



BUPATI GOWA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026**





BUPATI GOWA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar;

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Pembangunan Jangka Atas Rencana Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 461);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005– 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 15)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangkawaktu tertentu di Daerah.
8. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
13. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
19. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
23. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
24. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
25. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
26. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
27. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

28. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
29. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
30. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
31. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
32. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
33. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

34. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
35. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
36. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
37. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
38. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
39. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
40. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

41. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumberdaya pembangunan.
42. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
43. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
44. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
45. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
46. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
47. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

48. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
49. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
50. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
51. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
52. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

BAB II
RUANG LINGKUP RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJMD dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
 - a. visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan
 - b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan serta memperhatikan RPJMD Kabupaten/Kota sekitar.
- (3) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD meliputi:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;

- e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - i. BAB IX : Penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala BAPPEDA.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 25 Agustus 2021



BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 25 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2021 NOMOR 01
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
PROV.SULSEL B.HK.01.100.21

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-5
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-9
1.4. Maksud dan Tujuan	I-19
1.5. Sistematika Penulisan	I-20
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah Administrasi	II-1
2.1.1.1. Luas dan Batas wilayah Administrasi	II-1
2.1.1.2. Letak Dan Kondisi Geografis	II-2
2.1.1.3. Topografi	II-4
2.1.1.4. Geologi	II-6
2.1.1.5. Hidrologi.....	II-8
2.1.1.6. Klimatologi	II-8
2.1.2. Penggunaan Lahan	II-10
2.1.2.1. Kawasan Budidaya	II-10
2.1.2.2. Kawasan Peruntukan Pertambangan	II-15
2.1.2.3. Kawasan Peruntukan Industri.....	II-16
2.1.2.4. Kawasan Peruntukan Pariwisata	II-16
2.1.2.5. Kawasan Peruntukan Permukiman	II-17
2.1.2.6. Kawasan Peruntukan Lainnya.....	II-18
2.1.2.7. Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum ..	II-20
2.1.2.8. Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan Negara	II-21
2.1.2.9. Kawasan Lindung	II-21
2.1.3. Kawasan Rawan Bencana Alam.....	II-26
2.1.4. Demografi	II-29
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-33
2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-33
2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	II-33
2.2.1.2. Laju Inflasi	II-40
2.2.1.3. Indeks Gini.....	II-43
2.2.1.4. Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	II-45
2.2.1.5. Kemiskinan	II-46
2.2.1.6. Rasio Kesenjangan Kemiskinan	II-49

2.3.1.7. Proporsi Penduduk Dengan Pendapatan Kurang Dari USD 1,00 (PPP) Per Kapita Per Hari	II-50
2.2.2.Aspek Kesejahteraan Sosial	II-50
2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-50
2.2.2.2. Angka Melek Huruf	II-54
2.2.2.3. Angka Rata-rata Lama Sekolah	II-54
2.2.2.4. Angka Usia Harapan Hidup	II-55
2.2.2.5. Persentase Balita Gizi Buruk	II-56
2.2.2.6. Prevalensi Balita Gizi Kurang	II-56
2.2.2.7. Cakupan Desa Siaga Aktif	II-57
2.2.2.8. Angka Partisipasi Angkatan Kerja	II-57
2.2.2.9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II-58
2.2.2.10. Tingkat Pengangguran Terbuka	II-59
2.2.2.11. Rasio Penduduk yang Bekerja	II-60
2.2.2.12. Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja	II-60
2.2.2.13. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	II-61
2.2.2.14. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja	II-61
2.2.1.15. Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I ...	II-62
2.2.1.16. Indeks Kepuasan Masyarakat	II-63
2.2.1.17. Persentase PAD terhadap Pendapatan	II-64
2.2.1.18. Opini BPK	II-64
2.2.1.19. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	II-65
2.2.1.20. Penguatan Cadangan Pangan	II-66
2.2.1.21. Penanganan Daerah Rawan Pangan	II-66
2.2.1.22. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	II-67
2.2.1.23. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB	II-68
2.2.1.24. Produktivitas Sektor Pertanian	II-68
2.2.1.25. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	II-69
2.2.1.26. Produksi Sektor Perkebunan	II-69
2.2.1.27. Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB	II-70
2.2.1.28. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	II-71
2.2.1.29. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	II-71
2.2.1.30. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	II-72

2.2.1.31.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	II-73
2.2.1.32.	Pertumbuhan Industri	II-73
2.3.	Aspek Daya Saing Daerah.....	II-74
2.3.1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita .	II-74
2.3.2.	Nilai Tukar Petani.....	II-74
2.3.3.	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	II-75
2.3.4.	Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	II-75
2.3.5.	Angka Kriminalitas yang Tertangani.....	II-76
2.3.8.	Rasio Ketergantungan.....	II-77
2.4.	Aspek Pelayanan Umum.....	II-78
2.4.1.	Layanan Urusan Wajib Dasar	II-78
2.4.1.1.	Pendidikan	II-78
2.4.1.2.	Kesehatan	II-86
2.4.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang....	II-110
2.4.1.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-124
2.4.1.5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-130
2.4.1.6.	Sosial	II-133
2.4.2.	Layanan Urusan Wajib Non Dasar	II-139
2.4.2.1.	Tenaga Kerja.....	II-139
2.4.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-144
2.4.2.3.	Pangan.....	II-155
2.4.2.4.	Pertanahan.....	II-157
2.4.2.5.	Lingkungan Hidup	II-159
2.4.2.6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-170
2.4.2.7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-174
2.4.2.8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II-179
2.4.2.9.	Perhubungan.....	II-195
2.4.2.10.	Komunikasi dan Informatika	II-200
2.4.2.11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-202
2.4.2.12.	Penanaman Modal	II-205
2.4.2.13.	Kepemudaan dan Olah Raga	II-206
2.4.2.14.	Statistik.....	II-210
2.4.2.15.	Persandian	II-211
2.4.2.16.	Kebudayaan	II-211
2.4.2.17.	Perpustakaan	II-213
2.4.2.18.	Kearsipan	II-216
2.4.3.	Layanan Urusan Pilihan	II-217
2.4.3.1.	Pariwisata.....	II-217

2.4.3.2. Pertanian.....	II-218
2.4.3.3. Perdagangan.....	II-219
2.4.3.4. Perindustrian	II-220
2.4.3.5. Transmigrasi	II-220
2.4.3.6. Kelautan dan Perikanan.....	II-221
2.4.4. Penunjang Urusan.....	II-224
2.4.4.1. Perencanaan Pembangunan	II-224
2.4.4.2. Keuangan	II-227
2.4.4.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.....	II-232
2.4.4.4. Penelitian dan Pengembangan.....	II-234
2.4.4.5. Pengawasan.....	II-236
2.4.4.6. Sekretariat Dewan	II-237
2.5. Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020.....	II-238
2.6. Evaluasi Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Gowa	II-269
2.7. Pencapaian Sasaran Sustainable Development Goals (SDGs/TPB)	II-283

BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH III-1

3.1. Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu	III-4
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	III-4
3.1.1.1 Kinerja Pendapatan Daerah	III-10
3.1.1.2 Kinerja Belanja Daerah	III-54
3.1.1.3 Kinerja Pembiayaan	III-60
3.1.2. Neraca Daerah	III-62
3.1.2.1 Aset.....	III-67
3.1.2.2 Kewajiban.....	III-73
3.1.2.3 Ekuitas	III-75
3.1.2.4 Rasio Keuangan.....	III-75
3.2. Analisis Keuangan Daerah.....	III-81
3.2.1. Kapasitas Fiskal Daerah	III-81
3.2.2. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah.....	III-85
3.2.3. Kemandirian Daerah	III-87
3.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-89
3.3.1. Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-89
3.3.1.1 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran	III-89
3.3.1.2 Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Aparatur	III-91
3.3.1.3 Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan mengikat serta Prioritas Utama Rasio Keuangan	III-94
3.3.2. Analisis Pembiayaan.....	III-97
3.4. Kerangka Pendanaan.....	III-102

3.4.1. Asumsi Ekonomi, Sosial dan Fiskal.....	III-102
3.4.2. Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.....	III-107
3.4.2.1 Kebijakan dan Target Pendapatan Daerah .	III-107
3.4.2.2 Kebijakan dan Target Belanja Daerah.....	III-111
3.4.2.3 Kebijakan dan Target Pembiayaan Daerah .	III-113
3.4.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan	III-116
3.5. Dampak Pandemi Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020.....	III-121
3.6. Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah.....	III-124

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH IV-1

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	IV-1
4.1.1 Permasalahan Pembangunan untuk Penentuan Prioritas Daerah.....	IV-2
4.1.1.1 Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia.....	IV-2
4.1.1.2 Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi.....	IV-4
4.1.1.3 Ketimpangan Pendapatan Masyarakat.....	IV-6
4.1.1.4 Tingkat Pengangguran yang Masih Meningkat	IV-6
4.1.1.5 Masih Tingginya Tingkat Angka Kemiskinan	IV-7
4.1.2 Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah)	IV-13
4.1.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	IV-13
4.1.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	IV-15
4.1.2.3 Urusan Penunjang.....	IV-18
4.2 Isu Strategis.....	IV-19
4.2.1. Isu Strategis Internasional/Global	IV-19
4.2.1.1 Pandemi Covid-19.....	IV-19
4.2.1.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDG's)	IV-21
4.2.1.3 Perubahan Iklim	IV-23
4.2.1.4 Bonus Demografi	IV-24
4.2.1.5 Transformasi Digital	IV-25
4.2.2. Isu Strategis Nasional	IV-26
4.2.2.1 Standar Pelayanan Minimal	IV-26
4.2.3. Isu Strategis Pembangunan Daerah	IV-27
4.2.3.1 Mendekatkan Pelayanan Publik Bagi Seluruh Masyarakat	IV-27
4.2.3.2 Kualitas Infrastruktur Yang Menunjang Kegiatan Perekonomian	IV-28

4.2.3.3	Pemerataan Pendapatan Bagi Masyarakat Kabupaten Gowa	IV-29
4.2.3.4	Sumberdaya Manusia (SDM) yang Berkualitas	IV-29
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN		V-1
5.1.	VISI	V-1
5.2.	MISI.....	V-1
5.2.1	Misi I Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul dan Inklusif.....	V-3
5.2.2	Misi II Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal Dan Teknologi	V-3
5.2.3	Misi III Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Terintegrasi Dan Berwawasan Lingkungan.....	V-4
5.2.4	Misi IV Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif Melalui Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik Berkualitas	V-5
5.3	TUJUAN DAN SASARAN	V-7
5.3.1	Tujuan 1	V-8
5.3.2	Tujuan 2	V-11
5.3.3	Tujuan 3	V-14
5.3.4	Tujuan 4	V-16
5.4	Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan (Keterikatan terhadap RPJPD Kabupaten Gowa, RPJMD Sulawesi Selatan, dan RPJM Nasional)	V-21
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		VI-1
6.1	Strategi RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2022 - 2026	VI-1
6.2	Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2022 – 2026.....	VI-8
6.3	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Gowa	VI-17
6.4	Program Pembangunan Daerah	VI-21
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		V-1
7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah	V-1
7.2.	Program Perangkat Daerah.....	V-3
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-1		
8.1.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah	VIII-1
8.1.1.	Indikator Kinerja Makro.....	VIII-1
8.1.2.	Indikator Kinerja Utama	VIII-2

8.1.3. Indikator Kinerja Kunci	VIII-3
8.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal	VIII-19
8.3. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals Tpb/SDGs)	VIII-23

BAB IX PENUTUP..... IX-1

9.1. Pedoman Transisi.....	IX-1
9.2. Kaidah Pelaksanaan	IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Luas Wilayah Kabupaten Gowa Menurut Kecamatan.....	I-11
Tabel 1. 2	Keterkaitan antara RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026	I-12
Tabel 1. 3	Keterkaitan antara RPJPD 2005-2025 dengan RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026	I-13
Tabel 2. 1	Luas Wilayah Kabupaten Gowa Menurut Kecamatan.....	II-1
Tabel 2. 2	Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten	II-4
Tabel 2. 3	Luas Daerah Menurut Ketinggian Daerah per Kecamatan di.....	II-5
Tabel 2. 4	Kondisi Wilayah Kabupaten Gowa menurut Kecamatan...	II-5
Tabel 2. 5	Panjang Sungai Utama dan Luas Daerah Alirannya di Kabupaten Gowa Tahun 2020	II-8
Tabel 2. 6	Keadaan Iklim di Kabupaten Gowa Tahun 2020	II-9
Tabel 2. 7	Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Gowa Tahun 2020.....	II-10
Tabel 2. 8	Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Gowa	II-11
Tabel 2. 9	Lokasi Kawasan Tanaman Pertanian Pangan Kabupaten Gowa	II-12
Tabel 2. 10	Lokasi Kawasan Tanaman Perkebunan Kabupaten Gowa	II-13
Tabel 2. 11	Lokasi Kawasan Perikanan Darat Kabupaten Gowa.....	II-15
Tabel 2. 12	Kawasan Lindung Lainnya Di Kabupaten Gowa.....	II-22
Tabel 2. 13	Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa Menurut Kecamatan Tahun 2016 – 2020	II-29
Tabel 2. 14	Jumlah KK Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020	II-30
Tabel 2. 15	Kepadatan Penduduk Kabupaten Gowa Menurut Kecamatan Tahun 2016-2020.....	II-30
Tabel 2. 16	Sex Rasio Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2016- 2020	II-32
Tabel 2. 17	Komposisi Penduduk Kabupaten Gowa Menurut Kelompok Umur tahun 2019 dan 2020	II-32
Tabel 2. 18	Perkembangan PDRB Kabupaten Gowa Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2016-2020	II-34
Tabel 2. 19	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020* (%).	II-37
Tabel 2. 20	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-38
Tabel 2. 21	Perbandingan Nilai Inflasi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-41

Tabel 2. 22	Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Gowa Tahun 2015 – 2019.....	II-42
Tabel 2. 23	Perkembangan PDRB Perkapita ADHB Nasional, Provinsi dan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-43
Tabel 2. 24	Perbandingan Indeks Gini dan Tingkat Ketimpangan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020.....	II-44
Tabel 2. 25	Indeks Ketimpangan Williamson Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-46
Tabel 2. 26	Data Kemiskinan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 .	II-48
Tabel 2. 27	Penduduk Miskin Di Atas Garis Kemiskinan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 (%).....	II-48
Tabel 2. 28	Rasio Kesenjangan Kemiskinan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-49
Tabel 2. 29	Proporsi Penduduk Dengan Pendapatan Kurang Dari USD 1,00 PPP) Per Kapita Per Hari Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-50
Tabel 2. 30	Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-54
Tabel 2. 31	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-54
Tabel 2. 32	Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-55
Tabel 2. 33	Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-56
Tabel 2. 34	Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Gowa Tahun 2016–2020.....	II-57
Tabel 2. 35	Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Gowa Tahun 2016–2020.....	II-57
Tabel 2. 36	Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Gowa Tahun 2016–2020.....	II-58
Tabel 2. 37	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-59
Tabel 2. 38	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-59
Tabel 2. 39	Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-60
Tabel 2. 40	Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-60
Tabel 2. 41	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-61
Tabel 2. 42	Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-62

Tabel 2. 43	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2020.....	II-62
Tabel 2. 44	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-64
Tabel 2. 45	Persentase PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2020	II-64
Tabel 2. 46	Opini BPK Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-65
Tabel 2. 47	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-65
Tabel 2. 48	Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-66
Tabel 2. 49	Penanganan Daerah Rawan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-67
Tabel 2. 50	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-67
Tabel 2. 51	Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) terhadap PDRB Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-68
Tabel 2. 52	Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-68
Tabel 2. 53	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-69
Tabel 2. 54	Produksi Sektor Perkebunan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-69
Tabel 2. 55	Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-70
Tabel 2. 56	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-71
Tabel 2. 57	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-72
Tabel 2. 58	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-72
Tabel 2. 59	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-73
Tabel 2. 60	Pertumbuhan Industri Kabupaten Gowa Tahun 2015 – 2019.....	II-73
Tabel 2. 61	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-74
Tabel 2. 62	Nilai Tukar Petani Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 .	II-74
Tabel 2. 63	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-75
Tabel 2. 64	Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDB Kabupaten Gowa	II-75
Tabel 2. 65	Angka Kriminalitas yang Tertangani Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-76
Tabel 2. 66	Rasio Ketergantungan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-77

Tabel 2. 67	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-78
Tabel 2. 68	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-79
Tabel 2. 69	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-80
Tabel 2. 70	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-81
Tabel 2. 71	Angka Kelulusan (AL) SD/MI Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-82
Tabel 2.72	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-82
Tabel 2. 73	Ruang Kelas dalam Kondisi Bangunan Baik	II-83
Tabel 2. 74	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020..	II-84
Tabel 2. 75	Rasio Guru/Murid Sekolah semua jenjang pendidikan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-84
Tabel 2. 76	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-85
Tabel 2. 77	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-86
Tabel 2. 78	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup (Kasus) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-87
Tabel 2. 79	Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 kelahiran (Kasus) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-87
Tabel 2. 80	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup (kasus) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-88
Tabel 2. 81	Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup (Kasus) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-88
Tabel 2. 82	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup (Kasus) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-89
Tabel 2. 83	Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-90
Tabel 2. 84	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-90
Tabel 2. 85	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-91
Tabel 2. 86	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-91
Tabel 2. 87	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-92
Tabel 2. 88	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-92
Tabel 2. 89	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-93

Tabel 2. 90	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-94
Tabel 2. 91	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Gowa Tahun 2016– 2020	II-94
Tabel 2. 92	Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-95
Tabel 2. 93	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021.	II-96
Tabel 2. 94	Tingkat Prevelensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-96
Tabel 2. 95	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-97
Tabel 2. 96	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-97
Tabel 2. 97	Penderita Diare yang Ditangani Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-98
Tabel 2. 98	Angka Kejadian Malaria Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-99
Tabel 2. 99	Prevelensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-100
Tabel 2. 100	Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Terakhir Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-101
Tabel 2. 101	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-102
Tabel 2. 102	Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-103
Tabel 2. 103	Cakupan Puskesmas Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-104
Tabel 2. 104	Cakupan Puskesmas Pembantu Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-104
Tabel 2. 105	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-105
Tabel 2. 106	Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-106
Tabel 2. 107	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang ditangani Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-107
Tabel 2. 108	Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Gowa	II-108
Tabel 2. 109	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-109
Tabel 2. 110	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-109

Tabel 2. 111	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-110
Tabel 2. 112	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-111
Tabel 2. 113	Persentase Kawasan Permukiman Yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-112
Tabel 2. 114	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 km/jam) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-112
Tabel 2. 115	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 m) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-113
Tabel 2. 116	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-114
Tabel 2. 117	Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-114
Tabel 2. 118	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021.....	II-115
Tabel 2. 119	Tidak Terjadi Genangan >2 Kali Setahun Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-116
Tabel 2. 120	Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-116
Tabel 2. 121	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-117
Tabel 2. 122	Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-117
Tabel 2. 123	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-118
Tabel 2. 124	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-119
Tabel 2. 125	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-120
Tabel 2. 126	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-120
Tabel 2. 127	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-121
Tabel 2. 128	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber-HPL/HGB.....	II-121
Tabel 2. 129	Luasan RTH Publik Seputar 20% Dari Luas Wilayah Kota Kawasan Perkotaan Kabupaten Gowa Tahun 2016–2020.....	II-122
Tabel 2. 130	Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan Bangunan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021	II-123

Tabel 2. 131 Rasio Ruang Publik yang berubah peruntukannya	II-123
Tabel 2. 132 Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-124
Tabel 2. 133 Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-124
Tabel 2. 134 Rasio Permukiman Layak Huni Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-125
Tabel 2. 135 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-125
Tabel 2. 136 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-126
Tabel 2. 137 Persentase Permukiman yang Tertata Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-127
Tabel 2. 138 Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-127
Tabel 2. 139 Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-128
Tabel 2. 140 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-129
Tabel 2. 141 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-130
Tabel 2. 142 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-130
Tabel 2. 143 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-131
Tabel 2. 144 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-132
Tabel 2. 145 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-132
Tabel 2. 146 Persentase Penegakan PERDA Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-133
Tabel 2. 147 Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-134
Tabel 2. 148 Persentase PMKS Yang Tertangani Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-134
Tabel 2. 149 Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-135
Tabel 2. 150 Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-136
Tabel 2. 151 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana	

	Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-136
Tabel 2. 152	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-137
Tabel 2. 153	Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-138
Tabel 2. 154	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-139
Tabel 2. 155	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-139
Tabel 2. 156	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-140
Tabel 2. 157	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-141
Tabel 2. 158	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-142
Tabel 2. 159	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-143
Tabel 2. 160	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-143
Tabel 2. 161	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-144
Tabel 2. 162	Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR	II-145
Tabel 2. 163	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-145
Tabel 2. 164	Rasio KDRT Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-146
Tabel 2. 165	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-147
Tabel 2. 166	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-148
Tabel 2. 167	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-149
Tabel 2. 168	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit	

	Pelayanan Terpadu Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-150
Tabel 2. 169	Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-151
Tabel 2. 170	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-151
Tabel 2. 171	Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-152
Tabel 2. 172	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-153
Tabel 2. 173	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD	II-153
Tabel 2. 174	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-154
Tabel 2. 175	Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-155
Tabel 2. 176	Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-155
Tabel 2. 177	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-156
Tabel 2. 178	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-157
Tabel 2. 179	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-158
Tabel 2. 180	Penyelesaian Kasus Tanah Negara Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-158
Tabel 2. 181	Penyelesaian Izin Lokasi Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-159
Tabel 2. 182	Terselenggaranya KLHS Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-160
Tabel 2. 183	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-162
Tabel 2. 184	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-163
Tabel 2. 185	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-163
Tabel 2. 186	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-164

Tabel 2. 187	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-165
Tabel 2. 188	Terverifikasinya Hak Kearifan Lokal atau Hak Pengetahuan Tradisional Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-166
Tabel 2. 189	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-166
Tabel 2. 190	Pengaduan Masyarakat Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-167
Tabel 2. 191	Timbulan Sampah Yang Ditangani Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-168
Tabel 2. 192	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-168
Tabel 2. 193	Persentase Cakupan Area Pelayanan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-169
Tabel 2. 194	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-169
Tabel 2. 195	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-170
Tabel 2. 196	Rasio Bayi Berakte Kelahiran Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-171
Tabel 2. 197	Rasio Pasangan Berakte Nikah Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-171
Tabel 2. 198	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-173
Tabel 2. 199	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-173
Tabel 2. 200	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-174
Tabel 2. 201	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020....	II-174
Tabel 2. 202	Kelompok Binaan LPM Kabupaten Gowa Tahun 2016– 2020	II-175
Tabel 2. 203	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-176
Tabel 2. 204	Pesentase LSM Aktif Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-176
Tabel 2. 205	Persentase LPM Berprestasi Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-177
Tabel 2. 206	Persentase PKK Aktif Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-178
Tabel 2. 207	Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-178
Tabel 2. 208	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-179

Tabel 2. 209	Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-180
Tabel 2. 210	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-181
Tabel 2. 211	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-182
Tabel 2. 212	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-182
Tabel 2. 213	Rasio Akseptor KB Kabupaten Gowa Tahun 2016–2020.....	II-183
Tabel 2. 214	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-184
Tabel 2. 215	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun Kabupaten Gowa Tahun 2015 – 2019	II-185
Tabel 2. 216	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 tahun Kabupaten Gowa Tahun 2015 – 2019.....	II-185
Tabel 2. 217	Cakupan PUS Yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-186
Tabel 2. 218	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-187
Tabel 2. 219	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-187
Tabel 2. 220	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-188
Tabel 2. 221	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB ...	II-188
Tabel 2. 222	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-189
Tabel 2. 223	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-190
Tabel 2. 224	Cakupan PKB/PKLB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-191
Tabel 2. 225	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-191
Tabel 2. 226	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-192

Tabel 2. 227	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-193
Tabel 2. 228	Persentase Faskes dan Jejaringnya yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-193
Tabel 2. 229	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-194
Tabel 2. 230	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-195
Tabel 2. 231	Rasio Ijin Trayek Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 ...	II-196
Tabel 2. 232	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kabupaten Gowa Tahun.....	II-197
Tabel 2. 233	Persentase Layanan Angkutan Darat Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-198
Tabel 2. 234	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-198
Tabel 2. 235	Pemasangan Rambu-Rambu Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-199
Tabel 2. 236	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-199
Tabel 2. 237	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-200
Tabel 2. 238	Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-201
Tabel 2. 239	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-201
Tabel 2. 240	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-202
Tabel 2. 241	Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-203
Tabel 2. 242	Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-203
Tabel 2. 243	Persentase BPR/LKM Aktif Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-204
Tabel 2. 244	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-204
Tabel 2. 245	Jumlah Investor Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 ...	II-205
Tabel 2. 246	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-205

Tabel 2. 247	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021.....	II-206
Tabel 2. 248	Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-207
Tabel 2. 249	Cakupan Pembinaan Olah Raga Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-207
Tabel 2. 250	Pelatih yang Bersertifikat Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-208
Tabel 2. 251	Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-208
Tabel 2. 252	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-209
Tabel 2. 253	Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-209
Tabel 2. 254	Buku Kabupaten Dalam Angka Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-210
Tabel 2. 255	Buku PDRB Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-210
Tabel 2. 256	Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-211
Tabel 2. 257	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-212
Tabel 2. 258	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-212
Tabel 2. 259	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-213
Tabel 2. 260	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-213
Tabel 2. 261	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-214
Tabel 2. 262	Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021	II-214
Tabel 2. 263	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-215
Tabel 2. 264	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-215
Tabel 2. 265	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-215
Tabel 2. 266	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-216
Tabel 2. 267	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Gowa Tahun 2015 – 2019.....	II-217
Tabel 2. 268	Kunjungan Wisata Kabupaten Gowa Tahun 2016– 2020	II-217
Tabel 2. 269	Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-218

Tabel 2. 270	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar	II-218
Tabel 2. 271	Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Gowa Tahun 2015 – 2019	II-219
Tabel 2. 272	Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-219
Tabel 2. 273	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-220
Tabel 2. 274	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-220
Tabel 2. 275	Produksi Perikanan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-221
Tabel 2. 276	Konsumsi Ikan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-222
Tabel 2. 277	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-222
Tabel 2. 278	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-223
Tabel 2. 279	Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam Batasan Biologis yg Aman Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020...	II-223
Tabel 2. 280	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-225
Tabel 2. 281	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-226
Tabel 2. 282	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-226
Tabel 2. 283	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-227
Tabel 2. 284	Persentase SiLPA Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 ..	II-227
Tabel 2. 285	Persentase Program yang tidak Terlaksana di Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-228
Tabel 2. 286	Persentase Kegiatan Yang Tidak Terlaksana Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-228
Tabel 2. 287	Persentase Belanja Pendidikan (20%) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-229
Tabel 2. 288	Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-229
Tabel 2. 289	Persentase Belanja Langsung Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-230
Tabel 2. 290	Persentase Belanja Tidak Langsung Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-230
Tabel 2. 291	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-231
Tabel 2. 292	Penetapan APBD Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 ...	II-231
Tabel 2. 293	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020...	II-232

Tabel 2. 294	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-232
Tabel 2. 295	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-233
Tabel 2. 296	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-233
Tabel 2. 297	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-234
Tabel 2. 298	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-235
Tabel 2. 299	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-235
Tabel 2. 300	Persentase Tindak Lanjut Temuan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-236
Tabel 2. 301	Persentase Pelanggaran Pegawai Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-236
Tabel 2. 302	Jumlah Temuan BPK Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-237
Tabel 2. 303	Integrasi Program DPRD dalam Pelaksanaan Tupoksi Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021	II-237
Tabel 2. 304	Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020	II-239
Tabel 2. 305	Capaian SPM Kabupaten Gowa Tahun 2017-2018	II-270
Tabel 2. 306	Capaian SPM Kabupaten Gowa Tahun 2019 – 2020	II-278
Tabel 2. 307	Tingkat Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	II-283
Tabel 2. 308	Capaian Target Indikator SDGs/TPB Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020	II-287
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016- 2020.....	III-7
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Tahun 2016-2020 Kabupaten Gowa.....	III-11
Tabel 3.3	Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2016 - 2020	III-14
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun Tahun 2016-2020	III-15
Tabel 3.5	Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kab. Gowa Tahun 2016-2020	III-17
Tabel 3.6	Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Pajak Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2020 Kabupaten Gowa.....	III-20
Tabel 3. 7	Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Retribusi Daerah Tahun 2016-2020 Kabupaten Gowa.....	III-30

Tabel 3.8	Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020.....	III-34
Tabel 3.9	Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Gowa Tahun Tahun 2016-2020	III-36
Tabel 3.10	Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Dana Perimbangan Kab. Gowa Tahun Tahun 2016-2020.....	III-38
Tabel 3.11	Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Kab. Gowa Tahun 2016-2020	III-43
Tabel 3.12	Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Dana Alokasi Khusus Kab. Gowa Tahun 2016- 2020.....	III-49
Tabel 3.13	Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Gowa Tahun Tahun 2016-2020	III-53
Tabel 3.14	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun Tahun 2016-2020 Kabupaten Gowa.....	III-55
Tabel 3.15	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Tahun 2016-2020	III-57
Tabel 3.16	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020.....	III-61
Tabel 3.17	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2016-2020 Kabupaten Gowa.....	III-64
Tabel 3.18	Perkembangan Rasio Likuiditas Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020	III-76
Tabel 3.19	Perkembangan Rasio Solvabilitas Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020	III-78
Tabel 3.20	Perkembangan Rasio Aktivitas Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020	III-80
Tabel 3.21	Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020	III-83
Tabel 3.22	Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020	III-86
Tabel 3.23	Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020	III-88
Tabel 3.24	Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Tahun 2016 s/d Tahun 2020 Kabupaten Gowa.....	III-90
Tabel 3.25	Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020	III-92
Tabel 3.26	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020	III-94
Tabel 3.27	Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020.....	III-95

Tabel 3.28	Defisit Riil Anggaran Tahun 2016-2020 Kabupaten Gowa	III-98
Tabel 3.29	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020	III-99
Tabel 3.30	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2016-2020 Kabupaten Gowa	III-100
Tabel 3.31	Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Tahun 2016-2020	III-101
Tabel 3.32	Asumsi Capaian Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Gowa Tahun 2020-2026.....	III-104
Tabel 3.33	Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026	III-105
Tabel 3.34	Target Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026	III-110
Tabel 3.35	Target Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.....	III-112
Tabel 3.36	Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026	III-115
Tabel 3.37	Proyeksi Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026	III-119
Tabel 3.38	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026	III-120
Tabel 4.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa	IV-8
Tabel 4.2	Tingkat Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	IV-22
Tabel 5.1	Penjelasan Pokok Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa 2021-2026.....	V-1
Tabel 5.2	Keselarasan Misi pada RPJPD Kabupaten Gowa dengan Misi RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026	V-7
Tabel 5.3	Tujuan 1 dari Misi Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat yang Inklusif	V-8
Tabel 5.4	Tujuan 1 dari Misi Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi	V-11
Tabel 5.5	Tujuan 3 dari Misi 3 Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan ...	V-14
Tabel 5.6	Tujuan 3 dari Misi 4 Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas	V-16
Tabel 5.7	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026	V-19
Tabel 5.8	Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dengan RPJM Nasional Tahun 2020-2024	V-21

Tabel 5.9	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dan Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023	V-22
Tabel 5.10	Keterkaitan RPJM Nasional Tahun 2020-2024 , RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026	V-23
Tabel 5.11	Keterkaitan Sasaran Dokumen RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2015-2025 dan RPJMD Kabupaten Gowa.....	V-23
Tabel 5.9	Tujuan 3 dari Misi 4 Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.....	V-19
Tabel 5.10	Kerangka Logis Pencapaian Tujuan	V-21
Tabel 5.11	Isi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026	V-23
Tabel 5.12	Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dengan RPJM Nasional Tahun 2020-2024Tabel 5.4	V-27
Tabel 5.13	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dan Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023	V-28
Tabel 5.14	Keterkaitan Dokumen RPJM Nasional Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026	V-29
Tabel 5.15	Keterkaitan Sasaran Dokumen RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2015-2025 dan RPJMD Kabupaten Gowa.....	V-30
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Gowa	VI-5
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gowa	VI-13
Tabel 6.3	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu indikatif Kabupaten Gowa	VI-24
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 – 2026 Kabupaten Gowa	VII-2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kab. Gowa.....	VII-4
Tabel 8.1	Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Gowa Tahun 2022 – 2026.....	VIII-1
Tabel 8.2	Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gowa Tahun 2022 – 2026.....	VIII-2
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Gowa.....	VIII-4
Tabel 8.4	Target Indikator SPM Kabupaten Gowa Tahun 2022 – 2026.....	VIII-19
Tabel 8.5	Penetapan Indikator TPB/SDGs Kabupaten Gowa.....	VIII-23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2	Bagan Alir Hubungan RPJMD dan Renstra PD	II-18
Gambar 1.3	Bagan Alir Hubungan Antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah.....	II-18
Gambar 2. 1	Peta Administrasi Kabupaten Gowa	II-1
Gambar 5. 1	Proses Bisnis Pencapaian Visi dan Misi.....	V-2
Gambar 5. 2	Kerangka Logis Perencanaan Terintegrasi Misi 1	V-3
Gambar 5. 3	Kerangka Logis Perencanaan Terintegrasi Misi 2	V-4
Gambar 5. 4	Kerangka Logis Perencanaan Terintegrasi Misi 3	V-4
Gambar 5. 5	Kerangka Logis Perencanaan Terintegrasi Misi 4	V-5
Gambar 5. 6	Pilar Pembangunan Kabupaten Gowa	V-6
Gambar 5. 7	Kerangka Logis Pencapaian Tujuan 1.....	V-10
Gambar 5. 8	Kerangka Logis Pencapaian Tujuan 2.....	V-13
Gambar 5. 9	Kerangka Logis Pencapaian Tujuan 3.....	V-15
Gambar 5.10	Kerangka Logis Pencapaian Tujuan 4.....	V-17
Gambar 6. 1	Tema Pembangunan 2021-2026	VI-16

DAFTAR GRAFIK

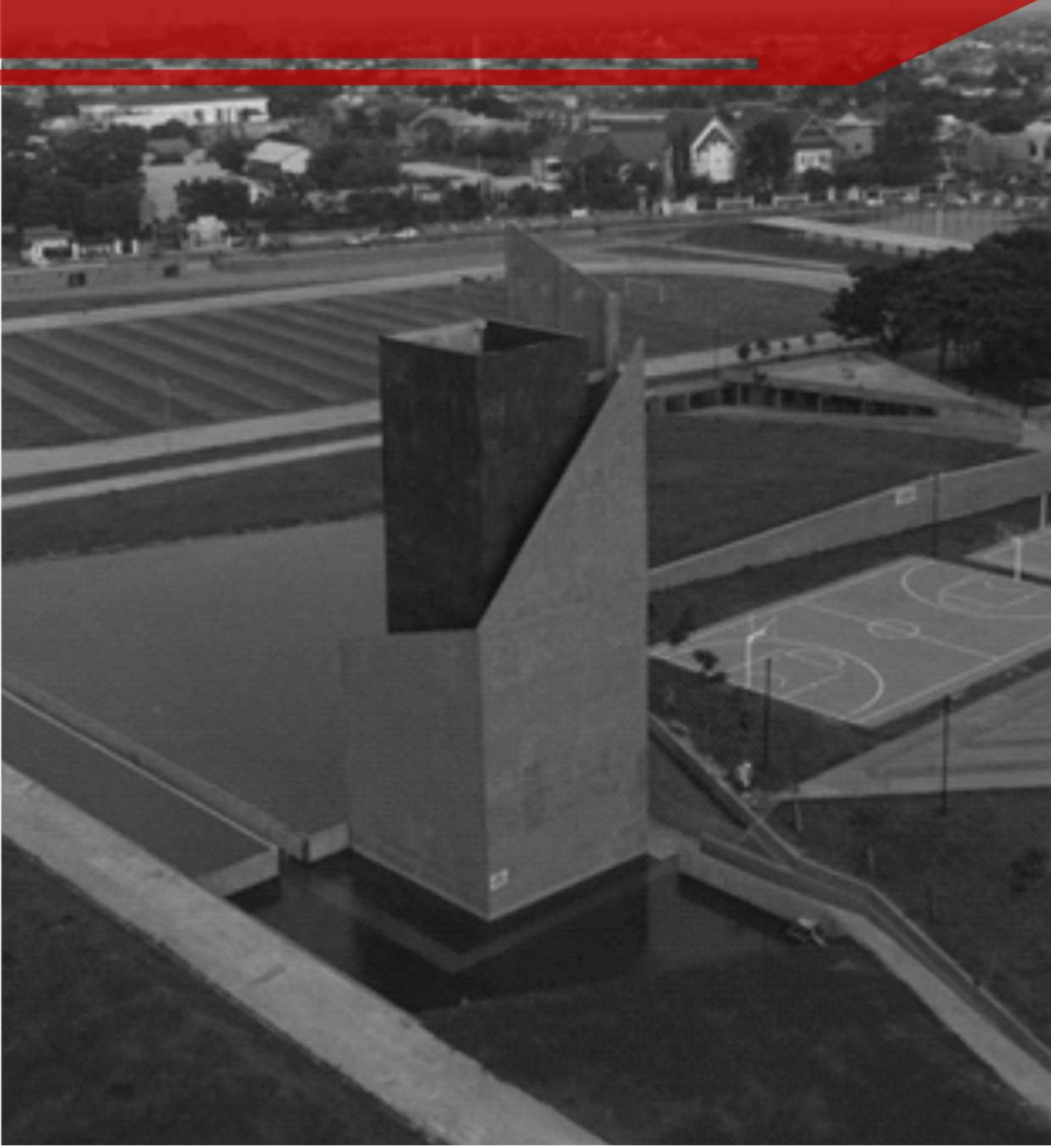
Grafik 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-39
Grafik 2.2	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2020	II-40
Grafik 2.3	Perbandingan Perkembangan Indeks Gini Nasional, Propinsi dan Kabupaten Gowa Tahun 2016–2020	II-44
Grafik 2.4	Indeks Keparahan dan Indeks Kedalaman Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-47
Grafik 2.5	Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Nasional, Provinsi dan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-49
Grafik 2.6	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-51
Grafik 2.7	Perbandingan Umur Harapan Hidup (Tahun) Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-51
Grafik 2.8	Perbandingan Harapan Lama Sekolah (Tahun) Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-52
Grafik 2.9	Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-53
Grafik 2.10	Perbandingan Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rp) Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020.....	II-53
Grafik 2.4	Perbandingan PDRB Perkapita Menurut ADHB 2010 Nasional, Provinsi dan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	II-47
Grafik 3.1	Perkembangan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2016-2020	III-13
Grafik 3.2	Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020	III-14
Grafik 3.3	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020	III-15
Grafik 3.4	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kab. Gowa Tahun 2016-2020	III-17
Grafik 3.5	Rata-rata Proporsi Realisasi KomponenPendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020	III-18
Grafik 3.6	Perkembangan Pajak Daerah Kab. Gowa Tahun 2016-2020	III-19

Grafik 3.7	Postur Pajak Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020 (dalam Juta)	III-21
Grafik 3.8	Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020	III-22
Grafik 3.9	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020.....	III-22
Grafik 3.10	Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020.....	III-23
Grafik 3.11	Realisasi Pajak Air Tanah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020	III-24
Grafik 3.12	Realisasi Pajak Parkir Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020	III-25
Grafik 3.13	Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020	III-25
Grafik 3.14	Realisasi Pajak Hiburan Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020	III-26
Grafik 3.15	Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020	III-27
Grafik 3.16	Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020	III-28
Grafik 3.17	Perkembangan Retribusi Daerah Kab. Gowa Tahun 2016-2020	III-29
Grafik 3. 18	Postur Retribusi Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020	III-32
Grafik 3.19	Perkembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kab. Gowa Tahun 2016-2020.....	III-33
Grafik 3.20	Postur Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020	III-33
Grafik 3.21	Perkembangan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020.....	III-35
Grafik 3.22	Postur Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kab. Gowa Tahun 2016-2020	III-37
Grafik 3.23	Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020	III-38
Grafik 3.24	Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Dana Perimbangan Kab. Gowa Tahun 2016-2020	III-39
Grafik 3.25	Perkembangan Dana Bagi Hasil Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020	III-40
Grafik 3.26	Postur Dana Bagi Hasil Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020	III-40
Grafik 3.27	Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020	III-41
Grafik 3.28	Postur Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020	III-42
Grafik 3.29	Perkembangan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020.....	III-44

Grafik 3.30	Postur Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020	III-45
Grafik 3.31	Perkembangan Dana Alokasi Umum Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020	III-46
Grafik 3.32	Perkembangan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020	III-47
Grafik 3.33	Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kab. Gowa Tahun 2016-2020	III-52
Grafik 3.34	Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020	III-53
Grafik 3.35	Kinerja Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	III-56
Grafik 3.36	Proporsi Realisasi Belanja Daerah.....	III-58
Grafik 3.37	Proporsi Realisasi Komponen Belanja Langsung Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020	III-59

BAB I

PENDAHULUAN



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 1
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2021-2026.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan usaha yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan melalui pembangunan sumber daya manusia, peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki daerah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah dibutuhkan suatu perencanaan pembangunan yang cermat dan komprehensif serta koheren dengan pembangunan nasional yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat bagi masyarakat umum dan masyarakat Kabupaten Gowa secara khusus.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses menentukan tindakan dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan tetap mempertimbangkan Visi, Misi dan arah kenijakan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025

Pada Pasal 260 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) pada

Tahun 2020 telah menetapkan Bapak **Adnan Purichta Ichsan, SH.,MH** sebagai **Bupati Gowa** dan Bapak **H. Abd. Rauf Malaganni, S.Sos.,M.Si** sebagai **Wakil Bupati Gowa** periode 2021-2024, karena itu Pemerintah Kabupaten Gowa perlu segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Mengenai Periodisasi RPJMD hasil Pilkada serentak tahun 2020 didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pasca Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 dimana berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga periodisasi RPJMD untuk pilkada serentak tahun 2020 adalah 2021-2026.

Penyusunan RPJMD 2021-2026 didasarkan hasil capaian RPJMD Kabupaten Gowa 2016-2021 dengan capaian kinerja ekonomi makro pada pelaksanaan RPJMD di tahun 2020. Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa hanya mencapai 1,76 persen. Hal tersebut disebabkan karena pandemi Covid 19 yang melanda Kabupaten Gowa. Kemudian, PDRB per kapita Kabupaten Gowa meningkat dari Rp 15,47 Juta di tahun 2016 menjadi Rp 21,53 juta di tahun 2020, walaupun demikian besaran PDRB per kapita Kabupaten Gowa ini tahun 2020 lebih rendah bila dibandingkan dengan PDRB per kapita Sulawesi Selatan Rp. 56,51 Juta.

Masalah ketimpangan pendapatan memang bukan isu yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat yang tercermin dari nilai indeks gini Kabupaten Gowa tahun 2016 sebesar 0,34 meningkat menjadi 0,35 ditahun 2019 walaupun masih berada pada kategori kesenjangan yang sedang dan lebih rendah dari gini rasio provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,40 berada pada ketimpangan kategori tinggi.

Tingkat pengangguran daerah yang diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gowa pada tahun 2020 sebesar 6,44 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar 4,35 persen dengan persentase angkatan kerja perempuan yang menganggur lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Isu kemiskinan di Kabupaten Gowa juga menjadi perhatian dalam Pembangunan Kabupaten Gowa 5 tahun mendatang (2021-2026) karena jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gowa pada tahun 2020 sekitar 7,38 persen, masih cukup tinggi apabila dibanding dengan persentase penduduk miskin Kota Makassar sebesar 4,54 persen.

Capaian IPM Kabupaten Gowa tahun 2016 sebesar 67,70 berada pada kategori menengah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga di tahun 2020 sebesar 70,43 berada pada kategori tinggi. Meskipun terjadi peningkatan setiap tahunnya namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan IPM Sulawesi Selatan sebesar 71,93. Capaian IPM Kabupaten Gowa ini secara relatif di tahun 2016 berada di urutan 13 dari 23 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan meningkat di tahun 2020 di urutan ke-9.

RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 juga telah memperhatikan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Berdasarkan hasil evaluasi capaian SDGs tahun 2020, jumlah Indikator yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gowa adalah 201 Indikator Kewenangan Kabupaten Gowa dan Pemerintah Kabupaten Gowa telah melaksanakan 139 Indikator TPB / SDGs. Berdasarkan persentase capaian SDGs pada tahun 2020 pada 17 tujuan SDGs, sebanyak 40,80 persen telah tercapai, 28,36 persen belum mencapai target, tidak tercapai target sebanyak 3,98 persen dan sebanyak 26,87 % tidak ada data.

RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif serta disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam kurun waktu paling lama 6 bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Selain memperhatikan visi dan misi kepala daerah terpilih, RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 juga telah mempertimbangkan visi, misi dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 yang telah memasuki tahap terakhir dari RPJPD dimaksud dan memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

RPJMD Kabupaten Gowa disusun oleh Pemerintah Kabupaten Gowa dengan melibatkan seluruh stakeholder serta para pemangku kepentingan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan RPJMD berdasarkan pendekatan perencanaan pembangunan meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*).

Tahapan penyusunan RPJMD dimulai dengan Penyusunan rancangan awal RPJMD sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Penyusunan rancangan awal RPJMD mencakup penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD, penjabaran visi dan misi Kepala Daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan Daerah, perumusan program Perangkat Daerah, dan KLHS. Kemudian rancangan awal RPJMD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik dan kepada DPRD untuk memperoleh kesepakatan. Setelah dilakukan konsultasi, kemudian dilaksanakan Musrenbang RPJMD yang bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. Setelah dilakukan rancangan akhir, Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik.

Dokumen RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD ini selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen rencana tahunan.

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dilandasi pada beberapa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang - Undang No. 39 tahun 2009 Tentang Kawasan

- Ekonomi Khusus (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Caca Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402)

19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633)
20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden No. 56 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
23. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reformasi Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327)
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), selain itu Kemendagri juga telah melakukan koordinasi terhadap cadangan pangan pemerintah daerah kepada daerah yang mempunyai potensi padi. Hal ini juga merupakan upaya dalam pengendalian inflasi daerah;

39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009);
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028;
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005–2025;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032.
47. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

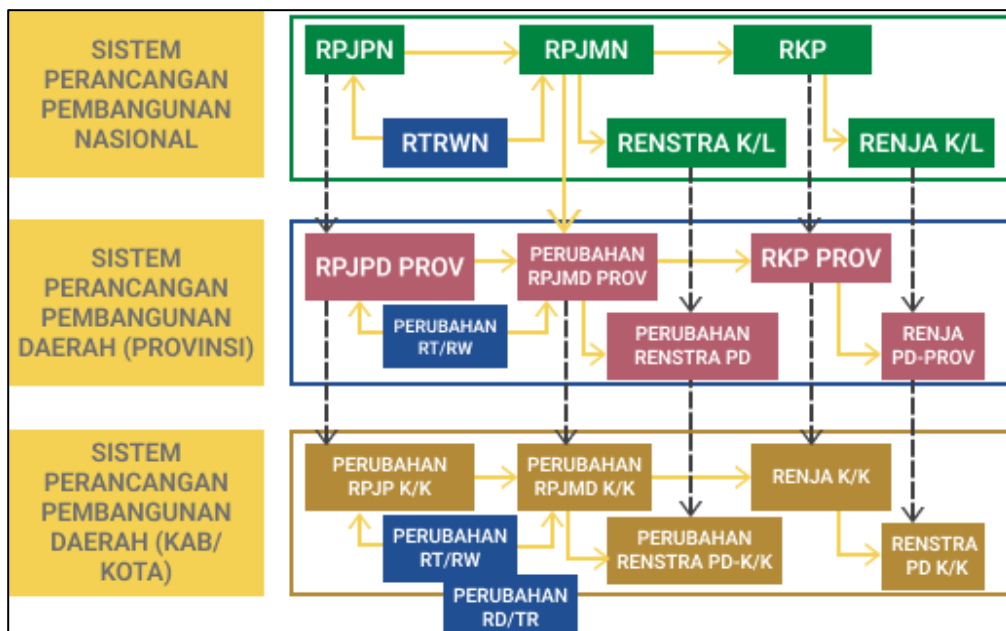
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan penyusunan RPJPD, RPJMD termasuk Perubahan RPJMD, dan RKPD.

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah.

Keterkaitan dokumen RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan dan anggaran lainnya secara vertikal mencakup Dokumen RPJMD Kabupaten Gowa berpedoman pada Perubahan RPJMD provinsi Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Kemudian keterkaitan secara horizontal mencakup Dokumen RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dengan dokumen RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa

RPJMD tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan akan dipedomani dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Untuk lebih jelasnya hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar atau skema berikut ini:



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah

Gambar 1. 1 Skema Hubungan Antar Dokumen

Tabel 1. 1
Keterkaitan antara RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026

RPJMD KABUPATEN GOWA TAHUN 2021-2026	RPJMD PROV. SULSEL TAHUN 2018-2023
VISI	
<p>TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK</p>	<p>SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF, DAN BERKARAKTER</p>
MISI	
<p>1 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.</p>	<p>4 Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter.</p>
<p>2 Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.</p>	<p>3 Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif.</p> <p>5 Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan.</p>
<p>3 Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan</p>	<p>2 Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel.</p>
<p>4 Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.</p>	<p>1 Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif.</p>

Tabel 1. 2
Keterkaitan antara RPJMN Tahun 2020-2024 dengan RPJMD
Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026

RPJMD KABUPATEN GOWA TAHUN 2021-2026	RPJM NASIONAL TAHUN 2020-2024
VISI	
TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK	INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
MISI	
1 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.	1 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
	5 Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
2 Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.	2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
	7 Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
3 Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.	3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
	4 Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
4 Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.	8 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
	6 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
	9 Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Tabel 1. 3
Keterkaitan antara RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025
dengan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026

Misi RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025	Misi RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026
MISI	
<p>1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak dasar, kesetaraan gender, nilai budaya dan agama.</p>	<p>1 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.</p>
<p>2 Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan.</p>	<p>2 Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi</p>
<p>3 Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada interkoneksi antar wilayah dan sektor.</p>	<p>3 Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan</p>
<p>4 Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan</p>	
<p>5 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis.</p>	<p>4 Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.</p>

Berikut ini digambarkan hubungan antara RPJMD Kabupaten Gowa dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Gowa dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan untuk mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RTRW. Olehnya itu, diperlukan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJMD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, yang meliputi menelaah rencana struktur ruang, menelaah rencana pola ruang, dan menelaah indikasi program pemanfaatan ruang.

2. RPJMD Kabupaten Gowa dengan RPJPD Tahun 2005-2025

Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD, mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan dalam RPJPD. Penelaahan pada sasaran pokok RPJPD dan tingkat capaian kinerja sampai dengan periode penyusunan RPJMD

3. RPJMD Kabupaten Gowa dengan RPJMN Tahun 2021-2026

RPJMN menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Gowa dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD. Berdasarkan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, bahwa tema RPJMN 2021-2016 adalah “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan” dengan agenda pembangunan yaitu : 1). Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, 2). Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, 3). Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa, 4). Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, 5). Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan

Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, 6). Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, 7). Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Hasil Analisa pada hubungan antara RPJMD Kabupaten Gowa dengan RPJMN menunjukkan bahwa telah terdapat keselarasan, meliputi keselarasan agenda pembangunan.

4. RPJMD Kabupaten Gowa dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018–2023 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2018, dimana ditetapkan visinya yaitu “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 5 (lima) misi yaitu : 1) Pemerintah yang berorientasi melayani, inovatif dan berkarakter; 2) Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan akselibel; 3) Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif; 4) Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif; 5) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan;

5. RPJMD Kabupaten Gowa RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009–2029 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009, dengan arahan Arahan Pengembangan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang cukup terkait dengan Kabupaten Gowa adalah kawasan pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan, dan perdagangan.

6. RPJMD Kabupaten Gowa dengan RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025

RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan tahap keempat dan terakhir dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2005–2025 sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor Tahun

agar tercipta keselarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. Dalam sasaran pokok sebagaimana tercantum dalam RPJPD Kabupaten Gowa dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan periode 5 (lima) tahun berkenaan yaitu 2021-2024.

7. RPJMD Kabupaten Gowa dengan Renstra Perangkat Daerah

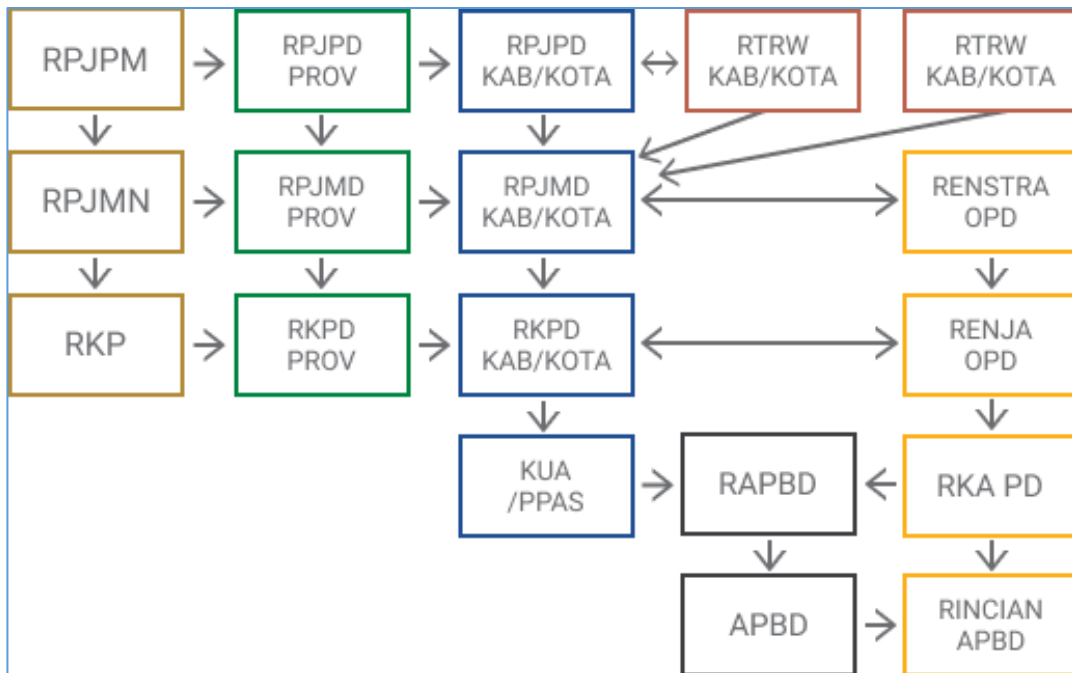
Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 pada Pasal 109 ayat (2), menyebutkan bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah (PD) dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD. RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap PD dibawah koordinasi Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa.

Tujuan, strategi dan kebijakan dalam Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsinya dirumuskan dalam rangka mewujudkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD melalui pencapaian sasaran program yang ditetapkan. Perumusan rancangan Renstra PD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan RPJMD. Penyusunan rancangan akhir Renstra PD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra PD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra PD tersebut bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

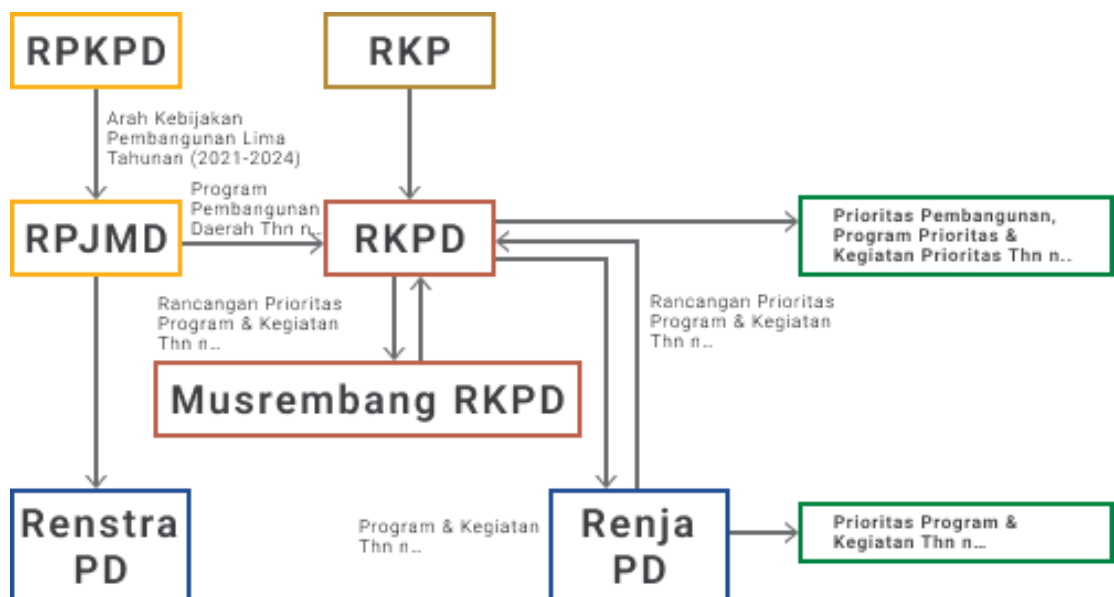
Untuk lebih jelasnya mengenai hubungan antara RPJMD Kabupaten Gowa dengan Renstra PD dapat dilihat pada gambar berikut ini.

8. RPJMD Kabupaten Gowa dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Gowa yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kabupaten Gowa yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa / kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gowa, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJM Nasional, hal ini dimaksudkan agar prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD. Untuk lebih jelasnya mengenai bagan alir hubungan antara penyusunan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1. 2
Bagan Alir Hubungan RPJMD dengan Renstra PD



Gambar 1. 3
Bagan Alir Hubungan Antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021–2026 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 dan menerjemahkan visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun melalui penetapan program serta kegiatan kegiatan prioritas daerah.

RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra OPD;
- 2) Sebagai pedoman dalam penyusunan RENJA SKPD perencanaan daerah untuk satu tahun;
- 3) Menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Rencanan Kegiatan Anggaran OPD;
- 4) Sebagai pedoman Tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa;
- 5) Menjadi instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah.
- 6) Menjadi pedoman bagi OPD se-Kabupaten Gowa dalam penyusunan RENJA OPD;
- 7) Menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pengalokasian anggaran pembangunan di Kabupaten Gowa berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan;
- 8) Sebagai pedoman bagi stakeholder khususnya dalam pencapaian target kinerja program prioritas serta dukungan pendanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN; Bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJMD yang berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan RPJMD, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD serta sistematika penulisan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan aspek-aspek tersebut. Gambaran kondisi umum daerah dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian pada tahap perumusan berupa informasi yang relevan dan penting yang menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH; Menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, meliputi: kinerja keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan, dan kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH; Bab ini menguraikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang menjadi dasar utama dalam penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah, yang menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Kabupaten Gowa dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN; Menguraikan tentang visi dan misi kepala daerah terpilih, serta perumusan tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH; Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan-pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Rumusan arah kebijakan dan program pembangunan akan menggambarkan keterkaitan antar bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH; Bab ini menguraikan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa selama 5 (lima) tahun, baik yang bersifat program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pemenuhan kebutuhan operasional yang disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; Bab ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati Gowa Tahun 2021-2026 dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing daerah melalui indikator kinerja daerah.

BAB IX PENUTUP ; Bab ini menguraikan gambaran kaidah pelaksanaan dan harapan pencapaian dari RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2019-2024.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Analisis pada aspek geografi dan demografi Kabupaten Gowa perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah, mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan. Secara rinci analisis geografi dan demografi untuk Kabupaten sebagai berikut :

2.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah Administrasi

2.1.1.1. Luas dan Batas wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Gowa yang terletak pada bagian selatan dari Provinsi Sulawesi Selatan adalah 1.883,33 km² atau 3,01% dari total luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa secara administratif terdiri dari 18 kecamatan, 121 Desa, 46 kelurahan, dan 675 dusun/lingkungan, sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Luas Wilayah Kabupaten Gowa Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	% Terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Desa/Kelurahan		
				Desa	Kelurahan	Jumlah
1	BAJENG	60,09	3,19	10	4	14
2	BAJENG BARAT	19,04	1,01	7	0	7
3	BAROMBONG	20,67	1,1	5	2	7
4	BIRINGBULU	218,84	11,62	9	2	11
5	BONTOLEMPANGAN	142,46	7,56	8	0	8
6	BONTOMARANNU	52,63	2,79	6	3	9
7	BONTONOMPO	30,39	1,61	11	3	14
8	BONTONOMPO SELATAN	29,24	1,55	8	1	9
9	BUNGAYA	175,53	9,32	5	2	7
10	MANUJU	91,9	4,88	7	0	7
11	PALLANGGA	48,24	2,56	12	4	16
12	PARANGLOE	221,26	11,75	5	2	7
13	PARIGI	132,76	7,05	5	0	5
14	PATTALLASSANG	84,96	4,51	8	0	8
15	SOMBA OPU	28,09	1,49	0	14	14
16	TINGGIMONCONG	142,87	7,59	1	6	7
17	TOMBOLO PAO	251,82	13,37	8	1	9
18	TOMPOBULU	132,54	7,04	6	2	8
Jumlah		1.883,33	100	121	46	167

Sumber: BPS, Gowa Dalam Angka 2021

Selatan dengan luas wilayah 1.883,33 km², atau setara dengan 4,02% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan.

2) Posisi Geostrategis

Dalam khasanah sejarah nasional, nama Gowa sudah tidak asing lagi. Mulai abad ke-15, Kerajaan Gowa merupakan kerajaan maritim yang besar pengaruhnya di perairan nusantara. Bahkan kerajaan ini juga muncul nama pahlawan nasional yang bergelar ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin, Raja Gowa XVI yang berani melawan VOC Belanda pada tahun-tahun awal kolonialisasinya di Indonesia.

Dikutip dari halaman Wikipedia Kerajaan Gowa memang pada akhirnya takluk kepada Belanda lewat perjanjian Bungaya, namun meskipun sebagai kerajaan tidak lagi Berjaya, kerajaan ini mampu memberi warisan terbesarnya, yaitu pelabuhan Makassar. Pelabuhan ini yang kemudian berkembang menjadi kota Makassar ini dapat disebut anak kandungnya, sedangkan Kerajaan Gowa sendiri merupakan cikal bakal Kabupaten Gowa sekarang. Kota Makassar lebih dikenal khalayak dibandingkan dengan Kabupaten Gowa. Padahal kenyataannya sampai sekarang Kabupaten Gowa ibaratnya masih menjadi ibu bagi Kota Makassar. Kabupaten yang hanya berjarak tempuh sekitar 10 menit dari Kota Makassar ini memasok sebagian besar kebutuhan dasar kehidupan kota. mulai dari bahan material untuk pembangunan fisik, bahan pangan terutama sayur-mayur, sampai aliran air bersih dari waduk Bili-bili.

Kemampuan Kabupaten Gowa menyuplai kebutuhan bagi daerah sekitarnya dikarenakan alamnya. Kabupaten seluas 1.883,32 km² ini memiliki enam gunung, dimana tertinggi adalah Gunung Bawakaraeng. Daerah ini juga dilalui Sungai Jeneberang yang didaerah pertemuannya dengan Sungai Jenelata dibangun Waduk Bili-Bili. Kondisi alam ini menjadikan tanah Gowa kaya akan bahan galian, disamping tanahnya yang subur.

3) Kondisi kawasan

Wilayah Kabupaten Gowa terdiri atas 2 (dua) kawasan, dataran tinggi seluas 1.509,87 km² atau setara dengan 80,17% yang meliputi sembilan kecamatan yakni Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolopao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Sedangkan dataran rendah seluas 373,46 km² atau setara dengan 19,83% yang juga terdiri dari sembilan kecamatan yaitu Bontonompo, Bontonompo Selatan,

Bajeng, Bajeng Barat, Pallangga, Barombong, Somba Opu, Bontomarannu dan Pattallassang.

Tabel 2. 2
Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)
1	Bajeng	Kalebajeng	12
2	Bajeng Barat	Borimatangkasa	15,8
3	Barombong	Kanjilo	6,5
4	Biringbulu	Lauwa	140
5	Bontolempangan	Bontoloe	63
6	Bontomarannu	Borongloe	9
7	Bontonompo	Tamallayang	16
8	Bontonompo Selatan	Pabundukang	30
9	Bungaya	Sapaya	46
10	Manuju	Moncongloe	20
11	Pallangga	Mangalli	2,45
12	Parangloe	Lanna	27
13	Parigi	Majannang	70
14	Pattallassang	Pattallassang	13
15	Somba Opu	Sungguminasa	0
16	Tinggimoncong	Malino	59
17	Tombolo Pao	Tamaona	90
18	Tompobulu	Malakaji	125

Sumber: BPS, Gowa Dalam Angka 2021

2.1.1.3. Topografi

1) Kemiringan Lahan

Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan lahan diatas 40 derajat yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Sementara itu produktif pada lahan yang tersedia meliputi kondisi kemiringan lahan sekitar 64,70% dari total luas wilayah berada pada kemiringan 0-40°.

2) Ketinggian Lahan

Wilayah Kabupaten Gowa berada pada elevasi 0-2.800 m dari permukaan laut. Elevasi 0-100 m diatas permukaan laut adalah dominan (24% atau 43,146 ha), daerah Kecamatan Tompobulu dan Tinggimoncong bagian timur dan selatan serta wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Sinjai serta Kabupaten Bantaeng merupakan daerah dengan elevasi antara 2.600-2.800 m dari permukaan laut. Sebagai gambaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 3
Luas Daerah Menurut Ketinggian Daerah per Kecamatan di
Kabupaten Gowa

Kecamatan	Luas	KETINGGIAN DAERAH									
		0 – 25 M		25 – 100 m		100 – 500 m		500–1.000 m		1.000 +	
		Km ²	%	Km ²	%	Km ²	%	Km ²	%	Km ²	%
Bajeng	60,09	60,09	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Bajeng Barat	19,04	19,04	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Barombong	20,67	20,67	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Biringbulu	218,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bontolempangan	142,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bontomarannu	52,63	52,5	99,76	0,13	0,24	-	-	-	-	-	-
Bontonompo	30,39	30,39	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Bontonompo Sel	29,24	29,24	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Bungaya	175,53	-	-	-	-	43,43	24,74	94,61	53,9	37,49	21,36
Manuju	91,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pallangga	48,24	48,24	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Parangloe	221,26	51,02	23,06	48,83	22,07	129,99	58,75	35,67	16,12	-	-
Parigi	132,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pattallassang	84,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Somba Opu	28,09	28,09	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Tinggimoncong	142,87	-	-	-	-	6,56	4,59	34,7	24,29	101,59	71,11
Tombolo Pao	251,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tompobulu	132,54	-	-	2,73	2,06	68,64	51,79	26,81	20,23	37,08	27,98

Sumber: BPS, Gowa Dalam Angka 2021

Sedangkan batas wilayah kecamatan dan kondisi wilayah kecamatan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 4
Kondisi Wilayah Kabupaten Gowa menurut Kecamatan

KECAMATAN	BATAS WILAYAH				Sebagian Besar Wilayah
	SEBELAH UTARA	SEBELAH TIMUR	SEBELAH SELATAN	SEBELAH BARAT	
Bajeng	Kec.Pallangga	Kec.Bontomarannu dan Kabupaten Takalar	Kec.Bontonompo	Kabupaten Takalar	Dataran Rendah
Bajeng barat	Kec.Bajeng	Kec.Bajeng	Kec.Bontonompo	Kabupaten Takalar dan Kec.Bajeng Barat	Dataran Rendah
Barombong	Kota Makassar	Kec. Bajeng dan Kec.Pallangga	Kec.Bajeng	Kota Makassar	Dataran Rendah
Biringbulu	Kec. Bungaya	Kec.Tompobulu	Kabupaten Jeneponto	Kabupaten Takalar	Dataran Tinggi
Bontolempangan	Kec.Parangloe dan Kec. Tinggimoncong	Kec.Tinggimoncong	Kec.Tompobulu	Kec.Bungaya	Dataran Tinggi
Bontomarannu	Kec.Pattallassang	Kec.Parangloe	Kec. Pallangga dan Kabupaten Takalar	Kec.Somba Opu	Dataran Rendah
Bontonompo	Kec. Bajeng	Kabupaten Takalar	Kec.Bontonompo Selatan	Kabupaten Takalar	Dataran Rendah

KECAMATAN	BATAS WILAYAH				Sebagian Besar Wilayah
	SEBELAH UTARA	SEBELAH TIMUR	SEBELAH SELATAN	SEBELAH BARAT	
Bontonompo Selatan	Kec.Bontonompo	Kabupaten Takalar	Kabupaten Takalar	Kabupaten Takalar	Dataran Rendah
Bungaya	Kec.Parangloe	Kec. Bontolempangan	Kec.Tompobulu	Kabupaten Takalar	Dataran Tinggi
Manuju	Kec.Parangloe	Kec.Bungaya	Kec.Bungaya	Kec.Pallangga dan Kabupaten Takalar	Dataran Tinggi
Pallangga	Kec.Somba Opu	Kec.Bontomarannu	Kec.Bajeng	Kec. Barombong	Dataran Rendah
Parangloe	Kabupaten Maros	Kec.Tinggimoncong	Kec.Manuju	Kec. Bontomarannu	Dataran Tinggi
Parigi	Kec.Tinggimoncong	Kabupaten Bulukumba	Kec.Bungaya	Kec.Parangloe	Dataran Tinggi
Pattallassang	Kabupaten Maros dan Kota Makassar	Kec.Parangloe	Kec. Bontomarannu	Kec. Somba Opu dan Kec. Pallangga	Dataran Rendah
Sombaopu	Kota Makassar	Kec.Bontomarannu	Kec.Pallangga dan Kabupaten Takalar	Kec.Pallangga dan Kota Makassar	Dataran Rendah
Tinggimoncong	Kabupaten Maros dan Kec.Tombolopao	Kabupaten Bulukumba dan Kec. Tombolopao	Kec. B.lempangan, dan Kabupaten Bantaeng	Kec.Parangloe dan Kec.Manuju	Dataran Tinggi
Tombolo pao	Kabupaten Bone	Kabupaten Sinjai	Kabupaten Bulukumba	Kec. Tinggimoncong	Dataran Tinggi
Tompobulu	Kec. Bontolempangan	Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto	Kabupaten Jeneponto	Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar	Dataran Tinggi

Sumber: BPS, Gowa Dalam Angka 2021

2.1.1.4. Geologi

1) Struktur dan Karakteristik

Penyelidikan geologi lingkungan regional Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan mencakup seluruh wilayah Kabupaten Gowa. Secara geologi daerah ini tersusun oleh batuan-batuan sedimen dan terobosan formasi camba yang berumur tersier, batuan gunung api dan terobosan yang termasuk dalam kelompok batuan gunung api Baturappe-Cindako berumur tersier, batuan gunung api Lompobatang yang berumur kuartar, serta endapan alluvial.

Daerah dataran yang merupakan daerah terendah di atas permukaan laut, umumnya ditempati oleh endapan alluvial. Kelompok batuan formasi camba dan batuan gunung api tersier umumnya menempati daerah perbukitan dan hanya sebagian kecil yang berada didaerah dataran serta didaerah dataran bergelombang; sedangkan daerah pegunungan yang merupakan bagian tertinggi dalam wilayah Kabupaten Gowa tersusun oleh batuan gunung api kuartar.

Daerah dataran yang umumnya tersusun oleh endapan alluvial merupakan wilayah air tanah produktivitas sedang-rendah. Sedangkan daerah yang tersusun oleh batuan sedimen formasi camba dan batuan gunung api termasuk batuan terobosan berumur tersier merupakan wilayah air tanah dengan produktivitas sangat rendah hingga langka air tanah. Daerah pegunungan termasuk wilayah air tanah produktivitas sedangkecuali sebagian daerah disekitar puncak merupakan wilayah air tanah langka.

2) Potensi kandungan

Bahan galian berupa pasir dan lempung banyak ditambang di daerah dataran terutama di daerah Bajeng, sedangkan sirtu di daerah lembah sungai Jeneberang di bagian hulu bendung Bili-Bili. Daerah bergelombang sering dibuat menjadi lebih landai bahkan datar dengan menggantinya sebagai tanah urug dan batu belah terutama didaerah yang tersusun oleh endapan gunung api tersier. Formasi camba oleh para peneliti sebelumnya diinformasikan mengandung lapisan tipis batubara, sedangkan intrusi batuan gunungapi Baturappe-Cindako antara lain menghasilkan mineralisasi logam mulia. Dari segi kebencanaan, daerah Kabupaten Gowa ini tidak termasuk daerah yang rawan gempa bumi karena kondisi geologi lokal dan posisi tektoniknya yang jauh dari zona-zona sumber gempa bumi. Daerah ini juga aman dari bencana gunung api karena gunung api terdekat yaitu Lompobattang sudah termasuk kategori padam.

Namun beberapa tempat termasuk sangat rawan terhadap bencana gerakan tanah seperti di sebagian lereng gunung Bawakaraeng dan sebagian daerah perbukitan yang terjal. Selain itu daerah lembah sungai Jeneberang juga rawan terhadap bencana banjir bandang. Analisis Geologi Lingkungan dan skoring setiap komponen geologi lingkungan yang dimiliki oleh semua daerah dan dianggap berpengaruh terhadap pengembangan wilayah menunjukkan nilainya berkisar antara 33-62 atau kurang leluasa hingga cukup leluasa untuk dikembangkan, kecuali daerah tertentu yang tersisihkan merupakan daerah yang tidak layak kembang. Daerah yang cukup leluasa untuk dikembangkan direkomendasikan sebagai kawasan budidaya umum utamanya pertanian tanaman pangan semusim dan pengembangan kawasan non pertanian seperti pemukiman, perkantoran dan perdagangan. Sedangkan sebagian besar daerah yang agak leluasa lainnya dan daerah yang kurang leluasa untuk dikembangkan merupakan daerah yang direkomendasikan sebagai kawasan budidaya terbatas umumnya pertanian (termasuk hutan). Adapun daerah yang tidak

layak kembang maka direkomendasikan sebagai kawasan lindung. Daerah yang cukup leluasa untuk dikembangkan sebagian besar terletak di dataran Sungguminasa-Takalar, sedangkan yang tidak layak menempati daerah di sekitar puncak perbukitan dan pegunungan terjal, sempadan sungai, waduk/danau dan mata air.

2.1.1.5. Hidrologi

1) Daerah Aliran Sungai

Kabupaten Gowa memiliki daerah aliran Sungai dengan luas daerah aliran terbesar yakni seluas 881 km² dengan panjang 90 km.

2) Sungai, danau dan bendungan

Sungai yang terdapat di Kabupaten Gowa ada 15 sungai dimana yang terbesar dikenal dengan Sungai Je’neberang. Sedangkan danau hanya ada 1 (satu) dikenal dengan nama Danau Mawang yang letaknya berada di Kecamatan Somba Opu. Sedangkan bendungan yang dimiliki Kabupaten Gowa dikenal dengan nama Bendungan Bili-Bili yang terletak di Kecamatan Parangloe, seperti tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2. 5
Panjang Sungai Utama dan Luas Daerah Alirannya
di Kabupaten Gowa Tahun 2020

NAMA SUNGAI	PANJANG SUNGAI (Km)	LUAS DAERAH ALIRAN SUNGAI (Km²)
Batang Kaliki	12	18,5
Bikampang	12	6,4
Cadika	48	36
Je’neberang	90	881
Je’nelata	30	226
Koccikang	21	4,25
Lembaya	30	6,1
Malino	45	36
Pa’bundukang	60	38
Pallappakang	23	28
Passosokia	19	17,5
Sapaya	21	9
Sicini	7	8,4
Tanru Rusa	12	15,6
Takapala	12	6,1

Sumber: BPS, Gowa Dalam Angka 2021

2.1.1.6. Klimatologi

Keadaan yang mempengaruhi iklim suatu daerah adalah suhu, kelembaban, arah angin dan kondisi cuaca pada saat tertentu. Pada umumnya Kabupaten Gowa mempunyai iklim tropis basah. Curah hujan dan hari hujan menunjukkan curah hujan untuk daerah dataran rendah mempunyai variasi antara 500–1.000

mm/tahun sedangkan untuk daerah hulu (pegunungan) berkisar antara 1.000 – 2.000 mm/tahun, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 6
Keadaan Iklim di Kabupaten Gowa Tahun 2020

No	Bulan	Suhu/Temperatur (°C)			Kelembaban (%)		
		Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
1	Januari	23,20	28,53	32,50	63,00	81,61	98,00
2	Februari	23,80	28,13	32,50	65,00	84,82	99,00
3	Maret	23,80	28,72	33,00	62,00	81,11	99,00
4	April	23,40	29,17	32,60	63,00	80,75	98,00
5	Mei	23,60	29,41	34,50	53,00	75,59	98,00
6	Juni	21,80	29,21	33,50	53,00	74,93	97,00
7	Juli	21,00	28,81	33,30	41,00	72,67	95,00
8	Agustus	21,00	30,03	35,50	33,00	64,73	97,00
9	September	20,80	30,22	35,70	39,00	65,98	94,00
10	Oktober	22,60	29,89	35,60	41,00	72,20	96,00
11	November	23,00	28,93	34,40	47,00	80,32	98,00
12	Desember	22,20	27,30	33,00	59,00	85,44	98,00

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2021

Menurut Tipe Iklim (Oldeman dan Sjarifuddin, 1997) wilayah Kabupaten Gowa termasuk dalam :

- C2; daerah yang dapat ditanami tanaman padi terutama palawija dua kali dalam setahun dengan jumlah air yang cukup tersedia,
- C3; daerah tersebut dapat ditanami padi secara terus menerus dengan jadwal tanam yang tepat sehingga panen jatuh pada saat curah hujan kurang,
- D3; daerah tersebut dapat ditanami padi satu kali dan tanaman palawija dua kali setahun dengan jumlah air yang tersedia cukup,
- D4; daerah tersebut dapat ditanami tanaman padi satu kali dan tanaman palawija dua kali dalam setahun dengan jumlah air yang cukup tersedia.

Tabel 2. 7
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan
Di Kabupaten Gowa Tahun 2020

BULAN	CURAH HUJAN (mm ³)	HARI HUJAN
Januari	734	22
Februari	282	17
Maret	270	18
April	162	15
Mei	30	4
Juni	47	10
Juli	2	2
Agustus	1	1
September	0	1
Oktober	0	0
November	25	9
Desember	264	22

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2021

2.1.2. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan aktifitas manusia pada dan dalam kaitannya dengan lahan, penggunaan lahan dari sudut pandang kemampuan lahan dengan jalan mengevaluasi lahan dalam hubungannya dengan bermacam-macam karakteristik alami yang disebutkan diatas. Penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu, misalnya permukiman, perkotaan dan persawahan. Penggunaan lahan juga merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya.

Perda Nomor 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa pasal 31 rencana pola ruang wilayah Kabupaten Gowa ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

2.1.2.1. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan hutan produksi;

Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas:

- a) Kawasan hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Biringbulu, Kecamatan Bontolempangan, Kecamatan Bungaya,

Kecamatan Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Tombolo Pao, dan Kecamatan Tompobulu seluas kurang lebih 20.287 Ha (dua puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh hektar).

- b) Kawasan hutan produksi tetap terdapat di Kecamatan Biringbulu, Bontolempangan, Bungaya, Manuju, Parangloe, Pattallassang, Tinggi Moncong, dan Tombolo Pao seluas kurang lebih 23.102 Ha (dua puluh tiga ribu seratus dua hektar).
- c) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di Kecamatan Biringbulu seluas kurang lebih 309.76 Ha (tiga ratus sembilan ribu tujuh puluh enam hektar).

Tabel 2. 8
Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Gowa

Kecamatan	Hutan Produksi Terbatas	%	Hutan Produksi Tetap	%	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	%
Biringbulu	3747.75	18.47	4235.78	18.33	309.76	100
Bontolempangan	3775.15	18.61	139.46	0.60	-	-
Bungaya	12.78	0.06	5082.21	22.00	-	-
Manuju	-	0.00	5851.15	25.33	-	-
Parangloe	-	0.00	7392.09	32.00	-	-
Parigi	2007.31	9.89	-	0.00	-	-
Pattallassang	-	0.00	4.19	0.02	-	-
Tinggimoncong	4432.98	21.85	318.76	1.38	-	-
Tombolo Pao	6246.24	30.79	78.58	0.34	-	-
Tompobulu	65.01	0.32	-	0.00	-	-
Jumlah	20.287.22	100.00	23.102.22	100.00	309.76	100

Sumber : RTRW Kabupaten Gowa 2012-2032

2. Kawasan peruntukan pertanian;

Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Gowa, terdiri atas:

a) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;

- Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah dengan luas 36.089,77 Ha (tiga puluh enam ribu delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian

wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah di Kabupaten Gowa yang beririgasi teknis ditetapkan sebagian sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.

- Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan luas 16.409 Ha (enam belas ribu empat ratus sembilan hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, dan sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang.

b. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura;

Kawasan peruntukan pertanian hortikultura dengan luas 12.386 Ha (dua belas ribu tiga ratus delapan puluh enam hektar) ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu.

Tabel 2. 9
Lokasi Kawasan Tanaman Pertanian Pangan Kabupaten Gowa

No.	Penggunaan	Pertanian Lahan Basah		Hortikultura		Pertanian Lahan Kering	
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%
1	Bajeng	3.541,68	10,64			103,49	0,63
2	Bajeng Barat	1.545,96	4,64			29,85	0,18
3	Barombong	1.184,21	3,56			1,42	0,01
4	Biring Bulu	1.359,73	4,08	348,21	2,81	3.515,20	21,42
5	Bontolempangan	1.872,04	5,62			3.140,60	19,14
6	Bontomarannu	2.051,77	6,16			1.061,18	6,47
7	Bontonompo	3.324,38	9,99				
8	Bontonompo Selatan	2.764,42	8,3			21,9	0,13
9	Bungaya	1.602,60	4,81			6.531,46	39,8
10	Manuju	479,02	1,44			1.747,68	10,65
11	Pallangga	3.471,90	10,43			105,2	0,64
12	Parangloe	410,22	1,23			149,49	0,91
13	Parigi	1.643,72	4,94	1.387,45	11,2		
14	Pattallassang	1.921,89	5,77				

No.	Penggunaan	Pertanian Lahan Basah		Hortikultura		Pertanian Lahan Kering	
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%
15	Somba Opu	199,87	0,6			0,32	0
16	Tinggimoncong	1.043,11	3,13	1.418,13	11,45		
17	Tombolo Pao	2.700,28	8,11	2.393,92	19,33		
18	Tompobulu	2.171,53	6,52	6.838,78	55,21	1,6	0,01
Jumlah		33.288,33	100	12.386,49	100	16.409,39	100

Sumber : RTRW Kabupaten Gowa 2012-2032

c. Kawasan peruntukan perkebunan;

Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas 11.029 Ha (sebelas ribu dua puluh sembilan hektar) ditetapkan disebahagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu;

Tabel 2. 10
Lokasi Kawasan Tanaman Perkebunan Kabupaten Gowa

No.	Kecamatan	Luas (ha)	%
1	Biringbulu	2.225,25	20,18
2	Bontolempangan	140,35	1,27
3	Bontomarannu	504,47	4,57
4	Bontonompo	42,72	0,39
5	Bontonompo Selatan	6,17	0,06
6	Bungaya	1.174,35	10,65
7	Manuju	82,88	0,75
8	Parangloe	1.153,50	10,46
9	Parigi	312,02	2,83
10	Pattallassang	5,16	0,05
11	Tinggimoncong	4.069,01	36,89
12	Tombolo Pao	1.237,68	11,22
13	Tompobulu	75,2	0,68
Jumlah		11.028,77	100

Sumber : RTRW Kabupaten Gowa 2012-2032

d. Kawasan peruntukan peternakan;

Kawasan peruntukan peternakan merupakan kawasan peruntukan pengembangan ternak besar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, dan sebagian wilayah Kecamatan Manuju;

1) Kawasan peruntukan perikanan;

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap;
Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada Sungai Je'neberang, Danau Mawang, Danau Tonjong, dan Danau Kalaborang.
- b. Kawasan peruntukan budidaya perikanan;
Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud, merupakan kawasan budidaya perikanan air tawar, terdiri dari:
 - Kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di kawasan waduk Bili-bili di Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe; dan
 - Kawasan budidaya minapadi dan budidaya kolam ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu.
 - Kawasan pengembangan minapolitan; merupakan kawasan minapolitan terpadu ditetapkan akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, dan sebagian wilayah Kecamatan Pallangga. Kawasan pengembangan minapolitan ini direncanakan terintegrasi dan terpadu dengan Pelabuhan Perikanan (PPI) Barombong di Kecamatan Barombong;
 - Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI).

Pengembangan BBI akan dikembangkan di Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bontomarannu, dan Kecamatan Tinggimoncong.

Tabel 2. 11
Lokasi Kawasan Perikanan Darat Kabupaten Gowa

No.	LOKASI
1.	Kawasan Minapolitan di Kecamatan Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng, Barombong, Pallangga.
2.	Pembangunan PPI Barombong (\pm 16 ha).
3.	Pengembangan perikanan kolam dan sawah tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Manuju dan Pattallassang.
4.	Balai Benih Ikan (BBI) di Kecamatan Bajeng, Bontomarannu dan Tinggimoncong.
5.	Pengembangan perikanan air tawar di Waduk Bili-Bili.

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.1.2.2. Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan peruntukan wilayah pertambangan merupakan kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara terdiri atas:

- a. Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam meliputi timah hitam dan tembaga yang terletak di Kecamatan Biringbulu, Kecamatan Tinggimoncong, dan Kecamatan Bungaya;
- b. Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa: zeolit, bentonit, oker, trass, kaolin, sulfur (belerang) yang tersebar di Kecamatan Bungaya, Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Biringbulu;
- c. Wilayah usaha pertambangan komoditas batuan meliputi: batu kali, batu gunung, tanah urug atau timbunan, pasir, kerikil, dan serti, terdapat di Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Manuju, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Pallangga, serta di DAS Jeneberang terutama di Kecamatan Parangloe dan Kecamatan Tinggimoncong; Kecamatan Bungaya, Kecamatan Tombolo Pao, Kecamatan Bontolempangan dan; tanah urug, batu kali, dan kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, dan sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong.

2.1.2.3. Kawasan peruntukan industri

Kawasan peruntukan industri, meliputi:

- a. Kawasan peruntukan industri besar** merupakan kawasan peruntukan industri pengolahan persampahan ditetapkan di wilayah Kecamatan Pattallassang;
- b. Kawasan peruntukan industri sedang** merupakan kawasan peruntukan industri pengolahan komoditas pertanian dan penduduk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gowa ditetapkan di wilayah Kecamatan Pattallassang;
- c. Kawasan peruntukan industri rumah tangga** berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu.

2.1.2.4. Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang pariwisata. Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas:

- a. Kawasan pariwisata budaya** sebagaimana dimaksud meliputi:
 - Taman Wisata Budaya Benteng Somba Opu di Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong;
 - Wisata Makam Syekh Yusuf dan Makam Sultan Hasanuddin, Masjid Tua Katangka dan Obyek Wisata Balla Lompoa; dan
 - Wisata budaya lokal lainnya meliputi Accera' Kalompoang, Appalili, Maudu' Kalompoang, Pa'dekko, Paraga, Pamanca, Pakkarena, dan Songka Bala.
- b. Kawasan pariwisata alam** meliputi:
 - Pengembangan ruang Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) yang terpadu dengan Taman Wisata Alam Malino di Kecamatan Tinggimoncong;

- Wisata Alam Bendungan Bili-Bili di Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe;
- Wisata Danau Mawang di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu; dan
- Wisata Air Terjun Parangloe di Kecamatan Parangloe.

c. Kawasan pariwisata buatan meliputi:

- Obyek wisata dan olahraga Golf Padivalley di Desa Pallantikang Kecamatan Pattallassang;
- Pusat rekreasi Gowa Discovery Park (GDP) di Kompleks Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Kawasan wisata Ekopolis Pattallassang-Parangloe Kecamatan Parangloe dan Kecamatan Pattallassang; dan;
- Kawasan wisata kuliner di Perkotaan Sungguminasa dan Kota Baru Pattallassang.

2.1.2.5. Kawasan peruntukan permukiman

Kawasan peruntukan permukiman, terdiri atas:

a) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan;

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan dengan luas 5.983 Ha (lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga hektar) ditetapkan di:

- Kawasan Permukiman Perkotaan Baru Gowa-Maros yang merupakan Kota Satelit Mamminasata bagian timur ditetapkan di Desa Panaikang dan Desa Paccelejang Kecamatan Pattallassang;
- Kawasan peruntukan permukiman Kota Baru Satelit Pattallassang terpadu dengan lapangan Golf Padivalley ditetapkan di Kecamatan Pattallassang;
- Kawasan Permukiman Baru Kawasan Strategis Parangloe ditetapkan di Kelurahan Parang Kecamatan Parangloe;
- Rencana pengembangan kawasan permukiman ditetapkan bagian selatan Mamminasata meliputi Desa Kanjilo, Desa Tamanyelleng, Kelurahan Lembangparang di Kecamatan Barombong, Desa Taeng di Kecamatan Pallangga, Desa Panciro di Kecamatan Bajeng serta Kelurahan Bone dan Desa Bontosunggu di Kecamatan Bajeng;

- Kawasan permukiman perkotaan sepanjang koridor Jalan Tun Abdul Razak di Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Bontomarannu dan Kecamatan Pattalassang;
- Kawasan permukiman di pusat kegiatan PKN, dan PPK
- b) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
Kawasan peruntukan permukiman perdesaan berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan dengan luas 216 Ha (dua ratus enam belas hektar) ditetapkan di kawasan permukiman di pusat kegiatan PPL disebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, dan sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao.

2.1.2.6. Kawasan peruntukan lainnya terdiri atas

a. Kawasan peruntukan perkantoran;

Kawasan peruntukan perkantoran meliputi:

- Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan. Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan skala regional dan kabupaten ditetapkan di Kawasan Perkotaan Sungguminasa di sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu dan sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang.
- Kawasan peruntukan pemerintahan skala kecamatan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu.
- Kawasan peruntukan perkantoran swasta. Kawasan peruntukan perkantoran swasta ditetapkan disebagian

wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, dan sebagian wilayah Kecamatan Bajeng.

b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa merupakan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional dan skala kabupaten dan/atau kecamatan. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa meliputi :

1) Kawasan peruntukan pasar tradisional ditetapkan di:

- Kawasan perdagangan tradisional terpadu dengan terminal tipe A di Kecamatan Pattallassang;
- Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Malino Kecamatan Tinggimoncong;
- Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Tamaona Kecamatan Tombolo Pao;
- Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Majannang Kecamatan Parigi;
- Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Sapaya Kecamatan Bungaya;
- Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Parang Lompoe Kecamatan Bontolempangan;
- Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Malakaji Kecamatan Tompobulu;
- Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Lauwa Kecamatan Biringbulu;
- Kawasan perdagangan Limbung di Kecamatan Bajeng;
- Kawasan perdagangan Tamallayang di Kecamatan Bontonompo;
- Kawasan perdagangan Pabundukang di Bontonompo Selatan;
- Kawasan perdagangan Borimatangkasa di Kecamatan Bajeng Barat;
- Kawasan perdagangan Kanjilo di Kecamatan Barombong;
- Kawasan perdagangan Borongloe di Kecamatan Bontomarannu;
- Kawasan perdagangan Lanna di Kecamatan Parangloe;
- Kawasan perdagangan Moncongloe di Kecamatan Manuju;
- Kawasan perdagangan Bontoloe di Kecamatan Bontolempangan;
- Kawasan perdagangan Cappa Bungaya di Kecamatan Pallangga; dan

- Kawasan perdagangan Panaikang di Kecamatan Pattallassang.

2) Kawasan peruntukan pusat perbelanjaan ditetapkan di:

- Pasar Induk Regional Mamminasata di Kawasan Perkotaan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu.
- Kawasan pusat perdagangan regional terpadu Kota Baru Mamminasata di Kecamatan Pattallassang.
- Kawasan perdagangan Borimatangkasa di Kecamatan Bajeng Barat.
- Kawasan perdagangan di Kawasan Kota Baru Satelit Pattallassang di Desa Panaikang dan Desa Paccellekang Kecamatan Pattallassang.

3) Kawasan peruntukan pertokoan modern ditetapkan di:

- Kawasan perdagangan di Kecamatan Somba Opu;
- Kawasan perdagangan di Kecamatan Barombong;
- Kawasan perdagangan di Kecamatan Pallangga,
- Kawasan perdagangan di Kecamatan Pattallassang; dan
- Kawasan perdagangan di Kecamatan Bajeng.

2.1.2.7. Kawasan peruntukan pelayanan umum, meliputi

a. Kawasan peruntukan pelayanan olahraga;

- Kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala kabupaten ditetapkan di Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kecamatan Somba Opu.
- Kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala kecamatan ditetapkan pada kawasan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) secara proporsional.

b. Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan terdiri atas:

- Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala regional ditetapkan di Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kecamatan Somba Opu.
- Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala kabupaten dan/atau kecamatan ditetapkan pada kawasan PPK dan PPL secara proporsional.

c. Kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi, ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, dan sebagian wilayah Kecamatan Pallangga;

d. Kawasan peruntukan pelayanan pemakaman umum, merupakan kawasan peruntukan pemakaman umum skala regional ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang.

2.1.2.8. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi :

- Kawasan Komando Distrik Militer 1409 Gowa di Kecamatan Somba Opu;
- Kantor Komando Rayon Militer di Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Barombong, Kecamatan Biringbulu, Kecamatan Bontolempangan, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kecamatan Bungaya, Kecamatan Manuju, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Parigi, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Tinggi Moncong, Kecamatan Tombolo Pao, dan Kecamatan Tompobulu;
- Kawasan Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) VII Hasanuddin Pakkatto di Kecamatan Bontomarannu;
- Kawasan Komando Pendidikan dan Latihan (Dodiklat) Bela Negara, Sekolah Calon Tamtama dan Sekolah Calon Bintara Malino di Kecamatan Tinggimoncong;
- Kepolisian Resort Gowa di Kecamatan Somba Opu; dan
- Kepolisian Sektor di Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Barombong, Kecamatan Biringbulu, Kecamatan Bontolempangan, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kecamatan Bungaya, Kecamatan Manuju, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Parigi, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Tombolo Pao, dan Kecamatan Tompobulu.

2.1.2.9. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan berkelanjutan. gambar tabel dibawah ini memberi gambaran kawasan lindung dan luas areanya di Kabupaten Gowa:

Tabel 2. 12
Kawasan Lindung Lainnya Di Kabupaten Gowa

NO.	KECAMATAN	LUAS (HA)	%
1	Kecamatan Biringbulu	646.73	36.83
2	Kecamatan Bontolempangan	3.18	0.18
3	Kecamatan Bungaya	156.8	8.79
4	Kecamatan Tinggimoncong	678.99	43.68
5	Kecamatan Tombolopao	150.32	7.87
6	Kecamatan Tompobulu	57.22	2.65
Jumlah		1693.24	100

Sumber : RTRW Kabupaten Gowa 2012-2032

Kawasan lindung meliputi:

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi, menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan serta memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan terdiri atas:

a. Kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 23.350 (dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu dengan luas 4.034 (empat ribu tiga puluh empat) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan dengan luas 481 (empat ratus delapan puluh satu) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya dengan luas 5.288 (lima ribu dua delapan puluh delapan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe dengan luas 5 (lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Parigi dengan luas 2.617 (dua ribu enam ratus tujuhbelas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong dengan luas 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao dengan luas 6.784 (enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat) hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu dengan luas 2.919 (dua ribu sembilan ratus Sembilan belas) hektar.

b. Kawasan resapan air.

Kawasan resapan air ditetapkan di bagian hulu DAS Jeneberang di Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Parigi, Kecamatan Parangloe, dan Kecamatan Manuju serta bagian hulu Sungai Lata di Kecamatan Pallangga.

c. Kawasan perlindungan setempat;

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan melindungi pantai, sungai, danau atau waduk, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

d. Kawasan sempadan pantai;

Meliputi daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat ditetapkan di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Gowa di Kecamatan Bontonompo Selatan.

e. Kawasan sempadan sungai;

Kawasan sempadan sungai meliputi:

- 1) Daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
- 2) Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
- 3) Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai. Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud ditetapkan pada jenis-jenis sungai:
- 4) Sungai-sungai yang bermuara ke danau dan waduk dan mempengaruhi penyediaan sumber air baku yang ada di danau dan waduk.
- 5) Sungai-sungai yang bermuara ke lautan. Kawasan sempadan sungai ditetapkan di Sungai Je'neberang, Sungai Je'nelata, Sungai Malino, Sungai Cadika, Sungai Pa'bundukang, dan Sungai Pallappakang.

f. Kawasan sekitar danau atau waduk.

Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud, meliputi daratan dengan jarak paling sedikit 50 m (lima puluh meter) sampai dengan 100 m (seratus meter) dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi. Kawasan sekitar danau atau waduk, ditetapkan di Danau Mawang di sebagian wilayah Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu, Waduk Bili-Bili di sebagian wilayah Desa Bili-Bili dan Kelurahan Bontoparang Kecamatan Parangloe, Danau Tonjong di sebagian wilayah Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu, dan Danau Kalaborang di sebagian wilayah Desa Bili-bili Kecamatan Parangloe.

6) Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan dimaksud, terdiri atas RTH Publik yang meliputi lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi, berbentuk

satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur dan lahan didominasi komunitas tumbuhan, dan RTH privat. Kawasan RTH kawasan perkotaan ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi:

1) RTH publik minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perkotaan Kabupaten Gowa atau seluas 42.096 Ha (empat puluh dua ribu sembilan puluh enam hektar) dilaksanakan melalui pengembangan:

- Hutan perkotaan dengan luasan 112 Ha (seratus dua belas hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, dan sebagian wilayah Kecamatan Barombong;
- Kawasan sempadan pantai dengan luasan 8 Ha (delapan hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan;
- Kawasan sempadan sungai dengan luasan 43 Ha (empat puluh tiga hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu;
- Kawasan sempadan danau atau waduk dengan luasan 46 Ha (empat puluh enam hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, dan sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu;
- TPU dengan luasan 15 Ha (lima belas hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu;
- Lapangan olah raga dengan luasan 90 Ha (sembilan puluh hektar) ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Pattallassang.

2) RTH privat minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan Kabupaten Gowa atau seluas 21.046 Ha (dua puluh satu ribu empat puluh enam hektar). Rencana pemenuhan RTH privat yang dimaksud meliputi:

- RTH di kawasan permukiman perkotaan dan di kawasan permukiman perdesaan; dan

- Pekarangan rumah, serta halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha yang tersebar di kawasan perkotaan PKN, PPK, dan PPL.

7) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;

Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, ditetapkan dalam rangka melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, dan pembangunan pada umumnya serta melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan keragaman bentuk geologi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia. Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, terdiri atas:

- 1) Kawasan taman wisata alam; Kawasan taman wisata alam merupakan Kawasan Taman Wisata Alam Malino dengan luas kurang lebih 3.286 Ha (tiga ribu dua ratus delapan puluh enam hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kelurahan Malino, sebagian wilayah Kelurahan Bulutanah, dan sebagian wilayah Desa Bontolerung Kecamatan Tinggimoncong;
- 2) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan merupakan bangunan dan lingkungan peninggalan sejarah ditetapkan di:
 - Benteng Balla Lompoa Sungguminasa di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu;
 - Situs Bersejarah Pusat Kerajaan Gowa Benteng Sombu Opu di Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong;
 - Masjid Tua Katangka di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu;
 - Makam Syech Yusuf di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu; dan
 - Makam Sultan Hasanuddin di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu.
- 3) Kawasan taman buru luas kurang lebih 402 Ha (empat ratus dua hektar) terletak di Bissoloro Kecamatan Bungaya;
- 4) Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d luas kurang lebih 41 Ha (empat puluh satu hektar) terletak di Kecamatan Biringbulu.

8) Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam geologi dan perlindungan terhadap air tanah. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan sempadan mata air meliputi daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi

mata air dan merupakan wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang dan sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Secara geografis Kabupaten Gowa berada pada kawasan yang rawan bencana alam, bencana alam yang paling sering terjadi adalah tanah longsor dan banjir. Selain faktor curah hujan yang cukup tinggi gangguan geomorfologi terutama faktor kemiringan lereng, kondisi batuan ataupun tanah penyusun lereng juga sangat berpengaruh. Meskipun longsor merupakan gejala fisik alami, namun beberapa hasil akitifitas manusia yang tidak terkendali dalam mengeksploitasi juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kestabilan lereng. Faktor-faktor aktifitas manusia ini antara lain pola tanam, pemotongan lereng untuk aktifitas pertambangan, pencetakan kolam dan sawah baru, drainase, konstruksi bangunan dan kepadatan penduduk. Dengan demikian dalam upaya pembangunan berkelanjutan melalui penciptaan keseimbangan lingkungan diperlukan penataan ruang dan kawasan. Kabupaten Gowa menetapkan beberapa kawasan yang rawan bencana adalah sebagai berikut:

- 1) Kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan abrasi dan kawasan rawan gerakan tanah.
- 2) Kawasan rawan abrasi meliputi pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan;
- 3) Kawasan rawan gerakan tanah meliputi kawasan yang rawan terhadap gerakan tanah ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, dan sebagian wilayah Kecamatan Parigi.

Kawasan rawan bencana alam ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya. Kawasan rawan bencana alam terdiri atas:

1) Kawasan rawan banjir

Kawasan rawan banjir ditetapkan di Desa Je'nemadingin, Desa Borongpa'lala dan Desa Panaikang di Kecamatan Pattalassang, Desa Borisallo, Desa Belapunranga, dan Desa Bontokassi di Kecamatan Parangloe, Desa Mata Allo, Desa Bili-bili, Desa Sokkolia dan Desa Romanglompoa di Kecamatan Bontomarannu, Kelurahan Samata, Kelurahan Paccinongan, Kelurahan Romangpolong, Kelurahan Tamarunang, Kelurahan Mawang, dan Kelurahan Bontoramba di Kecamatan Somba Opu, Desa Pallangga, Kelurahan Pangkabinanga, Desa Bontoala,

Kelurahan Tetebatu, Desa Kampili dan Desa Parangbanoa di Kecamatan Pallangga, dan Desa Pattalikang, Desa Tassese dan Desa Tanakaraeng di Kecamatan Manuju.

2) Kawasan rawan tanah longsor.

Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan di Kelurahan Garassi, Kelurahan Bontolerung dan Kelurahan Gantarang Kecamatan Tinggimoncong, Desa Bilangrengi, Desa Manimbahoi, Desa Majannang dan Desa Jonjo di Kecamatan Parigi, Desa Moncongloe dan Desa Tamalatea di Kecamatan Manuju, Desa Pao, Desa Kanreapia, Desa Ballasuka, Desa Erelembang dan Desa Bolaromang di Kecamatan Tombolo Pao, Desa Berutallasa, Desa Taring, Desa Borimasunggu dan Desa Julukanaya di Kecamatan Biringbulu, dan Kelurahan Je'nebatu, Kelurahan Sapaya, Desa Buakkang dan Desa Rannaloe di Kecamatan Bungaya.

Adapun kecenderungan kejadian bencana di Kabupaten Gowa dalam rentang waktu tahun 2018-2020 adalah :

- a. Pada tahun 2018 terjadi bencana alam yaitu :
 - Banjir terjadi di Kecamatan Somba Opu (12 kelurahan), Kecamatan Bontomarannu (Kelurahan Bontomanai, Borongloe dan Desa Romang Loe), Kecamatan Pattallassang (Desa Pallantikang, Borong Palala dan Sunggumanai), Kecamatan Parangloe (Desa BelapunrangaLonjoboko dan Kelurahan Bontoparang), Kecamatan Tombolo Pao (Desa Pao dan Desa Mamampang), Kecamatan Biringbulu (Desa Rappoala).
 - Banjir Bandang terjadi di Kecamatan Pallangga (Kelurahan Pangkabinanga, Tete Batu, Mangngalli, Desa Panakkukang, Kampili dan Taeng), Kecamatan Tombolo Pao (Desa Ballasuka), Kecamatan Manuju (Desa Bilalang, Moncongloe, Pattalikang, Manuju dan Tana Karaeng), Kecamatan Parigi (Desa Manimbahoi), Kecamatan Biringbulu (Desa Taring) dan Kecamatan Bontolempangan (Desa Paranglompoa, Bontolempangan, Ulujangang, Bontoloe dan Julumate'ne).
 - Angin kencang terjadi di Kecamatan Bontonombo Selatan (Desa Tanrara), Kecamatan Manuju (Desa Tassese dan Tamalatea),
 - Longsor terjadi di Kecamatan Tombolo Pao (Desa Tabinjai, Kanreapia dan Bola Romang), Kecamatan Manuju (Desa Pattalikang, Tassese, Manuju dan Tamalatea), Kecamatan Tompo Bulu (Desa Datara), Kecamatan Parigi (Desa Bilanrengi, Jonjo dan Majannang), Kecamatan Tinggimoncong (Kelurahan Malino, Pattapang, Garassi, Buluttana, Gantarang, Bontolerung

dan Desa Parigi), Kecamatan Biringbulu (Desa Baturappe, Berutallasa, Julukanaya, Parangloe, Lembangloe, Borimasunggu dan Kelurahan Lauwa), Kecamatan Bontolempangan (Desa Lassa-Lassa dan Pa'ladingan).

b. Pada tahun 2019 terjadi bencana alam besar melanda Kabupaten Gowa yaitu tanah longsor yang menelan korban meninggal dunia lebih dari 50 orang korban jiwa serta bencana alam lain.

- Tanah Longsor yang terjadi di Kecamatan Bungaya (Kelurahan Sapaya, Desa Bontomanai, Mangempang dan Rannaloe), Kecamatan Parangloe (Desa Lonjoboko dan Bontokassi), Kecamatan Tombolo Pao (Desa Tabbinjai, Kanreapia, Bolaromang dan Mamampang), Kecamatan Manuju (Desa Desa Pattalikang, Tassese, Manuju dan Tamalatea)Kecamatan Tompobulu (Desa Datarata), Kecamatan Parigi (Desa Bilanrengi, Jonjo dan Majannang) Kecamatan Tinggimoncong (Kelurahan Malino, Garassi, Buluttana, Gantarang, Bontolerung dan Desa Parigi), Kecamatan Biringbulu (Desa Baturappe, Berutallasa, Julukanaya, Parangloe, Lembangloe, Borimasunggu dan Kelurahan Lauwa) dan Kecamatan Bontolempangan (Desa Lassa-Lassa dan Pa'ladingang).
- Banjir yang terjadi di Kecamatan Somba Opu (12 kelurahan)Kecamatan Bontomarannu (Kelurahan Bontomanai dan Desa Romang Loe), Kecamatan Bungaya (Desa Bontomanai), Kecamatan Pattallassang (Desa Pallantikang, Borong Palala, Sunggumanai, Belapunranga dan Kelurahan Bontoparang)Kecamatan Parangloe (Desa Belapunranga, Lonjoboko dan Kelurahan Bontoparang), Kecamatan Tombolo Pao (Desa Pao dan Mamampang), Kecamatan Biringbulu (Desa Rapoala).
- Banjir Bandang yang terjadi di Kecamatan Pallangga (Kelurahan Pangkabinanga, Tete Batu, Mangngalli, Desa Panakkukang, Kampili, Taeng dan Tanrara), Kecamatan Tombolo Pao (Desa Ballasuka), Kecamatan Manuju (Desa Bilalang, Pattalikang, Manuju, Tana Karaeng dan Moncongloe) Kecamatan Parigi (Desa Manimbahoi), Kecamatan Biringbulu (Desa Taring) bdan Kecamatan Bontolempangan (Desa Paranglompoa, Bontolempangan, Ulujiangang, Bontoloe dan Julumate'ne)
- Angin kencang yang terjadi di Kecamatan Bajeng (Dusun Doja), Kecamatan Bajeng Barat (Desa Tana Bangka,

Kecamatan Pallangga (Desa Taeng), Kecamatan Bontonompo Selatan (Desa Tanrara), Kecamatan Manuju (Desa Tassese dan Tamalatea) dan Kecamatan Tinggimoncong (Kelurahan Pattapang)

- c. Pada tahun 2020 terjadi bencana alam banjir yang melanda 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Somba Opu (Kelurahan Tamarunang) dan Kecamatan Pallangga (Desa Panakkukang)

2.1.4. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Gowa menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 tercatat sebanyak 765.836 jiwa terdiri dari 379.874 laki-laki dan 385.962 perempuan. Penduduk terbesar ada di Kecamatan Somba Opu sebanyak 156.108 jiwa sedangkan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Parigi dengan jumlah penduduk 13.289 jiwa, disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 13
Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa Menurut Kecamatan
Tahun 2016 – 2020

No	Kecamatan	2016 (jiwa)	2017 (jiwa)	2018 (jiwa)	2019 (jiwa)	2020 (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
							2016-2020
1	Bontonompo	41.818	42.110	42.277	42.446	44.998	1,32
2	Bontonompo Selatan	29.763	29.882	30.631	30.754	32.118	1,17
3	Bajeng	68.820	69.727	68.826	69.357	72.066	1,41
4	Bajeng Barat	24.852	25.106	24.657	24.756	26.639	1,47
5	Pallangga	120.780	124.049	126.334	129.957	127.837	2,53
6	Barombong	39.503	40.262	40.135	40.739	45.192	2,64
7	SombaOpu	162.979	168.021	172.094	177.802	156.108	1,77
8	Bontomarannu	35.014	35.563	35.248	35.628	41.016	2,67
9	Pattallassang	24.064	24.366	24.022	24.188	30.254	3,19
10	Parangloe	18.384	18.643	18.429	18.591	18.628	1,14
11	Manuju	14.959	15.057	15.019	15.059	14.591	0,34
12	Tinggimoncong	23.850	24.065	23.593	23.655	23.332	0,51
13	Tombolopao	29.164	29.463	28.945	29.064	29.779	1,00
14	Parigi	12.697	12.708	13.949	13.987	13.289	0,15
15	Bungaya	16.300	16.468	16.889	16.933	16.742	0,53
16	Bontolempangan	12.313	12.326	14.209	14.246	14.781	1,00
17	Tompobulu	28.608	28.704	30.876	30.957	28.393	-0,19
18	Biringbulu	31.625	31.680	34.474	34.565	30.073	-0,70
Jumlah		722.702	735.493	748.200	760.607	765.836	1,56

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2021

Distribusi jumlah kepala keluarga menurut Kecamatan tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 14
Jumlah KK Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	2016 (KK)	2017 (KK)	2018 (KK)	2019 (KK)	2020 (KK)
1	Bontonompo	10,455	10,528	10,569	10,612	11,250
2	Bontonompo Selatan	7,441	7,471	7,658	7,689	8,030
3	Bajeng	17,205	17,432	17,207	17,339	18,017
4	Bajeng Barat	6,213	6,277	6,164	6,189	6,660
5	Pallangga	30,195	30,012	31,584	32,489	31,959
6	Barombong	9,876	10,066	10,034	10,185	11,298
7	SombaOpu	40,745	42,005	43,024	44,451	39,027
8	Bontomarannu	8,754	8,891	8,812	8,907	10,254
9	Pattallassang	6,016	6,092	6,006	6,047	7,564
10	Parangloe	4,596	4,661	4,607	4,648	4,657
11	Manuju	3,740	3,764	3,755	3,765	3,648
12	Tinggimoncong	5,963	6,016	5,898	5,914	5,833
13	Tombolopao	7,291	7,366	7,236	7,266	7,445
14	Parigi	3,174	3,177	3,487	3,497	3,322
15	Bungaya	4,075	4,117	4,222	4,233	4,186
16	Bontolempangan	3,078	3,082	3,552	3,562	3,695
17	Tompobulu	7,152	7,176	7,719	7,739	7,098
18	Biringbulu	7,906	7,920	8,619	8,641	7,518
Jumlah		183,873	187,050	190,152	193,171	191,456

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2021

Distribusi kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Gowa pada 2016-2021 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2. 15
Kepadatan Penduduk Kabupaten Gowa Menurut Kecamatan Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Bontonompo	30,39	1.376	1.386	1.391	1.397	1.481
2	Bontonompo Selatan	29,24	1.018	1.022	1.048	1.052	1.098
3	Bajeng	60,09	1.145	1.160	1.145	1.154	1.199
4	Bajeng barat	19,04	1.305	1.319	1.295	1.300	1.399
5	Palangga	48,24	2.504	2.571	2.619	2.694	2.650
6	Barombong	20,67	1.911	1.948	1.942	1.971	2.186
7	Somba Opu	28,09	5.802	5.982	6.127	6.330	5.557
8	Bontomarannu	52,63	665	676	670	677	779

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)				
			2016	2017	2018	2019	2020
9	Patallasang	84,96	276	283	287	285	356
10	Parangloe	221,26	81	83	84	84	84
11	Manuju	91,90	160	163	164	164	159
12	Tinggimoncong	142,87	164	167	168	166	163
13	Tombolopao	251,82	113	116	117	115	118
14	Parigi	132,76	97	96	96	105	100
15	Bungaya	175,53	92	93	94	96	95
16	Bontolempangan	142,46	89	86	87	100	104
17	Tompobulu	132,54	218	216	217	234	214
18	Biringbulu	218,84	146	145	145	158	137
Jumlah		1.883,33	384	391	397	410	407

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2021

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk tiap tahunnya, maka tantangan Kabupaten Gowa dalam pembangunan ke depan menjadi lebih besar pula. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tepat sehingga tekanan penduduk yang semakin besar tidak memunculkan konflik sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi lingkungan, dan kurangnya tingkat dukungan ketersediaan infrastruktur yang layak.

Besaran jumlah penduduk tersebut mendiami wilayah seluas 1.883,33 km², sehingga rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2020 adalah 407 jiwa per km². Dalam tataran regional Sulawesi Selatan tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Gowa merupakan salah satu yang tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Dari tabel terlihat bahwa kepadatan penduduk Kabupaten Gowa terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Peningkatan kepadatan dan aktivitas penduduk ini juga berimplikasi pada makin terbatasnya pemanfaatan lahan.

Komposisi penduduk Kabupaten Gowa menurut jenis kelamin selama periode tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Perempuan cenderung lebih banyak daripada penduduk Laki-Laki sebagai berikut :

Tabel 2. 16
Sex Rasio Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jenis Kelamin				Sex Ratio (%)
		Laki-Laki (jiwa)	%	Perempuan (jiwa)	%	
1	2016	361.814	49,19	373.679	50,81	96,80
2	2017	368.234	49,22	379.966	50,78	96,91
3	2018	374.425	49,23	386.182	50,77	96,96
4	2019	380.488	49,24	392.196	50,76	97,02
5	2020	379.874	49,60	385.962	50,39	98,42

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2021

Sedangkan gambaran mengenai sex rasio penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Gowa Tahun 2019 dan 2020 dapat di lihat pada table berikut ini.

Tabel 2. 17
Komposisi Penduduk Kabupaten Gowa Menurut Kelompok Umur tahun 2019 dan 2020

Kelompok Umur (Tahun)	2019			2020		
	Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan	
0 – 4	37.549	35.692	73.241	31.451	30.335	61.786
5 – 9	37.681	36.545	74.226	31.537	29.931	61.468
10 – 14	35.882	34.190	70.072	35.108	33.398	68.506
15 – 19	35.188	32.709	67.897	34.433	32.757	67.190
20 – 24	33.160	32.218	65.378	35.148	33.549	68.697
25 – 29	29.957	31.374	61.331	33.363	33.522	66.885
30 – 34	27.522	29.957	57.479	29.347	30.828	60.175
35 – 39	26.658	29.902	56.560	27.508	29.335	56.843
40 – 44	26.635	28.398	55.033	26.191	28.069	54.260
45 – 49	25.112	25.998	51.110	24.118	25.691	49.809
50 – 54	20.358	20.738	41.096	20.708	21.920	42.628
55 – 59	15.281	16.837	32.118	17.223	18.321	35.544
60 – 64	10.914	12.145	23.059	13.021	13.482	26.503
65 – 69	7.967	9.414	17.381	9.131	10.051	19.182
70 – 74	5.065	7.074	12.139	5.525	6.362	11.887
> 75	5.559	9.005	14.564	6.062	8.411	14.473
Jumlah	380.488	392.196	772.684	379.874	392.196	765.836

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2021

Potensi tersebut harus dioptimalkan oleh pemerintah melalui peningkatan kualitas dan investasi sumber daya manusia (*human capital investment*) mulai dari pendidikan, kesehatan, kemampuan komunikasi, keterampilan, serta penguasaan teknologi. Bonus demografi tidak akan memberikan dampak yang signifikan jika

pemerintah tidak melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jika mayoritas penduduk yang berusia produktif memiliki kualitas yang rendah, akan memicu gelombang pengangguran massal dan semakin menambah beban daerah.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kinerja pembangunan ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat berupa penjelasan gambaran dan hasil analisis terhadap pencapaian indikator kerjahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. Untuk lebih jelasnya mengenai aspek kesejahteraan dapat diuraikan sebagai berikut:

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja pembangunan ekonomi dapat diukur dengan salah satu indikator perekonomian secara makro yaitu pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB pada tahun tertentu di bandingkan dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya. PDRB terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu PDRB Atas Harga Konstan dan PDRB Atas Harga Berlaku. Dimana nilai PDRB yang digunakan adalah nilai PDRB atas dasar harga konstan. Penggunaan nilai atas dasar harga konstan ini karena telah dikeluarkannya pengaruh perubahan harga sehingga perubahan yang di ukur merupakan pertumbuhan ekonomi.

Nilai dan kontribusi sektor PDRB Kabupaten Gowa sejak tahun 2016-2020, khususnya PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (ADHK Tahun 2010) Kabupaten Gowa senantiasa mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2020 tumbuh sebesar 14.025,76 milyar rupiah yang relatif jauh lebih besar bila dibandingkan pada tahun 2016 yang sebesar 11.166,021 milyar rupiah. Berikut tabel PDRB ADHK menurut lapangan usaha tahun 2016–2020 di Kabupaten Gowa.

Tabel 2. 18
Perkembangan PDRB Kabupaten Gowa Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
Tahun 2016-2020

Kategori	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020*	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,796,251.12	31.01	5,173,375.05	30.09	5,550,014.31	29.11	5,655,580.00	27.01	5,943,990.00	27.61
2	Pertambangan dan Penggalian	660,113.83	4.26	752,070.39	4.37	871,126.21	4.57	1,009,870.00	4.82	1,043,470.00	4.85
3	Industri Pengolahan	1,025,808.31	6.62	1,154,818.64	6.72	1,240,118.53	6.51	1,420,320.00	6.78	1,353,250.00	6.28
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17,954.58	0.12	22,557.70	0.13	24,975.39	0.13	26,140.00	0.12	27,250.00	0.13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17,747.34	0.11	19,494.15	0.11	21,802.76	0.11	23,150.00	0.11	24,630.00	0.11
6	Konstruksi	1,611,435.41	10.37	1,834,924.22	10.67	2,148,126.11	11.27	2,487,300.00	11.88	2,503,090.00	11.63
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,806,225.93	11.83	2,116,438.90	12.31	2,425,495.00	12.72	2,745,920.00	13.11	2,714,680.00	12.61
8	Transportasi dan Pergudangan	258,235.15	1.7	282,193.34	1.64	309,871.95	1.63	351,200.00	1.68	343,250.00	1.59
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	365,777.35	2.24	417,351.01	2.43	467,965.85	2.45	517,150.00	2.47	476,020.00	2.21
10	Informasi dan Komunikasi	1.203.066.78	7.71	1,351,284.61	7.86	1,524,248.04	8	1,718,640.00	8.21	1,910,640.00	8.87

Kategori	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020*	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	412,599.86	2.67	440,643.18	2.56	476,987.54	2.5	503,290.00	2.40	522,860.00	2.42
12	Real Estate	1,320,040.87	8.64	1,446,363.57	8.41	1,580,466.24	8.29	1,712,990.00	8.18	1,801,610.00	8.37
13	Jasa Perusahaan	17,535.29	0.11	19,581.66	0.11	22,258.47	0.12	25,020.00	0.12	22,790.00	0.11
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	856,196.92	5.52	918,469.62	5.34	995,955.48	5.22	1,200,770.00	5.73	1,218,530.00	5.66
15	Jasa Pendidikan	608,389.23	3.92	678,719.03	3.95	763,379.72	4	828,210.00	3.96	885,000.00	4.11
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	279,733.03	1.8	314,559.79	1.83	352,811.83	1.85	390,880.00	1.87	448,890.00	2.08
17	Jasa lainnya	213,997.23	1.38	248,813.24	1.45	288,284.48	1.51	322,440.00	1.54	291,920.00	1.36
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		15,471,108.22	100	17,19210	100	19,063,888.90	100	20,939,000.00	100	21,531,880.00	100

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2021

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Gowa pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 27,61 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 12,61 persen, lapangan usaha Konstruksi 11,63 persen, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 8,87 persen, lapangan usaha Real Estate 8,37 persen, lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 6,28 persen serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,66 persen. Sementara peranan lapangan usaha-lapangan usaha lainnya masing-masing masih berada di bawah 5 (lima) persen.

Disamping itu terdapat beberapa sektor yang mengalami penurunan di tahun terakhir dimana diantaranya yaitu sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, akomodasi dan makan minum, jasa perusahaan serta jasa lainnya. Adapun penurunan yang terjadi diakibatkan terjadinya Pandemi COVID-19 yang sangat berimbas kepada perekonomian global khususnya Kabupaten Gowa. Sektor yang mengalami penurunan terbesar adalah pada industri pengolahan, disusul kemudian sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Sementara kontribusi sektor-sektor lainnya mengalami peningkatan adalah sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa pendidikan serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang penting karena indikator ini merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan tingkat keberhasilan suatu wilayah dalam meningkatkan output ekonomi yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi dari suatu waktu ke waktu yang lain. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan besarnya PDRB atas dasar harga konstan suatu tahun dengan tahun yang lain.

Tabel 2. 19.
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten
Gowa Tahun 2016 – 2020* (%)

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31.00	30.09	29.14	27.01	27,61
B	Pertambangan dan Penggalian	4.27	4.37	4.57	4.82	4.85
C	Industri Pengolahan	6.63	6.72	6.50	6.78	6.28
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.12	0.13	0.13	0.12	0.13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
F	Konstruksi	10.42	10.67	11.26	11.88	11.63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.67	12.31	12.72	13.11	12.61
H	Transportasi dan Pergudangan	1.67	1.64	1.62	1.68	1.59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.36	2.43	2.45	2.47	2.21
J	Informasi dan Komunikasi	7.78	7.86	7.99	8.21	8.87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.67	2.56	2.50	2.40	2.43
L	Real Estate	8.53	8.41	8.29	8.18	8.37
M,N	Jasa Perusahaan	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.53	5.34	5.22	5.73	5.66
P	Jasa Pendidikan	3.93	3.95	4.00	3.96	4.11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.81	1.83	1.85	1.87	2.08
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.38	1.45	1.51	1.54	1.36
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik , 2021

Tabel 2. 20
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas
Dasar Harga Konstan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

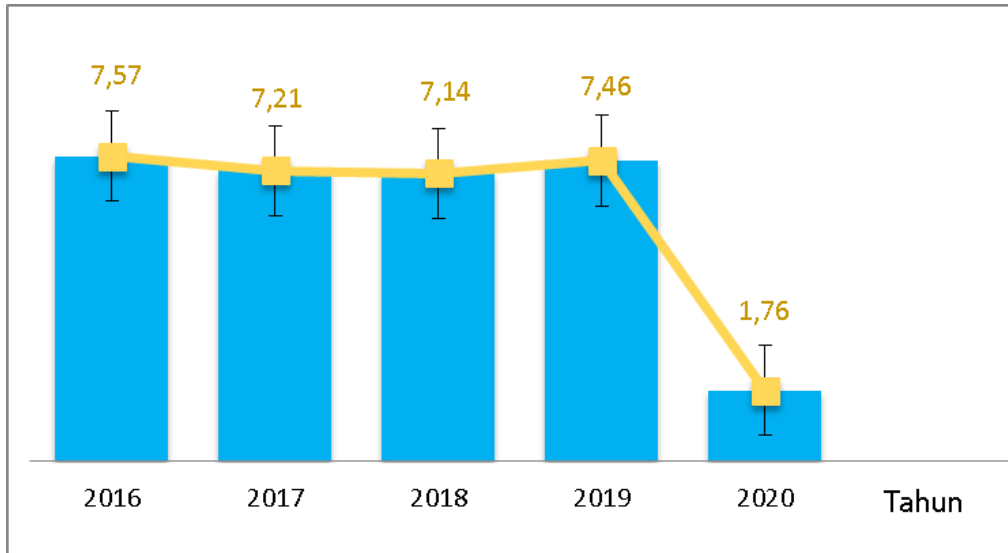
KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,2	4,53	4,4	1,08	2,69
B	Pertambangan dan Penggalian	13,55	13,4	12,65	15,67	1,12
C	Industri Pengolahan	8,13	8,61	4,04	12,37	-6,36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,12	6,87	5,44	4,13	4,82
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,35	6,77	10,09	5,01	8,87
F	Konstruksi	8,16	8,43	8,51	10,01	0,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,6	8,99	9,82	9,27	-2,14
H	Transportasi dan Pergudangan	3,27	6,71	8,92	12,3	-5,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,88	10,13	11,85	7,58	-10,57
J	Informasi dan Komunikasi	10,27	9,87	10,39	11,08	10,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	14,29	1,63	3,8	2,41	4,06
L	Real Estate	9,05	7,43	5,86	6,37	4,53
M,N	Jasa Perusahaan	7,35	8,2	9,28	10,34	-10,79
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,23	4,64	3,61	17,23	-0,29
P	Jasa Pendidikan	6,12	8,61	9,92	6,76	6,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,91	7,01	8,49	8,2	10,38
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,28	11,25	12,81	9,61	-10,44
LAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK		7,57	7,21	7,14	7,46	1,76

Sumber : Badan Pusat Statistik , 2021

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa selama lima tahun terakhir (2016- 2020), struktur perekonomian Kabupaten Gowa didominasi oleh 6 (enam) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Konstruksi, Informasi

dan Komunikasi, Real Estate dan Industri Pengolahan. Secara simultan keenam kategori tersebut memiliki peranan sebesar 75,37 persen terhadap total PDRB Kabupaten Gowa tahun 2021. Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa 2016-2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Grafik 2. 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

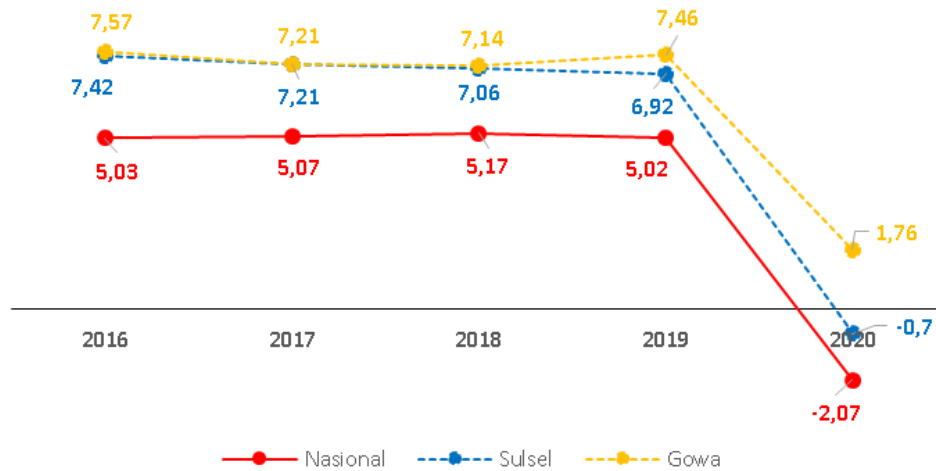


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa (menggunakan tahun dasar 2010) dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 memperlihatkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2017 perekonomian Kabupaten Gowa mengalami pelambatan menjadi 7,21 persen, selanjutnya 2018 mampu kembali melambat 7,14 persen selanjutnya 2019 kembali mengalami peningkatan 7,46 persen kemudian kembali mengalami pelambatan tahun 2020 sebesar 1,76 persen yang dipengaruhi oleh terjadinya Pandemi COVID-19. Berikut gambaran keadaan pertumbuhan ekonomi kabupaten selama 5 tahun terakhir.

Perbandingan Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 disajikan dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 2. 2
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2020



Tingkat LPE Kabupaten Gowa ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan LPE Sulawesi Selatan dan Nasional di tahun 2019 dan 2020, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi makro secara nasional.

Potret perkembangan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Gowa dapat dilihat dari dimensi yang lebih luas lagi. Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak berdiri sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas, melainkan saling bertautan (berkorelasi) dan berinteraksi dengan aspek dan indikator makro lainnya.

Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dan mempengaruhi indikator-indikator pembangunan lainnya. Hal ini berguna untuk dapat melihat kerangka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dan holistik.

2.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi adalah penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Apabila inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Kenaikan harga barang dan jasa tersebut menyebabkan menurunnya nilai tukar mata uang. Keberadaan inflasi ini berhubungan dengan harga dari barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam

suatu wilayah dan mampu mempengaruhi daya beli masyarakat. Kenaikan atau penurunan tersebut dimaknai sebagai laju inflasi.

Laju inflasi Kabupaten Gowa tertinggi terjadi pada saat menjelang perayaan hari besar, hari besar keagamaan dan musim liburan sekolah yang menyebabkan terjadinya lonjakan permintaan barang/jasa jenis tertentu. Selain itu laju inflasi ini dipengaruhi juga faktor cuaca ekstrem sehingga terjadi gangguan pasokan terhadap beberapa komoditas yang menyebabkan timbulnya ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan barang yang selanjutnya akan memacu dan memicu kenaikan harga dan mendorong terjadinya inflasi.

Perhitungan laju Inflasi Kabupaten Gowa, dihitung berdasarkan wilayah bagian atau Region Sulawesi Selatan. Dan dalam hal ini, BPS Kabupaten Gowa menyatakan bahwa Laju Inflasi Kabupaten Gowa berdasarkan Region Kota Makassar.

Untuk lebih jelasnya berikut perbandingan nilai Inflasi Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2016 – 2020 pada tabel berikut ini:

Tabel 2.21
Perbandingan Nilai Inflasi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Laju Inflasi (%)					Rerata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Inflasi Kabupaten Gowa	3.68	3.37	3.48	3.72	2.13**)	-0.31
2	Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan	0.30	1.04	3.50	2.35	2.04	0.35
3	Inflasi Nasional	3.02	3.61	3.13	2.72	1.68	-0.27

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2021

Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan. Indeks implisit juga merupakan indikator turunan dari PDB/PDRB, variable yang diperoleh dari survei yang juga tergantung dari pendekatan perhitungan yang digunakan.

PDRB Per kapita ADHK menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk dan menggambarkan pertumbuhan

nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Besaran PDRB Perkapita suatu daerah tergantung pada besaran PDRB dan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita pun merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk di suatu wilayah sehingga dapat dipakai sebagai salah satu indikator representatif untuk menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk.

PDRB perkapita Kabupaten Gowa, dengan perhitungan tahun dasar 2010, juga mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2015 sebesar 13.752,09 Miliar Rupiah, meningkat di tahun 2016 menjadi 15.471,11 Miliar Rupiah. Dan 17.192,66 Miliar Rupiah di tahun 2017 meningkat lagi sebesar 19.063,89 Miliar Rupiah pada tahun 2018. Dan meningkat menjadi 20.938,87 Miliar Rupiah pada tahun 2019.

Berikut adalah tabel PDRB perkapita tahun 2015–2019 di Kabupaten Gowa sebagai berikut :

Tabel 2. 22
Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK
2010 Kabupaten Gowa Tahun 2015 – 2019

Tahun	PDRB Perkapita ADHB (Milyar Rp)	PDRB Perkapita ADHK (Milyar Rp)
2015	13.752,09	10.380,22
2016	15.471,11	11.166,02
2017	17.192,66	11.971,36
2018*	19.063,89	12.822,68
2019*	20.938,87	13.783,11

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2020

Indikator lain untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita,

sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Sedangkan perkembangan PDRB Perkapita ADHB di Kabupaten Gowa jika dibandingkan dengan PDRB Perkapita

Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 23
Perkembangan PDRB Perkapita ADHB Nasional,
Provinsi dan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

PDRB Perkapita ADHB	2016	2017	2018	2019	2020*
Kabupaten Gowa	21,11	23,08	25,06	27,08	27,45
Provinsi Sulawesi Selatan	43,82	47,82	52,64	56,98	56,51
Nasional	47,96	51,89	56,00	59,10	56,90

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Gowa atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2020 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016, PDRB per kapita tercatat sebesar 21,11 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 mencapai 27,45 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

2.2.1.3. Indeks Gini

Salah satu ukuran distribusi pendapatan yang sering kali digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu daerah dapat menggunakan gini rasio dan kurva Lorenz. Indeks Gini adalah hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0-1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Kriteria klasifikasi ketimpangan berdasar indeks gini sebagai berikut:

- 1. Indeks Gini < 0,3 = Ketimpangan rendah
- 2. 0,3 ≤ Indeks Gini ≤ 0,5 = Ketimpangan moderat
- 3. Indeks Gini ≥ 0,5 = Ketimpangan tinggi

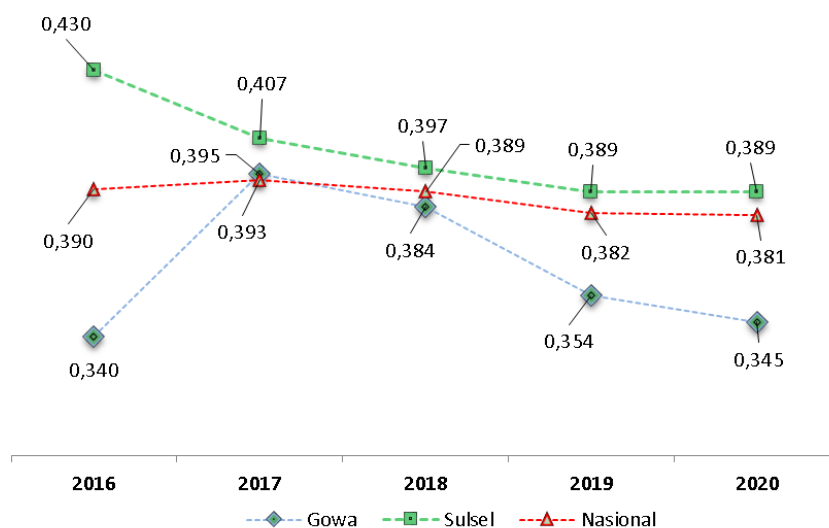
Indeks Gini Kabupaten Gowa selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan berada dikategori kelompok ketimpangan “moderat” karena nilai indeks Gini bernilai angkanya di bawah 0,4. Kondisi ini apabila dicermati lebih dalam, terlihat bahwa jika ditarik garis trendnya menunjukkan adanya tendensi semakin menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin membaik, di mana pada tahun 2015 sebesar 0,38 menurun menjadi 0,34 di tahun 2016 dan meningkat menjadi 0,35 di tahun 2018, akan tetapi meningkat kembali di tahun 2018 menjadi 0,37 dan di tahun 2019 menurun menjadi 0,35.

Tabel 2. 24
Perbandingan Indeks Gini dan Tingkat Ketimpangan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Gini Kabupaten Gowa	0.34	0.395	0.384	0.354	0.345
2	Indeks Gini Provinsi Sulawesi Selatan	0,43	0,407	0,397	0,389	0,389
3	Indeks Gini Nasional	0,39	0,393	0,389	0,382	0,381
4	Kriteria Ketimpangan Kabupaten Gowa	Moderat	Moderat	Moderat	Moderat	Moderat

Sumber : BPS, Indikator Makro Sosial Ekonomi Prov. Sulsel Triwulan IV 2020

Grafik 2. 3
Perbandingan Perkembangan Indeks Gini Nasional, Propinsi dan Kabupaten Gowa Tahun 2016–2020



Sumber : BPS, Indikator Makro Sosial Ekonomi Prov. Sulsel Triwulan IV 2020

Pergeseran angka indeks Gini Kabupaten Gowa yang semakin menurun memperlihatkan adanya pergeseran ke arah peningkatan pemerataan, yang pada dasarnya disebabkan oleh keseimbangan percepatan pertumbuhan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dibandingkan dengan kelompok penduduk berpendapatan rendah. Hal ini berarti bahwa percepatan pertumbuhan kelompok penduduk berpendapatan tinggi yang pada umumnya padat modal dan didukung oleh SDM yang tinggi sejalan dengan kelompok berpendapatan rendah, sehingga memberikan kontribusi yang sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa. Namun demikian upaya tetap harus dilakukan dan diarahkan kepada kelompok penduduk berpendapatan rendah dengan jalan meningkatkan percepatan kemampuan SDM dan pemerataan akses terhadap pelayanan publik serta memberikan perlindungan dalam bentuk kebijakan yang sifatnya prospektif, protektif, *pro poor*, *pro job* dan *pro invovement*.

2.2.1.4. Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Indeks Williamson merupakan pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan wilayah. Perhitungan Indeks Williamson didasarkan pada data PDRB per kapita masing-masing daerah dan jumlah penduduknya. Hasil pengukuran dari nilai Indeks Williamson dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. $IW < 0,4$ artinya tingkat ketimpangan rendah;
- b. $0,4 < IW < 0,5$ artinya tingkat ketimpangan moderat;
- c. $IW > 0,5$ artinya tingkat ketimpangan tinggi.

Jika indeks Williamson semakin mendekati angka 0 itu artinya semakin kecil ketimpangan pembangunan ekonomi dan jika indeks Williamson semakin mendekati angka 1 maka semakin melebar ketimpangan pembangunan ekonomi indeks disparitas wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson (IW) yang digunakan untuk melihat persentase ketidakmerataan dengan skala dimulai dari 0 sampai 1. Terlihat bahwa perkembangan disparitas wilayah antar kecamatan di Kabupaten Gowa sedikit mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 2. 25
Indeks Ketimpangan Williamson Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Ket
2016	0,1505	
2017	0,1521	
2018	0,1536	
2019	0,1544	
2020	0,1544	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Gowa 2020 (Diolah)

Peningkatan nilai Indeks Williamson ini mengindikasikan bahwa tingkat kesenjangan pemerataan wilayah antar kecamatan makin melebar, walaupun secara kategorisasi masih termasuk dalam kesenjangan yang relative rendah atau kesenjangan tersebut berada pada nilai $<0,3$ yang berarti kesenjangan antar wilayah kecamatan tergolong pada kategori rendah.

2.2.1.5. Kemiskinan

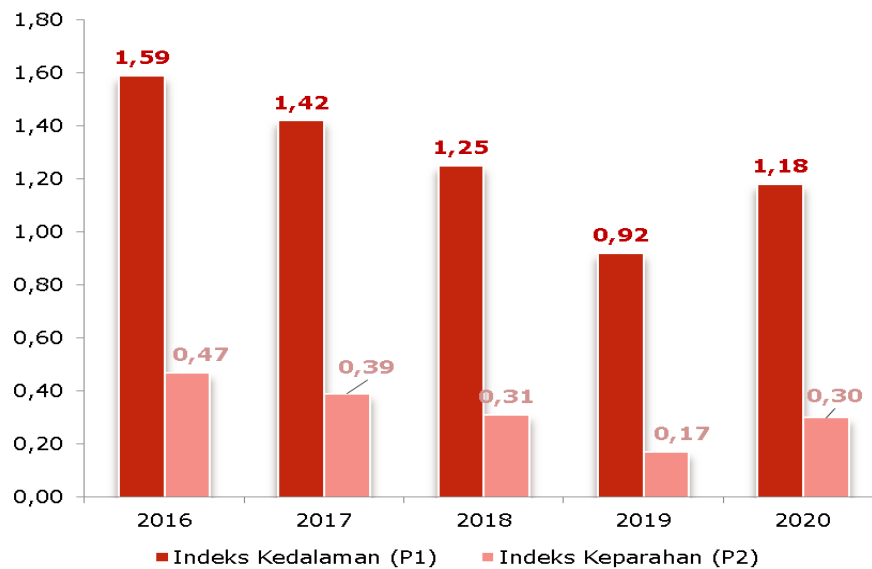
Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran perkapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Garis kemiskinan Kabupaten Gowa selama periode 2016 – 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 garis kemiskinan Kabupaten Gowa tercatat sebesar 316.428 Rupiah/Kapita/Bulan, sedangkan tahun 2017 menjadi sebesar 333.002 Rupiah/Kapita/Bulan, tahun 2018 menjadi 365.503 Rupiah/Kapita/Bulan, tahun 2019 menjadi 385.820 Rupiah/Kapita/Bulan, dan untuk tahun 2020 menjadi 390.917 Rupiah/Kapita/Bulan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode 2016 – 2020 mengalami fluktuasi.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 1,59 di tahun 2016 sedangkan tahun 2017 menjadi 1,42 dan tahun 2018 menurun menjadi 1,25 kemudian tahun 2019 turun menjadi 0,92 akan tetapi mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 1,18. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,47 pada tahun 2016, di tahun 2017 menurun menjadi 0,39. Sedangkan di tahun 2018 menurun kembali menjadi 0,31 dan tahun 2019 menurun menjadi 0,17 akan tetapi di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 0,3.

Grafik 2.4
Indeks Keparahahan dan Indeks Kedalaman Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020



Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2021

Sementara itu jika dilihat dari persentasenya, selama kurun waktu 2016-2020 tingkat kemiskinan Kabupaten Gowa cenderung mengalami penurunan kecuali di tahun 2020 mengalami kenaikan hal ini disebabkan oleh terjadinya Pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan Kabupaten Gowa pada khususnya.

Begitu pula dengan jumlah penduduk miskin cenderung mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2016 sebanyak 61,520 jiwa. Tahun 2017 naik menjadi 62.770 jiwa, menurun menjadi 59,340 jiwa pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 menjadi 57.980 jiwa demikian pula di tahun 2020 menurun menjadi 57.680 jiwa.

Meskipun tingkat kemiskinan Kabupaten Gowa pada 2 (dua) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan tetapi secara nasional masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa terus berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Namun upaya menurunkan kemiskinan tidak hanya

sebatas mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin tetapi juga mencakup penurunan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Berikut adalah tabel penduduk di atas garis kemiskinan tahun 2016–2020 di Kabupaten Gowa.

Tabel 2. 26
Data Kemiskinan Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Garis Kemiskinan Rp/Kapita/bulan	Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	Persentase penduduk miskin	Indeks Kedalaman (P1)	Indeks Keparahan (P2)
1	2016	316.428	61,52	8,40	1,59	0,47
2	2017	333.002	62,77	8,42	1,42	0,39
3	2018	365.503	59,34	7,83	1,25	0,31
4	2019	385.820	57,98	7,53	0,92	0,17
5	2020	390.917	57,68	7,38	1,18	0,30

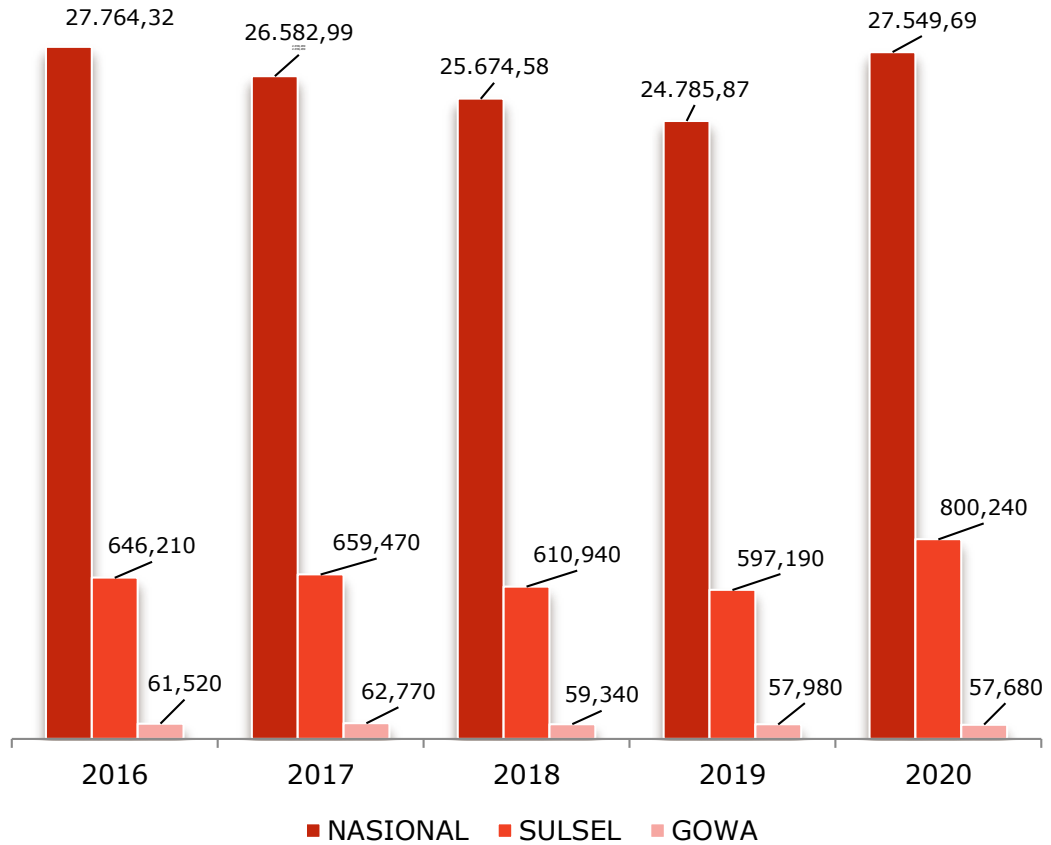
Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2021

Tabel 2. 27
Penduduk Miskin Di Atas Garis Kemiskinan Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2020 (%)

Tahun	Garis Kemiskinan Rph/Kapita/bulan	Jumlah penduduk miskin (jiwa)	Persentase penduduk miskin	Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan (%)
2016	316.428	61,52	8,40	91,60
2017	333.002	62,77	8,42	91,58
2018	365.503	59,34	7,83	92,17
2019	385.820	57,98	7,53	92,47
2020	390.917	57,68	7,38	92,62

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2021

Grafik 2.5
Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Nasional, Provinsi dan
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2020 dan 2021
 *) Data per September 2020

2.2.1.6. Rasio Kesenjangan Kemiskinan

Rasio kesenjangan kemiskinan di Kabupaten Gowa selama lima tahun terakhir menunjukkan penurunan seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28
Rasio Kesenjangan Kemiskinan Kabupaten
Gowa Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Rasio Kesenjangan Kemiskinan
1	2016	1,59
2	2017	1,42
3	2018	1,25
4	2019	0,92
5	2020	0,92

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Gowa, tahun 2021

2.2.1.7. Proporsi Penduduk Dengan Pendapatan Kurang Dari USD 1,00 (PPP) Per Kapita Per Hari

Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari menunjukkan penurunan setiap tahunnya, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 29
Proporsi Penduduk Dengan Pendapatan Kurang Dari USD 1,00 (PPP) Per Kapita Per Hari Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Rasio Kesenjangan Kemiskinan	Ket.
1	2016	8,36	
2	2017	8,39	
3	2018	7,80	
4	2019	7,76	
5	2020	7,76	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Gowa, Tahun 2021

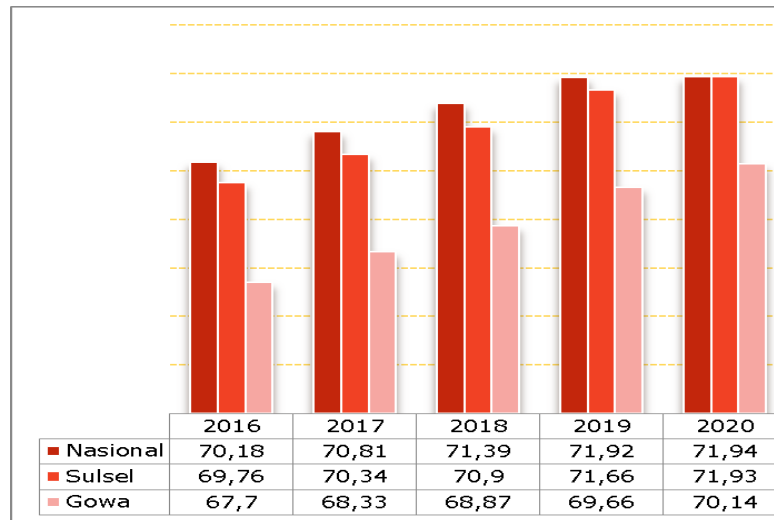
2.2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2) Pengetahuan (*knowledge*); (3) Standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Perkembangan IPM Kabupaten Gowa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, pada tahun 2016 capaian IPM Kabupaten Gowa sebesar 67,7 meningkat menjadi 70,14 pada tahun 2020.

Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang juga sama sama mengalami peningkatan setiap tahunnya. Seperti terlihat pada gambar berikut:

Grafik 2.6
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

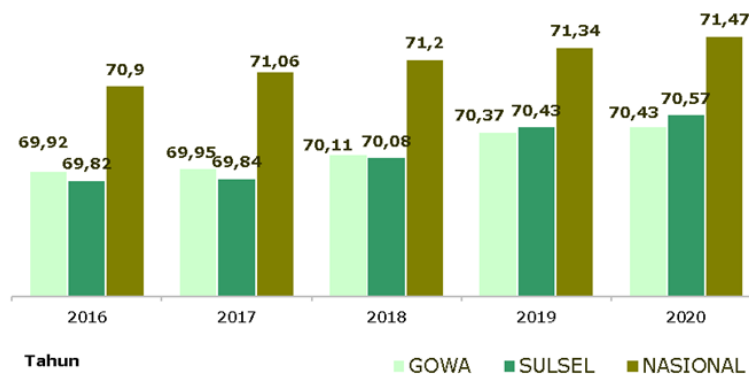


Sumber : BPS, Tahun 2021

a. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup atau disingkat UHH, merupakan angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang dihitung sejak dilahirkan (umur). UHH merupakan salah satu indikator derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, dengan adanya peningkatan UHH saat lahir dapat diindikasikan adanya keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan. Perkembangan UHH Kabupaten Gowa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu mengalami peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Grafik 2.7
Perbandingan Umur Harapan Hidup (Tahun) Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

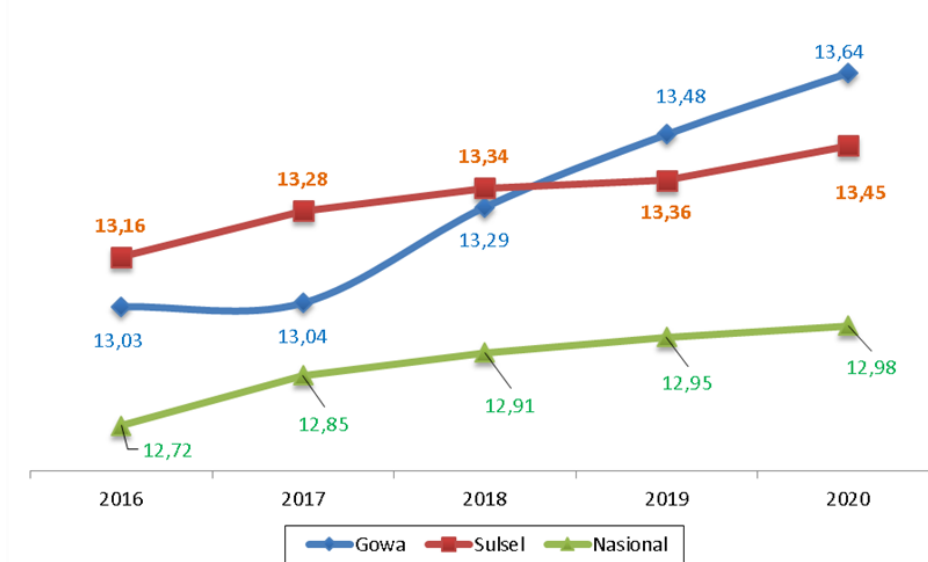


Sumber : BPS, Indikator Makro Sosial Ekonomi Prov. Sul-Sel Triwulan IV 2020

b. Harapan Lama Sekolah

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Gowa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 13,03 tahun dan pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 13,64 tahun. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang juga sama-sama mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Grafik 2.8
Perbandingan Harapan Lama Sekolah (Tahun) Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

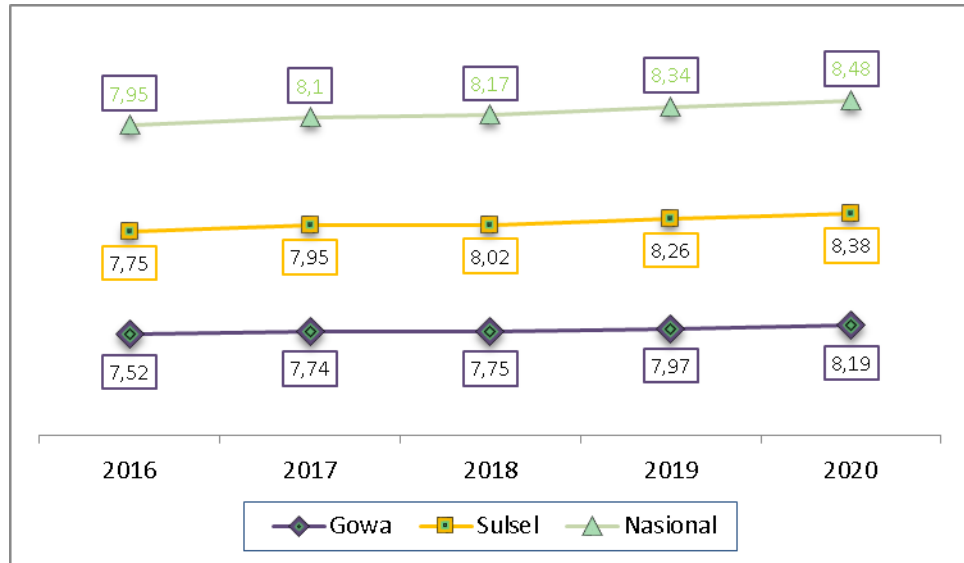


Sumber : BPS, Indikator Makro Sosial Ekonomi Prov. Sul-Sel Triwulan IV 2020

c. Rata-Rata Lama Sekolah

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gowa pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan, dari sebesar 7,52 pada tahun 2016 menjadi sebesar 8,19 tahun pada tahun 2020. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Grafik 2.9
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

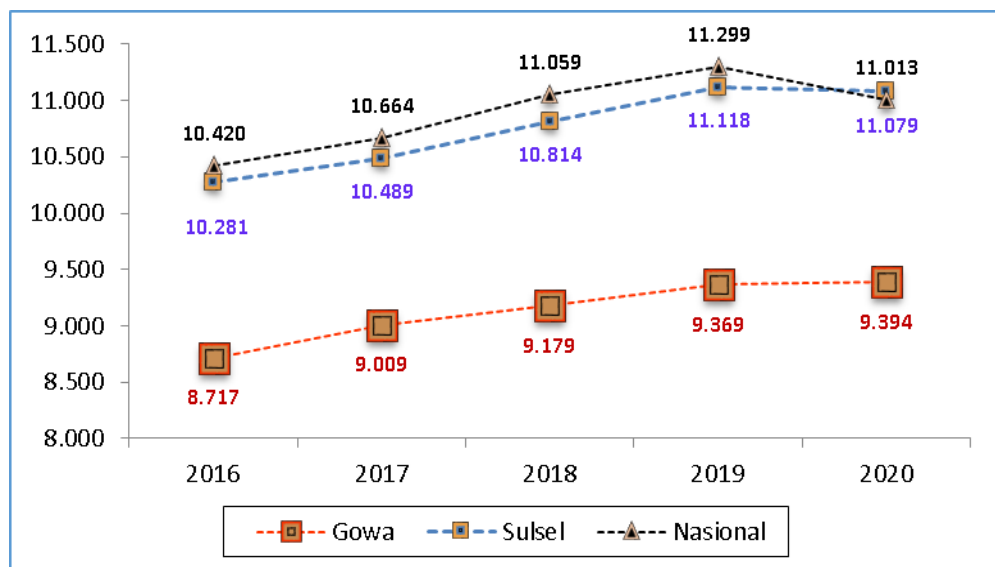


Sumber : BPS, Indikator Makro Sosial Ekonomi Prov. Sul-Sel Triwulan IV 2020

d. Pengeluaran Per Kapita

Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Gowa tahun 2016 hingga tahun 2020 selalu mengalami kenaikan, yaitu dari tahun 2016 sebesar Rp.8.717 ribu dan tahun 2020 menjadi sebesar Rp.9.394 ribu, seperti terlihat pada gambar berikut.

Grafik 2. 10
Perbandingan Pengeluaran Per Kapita (Ribuan Rp) Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS, Indikator Makro Sosial Ekonomi Prov. Sul-Sel Triwulan IV 2020

2.2.2.2. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bias menulis semakin meningkat setiap tahunnya. Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 30
Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten
Gowa Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk (usia 15 tahun keatas) yang bisa menulis	413.977	483.497	484.547	535.244	570.441
2	Jumlah penduduk (usia 15 tahun keatas)	454.494	523.114	523.114	556.954	590.342
3	Angka Melek Huruf	96,70%	92,43%	92,63%	96,10%	96,63%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.2.2.3. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah adalah Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Gowa ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kabupaten Gowa yang lebih baik. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 31
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten
Gowa Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Rata - Rata Lama Sekolah
1	2016	7,52
2	2017	7,74
3	2018	7,75
4	2019	7,97
5	2020	8,19
Rerata Pertumbuhan		7,83

Sumber : BPS, Indikator Makro Sosial Ekonomi Prov. SulSel Triwulan IV 2020

2.2.2.4. Angka Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata lama hidup penduduk di suatu daerah. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat di suatu daerah terutama di sektor kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan angka usia harapan hidup dipengaruhi dari beberapa faktor yang dalam hal ini faktor kesehatan lebih berperan penting selain faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan memengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, peningkatan gizi masyarakat, dan pelayanan kesehatan yang baik.

Berdasarkan angka usia harapan hidup di Kabupaten Gowa di mana selama kurun waktu tahun 2016-2020 terjadi peningkatan angka usia harapan hidup yaitu dari 69.88 tahun di tahun 2016 dan tahun 2020 meningkat menjadi 70,43.

Tabel 2.32
Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kesehatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Usia Harapan Hidup (Thn)	69,88	69,94	69,98	70,01	70,43

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Semakin meningkatnya angka usia harapan hidup penduduk Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa kualitas kesehatan yang semakin baik yang ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan, adanya berbagai jaminan kesehatan seperti Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah), Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dan BPJS Kesehatan.

Akan tetapi dengan adanya peningkatan angka usia harapan hidup, maka berarti juga harus meningkatkan pelayanan dan penjaminan hidup yang layak untuk lansia dan panti jompo sehingga memberikan kemungkinan para lansia untuk tetap beraktivitas dan mendapat pelayanan yang baik dan ke depan diharapkan menjadi kota yang ramah untuk lansia.

Dalam meningkatkan angka usia harapan hidup diperlukan tenaga medis dan kesehatan lainnya seperti angka kesakitan yang menurun, akses ke sarana kesehatan semakin dekat, akses tempat tinggal yang layak huni, kondisi air bersih yang baik, serta meningkatnya pola hidup sehat masyarakat.

2.2.2.5. Persentase Balita Gizi Buruk

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah status gizi. Untuk kondisi status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Perkembangan persentase balita gizi buruk di Kabupaten Gowa dalam kurun waktu 2016-2020 selalu mengalami fluktuasi. Pada di tahun 2016 terdapat 8 kasus atau 0.024% dari 32,810 balita. Tahun 2017 turun lagi menjadi 5 kasus atau 0.015% dari 32.401 balita, pada tahun 2018 terjadi kenaikan 7 kasus yaitu 0,022% dari 32,020 balita, pada tahun 2019 terdapat kenaikan yang signifikan jumlah balita gizi buruk sebanyak 38 kasus yaitu 0,07%, sedangkan di tahun 2020 jumlah balita gizi buruk naik menjadi 57 orang. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya Aplikasi Eppgbm yang memudahkan surveilans gizi dalam menyasar masalah status gizi, sedangkan di tahun-tahun sebelumnya pendataan dilakukan hanya berdasarkan pada buku antropometri.

Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada table beriku :

Tabel 2. 1.3
Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah balita gizi buruk	8	5	7	38	57
2	Jumlah balita	32.810	32.401	32.020	53.821	55.880
	Persentase balita gizi buruk	0,02%	0,02%	0,02%	0,07%	0,10%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.2.2.6. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Perkembangan prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Gowa dalam kurun waktu 2016-2020 selalu mengalami fluktuasi. Di mana pada tahun 2016 sebanyak 192 kasus atau 0.585% dari 32.810 balita. Tahun 2017 meningkat menjadi 2.238 kasus atau 6.907% dari 32.401 balita, tahun 2018 turun menjadi 554 kasus atau 1.730% dari 32.020 balita, tahun 2019 menjadi 3.135 kasus dari 53,821 balita atau sebesar 5,82% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 2.583 kasus dari 55,880 balita atau sebesar 4,62%.

Tabel 2.34
Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Gowa Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Banyaknya balita gizi kurang	192	2.238	554	3.135	2.583
2	Jumlah balita	32.810	32.401	32.020	53.821	55.880
3.	Prevalensi balita gizi kurang	0,59%	6,90%	1,73%	5,82%	4,62%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.2.2.7. Cakupan Desa Siaga Aktif

Cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Gowa pada tahun 2016-2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya, bahkan di tahun 2020 telah mencapai 100%. Untuk lebih jelasnya data cakupan desa siaga aktif dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 35
Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Gowa Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa siaga aktif	110	135	145	160	167
2	jumlah desa siaga yang dibentuk	167	167	167	167	167
3	Cakupan desa siaga aktif	65,87%	80,84%	86,83%	95,81%	100,00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.2.2.8. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam

proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing.

Kesempatan Kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja.

Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) menurut Soemitro Djojohadikusumo didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif.

Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Gowa semakin meningkat setiap tahunnya, kecuali untuk tahun 2016, hal ini dikarenakan BPS tidak merilis jumlah angkatan kerja 15 tahun keatas pada tahun tersebut. Berikut tabel angka partisipasi angkatan kerja tahun 2016-2020 di Kabupaten Gowa.

Tabel 2.36
Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Gowa
Tahun 2016–2020

No	Tahun	Uraian		
		Angkatan Kerja 15 tahun Keatas (jiwa)	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (jiwa)	Angka Partisipasi Angkatan Kerja
1	2016	-	-	-
2	2017	333.179	535.919	62,17%
3	2018	368.466	546.497	67,42%
4	2019	365.559	556.928	65,64%
5	2020	394.000	567.547	69,42%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.2.2.9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Dalam mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari prosentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun.

Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian

penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja.

Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja. Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu jumlah penduduk angkatan kerja dibagi seluruh penduduk usia kerja (berumur 15-64 tahun).

Tabel 2.37
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Penduduk Usia Kerja (jiwa)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
2016	-	-
2017	535.919	62,17
2018	546.497	67,42
2019	556.928	65,63
2020	582.646	67,62

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.2.2.10. Tingkat Pengangguran Terbuka

Persentase tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gowa berfluktuasi dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 6,44%, hal ini merupakan salah satu dampak dari terjadinya Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak perusahaan mengalami gulung tikar. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Penduduk Usia Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2016	-	-
2017	535.919	6,14
2018	546.497	4,80
2019	556.928	4,87
2020	582.646	6,44

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.2.2.11. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jika yang tersedia adalah angka pengangguran, maka angka yang digunakan adalah $= (1 - \text{angka pengangguran})$. Besaran penduduk yang bekerja pada kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Presentase penduduk yang bekerja terhadap total angkatan kerja sangat diharapkan untuk mengurangi jumlah pengangguran terbuka, namun tak kalah pentingnya kualitas tenaga kerja juga perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar.

Tabel 2.39
Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Uraian		
		Penduduk yang bekerja	Angkatan kerja	Rasio penduduk yang bekerja (%)
1	2016	-	-	-
2	2017	312.726	333.179	93,86
3	2018	350.780	368.466	95,20
4	2019	347.773	365.559	95,13
5	2020	368.615	394.000	93,56

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.2.2.12. Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja

Laju pertumbuhan per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja. indikator ini digunakan untuk melihat tingkat produktivitas tenaga kerja.

Tabel 2.40
Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produk Domestik Bruto (PDB)	11.166	11.971	12.826	13.782	14.025
2	Jumlah tenaga kerja	-	312.726	350.780	347.773	368.615
Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)		-	3,83%	3,66%	3,96%	3,80%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.2.2.13. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja) merupakan perbandingan kesempatan kerja penduduk terhadap total penduduk usia 15 tahun ke atas. Pendekatan yang digunakan untuk menghitung kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja (*supply side*) dengan asumsi bahwa jumlah penduduk yang bekerja sama dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. kelebihan dari sisi *supply side* dikurangi dengan *demand side* (penggangguran).

Tabel 2. 41
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kesempatan kerja	-	312.726	350.784	347.773	368.615
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	-	535.919	546.497	556.955	567.547
3	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas	-	58,35%	64,19%	62,44%	64,95%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.2.2.14. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri (BS), pekerja bebas (PB), dan pekerja keluarga (PK) terhadap total kesempatan kerja adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja baik berstatus berusaha sendiri, pekerja bebas dan pekerja keluarga terhadap total penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja (dinyatakan dalam format persentase). Indikator yang digunakan untuk melihat proporsi penduduk bekerja yang memiliki pekerjaan pada kegiatan informal.

Tabel 2. 42
Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan
Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan
Kerja Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga	-	114.451	129.219	127.699	160.226
2	Total kesempatan kerja	-	312.726	350.784	347.773	368.615
	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	-	36,60%	36,84%	36,72%	43,47%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa Tahun 2021

2.2.2.15. Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga.

Keluarga pra sejahtera I adalah keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator "kebutuhan psikologis" (*psychological needs*) keluarga.

Tabel 2. 43
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di
Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Uraian		
		Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Jumlah Keluarga Sejahtera I	Jumlah Keluarga	Cakupan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
1	2016	82.901	171.372	48,37%
2	2017	73.036	183.624	39,77%
3	2018	91.385	377.764	24,19%
4	2019	90.419	188.112	48,07%
5	2020	Tidak dilakukan penghitungan		

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Keberhasilan gerakan Keluarga Berencana (KB) kemudian berkembang menjadi program Keluarga Sejahtera. Keluarga di kategorisasikan kedalam 5 tahapan keluarga, yaitu keluarga Pra

Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, dan Keluarga Sejahtera III Plus.

Persentase cakupan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di Kabupaten Gowa sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Posisi cakupan dimaksud pada tahun 2016-2018 mengalami penurunan, di tahun 2019 meningkat menjadi 48,07%, dan di tahun 2020 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak melakukan penghitungan.

Permasalahan kemiskinan dapat dilihat dari aspek beban kependudukan. Beban masyarakat miskin makin berat akibat besarnya tanggungan keluarga dan tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Menurut data BPS, rumah tangga miskin cenderung mempunyai jumlah anggota rumah tangga yang lebih banyak. Karena rumah tangga miskin cenderung mempunyai tingkat kelahiran yang tinggi. Tingkat kematian anak pada rumah tangga miskin juga relatif tinggi sebagai akibat dari kurangnya pendapatan dan akses kesehatan serta pemenuhan gizi anak mereka. Dengan demikian jumlah anggota rumah tangga yang besar dapat menghambat peningkatan sumber daya manusia masa depan, yang dalam hal ini adalah anak-anak sebagai generasi penerus.

2.2.2.16. Indeks Kepuasan Masyarakat

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah perlu terus ditingkatkan, sehingga kualitas pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat dapat terwujud. Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, maka perlu mengetahui perkembangan kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik melalui kegiatan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara periodik.

Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memiliki pengertian adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 44
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
IKM Tahun 2016-2020	74,9%	75,9%	79,46%	83,86%	83,13%

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.2.2.17. Persentase PAD terhadap Pendapatan

PAD merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang salah satu komponennya adalah pajak daerah. Persentase PAD terhadap pendapatan digunakan untuk mengetahui proporsi PAD pada pendapatan daerah, hal tersebut juga menunjukkan kemandirian fiskal suatu daerah. Adapun persentase PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45
Persentase PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2020

Tahun	Uraian		
	Jumlah Pendapatan Daerah	Jumlah PAD	Persentase PAD terhadap Pendapatan
2016	1.422.740.175.918,20	187.176.036.300,40	13,16%
2017	1.790.263.499.730,15	268.339.203.299,15	14,99%
2018	1.781.396.471.000,37	217.112.642.503,37	12,19%
2019	1.870.608.908.440,64	238.239.570.974,67	12,74%
2020	1.883.818.352.305,74	241.470.562.565,34	12,82%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Dari data pada tabel dibawah dapat dilihat bahwa kemandirian fiskal Kabupaten Gowa masih rendah karena proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah selama tahun 2016-2020 baru mencapai rata-rata dibawah 15 persen.

2.2.2.18. Opini BPK

Opini BPK terhadap laporan keuangan merupakan penilaian ketaatan dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pencapaian indikator kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di dapat dari pemenuhan beberapa kriteria penilaian, seperti kesesuaian standar akuntansi pemerintah,

efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.46 2
Opini BPK Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Opini BPK
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Kabupaten Gowa mendapatkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 9 (sembilan) tahun berturut-turut. Dan untuk tahun 2020, terjadi penurunan pada opini BPK menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

2.2.2.19. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89,5%	89,6%	89,7%	89,8%	89,9%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Berdasarkan Hasil Analisis Konsumsi Pangan pada tahun 2016-2021, kualitas konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Gowa yang ditunjukkan oleh skor PPH, sudah cukup baik meskipun belum mencapai kondisi ideal. Pada tahun 2020 ketersediaan pangan di Kabupaten Gowa sudah cukup beragam. Hal ini dapat dilihat dari jenis pangan yang sudah mencapai skor maksimum, diantaranya umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak serta sayur dan buah, sedangkan kelompok pangan yang belum mencapai skor maksimum selama empat tahun terakhir adalah buah/biji berminyak, kacang-kacangan, dan gula.

2.2.2.20. Penguatan Cadangan Pangan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pada pasal 23 menyatakan bahwa dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, pemerintah menetapkan cadangan pangan nasional. Cadangan pangan nasional terdiri dari atas cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Penguatan cadangan pangan di Kabupaten Gowa pada tahun 2016 tidak dilakukan penghitungan oleh SKPD yang bersangkutan, sedangkan penguatan cadangan pangan pada empat tahun terakhir adalah sebesar 2 ton. penguatan cadangan pangan Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48
Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Cadangan Pangan (Lumbung Pangan Masyarakat)	Penguatan Cadangan Pangan (di Lumbung Pangan Masyarakat)
2016	-	-
2017	2	2 Ton
2018	2	2 Ton
2019	2	2 Ton
2020	2	2 Ton

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.2.2.21. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Penanganan daerah rawan pangan merupakan upaya untuk menangani suatu kondisi ketidakcukupan pangan dan gizi yang dialami oleh rumah tangga. Hasil Analisis Sistem kewaspadaan pangan dan gizi yang menghasilkan peta situasi pangan dan gizi di tingkat wilayah kecamatan digunakan sebagai bahan rekomendasi

bagi pengambilan keputusan dalam penanganan daerah rawan pangan. Penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.49
Penanganan Daerah Rawan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Penanganan Daerah Rawan Pangan	Kecamatan	1	1	2	2	3

Sumber : Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.2.2.22. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB sejak tahun 2016-2020 berfluktuasi, hal tersebut disebabkan beberapa faktor mempengaruhi yakni faktor Iklim (banjir dan kekeringan) serta serangan OPT sering menggagalkan tanam dan panen sehingga produksi tidak sesuai dengan target. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 50
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Kontribusi PDRB sektor Pertanian/ Perkebunan	Jumlah PDRB	Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan
2016	2.479.696,39	15.471.108,20	16,03%
2017	2.576.468,54	17.192.664,10	14,99%
2018	2.670.529,99	19.071.982,70	14,00%
2019	2.647.472,27	20.938.874,40	12,64%
2020	4.192.183,80	21.531.877,30	19,47%

Sumber : Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.2.2.23. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai kontribusi tinggi dalam produksi pertanian, pengukuran kontribusi pertanian khususnya palawija terhadap PDRB mempunyai pengaruh yang besar terhadap keseluruhan PDRB Kabupaten Gowa. Akan tetapi kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB mengalami kenaikan di tahun 2020. Untuk mengetahui kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 51
Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) terhadap PDRB Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Kontribusi sektor Pertanian (Tanaman Pangan)	Jumlah PDRB sektor Pertanian/ Perkebunan	Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB
2016	2.069.261,41	2.479.696,39	83,45%
2017	2.152.983,39	2.576.468,54	83,56%
2018	2.235.156,02	2.670.529,99	83,70%
2019	2.197.473,01	2.647.472,27	83,00%
2020	3.530.233,80	4.192.183,80	84,21%

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.2.2.24. Produktivitas Sektor Pertanian

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa sangat didukung oleh produksi pertanian. Ditengah pembangunan perumahan yang semakin pesat, diharapkan produksi sektor pertanian semakin meningkat dengan menerapkan teknologi tepat guna. Produksi sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) di Kabupaten Gowa selama kurun waktu lima tahun terakhir berfluktuatif, dan mengalami kenaikan di tahun 2020. Produksi sektor pertanian di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52
Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

No	Komoditi	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tanaman Pangan	912.148	969.241	999.271	939.683	964.694
2	Hortikultura	970.126	453.917	542.847	411.458	523.679
	Jumlah	1.882.274	1.423.158	1.542.118	1.351.141	1.488.373

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.2.2.25. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Dengan luas wilayah 1.883,33 kilometer persegi, Kabupaten Gowa mempunyai potensi perkebunan yang besar. Maka dari itu sektor perkebunan berpengaruh terhadap jumlah PDRB Kabupaten Gowa. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 53
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Kontribusi Perkebunan (Tanaman Keras)	Jumlah PDRB sektor Pertanian/ Perkebunan	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB
2016	174.345.220	4.796.251.120	3,64%
2017	180.512.830	5.173.375.050	3,49%
2018	183.901.900	5.558.315.760	3,31%
2019	184.798.330	5.655.581.950	3,27%
2020	291.238.720	5.943.990.000	4,90%

Sumber : Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.2.2.26. Produksi Sektor Perkebunan

Selain pertanian, sektor perkebunan juga mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa. Hasil produksi perkebunan pada jenis-jenis tertentu terkadang mengalami fluktuasi, akan tetapi untuk produksi kopi dan kakao selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Untuk mengetahui produksi sektor perkebunan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 54
Produksi Sektor Perkebunan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

No	Produksi Perkebunan	Tahun (Ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kelapa Dalam	624,67	578,71	614,00	617,69	918,47
2	Kelapa Hibrida	62,34	44,94	29,90	24,82	271,45
3	Kopi Robusta	591,17	689,44	695,00	727,66	742,03
4	Kopi Arabika	1.517,46	1.340,20	1.849,00	1.849,77	713,05

No	Produksi Perkebunan	Tahun (Ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
5	Kakao	1.456,99	1.350,20	1.485,00	1.541,39	477,36
6	Kemiri	55,76	63,07	174,00	145,91	236,09
7	Cengkeh	187,95	268,93	356,00	373,00	609,85
8	Jambu Mete	150,44	142,93	160,00	156,83	155,70
9	Kapuk	23,00	21,84	27,00	26,33	197,72
10	Panili	0,96	0,95	1,47	1,61	83,81
11	Lada	2,65	8,84	11,00	9,18	264,55
12	Pala	1,79	0	2,00	1,89	205,00
13	Karet	0	0	0	0	0
14	Tebu	0	158,56	353,54	916,54	0
15	Kapas	0	0	0	9.566	0
16	Aren	0	0	0	764	7.728,41
17	Tembakau	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.2.2.27. Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB

Dukungan Kabupaten Gowa kepada kelompok tani baik dalam hal peningkatan sumber daya manusia maupun pemberian bantuan alat tani selalu diupayakan meningkat sesuai dengan jumlah kelompok tani yang ada. Maka dari itu kontribusi produksi kelompok tani terhadap PDRB selalu berada pada angka 100%, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 55
Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Produksi Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Hasil Kelompok Petani (ton)	Jumlah Produksi Padi/Bahan Pangan Utama di Daerah (ton)	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB
2016	912.148	912.148	100,00%
2017	969.241	969.241	100,00%
2018	999.271	999.271	100,00%
2019	939.683	939.683	100,00%
2020	964.694	964.694	100,00%

Sumber : Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.2.2.28. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah yang disebabkan berbagai sektor, salah satunya adalah sektor pariwisata. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB pada kurun waktu 2019-2019 mengalami kenaikan, akan tetapi di tahun 2020 menurun sebesar 0,44 persen, hal ini disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.56
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Kontribusi PDRB Dari Sektor Pariwisata (Rp)	Jumlah PDRB (Rp)	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB
2016	579.774,50	15.471.108,20	3,75%
2017	667.164,20	17.192.664,10	3,88%
2018	756.250,30	19.071.982,70	3,97%
2019	839.586,70	20.938.874,40	4,01%
2020*)	767.940,00	21.531.880,00	3,57%

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.2.2.29. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Bila dilihat dari kondisi perairan di Kabupaten Gowa, pada dasarnya pengembangan budidaya perikanan yang dikembangkan adalah perikanan air tawar. Sedangkan perikanan air laut di Kabupaten Gowa tidak terlalu berpengaruh besar, hal ini dikarenakan garis pantai Kabupaten Gowa hanya sepanjang 800 m, sehingga Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB di Kabupaten Gowa selama kurun waktu lima tahun terakhir dibawah 6 persen. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 57
Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap
PDRB Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Kontribusi PDRB Dari Sektor Kelautan dan Perikanan (Rp)	Jumlah PDRB (Rp)	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB
2016	818.935,46	15.471.108,22	5,29%
2017	929.758,63	17.192.664,10	5,41%
2018	1.024.957,42	19.071.982,68	5,37%
2019	1.115.367,75	20.938.874,38	5,33%
2020	1.032.615,62	21.531.877,32	4,80%

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.2.2.30. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor perekonomian yang ikut menyumbang pendapatan atau nilai tambah yang cukup terhadap PDRB. Sektor perdagangan terdiri dari 3 sub sektor yaitu perdagangan besar dan eceran, rumah makan/restoran dan perhotelan. Untuk beberapa tahun kedepan kontribusi sektor perdagangan diharapkan semakin meningkat khususnya di Kabupaten Gowa sebagai daerah penyangga ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Di tahun 2020 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB menurun, hal ini dipengaruhi oleh terjadinya Pandemi COVID 19. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 58
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Kontribusi PDRB Dari Sektor Perdagangan (Rp)	Jumlah PDRB (Rp)	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
2016	1.806.225,93	15.471.108,22	11,67%
2017	2.116.438,90	17.192.664,10	12,31%
2018	2.425.945,00	19.071.982,68	12,71%
2019	2.745.923,50	20.938.874,38	13,11%
2020	1.695.600,00	21.531.880,00	7,87%

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.2.2.31. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

PDRB memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dimana semakin tinggi PDRB maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhannya juga tinggi. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Gowa diharapkan dapat terus menerus meningkatkan PDRB-nya khususnya sektor industri yang memiliki prospek potensial untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan sektor industri merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.59
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Kontribusi PDRB Dari Sektor Industri (Rp)	Jumlah PDRB (Rp)	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
2016	1.025.808,31	15.471.108,22	6,63%
2017	1.154.818,64	17.192.664,10	6,72%
2018	1.240.118,53	19.071.982,68	6,50%
2019	1.420.321,90	20.938.874,38	6,78%
2020	1.353.250,00	21.531.880,00	6,28%

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.2.2.32. Pertumbuhan Industri

Pertumbuhan industri di Kabupaten Gowa pada tahun 2015-2018 menunjukkan peningkatan yang signifikan, khususnya posisi Kabupaten Gowa sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi. Akan tetapi pada tahun 2019 pertumbuhan industri mengalami penurunan sekitar 1,54% dibandingkan tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.60
Pertumbuhan Industri Kabupaten Gowa Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah Industri Tahun n- Jumlah Industri Tahun (n-1)	Jumlah Industri s/d Tahun	Pertumbuhan Industri
2016	24	4.037	0,59%
2017	112	4.149	2,70%
2018	130	4.279	3,04%
2019	65	4.344	1,50%
2020	80	4.424	1,81%

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.3.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita adalah total biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua rumah tangga dibagi dengan banyaknya rumah tangga. Adapun jumlah rumah tangga disini adalah jumlah rumah tangga yang dibagikan kuisioner pada 9 (Sembilan) kecamatan.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.61
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2020

Tahun	Total Pengeluaran Rumah Tangga (Rp)	Jumlah Rumah Tangga	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita (Rp)
2016	424.000.000	270	1.570.370,37
2017	458.600.000	270	1.698.518,52
2018	517.000.000	270	1.914.814,81
2019	531.000.000	270	1.966.666,67
2020	530.200.000	270	1.963.703,70

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.3.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). Nilai Tukar Petani merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan dan juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Nilai Tukar Petani Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 62
Nilai Tukar Petani Kabupaten Gowa Tahun 2016 -
2020

Tahun	Indeks Yang Diterima Petani (It)	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	Nilai Tukar Petani
2016	129,60	123,75	104,73
2017	129,06	127,97	100,85
2018	135,33	132,30	102,29
2019	138,74	134,63	103,05
2020	138,74	134,63	103,05

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.3.3 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Kemiskinan dapat terjadi apabila tingkat pendapatannya tidak dapat memenuhi pengeluaran yang diperlukan untuk kebutuhan hidup. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), hal itu dapat dipengaruhi dua hal, yakni pengeluaran perkapita yang dikategorikan kelompok makanan dan non-makanan. Pengeluaran konsumsi non pangan Perkapita Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.63
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Total Pengeluaran RT Non Pangan (Rp)	Total Pengeluaran (Rp)	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita
2016	427.737	864.762	49,46%
2017	529.824	1.008.146	52,55%
2018	478.399	935.435	51,14%
2019	526.548	1.084.498	48,55%
2020	439.926	835.303	52,67%

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.3.4. Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.64
Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDB Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Ekspor dan Impor Barang dan Jasa	PDB	Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDB
2016	-	-	-
2017	3.383.482,97	13.598.825.000,70	0,02%
2018	2.699.571,36	14.838.311.000,50	0,02%
2019	2.966.976,00	15.833.943.000,40	0,02%
2020	1.467.865,00	15.434.151.000,80	0,01%

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Tabel diatas menggambarkan terjadinya penurunan rasio ekspor dan impor terhadap PDB pada tahun 2020 dimana tahun 2017-2019 memiliki nilai yang konstan. Ekspor akan secara langsung memberi kenaikan penerimaan dalam pendapatan suatu negara. Terjadinya kenaikan penerimaan pendapatan suatu negara

akan mengakibatkan terjadinya kenaikan tingkat PDB. Dengan kata lain ekspor akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi

2.3.5. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Rasa aman merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Seiring dengan itu, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan rasa aman pada seluruh rakyatnya. Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Sejalan dengan itu, statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (kriminalitas) setiap 10.000 penduduk. Angka kriminalitas di Kabupaten Gowa pada tahun 2020 turun drastis jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia termasuk Kabupaten Gowa dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Adanya pengaturan operasional tempat umum, pusat perbelanjaan dan jam malam sehingga hal ini membuat masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah masing-masing. Angka kriminalitas di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65
Angka Kriminalitas yang Tertangani Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Tindak Kriminal Tertangani Dalam 1 Tahun	Jumlah Penduduk	Angka Kriminalitas yang Tertangani
2016	887	735.493	12,06
2017	1.485	748.200	19,85
2018	1.359	760.607	17,87
2019	1.260	772.684	16,31
2020	812	765.836	10,60

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Tahun 2021

Kecenderungan angka kriminalitas yang tertangani kabupaten Gowa 2016-2021 menunjukkan kecenderungan menurun walaupun jumlah kriminalitas masih tinggi hal ini tidak terlepas dari kebijakan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan fokus pada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis pada aspek kerukunan dan ketertiban sosial, serta menjaga kerukunan antar umat beragama.

2.3.6. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas (disebut usia non produktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (usia produktif).

Persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio Ketergantungan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 66
Rasio Ketergantungan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Penduduk Usia <15 + usia >64	Penduduk Usia 15-64	Rasio Ketergantungan
2016	277.069	483.538	57
2017	267.579	493.028	54
2018	258.305	502.302	51
2019	261.623	511.061	51
2020	304.492	461.344	66

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2021

Rasio ketergantungan di Kabupaten Gowa selalu meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2020 angka rasio ketergantungan adalah 66, yang artinya setiap 100 orang berusia produktif di Kabupaten Gowa menanggung 66 orang yang non produktif yaitu usia 0 – 14 tahun dan 65 tahun keatas. Semakin tingginya persentase Rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Kenaikan rasio ketergantungan tentunya membawa dampak bagi kependudukan di Kabupaten Gowa dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan baik dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana, fasilitas-fasilitas umum dan yang terpenting adalah kebijakan dalam rangka mengurangi laju pertumbuhan penduduk dan menurunkan angka beban tanggungan.

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

2.4.1.1. Pendidikan

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Adapun kondisi Pendidikan anak usia dini (PAUD) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Siswa pada Jenjang TK/ RA/Penitipan Anak	Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2016	41.603	43.021	96,70%
2017	30.843	43.852	70,34%
2018	36.008	36.779	97,90%
2019	43.969	44.851	98,03%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan kecenderungan peningkatan persentase jumlah anak usia 4-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Jenjang TK/ RA/Penitipan Anak mengindikasikan perkembangan PAUD di Kabupaten Gowa sangat baik baik yang difasilitasi oleh pemerintah dan prakarsa masyarakat.

2) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 68
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	APK SD/MI	APK SMP/MTs	APK SMA/MA/SMK
2016	111,34	72,84	72,70
2017	113,26	79,58	64,44
2018	110,61	92,85	80,61
2019	104,51	104,25	89,99
2020	104,89	99,20	88,95

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dan Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Capaian tingkat APK Kabupaten Gowa pada tahun 2020 untuk tingkat SD/MI telah melampaui 100 persen, yaitu 104,89 persen untuk APK SD/MI namun untuk APK SMP/MTs sebesar 99,20 persen dan SMA/SMK/MA sebesar 89,95 persen. Hal ini tidak terlepas oleh adanya kebijakan penguatan Pendidikan selama ini telah dilakukan dengan baik.

Hal ini memberikan informasi mengenai tingkat serapan pendidikan dan partisipasi penduduk pada setiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi APK berarti semakin tinggi pula akses penduduk suatu daerah terhadap pendidikan, serta semakin tinggi tingkat kemampuan daerah tersebut dalam penyelenggaraan otonomi daerah. APK pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Gowa dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan, walaupun terdapat penurunan pada tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di tahun 2020. APK Kabupaten Gowa pada setiap jenjang pendidikan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

3) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap

jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Selengkapnya dapat dilihat pada beberapa tingkat pendidikan berikut:

Tabel 2. 39
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jenjang Pendidikan		
	SD/MI/Paket A	SMP/MTs/Paket B	SMA/SMK/MA/Paket C
2016	99,50	68,21	63,88
2017	97,92	72,22	59,70
2018	95,82	73,57	59,04
2019	97,92	72,22	59,70
2020	97,01	74,27	60,50

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Capaian APM Kabupaten Gowa pada tahun 2020 secara umum untuk jenjang pendidikan SD/MI telah mencapai 97,01 persen sedangkan untuk jenjang SMP/MTs/Paket B sebesar 74,24 persen, jenjang SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 60,50 persen.

Secara trend capaian APM tahun 2016 ke tahun 2020 untuk jenjang pendidikan SD/MI/Paket A dan SMA/SMK/MA/Paket C mengalami penurunan sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B mengalami peningkatan walaupun persentasenya belum mencapai 100 persen.

Angka partisipasi murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Hal ini juga dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dari program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah, sebab pengukuran APM menggunakan perbandingan antara jumlah

siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk pada usia sekolah yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan.

4) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Selengkapnya dapat dilihat pada beberapa tingkat pendidikan berikut :

Tabel 2. 70
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Kabupaten
Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jenjang Pendidikan		
	SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SMA/SMK/MA/ Paket C
2016	-	-	-
2017	0,26 %	0,0092 %	1,37 %
2018	0,26 %	0,0045 %	1,09 %
2019	0,27 %	0,0055 %	1,04 %
2020	0,29 %	0,0078 %	0,96 %

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbudristek 2021 (Diolah)

Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan adalah angka putus sekolah, yaitu indikator yang mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

Data yang tersedia menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Kabupaten Gowa pada periode 2017 sampai dengan 2021 cukup rendah (dibawah 1 persen), namun demikian untuk jenjang pendidikan SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B menunjukkan kecenderungan peningkatan. Kecilnya angka putus sekolah tersebut diantaranya disebabkan oleh adanya kebijakan program pendidikan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah periode 2016-2021.

5) Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs

Angka kelulusan sebagai salah satu indikator yang mencerminkan keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Semakin baik proses belajar mengajar, maka persentase angka kelulusan semakin baik pula. Selengkapny dapat dilihat pada beberapa tingkat pendidikan berikut.

Tabel 2.71
Angka Kelulusan (AL) SD/MI Kabupaten
Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Angka Kelulusan	
	SD/MI/Paket A	SMP/MTs/Paket B
2016	100 %	100 %
2017	100 %	100 %
2018	100 %	100 %
2019	100 %	100 %
2020	100 %	100 %

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Tahun 2021

Capaian angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B secara konsisten mencapai 100 persen, keberhasilan ini tidak terlepas dari beberapa program strategis daerah dibidang pendidikan seperti Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB).

6) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Angka melanjutkan adalah persentase jumlah lulusan pada setiap jenjang pendidikan yang melanjutkan ke jenjang berikutnya. Angka Melanjutkan berguna untuk melihat apakah penduduk usia sekolah menyelesaikan pendidikannya dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak. Idealnya adalah semua lulusan melanjutkan pendidikannya ke jenjang berikutnya. Selengkapny dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.42
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Kabupaten
Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Siswa Baru Tingkat I pada jenjang SMP/MTs	Jumlah Lulusan Pada Jenjang SD/MI Tahun Ajaran Sebelumnya	Angka Melanjutkan(AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
2016	13.624	14.144	96,32%
2017	12.312	12.945	95,11%
2018	12.945	12.945	100,00%
2019	13.101	13.101	100,00%
2020	11.762	12.375	95,05%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Angka Melanjutkan Kabupaten Gowa dari SD/MI ke SMP/MTs berfluktuasi dalam kurun waktu tahun 2016-2020, bahkan cenderung menurun pada tahun 2017, capaian ini

menunjukkan bahwa masih terdapat siswa SD yang tamat namun tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan menengah. Beberapa faktor yang menghambat pencapaian target angka melanjutkan di Kabupaten Gowa adalah kemiskinan yang menyebabkan masih terdapat beberapa siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu yang harus membantu perekonomian.

7) Fasilitas Pendidikan

Fasilitas adalah sarana dan prasarana yang harus tersedia untuk melancarkan kegiatan pendidikan di sekolah. Sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa fasilitas pendidikan yang ditampilkan adalah bangunan sekolah dalam kondisi baik. Adapun fasilitas yang akan disajikan dalam dokumen ini adalah kondisi bangunan sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang ada di Kabupaten Gowa.

a) Ruang Kelas dalam Kondisi Bangunan Baik

Ruang kelas dengan kondisi bangunan baik merupakan perbandingan antara Ruang Kelas dengan kondisi bangunan baik dengan jumlah seluruh ruang kelas yang dinyatakan dalam persen. Ruang Kelas mempunyai jumlah ruang kelas yang berbeda-beda dan kondisi ruang kelas terbagi atas 4 (empat) kondisi yaitu kondisi baik, rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Sekolah yang mempunyai ruang kelas dengan kondisi baik dan rusak ringan dinyatakan sebagai sekolah dengan kondisi bangunan baik karena ruang kelas yang rusak ringan bisa di biayai oleh dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Tabel 2.73
Ruang Kelas dalam Kondisi Bangunan Baik
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Ruang Kelas dalam Kondisi Baik		
	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA
2016	77,26	95,03	99,41
2017	87,90	89,78	97,25
2018	87,56	87,74	95,94
2019	86,42	88,79	96,26
2020	88,75	92,84	94,93

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbudristek 2021 (Diolah)

8) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah dapat menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah ini dihitung untuk tiap 10.000 penduduk. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.74
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Sekolah (SD/MI+SMP/MTs)	Jumlah Penduduk Usia (7 s.d 12) thn + (13 s.d 15) thn	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar
2016	658	123.546	53,26
2017	667	125.783	53,03
2018	671	113.655	59,04
2019	674	128.089	52,62
2020	674	130.726	51,56

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Gowa Dalam Angka Tahun 2021

Rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Gowa menurun dalam jangka waktu dua tahun terakhir, hal ini disebabkan oleh semakin bertambah jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun sedangkan jumlah sekolah tidak bertambah.

9) Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan jenjang pendidikan per jumlah murid pendidikan dasar. Rasio guru/murid ini dihitung untuk mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pembelajaran. Rasio jumlah guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) dan pendidikan menengah Kabupaten Gowa disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.75
Rasio Guru/Murid Sekolah semua jenjang pendidikan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Rasio Guru/Murid		
	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA
2016	1 : 19	1 : 18	1 : 17
2017	1 : 16	1 : 16	1 : 19
2018	1 : 20	1 : 16	1 : 18
2019	1 : 17	1 : 15	1 : 18
2020	1 : 17	1 : 15	1 : 23

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbudristek 2021 (Diolah)

Jika mengacu pada dasarnya rasio guru/murid ideal untuk kelas yaitu 1 : 36 maka Rasio jumlah guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) dan pendidikan menengah Kabupaten Gowa sudah menunjukkan kondisi yang ideal.

10) Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-25 Tahun, Perempuan dan Laki-Laki

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka melek huruf berkisar antara 0-100 persen. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. Indikator ini dapat dijadikan gambaran peningkatan kualitas sumber daya manusia disuatu daerah, selengkapnya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 76
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Banyaknya Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Melek Huruf	Banyaknya Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas
2016	413.977	454.494	91,09%
2017	513.497	523.114	98,16%
2018	487.347	493.708	98,71%
2019	535.244	555.145	96,42%
2020	570.411	590.342	96,62%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Angka Melek Huruf di Kabupaten Gowa selama kurun waktu lima tahun terakhir bergerak fluktuatif tapi kesemuanya diatas angka 90 persen. Untuk AMH Kabupaten Gowa pada tahun 2019 sebesar 96,42 persen, artinya sekitar 96 persen penduduk di Kabupaten Gowa yang berumur 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.

11) Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Distribusi Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 untuk semua jenjang pendidikan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.77
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jenjang Pendidikan			Total
	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	
2016	84,20	86,30	96,25	88,92
2017	92,00	96,10	96,70	94,93
2018	88,90	92,60	96,65	92,72
2019	90,60	95,50	98,15	94,75
2020	73,10	93,00	90,70	85,60

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbudristek 2021 (diolah)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 9 mengamanatkan setiap guru wajib memperoleh kualifikasi akademik minimal S1/D4. Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Gowa sudah mencapai diatas 90 persen di tahun 2014 namun kembali mengalami penurunan ditahun 2020 sebesar 85,60 persen.

2.4.1.2. Kesehatan

1) Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* (IMR) merupakan indikator yang lazim digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat, sehingga program-program kesehatan banyak yang menitikberatkan pada upaya penurunan AKB, dimana AKB merujuk pada jumlah bayi yang meninggal antara fase kelahiran hingga bayi umur < 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup.

Distribusi angka kematian bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup (Kasus) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.78
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup
(Kasus) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Bayi Usia 0-11 bulan yang Meninggal di Suatu Wilayah Pada Kurun Waktu Tertentu	Jumlah Kelahiran Hidup di Wilayah dan Pada Kurun Waktu Yang Sama	Angka Kematian Bayi (AKB)
2016	99	12.668	8
2017	75	12.652	6
2018	42	13.051	3
2019	47	13.555	3
2020	41	13.515	3

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

AKB di Kabupaten Gowa selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan yang signifikan hal ini dikarenakan adanya beberapa perbaikan, diantaranya peningkatan kualitas kesehatan ibu semasa hamil serta penanganan dan pemantauan bayi baru lahir secara adekuat, dengan adanya program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

2) Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 kelahiran

Angka Kelangsungan Hidup Bayi merupakan peluang bayi hidup sampai dengan usia satu tahun. Angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Gowa selama kurun waktu lima tahun menunjukkan penurunan. Hal ini menunjukkan, masih perlunya kerja keras stakeholder terkait untuk terus meningkatkan angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Gowa.

Tabel 2. 79
Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 kelahiran
(Kasus) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kelangsungan Hidup Bayi	992	941	997	997	997

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

3) Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Balita merupakan jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur

yang sama pada pertengahan tahun itu. Angka Kematian Balita di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.80
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup
(kasus) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	6	9	11	5	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

4) Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Kematian neonatal merupakan kematian seorang bayi yang dilahirkan hidup dalam 7 hari setelah kelahiran, di kenal juga dengan istilah kematian neonatal dini/perinatal. Kematian Neonatal dari tahun 2015 - 2019 cenderung menurun. Kondisi bayi baru lahir bermasalah disebabkan oleh kualitas kesehatan ibu pada masa sebelum dan saat hamil yang mempengaruhi kondisi kesehatan bayi baru lahir, dan kualitas kesehatan ibu hamil ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial budaya. Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.81
Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup
(Kasus) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup	6	5	3	3	3

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

5) Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Indikator ini menunjukkan Angka kematian ibu pada saat hamil, bersalin dan nifas dari per 100.000 kelahiran, Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.82
Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup (Kasus)
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Ibu Hamil Yang Meninggal Karena Hamil, Bersalin dan Nifas di Wilayah Tertentu selama 1 Tahun	Jumlah Kelahiran Hidup di Wilayah Tersebut dan Pada Kurun Waktu Yang Sama	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup
2016	18	12.668	142
2017	13	12.655	103
2018	17	13.051	130
2019	14	13.555	103
2020	15	13.515	111

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Data kematian ibu selama tahun 2016-2020 cenderung berfluktuasi. Beberapa faktor penyebab terjadinya kondisi ini diantaranya kondisi fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana di beberapa kabupaten untuk penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal masih belum optimal dan distribusi SDM kesehatan yang kompeten untuk kasus kegawat daruratan belum merata ditingkat puskesmas. Selain itu sistem rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar ke fasilitas rujukan belum seluruhnya berjalan optimal. Kebijakan Sistem Rujukan yang belum efektif untuk kasus-kasus darurat sehingga terlambat mencapai fasilitas kesehatan.

6) Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Tujuan posyandu antara lain menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, membudayakan NKBS, meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera dan berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera.

Rasio posyandu di Kabupaten Gowa meningkat selama kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah Posyandu yang ada di Kabupaten Gowa.

Rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.83
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio Posyandu Per Satuan Balita
2016	715	60.636	11,79
2017	734	61.153	12,00
2018	765	57.023	13,42
2019	776	59.201	13,12
2020	782	55.880	13,9

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

7) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama saat ini dimana Puskesmas menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan tersebut dalam memenuhi pelayannya kepada penduduk, dengan demikian pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.84
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	Jumlah Penduduk	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
2016	200	735.493	0,27
2017	189	748.200	0,25
2018	189	760.607	0,25
2019	158	772.684	0,20
2020	151	765.836	0,19

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka, Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa Tahun 2021

8) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit terhadap jumlah penduduk. Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.85
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Rumah Sakit	Jumlah Penduduk	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
2016	1	735.493	0,0014
2017	1	748.200	0,0013
2018	2	760.607	0,0026
2019	2	772.684	0,0026
2020	3	765.836	0,0039

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka, Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

9) Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk ini menggambarkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter yang diukur berdasarkan jumlah dokter per 1.000 penduduk. Rasio dokter memperlihatkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya, salah satu penyebabnya adalah adanya pengangkatan CPNS tenaga medis khususnya dokter di Kabupaten Gowa. Rasio dokter persatuan penduduk di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.86
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Dokter	Jumlah Penduduk	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
2016	141	735.493	0,192
2017	95	748.200	0,127
2018	153	760.607	0,201
2019	178	772.684	0,230
2020	204	765.836	0,266

Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD, Tahun 2021

10) Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dan cakupan

pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk. Jumlah tenaga medis di Kabupaten Gowa berkurang secara signifikan di tahun 2020, hal ini dikarenakan adanya tenaga medis yang telah memasuki purna bakti, pindah tugas ke daerah lain dan adanya tenaga medis yang meninggal dunia. Rasio tenaga medis di Kabupaten Gowa selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.87
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Tenaga Medis	Jumlah Penduduk	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
2016	316	735.493	0,429
2017	260	748.200	0,348
2018	352	760.607	0,463
2019	354	772.684	0,458
2020	205	765.836	0,268

Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD, Tahun 2021

11) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, dan RSUD). Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.88
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Komplikasi Kebidanan Yang Mendapat Penanganan Definitif di Satu Wilayah Kerja Pada Kurun Waktu Tertentu	Jumlah Ibu Dengan Komplikasi Kebidanan di Satu Wilayah Kerja Pada Kurun Waktu Yang Sama	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani
2016	2.166	2.783	77,83%
2017	2.038	2.780	73,31%
2018	2.130	2.757	77,26%
2019	2.187	3.021	72,39%
2020	1.546	3.021	51,18%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

12) Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.89
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Ibu Bersalin Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan di Satu Wilayah Kerja Pada Kurun Waktu Tertentu	Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin di Satu Wilayah Kerja Dalam Kurun Waktu Yang Sama	Cakupan Pertolongan
2016	12.570	13.272	94,71%
2017	13.318	13.898	95,83%
2018	13.016	13.179	98,76%
2019	13.304	13.304	100,00%
2020	13.456	14.488	92,88%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

13) Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Indikator keberhasilan program imunisasi adalah tercapainya *Universal Child Immunization* (UCI) ialah cakupan imunisasi dasar lengkap bayi secara merata pada bayi di 100% desa/kelurahan. Cakupan desa/kelurahan UCI di Kabupaten Gowa turun di tahun 2020 menjadi 90,42%, hal ini dipengaruhi oleh terjadinya Pandemi COVID-19 sehingga tidak dilaksanakan sweeping imunisasi.

Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kontak fisik selama masa pandemik. Cakupan desa/kelurahan UCI di Kabupaten Gowa selama lima tahun terakhir telah mencapai 100% seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 90
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization
(UCI) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Desa/ Kelurahan UCI	Jumlah Seluruh Desa/Kelurahan	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
2016	167	167	100%
2017	167	167	100%
2018	167	167	100%
2019	167	167	100%
2020	151	167	90,42%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

14) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita gizi buruk mendapat perawatan adalah jumlah balita gizi buruk yang di temukan dan telah mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan dibagi dengan jumlah keseluruhan balita yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama dikali seratus persen. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.91
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten
Gowa Tahun 2016– 2020

Tahun	Jumlah Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Sarana Pelayanan Kesehatan di Satu Wilayah Kerja Pada Kurun Waktu Tertentu	Jumlah Seluruh Balita Gizi Buruk Yang Ditemukan di Satu Wilayah Kerja Dalam Waktu Yang Sama	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
2016	8	8	100,00%
2017	4	4	100,00%
2018	7	7	100,00%
2019	38	38	100,00%
2020	57	57	100,00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

15) Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar Yang Digunakan Indonesia 2.100 Kkal/Kapita/Hari)

Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum diindikasikan oleh masih tingginya prevalensi *stunting* yang disebabkan oleh kurang asupan gizi dalam waktu

cukup lama. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.92
Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat
Konsumsi Minimum Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Banyaknya Penduduk yang Tingkat Konsumsinya Lebih Rendah dari 2.100 Kkal/Kapita/Hari	Jumlah Balita	Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum
2016	1.832,0	60.636	3,02%
2017	1.833,0	61.153	3,00%
2018	1.817,6	57.023	3,19%
2019	1.777,2	59.201	3,00%
2020	1.896,2	55.880	3,39%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa Tahun 2021

16) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Penemuan pasien baru TB BTA Positif adalah penemuan pasien TB melalui pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan sewaktu (SPS) dan diobati di unit pelayanan kesehatan dalam suatu wilayah kerja pada waktu tertentu. Pasien baru adalah pasien yang belum pernah diobati dengan OAT atau sudah pernah menelan OAT kurang dari satu bulan (30 dosis) harian. Sedangkan penanganan/pengobatan adalah pemberian pengobatan pada pasien baru TB BTA positif dengan OAT selama 6 bulan.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA merupakan cakupan dari jumlah penderita TBC/BTA (+) yang ditemukan dan diobati disuatu wilayah kerja selama 1 tahun dibagi dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC/BTA (+) dalam kurun waktu yang sama. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/BTA di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.93
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit
TBC BTA Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021

Tahun	Jumlah Penderita Baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan Diobati di Satu Wilayah Kerja Selama 1 Tahun	Jumlah Perkiraan Penderita Baru TBC BTA (+) Dalam Kurun Waktu Yang Sama	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
2016	701	1.430	49,02%
2017	633	1.513	41,84%
2018	769	1.860	41,34%
2019	1.039	2.290	45,37%
2020	632	1.761	10,19%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

17) Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi kronis yang menyerang paru dan merupakan salah satu penyebab kematian dengan jumlah yang tinggi. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) di Kabupaten Gowa dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.94
Tingkat Prevelensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Banyaknya Kasus Penderita TBC (baru dan lama)	Jumlah Penduduk pada Kurun Waktu Yang Sama	Tingkat Prevelensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
2016	1.190	735.493	161,80
2017	1.464	748.200	195,67
2018	1.578	760.607	207,47
2019	1.731	772.684	224,02
2020	949	765.836	123,92

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

18) Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tingkat kematian karena tuberkulosis dihitung berdasarkan perbandingan jumlah pasien TB yang meninggal terhadap jumlah penduduk per 100.000 jiwa. Tingkat Kematian karena Tuberculosis di Kabupaten Gowa selama lima tahun terakhir terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.95
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Pasien TB Yang Meninggal	Jumlah Penduduk Pada Kurun Waktu Yang Sama	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis
2016	0	735.493	0
2017	16	748.200	2
2018	28	760.607	4
2019	12	772.684	2
2020	30	765.836	4

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

19) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD merupakan persentase atas jumlah penderita DBD yang ditemukan dengan jumlah penderita DBD yang ditangani. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD pada Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.96
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Penderita DBD yang Ditangani Sesuai SOP di Satu Wilayah Kerja Selama 1 Tahun	Jumlah Penderita DBD yang Ditemukan di Satu Wilayah Dalam Kurun Waktu Yang Sama	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD
2016	429	429	100,00%
2017	147	147	100,00%
2018	196	196	100,00%
2019	473	473	100,00%
2020	439	439	100,00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) pada tahun 2020 di Kabupaten Gowa sebanyak 439, ini berarti menurun dibanding tahun 2019 yang hanya terdapat 473 Kasus namun masih tergolong tinggi. Permasalahan dalam upaya pengendalian DBD antara lain : masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk secara terus menerus sebagai upaya yang efektif dalam pencegahan penyakit DBD dan belum optimalnya penggunaan analisa data dalam perencanaan kegiatan Pengendalian DBD oleh petugas Puskesmas.

20) Penderita Diare yang ditangani

Diare adalah buang air besar lembek/cair bahkan dapat berupa air saja yang frekuensinya lebih sering dari biasanya. Penderita diare yang ditangani merupakan persentase penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader disuatu wilayah dalam waktu satu tahun terhadap jumlah perkiraan penderita diare dalam suatu wilayah tertentu pada waktu yang sama dimana 10% dari angka kesakitan dikalikan jumlah penduduk. Penderita diare yang ditangani di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.97
Penderita Diare yang Ditangani Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun	Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)
2016	16.450	18.553
2017	20.234	14.705
2018	8.469	20.303
2019	7.139	20.862
2020	3.478	20.678

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Pada tahun 2020 kasus diare pada semua umur sebanyak 20.678 kasus dan tahun 2019 sebanyak 20.868 kasus. Hal ini menunjukkan adanya penurunan yang dikarenakan meningkatkan jumlah desa ODF di Kabupaten Gowa dan kondisi pandemi covid-19 dimana masyarakat memilih untuk melakukan pengobatan sendiri di rumah terlebih dahulu.

21) Angka Kejadian Malaria

Angka kejadian malaria merupakan indikator untuk mengetahui insiden penyakit malaria pada satu daerah tertentu selama satu tahun. Jumlah penduduk yang menderita di Kabupaten Gowa selama lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. Angka kejadian malaria di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.98
Angka Kejadian Malaria Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu	Jumlah penduduk pada pertengahan tahun	Angka Kejadian Malaria	Tingkat Kematian Akibat Malaria
2016	15	735.493	2,04	0
2017	10	748.200	1,34	0
2018	7	760.607	0,92	0
2019	9	764.970	1,18	0
2020	4	765.836	5,22	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Pada tahun 2019, di Kabupaten Gowa ditemukan 9 kasus positif malaria. Sementara di Tahun 2020 ditemukan 4 kasus, yang artinya meningkat dibanding tahun 2019. Tingkat kematian akibat Malaria tahun 2016-2020 sebesar 0.

Penegakan diagnosa malaria yang dilakukan adalah dengan pemeriksaan mikroskopis. Semua kasus positif malaria mendapat pengobatan ACT. Dalam hal pengobatan malaria, dilakukan pemantauan minum obat malaria oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten bersama dengan puskesmas. Tujuannya untuk memastikan obat malaria yang diberikan diminum dengan teratur dan tepat, untuk mencegah terjadinya kegagalan pengobatan yang bisa berakibat terjadinya kekambuhan dan resistensi obat.

Dilakukan penyelidikan epidemiologi pada semua kasus malaria untuk mengetahui kronologis riwayat sakit dan pengobatan untuk menentukan klasifikasi kasus, mencari kasus atau tersangka lain di sekitar penderita, dan pengamatan vektor di lingkungan tempat tinggal penderita.

22) Prevelensi HIV/AIDS (persen)

HIV dan AIDS merupakan penyakit yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual dan penggunaan jarum suntik yang sering dikaitkan dengan kesehatan reproduksi terutama

perempuan. Persentase Prevalensi HIV/AIDS merupakan jumlah pasien HIV dan AIDS terhadap total populasi penduduk. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.99
Prevelensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Jumlah penduduk disatu wiayah kerja pada kurun waktu yang sama	Prevelensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	55	751.981	0,007%
2019	103	772.684	0,013%
2020	20	765.836	0,0026%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Gowa masih menjadi permasalahan. Pada tahun 2020 penemuan HIV/AIDS sebanyak 20 kasus, turun dibanding tahun 2019 yang sebanyak 103 kasus.

23) Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Terakhir

Salah satu kegiatan penanggulangan HIV adalah mengupayakan peningkatan penggunaan kondom pada setiap hubungan seks berisiko. Jumlah penduduk Kabupaten Gowa usia 15-24 tahun yang memakai kondom berhubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.100
Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Terakhir
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Banyaknya penduduk usia 15-24 thn yang memakai kondom berhubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir	Banyaknya penduduk usia 15-24 tahun yang melakukan hubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir	Prevelensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi
2016	0	0	0
2017	86	75	1,15
2018	113	99	1,14
2019	209	195	1,07
2020	205	222	0,9

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

24) Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS

Jumlah pasien HIV dan AIDS di Kabupaten Gowa dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 48 orang (sesuai dengan tabel 2.135). Tingkat pengetahuan mengenai HIV dan AIDS di antara penduduk kebanyakan di usia 15-24 tahun di Kabupaten Gowa masih berkisar 0,05% di tahun 2019. Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 101
Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki
Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS di satu wilayah pada waktu tertentu	Jumlah penduduk usia 15-24 tahun di satu wilayah pada waktu yang sama	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	40	124.155	0,03%
2019	65	133.275	0,05%
2020	115	135.887	0,08%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

25) Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi merupakan jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standard dibagi jumlah seluruh bayi lahir hidup disuatu wilayah. Di Kabupaten Gowa cakupan kunjungan bayi tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi akan tetapi secara rata-rata masih diatas 90%.

Hal ini di karenakan pelayanan kesehatan dasar pada anak bayi salah satunya adalah pemberi Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), hal ini yang menarik ibu atau keluarga untuk datang berkunjung ke Posyandu sehingga anak bayi mendapatkan pelayanan berkualitas dan terstandar sampai usia satu tahun.

Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Gowa pada Tahun 2020 sebesar 96,40 persen Dari jumlah bayi 13.515 yang mendapatkan pelayanan bayi sesuai standar adalah 13.082 bayi mengalami peningkatan dari tahun 2019, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.102
Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Cakupan Kunjungan Bayi
2016	12.252	12.616	97,11%
2017	12.019	12.736	94,37%
2018	12.893	13.051	98,79%
2019	13.027	13.733	94,86%
2020	13.082	13.515	96,40%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Pelayanan kesehatan bayi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada bayi sedikitnya 4 kali, selama periode 29 hari sampai dengan 11 bulan setelah lahir. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi : Pemberian imunisasi dasar lengkap, Stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang bayi, Pemberian Vitamin A 100.000 IU, Konseling ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI, tanda -tanda sakit dan perawatan kesehatan bayi di rumah menggunakan Buku KIA dan penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan.

26) Cakupan Puskesmas

Puskesmas merupakan kewenangan Kabupaten/Kota. Distribusi tenaga kesehatan (jumlah dan jenis tenaga) tidak merata di seluruh Puskesmas, banyak terpusat di kawasan perkotaan. Tingginya mutasi petugas yang sudah dilatih terkait manajemen dan akreditasi Puskesmas serta penempatan pejabat/petugas di Puskesmas tidak sesuai dengan kompetensi kesehatan menurut Permenkes 75 Tahun 2014. Cakupan Puskesmas Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.103
Cakupan Puskesmas Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Puskesmas	Jumlah seluruh kecamatan	Cakupan Puskesmas
2016	26	18	144,44%
2017	26	18	144,44%
2018	26	18	144,44%
2019	26	18	144,44%
2020	26	18	144,44%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Cakupan Puskesmas per-kecamatan di Kabupaten Gowa sejak tahun 2016 sudah terpenuhi diatas 100 persen. Permasalahan terkait capaian cakupan Puskesmas adalah :distribusi tenaga kesehatan (jumlah dan jenis tenaga) tidak merata di seluruh puskesmas dan tingginya mutasi petugas yang sudah dilatih terkait manajemen dan akreditasi puskesmas.

27) Cakupan Puskesmas Pembantu

Puskesmas Pembantu merupakan unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Puskesmas pembantu memiliki ruang lingkup yang lebih kecil dan kecanggihannya yang lebih rendah daripada puskesmas. Cakupan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.104
Cakupan Puskesmas Pembantu Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Puskesmas Pembantu	Jumlah Seluruh Desa	Cakupan Puskesmas Pembantu
2016	115	121	95,04%
2017	115	121	95,04%
2018	115	121	95,04%
2019	115	121	95,04%
2020	125	121	103,31%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Cakupan Puskesmas Pembantu per-Desa di Kabupaten Gowa tahun 2020 sudah terpenuhi diatas 100 persen yaitu sebesar

103,31 persen. Ketersediaan sarana kesehatan merupakan komponen yang penting dalam sumber daya kesehatan. Sarana kesehatan harus memadai, baik dalam jumlah maupun kualitas bangunan yang merupakan unit sarana pelayanan kesehatan yang bermutu, baik bangunan utama, sarana pendukung maupun sanitasi lingkungannya.

28) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Belum semua ibu hamil dan keluarga memahami tentang kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman sehingga terlambat kontak dengan petugas kesehatan. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.105
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu	Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu sama	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
2016	13.130	13.914	94,37%
2017	13.238	13.898	95,25%
2018	13.538	13.786	98,20%
2019	14.249	15.107	94,32%
2020	13.962	15.106	92,43%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Cakupan Kunjungan ibu hamil K4 di Kabupaten Gowa selama lima tahun terakhir berada diatas 90%, dan pada tahun 2019 berada pada capaian 94,32%. Kondisi grografis yang sulit akses ke fasilitas kesehatan sehingga ibu hamil tidak rutin datang memeriksakan kehamilannya yang mempunyai kompotensi sesuai standar minimal 4 kali selama kehamilannya . Jika ibu hamil tidak memperoleh pelayanan seperti tersebut di atas pada masa kehamilan, maka tidak dapat dilaporkan sebagai cakupan kunjungan ibu hamil lengkap (K4). Kunjungan antenatal bisa lebih dari 4 kali sesuai kebutuhan jika ada keluhan, penyakit dan gangguan kehamilan.

Secara umum penyebab masih adanya ibu hamil yang tidak memperoleh pelayanan kunjungan ibu hamil lengkap (K4) adalah: belum semua ibu hamil dan keluarga memahami tentang kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman sehingga terlambat kontak

dengan petugas kesehatan dan adanya ibu hamil yang berpindah tempat sehingga tidak terpantau sasmpai persalinannya.

29) Cakupan Pelayanan Nifas

Pelayanan nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu nifas mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan. Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas, diperlukan pemantauan pemeriksaan ibu nifas dengan melakukan kunjungan nifas sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : 6 jam - 3 hari setelah persalinan, 4–28 hari setelah persalinan, 29–42 hari setelah persalinan.

Pelayanan kesehatan yang diberikan antara lain : pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan dan pemberian vitamin A 200.000 IU sebanyak dua kali. Cakupan Kunjungan Nifas di Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.106
Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Cakupan Pelayanan Nifas
2016	12.509	13.272	94,25%
2017	12.579	13.318	94,45%
2018	12.876	13.179	97,70%
2019	13.277	14.418	92,09%
2020	13.044	14.488	90,03%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Pada Tahun 2020 pencapaian Cakupan pelayanan Nifas (KF) sebesar 90,03 persen Pencapaian Cakupan pelayanan nifas yang dimaksud jika sudah melakukan kunjungan nifas lengkap, jadi masih ada ibu nifas yang belum bisa mencapai kunjungan nifas lengkap karena masih mendapatkan kunjungan nifas pertama atau kedua, dan juga adanya kematian maternal di masa nifas. Selain itu dengan adanya masa pandemi ada ibu nifas yang tidak memeriksakan kesehatannya atau bidan desa memang belum melakukan kunjungan nifas.

30) Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani

Neonatus komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan atau kelainan yang dapat menyebabkan kecacatan dan kematian, seperti asfiksia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir dan BBLR. Yang dimaksud penanganan neonatus dengan komplikasi adalah neonatus sakit dan atau dengan kelainan yang mendapatkan pelayanan sesuai standar oleh tenaga kesehatan baik di rumah maupun di sarana pelayanan kesehatan.

Cakupan Penanganan Komplikasi Neonatus di Kabupaten Gowa dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.107
Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang ditangani
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani
2016	1.322	1.892	69,87%
2017	1.242	1.883	65,96%
2018	1.263	1.958	64,50%
2019	1.436	1.996	71,94%
2020	1.085	1.085	100,00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa cakupan pelayanan neonatus komplikasi tahun 2020 di Kabupaten Gowa sebesar 100,00 persen. Angka ini masih sudah sesuai dengan target dari sasaran neonatus komplikasi dari sasaran bayi. Walaupun ditahun sebelumnya masih rendahnya cakupan pelayanan neonatal komplikasi dapat disebabkan oleh sistem pencatatan dan pelaporan atau tidak ditemukannya neonatus yang komplikasi dan juga kualitas dari kunjungan neonatus yang kurang maksimal.

31) Cakupan Pelayanan Anak Balita

Pelayanan kesehatan anak balita adalah pelayanan anak balita (12 – 59 bulan) yang memperoleh pelayanan sesuai standar oleh tenaga kesehatan, disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.108
Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja ada waktu tertentu	Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama	Cakupan Pelayanan Anak Balita
2016	39.249	44.581	88,04%
2017	45.817	52.194	87,78%
2018	51.853	51.853	100,00%
2019	51.260	68.240	75,12%
2020	49.110	55.880	87,88%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Berdasarkan data capaian pelayanan anak balita dari tahun 2016- 2021 terjadi fluktuasi, hal ini disebabkan salah satunya karena kegiatan posyandu yang monoton sehingga mengurangi minat ibu untuk datang membawa balitanya berkunjung ke posyandu. Demikian pula keterlibatan lintas sektor dan lintas program dalam pelaksanaan pelayanan di posyandu yang masih kurang maksimal, sehingga pemberdayaan masyarakat dalam memantau tumbuh kembang anak balita menurun.

Cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Kabupaten Gowa pada Tahun 2020 sebesar 87,88 persen. Dari sasaran balita 55.880 yang mendapatkan pelayanan kesehatan anak balita sejumlah 49.110 balita. Hal ini disebabkan banyaknya balita yang sudah sekolah di PAUD sehingga tidak datang ke posyandu dan dengan adanya pandemi COVID 19 posyandu banyak yang ditiadakan.

32) Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6–24 bulan keluarga miskin adalah pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6–24 bulan dari keluarga miskin selama 90 hari. Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat menyebabkan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan dapat pula menyebabkan penurunan tingkat kecerdasan. Untuk itu pemberian MP-ASI pada bayi usia 6-24 bulan untuk keluarga miskin perlu dilakukan karena adanya keterbatasan dalam penyediaan pangan di rumah tangga. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI

pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.109
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI	Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin
2016	1.202	1.202	100,00%
2017	1.965	1.965	100,00%
2018	910	910	100,00%
2019	7.512	6.146	81,82%
2020	2.957	3.127	94,56%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin tahun 2016-2018 sudah mencapai 100 persen namun di tahun 2019 dan 2020 kembali dibawah 100 persen.

33) Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan terhadap murid baru kelas 1 SD/MI yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan seterusnya. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di Kabupaten Gowa dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.110
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Jumlah murid SD dan setingkat di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
2016	61.421	76.086	80,73%
2017	69.650	80.132	86,92%
2018	70.847	84.907	83,44%
2019	62.470	79.914	78,17%
2020	24.509	52.771	46,44%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Jumlah seluruh anak siswa SD kelas 1 Tahun 2020 sebanyak 52.771, target penjangkauan tercapai hanya 46,44 persen karena adanya pandemi covid-19, anak sekolah belajar dengan cara daring / kegiatan di rumah, sehingga kegiatan penjangkauan (skrining kesehatan) anak sekolah terhambat dan banyak yang tidak melakukan kegiatan tersebut.

Anak usia sekolah merupakan sasaran strategis untuk pelaksanaan program kesehatan, mereka juga merupakan sasaran yang mudah dijangkau karena terorganisir dengan baik yaitu berada di sekolah/madrasah. Program pelayanan kesehatan di sekolah diutamakan pada upaya peningkatan kesehatan (upaya *promotif*) dan upaya pencegahan penyakit (upaya *preventif*). Upaya *preventif* antara lain dilaksanakan melalui kegiatan penjangkauan kesehatan (skrining kesehatan) anak sekolah dilakukan terhadap seluruh peserta didik baru pada tahun ajaran baru.

2.4.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Kondisi panjang jaringan jalan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.111
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Panjang Jalan Kondisi Baik (km)	Panjang Jalan Seluruhnya (km)	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%)
2016	1.596	2.396,53	66,60
2017	1.783	2.396,53	74,40
2018	2.010	2.396,53	83,87
2019	2.122	2.396,53	88,54
2020	2.181	2.396,53	91,01

Sumber :Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Infrastruktur jalan yang berkualitas akan berdampak langsung terhadap efisiensi sektor-sektor lainnya sebagai akibat dari terinduksinya biaya transportasi dan meningkatnya waktu tempuh, yang pada akhirnya akan mendorong akselerasi kesejahteraan masyarakat. Jumlah panjang jalan kondisi baik meningkat secara signifikan. Pembangunan transportasi jalan di

Kabupaten Gowa, kondisi jalan mengalami perubahan panjang jalan dimana kondisi jalan baik tahun 2016 adalah 66,60 persen meningkat pada tahun 2020 sebesar 91,01 persen.

2) Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh adalah panjang jalan (km) dibagi dengan jumlah penduduk suatu wilayah. Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.112
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Panjang Jalan	Jumlah Penduduk	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk (km/jiwa)
2016	2.396,53	735.493	0,0033
2017	2.396,53	748.200	0,0032
2018	2.396,53	760.607	0,0032
2019	2.396,53	772.684	0,0031
2020	2.396,53	765.836	0,0031

Sumber : Dinas Pudan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Kabupaten Gowa dari tahun 2016 hingga 2020 panjang jalan mengalami peningkatan setiap tahun dari 2.396,53 Km menjadi 2.396,53 Km rasio Panjang jalan saat ini adalah 0,0031.

3) Persentase Kawasan Permukiman Yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4

Persentase kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 adalah perbandingan antara jumlah kawasan permukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4 dengan jumlah seluruh kawasan permukiman penduduk yang dinyatakan dalam persen. Pada tahun 2016 kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 di Kabupaten Gowa sebesar 4,0 persen dan semakin mengalami penurunan dalam kurun waktu

lima tahun, sehingga di tahun 2020 sebesar 3,3 persen seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.113
Persentase Kawasan Permukiman Yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah kawasan pemukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4	Jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk	Persentase Kawasan Permukiman Yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4
2016	2	545	4,0%
2017	21	545	3,9%
2018	20	545	3,7%
2019	18	545	3,3%
2020	N/A	N/A	N/A

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2021

4) Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 km/jam)

Jalan Kabupaten dalam kondisi baik adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6%), sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar dengan kecepatan diatas 40 km/jam tanpa ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.114
Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 km/jam) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (km)	Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut (km)	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 km/jam)
2016	1.521	2.396,53	63,5%
2017	1.575	2.396,53	65,7%
2018	1.709	2.396,53	71,3%
2019	1.783	2.396,53	74,4%
2020	1.825	2.396,53	76,2%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Pada tahun 2016 persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) di Kabupaten Gowa sebesar 63,5 persen dan

semakin mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun, sehingga di tahun 2020 meningkat menjadi 76,2 persen.

5) Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5m)

Saluran drainase adalah salah satu bangunan pelengkap pada ruas jalan dalam memenuhi salah satu persyaratan teknis prasarana jalan. Saluran drainase jalan raya berfungsi untuk mengalirkan air yang dapat mengganggu pengguna jalan, sehingga badan jalan tetap kering. Pada umumnya saluran drainase jalan raya adalah saluran terbuka dengan menggunakan gaya gravitasi untuk mengalirkan air menuju outlet. Distribusi aliran dalam saluran drainase menuju outlet ini mengikuti kontur jalan raya, sehingga air permukaan akan lebih mudah mengalir secara gravitasi. Selama tahun 2016-2018 persentase jalan yang memiliki trotoar di Kabupaten Gowa masih sangat kecil (<1%), baru ditahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan sedikit menjadi 1,06%, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.115
Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 m) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (Km)	Panjang seluruh jalan kabupaten (Km)	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5m)
2016	23,46	2.396,53	0,98%
2017	23,46	2.396,53	0,98%
2018	23,46	2.396,53	0,98%
2019	25,46	2.396,53	1,06%
2020	25,46	2.396,53	1,06%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2021

6) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah tinggal bersanitasi merupakan rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi yang layak dengan pemahaman akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan. Persentase rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.116
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah rumah tangga bersanitasi	Jumlah rumah tangga	Persentase rumah tangga bersanitasi
2016	83.718	168.993	50,41%
2017	83.793	171.913	50,46%
2018	84.913	190.152	51,04%
2019	85.263	193.171	51,23%
2020	85.813	196.128	51,51%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2021

7) Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar

Garis sempa dan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar di Kabupaten Gowa selama lima tahun masih dibawah 1%, akan tetapi tetap harus diwaspadai karena terdapat kenaikan setiap tahunnya walaupun sedikit seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.117
Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Panjang Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Km)	Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten (Km)	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar
2016	25,71	5.672,43	0,45%
2017	25,71	5.672,43	0,45%
2018	26,66	5.672,43	0,47%
2019	26,66	5.672,43	0,47%
2020	26,66	5.672,43	0,47%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2021

8) Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Drainase jalan mengandung pengertian membuang atau mengalirkan air (air hujan, air limbah, atau air tanah) ke tempat pembuangan yang telah ditentukan dengan cara gravitasi atau menggunakan sistem pemompaan. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara

optimal. Untuk drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kabupaten Gowa selama lima tahun cenderung mengalami peningkatan rata-rata 0,86% seperti terlihat pada berikut:

Tabel 2.118
Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021

Tahun	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km)	Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat
2016	145,0	372,4	61,1%
2017	140,9	372,4	62,2%
2018	138,8	372,4	62,7%
2019	136,0	372,4	63,5%
2020	136,0	372,4	63,5%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2021

9) Tidak Terjadi Genangan >2 Kali Setahun

Permasalahan tentang genangan atau banjir sudah sangat umum terjadi di kawasan perkotaan. Namun, kurangnya perhatian dalam pengelolaan sistem drainase, diikuti pesatnya perkembangan Kabupaten Gowa mengakibatkan berubahnya karakteristik fisik kota. Perubahan ini juga diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di setiap kecamatan khususnya daerah perkotaan yang menyebabkan semakin banyaknya lahan yang beralih fungsi menjadi tempat permukiman. Semakin berkurangnya lahan resapan yang ada menyebabkan debit air meluap menggenangi sebagian lahan. Tidak terjadi genangan >2 kali setahun di Kabupaten Gowa selama lima tahun stagnan berada pada kisaran dibawah 45% seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.119
Tidak Terjadi Genangan >2 Kali Setahun
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Luasan daerah yang tergenang (ha)	Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang (ha)	Tidak terjadi genangan >2 kali setahun
2016	50,93	115,49	44,10%
2017	50,82	115,49	44,01%
2018	50,53	115,49	43,75%
2019	50,24	115,49	43,50%
2020	50,24	115,49	43,50%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2021

10) Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor

Turap adalah susunan batu kali yang memiliki fungsi untuk menahan tekanan pada tanah, sehingga berguna untuk mencegah tanah longsor. Pembangunan turap berfungsi untuk pemeliharaan bantaran sungai baik di kawasan permukiman maupun kawasan pertanian serta perkebunan masyarakat. Pembangunan turap di wilayah Kabupaten Gowa masih tergolong rendah, di tahun 2020 pembangunan turap baru mencapai 6,7 persen.

Tabel 2.120
Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Lokasi Pembangunan Turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (lokasi)	Jumlah seluruh wilayah rawan longsor (desa)	Persentase Pembangunan Turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor
2016	2	45	4,4%
2017	2	45	4,4%
2018	2	45	4,4%
2019	3	45	6,7%
2020	3	45	6,7%

Sumber : Dinas Pu dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2021

11) Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Irigasi atau penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan pengaliran air menggunakan sistem, saluran dan bangunan tertentu dengan tujuan sebagai penunjang produksi pertanian, persawahan dan perikanan. Irigasi Kabupaten Gowa dalam kondisi baik semakin meningkat dalam lima tahun terakhir, dari 80,15% di tahun 2016 meningkat menjadi 90,81% di tahun 2020, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.121
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (ha)	Luas irigasi kabupaten (ha)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
2016	22.287	27.806	80,15%
2017	23.357	27.806	84,00%
2018	24.391	27.806	87,72%
2019	25.159	27.806	90,48%
2020	25.250	27.806	90,81%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2021

12) Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Rasio jaringan irigasi di Kabupaten Gowa selama lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, dari 0,0046 di tahun 2016 meningkat menjadi 0,0059 di tahun 2020, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.122
Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Panjang saluran irigasi (Km)	Luas lahan budidaya pertanian (Ha)	Rasio jaringan irigasi
2016	155,38	34.125	0,0046
2017	176,32	34.125	0,0052
2018	195,03	34.125	0,0057
2019	200,10	34.125	0,0059
2020	206,40	34.125	0,0060

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2021

13) Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

Sedangkan persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Persentase penduduk berakses air minum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.123
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Penduduk berakses air minum	Jumlah penduduk	Persentase penduduk berakses air minum
2016	517.798	735.493	70,40%
2017	522.018	748.200	69,77%
2018	535.446	760.607	70,40%
2019	536.402	772.684	69,42%
2020	541.602	765.836	70,72%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2021

14) Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan dengan jumlah penduduk seluruhnya, dinyatakan dalam persen. Di Kabupaten Gowa proporsi rumah tangga dengan

akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan pada tahun 2019 adalah sebesar 60,58%, sedangkan di Tahun 2020 belum ada data dari PDAM terkait air minum. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.124
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan	Jumlah penduduk seluruhnya	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan
2016	412.807	735.493	56,13%
2017	428.940	748.200	57,33%
2018	414.952	760.607	54,56%
2019	468.092	772.684	60,58%
2020	593.643	765.836	77,52%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2021

15) Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan pengurangan sampah adalah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

Di Kabupaten Gowa proses pengurangan sampah melalui guna ulang/daur ulang sebelum masuk ke TPA baru dimulai pada tahun 2017 melalui Bank Sampah yang dimulai dibentuk di Pasar Minasamaupa Sungguminasa sebagai Bank Sampah Pusat, dan saat ini telah terbentuk 1 (satu) Bank Sampah Pusat dan 22 (dua puluh dua) Bank Sampah Unit di seluruh Kabupaten Gowa.

Tabel 2.125
Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA (m ³)	Total volume sampah (m ³)	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan (Bank Sampah)
2016	-	-	
2017	96.725	134.227,47	72,06%
2018	100.010	136.546,50	73,24%
2019	100.923	138.908,78	72,65%
2020	NA	NA	NA

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2021

16) Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah desa. Penyediaan TPU di Kabupaten Gowa masih sedikit sekali, jumlah daya tampung pemakaman umum selama lima tahun terakhir stagnan dan tidak mengalami peningkatan, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.126
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum	Jumlah penduduk	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk
2016	134.067	735.493	182,29
2017	134.067	748.200	179,19
2018	134.067	760.607	176,26
2019	134.067	772.684	173,51
2020	134.067	765.836	175,06

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2021

17) Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Berdasarkan buku Kabupaten Gowa Dalam Angka Tahun 2020, sarana peribadahan yang tidak ada di Kabupaten Gowa adalah pura dan vihara, walaupun ada penduduk yang beragama Hindu sejumlah 98 orang dan beragama Budha sebanyak 98 orang.

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.127
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Tempat Ibadah	Jumlah penduduk	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk
2016	1.555	735.493	2,11
2017	1.441	748.200	1,93
2018	1.351	760.607	1,78
2019	1.324	772.684	1,71
2020	1.829	765.836	2,39

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka , Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

18) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber-HPL/HGB

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 menyatakan bahwa Hak pengelolaan (HPL) tidak ada batas waktu, hanya diberikan atas tanah Negara yang dikausai oleh BUMN dan BUMD sedangkan Hak Guna Bangunan (HGB) dapat diberikan atas tanah Negara, tanah hak pengelolaan oleh pemerintah atau tanah milik oleh pemegang hak milik dengan jangka waktu selama-lamanya 30 tahun dan diperpanjang paling lama 20 tahun, HPL/HGB dapat dialihkan ke pihak lain dan dijadikan jaminan hutang dan jaminan kredit di perbankan. Sementara dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota.

Rasio ruang terbuka hijau di Kabupaten Gowa dalam kurun waktu lima tahun terakhir semakin menurun, hal ini dikarenakan luas ruang terbuka hijau yang tetap akan tetapi luas wilayah ber-HPL/HGB semakin bertambah, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.128
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber-HPL/HGB

Tahun	Luas Ruang Terbuka Hijau	Luas Wilayah Ber-HPL/HGB	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
2016	135,59	1.283	10,6%
2017	135,59	1.750	7,7%
2018	135,59	4.128	3,3%
2019	135,59	4.966	2,7%
2020	135,59	4.966	2,7%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2021

19) Luasan RTH Publik Seputar 20% Dari Luas Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan

Ruang terbuka hijau publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contoh RTH Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (green belt), RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Luasan RTH Publik 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.129
Luasan RTH Publik Seputar 20% Dari Luas Wilayah Kota Kawasan Perkotaan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM	Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan	Luasan RTH publik seputar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan
2016	314	1.104	28,44%
2017	314	1.104	28,44%
2018	314	1.104	28,44%
2019	536,5	1.104	48,60%
2020	536,5	1.104	48,60%

Sumber :Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa , Tahun 2021

20) Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan Bangunan

Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah sebuah produk hukum yang berisi perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, merawat atau merobohkan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.130
Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan Bangunan Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2021

Tahun	Jumlah Bangunan ber-IMB	Jumlah Bangunan	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan
2016	5.555	168.993	0,033
2017	5.904	171.913	0,034
2018	4.779	190.152	0,025
2019	5.000	193.171	0,026
2020	5.194	196.128	0,026

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa , Tahun 2021

Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan Bangunan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021 mengalami penurunan dimana tahun 2016 sebesar 0,033 dan tahun 2020 sebesar 0,026

21) Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya

Dalam dokumen ini ruang publik yang dimaksud adalah ruang publik dalam dunia nyata. Ruang publik yang berubah peruntukannya di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.131
Rasio Ruang Publik yang berubah peruntukannya
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021

Tahun	Jumlah ruang publik yang berubah fungsi (ha)	Jumlah ruang publik yang tersedia (ha)	Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya
2016	0,075	316,7	0,02%
2017	0,075	316,7	0,02%
2018	0,075	539,24	0,01%
2019	0,075	539,24	0,01%
2020	0,075	539,24	0,01%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2021

22) Ketaatan Terhadap RTRW

Penataan Ruang, Untuk menilai capaian pembangunan pada bidang penataan ruang, antara lain adalah ketaatan terhadap RTRW serta rasio bangunan ber IMB. Realisasi kinerja pembangunan di bidang penataan ruang bidang ketaatan terhadap RTRW dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 2.132
Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Ketaatan Terhadap RTRW	Realisasi Rencana Peruntukan RTRW
2016	72%	68,74%
2017	74,2%	68,67%
2018	69,6%	74,6%
2019	72,3%	77,21%
2020	75%	79,5%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Persentase ketaatan terhadap RTRW tahun 2021 sebesar 75 persen mengalami peningkatan dari tahun 2016 dengan realisasi peruntukan RTRW hingga tahun 2020 sebesar 79,50 persen.

2.4.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rasio rumah layak huni di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.133
Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah rumah layak huni	Jumlah penduduk	Rasio rumah layak huni
2016	107.382	735.493	14,60
2017	112.230	748.200	15,00
2018	115.805	760.607	15,23
2019	116.615	772.684	15,09
2020	117.432	765.836	15,33

Sumber : Dinas Perkimtan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Rumah Layak Huni persatuan penduduk Tahun 2020 jumlah rumah layak huni sebanyak 117.432 buah dengan rasio 15,33 % memiliki kecenderungan dari tahun 2016 sampai tahun 2021.

2) Rasio Permukiman Layak Huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan. Rasio permukiman yang layak huni di Kabupaten Gowa di tahun 2020 sebesar 0,79 mengalami peningkatan dimana ditahun 2016 capaiannya sebesar 0,70 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.134
Rasio Permukiman Layak Huni Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Luas Permukiman Layak Huni (Ha)	Luas Wilayah Permukiman (Ha)	Rasio Permukiman Layak Huni
2016	4.340	6.200	0,70
2017	4.526	6.200	0,73
2018	4.650	6.200	0,75
2019	4.800	6.200	0,77
2020	4.924	6.200	0,79

Sumber :Dinas Perkimtan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

3) Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. seperti dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.135
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Cakupan ketersediaan rumah layak huni
2016	107,38	148.885	72,12%
2017	112,23	149.640	75,00%
2018	115,81	150.396	77,00%
2019	116,62	151.146	77,15%
2020	117,43	151.963	77,28%

Sumber :Dinas Perkimtan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Adapun ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Gowa semakin meningkat setiap tahunnya dimana capaian tahun 2020 sebesar 77,28 persen dan tahun 2016 capainnya sebesar 72,12 persen.

4) Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau

Rumah terjangkau adalah rumah dengan harga jual atau harga sewa yang mampu dimiliki atau disewa oleh seluruh lapisan masyarakat. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau di Kabupaten Gowa selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.136
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu	Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
2016	2.351	3.358	70,01%
2017	3.235	4.431	73,01%
2018	5.657	7.542	75,01%
2019	6.467	8.398	77,01%
2020	7.284	9.215	79,05%

Sumber :Dinas Perkimtan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

5) Persentase Permukiman yang Tertata

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Persentase permukiman yang tertata di Kabupaten Gowa selama lima tahun terakhir telah mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Di tahun 2020 persentase permukiman yang tertata masih berada pada 32,01persen seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.137
Persentase Permukiman yang Tertata Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Luas area permukiman tertata (Ha)	Luas area permukiman keseluruhan (Ha)	Persentase permukiman yang tertata
2016	1.656,4	6.199	26,72%
2017	1.736,4	6.199	28,01%
2018	1.824,4	6.199	29,43%
2019	1.904,4	6.199	30,72%
2020	1.984,4	6.199	32,01%

Sumber :Dinas Perkimtan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

6) Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Daerah kumuh adalah daerah atau kawasan tempat tinggal (hunian) yang dihuni sekelompok orang yang menempati bangunan sementara, tidak ada akses air yang aman untuk diminum, tidak ada fasilitas sanitasi yang layak, dan kondisi lingkungan yang tidak memadai.

Persentase lingkungan permukiman kumuh adalah luas lingkungan permukiman kumuh dibagi luas wilayah dan disajikan dalam bentuk persen. Adapun persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Gowa semakin menurun setiap tahunnya seperti dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.138
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Luas lingkungan permukiman kumuh (ha)	Luas wilayah (ha)	Persentase lingkungan permukiman kumuh
2016	507,96	7.633	6,65%
2017	415,96	7.633	5,45%
2018	323,96	7.633	4,24%
2019	231,96	7.633	3,04%
2020	190,96	7.633	2,50%

Sumber :Dinas Perkimtan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Gowa menunjukkan kecenderungan penurunan dimana di tahun 2016 sebesar 6,65 persen turun menjadi 2,50 persen di tahun 2020.

7) Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan adalah luasan permukiman kumuh yang tertangani dibagi luas permukiman kumuh dan disajikan dalam bentuk persen. Persentase luasan permukiman kumuh di Kabupaten Gowa pada tahun 2016 adalah sebesar 15,15 persen dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 32,06 persen seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.139
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Luasan Permukiman Kumuh yang Tertangani (Ha)	Luas Permukiman Kumuh (Ha)	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan
2016	35	231,03	15,15%
2017	60	231,03	25,97%
2018	64,07	231,03	27,73%
2019	69,07	231,03	29,90%
2020	74,07	231,03	32,06%

Sumber :Dinas Perkintan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

8) Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan adalah perbandingan antara banyaknya rumah tangga kumuh perkotaan dengan jumlah rumah seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen. Rumah tangga kumuh didefinisikan sebagai rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak, sanitasi layak, luas lantai > 7,2 m² per kapita, kondisi atap, lantai, dan dinding yang layak. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan di Kabupaten Gowa pada tahun 2016 sebesar 8,12 persen dan turun menjadi 7,30 persen di tahun 2020, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.140
Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kabupaten
Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan	Jumlah seluruh rumah	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan
2016	9.775	120.325	8,12%
2017	9.485	121.778	7,79%
2018	9.335	122.592	7,61%
2019	9.178	123.092	7,46%
2020	9.021	123.592	7,30%

Sumber :Dinas Perkimtan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan di Kabupaten Gowa mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 8,12 persen hingga tahun 2021 menyisakan 7,30 persen.

9) Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman Yang Didukung Dengan PSU

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa prasarana, sarana, dan utilitas umum menjadi salah satu aspek yang menentukan suatu perumahan layak huni atau tidak.

Lingkup perumahan dapat dilihat dari jenis pelayanan dasar perumahan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dalam Pasal 3 ayat (2), yaitu: rumah layak huni dan terjangkau; serta lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.141
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu	Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
2016	2	30	6,67%
2017	4	70	5,71%
2018	5	79	6,33%
2019	8	30	26,67%
2020	12	50	24,00%

Sumber :Dinas Perkimtan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.4.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Persentase cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yakni 100 orang petugas linmas kabupaten dibagi dengan satu wilayah kerja kabupaten. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.142
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota daerah pemekaran baru	1 Wilayah kerja kabupaten /kota	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)
2016	23,40	1.170	2,00%
2017	23,40	1.170	2,00%
2018	23,40	1.170	2,00%
2019	42,84	2.142	2,00%
2020	28,60	1.430	2,00%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab, Gowa, Tahun 2021

Rasio jumlah Perlindungan Masyarakat per 10.000 penduduk mencerminkan tingkat kemampuan suatu daerah untuk menjamin ketenteraman, ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah serta memberi perlindungan kepada masyarakat. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan suatu daerah untuk

menjamin ketenteraman, ketertiban dan penegakan aturan, dan semakin mampu daerah tersebut menjalankan otonomi daerah.

2) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah perbandingan antara jumlah penyelesaian pelanggaran K3 dengan jumlah pelanggaran K3 dikali 100 persen. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.143
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Pelanggaran K3 yang terselesaikan	Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
2016	72	72	100,00%
2017	95	95	100,00%
2018	72	72	100,00%
2019	730	730	100,00%
2020	68	68	100,00%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab, Gowa, Tahun 2021

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun Tingkat Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) di Kabupaten Gowa tahun 2021 sebanyak 68 kasus pelanggaran, yang terselesaikan sebanyak 68 kasus pelanggaran atau 100%. Capaiannya konsiten 100 persen sejak tahun 2016.

3) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran meliputi jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran dibagi dengan luas wilayah kabupaten. Data Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 meningkat sejak tahun 2019 sebesar 59,58 persen konsiten hingga tahun 2020.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.144
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran (km²)	Luas wilayah kabupaten/kota (km²)	Cakupan pelayanan bencana kebakaran
2016	-	-	-
2017	455,85	1.883,33	24,20%
2018	594,61	1.883,33	31,57%
2019	1.122,06	1.883,33	59,58%
2020	1.122,06	1.883,33	59,58%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab, Gowa, Tahun 2021

4) Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Penanganan kebakaran merupakan hal yang diataranya memerlukan keahlian, ketepatan dan kecepatan. Waktu penanganan kebakaran sangat menentukan tingkat keberhasilan penanganan dalam setiap kasus kebakaran. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) merupakan Jumlah Kasus Kebakaran Di WMK Yang Tertangani Dalam Waktu Maksimal 15 Menit terhadap Jumlah Kasus Kebakaran Dalam Jangkauan WMK yang dinyatakan dalam persen. Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.145
Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	Tingkat Waktu Tanggap
2016	-	-	-
2017	29	46	63,04%
2018	64	68	94,12%
2019	66	105	62,89%
2020	24	43	55,81%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab, Gowa, Tahun 2021

5) Persentase Penegakan PERDA

Penegakan PERDA merupakan salah satu tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dimana setiap PERDA yang dihasilkan Kabupaten Gowa menjadi tanggung jawab Satpol PP dalam penegakannya. Persentase penegakan PERDA di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.146
Persentase Penegakan PERDA Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	Jumlah pelanggaran PERDA	Persentase penegakan PERDA
2016	18	167	10,78%
2017	26	423	6,15%
2018	168	170	98,82%
2019	175	181	96,69%
2020	2.107	2.116	99,57%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab, Gowa, Tahun 2021

Tingkat persentase Penegakan PERDA di Kabupaten Gowa Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 mengalami Peningkatan. Dari tabel diatas menunjukkan tingkat persentasi penegakan PERDA di tahun 2016 hanya mencapai 10,78 persen dan mengalami peningkatan di Tahun 2020 menjadi 99,57 persen. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Gowa dalam mensosialisasikan peraturan daerah sudah cukup optimal, namun masih perlu ditingkatkan agar peraturan daerah yang berlaku di taati dan dipatuhi oleh seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Gowa.

2.4.1.6. Sosial

1) Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Gowa sebesar 100 persen setiap tahunnya, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.147
Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
2016	12.941	12.941	100,00%
2017	37.636	37.636	100,00%
2018	34.234	34.234	100,00%
2019	44.525	44.525	100,00%
2020	137.208	137.208	100,00%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Gowa , Tahun 2021

2) Persentase PMKS Yang Tertangani

Persentase PMKS yang tertangani adalah perbandingan jumlah PMKS yang tertangani dengan jumlah PMKS yang ada, yang dinyatakan dalam persen. Persentase PMKS yang tertangani di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.148
Persentase PMKS Yang Tertangani Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah PMKS yang tertangani	Jumlah PMKS yang ada	Persentase PMKS yang tertangani
2016	12.941	12.941	100,00%
2017	37.636	37.636	100,00%
2018	34.234	34.234	100,00%
2019	44.525	44.525	100,00%
2020	149.733	149.733	100,00%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Gowa , Tahun 2021

Jumlah PMKS yang selesai ditangani dibandingkan jumlah PMKS keseluruhan memiliki persentase peningkatan dari tahun 2016 sampai 2021 konsisten 100 persen. Demi meningkatkan pemecahan masalah sosial di Kabupaten Gowa, Penanganan PMKS dsudah menerapkan keterpaduan berbagai Perangkat Daerah dalam menyelesaikan maslaah-masalah sosial yang muncul. Hal tersebut tentunya menekankan pada sisi koordinasi berbagai lintas sektor juga termasuk dari masyarakat untuk berperan aktif meningkatkan penanganan masalah sosial.

3) Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Persentase PMKS Skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar adalah perbandingan antara jumlah PMKS yang memperoleh bantuan dengan jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial yang dinyatakan dalam persen. Persentase PMKS Skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar di Kabupaten Gowa sejak tahun 2016 hingga 2020 konsisten 100 persen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.149
Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
2016	12.941	12.941	100,00%
2017	37.636	37.636	100,00%
2018	34.234	34.234	100,00%
2019	44.525	44.525	100,00%
2020	115.865	115.865	100,00%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Gowa , Tahun 2021

4) Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial adalah perbandingan antara jumlah panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial dengan jumlah panti sosial yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial yang dinyatakan dalam persen. Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan kesehatan sosial di Kabupaten Gowa selama lima tahun terakhir adalah 100,00 persen seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.150
Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana
Pelayanan Kesehatan Sosial Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial
2016	52	52	100,00%
2017	30	30	100,00%
2018	29	29	100,00%
2019	30	30	100,00%
2020	30	30	100,00%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Gowa , Tahun 2021

5) Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) adalah sistem kerjasama antar keperangkat pelayan sosial diakar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.151
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat
(WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan
Kesejahteraan Sosial Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah WKBSM Dalam 1 (Satu) Tahun yang Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesos	Jumlah WKBSM Dalam 1 (Satu) Tahun yang Seharusnya Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesos Skala	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesos
2016	5	13	38,45%
2017	9	13	69,23%
2018	11	13	84,61%
2019	12	13	92,30%
2020	12	13	92,30%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Gowa , Tahun 2021

Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) di Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 5 tahun

terakhir terus mengalami peningkatan. Tingginya partisipasi masyarakat untuk ikut mengelola WKSBM dan kebermanfaatan WKSBM bagi masyarakat sehingga tertarik dan ikut bergabung dalam kegiatan WKSBM. Manfaat secara berkelanjutan adalah tersalurkannya program pemerintah melalui bantuan sosial. akan tetapi WKBSM ini sudah tidak adanya dukungan Anggaran dari kementerian sosial untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Wahana Kesejahteraan Sosial.

6) Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana.

Sedangkan Masa Tanggap Darurat Bencana adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Sementara itu, masa tanggap darurat bencana meliputi tahap siaga darurat, tahap tanggap darurat dan transisi dari tahap tanggap darurat ke tahap pemulihan. Korban bencana yang menerima bantuan social di tahun 2020 meningkat drastic jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan terjadinya Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan seluruh Negara di dunia, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 152
Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial slama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
2016	200	200	100,00%
2017	643	643	100,00%
2018	1.930	1.930	100,00%
2019	1.392	1.392	100,00%
2020	115.865	115.865	100,00%

Sumber :Dinas Sosial Kabupaten Gowa , Tahun 2021

Pada pengukuran capaian kinerja indikator Persentase korban Bencana yang menerima bantuan sosial sudah sangat maksimal dengan adanya bantuan distribusi Logistik dari Kementerian sosial yang sangat mendukung penanganan korban bencana selama masa tanggap darurat. Akan tetapi masih belum ada pengadaan bantuan logistik yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Kabupaten Gowa dalam rangka penanganan korban bencana selama masa tanggap darurat.

7) Persentase Korban Bencana Yang dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Pada lima tahun terakhir, jumlah korban bencana yang terjadi di Kabupaten Gowa semakin meningkat setiap tahunnya khususnya di tahun 2020 jumlah korban bencana mencapai 514 orang, hal ini diakibatkan terjadinya bencana banjir yang menimpa beberapa kecamatan di Kabupaten Gowa. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap di Kabupaten Gowa selama kurun waktu lima tahun terakhir tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.153
Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun	Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
2016	20	20	100,00%
2017	30	30	100,00%
2018	140	140	100,00%
2019	514	514	100,00%
2020	514	514	100,00%

Sumber :Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Tahun 2021

8) Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan mental.

Sedangkan Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Di Kabupaten Gowa persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial semakin meningkat setiap tahunnya, dari 10,39% di tahun 2016 meningkat menjadi 100% di tahun 2020 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.154
Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
2016	118	1.136	10,39%
2017	1.853	2.996	61,85%
2018	1.105	1.172	94,28%
2019	9.583	9.587	99,96%
2020	20.829	20.829	100,00%

Sumber :Dinas Sosial Kabupaten Gowa , Tahun 2021

2.4.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.4.2.1. Tenaga Kerja

1) Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun

Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja merupakan perbandingan antara jumlah sengketa pengusaha pekerja dibagi jumlah Perusahaan. Angka sengketa pengusaha pekerja di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.155
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah sengketa pengusaha pekerja	Jumlah perusahaan	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
2016	-	-	-
2017	5	763	0,66
2018	14	718	1,95
2019	6	718	0,84
2020	7	607	1,15

Sumber :Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa , Tahun 2021

Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja merupakan perbandingan antara jumlah sengketa pengusaha pekerja dibagi jumlah Perusahaan. Angka sengketa Pengusaha Pekerja pertahunnya kurun waktu 2016-2021 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2016 sebesar 0,66 persen dengan jumlah perusahaan sebesar 5 perusahaan, pada tahun 2017 meningkat sebesar 1,95 persen dan pada tahun 2018 menurun sebesar 0,84 persen, pada tahun 2020 meningkat lagi sebesar 1,15 persen dengan jumlah perusahaan sebesar 7 perusahaan. Ada beberapa hal yang menyebabkan sengketa pengusaha dan pekerja meningkat antara lain adalah meningkatnya wawasan pekerja dan buruh dan era transparansi sementara sebagian perusahaan masih belum melaksanakan secara maksimal aturan yang berlaku.

2) Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama berfluktuatif. Hal ini disebabkan banyak faktor antara lain pihak pihak memang mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan dengan Perjanjian Bersama. Selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.156
Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Σ kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	Σ kasus yang dicatatkan	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
2016	-	-	-
2017	3	5	60,00%
2018	13	14	92,86%
2019	2	6	33,33%
2020	3	7	42,86%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama berfluktuatif, tahun 2017 kasus yang terselesaikan sebesar 60 persen, kemudian tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi sebesar 92,86 persen dan tahun 2019 menurun kembali menjadi sebesar 33,33 persen, dan tahun 2020 meningkat lagi menjadi sebesar 42,86 persen. Hal ini disebabkan banyak faktor antara lain pihak pihak memang mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan, pihak yang mewakili dalam melakukan perundingan mediasi sangat mempengaruhi pula tingkat keberhasilan

penyelesaian, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terutama tentang penyelesaian secara Perjanjian Bersama, faktor budaya dan sosial ekonomi perusahaan.

3) Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja yang terdaftar. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. :

Tabel 2.157
Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan
Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2020

Tahun	∑ pencari kerja yang ditempatkan	∑ pencari kerja yang terdaftar	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
2016	265	4.130	6,42%
2017	166	2.899	5,73%
2018	445	2.047	21,74%
2019	533	2.412	22,10%
2020	2.249	2.532	88,82%

Sumber :Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa , Tahun 2021

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan kurun waktu 2016-2020 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 sebesar 6,42 persen, mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 5,73 persen, dan pada tahun 2018 meningkat lagi sebesar 21,74 persen dan tahun 2018 turun meningkat menjadi 88.82 persen.

4) Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Selama lima tahun terakhir belum ada perselisihan antara buruh dan pengusaha dengan pemerintah daerah terkait kebijakan pemerintah daerah, hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Gowa belum mempunyai/membuat kebijakan terkait ketenagakerjaan.

5) Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Pelatihan berbasis kompetensi sangat dibutuhkan dalam kaitan meningkatkan skill tenaga kerja agar dapat bersaing di pasar kerja. Selengkapnya pada tabel berikut:

Tabel 2.158
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan
Berbasis Kompetensi Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	∑ tenaga kerja yang dilatih	∑ Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
2016	144	317	45,43%
2017	16	50	32,00%
2018	160	372	42,67%
2019	304	515	59,03%
2020	48	532	9,02%

Sumber :Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi kurun waktu 2016-2021 mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2016 sebesar 45,43 persen, pada tahun 2017 turun menjadi sebesar 32 persen, dan pada tahun 2018 naik lagi menjadi sebesar 42,67 persen dan tahun 2019 naik sebesar 59,03 persen dan menurun sebesar 9,02 persen pada tahun 2020. Pelatihan berbasis kompetensi sangat dibutuhkan dalam kaitan meningkatkan skill tenaga kerja agar dapat bersaing di pasar kerja.

6) Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Sampai dengan saat ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa belum pernah melakukan pelatihan tenaga kerja berbasis masyarakat.

7) Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan berbasis kewirausahaan sangat dibutuhkan dalam memberdayakan UKM, memperluas peluang usaha, meningkatkan produktivitas UKM. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan pelatihan berbasis kewirausahaan yang tersebar di 18 kecamatan, akan tetapi di tahun 2019 dan 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa tidak melaksanakan pelatihan berbasis kewirausahaan. Selengkapnya pada tabel berikut :

Tabel 2.159
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan
Berbasis Kewirausahaan Kabupaten Gowa Tahun
2016 – 2020

Tahun	∑ tenaga kerja yang dilatih	∑ pendaftar pelatihan kewirausahaan	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
2016	20	30	66,67%
2017	20	43	46,51%
2018	40	77	51,95%
2019	Tidak ada pelatihan kewirausahaan yang dilakukan		
2020	Tidak ada pelatihan kewirausahaan yang dilakukan		

Sumber :Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa , Tahun 2021

8) Rasio Lulusan S1/S2/S3

Rasio lulusan S1/S2/S3 merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja lulusan S1/S2/S3 dibagi jumlah penduduk. Penilaian ini secara tidak langsung menunjukkan kualitas SDM masyarakat Kabupaten Gowa. Kualitas SDM ini sangat berkaitan erat dengan dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Gowa menunjukkan peningkatan yang pesat pada tahun 2020, yaitu sebesar 1.102 per 10.000 penduduk. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.160
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Pencari Kerja Lulusan S1/S2	Jumlah lulusan S1/S2/S3 (org)	Jumlah penduduk (org)	Rasio lulusan S1/S2/S3
2016	-	-	-	-
2017	728	39.577	748.200	529
2018	740	45.626	760.607	600
2019	843	52.910	772.684	685
2020	787	84.408	765.836	1.102

Sumber :Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa , Tahun 2021

2.4.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.161
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah (org)	Jumlah pekerja perempuan (org)	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
2016	4884	83.587	5,84%
2017	4668	81.833	5,70%
2018	4621	81.792	5,65%
2019	4735	81.347	5,82%
2020	4735	81.300	5,82%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2021

Selama tahun 2016 sampai tahun 2020, partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (eksekutif) di Kabupaten Gowa mengalami penurunan yang, dimana pada tahun 2016 sebanyak 5,84 persen dan tahun 2020 partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan mencapai 5,82 persen.

2) Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPRD

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD adalah perbandingan jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dengan jumlah total kursi di keanggotaan DPRD yang dinyatakan dalam persen. Persentase keterwakilan perempuan di parlemen dalam 2 (dua) periode pemilu, yaitu periode 2015-2018 dan periode 2019-2024 di Kabupaten Gowa cukup bervariasi, dimana perempuan yang duduk di lembaga legislatif periode 2015-2018 sebanyak 17,78 persen, kemudian pada periode 2019-2024 jumlah anggota dewan perempuan meningkat menjadi 28,89 persen. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.162
Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR

Tahun	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR
2016	8	45	17,78%
2017	8	45	17,78%
2018	8	45	17,78%
2019	13	45	28,89%
2020	13	45	28,89%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2021

Persentase keterwakilan perempuan di parlemen dalam 2 (dua) periode pemilu, yaitu periode 2015-2018 dan periode 2019-2024 di Kabupaten Gowa cukup bervariasi, dimana perempuan yang duduk di lembaga legislatif periode 2015-2018 sebanyak 17,78 persen, kemudian pada periode 2019-2024 jumlah anggota dewan perempuan meningkat menjadi 28,89 persen dari. Meskipun belum mencapai kuota 30 persen, namun pencapaian perempuan dalam bidang politik di Kabupaten Gowa sudah mengalami kemajuan yang cukup signifikan.

3) Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah perbandingan jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta dengan jumlah pekerja perempuan yang dinyatakan dalam persen. Partisipasi perempuan di lembaga swasta dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.163
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Pekerja perempuan di lembaga swasta (org)	Jumlah pekerja perempuan (org)	Partisipasi perempuan di lembaga swasta
2016	450	83.587	0,54%
2017	413	81.833	0,50%
2018	726	81.792	0,89%
2019	763	81.347	0,94%
2020	785	81.300	0,97%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2021

Kaum perempuan tidak hanya memilih profesi yang duduk di lembaga pemerintah tapi sebagian juga memilih bekerja di lembaga swasta, termasuk di Kabupaten Gowa. Partisipasi perempuan di lembaga swasta dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan meningkat yaitu tahun 2016 sebesar 0,54 persen meningkat menjadi 0,97 persen pada tahun 2020, hal ini disebabkan karena akses yang dibuka untuk perempuan bekerja seperti di perusahaan atau pabrik sudah terbuka secara luas.

4) Rasio KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah semua perilaku ancaman, pelecehan, dan kekerasan baik secara fisik, psikologis, dan seksual antara dua orang yang terikat hubungan personal ataupun kepada anggota keluarga lain. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Rasio KDRT di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.164
Rasio KDRT Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah KDRT	Jumlah rumah tangga	Rasio KDRT
2016	42	168.993	0,02%
2017	13	171.913	0,01%
2018	23	190.152	0,01%
2019	30	193.171	0,02%
2020	19	196.128	0,01%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2021

Rasio KDRT yang dinyatakan dalam persen memiliki kecenderungan menurun dari tahun 2016 sebesar 0,02 persen sampai dengan 2020 sebesar 0,01 persen, ranah yang paling beresiko bagi perempuan, yaitu kekerasan dalam ranah personal, yaitu diantaranya perkawinan atau dalam rumah tangga (KDRT), dan dalam hubungan personal (hubungan pribadi).

5) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah perbandingan jumlah perempuan yang bekerja dengan jumlah penduduk perempuan yang dinyatakan dalam persen. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.165
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan (org)	Jumlah angkatan kerja perempuan (org)	Partisipasi angkatan kerja perempuan
2016	5.340	83.587	6,39%
2017	5.081	81.833	6,21%
2018	5.347	81.792	6,54%
2019	5.498	81.347	6,76%
2020	5.520	81.300	6,79%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2021
 Partisipasi angkatan kerja perempuan memiliki kecenderungan meningkat dimana tahun 2016 sebesar 6,39 persen meningkat di tahun 2020 sebesar 6,79 persen.

6) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

Perempuan dan anak korban kekerasan berhak untuk mendapatkan layanan bantuan hukum berupa penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.166
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang
mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di
dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu (laporan)	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu (laporan)	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
2016	93	120	77,50%
2017	49	95	51,58%
2018	87	87	100,00%
2019	97	103	94,17%
2020	71	71	100,00%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2021

Dalam rangka penanganan perempuan korban kekerasan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah membentuk unit-unit layanan di beberapa lembaga pemerintahan, yang berpengaruh terhadap Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu kabupaten hingga tahun 2020 semua tertangani.

7) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang teridentifikasi di pelayanan kesehatan merupakan fenomena gunung es karena belum menggambarkan jumlah seluruh kasus yang ada di masyarakat. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat mempengaruhi kesehatan korban sehingga berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, peran pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas sangat dibutuhkan untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan di tingkat pelayanan dasar yaitu di Puskesmas dan tingkat pelayanan rujukan di Rumah Sakit

melalui pelayanan terpadu. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, peran tenaga kesehatan sangatlah besar, yaitu mulai dari identifikasi kasus kekerasan, memberikan pelayanan medis terhadap korban, melakukan rujukan baik medis, hukum, maupun sosial, serta melakukan upaya pencegahannya. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.167
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2020

Tahun	Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu (org)	Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu (org)	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
2016	32	32	100,00 %
2017	66	66	100,00 %
2018	54	54	100,00 %
2019	50	50	100,00 %
2020	60	60	100,00 %

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2021

8) Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu di Kabupaten Gowa sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 konsisten 100 persen dapat dilihat pada tabel bawah ini :

Tabel 2.168
Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan Oleh
Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu
Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2020

Tahun	Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos (org)	Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos (org)	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
2016	5	5	100,00 %
2017	10	10	100,00 %
2018	6	6	100,00 %
2019	4	4	100,00 %
2020	3	3	100,00 %

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2021

9) Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Gowa dari tahun 2016 sampai tahun 2020 konsisten 100 persen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.169
Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
2016	15	15	100,00 %
2017	10	10	100,00 %
2018	6	6	100,00 %
2019	3	3	100,00 %
2020	2	2	100,00 %

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2021

10) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum di Kabupaten Gowa dari tahun 2016 sampai tahun 2020 konsiten 100 persen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.170
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum (org)	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum (org)	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
2016	15	15	100,00 %
2017	10	10	100,00 %
2018	6	6	100,00 %
2019	3	3	100,00 %
2020	2	2	100,00 %

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2021

Layanan-layanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan meliputi pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pemulangan, dan juga pendampingan tokoh agama

11) Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entn/point, atau dari daerah penerima ke daerah asal. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.171
Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan (org)	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT (org)	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
2016	93	120	77,50%
2017	49	95	51,58%
2018	87	87	100,00%
2019	97	103	94,17%
2020	71	71	100,00%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2021

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan terus mengalami peningkatan dimana tahun 2016 sebesar 77,50 persen kemudian tahun 2017 kembali turun 51,58 persen, kemudian naik lagi ditahun 2018 sebesar 100 persen, kemudian turun menjadi 94,17 persen di tahun 2019 dan naik kembali menjadi 100 persen di tahun 2020.

12) Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Gowa dari tahun 2016 sampai tahun 2020 konsisten 100 persen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.172
Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya (org)	Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial (org)	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
2016	93	93	100,00%
2017	49	49	100,00%
2018	87	87	100,00%
2019	97	97	100,00%
2020	71	71	100,00%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2021

13) Rasio APM perempuan/laki-laki di SD

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat SD adalah perbandingan APM murid perempuan terhadap APM murid laki-laki pada setiap jenjang pendidikan SD yang dinyatakan dalam persen. Rasio APM perempuan/laki-laki di SD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.173
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD

Tahun	APM-SD Perempuan	APM-SD Laki-Laki	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD
2016	36.010	38.873	92,63
2017	36.171	38.723	93,41
2018	35.947	38.309	93,83
2019	35.498	38.242	92,82
2020	35.043	37.962	92,31

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2021

Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD tahun 2016 sebesar 92,63 persen kemudian naik menjadi 93,41 persen di tahun 2017, tahun 2018 dan 2019 masing-masing 92,83 persen dan 92,82 persen dan sebesar 92,31 di tahun 2020.

14) Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) anak perempuan terhadap anak laki-laki di SMP adalah perbandingan APM murid

perempuan terhadap APM murid laki-laki pada jenjang pendidikan SMP yang dinyatakan dalam persen. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.174
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	APM-SMP Perempuan	APM-SMP Laki-Laki	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP
2016	15.997	15.921	100
2017	15.823	15.866	100
2018	15.254	15.028	102
2019	14.668	14.938	98
2020	14.420	14.524	99

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2021
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP tahun 2016-2017 sebesar 100 persen kemudian naik menjadi 102 persen di tahun 2018, tahun 2019 dan 2020 masing-masing 98 persen dan 99 persen.

15) Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki pada Kelompok Usia 15-24 Tahun

Angka melek huruf merupakan ukuran persentase penduduk pada kelompok usia tertentu yang dapat membaca sekaligus menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap seluruh penduduk pada kelompok usia tersebut. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki laki di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.175
Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki
Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	AMH15-24 perempuan	AMH15-24 laki-laki	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun
2016	57,72	38,48	1,5
2017	55,45	36,97	1,5
2018	55,57	37,05	1,5
2019	57,85	38,57	1,5
2020	57,97	38,65	1,5

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2021

2.4.2.3. Pangan

1) Ketersediaan Pangan Utama

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 2004 pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Sedangkan ketersediaan pangan berhubungan dengan suplai pangan melalui kebutuhan, produksi, dan luas panen. Pangan utama di Kabupaten Gowa adalah beras, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.176
Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Rata-Rata jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)	Jumlah penduduk	Ketersediaan pangan utama
2016	246.418	735.493	33,50%
2017	247.380	748.200	33,06%
2018	251.563	760.607	33,07%
2019	249.997	772.684	32,35%
2020	262.033	765.836	34,22%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa , Tahun 2021

Persentase ketersediaan pangan utama yaitu beras, jagung dan kedelai di Kabupaten Gowa dari tahun 2016 sampai tahun 2021 memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 Ketersediaan beras Kabupaten Gowa Sebesar 33,50 persen menurun menjadi 33,06 persen pada tahun 2017, mengalami peningkatan menjadi 33,07 persen pada tahun 2018, kembali menurun 33,25 persen tahun 2019 dan kembali meningkat 34,22 % di tahun 2020.

2) Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak Per Kapita

Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menganalisis situasi ketersediaan pangan di suatu negara/wilayah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan aspek penyediaan dan pemanfaatan pangan. Hasil dari Neraca Bahan Makanan tersebut adalah jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi, protein dan lemak. Ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.177
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Energi (Kkal/th)	Protein (Gr/th)	Lemak (Gr/th)
2016	4.623	186,27	113,53
2017	5.562	178,91	66,26
2018	6.067	191,70	71,58
2019	4.878	159,12	101,70
2020	5.540	163,91	81,23

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa , Tahun 2021

Kondisi Ketersediaan energy, protein perkapita dan lemak Kabupaten Gowa pada tahun 2016 masing-masing sebesar 4.623 kkal/kapita/hari, 186,27 dan 113,53 Gr/tahun serta di tahun 2020 menjadi 5.540 Kkal/tahun, 163,91 Gr/tahun dan 81,23 Gr/tahun.

3) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Sesuai dengan amanat UU No 18 tahun 2012 tentang pangan, pemerintah berkewajiban untuk menjamin keamanan pangan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah diamanatkan untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan serta diwajibkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasannya. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.178
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu	Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
2016	3	5	60%
2017	3	5	60%
2018	20	20	100%
2019	7	8	87,5%
2020	8	8	100 %

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa , Tahun 2021

Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan tahun 2016 dan 2017 sebesar 60 persen dan telah mencapai 100 persen di tahun 2018 kembali menurun di tahun 2019 menjadi 87,5 persen dan kembali mencapai 100 persen di tahun 2020.

2.4.2.4. Pertanahan

1) Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Jumlah lahan bersertifikat adalah jumlah lahan yang sudah bersertifikat (Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Milik, dan Hak Pakai). Luas lahan bersertifikat di Kabupaten Gowa menunjukkan adanya peningkatan, dari tahun 2016 sebanyak 5.511.548 menjadi sebanyak 11.029.196 di tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan meningkatnya tertib administrasi pertanahan yang menunjang kepastian hukum dalam kepemilikan tanah, walaupun di tahun 2020 luas lahan berserifikat menurun luasannya. Persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.179
Persentase Luas Lahan Bersertifikat
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Luas Lahan bersertifikat	Jumlah luas wilayah	Persentase luas lahan bersertifikat
2016	5.511.548	1.883.330.000	0,29%
2017	9.063.706	1.883.330.000	0,48%
2018	16.355.527	1.883.330.000	0,87%
2019	22.252.658	1.883.330.000	1,18%
2020	11.029.196	1.883.330.000	0,59%

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2) Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Dalam lima tahun terakhir, hanya ada dua kasus tanah negara yang terdaftar dan diselesaikan, yaitu pada tahun 2018 dan tahun 2020, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.180
Penyelesaian Kasus Tanah Negara Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah kasus yang diselesaikan	Jumlah kasus yang terdaftar	Penyelesaian kasus tanah Negara
2016	0	0	0,00%
2017	0	0	0,00%
2018	1	1	100,00%
2019	0	0	0,00%
2020	1	1	100,00%

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa, Tahun 2021

3) Penyelesaian Izin Lokasi

Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Penyelesaian izin lokasi di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.181
Penyelesaian Izin Lokasi Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Izin Lokasi	Permohonan Izin Lokasi	Penyelesaian Izin Lokasi
2016	18	18	100,00%
2017	10	10	100,00%
2018	6	6	100,00%
2019	7	7	100,00%
2020	5	5	100,00%

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.4.2.5. Lingkungan Hidup

1) Tersusunnya RPPLH

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Pada kurun waktu tahun 2016-2020, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa belum pernah menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

2) Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan

RPPLH merupakan salah satu instrumen dalam penyusunan perencanaan yang memiliki fungsi penting untuk menyeleraskan kebijakan lingkungan baik yang dibuat oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas mengelola lingkungan maupun lembaga lain yang tugasnya juga terkait dengan persoalan lingkungan hidup dan harus diintegrasikan dalam rencana pembangunan. Pada tahun 2016-2020, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa belum pernah menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Sehingga belum ada pula integrasi RPPLH dalam rancana pembangunan Kabupaten Gowa.

3) Terselanggaranya KLHS untuk K/R/P

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, dalam Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memasukkan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi :

- a) rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta Rencana Rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dan;
- b) kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

KLHS yang telah dilaksanakan di Kabupaten Gowa, antara lain:

- KLHS RPJMD (Tahun 2016)
- KLHS Kota Baru Pattallassang (Tahun 2018)
- KLHS Jasa Perdagangan Sungguminasa (Tahun 2018)
- KLHS Tun Abdul Razak (Tahun 2019)
- KLHS Cambayya-Sungguminasa (Tahun 2020)
- KLHS RPJMD (Tahun 2020)

Terselenggaranya KLHS dalam pengambilan kebijakan maupun penyusunan dokumen yang menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.182
Terselenggaranya KLHS Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Terselenggaranya KLHS	Ada (1)	Tidak Ada	Ada (2)	Ada (1)	Ada (2)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Gowa telah disusun pada tahun 2020. Adapun kajian yang termuat dalam KLHS RPJMD adalah terkait Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan. Kajian ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Kepentingan kajian ini terutama adalah untuk menentukan apakah intensitas pembangunan masih dapat dikembangkan atau ditambahkan.

Daya dukung lingkungan merupakan batas kondisi kemampuan dari lingkungan untuk dapat menunjang kehidupan manusia. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan

kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan. Pada KLHS RPJMD Kabupaten Gowa, kajian daya dukung Kabupaten Gowa akan disajikan daya dukung yang berbasis potensi dan Jasa Lingkungan. Untuk berbasis potensi, daya dukung ditentukan pada kemampuan lahan di Kabupaten Gowa. Sementara untuk Jasa Lingkungan ditentukan melalui penetapan status ketersediaan air di wilayah Kabupaten dengan pendekatan Jasa Lingkungan.

Kemampuan lahan adalah penilaian lahan secara sistematis berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Kelas kemampuan lahan terbagi atas VIII kelas. Dari kelas I s.d. IV dapat digunakan untuk pertanian, sedangkan dari kelas V s.d. VII untuk padang rumput, kelas VIII sebaiknya secara alami sebagai hutan lindung. Berdasarkan hasil kajian kemampuan lahan pada dokumen KLHS RPJMD, daerah pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh potensi lahan terdapat pada Kecamatan Pattallassang dan Pallangga. Sedangkan untuk Sebagian daerah Kecamatan Biring Bulu, Parigi, Tinggimoncong, Tombolo Pao dan Tompobulu tidak sesuai di jadikan lahan pertanian namun lebih sesuai untuk vegetasi permanen beberapa bagian juga di kecamatan ini diarahkan untuk peruntukan cagar alam, hutan lindung, atau tempat rekreasi.

Pada tahap perhitungan ketersediaan air, data yang digunakan adalah Nilai Indeks Jasa Lingkungan dalam sistem grid dan data potensi ketersediaan air untuk satu kesatuan Wilayah. Satuan Wilayah untuk identifikasi potensi air pada penghitungan daya dukung nasional dan pulau adalah Wilayah Sungai. Untuk dapat menghitung potensi ketersediaan air Kabupaten perlu diidentifikasi terlebih dahulu Wilayah Sungai yang tercakup didalam wilayah administrasinya. Data yang diperlukan adalah debit wilayah sungai tahunan. Total indeks jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air wilayah sungai dan total indeks jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air kabupaten.

Hasil kajian daya dukung penyediaan air menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Gowa sebesar 1.406.209.345 m³/Tahun, sementara kebutuhan sebesar 33.489.720 m³/Tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 1.372.719.625 m³/Tahun, hal

ini berarti ambang batas daya dukung penyediaan air belum terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Tombolo Pao (169.178.895 m³/Tahun), Bungaya (155.995.053 m³/Tahun), Parangloe (151.019.282 m³/Tahun), Biringbulu (149.078.282 m³/Tahun) dan Tinggi Moncong (146.873.695 m³/Tahun). Hal ini dapat dipahami dikarenakan Kecamatan tersebut di atas merupakan kecamatan yang tutupan lahannya masih bagus dan masih terdapat banyak kawasan hutan. Sementara untuk selisih antara ketersediaan dan kebutuhan terkecil terdapat pada Kecamatan Bajeng Barat (15.488.878 m³/Tahun) dan Somba Opu (16.060.277 m³/Tahun).

4) Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Indeks kualitas air adalah mekanisme matematis untuk menghitung data kualitas air. Pemantauan kualitas air perlu dilakukan pada air sungai, air laut, air danau, air rawa dan air tanah sehingga air dapat dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya.

Pengukuran Indeks Kualitas Air baru dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Tahun 2018 dengan Capaian tahun 2017 sebesar 65 menurun di tahun 2018 sebesar 56 dan meningkat 71,08 di tahun 2020 . Adapun hasil pengukuran indeks kualitas air Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.183
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2020
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	-	-	65	56	71,08

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Tahun 2021

5) Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah. Pengukuran Indeks Kualitas Udara baru dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Tahun 2018. Adapun hasil pengukuran indeks kualitas udara Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.184
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	-	-	83	83	83,85

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Tahun 2021

6) Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Perhitungan Indeks Tutupan Lahan dilakukan melalui perbandingan jumlah luas tutupan ber-hutan dibagi dengan jumlah luas wilayah Kabupaten Gowa. Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan baru dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Tahun 2018. Adapun hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.185
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten
Gowa Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-	-	52	52,5	53

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Tahun 2021

7) Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah merupakan perbandingan antara Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang ditangani dengan total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang dinyatakan dalam persen seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.186
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan
Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi
Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH
Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani	Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
2016	25	25	100,00%
2017	25	25	100,00%
2018	25	25	100,00%
2019	24	25	96,00%
2020	24	27	88,89%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Tahun 2021

8) Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD)

Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana pejabat pengawas lingkungan hidup di daerah (PPLHD) terdiri atas jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina dan jumlah sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa belum pernah melaksanakan peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Peabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD).

9) Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki latar belakang sejarah serta kebudayaan yang lama (tua). Keberadaan MHA sudah ada jauh sebelum ada atau terbentuknya negara ini. Menurut Ter Haar di dalam bukunya *Beginzellen en Stelsel van Het Adatrecht (1939)* mengatakan diseluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat bawah, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai

hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan itu. Golongan manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri dan mempunyai harta benda, milik keduniaan dan gaib, golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum.

Pengakuan MHA telah dilakukan sejak Indonesia berdiri. Pasal 18 UUD merupakan pengakuan gelombang pertama dalam konteks Nasional Indonesia. Pengakuan gelombang kedua dilakukan melalui UU nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Pengakuan ketiga adalah yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Pengakuan gelombang keempat dilakukan setelah Amandemen UUD dengan memunculkan beberapa undang-undang. Masing-masing pengakuan ini dimaknai bervariasi sesuai dengan selera penguasa yang sedang menjabat di Indonesia. Pengakuan atas keberadaan MHA dalam UUD sebelum amandemen adalah mengakui masyarakat yang sudah ada dengan segala sistem yang berlaku didalamnya.

Tabel 2.187
Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	8	0	1	7	4

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Dalam hal fasilitasi pendampingan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Gowa telah dilakukan pendampingan selama 5 (lima) tahun terakhir kepada 9 (sembilan) kelompok MHA yang ada di Kabupaten Gowa.

Tabel 2.188
Terverifikasinya Hak Kearifan Lokal atau Hak Pengetahuan
Tradisional Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	8	0	1	7	4

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Terkait dengan penetapan hak Masyarakat Hukum Adat, termasuk kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta penyediaan sarana/prasarana untuk Masyarakat Hukum sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan Adat di Kabupaten Gowa.

10) Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup

Ketika individu atau kelompok berkontribusi dan berprestasi dalam bidang lingkungan hidup, pemerintah Indonesia akan memberikan penghargaan sebagai salah satu rangkaian. Penghargaan tertinggi bidang lingkungan hidup ini, antara lain Kalpataru, Adipura, dan Adiwiyata. Ketiganya memiliki persamaan, yakni diberikan kepada individu atau kelompok sebagai apresiasi terhadap capaian bidang lingkungan hidup pada kategori masing-masing. Penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh Kabupaten Gowa adalah Piagam Sekolah Adiwiyata, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.189
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada (Adiwiyata)	Ada (Adiwiyata)	Ada (Adiwiyata)	Ada (Adiwiyata)	Ada (Adiwiyata)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Tahun 2021

11) Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah dapat diketahui dari jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani dibagi dengan total jumlah pengaduan yang teregistrasi yang dinyatakan dalam persen. Jumlah pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, lokasi usaha dan dampaknya di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.190
Pengaduan Masyarakat Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Pengaduan masyarakat yang ditangani	Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah
2016	2	2	100,00%
2017	2	2	100,00%
2018	3	3	100,00%
2019	2	2	100,00%
2020	7	7	100,00%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Tahun 2021

12) Timbulan sampah yang ditangani

Timbulan sampah yang tertangani yaitu volume timbulan sampah yang di tangani di bagi dengan total timbulan sampah yang dinyatakan dalam persen. Persentase timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Gowa semakin meningkat setiap tahunnya, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 91
Timbulan Sampah Yang Ditangani Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Volume timbulan sampah yang ditangani (ton/th)	Volume timbulan sampah yang ditangani (ton/th)	Timbulan sampah yang ditangani
2016	67.892,26	134.227,47	50,58%
2017	72.478,88	136.546,50	53,08%
2018	83.355,87	138.810,78	60,05%
2019	85.243,46	141.014,83	60,45%
2020	131.400,00	141.008,26	93,19%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Tahun 2021

13) Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R

Sampah yang terkurangi melalui 3 R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan. Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 192
Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R Kabupaten
Gowa Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R	3,29%	4,68%	4,61%	4,54%	4,56%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Tahun 2021

14) Persentase Cakupan Area Pelayanan

Cakupan area pelayanan yaitu luas area pelayanan pengelolaan sampah di bagi dengan luas wilayah yang dinyatakan dalam persen. Cakupan area pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Gowa baru dilaksanakan di seluruh Kecamatan Somba Opu, sebagian Kecamatan Palangga, sebagian Kecamatan Bontomarannu, sebagian Kecamatan Bajeng, sebagian Kecamatan Pattallassang, sebagian Kecamatan Tinggimoncong dan sebagian Kecamatan Barombong, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 193
Persentase Cakupan Area Pelayanan Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Luas area pelayanan pengelolaan sampah (km ²)	Luas wilayah (km ²)	Persentase cakupan area pelayanan
2015	120,88	1.833,00	6,42%
2016	120,88	1.833,00	6,42%
2017	120,88	1.833,00	6,42%
2018	120,88	1.833,00	6,42%
2019	1.833,00	1.833,00	100,00%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Tahun 2021

15) Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani

Jumlah sampah yang tertangani yaitu volume sampah yang tertangani dibagi dengan total jumlah timbulan sampah yang dinyatakan dalam persen. Persentase jumlah sampah yang tertangani di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 194
Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah sampah yang tertangani (ton)	Total jumlah timbulan sampah (ton)	Persentase cakupan area pelayanan
2016	67.892,26	134.227,47	50,58%
2017	72.478,88	136.546,50	53,08%
2018	83.355,87	138.810,78	60,05%
2019	85.243,46	141.014,83	60,45%
2020	131.400,00	141.008,26	93,19%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, Tahun 2021

16) Operasionalisasi TPA/TPST/SPA

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk membuang sampah yang sudah menacapai tahap akhir dalam pengelolaan sampah yang dimulai dari pertama kali sampah dihasilkan, dikumpulkan, diangkut, dikelola dan dibuang. Sampai dengan saat ini baru ada 1 (satu) unit TPA yang digunakan oleh Kabupaten Gowa yaitu TPA Pa'bentengan yang terletak di Kecamatan Bajeng.

2.4.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah. Kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil di Kabupaten Gowa terus menunjukkan tren positif. Terkait kepemilikan KTP terlihat bahwa pada tahun 2020 menunjukkan angka 0,99 meningkat dibanding tahun 2019 sebesar 0,97. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.195
Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber-KTP	Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk
2016	436.011	539.803	0,81
2017	473.342	540.242	0,88
2018	459.310	533.615	0,86
2019	513.339	526.581	0,97
2020	530.643	537.202	0,99

Sumber : Dinas DUKCAPIL Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2) Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Akte kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang didepan hukum. Akte kelahiran sangat penting peranannya untuk memperoleh akses pelayanan publik lainnya seperti pendidikan dan paspor. Rasio bayi berakte kelahiran merupakan jumlah bayi berakte kelahiran dibanding dengan jumlah bayi. Rasio bayi berakte kelahiran di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.196
Rasio Bayi Berakte Kelahiran Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah bayi berakte kelahiran	Jumlah bayi	Rasio bayi berakte kelahiran
2016	95.112	235.617	0,40
2017	154.385	244.875	0,63
2018	244.076	234.930	1,04
2019	251.963	253.043	0,99
2020	271.907	272.524	0,99

Sumber : Dinas DUKCAPIL Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Rasio bayi berakte kelahiran merupakan jumlah bayi berakte kelahiran dibanding dengan jumlah bayi. Untuk tahun 2016, jumlah bayi berakte kelahiran di Kabupaten Gowa mencapai 95.112 jiwa dari jumlah bayi di Kabupaten Gowa sebanyak 235.617 jiwa. Sedangkan untuk tahun 2020 jumlah bayi berakte kelahiran di Kabupaten Gowa mencapai 271.907 jiwa dari jumlah bayi di Kabupaten Gowa sebanyak 272.524 jiwa.

3) Rasio Pasangan Berakte Nikah

Rasio pasangan berakte nikah merupakan jumlah pasangan nikah berakte nikah dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pasangan nikah. Rasio pasangan berakte nikah di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.197
Rasio Pasangan Berakte Nikah Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Rasio pasangan berakte nikah
2016	58.774	374.906	0,16
2017	65.732	377.714	0,17
2018	74.525	380.609	0,20
2019	80.473	378.609	0,21
2020	81.170	373.342	0,22

Sumber : Dinas DUKCAPIL Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Rasio pasangan berakte nikah merupakan jumlah pasangan nikah berakte nikah dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pasangan nikah. Untuk tahun 2016, jumlah pasangan nikah berakte nikah di Kabupaten Gowa mencapai 58.774 jiwa dari total keseluruhan pasangan nikah di Kabupaten Gowa sebanyak

374.906 jiwa. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah pasangan nikah berakte nikah di Sulawesi Selatan mencapai 81.170 jiwa dari total keseluruhan pasangan nikah di Sulawesi Selatan sebanyak 373.342 jiwa.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di kantor urusan agama (KUA). Sedangkan bagi yang bergama Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu, pencatatan perkawinannya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Akta Perkawinan sangat penting bagi setiap penduduk yang telah menikah sebab merupakan alat bukti otentik kepada seorang pria dan seorang wanita dalam melaksanakan pencatatan perkawinan. Adanya program nasional Percepatan penerbitan akta kelahiran, secara tidak langsung mendorong peningkatan rasio pasangan berakte nikah sebab seharusnya pemohon akta kelahiran melampirkan buku nikah/ akta perkawinan orang tuanya. Masih banyaknya akte perkawinan yang telah diterbitkan sebelumnya secara konvensional dan belum terintegrasi dengan SIAK, menyebabkan datanya perkawinannya belum tercatat dalam SIAK.

Demikian halnya dengan Akte perkawinan untuk penduduk muslim sepenuhnya dilakukan oleh kantor urusan agama (KUA), adapun data hasil pelayanan penerbitan buku nikah yang dilakukan KUA belum sepenuhnya terintegrasi dengan data base dinas kependudukan dan pencatatan sipil (SIAK).

4) Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Menurut pasal 1 point 29 PP No. 37 Tahun 2007, database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

Penyajian data kependudukan berskala provinsi (pasal 6 UU NO. 24 Tahun 2013) dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota (pasal 7 UU NO. 24 Tahun 2013) berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Data Kependudukan diterbitkan secara berkala, untuk skala Nasional, skala Provinsi dan Kabupaten/Kota diterbitkan per semester yaitu semester pertama diterbitkan tiap tanggal 30 Juni dan semester kedua diterbitkan tanggal

31 Desember setiap tahun kelender (penjelasan pasal 5 s/d 7 UU No. 24 Tahun 2013).

Tabel 2.198
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas DUKCAPIL Kabupaten Gowa, Tahun 2021

5) Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

KTP berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlakusebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 199
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas DUKCAPIL Kabupaten Gowa, Tahun 2021

6) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Cakupan penerbitan KTP Elektronik adalah jumlah dokumen KTP Elektronik yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib KTP dalam satu wilayah pada tahun yang sama. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.200
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	Jumlah penduduk wajib KTP	Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk
2016	436.011	539.803	80,77%
2017	473.342	540.242	87,62%
2018	459.310	533.615	86,08%
2019	513.339	526.581	97,49%
2020	530.643	537.202	98,78%

Sumber : Dinas DUKCAPIL Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Cakupan penerbitan KTP Elektronik adalah jumlah dokumen KTP Elektronik yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya memiliki kecenderungan meningkat dimana Capaian di tahun 2020 sebesar 98,78 persen Lebih baik disbanding capaian tahun 2016 sebesar 80,77 persen.

2.4.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, memperlihatkan peningkatan angka capaian yang cukup baik setiap tahun. Di mana pada tahun 2016, sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik sebanyak 92 desa dari 121 desa atau 76,03 persen dan di tahun 2020 meningkat menjadi 121 desa atau 100 persen, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.201
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	Jumlah seluruh pemerintahan desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
2016	92	121	76,03%
2017	102	121	84,30%
2018	109	121	90,08%
2019	110	121	90,91%
2020	121	121	100,00%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2) Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang berada di desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Sedangkan kelompok binaan LPM adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat dari tahun 2016-2020 tidak mengalami perubahan yaitu masing-masing hanya 3 kelompok. Kondisi ini dikarenakan jumlah kelompok binaan dan jumlah LPM tidak mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.202
Kelompok Binaan LPM Kabupaten Gowa Tahun 2016– 2020

Tahun	Jumlah Kelompok Binaan LPM	Jumlah LPM	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
2016	501	167	3
2017	501	167	3
2018	501	167	3
2019	501	167	3
2020	501	167	3

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, Tahun 2021

3) Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Sedangkan kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis. Rata-rata jumlah kelompok

binaan PKK dari tahun 2016-2019 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 5.423 kelompok, sedangkan di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebanyak 5.517 kelompok, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.203
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Kelompok Binaan PKK	Jumlah PKK	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
2016	5.423	167	32,47%
2017	5.423	167	32,47%
2018	5.423	167	32,47%
2019	5.423	167	32,47%
2020	5.517	167	33,04%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, Tahun 2021

4) Persentase LSM Aktif

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Persentase LSM aktif dan terdaftar pada tahun 2016–2020 di Kabupaten Gowa mengalami peningkatan yaitu dari 15 LSM di tahun 2016 menjadi 33 LSM di tahun 2020, dengan persentase LSM aktif dan terdaftar sebesar 100 persen, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.204
Pesentase LSM Aktif Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah LSM aktif	Jumlah LSM Terdaftar	Persentase LSM aktif
2016	15	15	100,00%
2017	23	23	100,00%
2018	33	33	100,00%
2019	33	33	100,00%
2020	33	33	100,00%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, Tahun 2021

5) Persentase LPM Berprestasi

Jumlah LPM berprestasi yaitu Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif melaksanakan kegiatan dibagi jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat yang berprestasi dikali seratus. Persentase LPM berprestasi di Kabupaten Gowa dari tahun 2016-2020 masih rendah, yaitu pada tahun 2016 dari 167 LPM yang ada di Kabupaten Gowa hanya 18 LPM berprestasi atau hanya 10,78 persen. Jumlah LPM berprestasi meningkat terus jumlahnya sampai dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 28 LPM, akan tetapi jumlah LPM berprestasi ini berkurang jumlahnya di tahun 2020 yaitu sebanyak 18 LPM. Kondisi ini membutuhkan pembinaan terhadap tugas dan fungsi LPM dalam pembangunan di desa. Persentase LPM berprestasi di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.205
Persentase LPM Berprestasi Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah LPM Berprestasi	Jumlah LPM	Persentase LPM Berprestasi
2016	18	167	10,79%
2017	21	167	12,57%
2018	24	167	14,37%
2019	28	167	16,77%
2020	18	167	10,78%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, Tahun 2021

6) Persentase PKK aktif

PKK aktif yaitu jumlah PKK yang memiliki pengurus dan sekretariat dan memiliki program kerja. Jumlah PKK dihitung dari jumlah tim penggerak PKK dalam lingkup wilayah pemerintah daerah. Tim Penggerak PKK beranggotakan warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan partai politik, Lembaga atau instansi, berfungsi sebagai perencana, pelaksana pengendali gerakan PKK. Hingga tahun 2020 tercatat memiliki Tim Penggerak PKK dengan persentase aktif 100 persen dengan jumlah PKK aktif sebanyak 167.

Tabel 2.206
Persentase PKK Aktif Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah PKK Aktif	Jumlah PKK	Persentase PKK Aktif
2016	167	167	100,00%
2017	167	167	100,00%
2018	167	167	100,00%
2019	167	167	100,00%
2020	167	167	100,00%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, Tahun 2021

7) Persentase Posyandu aktif

Posyandu berperan penting dalam memperbaiki kesehatan ibu, bayi, dan anak balita. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. Oleh karena itu keaktifan posyandu di setiap daerah sangat penting untuk memastikan ketersediaan layanan kesehatan untuk ibu dan anak. Selama tahun 2016 sampai 2020, jumlah posyandu aktif di Kabupaten Gowa sebesar 100 persen, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.207
Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Posyandu Aktif	Jumlah Posyandu	Persentase Posyandu Aktif
2016	693	693	100,00%
2017	704	704	100,00%
2018	765	765	100,00%
2019	779	779	100,00%
2020	785	785	100,00%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, Tahun 2021

8) Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan yang memberikan peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat bisa berupa ide, gagasan, pikiran dan bisa pula berupa bantuan

finansial. Selama lima tahun terakhir di Kabupaten Gowa belum ada swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat.

2.4.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan. Dalam nilai universal, penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Dalam kaitan peran penduduk tersebut, kualitas mereka perlu ditingkatkan melalui berbagai sumber daya yang melekat, dan pewujudan keluarga kecil yang berkualitas, serta upaya untuk menskenario kuantitas penduduk dan persebaran kependudukan.

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya. Karena di samping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.208
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Laju pertumbuhan penduduk	1,88	1,77	1,73	1,66	1,59

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Gowa dari tahun 2016-2020 cenderung menurun. LPP Kabupaten Gowa tahun 2016 sejumlah 1,88 terus menurun setiap tahunnya dan menjadi sebesar 1,59 di tahun 2020. Kebijakan pemerintah untuk menekan LPP dengan adanya program Keluarga Berencana (KB) yang diluncurkan sejak tahun 1980-an semakin nyata hasilnya. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) jika tidak dikendalikan akan berakibat pada ledakan penduduk, yang akan memberi pengaruh terhadap sumberdaya makanan dan energi yang salah satunya akan berdampak pada kerusakan lingkungan.

2) Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan setiap perempuan, dan merupakan ukuran untuk seluruh perempuan usia 15-49 tahun yang dihitung berdasarkan angka kelahiran menurut kelompok umur. Banyak faktor yang mempengaruhi Angka Kelahiran Total (TFR) yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi, serta tingkat urbanisasi. Tingkat pendapatan yang semakin tinggi akan semakin besar pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas yang terjadi, karena orangtua menginginkan kualitas yang baik untuk anak-anaknya. Demikian juga jika pendidikan dan kesehatan seseorang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap penurunan fertilitas, terlebih jika didukung dengan penggunaan alat kontrasepsi untuk mengendalikan kelahiran demi kualitas generasi. Faktor-faktor ini pula yang mempengaruhi TFR di Kabupaten Gowa. Total fertility rate (TFR) Kabupaten Gowa tersajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.209
Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Total Fertility Rate (TFR)	2,41	2,47	2,47	2,00	2,39

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Di Kabupaten Gowa angka TFR dari tahun 2016-2018 cenderung konstan, dan menurun di tahun 2019 meskipun mengalami kenaikan lagi di tahun 2020. Angka TFR sangat dipengaruhi oleh kegiatan pembangunan sosial ekonomi, keberhasilan program KB, peningkatkan rata-rata usia kawin, peningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta pengembangan program penurunan tingkat kelahiran. Bila program-program ini berjalan baik, angka TFR dapat di tekan dan berdampak pada Penurunan atau perlambatan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP). Di tahun 2020 TFR di Kabupaten Gowa telah menyentuh angka 2,39.

3) Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Kampung KB di Kabupaten Gowa baru di canangkan pertama kali pada tahun 2016. Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di Kampung KB setiap tahunnya meningkat, hal ini

dikarenakan adanya *Memorandum of Understanding* (MOU) antara SKPD terkait dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta *Distric Working Group* (DWG) yang merupakan suatu pertemuan kordinasi lintas sektor bidang kependudukan.

Tabel 2.210
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB	Jumlah semua perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB
2016	7	36	19,44%
2017	10	36	27,78%
2018	17	36	47,22%
2019	18	36	50,00%
2020	18	36	50,00%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2021

4) Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Rancangan induk pengendalian penduduk diharapkan bisa menjadi acuan penyusunan rancangan pembangunan daerah. Rancangan induk pengendalian penduduk ini sangat penting untuk disinergikan dengan rencana pembangunan pemerintah, karena laju pertumbuhan penduduk akan berkorelasi dengan laju pergerakan pembangunan.

Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk adalah perbandingan jumlah perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan jumlah semua perangkat daerah yang dinyatakan dalam persen. Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 211
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk	Jumlah semua perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk
2016	7	36	19,44%
2017	10	36	27,78%
2018	17	36	47,22%
2019	18	36	50,00%
2020	18	36	50,00%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2021

5) Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Jumlah anak per keluarga biasanya digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, dimana semakin kecil jumlah anak dalam keluarga diasumsikan akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Pemenuhan hak dasar anak akan lebih maksimal, demikian juga kualitas pengasuhan kedua orangtuanya diasumsikan akan jauh lebih baik.

Tabel 2.212
Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Anak	Jumlah Keluarga	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga
2016	325.544	211.337	1,540
2017	326.514	216.687	1,507
2018	332.286	221.478	1,500
2019	338.679	224.424	1,509
2020	328.067	225.276	1,456

Sumber : Dinas Kependudukan dan Cakil, Tahun 2021

Rata-rata jumlah anak adalah perbandingan antara jumlah anak dengan jumlah keluarga yang ada di Kabupaten Gowa. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk

tahun 2016–2020 rata-rata jumlah anak per-keluarga di Kabupaten Gowa cenderung tetap, hal ini merupakan indikasi bahwa Program Keluarga Berencana merupakan salah satu program pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berjalan baik. Pada tahun 2020 tidak dilakukan perhitungan dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19.

Diharapkan untuk tahun berikutnya angka ini tetap atau cenderung menurun, sehingga secara umum akan mempengaruhi penurunan laju pertumbuhan penduduk dan memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas generasi.

9) Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah perbandingan antara jumlah akseptor KB dengan jumlah pasangan usia subur yang dinyatakan dalam persen. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.213
Rasio Akseptor KB Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Akseptor KB	Jumlah Pasangan Usia Subur	Rasio Akseptor KB
2016	86.800	121.971	71,16%
2017	83.968	121.540	69,09%
2018	83.416	121.419	68,70%
2019	86.053	122.581	70,20%
2020	86.691	121.007	71,64%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2021

9) Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk wanita kawin. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern, atau untuk mengukur pemakaian metode kontrasepsi modern saja.

CPR adalah perbandingan antara jumlah perempuan usia reproduksi (usia 15-49 tahun) yang menggunakan suatu metode

kontrasepsi dengan jumlah seluruh perempuan usia 15-49 tahun yang ditanyakan dalam persen. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.214
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah peserta KB aktif perempuan	Jumlah keseluruhan akseptor KB aktif	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun
2016	85.585	86.800	98,60%
2017	83.408	83.968	99,33%
2018	83.020	83.416	99,53%
2019	85.678	86.053	99,56%
2020	83.979	86.691	96,87%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2021

10) Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)

Pernikahan dini, hamil, dan melahirkan di usia remaja masih menjadi ancaman bagi kemajuan perempuan Indonesia. Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 yang dipublikasikan di tahun 2018 menunjukkan 36 dari 1.000 perempuan melahirkan di usia remaja atau 15 tahun hingga 19 tahun, angka ini memprihatinkan karena mereka penyumbang tingginya angka balita pendek atau *stunting*, kematian ibu dan bayi di Indonesia.

Tingginya angka ASFR mengindikasikan pernikahan dini, dan perilaku seks bebas atau seks pra nikah di kalangan remaja masih tinggi. Selain itu juga dikarenakan faktor ekonomi dan budaya. Terkait budaya, menurutnya, di sejumlah daerah perempuan yang belum menikah di usia 15 tahun dianggap tidak laku dan perawan tua. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.215
Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000
Perempuan Usia 15-19 Tahun Kabupaten Gowa Tahun 2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun	2,47	24,06	25,19	46,60	28,04

Sumber : BPS, Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2021

11) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia ideal pada saat perkawinan. PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar pernikahan dilakukan pada pasangan yang sudah siap/dewasa dari ekonomi, kesehatan, mental/psikologi. Pendewasaan usia perkawinan merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional yang diharapkan dapat memberikan dampak pada peningkatan umur kawin pertama yang pada gilirannya akan menurunkan Total Fertility Rate (TFR).

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin dari 16 menjadi 19 tahun dapat menekan/menurunkan angka pernikahan dini. Adapun Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.216
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya
Dibawah 20 tahun Kabupaten Gowa Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 tahun	Jumlah pasangan usia subur	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun
2015	5.926	128.455	4,61%
2016	2.130	121.971	1,75%
2017	2.428	121.540	2,00%
2018	2.033	121.419	1,67%
2019	1.294	122.581	1,06%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2021

12) Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Unmeet need adalah kondisi dimana keinginan Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia, sehingga mereka mengambil keputusan tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa, menggambarkan bahwa cakupan PUS yang ingin ber-KB masih dibawah dua puluh persen, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.217
Cakupan PUS Yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlyani	Jumlah pasangan usia subur	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi
2016	21.125	121.971	17,32%
2017	22.065	121.540	18,15%
2018	21.788	121.419	17,94%
2019	20.135	122.581	16,43%
2020	14.934	121.007	12,34%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2021

13) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Pemakaian metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) baik berupa implant, IUD dan kontrasepsi mantap (kontap) adalah metode kontrasepsi yang tepat dalam mencegah atau merencanakan kehamilan. Hal ini di karenakan pada beberapa kasus seringkali kehamilan yang tidak diinginkan dikarenakan kegagalan dalam penggunaan alat/obat kontrasepsi.

Upaya Pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk guna menyongsong Bonus Demografi menuju Industri 4.0 melalui peningkatan kapasitas PPKBD/SUBPPKBD dalam melakukan KIE MKJP sehingga akseptor paham tentang apa, jenis, dan efek samping MKJP. Persentase pemakaian kontrasepsi jangka panjang di Kabupaten Gowa terus mengalami peningkatan sejak tahun 2016 sebesar 15,56% menjadi 20,33% di tahun 2019, akan

tetapi menurun di tahun 2020 menjadi sebesar 19,68% seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.218
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	Jumlah akseptor KB	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
2016	13.504	86.800	15,56%
2017	13.384	83.968	15,94%
2018	15.469	83.416	18,54%
2019	17.495	86.053	20,33%
2020	17.063	86.691	19,68%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2021

14) Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Untuk meningkatkan keberlangsungan pemakaian kontrasepsi, maka hal yang perlu disarankan adalah dorongan pemakaian MKJP, pendampingan PUS yang ber-KB yang mengalami komplikasi dan efek samping sehingga tetap konsisten menggunakan alat kontrasepsi, memperbanyak calon fasilitator KB yang dapat memberikan Advokasi dan KIE kepada akseptor KB untuk tetap menggunakan alat kontrasepsi, dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pelayanan MKJP serta kebijakan teknis bagi petugas untuk peningkatan kemampuan komunikasi dan teknis. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.219
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	Jumlah akseptor KB	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi
2016	17.071	86.800	19,67%
2017	16.053	83.968	19,12%
2018	12.563	83.416	15,06%
2019	11.880	86.053	13,81%
2020	14.188	86.691	16,37%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2021

15) Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB

Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB adalah perbandingan jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB dengan jumlah anggota kelompok BKB yang dinyatakan dalam persen. Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.220
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	Jumlah anggota kelompok BKB	Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB
2016	4.982	6.409	77,73%
2017	4.711	6.030	78,13%
2018	4.394	5.568	78,92%
2019	4.319	5.472	78,93%
2020	4.330	4.909	88,21%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2021

16) Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah suatu kelompok/wadah kegiatan yang terdiri dari keluarga mempunyai anak remaja usia 10-14 tahun yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua remaja dalam rangka pembinaan tumbuh kembang remaja, dalam rangka memantapkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian dalam mengikuti program Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur (PUS) anggota kelompok.

Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB adalah perbandingan jumlah anggota kelompok yang ber-KB dengan jumlah anggota kelompok BKR yang dinyatakan dalam persen. Cakupan anggota bina keluarga remaja ber-KB di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.221
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Tahun	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	Jumlah anggota kelompok BKR	Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB
2016	3.274	4.937	66,32%
2017	3.051	4.653	65,57%
2018	3.274	4.937	66,32%
2019	3.320	4.993	66,49%
2020	2.896	3.543	81,74%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2021

17) Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB

Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah kelompok kegiatan keluarga yang mempunyai lanjut usia yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lansia. Sedangkan cakupan anggota bina keluarga lansia ber-KB adalah jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB dibagi jumlah anggota kelompok BKL yang dinyatakan dalam persen. Cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) ber-KB di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.222
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	Jumlah anggota kelompok BKL	Cakupan anggota bina kelompok BKL yang ber-KB
2016	2.541	4.299	59,11%
2017	1.992	4.068	48,97%
2018	2.541	4.299	59,11%
2019	2.847	4.799	59,32%
2020	2.118	2.596	81,59%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2021

18) Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) telah terbentuk di setiap kecamatan terkhusus daerah terpencil, terkumuh dan wilayah dengan cakupan KB yang rendah sebagai amanat kriteria wilayah pembentukan Kampung KB. Sejauh ini Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) telah terbentuk pada setiap kecamatan di Kabupaten Gowa.

19) Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa adalah suatu wadah kegiatan program gerakan Generasi Berencana dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Jumlah kelompok PIK R/M itu idealnya dibentuk satu pada tiap kecamatan. Akan tetapi kenyataannya terdapat lebih dari satu PIK R/M pada tiap-tiap kecamatan.

Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa adalah perbandingan jumlah pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa dengan jumlah kecamatan yang dinyatakan dalam persen. Untuk mengetahui cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.223
Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah PIK R/M	Jumlah Kecamatan	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling R/M
2016	129	18	716,67%
2017	145	18	805,56%
2018	146	18	811,11%
2019	149	18	827,78%
2020	93	18	516,67%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2021

20) Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk

Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan Keluarga Berencana Nasional. Karena perannya yang penting, maka pelibatan PKB/PLKB dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan berkaitan dengan pengendalian penduduk menjadi penting.

Dalam lima tahun terakhir, cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk di Kabupaten Gowa sudah mencapai 100 persen. Hal ini disebabkan karena PKB/PLKB adalah pegawai negeri sipil yang tentu saja terlibat langsung dalam semua proses perencanaan dan pelaksanaan bidang pengendalian penduduk di Kabupaten Gowa seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.224
Cakupan PKB/PKLB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	PKB dan PLKB	Cakupan PKB/PLKB yg didayagunakan PD KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk
2016	133	133	100,00%
2017	129	129	100,00%
2018	136	136	100,00%
2019	124	124	100,00%
2020	122	122	100,00%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2021

21) Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber-KB Mandiri

Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri adalah perbandingan jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri dengan jumlah anggota kelompok UPPKS yang dinyatakan dalam persen. Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.225
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	Jumlah anggota kelompok UPPKS	Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri
2016	1.298	1.968	65,96%
2017	1.029	1.607	64,03%
2018	1.298	1.968	65,96%
2019	1.612	2.354	68,48%
2020	1.405	1.724	81,50%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2021

22) Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) merupakan seseorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif dalam melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional ditingkat dusun RT/RW yang setara. Peran petugas pembantu dalam mensosialisasikan menggunakan alat kontrasepsi pada tingkat desa dan kelurahan dapat secara langsung mempengaruhi perilaku penduduk dalam mengikuti program KB. Oleh karena itu keberadaan petugas pembantu harus disebar di semua desa.

Di Kabupaten Gowa, rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan di Kabupaten Gowa sudah mencapai angka 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi desa/kelurahan di Kabupaten Gowa yang tidak memiliki petugas pembantu Pembina KB.

Tabel 2.226
Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah petugas pembantu pembina KB desa	Jumlah desa/kelurahan	Rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kel
2016	167	167	100,00%
2017	167	167	100,00%
2018	167	167	100,00%
2019	167	167	100,00%
2020	167	167	100,00%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2021

23) Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat adalah perbandingan jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang alkon dengan perkiraan permintaan masyarakat yang dinyatakan persen. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.227
Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat
Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang Alkon	Perkiraan permintaan masyarakat	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
2016	55.705	93.184	59,78%
2017	55.620	93.184	59,69%
2018	43.669	81.147	53,81%
2019	41.926	87.299	48,03%
2020	43.605	92.504	47,14%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2021

24) Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan

Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan adalah perbandingan jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS dengan jumlah faskes dan jejaring yang dinyatakan dalam persen. Persentase faskes dan jejaringnya di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 228
Persentase Faskes dan Jejaringnya yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	Jumlah faskes dan jejaring	Persentase faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan
2016	32	36	88,89%
2017	32	32	100,00%
2018	31	31	100,00%
2019	31	31	100,00%
2020	31	31	100,00%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2021

25) Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa

Informasi Data Mikro Keluarga telah tersedia di semua Desa/Kelurahan hanya saja kualitas dan display data yang di tampilkan masih butuh pendampingan lebih lanjut melalui peningkatan kapasitas petugas dalam mengolah data KBBPK.

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa adalah perbandingan antara jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia dengan jumlah seluruh informasi data mikro keluarga yang dinyatakan dalam persen. Sejauh ini cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga telah tersedia di setiap desa di Kabupaten Gowa.

26) Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

Dalam membangun keluarga, ada 8(delapan) fungsi keluarga yang seharusnya menjadi perhatian semua keluarga di Indonesia karena dianggap sebagai acuan dan pondasi kehidupan oleh setiap keluarga. BKKBN menyebut bahwa kedelapan fungsi tersebut adalah fungsi agama, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi sosial dan budaya, fungsi perlindungan, fungsi kesehatan reproduksi, fungsi lingkungan, fungsi ekonomi, dan fungsi sosialisasi pendidikan.

Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga di Kabupaten Gowa semakin meningkat setiap tahunnya dan berada pada angka diatas 90%. Akan tetapi di Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 96,08%, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.229

Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Jumlah kelompok kegiatan	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga
2016	707	727	97,25%
2017	707	728	97,12%
2018	721	729	98,90%
2019	750	753	99,60%
2020	759	790	96,08%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2021

27) Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita dan Anak Yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak adalah perbandingan antara jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang dengan jumlah keluarga mempunyai balita dan anak yang dinyatakan dalam persen. Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.230

Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
2016	1.975	5.472	36,09%
2017	2.112	5.568	37,93%
2018	2.450	6.409	38,23%
2019	2.781	6.030	46,12%
2020	2.183	5.560	39,26%

Sumber : Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.4.2.9. Perhubungan

1) Rasio Ijin Trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/ atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Secara umum kinerja rasio ijin trayek tergolong kurang, hal ditunjukkan dengan rasio ijin trayek rata-rata terhadap jumlah penduduk yang semakin menurun selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2016 izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 365 namun terus menurun menjadi 57 di tahun 2020.

Hal ini disebabkan oleh semakin menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dan beralih ke transportasi online yang mengedepankan kemudahan, kecepatan dan pelayanan 24 jam.

Tabel 2.231
Rasio Ijin Trayek Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	Jumlah penduduk	Rasio ijin trayek
2016	365	735.493	0,00050
2017	199	748.200	0,00027
2018	178	760.607	0,00023
2019	137	772.684	0,00018
2020	57	765.836	0,00007

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2) Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Uji KIR adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Jumlah uji KIR di Kabupaten Gowa terus meningkat selama lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2016 jumlah uji KIR sebanyak 693 dan meningkat menjadi 1.707 di tahun 2020.

Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa dalam hal ini Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada tahun 2019 telah mendapatkan AKREDITASI C dari Kementerian Perhubungan dan menjadi satu-satunya pengujian di Provinsi Sulawesi Selatan yang bisa melakukan pengujian kendaraan bermotor, hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR di Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa pada tahun 2020.

Namun perlu diingat bahwa pelaksanaan uji KIR tidak berlaku pada satu wilayah saja akan tetapi dapat dilaksanakan pada daerah lain apabila tenggang waktu KIR telah habis. Mobilitas mobil penumpang umum yang tinggi akan berdampak pada lokasi wilayah tempat pengujian karena kita tidak dapat untuk memobilisasi/mengarahkan angkutan umum untuk melakukan uji KIR di Kabupaten Gowa saja. Sehingga apabila sudah banyak

daerah lain yang telah mendapatkan AKREDITASI dari Kementrian Perhubungan akan mempengaruhi jumlah uji KIR di Kabupaten Gowa. Maka dari itu untuk meningkatkan capaian kinerja diperlukan usaha mengoptimalkan kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor diantaranya pelaksanaan sosialisasi pentingnya Uji KIR kepada para pengusaha angkutan umum, operasi terpadu kelengkapan Uji KIR dengan pihak terkait, peningkatan SDM penguji dan inovasi-inovasi lainnya terkait pengujian.

Tabel 2.232
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2015 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	693	806	961	1193	1707

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

4) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Kabupaten Gowa tidak mempunyai fasilitas pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Sedangkan untuk fasilitas naik turun penumpang yang ada di Kabupaten Gowa adalah 1 (satu) Terminal Regional Cappa Bungaya dan 3 (tiga) Terminal Pembantu. Dimana Terminal Penumpang Tipe B hanya melayani Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKAP), Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan.

5) Persentase Layanan Angkutan Darat

Posisi Kabupaten Gowa yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang dibarengi dengan semakin banyaknya pembangunan perumahan. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah kendaraan pribadi yang semakin bertambah dan mengakibatkan terjadinya kemacetan pada beberapa ruas jalan.

Kemacetan yang terjadi di Kabupaten Gowa rata-rata didominasi oleh kendaraan pribadi baik itu roda dua dan roda empat. Hal ini terlihat dari semakin menurunnya jumlah angkutan darat dan jumlah penumpang angkutan darat, walaupun persentase layanan angkutan darat selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu 100 persen.

Tabel 2.233
Persentase Layanan Angkutan Darat Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah angkutan darat	Jumlah penumpang angkutan darat	Persentase layanan angkutan darat
2016	315	1.575	20,00%
2017	287	1.435	20,00%
2018	261	1.305	20,00%
2019	237	1.185	20,00%
2020	215	1.075	20,00%

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

6) Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR di Kabupaten Gowa mengalami kenaikan setiap tahunnya. Maka dari itu perlu ditingkatkannya pengawasan terhadap angkutan umum khususnya yang tidak memiliki KIR. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 234
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada Tahun n	Jumlah angkutan umum pada Tahun n	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum
2016	31	580	5,34%
2017	48	612	7,84%
2018	51	572	8,92%
2019	72	512	14,06%
2020	118	512	23,05%

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

7) Pemasangan Rambu-rambu

Secara umum pengertian rambu-rambu merupakan satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan.

Selain itu rambu lalu lintas juga merupakan tanda yang sengaja dipasang untuk memberikan informasi kepada para pemakai jalan. Rambu tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran pada sistem jalan. Berdasarkan jenis pesan yang disampaikan, rambu lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi rambu-rambu berupa 1. Rambu peringatan, 2. Rambu petunjuk, 3. Rambu Larangan dan perintah, 4. Rambu tetap dan rambu tidak tetap. Pemasangan rambu-rambu di Kabupaten Gowa mengalami kenaikan tiap tahun seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.235
Pemasangan Rambu-Rambu Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	Pemasangan Rambu-rambu
2016	55	250	22,00%
2017	104	250	41,60%
2018	155	250	62,00%
2019	208	250	83,20%
2020	250	250	100,00%

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

8) Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Nilai rasio panjang jalan per jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di Kabupaten Gowa, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan yang semakin mengecil menunjukkan bahwa penambahan panjang jalan tidak sebanding dengan penambahan jumlah kendaraan. Jumlah kendaraan meningkat setiap tahun, sedangkan panjang jalan setiap tahun tetap.

Tabel 2.236
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Panjang Jalan	Jumlah kendaraan	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
2016	2.396,53	243.116	0,01
2017	2.396,53	256.970	0,009
2018	2.396,53	271.149	0,009
2019	2.396,53	271.149	0,009
2020	2.396,53	294.906	0,008

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.4.2.10. Komunikasi dan Informatika

1) Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Kelompok Informasi Masyarakat merupakan komunitas masyarakat/mitra strategis Pemerintah Daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat menjadi hal mutlak yang harus dilaksanakan dalam melengkapi mekanisme yang sedianya cepat, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin pesat.

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan pada tahun 2016 belum ada di Kabupaten Gowa. Pada tahun 2017 mulai adanya pengembangan dan pemberdayaan KIM yaitu sebanyak 9 kelompok dan untuk tahun 2020 sebanyak 10 kelompok.

Tabel 2.237
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah KIM	Jumlah Kecamatan	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan
2016	-	18	-
2017	9	18	50,00%
2018	10	18	55,56%
2019	10	18	55,56%
2020	10	18	55,56%

Sumber : Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2) Cakupan Layanan Telekomunikasi

Perkembangan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) ini dipicu oleh perkembangan layanan telekomunikasi. Cakupan layanan telekomunikasi dapat kita ketahui dengan membandingkan antara luas wilayah yang terlayani (tercover) oleh layanan telekomunikasi dengan luas wilayah Kabupaten Gowa keseluruhan. Layanan telekomunikasi di Kabupaten Gowa selama lima tahun ini sudah mencakup di semua wilayah.

3) Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

Menurut Statistik Telekomunikasi Indonesia Tahun 2018 selama lima tahun terakhir, penggunaan Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) oleh rumah tangga di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat. Persentase penduduk di Kabupaten Gowa yang menggunakan telepon selular terus mengalami peningkatan, dari 24,99 persen di tahun 2016 naik sebesar 71.37 persen dalam kurun waktu lima tahun, hingga pada tahun 2019 mencapai 88,04 persen.

Tabel 2.238
Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon	Jumlah Penduduk	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon
2016	183.873	735.493	24,99%
2017	249.400	748.200	33,33%
2018	480.393	760.607	63,16%
2019	680.303	772.684	88,04%
2020	764.031	765.836	99,76%

Sumber : Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa, Tahun 2021

4) Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet

Kebutuhan penduduk akan akses internet baik untuk keperluan pribadi, pekerjaan, belajar maupun berbelanja semakin meningkat. Dalam hal rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Gowa juga mengalami peningkatan setiap tahun, proporsi rumah tangga berakses internet pada tahun 2016 sebanyak 0,20 dan meningkat di tahun 2020 menjadi 0,49.

Tabel 2.239
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kabupaten
Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet	Jumlah rumah tangga	Proporsi rumah tangga dengan akses internet
2016	33.798	168.993	0,20
2017	42.978	171.913	0,25
2018	63.384	190.152	0,33
2019	77.587	193.171	0,40
2020	96.585	196.128	0,49

Sumber : Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa, Tahun 2021

5) Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi

Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki perangkat komputer pribadi terhadap jumlah rumah tangga secara keseluruhan, dinyatakan dalam persen. Kebutuhan masyarakat akan komputer pribadi semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan kebutuhan dalam pekerjaan, sekolah dan bisnis yang membutuhkan pemakaian komputer pribadi dalam pelaksanaannya khususnya jika dilaksanakan di rumah. Di Kabupaten Gowa proporsi rumah tangga yang memiliki komputer meningkat terus setiap tahun dari tahun 2016 sebesar 0,18 meningkat menjadi 0,46 di tahun 2020.

Tabel 2.240
Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Jumlah rumah tangga	Proporsi rumah tangga yg memiliki komputer pribadi
2016	30.298	168.993	0,18
2017	35.298	171.913	0,20
2018	40.000	190.152	0,21
2019	68.875	193.171	0,36
2020	90.000	196.128	0,46

Sumber : Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.4.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Persentase koperasi aktif

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor pertanian dan pergerakan kegiatan perekonomian. Selain kegiatan jual beli, hal lain yang memberi pengaruh terhadap pergerakan perekonomian antara lain kegiatan perkoperasian, usaha kecil dan menengah. Pada tahun 2016 jumlah koperasi aktif sebanyak 452, meningkat di tahun 2020 menjadi sebanyak 465 unit, disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.241
Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah koperasi aktif	Jumlah seluruh koperasi	Persentase koperasi aktif
2016	452	572	79,02%
2017	453	576	78,65%
2018	463	579	79,97%
2019	456	545	83,67%
2020	465	552	84,24%

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2) Persentase UKM Non BPR/Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Aktif

Persentase UKM non BPR/LKM aktif merupakan perbandingan antara jumlah UKM non BPR/LKM aktif dengan jumlah seluruh UKM non BPR/LKM yang dinyatakan dalam persen. Meskipun persentase UKM Non BPR/LKM aktif naik turun akan tetapi jumlah UKM Non BPR/LKM aktif mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah seluruh Non BPR/LKM setiap tahunnya, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.242
Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM	Persentase UKM non BPR/LKM aktif
2016	13	21	61,90%
2017	10	23	43,48%
2018	25	30	83,33%
2019	28	37	75,68%
2020	32	35	91,43%

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa, Tahun 2021

3) Persentase BPR/ Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Aktif

Persentase BPR/LKM aktif merupakan perbandingan antara jumlah BPR/LKM aktif dengan jumlah seluruh BPR/LKM yang dinyatakan dengan persen. Persentase BPR/LKM aktif di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.243
Persentase BPR/LKM Aktif Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah BPR/LKM aktif	Jumlah seluruh BPR/LKM	Persentase BPR/LKM aktif
2016	1	1	100,00%
2017	1	1	100,00%
2018	1	1	100,00%
2019	1	1	100,00%
2020	1	1	100,00%

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa, Tahun 2021

4) Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Jumlah usaha mikro dan kecil artinya jumlah seluruh usaha yang mempunyai omzet maksimal 300 juta. Jumlah usaha mikro dan kecil merupakan akumulasi dari jumlah pelaku industri, perdagangan, pertanian, peternakan dan perikanan.

Persentase usaha mikro dan kecil merupakan perbandingan antara jumlah usaha mikro dan kecil dengan jumlah seluruh UKM yang ada di Kabupaten Gowa dan dinyatakan dalam persen. Persentase jumlah usaha mikro dan kecil dari tahun 2016-2019 cenderung stagnan. Di tahun 2020 terjadi lonjakan jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Gowa, hal ini dikarenakan adanya pendataan ulang yang melibatkan unsur kecamatan dalam pelaksanaannya pendataannya. Persentase usaha mikro dan kecil di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.244
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Gowa Tahun
2016 – 2020

Tahun	Jumlah usaha mikro dan kecil	Jumlah seluruh UKM	Persentase usaha mikro dan kecil
2016	6.382	6.641	96,10%
2017	6.677	6.936	96,27%
2018	6.844	7.104	96,34%
2019	6.972	7.233	96,39%
2020	40.520	40.786	93,35%

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.4.2.12. Penanaman Modal

1) Jumlah Investor Berskala Nasional

Investor adalah orang perseorangan atau lembaga baik domestik dan non domestik yang melakukan suatu investasi dalam jangka pendek atau jangka panjang. Sejak tahun 2016 sampai tahun 2020, peningkatan yang cukup signifikan ini disebabkan oleh semakin kondusifnya iklim penanaman modal di Kabupaten Gowa dan juga adanya kebijakan pemerintah pusat yang memberikan kemudahan dalam perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS).

Tabel 2.245
Jumlah Investor Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Investor	967	853	825	1618	2324

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2) Jumlah nilai investasi berskala nasional

Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perseorangan atau lembaga baik domestik dan non domestik untuk jangka waktu tertentu. Jumlah nilai investasi dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi yang telah disetujui dinas terkait. Nilai investasi berskala nasional di Kabupaten Gowa terus mengalami kenaikan khususnya di tahun 2019 naik sebesar 68,5% jika dibandingkan tahun 2018. Akan tetapi nilai investasi di Kabupaten Gowa pada tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini merupakan imbas dari terjadinya pandemi COVID-19 yang tidak hanya melanda Kabupaten Gowa melainkan melanda seluruh negara-negara di dunia.

Tabel 2.246
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah investasi berskala nasional
2016	454.183.423.500
2017	1.444.148.216.605
2018	1.960.011.456.993
2019	3.303.304.782.337
2020	2.310.586.870.405

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.4.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

1) Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Pembangunan pemuda menjadi salah satu agenda strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *The Sustainable Development Goals* (SDGs) telah menempatkan pemuda beserta peranan mereka dalam proses menuju pembangunan yang berkelanjutan. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mendukung pembangunan pemuda telah melakukan pembinaan organisasi kepemudaan salah satunya dengan melaksanakan Musrenbang Pemuda, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.247
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021

Tahun	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	Jumlah seluruh organisasi pemuda	Persentase organisasi pemuda yang aktif
2016	36	36	100,00%
2017	36	36	100,00%
2018	35	36	97,22%
2019	59	59	100,00%
2020	62	62	100,00%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Persentase organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Gowa telah mencapai 100 persen, namun pada tahun 2018 menurun menjadi 97 persen dan ditahun selanjutnya mengalami kenaikan menjadi 100 persen. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Pembinaan pemuda dilakukan melalui pembinaan organisasi kepemudaan, namun keberadaan dan kiprah organisasi pemuda di Kabupaten Gowa.

2) Persentase Wirausaha Muda

Wirausaha adalah pelaku utama dalam pembangunan ekonomi dan fungsinya untuk melakukan inovasi atau kombinasi-kombinasi yang baru untuk sebuah inovasi atau orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Persentase wirausaha muda adalah perbandingan antara jumlah wirausaha muda di bagi dengan jumlah seluruh wirausaha yang

dinyatakan dalam persen. Persentase Wirausaha muda di Kabupaten Gowa selama 2016-2021 terus mengalami peningkatan masing-masing dari 42,86 persen di tahun 2016 menjadi 75 persen di tahun 2021.

Persentase wirausaha muda di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.248
Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah wirausaha muda	Jumlah seluruh wirausaha	Persentase wirausaha muda
2016	3	7	42,86%
2017	4	8	50,00%
2018	4	10	40,00%
2019	16	20	80,00%
2020	15	20	75,00%

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa, Tahun 2021

3) Cakupan Pembinaan Olah Raga

Cakupan pembinaan olahraga merupakan perbandingan jumlah cabang olahraga yang dibina dengan jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar yang dinyatakan dalam persen. Cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.249
Cakupan Pembinaan Olah Raga Kabupaten
Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	Cakupan pembinaan olahraga
2016	27	27	100,00%
2017	28	28	100,00%
2018	29	29	100,00%
2019	48	48	100,00%
2020	49	49	100,00%

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa, Tahun 2021

4) Cakupan Pelatih yang Bersertifikat

Cakupan pelatih yang bersertifikasi adalah perbandingan antara jumlah pelatih bersertifikat dengan jumlah seluruh pelatih yang dinyatakan dalam persen. Perbaikan kompetensi pelatih di Kabupaten Gowa juga bergerak naik dari tahun 2016 sampai 2020, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.250
Pelatih yang Bersertifikat Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah pelatih yang bersertifikat	Jumlah seluruh pelatih	Cakupan pelatih yang bersertifikat
2016	38	80	47,50%
2017	42	80	52,50%
2018	47	80	58,75%
2019	47	80	58,75%
2020	48	80	60,00%

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa, Tahun 2021

5) Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Cakupan pembinaan atlet muda adalah perbandingan antara jumlah pembinaan atlet muda dengan jumlah seluruh pembinaan atlet muda yang dinyatakan dalam persen. Pembinaan atlet muda di Kabupaten Gowa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bergerak naik meskipun masih di bawah 50 persen, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.251
Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah atlet pelajar yang dibina	Jumlah seluruh atlet pelajar	Cakupan pembinaan atlet muda
2016	65	150	43,33%
2017	69	150	46,00%
2018	70	150	46,67%
2019	72	150	48,00%
2020	72	150	48,00%

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa, Tahun 2021

6) Jumlah Atlet Berprestasi

Olahraga adalah suatu aktivitas fisik yang bersifat positif yang dapat menyehatkan jasmani maupun rohani serta dapat mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Oleh sebab itu pembinaan olahraga seharusnya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk menjadikan olahraga sebagai ajang kompetisi dan prestasi. Setiap orang yang berolahraga tidak mempunyai tujuan yang sama, ada yang hanya untuk mencari kebugaran dan bagi seorang atlet tujuan utama berolahraga ialah ingin mendapatkan prestasi yang tinggi, sering disebut dengan prestasi olahraga. Berprestasi dikancah Nasional maupun Internasional, diantaranya melalui peningkatan pembinaan pelatih, pencarian bibit muda yang potensial, dan pembangunan sarana prasarana. Jumlah atlet berprestasi adalah jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dalam satu tahun.

Jumlah atlet berprestasi di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.252
Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah atlet berprestasi	10	8	13	10	10

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa, Tahun 2021

7) Jumlah Prestasi Olahraga

Jumlah prestasi cabang olahraga adalah jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun. Jumlah prestasi cabang olahraga di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.253
Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah prestasi olahraga	0	0	9	9	9

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.4.2.14. Statistik

1) Buku "Kabupaten Dalam Angka"

Buku Kabupaten dalam Angka merupakan salah satu sarana untuk menyediakan data statistik yang dapat menggambarkan indikator capaian pembangunan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah maupun swasta dan selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi hasil pembangunan. Ketersediaan Buku Kabupaten Dalam Angka Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.254
Buku Kabupaten Dalam Angka Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2) Buku "PDRB"

Sedangkan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah buku yang memuat jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan disuatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. Ketersediaan Buku PDRB Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.255
Buku PDRB Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.4.2.15. Persandian

1) Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Menurut Perka Lemsaneg Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. Urusan persandian saat ini dalam pengamanannya terhadap informasi publik, tidak berfokus pada informasi rahasia, namun juga keutuhan, keotentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan nir penyangkalan atas informasi dan yang terpenting adalah pelaksanaan keamanan informasi secara menyeluruh.

Tabel 2.256
Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah PD yg telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	Jumlah total PD	Persentase PD yg telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD
2016	54	54	100%
2017	54	54	100%
2018	54	54	100%
2019	54	54	100%
2020	54	54	100%

Sumber : Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.4.2.16. Kebudayaan

1) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah yang terkenal sebagai kerajaan besar di Indonesia pada jaman dahulu yaitu Kerajaan Gowa. Jejak-jejak peninggalan kebesarannya bukan hanya dapat dilihat dari megahnya Istana Balla Lompoa tapi juga dari keaneragaman kebudayaan yang masih dilestarikan hingga saat ini. Secara umum penyelenggaraan festival seni dan budaya sejak tahun 2016-2019 cenderung meningkat, akan tetapi menurun di tahun 2020 seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.257
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten
Gowa Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	14	14	16	16	8

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang dilestarikan

Cagar Budaya baik berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya maupun Kawasan Cagar Budaya memiliki peran penting bagi pemahaman dan pengembangan Sejarah, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga dalam rangka pelestarian dan pengelolaannya diperlukan adanya upaya perlindungan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan Cagar Budaya. Perkembangan pembangunan di Kabupaten Gowa saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat, sehingga implikasinya dapat mengancam Keberadaan Cagar Budaya, maka diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya. Dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya Kabupaten Gowa mempunyai tujuan melestarikan warisan budaya daerah dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat daerah melalui Cagar Budaya, memperkuat kepribadian daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah, dan mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat Nasional dan Internasional. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.258
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100 BCB	102 BCB	493 BCB	493 BCB	493 BCB

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

3) Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi

Karya budaya Sulawesi Selatan yang dimasukkan sebagai Objek Pemajuan Kebudayaan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. Terdapat 2 Kabupaten yang tercatat, salah satunya adalah Kabupaten Gowa. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi dari tahun 2016 sampai hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.259
Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	0	2	0	0

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

4) Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu

Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu dari tahun 2015 sampai 2020 adalah kompleks istana dan museum Balla Lompoa yang merupakan salah satu situs peninggalan Kerajaan Gowa.

Tabel 2.260
Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.4.2.17. Perpustakaan

1) Jumlah Pengunjung Perpustakaan per-Tahun

Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Jumlah

pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.261
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	150.533	2.014	16.547	17.172	285

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2) Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan adalah jumlah buku yang ada di perpustakaan. Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.262
Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021

Tahun	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
2016	3.731	7.464	0,50
2017	4.376	8.764	0,50
2018	2.949	4.581	0,64
2019	3.562	6.389	0,56
2020	3.562	6.389	0,56

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

3) Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk

Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah dimana rasio perpustakaan persatuan penduduk adalah perbandingan antara jumlah perpustakaan per 1.000 penduduk. Rasio perpustakaan persatuan penduduk di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.263
Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Perpustakaan	Jumlah Penduduk	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk
2016	23	735.493	0,031
2017	23	748.200	0,030
2018	23	760.607	0,030
2019	23	772.684	0,029
2020	23	765.836	0,030

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

4) Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun

Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun adalah jumlah rata-rata orang yang mengunjungi perpustakaan dalam satu tahun. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.264
Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun	52,94	0,31	3,62	2,22	0,0003

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

5) Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan adalah jumlah judul buku yang ada di perpustakaan. Jumlah koleksi judul buku yang tersediadi perpustakaan Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.265
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Kabupaten
Gowa Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	3.731	4.376	2.949	3.562	3.562

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

6) Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat

Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang memiliki Sertifikat adalah perbandingan antara jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat dengan Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang dinyatakan dalam persen. Perpustakaan di Kabupaten Gowa belum mempunyai pustakawan, tenaga teknis dan penilai.

2.4.2.18. Kearsipan

1) Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku adalah perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku dengan jumlah seluruh perangkat daerah. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.266
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku arsip secara baku	Jumlah Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku
2016	-	54	0,00%
2017	43	54	79,62%
2018	54	54	100,00%
2019	54	54	100,00%
2020	54	54	100,00%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2) Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa terus berupaya untuk memperbaiki pengelolaan arsip agar semua dokumen penting terkait dengan kegiatan pemerintah reliabel dan akurat untuk digunakan. Untuk itu, pemerintah daerah dalam lima tahun terakhir terus menambah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Gowa.

Tabel 2.267
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Gowa Tahun 2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	-	-	79,62%	100,00%	100,00%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa, Tahun 2020

2.4.3. Layanan Urusan Pilihan

2.4.3.1. Pariwisata

1) Kunjungan Wisata

Kunjungan wisata dihitung dengan membandingkan antara Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-kabupaten dengan jumlah seluruh kunjungan wisata yang direncanakan se-kabupaten yang dinyatakan dalam persen. Jumlah kunjungan wisata setiap tahun mengalami kenaikan hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain, perbaikan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan, peningkatan promosi wisata oleh pemerintah daerah dan juga pelaksanaan event Beautiful Malino yang mulai digalakkan sejak tahun 2017.

Tabel 2.268
Kunjungan Wisata Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan	Kunjungan wisata
2016	180.988	100.616	179,88%
2017	199.217	107.235	185,78%
2018	214.553	113.854	188,45%
2019	287.687	120.473	238,80%
2020	150.435	127.092	118,37%

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2) Lama Kunjungan Wisata

Secara umum lama tinggal wisatawan pada suatu destinasi wisata dipengaruhi oleh ketersediaan informasi yang cukup tentang suatu destinasi wisata bagi wisatawan sehingga memutuskan untuk melakukan eksplorasi lebih mendalam destinasi tersebut. Rata-rata lama kunjungan wisata di Kabupaten Gowa yaitu pada yaitu 1-2 hari.

Tabel 2.269
Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Lama Kunjungan Wisata	1,5	2	2	1,5	1,25

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.4.3.2. Pertanian

1) Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal merupakan perbandingan antara produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya dengan luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal yang dinyatakan dalam persen. Produktivitas padi atau bahan pangan lokal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.270
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

Tahun		Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)	Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
2016	Padi	401.979	69.847,6	5,76
	Jagung	262.298	44.993,8	5,83
2017	Padi	408.899	67.666,2	6,04
	Jagung	304.621	48.523,0	6,28
2018	Padi	412.964	62.397,6	6,62
	Jagung	337.174	47.677,0	7,07
2019	Padi	403.540	62.643,8	6,44
	Jagung	288.200	38.278,0	7,53
2020	Padi	416.778	69.144,4	5,9
	Jagung	296.846	53.455,1	6,1

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Produktivitas padi per hektar di Kabupaten Gowa selama tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar 5,76 ton pertahun.

2) Cakupan Bina Kelompok Petani

Cakupan bina kelompok petani merupakan perbandingan antara jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan Pemda

dengan jumlah kelompok tani yang dinyatakan dalam persen. Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan Pemda semakin menurun setiap tahunnya, hal ini dikarenakan ketersediaan anggaran terkait pemberian bantuan kepada kelompok petani juga semakin berkurang. Cakupan bina kelompok petani di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 271
Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Gowa Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n	jumlah kelompok tani	Cakupan bina kelompok petani
2016	394	3659	10,77%
2017	223	3659	6,09%
2018	103	3659	2,81%
2019	88	3659	2,41%
2020	68	3659	1,86%

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.4.3.3. Perdagangan

1) Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor. Di Kabupaten Gowa dari tahun 2016-2020 belum ada nilai impor sehingga nilai ekspor masih mendominasi. Ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.272
Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Ekspor Bersih Perdagangan	-	3.383.482,97	2.699.571,36	2.966.976,00	1.467.865,00

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2) Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal merupakan perbandingan antara jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda tahun dengan jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang dinyatakan dalam persen. Cakupan bina kelompok

pedagang/usaha informal di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.273
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
2016	2.201	2.753	79,95%
2017	2.487	2.949	84,33%
2018	2.580	3.151	81,88%
2019	2.868	3.384	84,75%
2020	2.768	3.597	82,99%

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.4.3.4. Perindustrian

1) Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Cakupan bina kelompok pengrajin merupakan perbandingan antara jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan Pemerintah Daerah dengan jumlah kelompok pengrajin yang dinyatakan dalam persen. Cakupan bina kelompok pengrajin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.274
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan Pemda Tahun n	Jumlah kelompok pengrajin	Cakupan bina kelompok pengrajin
2016	511	514	99,42%
2017	541	574	94,25%
2018	544	614	88,60%
2019	547	654	83,64%
2020	560	699	80,11%

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.4.3.5. Transmigrasi

1) Persentase Transmigrasi Swakarsa

Transmigrasi swakarsa atau yang biasa disebut sebagai transmigrasi spontan adalah transmigrasi yang dilakukan dengan biaya sendiri, namun berdasarkan bimbingan dan juga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Di Kabupaten Gowa sampai saat ini

belum ada transmigrasi swakarsa, yang ada di Kabupaten saat ini adalah transmigrasi lokal.

2.4.3.6. Kelautan dan Perikanan

1) Produksi Perikanan

Produksi perikanan adalah banyaknya produksi perikanan yang diperoleh dalam rentan waktu tertentu. Selama kurun waktu 2016-2020 produksi perikanan di Kabupaten Gowa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Produksi Perikanan di dukung oleh berbagai faktor yakni diantaranya luas areal pemeliharaan ikan, alat penangkapan ikan, dan armada yang dipakai untuk menangkap ikan.

Sesuai data dalam tabel terlihat bahwa kontribusi produksi perikanan kelompok nelayan mengalami peningkatan yakni dari 101,49% tahun 2016 meningkat menjadi 116,09% di tahun 2020.

Tabel 2.275
Produksi Perikanan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Produksi Ikan (Ton)	Target Daerah (Ton)	Produksi perikanan
2016	693.2	683.03	101,49%
2017	727.7	721.5	100,86%
2018	781.5	762.2	102,53%
2019	840.3	805.4	104,33%
2020	974.1	839.1	116,09%

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2) Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah konsumsi ikan dengan target daerah yang dinyatakan dalam persen. Konsumsi ikan di Kabupaten Gowa selama lima tahun terakhir telah mencapai 100% (seratus persen), seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.276
Konsumsi Ikan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)	Target Daerah (Kg)	Konsumsi Ikan
2016	46,82	46,82	100,00%
2017	47,06	47,06	100,00%
2018	47,22	47,22	100,00%
2019	47,45	47,45	100,00%
2020	47,57	47,57	100,00%

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

3) Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan dihitung berdasarkan perbandingan antara Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dengan target kelompok nelayan yang dinyatakan dalam persen. Jumlah Kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan selama 5 tahun terakhir baru berkisar pada angka 25% (dua puluh lima persen). Cakupan bina kelompok nelayan diarahkan untuk kontribusi terhadap ketahanan pangan.

Tabel 2.277
Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n	Jumlah kelompok nelayan	Cakupan bina kelompok nelayan
2016	3	14	21,43%
2017	4	16	25,00%
2018	5	20	25,00%
2019	6	24	25,00%
2020	7	27	25,93%

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

4) Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan merupakan perbandingan jumlah produksi ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan dengan jumlah produksi ikan di daerah yang dinyatakan dalam persen. Kontribusi produksi perikanan kelompok nelayan mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun peningkatan tersebut masih sangat kecil, yakni dari 6,35% di tahun

2016 meningkat menjadi 9,99% di tahun 2020, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.278
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	Jumlah produksi ikan di daerah	Produksi perikanan kelompok nelayan
2016	35,7	562,51	6,35%
2017	43,1	571	7,55%
2018	50,7	579,5	8,75%
2019	58,3	588,2	9,91%
2020	60,2	602,8	9,99%

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

5) Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis aman adalah perbandingan antara jumlah total hasil tangkapan dalam satu tahun terhadap jumlah tangkapan yang diperbolehkan dalam tahun yang sama, dinyatakan dalam persen.

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologi yang aman di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.279
Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam Batasan Biologis yg Aman Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah tangkapan ikan	80% dari tangkapan maksimum lestari	Proporsi tangkapan ikan yg berada dalam batasan biologis yg aman
2016	566,6	659,20	85,95%
2017	575,1	678,98	84,70%
2018	582,3	699,35	83,26%
2019	588,0	720,33	81,63%
2020	602,8	741,94	81,25%

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.4.4. Penunjang Urusan

2.4.4.1. Perencanaan Pembangunan

1) Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dibuat untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Kabupaten Gowa telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025.

2) Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dibuat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang berisi visi, misi dan program kepala daerah terpilih dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN. Kabupaten Gowa telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021.

3) Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun Dokumen RKPD Kabupaten Gowa dari tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

- Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Gowa Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017;

- Peraturan Bupati Gowa Nomor 18A Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2018;
- Peraturan Bupati Gowa Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019;
- Peraturan Bupati Gowa Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020.

Tabel 2.280
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Gowa, Tahun 2021

4) Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. Kabupaten Gowa telah menyusun dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032.

5) Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke Dalam RKPD

Konsistensi Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD merupakan perbandingan antara jumlah program yang ada di RKPD dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan dan dinyatakan dalam persen. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 81
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
2016	189	245	77,14%
2017	245	262	93,52%
2018	229	229	100,00%
2019	188	188	100,00%
2020	181	181	100,00%

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Gowa, Tahun 2021

6) Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD

Konsistensi Penjabaran program RKPD kedalam APBD merupakan perbandingan antara jumlah program yang ada di APBD dengan jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan dan dinyatakan dalam persen. Angka 100% menunjukkan dokumen RKPD telah konsisten dan angka dibawah 100% menunjukkan terjadi inkonsistensi antar dokumen APBD dengan RKPD. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 282
Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah program APBD Tahun berkenaan	Jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD
2016	189	189	100,00%
2017	245	245	100,00%
2018	229	229	100,00%
2019	188	188	100,00%
2020	188	188	100,00%

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Gowa, Tahun 2021

7) Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamankan setiap RTR, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten dalam penyusunannya harus memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka

menengah nasional, provinsi, dan kabupaten. Dan dalam pelaksanaannya, RTRW dengan rencana pembangunan dapat berjalan dua arah. Penyusunan RTRW kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan RPJMD, dan sekaligus RTRW Kabupaten juga menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD dan RPJPD.

Tabel 2.283
Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW
Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2020

Tahun	Kesesuaian prog/keg pembangunan terhadap pola dan struktur ruang	Dokumen RTRW	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW
2016	18 Program	1 Dokumen	65%
	37 Kegiatan		59%
2017	18 Program	1 Dokumen	78%
	37 Kegiatan		57%
2018	18 Program	1 Dokumen	78%
	37 Kegiatan		75%
2019	18 Program	1 Dokumen	87%
	37 Kegiatan		75%
2020	18 Program	1 Dokumen	91%
	37 Kegiatan		75%

Sumber : Dinas PU dan PR Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.4.4.2. Keuangan

1) Persentase SiLPA Terhadap APBD

SiLPA adalah sisa lebih perhitungan anggaran sebagai selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Sedangkan persentase SiLPA merupakan perbandingan antara total SiLPA dengan total APBD yang dinyatakan dalam persen. Persentase SiLPA terhadap APBD di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.284
Persentase SiLPA Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2020

Tahun	Total SiLPA	Total APBD	Persentase SiLPA
2016	128.067.328.659,33	1.836.786.293.312,73	6,97%
2017	146.188.502.771,23	1.902.076.670.273,33	7,69%
2018	91.351.245.045,91	1.982.464.216.421,23	4,61%
2019	92.540.509.568,07	2.013.411.115.780,91	4,60%
2020	149.148.157.506,03	1.975.626.062.446,40	7,55%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2) Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana

Persentase program yang tidak terlaksana di Kabupaten Gowa dan jumlah kegiatan yang tidak terlaksana di Kabupaten Gowa sebagai berikut:

Tabel 2.285
Persentase Program yang tidak Terlaksana
di Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Program Dalam APBD Yang Tidak Dilaksanakan	Total Program Dalam APBD	Persentase Program Yang Tidak Terlaksana
2016	5	189	2,65%
2017	6	245	2,45%
2018	6	229	2,62%
2019	5	188	2,66%
2020	8	188	4,26%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Tabel 2.286
Persentase Kegiatan Yang Tidak Terlaksana Kabupaten
Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Kegiatan Dalam APBD Yang Tidak Dilaksanakan	Total Kegiatan Dalam APBD	Persentase Kegiatan Yang Tidak Terlaksana
2016	7	1103	0,63%
2017	8	1119	0,71%
2018	11	1127	0,98%
2019	8	1110	0,72%
2020	27	872	3,10%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, Tahun 2021

3) Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Persentase belanja pendidikan merupakan perbandingan antara jumlah belanja bidang urusan pendidikan dengan total APBD yang dinyatakan dalam persen. Belanja Pendidikan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa sudah memenuhi amanat Undang-Undang yaitu sebesar 20 persen dari APBD, hal ini terlihat dari data yang ada dari tahun 2016-2020 alokasi anggaran untuk pendidikan di Kabupaten Gowa telah berada diatas 20 persen disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.287
Persentase Belanja Pendidikan (20%) Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan	Total APBD	Persentase belanja pendidikan (20%)
2016	574.454.409.701,00	1.836.786.293.312,73	31,27%
2017	557.175.572.516,00	1.902.076.670.273,33	29,29%
2018	578.246.657.958,00	1.982.464.216.421,23	29,17%
2019	589.508.165.664,71	2.013.411.115.780,91	29,28%
2020	559.912.562.000,13	1.975.626.062.446,40	28,34%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, Tahun 2021

4) Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Persentase belanja kesehatan merupakan perbandingan antara jumlah belanja bidang urusan kesehatan dengan total APBD yang dinyatakan dalam persen. Belanja Kesehatan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa selama tahun 2016-2020 telah melebihi 10% dan semakin meningkat setiap tahunnya, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.288
Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan	Total APBD	Persentase belanja kesehatan (10%)
2016	228.387.632.971,00	1.836.786.293.312,73	12,43%
2017	282.474.850.936,25	1.902.076.670.273,33	14,85%
2018	303.042.436.886,00	1.982.464.216.421,23	15,29%
2019	319.134.559.443,31	2.013.411.115.780,91	15,85%
2020	343.230.685.128,00	1.975.626.062.446,40	17,27%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, Tahun **2021**

5) Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung

Perbandingan belanja langsung dengan belanja tidak langsung merupakan perbandingan antara jumlah belanja langsung dan jumlah belanja tidak langsung terhadap total APBD yang dinyatakan dalam persen. Di tahun 2016 proporsi belanja tidak langsung masih lebih dominan dibanding belanja langsung. Sedangkan untuk tahun 2017-2019 mulai terlihat adanya penurunan belanja tidak langsung dan meningkatnya belanja langsung.

Tabel 2.289
Persentase Belanja Langsung Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Belanja Langsung	Total APBD	Persentase belanja langsung
2016	665.205.601.530,00	1.836.786.293.312,73	36,22%
2017	873.409.009.977,25	1.902.076.670.273,33	45,92%
2018	899.913.411.399,28	1.982.464.216.421,23	45,39%
2019	887.620.119.527,91	2.013.411.115.780,91	44,09%
2020	831.280.811.012,66	1.975.626.062.446,40	42,08%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, Tahun 2021

Tabel 2.290
Persentase Belanja Tidak Langsung Kabupaten
Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Belanja Tidak Langsung	Total APBD	Persentase belanja tidak langsung
2016	937.341.157.218,00	1.836.786.293.312,73	51,03%
2017	854.553.516.478,00	1.902.076.670.273,33	44,93%
2018	927.727.665.691,41	1.982.464.216.421,23	46,80%
2019	978.336.280.228,57	2.013.411.115.780,91	48,59%
2020	1.050.981.828.905,89	1.975.626.062.446,40	53,19%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, Tahun 2021

6) Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa

Bagi hasil kabupaten/kota dan desa merupakan perbandingan antara jumlah belanja bagi hasil kabupaten/kota dan

desa yang dinyatakan dalam persen. Belanja bagi hasil dan desa di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.291
Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Kabupaten
Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/kota/desa	Total APBD	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa
2016	86.997.649.524,20	1.836.786.293.312,73	4,74%
2017	87.871.879.826,00	1.902.076.670.273,33	4,62%
2018	75.891.104.209,00	1.982.464.216.421,23	3,83%
2019	101.883.197.749,97	2.013.411.115.780,91	5,06%
2020	90.192.159.355,40	1.975.626.062.446,40	4,57%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, Tahun 2021

7) Penetapan APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri, ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Kabupaten Gowa pernah mengalami keterlambatan Penetapan APBD yaitu pada Penetapan APBD Kabupaten Gowa Tahun 2016.

Tabel 2.292
Penetapan APBD Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Penetapan APBD
2016	Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 27 Januari 2016
2017	Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016
2018	Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017
2019	Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018
2020	Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.4.4.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1) Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal adalah perbandingan antara ASN yang mengikuti diklat teknis dengan jumlah seluruh ASN yang dinyatakan dalam persen. Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa capaian persentase keikutsertaan ASN dalam pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Gowa masih rendah.

Tabel 2.293
Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah total ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
2016	512	8.963	5,71%
2017	552	7.759	7,11%
2018	552	7.759	7,11%
2019	663	7.530	8,80%
2020	693	7.564	9,16%

Sumber : BKPSDM Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2) Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural adalah perbandingan antara jumlah ASN yang telah mengikuti diklat struktural dengan jumlah total jabatan yang dinyatakan dalam persen. Persentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.294
Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah pejabat ASN yang mengikuti diklat struktural	Jumlah total jabatan	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
2016	366	999	36,64%
2017	406	1071	37,91%
2018	406	1071	37,91%
2019	466	825	56,48%
2020	466	825	56,48%

Sumber : BKPSDM Kabupaten Gowa, Tahun 2021

3) Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan Pimpinan Tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai pada Instansi Pemerintah. Pada tahun 2017 terjadi perubahan jumlah pejabat tinggi pada Pemerintah Kabupaten Gowa, hal ini dikarenakan adanya perubahan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Tabel 2.295
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	45	42	42	42	42

Sumber : BKPSDM Kabupaten Gowa, Tahun 2021

4) Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah

Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Pada tahun 2017 sampai tahun 2019 jumlah Jabatan Administrasi di Kabupaten Gowa stagnan sebesar 208 orang, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.296
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	-	208	208	208	208

Sumber : BKPSDM Kabupaten Gowa, Tahun 2021

5) Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah di Kabupaten Gowa dapat dilihat di tahun 2020 sebanyak 5.084 ASN.

2.4.4.4. Penelitian dan Pengembangan

1) Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Persentase implementasi rencana kelitbangan merupakan perbandingan antara jumlah kelitbangan dalam RKPD dengan jumlah kelitbangan dalam RPJMD yang dinyatakan dalam persen. Pada tahun 2016 kelitbangan masih menjadi bagian dari Bappeda, sehingga hal-hal terkait kelitbangan belum menjadi prioritas perangkat daerah saat itu. Sehingga hal-hal terkait kelitbangan baru betul-betul dilaksanakan pada tahun 2019 seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.297
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah kelitbangan dalam RKPD	Jumlah kelitbangan dalam RPJMD	Persentase implementasi rencana kelitbangan
2016		Tidak Ada	
2017		Tidak Ada	
2018		Tidak Ada	
2019	3	15	20,00%
2020	2	15	13,33%

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2) Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan merupakan perbandingan antara jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti (sesuai dengan Renja perangkat daerah yang berkenaan) yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dengan jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah, dan dinyatakan dalam persen. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.298
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti	Jumlah kelitbangan dalam Renja PD	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan
2016		Tidak Ada	
2017		Tidak Ada	
2018		Tidak Ada	
2019	3	3	100,00%
2020	2	2	100,00%

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

3) Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah

Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah adalah jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dengan jumlah total perangkat daerah yang dinyatakan dalam persen. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.299
Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan
Inovasi Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi	Jumlah total perangkat daerah	Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah
2016		Tidak Ada	
2017		Tidak Ada	
2018		Tidak Ada	
2019	2	54	3,70%
2020	10	54	18,51%

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

4) Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di Daerah

Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah adalah jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dengan jumlah inovasi yang diusulkan. Dalam kurun waktu 2016-2021 belum ada kebijakan inovasi yang diterapkan di Kabupaten Gowa.

2.4.4.5. Pengawasan

1) Persentase Tindak Lanjut Temuan

Persentase tindak lanjut temuan merupakan perbandingan antara jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan jumlah total temuan yang dinyatakan dalam persen. Persentase tindak lanjut temuan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.300
Persentase Tindak Lanjut Temuan Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	Jumlah total temuan	Persentase tindak lanjut temuan
2016	39	229	17,03%
2017	134	215	62,33%
2018	113	264	42,80%
2019	164	322	50,93%
2020	140	182	76,92%

Sumber : Inspektorat Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2) Persentase Pelanggaran Pegawai

Persentase pelanggaran pegawai merupakan perbandingan antara jumlah ASN yang dikenai sanksi dengan jumlah total ASN yang dinyatakan dalam persen. Persentase pelanggaran pegawai di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.301
Persentase Pelanggaran Pegawai Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	Jumlah total ASN	Persentase pelanggaran pegawai
2016	0	8.963	0,00%
2017	0	7.759	0,00%
2018	8	7.759	0,10%
2019	11	7.530	0,15%
2020	11	7.329	0,15%

Sumber : BKPSDM Kabupaten Gowa, Tahun 2021

3) Jumlah Temuan BPK

Indikator jumlah temuan BPK dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan total seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Jumlah temuan BPK di Kabupaten Gowa semakin menurun setiap tahunnya, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.302
Jumlah Temuan BPK Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah temuan BPK	84	51	41	35	27

Sumber : Inspektorat Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.4.4.6. Sekretariat Dewan

Kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gowa sampai saat ini telah menunjukkan adanya sinergitas antara program kerja pemerintah daerah dan DPRD yang diindikasikan dengan ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD, tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen RPJMD maupun RKPD dan terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 303
Integrasi Program DPRD dalam Pelaksanaan Tupoksi Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJM maupun RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat Dewan Kabupaten Gowa, Tahun 2021

2.5. PENCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2016-2020

Dari 350 indikator kinerja pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dilakukan analisa data, yaitu :

- a. Indikator kinerja pemerintah daerah yang melampaui target sebanyak 94 indikator (28,86%);
- b. Indikator kinerja pemerintah daerah yang mencapai target sebanyak 173 indikator (49,43 %);
- c. Indikator kinerja pemerintah daerah yang belum mencapai target sebanyak 83 indikator (23,71 %).

Disamping pengukuran kinerja dari kedua aspek tersebut di atas yang menggambarkan kinerja impact Penyelenggaraan Urusan Pemerintah, pengukuran capaian aspek pelayanan umum yang menggambarkan kinerja outcome penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Gowa tahun 2016-2021 dengan berbagai indikator dan capaiannya sebagaimana disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 304
Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1)	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB							
1.1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB ADHB (juta)	21,11	23,08	25,06	27,08	27,45	27,45	Tercapai
1.1.1.1.2	Pertumbuhan PDRB ADHK (juta)	7,57	7,21	7,14	7,46	1,76	1,76	Tercapai
1.1.1.1.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,57	7,21	7,14	7,46	1,76		Belum Tercapai
1.1.1.2	Laju Inflasi	3,68	3,37	3,48	3,72	2,13	3,0-1,0	Tercapai
1.1.1.3	PDRB per kapita							
1.1.1.3.1	PDRB per kapita ADHB (juta)	15.471,11	17.192,66	19.063,89	20.938,87	21.531,88	56.690,00	Belum Tercapai
1.1.1.3.2	PDRB per kapita ADHK (juta)	11.166,02	11.971,36	12.822,68	13.783,11	14.025,76		
1.1.1.4	Indeks Gini	0,34	0,395	0,384	0 ,354	0,345	0,414	Terlampau
1.1.1.5	Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia							
1.1.1.6	Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,1505	0,1521	0,1536	0,1544	0,1544	0,620	Terlampau
1.1.1.7	Persentase penduduk miskin	8,4	8,42	7,83	7,53	7,38	7,38	Tercapai
1.1.1.8	Persentase Penduduk Di atas Garis Kemiskinan	91,6	91,58	92,17	92,47	92,62	92,62	Tercapai
1.1.1.9	Rasio Kesenjangan Kemiskinan	1,59	1,42	1,25	0,92	0,92	0,92	Tercapai
1.1.1.10	Proporsi Penduduk Dengan Pendapatan Kurang Dari USD 1,00 (PPP) Per Kapita Per Hari	8,36	8,39	7,8	7,76	7,76	7,76	Tercapai
1.1.1.11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,7	68,33	68,87	69,66	70,14	72,18	Belum Tercapai

Gambaran Umum Kondisi Wilayah

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1.1.1.11.1	Angka Harapan Hidup (tahun)	69,92	69,65	70,11	70,37	70,57	70,2	Tercapai
1.1.1.11.2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,03	13,04	13,29	13,48	13,64	13,64	Tercapai
1.1.1.11.3	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,52	7,74	7,75	7,97	8,19	8,19	Tercapai
1.1.1.11.4	Pengeluaran Per Kapita (Ribuan)	8.717	9.009	9.179	9.369	9.394	9.394	Tercapai
1.1.1.12	Angka Melek Huruf (%)	96,70	92,43	92,6%	96,10	96,63	95,61	Tercapai
1.1.1.13	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,88	69,94	69,98	70,01	70,43	70,43	Tercapai
1.1.1.14	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0,02	0,02	0,02	0,07	0,10	0,10	Tercapai
1.1.1.15	Prevelensi Balita Gizi Kurang (%)	0,59	6,90	1,73	5,82	4,62	4,62	Tercapai
1.1.1.16	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	65,87	80,84	86,83	95,81	100,00	100,00	Tercapai
1.1.1.17	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)	-	62,17	67,42	65,64	69,42	61,53	Tercapai
1.1.1.18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	-	62,17	67,42	65,63	67,62	62,42	Tercapai
1.1.1.19	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	-	6,14	4,80	4,87	6,44	5,22	Belum Tercapai
1.1.1.20	Rasio Penduduk yang Bekerja (%)	-	93,86	95,20	95,13	93,56	94,62	Belum Tercapai
1.1.1.21	Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja (%)	-	3,83	3,66	3,96	3,80	3,80	Tercapai
1.1.1.22	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (%)	-	58,35	64,19	62,44	64,95	64,95	Tercapai
1.1.1.23	Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja (%)	-	36,60	36,84	36,72	43,47	36,77	Terlampau
1.1.1.24	Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I (%)	48,37	39,77	24,19	48,07	Tidak dilakukan penghitungan	48,37	Belum Tercapai
1.1.1.25	Indeks Kepuasan Masyarakat	74,9	75,97	79,46	83,86	83,13	83	Tercapai
1.1.1.26	Persentase PAD terhadap Pendapatan (%)	13,16	14,99	12,19	12,74	12,82	41,26	Belum Tercapai
1.1.1.27	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	Belum Tercapai

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
1.1.1.28	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	89,50	89,60	89,70	89,80	89,90	83,7	Terlampau
1.1.1.29	Penguatan Cadangan Pangan (Ton)	-	2	2	2	2	2	Tercapai
1.1.1.30	Penanganan Daerah Rawan Pangan	1	1	2	2	3	2	Tercapai
1.1.1.31	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB (%)	16,03	14,99	14,00	12,64	19,47	19,47	Tercapai
1.1.1.32	Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) terhadap PDRB (%)	83,45	83,56	83,70	83,00	84,21	23,77	Terlampau
1.1.1.33	Produksi Sektor Pertanian	1.882.274	1.423.158	1.542.118	1.351.141	1.488.373	1.116.510	Terlampau
1.1.1.34	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB (%)	3,64	3,49	3,31	3,27	4,90	1,88	Terlampau
1.1.1.35	Produksi Sektor Perkebunan	4.675,18	4.668,61	5.757,91	16.722,62	12.603,49	10.210,00	Terlampau
1.1.1.36	Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB (%)	100	100	100	100	100	91,17	Terlampau
1.1.1.37	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	3,75	3,88	3,97	4,01	3,57	3,57	Tercapai
1.1.1.38	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	5,29	5,41	5,37	5,33	4,80	9,48	Belum Tercapai
1.1.1.39	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	11,67	12,31	12,71	13,11	7,87	14,9	Belum Tercapai
1.1.1.40	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	6,63	6,72	6,50	6,78	6,28	8	Belum Tercapai
1.1.1.41	Pertumbuhan Industri (%)	0,59	2,70	3,04	1,50	1,81	1,81	Tercapai
2)	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
2.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	1.570.370,37	1.698.518,52	1.914.814,85	1.966.666,67	1.963.703,70	1.963.703,70	Tercapai
2.2	Nilai Tukar Petani	104,73	100,85	102,29	103,05	103,05	103,05	Tercapai
2.3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	52,67	49,46	52,55	51,14	48,55	48,55	Tercapai
2.4	Produktivitas Total Daerah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Tercapai

Gambaran Umum Kondisi Wilayah

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.5	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa (%)				96,41			
2.6	Indeks Pembangunan Desa	0	-	0	0	0	0	Tercapai
2.7	Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDB (%)	-	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	Tercapai
2.8	Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum dan BPR	2,04	2,12	2,25	2,22	2,17	2,17	Tercapai
2.9	Angka Kriminalitas yang Tertangani (%)	0,12	0,20	0,18	0,16	0,11	0,11	Tercapai
2.10	Rasio Ketergantungan	57	54	51	51	66	66	Tercapai
3)	PELAYANAN UMUM							
3.1.	Pelayanan Urusan Wajib							
3.1.1	Pendidikan							
3.1.1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	96,70	70,34	97,90	98,03	98,15	70,24	Terlampau
3.1.1.2	Angka Partisipasi Kasar							
	- SD/MI (%)	111,34	113,26	110,61	104,51	104,89	100	Terlampau
	- SMP/MTs (%)	72,84	79,58	92,85	104,25	99,20	96,94	Terlampau
	- SMA/SMK/MA (%)	102,46	-	-	-	-	-	-
3.1.1.3	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan							
	- SD/MI	1,99	1,80	1,77	1,80	1,67	1,99	Belum Tercapai
	- SMP/MTs	1,62	1,56	1,68	1,61	1,27	1,75	Belum Tercapai
	- SMA/SMK/MA	1,20	-	-	-	-		
3.1.1.4	Angka Partisipasi Murni							
3.1.1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A (%)	99,5	97,92	95,82	97,92	97,01	100	Belum Tercapai
3.1.1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B (%)	68,21	72,22	73,57	72,22	74,27	100	Belum Tercapai

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.1.1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	63,88	59,7	59,04	59,7	60,5		
3.1.1.5	Angka Partisipasi Sekolah							
3.1.1.5.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/ Paket A (%)	98,76	99,42	99,53	99,53	98,90	98,90	Tercapai
3.1.1.5.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%)	95,00	96,07	96,38	96,38	97,01	97,01	Tercapai
3.1.1.5.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	64,44	-	-	-	-		
3.1.1.6	Angka Putus Sekolah							
3.1.1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	-	0,26	0,26	0,27	0,29	0	Belum Tercapai
3.1.1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	-	0,000092	0,000045	0,000055	0,000078	0	Belum Tercapai
3.1.1.6.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)	-	1,37	1,09	1,04	0,96	0	Belum Tercapai
3.1.1.7	Angka Kelulusan							
3.1.1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.1.1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.1.1.7.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)	100	-	-	-	-		
3.1.1.8	Angka Melanjutkan							
3.1.1.8.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	96,32	71,94	100,00	100,0	95,05	100	Belum Tercapai
3.1.1.8.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	61,42	-	-	-	-		
3.1.1.9	Fasilitas Pendidikan							
3.1.1.9.1	Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (%)	70,88	71,40	71,77	73,38	77,62	77,62	Tercapai

Gambaran Umum Kondisi Wilayah

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.1.1.9.2	Persentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik (%)	75,29	75,64	76,36	42,11	56,25	56,25	Tercapai
3.1.1.10	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah							
3.1.1.10.1	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	53 ,26	53, 03	59 ,04	52 , 62	51,56	51,56	Tercapai
3.1.1.10.2	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	22,71	-	-	-	-	-	
3.1.1.11	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	1 : 19	1 : 16	1 : 20	1 : 17	1 : 17	1 : 36	Tercapai
3.1.1.12	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	1 : 18	1 : 16	1 : 16	1 : 15	1 : 15	1 : 36	Tercapai
3.1.1.15	Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar (%)	92,67	92,32	85,45	98,13	87,49	87,49	Tercapai
3.1.1.16	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (%)	91,09	98,16	98,71	96,42	96,63	95,61	Terlampai
3.1.1.17	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)	88,92	94,93	92,72	94,75	85,6	100	Belum Tercapai
3.1.2.	Kesehatan							
3.1.2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup (kasus)	8	60	3	3	3	1.055	Terlampai
3.1.2.2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (kasus)	992	941	997	997	997	992	Terlampai
3.1.2.3	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup (kasus)	6	9	11	5	1	1.147	Terlampai
3.1.2.4	Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup (kasus)	6	5	3	3	3	814	Terlampai
3.1.2.5	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup (kasus)	142	103	130	103	111	113	Terlampai

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.1.2.6	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	11,79	12	13,42	13,12	13,90	13,95	Belum Tercapai
3.1.2.7	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	0,27	0,25	0,25	0,20	0,19	0,19	Tercapai
3.1.2.8	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,0014	0,0013	0,0026	0,0026	0,0039	1,23	Belum Tercapai
3.1.2.9	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	0,192	0,127	0,201	0,23	0,266	19	Belum Tercapai
3.1.2.10	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	0,429	0,348	0,463	0,458	0,268	37,72	Belum Tercapai
3.1.2.11	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani (%)	77,83	73,31	77,26	72,39	51,18	83	Belum Tercapai
3.1.2.12	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%)	94,71	95,83	98,76	100,00	92,88	96,5	Belum Tercapai
3.1.2.13	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	100	100	100	100	90,42	96,5	Belum Tercapai
3.1.2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.1.2.15	Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (%)	3,02	3,00	3,19	3,00	3,39	3,39	Tercapai
3.1.2.16	Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak (%)	112,56	104,89	108,55	105,70	98,18	95	Terlampau
3.1.2.17	Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk	1,88	0	1	0	0	2	Terlampau
3.1.2.18	Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani (%)	48,76	32,28	12,17	11,56	14,88	30	Belum Tercapai
3.1.2.19	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (%)	49,02	41,84	41,34	45,37	10,19	100	Belum Tercapai
3.1.2.20	Tingkat Prevelensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	161,8	195,67	207,47	224,02	123,92	207	Terlampau

Gambaran Umum Kondisi Wilayah

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.1.2.21	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0	2	4	2	4	3	Belum Tercapai
3.1.2.22	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi (%)	6,99	6,61	5,38	4,37	3,97	75	Belum Tercapai
3.1.2.23	Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS (%)	80,75	93,78	98,96	100	57,40	90	Belum Tercapai
3.1.2.24	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.1.2.25	Penderita Diare Yang Ditangani (%)	88,66	137,60	41,71	34,22	16,82	16,82	Tercapai
3.1.2.26	Angka Kejadian Malaria	2,04	1,34	0,92	1,18	5,22	<1	Belum Tercapai
3.1.2.27	Tingkat Kematian Akibat Malaria	0	0	0	0	0	0	Tercapai
3.1.2.28	Proporsi Anak Balita Yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida	Tidak dilaksanakan karena Kabupaten Gowa masuk dalam daerah Eliminasi Malaria dari Tahun 2014						
3.1.2.29	Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat	Proporsi anak balita yang diobati dengan obat anti malaria nihil karena yang mengalami penyakit malaria selalu usia produktif dan Kabupaten Gowa masuk dalam kategori eliminasi malaria						
3.1.2.30	Prevelensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi (%)	0	0	0,007	0,013	0,0026	<0,5	Terlampau
3.1.2.31	Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Terakhir	0	1,15	1,14	1,07	0,9	0,9	Tercapai
3.1.2.32	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS (%)	0	0	0,03	0,05	0,08	0,08	Tercapai
3.1.2.33	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%)	87,29	104,24	154,48	147,67	62,45	100	Belum Tercapai
3.1.2.34	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	97,11	94,37	98,79	94,86	96,40	98	Belum Tercapai

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.1.2.35	Cakupan Puskesmas (%)	144,44	144,44	144,44	144,44	144,44	144,44	Tercapai
3.1.2.36	Cakupan Puskesmas Pembantu (%)	95,04	95,04	95,04	95,04	103,31	103,31	Tercapai
3.1.2.37	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (%)	94,37	95,25	98,20	94,32	92,43	92,5	Belum Tercapai
3.1.2.38	Cakupan Pelayanan Nifas (%)	94,25	94,45	97,70	92,09	90,03	93,5	Belum Tercapai
3.1.2.39	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani (%)	69,87	65,96	64,50	71,94	100,00	62	Terlampau
3.1.2.40	Cakupan Pelayanan Anak Balita (%)	88,04	87,78	100	75,12	87,88	72,5	Terlampau
3.1.2.41	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Keluarga Miskin (%)	100	100	100	81,82	94,56	100	Belum Tercapai
3.1.2.42	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat (%)	80,73	86,92	83,44	78,17	46,44	78,17	Belum Tercapai
3.1.2.43	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin (%)	87	104,24	154,49	147,67	62,46	100	Belum Tercapai
3.1.2.44	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) (%)	-	-	-	33	33	100	Belum Tercapai
3.1.2.45	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam (%)	100	100	100	89	0	100	Belum Tercapai
3.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1.3.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (km)	0,67	0,74	0,84	0,89	0,91	1	Belum Tercapai
3.1.3.2	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk (km/jiwa)	0,0033	0,0032	0,0032	0,0031	0,0031	0,0050	Belum Tercapai
3.1.3.3	Persentase Kawasan Permukiman Yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 (%)	4,00	3,90	3,70	3,30	2,60	2,60	Tercapai

Gambaran Umum Kondisi Wilayah

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.1.3.4	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 km/jam) (%)	63,50	65,70	71,30	74,40	76,20	76,20	Tercapai
3.1.3.5	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 m) (%)	0,98	0,98	0,98	1,06	1,06	1,06	Tercapai
3.1.3.6	Persentase Sempadan Jalan Yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar (%)	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	Tercapai
3.1.3.7	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi (%)	50,41	50,46	51,04	51,23	51,51	80,20	Belum Tercapai
3.1.3.8	Persentase Sempadan Sungai Yang Dipakai Bangunan Liar (%)	0,45	0,45	0,47	0,47	0,47	0,47	Tercapai
3.1.3.9	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air (%)	61,10	62,20	62,70	63,50	63,50	75	Belum Tercapai
3.1.3.10	Tidak Terjadi Genangan >2 Kali Setahun (%)	44,10	44,01	43,75	43,50	43,50	75	Belum Tercapai
3.1.3.11	Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor (%)	4,40	4,40	4,40	6,70	6,70	6,70	Tercapai
3.1.3.12	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	80,15	84,00	87,72	90,48	90,81	100	Belum Tercapai
3.1.3.13	Rasio Jaringan Irigasi	0,0046	0,0052	0,0057	0,0059	0,006		
3.1.3.14	Persentase Penduduk Berakses Air Minum(%)	70,40	69,77	70,40	69,42	70,72	73,80	Belum Tercapai
3.1.3.15	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan (%)	56,13	57,33	54,56	60,58	77,52	89,69	Belum Tercapai
3.1.3.16	Persentase Areal Kawasan Kumuh (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	Terlampau
3.1.3.17	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan (%)	-	72,06	73,24	72,65	NA		

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.1.3.18	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	182,29	179,19	176,26	173,51	175,06	250	Belum Tercapai
3.1.3.19	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	2,11	1,93	1,78	1,71	2,39	2,11	Terlampau
3.1.3.20	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber-HPL/HGB (%)	10,60	7,70	3,30	2,70	2,70		
3.1.3.21	Luasan RTH Publik Seputar 20% Dari Luas Wilayah Kota Kawasan Perkotaan (%)	28,44	28,44	28,44	48,60	48,60	25	Terlampau
3.1.3.22	Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan Bangunan	0,033	0,034	0,025	0,026	0,026	0,026	Tercapai
3.1.3.23	Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya (%)	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	Tercapai
3.1.3.24	Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan (Ha)	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,30	Belum Tercapai
3.1.3.25	Ketaatan Terhadap RTRW (%)	104,7	108,1	93,3	93,6	94,3	80,91	Terlampau
3.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
3.1.4.1	Rasio Rumah Layak Huni	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,20	Belum Tercapai
3.1.4.2	Rasio Permukiman Layak Huni	0,7	0,73	0,75	0,77	0,79	0,74	Terlampau
3.1.4.3	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	72,12	75,00	77,00	77,15	77,28	77,28	Tercapai
3.1.4.4	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau (%)	70,01	73,01	75,01	77,01	79,05	79,05	Tercapai
3.1.4.5	Persentase Permukiman Yang Tertata (%)	26,72	28,01	29,43	30,72	32,01	32,01	Tercapai
3.1.4.6	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh (%)	6,65	5,45	4,24	3,04	2,50	2,50	Tercapai

Gambaran Umum Kondisi Wilayah

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.1.4.7	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan (%)	15,15	25,97	27,73	29,90	32,06	32,06	Tercapai
3.1.4.8	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (%)	8,12	7,79	7,61	7,46	7,30	7,30	Tercapai
3.1.4.9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung Dengan PSU (%)	6,67	5,71	6,33	26,67	24,00	24,00	Tercapai
3.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
3.1.5.1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (%)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Tercapai
3.1.5.2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.1.5.3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%)	-	24,20	31,57	59,58	59,58	59,58	Tercapai
3.1.5.4	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	-	63,04	94,12	62,89	55,81	55,81	Tercapai
3.1.5.5	Persentase Penegakan PERDA (%)	10,78	6,15	98,82	96,69	99,57	90	Terlampau
3.1.6	Sosial							
3.1.6.1	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.1.6.2	Persentase PMKS Yang Tertangani (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.1.6.3	Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.1.6.4	Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya (%)	0,00	0,00	100	100	0,00	100	Belum Tercapai
3.1.6.5	Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.1.6.6	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial (%)	38,45	69,23	84,61	92,30	92,30	90	Terlampau
3.1.6.7	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.1.6.8	Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.1.6.9	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial (%)	10,39	61,85	94,28	99,96	100	100	Tercapai
3.2	Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
3.2.1	Tenaga Kerja							
3.2.1.1	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	-	6,55	19,49	8,36	11,53	10	Terlampau
3.2.1.2	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	-	60,00	92,86	33,33	42,86	54,5	Belum Tercapai
3.2.1.3	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan (%)	6,42	5,73	21,74	22,10	88,82	80	Terlampau

Gambaran Umum Kondisi Wilayah

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.2.1.4	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek							
3.2.1.5	Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah	Kabupaten Gowa belum mempunyai kebijakan terkait ketenagakerjaan						
3.2.1.6	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (%)	45,43	32,00	42,67	59,03	9,02	71,43	Belum Tercapai
3.2.1.7	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Sampai saat ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa belum pernah melaksanakan pelatihan tenaga kerja berbasis masyarakat						
3.2.1.8	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan (%)	66,67	46,51	51,95	Tidak ada pelatihan kewirausahaan yang dilakukan		69,23	Belum Tercapai
3.2.1.9	Rasio Lulusan S1/S2/S3	-	528,96	599,86	684,75	1.102,17	1.102,17	Tercapai
3.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
3.2.2.1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (%)	5,84	5,70	5,65	5,82	5,82	5,82	Tercapai
3.2.2.2	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR (%)	17,78	17,78	17,78	28,89	28,89	23	Terlampau
3.2.2.3	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (%)	0,54	0,5	0,89	0,94	0,97	0,72	Terlampau
3.2.2.4	Rasio KDRT (%)	0,02	0,01	0,01	0,02	0,01	0,06	Terlampau
3.2.2.5	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur	-	-	-	-	-		
3.2.2.6	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	6,39	6,21	6,54	6,76	6,79	10	Belum Tercapai
3.2.2.7	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu (%)	77,50	51,58	100	94,17	100	100	Tercapai

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.2.2.8	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.2.2.9	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.2.2.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.2.2.11	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.2.2.12	Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (%)	77,50	51,58	100	94,17	100	100	Tercapai
3.2.2.13	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.2.2.14	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD	0,93	0,93	0,94	0,93	0,92	0,92	Tercapai
3.2.2.15	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP	1	0,99	1,02	0,98	0,99	0,99	Tercapai
3.2.2.16	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA							
3.2.2.17	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di Perguruan Tinggi							
3.2.2.18	Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	Tercapai

Gambaran Umum Kondisi Wilayah

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.2.2.19	Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian							
3.2.3	Pangan							
3.2.3.1	Ketersediaan Pangan Utama (%)	33,50	33,06	33,07	32,35	34,22	22,70	Tercapai
3.2.3.2	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita							
	Energi (Kkal/th)	4.623	5.562	6.067	4.878	5.540	5.540	Tercapai
	Protein (Gr/th)	186,27	178,91	191,70	159,12	163,91	163,91	Tercapai
	Lemak (Gr/th)	113,53	66,26	71,58	101,7	81,23	81,23	Tercapai
3.2.3.3	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	60	60	100	87,50	100,50	100	Terlampau
3.2.4	Pertanahan							
3.2.4.1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	0,29	0,48	0,87	1,18	0,59	2,5	Belum Tercapai
3.2.4.2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)	0,00	0,00	100	0,00	100	100	Tercapai
3.2.4.3	Penyelesaian Izin Lokasi (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.2.5	Lingkungan Hidup							
3.2.5.1	Tersusunnya RPPLH	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Belum Tercapai
3.2.5.2	Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Belum Tercapai
3.2.5.3	Terselenggaranya KLHS	Ada (1)	Tidak ada	Ada (2)	Ada (1)	Ada (2)	Ada	Tercapai
3.2.5.4	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	-	-	65	56	71,08	56,1	Terlampau
3.2.5.5	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	-	-	83	83	83,85	86,3	Belum Tercapai
3.2.5.6	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-	-	52	52,5	53	56,7	Belum Tercapai

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.2.5.7	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	96	88,98	100	Belum Tercapai
3.2.5.8	Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD)	0	0	0	0	0	0	Tercapai
3.2.5.9	Masyarakat Hukum Adat (MHA)							
3.2.5.9.1	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	9	9	9	9	9	9	Tercapai
3.2.5.9.2	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	8	0	1	7	4	4	Tercapai
3.2.5.9.3	Terverifikasinya Hak Kearifan Lokal atau Hak Pengetahuan Tradisional	8	0	1	7	4	4	Tercapai
3.2.5.9.4	Penetapan Hak Masyarakat Hukum Adat	0	0	0	0	0	0	Tercapai
3.2.5.9.5	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai
3.2.5.9.6	Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai
3.2.5.10	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	0	0	0	0	0	0	Tercapai
3.2.5.11	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Ada (Adiwiyata)	Ada (Adiwiyata)	Ada (Adiwiyata)	Ada (Adiwiyata)	Ada (Adiwiyata)	Ada	Tercapai

Gambaran Umum Kondisi Wilayah

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.2.5.12	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.2.5.13	Timbulan Sampah Yang Ditangani (%)	50,5	53,08	60,05	60,45	93,19	100	Belum Tercapai
3.2.5.14	Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R (%)	3,29	4,68	4,61	4,54	4,56	5	Belum Tercapai
3.2.5.15	Persentase Cakupan Area Pelayanan (%)	6,42	6,42	6,42	6,42	100	100	Tercapai
3.2.5.16	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani (%)	50,58	53,08	60,05	60,45	93,19	100	
3.2.5.17	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA (unit)	1	1	1	1	1	1	Tercapai
3.2.5.18	Persentase Izin Pengelolaan Sampah oleh Swasta Yang Diterbitkan (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai
3.2.5.19	Persentase Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-undangan (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai
3.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
3.2.6.1	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	0,81	0,88	0,86	0,97	0,99	0,95	Terlampau
3.2.6.2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	0,4	0,63	1,04	0,99	0,99	0,93	Belum Tercapai
3.2.6.3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	0,16	0,17	0,2	0,21	0,22	0,28	Belum Tercapai
3.2.6.4	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai
3.2.6.5	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Tercapai
3.2.6.6	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	80,77	87,62	86,08	97,49	98,78	95	Terlampau

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.2.6.7	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (%)	40,37	63,05	103,89	99,57	99,57	93	Terlampau
3.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
3.2.7.1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik (%)	76,03	84,30	90,08	90,91	10	100	Tercapai
3.2.7.2	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	3	3	3	3	3	3	Tercapai
3.2.7.3	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK (%)	32,47	32,47	32,47	32,47	33,04	41	Belum Tercapai
3.2.7.4	Pesentase LSM Aktif (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.2.7.5	Persentase LPM Berprestasi (%)	10,79	12,57	14,37	16,77	10,78	25	
3.2.7.6	Persentase PKK Aktif (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.2.7.7	Persentase Posyandu Aktif (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.2.7.8	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	Belum Tercapai
3.2.7.9	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
3.2.8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,88	1,77	1,73	1,66	1,59	1,90	Tercapai
3.2.8.2	Total Fertility Rate (TFR) (%)	2,41	2,47	2,47	2	2,39	2,40	Tercapai
3.2.8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB (%)	19,44	27,78	47,22	50	50	50	Tercapai
3.2.8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (%)	19,44	27,78	47,22	50	50	54	Belum Tercapai

Gambaran Umum Kondisi Wilayah

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.2.8.5	Persentase Kebijakan (Perda/Perkada) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk	1 Perbup	1 Perbup SE Bupati	1 Perbup	1 Perbup	1 Perbup	1 peraturan	Tercapai
3.2.8.6	Jumlah Sektor Yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan	5	5	5	5	5	5	Tercapai
3.2.8.7	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	1	1	1	3	3	1	Terlampau
3.2.8.8	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga	1,2	1,3	1,3	1,2	Tidak dilakukan perhitungan	2	Terlampau
3.2.8.9	Rasio Akseptor KB (%)	71,16	69,09	68,70	70,20	71,64	66,74	Terlampau
3.2.8.10	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun (%)	98,60	99,33	99,53	99,56	96,87	66,74	Terlampau
3.2.8.11	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun	2,47	24,06	25,19	46,6	28,04	20	Belum Tercapai
3.2.8.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 tahun (%)	4,61	1,75	2	1,67	1,06	5	Terlampau
3.2.8.13	Cakupan PUS Yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (%)	17,32	18,15	17,94	16,43	12,34	13,8	Belum Tercapai
3.2.8.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	15,56	15,94	18,54	20,33	19,68	25,35	Belum Tercapai
3.2.8.15	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi (%)	19,67	19,12	15,06	13,81	16,37	14,31	Terlampau

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.2.8.16	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	77,73	78,13	78,92	78,93	88,21	63,6	Terlampau
3.2.8.17	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	66,32	65,57	66,32	66,49	81,74	60	Terlampau
3.2.8.18	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	59,11	48,97	59,11	59,32	81,59	60	Terlampau
3.2.8.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan (%)	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	10	Belum Tercapai
3.2.8.20	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)	716,67	805,56	811,11	827,78	516,67	100	Terlampau
3.2.8.21	Cakupan PKB/PKLB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.2.8.22	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang ber-KB Mandiri (%)	65,96	64,03	65,96	68,48	81,50	100	Tercapai
3.2.8.23	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.2.8.24	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat (%)	59,78	59,69	53,81	48,03	47,14	67,21	Belum Tercapai
3.2.8.25	Persentase Faskes dan Jejaringnya Yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan (%)	88,89	100	100	100	100	100	Tercapai

Gambaran Umum Kondisi Wilayah

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.2.8.26	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.2.8.27	Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga (%)	97,25	97,12	98,90	99,60	96,08	100	Tercapai
3.2.8.28	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%)	36,09	37,93	38,23	46,12	39,26	39,26	Tercapai
3.2.8.29	Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita (%)	21	21	21	21	21	21	Tercapai
3.2.8.30	Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes (%)	0,009	0,008	0,007	0,05	0,05	0,02	Terlampau
3.2.9	Perhubungan							
3.2.9.1	Rasio Ijin Trayek	0,0005	0,00027	0,00023	0,00018	0,00007	0,0005	Belum Tercapai
3.2.9.2	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	693	806	961	1193	1707	790	Terlampau
3.2.9.3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	4	4	4	4	4	4	Tercapai
3.2.9.4	Persentase Layanan Angkutan Darat (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.2.9.5	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum (%)	5,34	7,84	8,92	14,06	23,05	20	Terlampau
3.2.9.6	Pemasangan Rambu-Rambu (%)	22	41,60	62	83,20	100	100	Tercapai
3.2.9.7	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	0,01	0,009	0,009	0,009	0,008	0,01	Belum Tercapai
3.2.10	Komunikasi dan Informatika							
3.2.10.1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	-	50	55,56	55,56	55,56	55,56	Tercapai
3.2.10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	1	1	1	1	1	1	Tercapai

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.2.10.3	Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon (%)	24,99	33,33	63,16	88,04	99,76	99,76	Tercapai
3.2.10.4	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	0,2	0,25	0,33	0,4	0,49	0,49	Tercapai
3.2.10.5	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi	0,18	0,2	0,21	0,36	0,46	10	Belum Tercapai
3.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
3.2.11.1	Persentase Koperasi Aktif (%)	79,02	78,65	79,97	83,67	84,24	80	Terlampau
3.2.11.2	Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif (%)	61,90	43,48	83,33	75,68	91,43	91,43	Tercapai
3.2.11.3	Persentase BPR/LKM Aktif (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.2.11.4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	96,10	96,27	96,34	96,39	93,35	97	Belum Tercapai
3.2.12	Penanaman Modal							
3.2.12.1	Jumlah Investor	967	853	825	1618	2324	1548	Terlampau
3.2.12.2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	454.183.423.500	1.444.148.216.605	1.960.011.456.993	3.303.304.782.337	2.310.586.870.405	916.369.730.000	Terlampau
3.2.12.3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	19,17	366,62	425,19	5,77	3,01	25	Belum Tercapai
3.2.12.4	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) (%)	14,94%	212,66%	30,09%	70,86%	-32,43%		
3.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga							
3.2.13.1	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif (%)	100	100	97,22	100	100	50,16	Tercapai
3.2.13.2	Persentase Wirausaha Muda (%)	42,86	50	40	80	75	50	Terlampau
3.2.13.3	Cakupan Pembinaan Olah Raga (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.2.13.4	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat (%)	47,50	52,50	58,75	58,75	60	60	Tercapai
3.2.13.5	Cakupan Pembinaan Atlet Muda (%)	43,33	46	46,67	48	48	48	Tercapai
3.2.13.6	Jumlah Atlet Berprestasi	10	8	13	10	10	10	Tercapai

Gambaran Umum Kondisi Wilayah

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.2.13.7	Jumlah Prestasi Olahraga	0	0	9	9	9	10	Belum Tercapai
3.2.14	Statistik							
3.2.14.1	Tersedianya Sistem Data dan Statistik Yang Terintegrasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tercapai
3.2.14.2	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai
3.2.14.3	Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai
3.2.15	Persandian							
3.2.15.1	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.2.16	Kebudayaan							
3.2.16.1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	14	14	16	16	8	14	Belum Tercapai
3.2.16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan (BCB)	100	102	493	493	493	200	Terlampau
3.2.16.3	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	0	0	2	0	0	2	Belum Tercapai
3.2.16.4	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu (unit)	1	1	1	1	1	1	Tercapai
3.2.17	Perpustakaan							
3.2.17.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	150.533	2.014	16.547	17.172	285	150.533	Terlampau
3.2.17.2	Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	0,50	0,50	0,64	0,56	0,56	0,56	Tercapai
3.2.17.3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	0,031	0,03	0,03	0,029	0,029	0,029	Tercapai
3.2.17.4	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	52,94	0,31	3,62	2,22	0,0003	52,94	Belum Tercapai

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.2.17.5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	3.731	4.376	2.949	3.562	3.562	3.800	Belum Tercapai
3.2.17.6	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	Belum Tercapai
3.2.18	Kearsipan							
3.2.18.1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku (%)	0,00	79,62	100	100	100	100	Tercapai
3.2.18.2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (%)	-	79,62	100	100	100	100	Tercapai
3.3	Layanan Urusan Pilihan							
3.3.1	Pariwisata							
3.3.1.1	Persentase Kunjungan Wisata (%)	179,88	185,78	188,45	238,80	118,37	100	Terlampau
3.3.1.2	Rata-Rata Lama Kunjungan Wisata (Hari)	1,5	2	2	1,5	1,25	2	Belum Tercapai
3.3.1.3	Persentase PAD Sektor Pariwisata (%)	1,21	1,04	2,71	4,32	4,77	2,70	Terlampau
3.3.2	Pertanian							
3.3.2.1	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar (padi)	5,67	6,04	6,62	6,44	5,9	5,53	Terlampau
3.3.2.2	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar (Jagung)	5,83	6,28	7,07	7,53	6,1	5,9	Terlampau
3.3.2.3	Cakupan Bina Kelompok Petani (%)	10,77	6,09	2,82	2,41	1,86	10	Belum Tercapai
3.3.3	Perdagangan							
3.3.3.1	Ekspor Bersih Perdagangan	-	3.383.482,9	2.699.571,4	2.966.976,00	1.467.865,00	1.358.809	Terlampau
3.3.3.2	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)	79,95	84,33	81,88	84,75	82,99	80,33	Terlampau
3.3.4	Perindustrian							
3.3.4.1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)	99,42	94,25	88,60	83,64	80,11	100	Terlampau

Gambaran Umum Kondisi Wilayah

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.3.5	Transmigrasi							
3.3.5.1	Persentase Transmigrasi Swakarsa	Tidak ada transmigrasi swakarsa di Kabupaten Gowa						
3.3.6	Kelautan dan Perikanan							
3.3.6.1	Produksi Perikanan (%)	101,49	100,86	102,53	104,33	116,09	100	Terlampau
3.3.6.2	Konsumsi Ikan (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.3.6.3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	21,43	25,00	25,00	25,00	25,93	23,62	Terlampau
3.3.6.4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (%)	6,35	7,55	8,75	9,91	9,99	8,75	Terlampau
3.3.6.5	Proporsi Tangkapan Ikan yg Berada Dalam Batasan Biologis yg Aman (%)	85,95	84,70	83,26	81,63	81,25	81,25	Tercapai
3.3.6.6	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	TIDAK ADA DATA						
3.3.6.7	Nilai Tukar Nelayan							
3.4	Penunjang Urusan							
3.4.1	Perencanaan Pembangunan							
3.4.1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	ADA (Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005–2025)					ADA	Tercapai
3.4.1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA	ADA (Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021)					ADA	Tercapai
3.4.1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai
3.4.1.4	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	ADA (Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032)					ADA	Tercapai

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.4.1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD (%)	77,14	93,52	100	100	100	100	Tercapai
3.4.1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD (%)	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.4.1.7	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW							
	Program (%)	65	78	78	87	91	80	Terlampau
	Kegiatan (%)	59	57	75	75	75	80	Belum Tercapai
3.4.2	Keuangan							
3.4.2.1	Persentase SiLPA terhadap APBD (%)	6,97	7,69	4,61	4,60	7,55	4,50	Belum Tercapai
3.4.2.2	Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana (%)							
3.4.2.2.1	Persentase Program Yang Tidak Terlaksana (%)	2,65	2,45	2,62	2,66	4,26	5	Terlampau
3.4.2.2.2	Persentase Kegiatan Yang Tidak Terlaksana (%)	0,63	0,71	0,98	0,72	3,10	2	Belum Tercapai
3.4.2.3	Persentase Belanja Pendidikan (20%) (%)	31,27	29,29	29,17	29,28	28,34	20	Terlampau
3.4.2.4	Persentase Belanja Kesehatan (10%) (%)	12,43	14,85	15,29	15,85	17,27	10	Terlampau
3.4.2.5	Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung (%)							
3.4.2.5.1	Persentase Belanja Langsung (%)	36,22	45,92	45,39	44,09	42,08	35	Terlampau
3.4.2.5.2	Persentase Belanja Tidak Langsung (%)	51,03	44,93	46,80	48,59	53,19	65	Terlampau
3.4.2.6	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa (%)	4,74	4,62	3,83	5,06	4,57		
3.4.2.7	Penetapan APBD	Perda Kab Gowa No 1 Thn 2016 tgl 27 Jan 2016	Perda Kab Gowa No 12 Thn 2016 tgl 29 Des 2016	Perda Kab Gowa No 10 Thn 2017 tgl 29 Des 2017	Perda Kab Gowa No 10 Thn 2018 tgl 27 Des 2018	Perda Kab Gowa No 14 Thn 2019 tgl 27 Des 2019	Perda	Tercapai

Gambaran Umum Kondisi Wilayah

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.4.3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan							
3.4.3.1	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (JP)	511	511	511	511 JP	522	500	Terlampau
3.4.3.2	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten Gowa Tahun (%)	5,71	7,11	7,11	8,80	9,16	5	Terlampau
3.4.3.3	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (%)	36,64	37,91	37,91	56,48	56,48	50	Terlampau
3.4.3.4	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	45	42	42	42	42	42	Tercapai
3.4.3.5	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	-	208	208	208	208	208	Tercapai
3.4.3.6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah (org)					5.084	2.000	Terlampau
3.4.4	Penelitian dan Kelitbangan							
3.4.4.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan (%)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	20	13,33	20	Belum Tercapai
3.4.4.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan (%)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	100	100	100	Tercapai
3.4.4.3	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah (%)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	3,70	18,51	10	Terlampau
3.4.4.4	Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di Daerah	Belum ada kebijakan terkait inovasi						

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN KINERJA					Standar	Interpretasi
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.4.5	Pengawasan							
3.4.5.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan (%)	17,03	62,33	42,80	50,93	76,92	100	Belum Tercapai
3.4.5.2	Persentase Pelanggaran Pegawai Kabupaten Gowa Tahun 2015 – 2019 (%)	0,00	0,00	0,10	0,15	0,15	2	Terlampau
3.4.5.3	Jumlah temuan BPK	84	51	41	35	27	20	Terlampau
3.4.6	Sekretariat Dewan							
3.4.6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai
3.4.6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJM maupun RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai
3.4.6.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai

2.6. EVALUASI CAPAIAN TARGET INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KABUPATEN GOWA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal telah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Penetapan SPM untuk urusan pemerintahan wajib dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 3, yang terdiri atas :

- a. Pendidikan,
- b. Kesehatan,
- c. Pekerjaan umum,
- d. Perumahan rakyat,
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- f. Sosial .

Adapun capaian SPM Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 305
Capaian SPM Kabupaten Gowa Tahun 2017-2018

No.	Jenis Layanan Dasar	Target Nasional	Capaian 2017	Capaian 2018
BIDANG PENDIDIKAN				
Pendidikan Dasar				
1	Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs	100%	100%	90%
Pendidikan Kesetaraan				
3	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis	93%	80%	80%
4	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	45%	90%	80%
5	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia 1 (satu) ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru	80%	80%	85%
6	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satu pendidikan dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	85%	90%	85%
7	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	87%	90%	75%

No.	Jenis Layanan Dasar	Target Nasional	Capaian 2017	Capaian 2018
8	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2(dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	100%	90%	100%
9	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau DIV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing – masing sebanyak 40% dan 20%	100%	80%	85%
10	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing – masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan PKn	100%	80%	100%
11	Di setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100%	80%	100%
12	Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100%	100%	100%
13	Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100%	100%	100%
14	Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	100%	90%	90%
15	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungandilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	100%	100%	90%
Pendidikan Dasar Oleh Satuan Pendidikan				
17	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	90%	80%	80%
18	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran	90%	80%	80%

Gambaran Umum Kondisi Wilayah

No.	Jenis Layanan Dasar	Target Nasional	Capaian 2017	Capaian 2018
	dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik			
19	Setiap SD/MI menyediakan satu set alat peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optic, kit IPA untuk eksperimen dasar dan poster/carta IPA	85%	80%	70%
20	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi	85%	80%	100%
21	Setiap guru tetap bekerja 37.5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan	100%	90%	90%
22	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut: a) Kelas I – II : 18 jam per minggu; b) Kelas III : 24 jam per minggu; c) Kelas IV – VI : 27 jam per minggu; Kelas VII – IX : 27 jam per minggu	100%	100%	90%
23	Setiap satuan pendidikan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	95%
24	Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	90%	90%	100%
25	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	90%	80%	100%
26	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	90%	80%	90%
27	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik	100%	100%	90%
28	Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil	100%	90%	90%

No.	Jenis Layanan Dasar	Target Nasional	Capaian 2017	Capaian 2018
	Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Agama di Kabupaten/Kota pada setiap akhir semester			
29	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)			
	IP 27.1	90%	85%	85%
	IP 27.2	90%	85%	85%
	IP 27.3	90%	85%	85%
Pendidikan Anak Usia Dini				
BIDANG KESEHATAN				
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	96%	98%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%	89%	97%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	83%	98%
4	Pelayanan kesehatan balita	100%	49%	91%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	33%	96%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	58%	63%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	52%	79%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%	14%	51%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	80%	96%	38%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	100%	30%	80%
11	Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (TB)	100%	69%	89%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100%	88%	87%
13	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan <i>Immunodeficiency</i>			
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
Sumber Daya Air : Prioritas Utama Penyediaan Air Untuk Kebutuhan Masyarakat				
1	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari – hari	100%	100%	100,30%

Gambaran Umum Kondisi Wilayah

No.	Jenis Layanan Dasar	Target Nasional	Capaian 2017	Capaian 2018
2	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	70%	70%	87%
Jalan : Aksesibilitas				
3	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat –pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota	100%	100%	100%
Jalan : Mobilitas				
4	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan	100%	100%	86,40%
Jalan : Keselamatan				
5	Tersedianya jalan yang menjamin penggunajalan berkendara dengan selamat	60%	60%	86,40%
Ruas : Kondisi Jalan				
6	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	60%	60%	86,40%
Ruas : Kecepatan				
7	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanandapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	60%	50%	86,40%
Jembatan : Prioritas sebagai penghubung jalan untuk kebutuhan masyarakat				
8	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten	100%	100%	100%
Air Minum : Cluster Pelayanan				
9	Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	80%	80%	96,60%
Penyehatan Lingkungan dan Permukiman (Sanitasi Lingkungan) Drainase				

No.	Jenis Layanan Dasar	Target Nasional	Capaian 2017	Capaian 2018
10	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadigenangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam dan tidak lebih dari 2 kali setahun)	80%	80%	66,20%
Penataan Bangunan dan Lingkungan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)				
11	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
Penataan Bangunan dan Lingkungan Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)				
12	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung (HSBGN)	100%	100%	100%
Penataan Bangunan dan Lingkungan Informasi Penataan Ruang				
13	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%	100%	100%
Penataan Bangunan dan Lingkungan Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang				
14	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan rencana dan tata ruang dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang	100%	100%	66,70%
Penataan Bangunan dan Lingkungan Izin Pemanfaatan Ruang				
15	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTRW kabupaten beserta rencana rincinya	100%	100%	100%
Penataan Bangunan dan Lingkungan Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang				
16	Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam 5 (lima) hari kerja	100%	100%	100%
Penataan Bangunan dan Lingkungan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik				

Gambaran Umum Kondisi Wilayah

No.	Jenis Layanan Dasar	Target Nasional	Capaian 2017	Capaian 2018
17	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	80%	80%	14,37%
BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat				
1	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
2	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 kali patroli dalam sehari	3 kali patroli dalam sehari	3 kali patroli dalam sehari
3	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas) di Kabupaten/Kota	1 orang per RT	1 orang per RT	1 orang per RT
Penanggulangan Bencana Kebakaran				
4	Cakupan pelayanan bencana kebakarankabupaten/kota	80%	92%	95,56%
5	Tingkat waktu tanggap (<i>Response Time Rate</i>)	75%	100%	100%
6	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85%	86%	86%
7	Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	90%	17%	17%
BIDANG SOSIAL				
Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial				
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100%	99,32%	46,96%
2	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomisejenis lainnya	80%	3,70%	3,70%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial				
3	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80%	100%	100%
4	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60%	100%	100%
Penanggulangan korban bencana				

No.	Jenis Layanan Dasar	Target Nasional	Capaian 2017	Capaian 2018
5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80%	100%	100%
6	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	80%	100%	100%
Pelaksanaan dan Pengembangan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial				
7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40%	8,66%	8,66%
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT				
Rumah Layak Huni dan Terjangkau				
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	70,49%	72%	73%
2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	50%	51%	55%
Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)				
3	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	78%	80%	81%

Tabel 2. 306
Capaian SPM Kabupaten Gowa Tahun 2019 – 2020

No.	Jenis Layanan Dasar	Target Nasional	Capaian 2019	Capaian 2020	Interpretasi
BIDANG PENDIDIKAN					
Pendidikan Dasar					
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	92,38%	89,77%	Belum Tercapai
Pendidikan Kesetaraan					
2	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%	100%	Tercapai
Pendidikan Anak Usia Dini					
3	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	98,03%	45,06%	Belum Tercapai
BIDANG KESEHATAN					
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
4	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	99,56%	100%	Tercapai
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
5	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	93,86%	100%	Tercapai
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
6	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	99,49%	100%	Tercapai

No.	Jenis Layanan Dasar	Target Nasional	Capaian 2019	Capaian 2020	Interpretasi
Pelayanan Kesehatan Balita					
7	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	98,87%	100%	Tercapai
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					
8	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	55,41%	100%	Tercapai
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					
9	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	63,15%	100%	Tercapai
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					
10	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	87,26%	100%	Tercapai
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
11	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	21,45%	100%	Tercapai
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					
12	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	80%	70,43%	100%	Terlampau
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					
13	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	31,20%	100%	Tercapai
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)					
14	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	95,93%	100%	Tercapai
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan <i>Immunodeficiency</i>					

Gambaran Umum Kondisi Wilayah

No.	Jenis Layanan Dasar	Target Nasional	Capaian 2019	Capaian 2020	Interpretasi
15	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	11,22%	100%	Tercapai
BIDANG PEKERJAAN UMUM					
Penyediaan Pelayanan Air Minum					
16	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	100%	2,80%	80,30%	Belum Tercapai
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik					
17	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	0,18%	74,56%	Belum Tercapai
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT					
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					
18	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	Tercapai
Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Hui Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota					
19	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	100%	Tercapai
BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					

No.	Jenis Layanan Dasar	Target Nasional	Capaian 2019	Capaian 2020	Interpretasi
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum					
20	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda	100%	93,48%	100%	Tercapai
Pelayanan Informasi Rawan Bencana					
21	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	Tercapai
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					
22	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	100%	100%	100%	Tercapai
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					
23	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	Tercapai
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran					
24	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	Tercapai
BIDANG SOSIAL					
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas					
25	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	99,32%	100%	Tercapai
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti					
26	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	99,51%	100%	Tercapai
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar					
27	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	99,98%	100%	Tercapai

Gambaran Umum Kondisi Wilayah

No.	Jenis Layanan Dasar	Target Nasional	Capaian 2019	Capaian 2020	Interpretasi
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Susila Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					
28	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	100%	Tercapai
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban					
29	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	Tercapai

Dari 29 jenis layanan dasar SPM sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dilakukan analisa data, yaitu :

- a. Jenis pelayanan SPM yang sudah dilaksanakan dan melampaui target sebanyak 1 jenis pelayanan (3,45%);
- b. Jenis Pelayanan SPM yang sudah dilaksanakan dan mencapai target sebanyak 24 jenis pelayanan (82,76%);
- c. Jenis pelayanan SPM yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target sebanyak 4 jenis pelayanan (13,79%).

2.7 PENCAPAIAN SASARAN SUISTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS/TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Umumnya dari 17 TPB yang ada, terdapat 5 TPB yang tingkat pencapaiannya masih dibawah 50%, seperti terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 1
Tingkat Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

No. TPB	Tujuan TPB	Kategori				Tingkat Capaian TPB (%)
		A	B	C	D	
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	9	11	1	1	40,91%
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	7	1	1	2	63,63%
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	15	12		5	55,56%

No. TPB	Tujuan TPB	Kategori				Tingkat Capaian TPB (%)
		A	B	C	D	
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	5	6		2	45,45%
5	Mencapai Kestaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	6	5		3	54,55%
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	7	5	5		58,33%
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua				2	0,00%
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	6	3		8	66,67%
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	4	1		4	80,00%
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara	3	2		4	60,00%
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	3	4		1	42,86%
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	2			1	100,00%
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	1	1			50,00%
14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	1			1	100,00%

No. TPB	Tujuan TPB	Kategori				Tingkat Capaian TPB (%)
		A	B	C	D	
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	3	1			75,00%
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	8	2		11	80,00%
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	2	3	1	9	40,00%

Keterangan :

A : Dilaksanakan dan mencapai target

B : Dilaksanakan dan belum mencapai target

C : Belum dilaksanakan dan belum mencapai target

D : Tidak ada data

Peraturan Presiden nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dan berkomitmen penuh dalam penentuan sasaran dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), berdasarkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Gowa juga ikut berkomitmen mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 terdapat 220 indikator SDGs/TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Dari 220 indikator tersebut telah dilakukan analisis data berdasarkan 4 kategori yaitu :

- a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target sebesar 82 indikator (41%);
- b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target sebesar 57 indikator (28%);
- c. Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target sebesar 8 indikator (4%);

Adapun capaian SDGs/TPB Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.308
Capaian Target Indikator SDGs/TPB Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020		
Tujuan 1. Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat									
1,2	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	7%	8,40%	8,42%	7,83%	7,53%	7,53%	Terlampau	Dinas Sosial
1,3	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	95%	NA	NA	70%	84%	84%	Belum Tercapai	Dinas Kesehatan
1,3	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Meningkat	NA	NA	9,62%	8,42%	8,42%	Belum Tercapai	Dinas Kesehatan
1,3	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Meningkat	NA	40,77%	85,0%	25,70%	25,70%	Belum Tercapai	Dinas Sosial
1,3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Menurun	NA	12.669 KK	26.210 KK	24.611 KK	24.611 KK	Belum Tercapai	Dinas Sosial
1,4	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	85%	92,03%	94,45%	98,76%	94,27%	94,27%	Terlampau	Dinas Sosial
1,4	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	63%	107,10%	102,60%	103,90%	105%	105%	Terlampau	Dinas Kesehatan
1,4	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	65%	52,50%	50,10%	50%	53,90%	53,90%	Belum Tercapai	Dinas Kesehatan
1,4	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	100%	72,98%	73,54%	75,31%	75,43%	75,43%	Belum Tercapai	Dinas PU dan PR

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020		
1,4	Persentase rumah tangga bersanitasi	100%	0,19%	0,04%	0,59%	0,18%	0,18%	Belum Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1,4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	94,78%	94,56%	102,34%	120,73%	104,31%	104,31%	Terlampau	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1,4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	82,20%	93,96%	96,35%	95,64%	99,56%	99,56%	Terlampau	Dinas Pendidikan
1,4	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Pendidikan
1,5	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	1	3	-	59	59	Belum Tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1,5	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat	1	1	1	1	1	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1,5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Meningkat	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1,5	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkat	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	Dinas Sosial
1,5	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Sosial
1,5	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	200.000.000	400.000.000	200.000.000	44.457.973.485	44.457.973.485	Belum Tercapai	Dinas Sosial
1,5	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Ada	1	1	1	1	1	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Gambaran Umum Kondisi Wilayah

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020		
1.a	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkat	0,25%	0,39%	0,32%	0,33%	0,33%	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.a	Persentase belanja pendidikan (20%); Persentase belanja kesehatan (10%)	Meningkat	14,26%	12,51%	12,32%	12,51%	12,51%	Belum Tercapai	Dinas Sosial
Tujuan 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan									
2,1	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	Menurun	10%	5%	5%	5%	5%	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan
2,1	Prevalensi balita gizi kurang	17%	31,30%	28,80%	NA	NA	NA		Dinas Ketahanan Pangan
2,1	Penanganan daerah rawan pangan	Menurun	30%	25%	20%	15%	15%	Tercapai	Dinas Kesehatan
2,1	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	Menurun	NA	NA	92,95%	86,38%	86,38%	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan
2,2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun	40,10%	36,80%	44,50%	36,90%	36,90%	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan
2,2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Kesehatan
2,2	Persentase balita gizi buruk/kurang gizi	Menurun	9,60%	10,00%	24,50%	NA	NA		Dinas Kesehatan
2,2	Prevalensi anemia pada ibu hamil.		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Kesehatan
2,2	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat	28,70%	44,89%	71,84%	81,10%	81,10%	Tercapai	Dinas Kesehatan
2,2	Konsumsi ikan	92,50%	89,51%	89,60%	89,70%	89,80%	89,80%	Tercapai	Dinas Kesehatan

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020		
2,3	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Ketahanan Pangan
TUJUAN 3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia									
3,1	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Menurun	142	102,7	130	103,3	103,3	Tercapai	Dinas Tenaga Kerja
3,1	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95%	92.02%	94.26%	98.64%	93.99%	93.99%	Belum Tercapai	Dinas Kesehatan
3,1	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	85%	92.03%	94,45%	98.76%	94.27%	94.27%	Tercapai	Dinas Kesehatan
3,2	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Menurun	0,5	0,7	0,8	0,4	0,4	Belum Tercapai	Dinas Kesehatan
3,2	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Menurun	6	4,7	2,7	3,2	3,2	Tercapai	Dinas Kesehatan
3,2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Menurun	7,8	5,9	3,2	3,4	3,1	Tercapai	Dinas Kesehatan
3,2	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	95%	100%	100%	100%	100%	100%	Terlampau	Dinas Kesehatan
3,3	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Menurun	-	45 Orang	55 Orang	49 Orang	49 Orang	Tercapai	Dinas Kesehatan
3,3	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Menurun	1,339	1,545	1,661	1,81	1,81	Belum Tercapai	Dinas Kesehatan
3,3	Angka kejadian Malaria	Menurun	0,024	0,016	0,015	0,014	0,014	Belum Tercapai	Dinas Kesehatan
3,3	Jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria.	18	18	18	18	18	18	Tercapai	Dinas Kesehatan
3,3	Persentase kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Meningkat	0	30,70%	46,10%	76,90%	76,90%	Tercapai	Dinas Kesehatan
3,3	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	1 Orang	2 Orang	1 Orang	NA	NA		Dinas Kesehatan
3,3	Jumlah kecamatan dengan eliminasi Kusta.		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Kesehatan

Gambaran Umum Kondisi Wilayah

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020		
3,3	Jumlah kecamatan dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Kesehatan
3,4	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurun	-	0,14%	0,20%	0,23%	0,23%	Belum Tercapai	Dinas Kesehatan
3,4	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun	8,00%	10,00%	16,00%	34,12 %	34,12 %	Belum Tercapai	Dinas Kesehatan
3,4	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun	2,95%	47,00%	19,00%	4,38%	4,38%	Belum Tercapai	Dinas Kesehatan
3,4	Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkat	2 puskesmas	2 puskesmas	4 puskesmas	5 puskesmas	5 puskesmas	Tercapai	Dinas Kesehatan
3,5	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Kesehatan
3,5	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Kesehatan
3,7	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	66%	NA	NA	NA	53,80%	53,80%	Belum Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3,7	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	65%	52,50%	50,10%	50%	53,90%	53,90%	Belum Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3,7	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	23,50%	15,56%	15,94%	18,54%	20,33%	20,33%	Belum Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3,7	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	38	24,06	25,19	44,6	28,04	28,04	Belum Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3,7	Total Fertility Rate (TFR)	2,28	2,41	2,47	2,46	2,39	2,39	Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020		
3,8	Unmet need pelayanan kesehatan.		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3,8	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat	NA	NA	529477 Jiwa	648793 Jiwa	648793 Jiwa	Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3,8	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	95%	NA	NA	70%	84%	84%	Belum Tercapai	Dinas Kesehatan
3.a	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Menurun	NA	0,14%	0,20%	0,23%	0,23%	Belum Tercapai	Dinas Kesehatan
3.b	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat	80%	80%	85%	85%	85%	Tercapai	Dinas Kesehatan
3.c	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Meningkat	829	775	828	847	847	Tercapai	Dinas Kesehatan
TUJUAN 4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua									
4,1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Meningkat	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	Dinas Kesehatan
4,1	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	84,20%	38,48%	53,48%	73,48%	76,74%	76,74%	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan
4,1	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	81%	20,25%	34,25%	46,25%	47,32%	47,32%	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan
4,1	Angka partisipasi kasar	114,09%	100,17%	102,58%	108,91%	104,51%	104,51%	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan
4,1	Angka partisipasi kasar	106,94%	98,16%	97,41%	98,91%	100,78%	100,78%	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan
4,1	Angka rata-rata lama sekolah	8,8 Tahun	7,42 Tahun	7,52 Tahun	7,74 Tahun	7,74 Tahun	7,74 Tahun	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan
4,2	Angka partisipasi kasar	77,20%	70,55%	86,08%	96,70%	98,03%	98,03%	Terlampau	Dinas Pendidikan

Gambaran Umum Kondisi Wilayah

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020		
4,4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Pendidikan
4,5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A; Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B; Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	82,20%	93,96%	96,35%	95,64%	99,56%	99,56%	Terlampau	Dinas Tenaga Kerja
4,6	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	96,10%	89,21%	97,43%	85%	96,42%	96,42%	Terlampau	Dinas Pendidikan
4,6	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Meningkat	89%	92%	92,63%	96,42%	96,42%	Tercapai	Dinas Pendidikan
4.a	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Pendidikan
4.c	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat	98.35%	81%	83%	83%	83%	Tercapai	Dinas Pendidikan
TUJUAN 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan									
5,1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	16	9,0	8,0	11,0	12,0	12,0	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan
5,2	Rasio KDRT	Menurun	0,2	0,17	0,10	0,09	0,09	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020		
5,2	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun	0,48	0,28	0,19	0,16	0,16	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5,2	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	0,2	0,17	0,10	0,09	0,09	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5,2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5,3	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Menurun	0,16%	0,12%	0,09%	0,15%	0,15%	Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5,3	Rata-rata usia kawin pertama wanita		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5,3	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5,5	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Meningkat	NA	17,00%	17,00%	20,00%	20,00%	Terlampau	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5,5	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat	NA	3,35%	2,25%	1,15%	1,15%	Belum Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambaran Umum Kondisi Wilayah

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020		
5,6	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5,6	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	9,90%	22,70%	21,60%	NA	24,60%	24,60%	Terlampai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5,6	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	85%	52,50%	50,10%	50%	53,90%	53,90%	Belum Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5.b	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Meningkat	2,61%	59,59%	62,41%	70,11%	70,11%	Tercapai	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
TUJUAN 6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua									
6,1	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	100%	72,98%	73,54%	75,31%	75,43%	75,43%	Belum Tercapai	Dinas Kesehatan
6,1	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	118,6 m3/dt	529.5 lt/dt	529.5 lt/dt	529.5 lt/dt	529.5 lt/dt	529.5 lt/dt	Terlampai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6,1	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	100%	72,98%	73,54%	75,31%	75,43%	77,43%	Belum Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020		
6,2	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat	30%	45%	55%	70%	70%	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6,2	Persentase rumah tinggal bersanitasi	100%	0,19%	0,04%	0,59%	0,18%	0,18%	Belum Tercapai	Dinas Kesehatan
6,2	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat	99 Desa/Kel	119 Desa/Kel	167 Desa/Kel	167 Desa/Kel	167 Desa/Kel	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6,2	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat	99 Desa/Kel	112 Desa/Kel	137 Desa/Kel	153 Desa/Kel	153 Desa/Kel	Tercapai	Dinas Kesehatan
6,2	Jumlah kecamatan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat	10 IPAL	13 IPAL	38 IPAL	45 IPAL	45 IPAL	Tercapai	Dinas Kesehatan
6,2	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	358 rumah tangga	75 rumah tangga	1120 rumah tangga	350 rumah tangga	350 rumah tangga	Belum Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6,3	Jumlah kecamatan yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6,3	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6,3	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Meningkat	NA	NA	65%	56%	56%	Belum Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6,3	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Meningkat	NA	NA	65%	56%	56%	Belum Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup

Gambaran Umum Kondisi Wilayah

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020		
6,5	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Lingkungan Hidup
6,5	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6,5	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6,5	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TUJUAN 7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua									
7,2	Bauran energi terbarukan.		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7,3	Intensitas energi primer.		NA	NA	NA	NA	NA		Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
TUJUAN 8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua									
8,1	Pertumbuhan PDRB	Meningkat	7,57%	7,21%	7,14%	7,46%	7,46%	Belum Tercapai	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
8,1	PDRB per Kapita	Meningkat	21,04 Jt	22,98 Jt	25,07 Jt	27,1 Jt	27,1 Jt	Tercapai	Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020		
8,2	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja		NA	NA	NA	8,43%	8,43%		Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian
8,3	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Tenaga Kerja
8,3	Persentase tenaga kerja formal.	51%	NA	33,31%	33,29%	34,88%	34,88%	Belum Tercapai	Dinas Tenaga Kerja
8,3	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Tenaga Kerja
8,3	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Tenaga Kerja
8,5	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat	NA	NA	55.162	59.591	59.591	Tercapai	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
8,5	Tingkat pengangguran terbuka	Menurun	NA	6,14%	4,80%	4,87%	4,87%	Tercapai	Dinas Tenaga Kerja
8,5	Tingkat setengah pengangguran.		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Tenaga Kerja
8,6	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Tenaga Kerja
8,9	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Meningkat	365.773,3 (Juta Rupiah)	417.351,0 (Juta Rupiah)	467.965,8 (Juta Rupiah)	517.149,5 (Juta Rupiah)	517.149,5 (Juta Rupiah)	Tercapai	Dinas Tenaga Kerja
8,9	Kunjungan wisata	Meningkat	3583 Orang	3082 Orang	3302 Orang	3462 Orang	3462 Orang	Belum Tercapai	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8,9	Kunjungan wisata	Meningkat	177405 Orang	196135 Orang	211251 Orang	284225 Orang	284225 Orang	Tercapai	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8,9	PAD sektor pariwisata	Meningkat	164 (Triliun Rupiah)	192 (Triliun Rupiah)	241 (Triliun Rupiah)	280 (Triliun Rupiah)	280 (Triliun Rupiah)	Tercapai	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8,9	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8,10	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Tenaga Kerja

Gambaran Umum Kondisi Wilayah

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020		
TUJUAN 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi									
9,1	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
9,2	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Meningkat	6,42%	6,51%	6,33%	6,61%	6,61%	Tercapai	Dinas Perhubungan
9,2	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Meningkat	6,63%	6,72%	6,50%	6,78%	6,78%	Tercapai	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9,2	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9,3	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat	0,015%	0,027%	0,030%	0,015%	0,015%	Belum Tercapai	Dinas Tenaga Kerja
9,3	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9.c	Proporsi rumah tangga dengan akses internet		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9.c	Presentase penduduk yang menggunakan hp/telepon	Meningkat	2,61%	59,59%	62,41%	70,11%	70,11%	Tercapai	Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian
9.c	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Meningkat	23,86%	29,04%	37,14%	44,31%	44,31%	Tercapai	Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian
TUJUAN 10. Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara									
10,1	Indeks Gini	0,36	0,407	0,395	0,384	0,354	0,354	Belum Tercapai	Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian
10,1	Presentase penduduk di atas garis kemiskinan	7%	8,40%	8,42%	7,83%	7,53%	7,53%	Terlampau	Dinas Sosial

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020		
10,1	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Sosial
10,1	Jumlah desa tertinggal.	Menurun	30%	6%	NA	NA	NA		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10,1	Jumlah Desa Mandiri.		NA	NA	NA	1%	1%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10,2	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10,3	Indeks Kebebasan Sipil.		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Sosial
10,3	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Ada	13	10	10	14	14	Tercapai	Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian
10,4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Meningkat	NA	NA	9,62%	8,42%	8,42%	Belum Tercapai	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
TUJUAN 11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan									
11,1	Rasio rumah layak huni	Meningkat	-	72%	-	72,32%	72,32%	Tercapai	Dinas Sosial
11,3	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
11,5	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana	Menurun	1	3	-	59	59	Belum Tercapai	Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah

Gambaran Umum Kondisi Wilayah

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020		
11,5	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun	9	9	9	9	9	Belum Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11,5	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Ada	1	2	3	3	3	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11,5	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	200.000.000	400.000.000	200.000.000	44.457.973.485	44.457.973.485	Belum Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11,6	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	80%	51%	53,08%	60,45%	60,45%	60,45%	Belum Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.b	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Ada	1	1	1	1	1	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TUJUAN 12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan									
12,4	Jumlah limbah B3 yang dikelola	Meningkat	NA	16,13%	21,62%	24,39%	24,39%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
12,5	Presentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Meningkat	NA	20293,5 Ton	24656,48 Ton	28046,72 Ton	28046,72 Ton	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
12,6	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Lingkungan Hidup
TUJUAN 13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya									

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020		
13,1	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Ada	1	1	1	1	1	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
13,1	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	1	3	-	59	59	Belum Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TUJUAN 14. Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan									
14,6	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota		NA	NA	NA	NA	NA		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14.b	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Meningkat	3 Orang	4 Orang	5 Orang	6 Orang	6 Orang	Tercapai	Dinas Perikanan
TUJUAN 15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati									
15,1	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara	Meningkat	55,43%	58,40%	54,94%	58,60%	58,60%	Tercapai	Dinas Perikanan
15,3	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Meningkat	NA	0,002%	0,001%	0,007%	0,007%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
15,6	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Ada	13	10	10	14	14	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup

Gambaran Umum Kondisi Wilayah

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020		
15,9	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat	1	1	1	1	1	Belum Tercapai	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
TUJUAN 16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level									
16,1	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Lingkungan Hidup
16,1	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.		NA	NA	NA	NA	NA		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16,1	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.		NA	NA	NA	NA	NA		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16,1	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.		NA	NA	NA	NA	NA		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16,2	Rasio KDRT	Menurun	0,18%	0,10%	0,07%	0,03%	0,03%	Tercapai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16,2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Menurun	0,20%	0,17%	0,10%	0,09%	0,09%	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16,2	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun	0,20%	0,17%	0,10%	0,09%	0,09%	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16,5	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020		
16,6	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	87,83%	93,35%	95,69%	95,13%	95,13%	Tercapai	Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian
16,6	Opini BPK		NA	NA	NA	NA	NA		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
16,6	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat	100% (B)	100% (B)	100% (B)	-	-		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
16,6	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	80%	32,60%	33,89%	30,60%	45,10%	45,10%	Tercapai	Inspektorat Daerah
16,6	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	CC	C	C	CC	CC	CC		Bagian Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah
16,6	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	90%	NA	NA	59,54%	91,27%	91,27%	Terlampau	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah
16,7	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Meningkat	NA	17,00%	17,00%	20,00%	20,00%	Tercapai	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah
16,7	Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Meningkat	15%	20%	25%	30%	30%	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16,9	Rasio bayi berakte kelahiran		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16,9	Cakupan penerbitan akta kelahiran		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Gambaran Umum Kondisi Wilayah

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020		
16,9	Rasio bayi berakte kelahiran		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16,10	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.b	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian
TUJUAN 17. Memperkuat ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan									
17,1	Persentase PAD terhadap pendapatan	Meningkat	10,42%	10,41%	9,34%	8,93%	8,93%	Belum Tercapai	Badan Pendapatan Daerah
17,1	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	12%	1,20%	1,15%	1,00%	1,08%	1,08%	Belum Tercapai	Badan Pendapatan Daerah
17,1	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat	5,48%	5,83%	6,22%	6,92%	6,92%	Tercapai	Badan Pendapatan Daerah
17,6	Proporsi rumah tangga dengan akses internet		NA	NA	NA	NA	NA		Badan Pendapatan Daerah
17,6	Proporsi rumah tangga dengan akses internet		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
17,8	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Meningkat	23,86%	29,04%	37,14%	44,31%	44,31%	Tercapai	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
17,17	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).		NA	NA	NA	NA	NA		Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah

No	Indikator RPJMD	Target Capaian	Realisasi					Interpretasi	Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020		
17,17	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).		NA	NA	NA	NA	NA		Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah
17,18	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.		NA	NA	NA	NA	NA		Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah
17,18	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
17,18	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meningkat	20%	20%	20%	20%	20%	Belum Tercapai	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
17,18	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
17,19	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17,19	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
17,19	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).		NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH



BAB III

GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Kondisi keuangan daerah menjadi faktor yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa gambaran keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah untuk mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Dalam lingkup mikro gambaran keuangan daerah meliputi analisis pengelolaan keuangan daerah baik dari segi pendapatan maupun belanja daerah. Berbagai literatur dan *best practice* mengemukakan bahwa manajemen pembelanjaan pemerintah daerah adalah instrument kunci dari kebijakan pemerintah daerah, karena itu disarankan kepada otoritas penganggaran untuk mencermati adanya hubungan integral dan keseimbangan antara “*revenue* dan *expenditure*”. Hal ini penting untuk menjaga terciptanya keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) daerah serta perspektif pembangunan yang berorientasi jangka menengah dan panjang. Salah satu faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah terkait masalah keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah guna memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, baik kebijakan yang melandasi pengelolaannya maupun kinerja keuangan masa lalu. Strategi yang ditempuh diderivasi ke dalam bentuk struktur APBD yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

APBD merupakan instrumen kunci dalam sistem Pengelolaan Keuangan Daerah. mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi adalah anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan. Fungsi perencanaan adalah anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan Kegiatan pada tahun berkenaan. Fungsi pengawasan adalah anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi adalah anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi adalah kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi adalah anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

Penyusunan Gambaran Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia serta menyusun dan mengalokasikannya secara tepat

berdasarkan proporsi program prioritas yang diselaraskan dengan kebijakan pemerintah daerah serta mempersiapkan kondisi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Salah satu aspek penting dalam penyusunan APBD adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*).

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini.

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Selanjutnya, beberapa prinsip yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran daerah yaitu :

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak

dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD;

3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

3.1 KINERJA KEUANGAN DAERAH MASA LALU

Gambaran kinerja keuangan daerah dapat ditunjukkan dengan Kerangka pendanaan merupakan perspektif rencana penganggaran untuk lima tahun ke depan. Sebagai perspektif rencana, maka analisis harus didasarkan atas asumsi makro ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yang diinginkan, dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Untuk itu, pada bagian ini akan diawali dengan proyeksi asumsi makro ekonomi, kondisi sosial masyarakat, pokok-pokok kebijakan fiskal, kemudian proyeksi pendapatan dan belanja daerah, dan terakhir perhitungan kerangka pendanaan yang akan menunjukkan potensi kapasitas riil keuangan daerah lima tahun ke depan. Terkait dengan kapasitas riil keuangan daerah, desain penganggaran sudah harus menunjukkan besaran anggaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Pertumbuhan dan proposi komponen APBD berupa: pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah selama periode tersebut, kemudian pertumbuhan dan rasio neraca daerah, disamping juga dengan pendekatan rasio-rasio keuangan daerah yang sering digunakan dalam analisis keuangan daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran pelayanan publik.

Analisis Kinerja keuangan Kabupaten Gowa yang disajikan adalah semua komponen struktur APBD, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kinerja struktur APBD tersebut dianalisis dalam lima tahun terakhir, satu periode pemerintahan terakhir selama tahun 2016 sampai dengan 2021. Secara umum komponen struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari:

Komponen Pendapatan :

1. Pendapatan asli daerah berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2. Dana Perimbangan yang berasal dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana insentif daerah; serta
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang berasal dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Komponen Belanja :

1. Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa lainnya, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa lainnya, dan belanja tidak terduga;
2. Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Komponen Pembiayaan :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, serta Pembayaran Pokok Utang.

Hasil evaluasi realisasi APBD Kabupaten Gowa selama tahun 2016-2020 untuk menggambarkan kinerja keuangan daerah masa lalu, melalui penggambaran kinerja pelaksanaan APBD setiap tahunnya. Kinerja pelaksanaan APBD ini mencakup semua komponen-komponennya, yang meliputi kinerja pendapatan daerah, kinerja belanja daerah, dan kinerja pembiayaan daerah beserta dengan unsur-unsurnya.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Gowa meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan pada periode 2016-2020, total pendapatan daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,07 % pertahun, dari sebesar Rp.1,612 trilyun pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp.1,883 trilyun pada pada tahun 2020. Sedangkan belanja daerah mengalami pertumbuhan sedikit lebih tinggi dari pendapatan daerah dengan rata-rata sebesar 4,80 % pertahun, dari sebesar Rp.1,602 trilyun pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp.1,931 trilyun pada tahun 2020. Sedangkan Pembiayaan Daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 16,68% pertahun, dari sebesar Rp. 118 milyar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp 147 milyar pada tahun 2020. Berikut disajikan data Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gowa 2016-2021

No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	1.612.246.983.358,60	1.790.263.499.730,15	1.781.396.471.000,37	1.870.608.908.440,64	1.883.817.352.305,74	4,07
1.1	Pendapatan Asli Daerah	187.176.036.300,40	268.339.203.299,15	217.112.642.503,37	238.239.570.974,67	241.469.562.565,34	8,84
1.1.1.	Pajak daerah	78.471.938.351,84	89.747.690.642,00	100.361.985.000,00	112.451.239.497,56	115.543.741.226,00	10,25
1.1.2.	Retribusi daerah	68.328.084.527,00	55.937.919.224,00	74.468.416.778,00	79.360.833.550,00	66.507.429.022,99	1,34
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	4.386.251.872,00	4.625.881.692,94	3.879.102.074,00	4.966.988.917,00	4.342.158.893,00	1,20
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	35.989.761.549,56	118.027.711.740,21	38.403.138.651,37	41.460.509.010,11	55.076.233.423,35	50,32
1.2.	Dana Perimbangan	1.225.854.162.037,00	1.304.093.896.763,00	1.237.082.857.147,00	1.258.904.850.116,00	1.217.293.801.285,00	(0,07)
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	27.469.025.627,00	22.863.412.183,00	18.774.742.466,00	15.670.665.197,00	21.416.148.044,00	(3,63)
1.2.2.	Dana alokasi umum	850.677.296.000,00	835.733.631.000,00	837.326.483.000,00	887.926.896.000,00	808.650.245.000,00	(1,11)
1.2.3.	Dana alokasi khusus	347.707.840.410,00	445.496.853.580,00	380.981.631.681,00	355.307.288.919,00	387.227.408.241,00	3,97
1.2.4.	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-	0,00
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	199.216.785.021,20	217.830.399.668,00	327.200.971.350,00	373.464.487.349,97	425.053.988.455,40	21,88
1.3.1	Hibah	2.330.771.140,00	21.420.810.950,00	4.036.171.549,00	3.477.000.000,00	98.883.540.000,00	866,99

No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya**)	86.997.649.524,20	87.871.879.826,00	75.891.104.209,00	101.883.197.749,97	90.192.159.355,40	2,54
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	83.741.410.000,00	99.632.871.692,00	150.236.915.999,00	168.072.826.000,00	51.144.603.000,00	3,02
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	26.146.954.357,00	8.904.837.200,00	14.741.899.593,00	13.915.303.600,00	38.100.469.100,00	41,95
1.3.6	Pendapatan Lainnya			82.294.880.000,00	86.116.160.000,00	146.733.217.000,00	18,76
2	BELANJA	1.602.546.758.748,00	1.727.962.526.455,25	1.827.641.077.090,69	1.865.956.399.756,48	1.931.392.222.938,55	4,80
2.1	Belanja Tidak Langsung	937.341.157.218,00	854.553.516.478,00	927.727.665.691,41	978.336.280.228,57	1.100.111.411.925,89	4,41
2.1.1	Belanja Pegawai	754.891.301.986,00	656.658.328.352,00	703.167.264.409,41	721.227.943.794,00	716.976.502.117,00	(0,99)
2.1.2	Belanja Bunga						0,00
2.1.3	Belanja Hibah	9.981.178.000,00	8.928.751.334,00	10.909.182.587,00	12.354.922.000,00	97.217.987.620,00	177,94
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.419.000.000,00	482.500.000,00	76.572.200,00	2.625.000.000,00	19.824.610.100,00	954,79
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	1.675.443.700,00	1.675.443.700,00	1.675.443.700,00	1.070.606.769,00	1.068.106.071,00	(9,08)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	168.374.233.532,00	186.808.493.092,00	211.899.202.795,00	240.557.807.665,57	229.566.158.017,89	8,33
2.1.8	Belanja Tidak Terduga				500.000.000,00	35.458.048.000,00	1747,90
2.2	Belanja Langsung	665.205.601.530,00	873.409.009.977,25	899.913.411.399,28	887.620.119.527,91	831.280.811.012,66	6,66
2.2.1	Belanja Pegawai	38.274.997.306,00	41.552.451.426,00	33.505.309.500,00	32.959.499.459,00	53.373.038.881,00	12,38
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	284.454.757.410,00	353.962.254.334,00	412.730.052.406,28	426.139.538.479,94	407.456.317.961,00	9,98
2.2.3	Belanja Modal	342.475.846.814,00	477.894.304.217,25	453.678.049.493,00	428.521.081.588,97	370.451.454.170,66	3,84

No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
3	Pembiayaan	118.367.104.048,73	83.887.529.496,33	137.595.851.136,23	87.888.000.883,91	147.592.406.818,84	16,68
3.1	Penerimaan Pembiayaan	122.305.081.922,73	128.115.905.519,33	191.281.349.136,23	141.368.000.883,91	188.112.015.464,84	15,26
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	3.937.977.874,00	44.228.376.023,00	53.685.498.000,00	53.480.000.000,00	40.519.608.646,00	254,97

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

3.1.1.1 Kinerja Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, guna peningkatan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Analisis Pendapatan Daerah menggunakan angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan Pendapatan Daerah di masa yang akan datang. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2020 Kabupaten Gowa digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2020 Kabupaten Gowa

No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	1.612.246.983.358,60	1.790.263.499.730,15	1.781.396.471.000,37	1.870.608.908.440,64	1.883.817.352.305,74	4,07
1,1	Pendapatan Asli Daerah	187.176.036.300,40	268.339.203.299,15	217.112.642.503,37	238.239.570.974,67	241.4469.562.565,34	8,84
1.1.1.	Pajak daerah	78.471.938.351,84	89.747.690.642,00	100.361.985.000,00	112.451.239.497,56	115.543.741.226,00	10,25
1.1.2.	Retribusi daerah	68.328.084.527,00	55.937.919.224,00	74.468.416.778,00	79.360.833.550,00	66.507.429.022,99	1,34
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	4.386.251.872,00	4.625.881.692,94	3.879.102.074,00	4.966.988.917,00	4.342.158.893,00	1,20
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	35.989.761.549,56	118.027.711.740,21	38.403.138.651,37	41.460.509.010,11	55.076.233.423,35	50,32
1.2.	Dana Perimbangan	1.225.854.162.037,00	1.304.093.896.763,00	1.237.082.857.147,00	1.258.904.850.116,00	1.217.293.801.285,00	-0,07
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	27.469.025.627,00	22.863.412.183,00	18.774.742.466,00	15.670.665.197,00	21.416.148.044,00	-3,63
1.2.2.	Dana alokasi umum	850.677.296.000,00	835.733.631.000,00	837.326.483.000,00	887.926.896.000,00	808.650.245.000,00	-1,11
1.2.3.	Dana alokasi khusus	347.707.840.410,00	445.496.853.580,00	380.981.631.681,00	355.307.288.919,00	387.227.408.241,00	3,97
1.2.4.	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-	-
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	199.216.785.021,20	217.830.399.668,00	327.200.971.350,00	373.464.487.349,97	425.053.988.455,40	21,88
1.3.1	Hibah	2.330.771.140,00	21.420.810.950,00	4.036.171.549,00	3.477.000.000,00	98.883.540.000,00	866,99

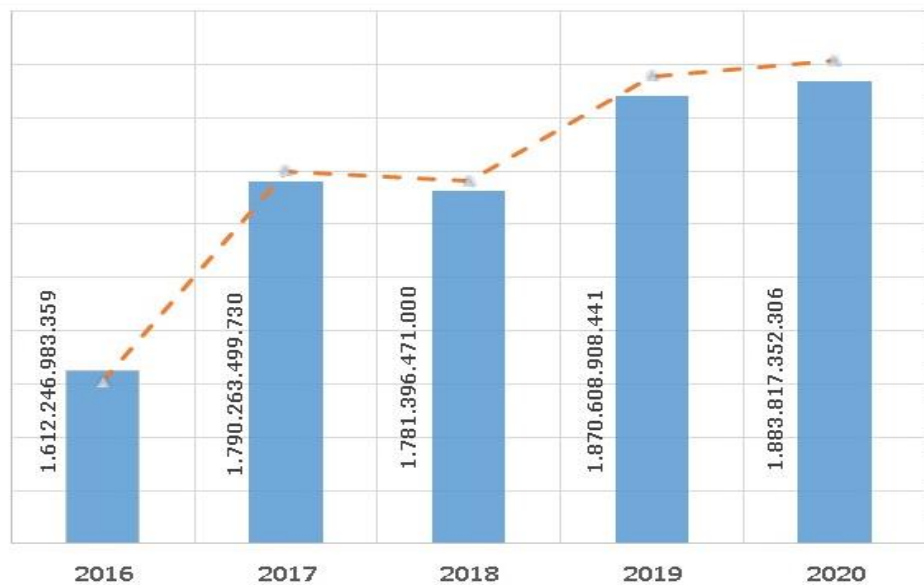
No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya**)	86.997.649.524,20	87.871.879.826,00	75.891.104.209,00	101.883.197.749,97	90.192.159.355,40	2,54
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	83.741.410.000,00	99.632.871.692,00	150.236.915.999,00	168.072.826.000,00	51.144.603.000,00	3,02
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	26.146.954.357,00	8.904.837.200,00	14.741.899.593,00	13.915.303.600,00	38.100.469.100,00	41,95
1.3.6	Pendapatan Lainnya			82.294.880.000,00	86.116.160.000,00	146.733.217.000,00	18,76

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dalam kurun waktu 2016-2020 ini menunjukkan rata-rata pertumbuhan Pendapatan daerah sebesar 4,07 persen. Trend persentase masing-masing komponen Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata pertumbuhan 8,84 persen, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan rata-rata pertumbuhannya 21,88 persen, sedangkan Dana Perimbangan trend rata-rata pertumbuhannya menurun 0,07 persen. Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Gowa sangat baik dan mengarah pada kemandirian pendapatan daerah.

Pendapatan daerah menunjukkan kinerja peningkatan yaitu dari Rp 1,612 Trilyun pada tahun 2016 meningkat sebesar 11,04% menjadi Rp 1,790 Trilyun di tahun 2017 dan menurun sebesar 0,49% menjadi Rp 1,781 Trilyun di tahun 2018 dan berhasil naik sebesar 5% menjadi Rp 1,870 Trilyun di tahun 2019 dan meningkat lagi sebesar 0,71% menjadi Rp 1,883 Trilyun di tahun 2020, jadi total peningkatan selama periode lima tahun pendapatan daerah meningkat sebesar Rp 271,57 Milyar. Rata-rata proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa mampu menyumbangkan 12,87% dari total realisasi Pendapatan Daerah, porsi terbesar berasal dari Dana Perimbangan 70,05% dari total Pendapatan Daerah, sedangkan sisanya merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 17,08%.

Grafik 3. 1
Perkembangan Pendapatan Daerah Kab. Gowa
Tahun 2016-2020



Sumber : Data Diolah

Tabel 3. 3
Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah
Kab. Gowa Tahun 2016 s/d Tahun 2020

Uraian	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	Rata-rata Proporsi (%)
Pendapatan Asli Daerah	11.61	14.99	12.19	12.74	12.82	12.87
Dana Perimbangan	76.03	72.84	69.44	67.30	64.62	70.05
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	12.36	12.17	18.37	19.96	22.56	17.08

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

Grafik 3. 2
Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah
Tahun 2016-2020



Sumber : Data Diolah

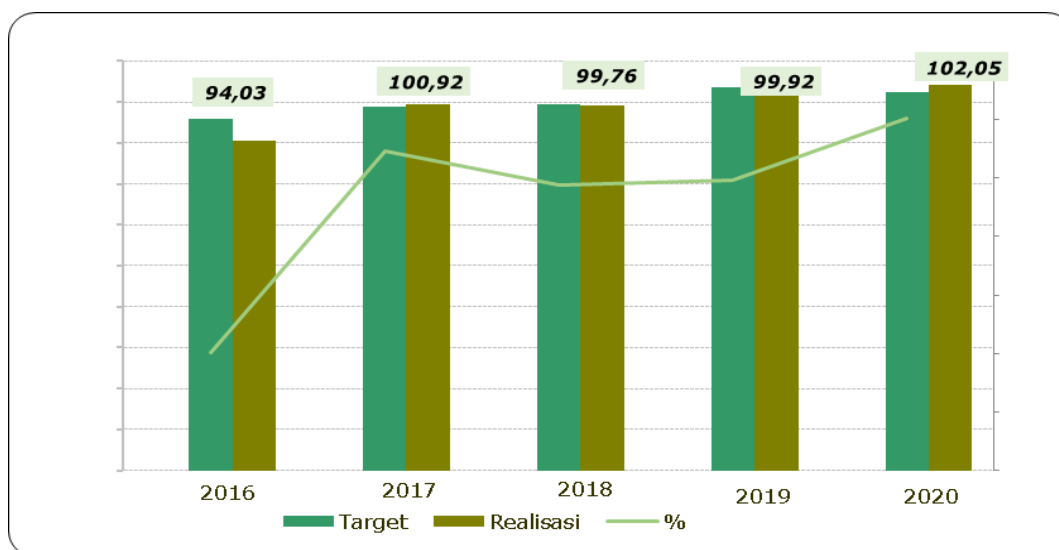
Berdasarkan Gambar diatas, terlihat bahwa struktur pendapatan daerah Kabupaten Gowa masih tergantung pada dana perimbangan. Namun demikian, pendapatan asli daerah mengalami peningkatan yang sangat signifikan sehingga diharapkan kemandirian fiskal daerah dapat diwujudkan.

Tabel 3. 4
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 s/d Tahun 2020

Tahun	Target	Realisasi	%
2016	1.714.540.211.390,00	1.612.246.983.358,60	94,03
2017	1.773.971.166.873,00	1.790.263.499.730,15	100,92
2018	1.785.653.795.674,00	1.781.396.471.000,37	99,76
2019	1.872.059.870.736,00	1.870.608.908.440,64	99,92
2020	1.845.932.697.136,00	1.883.817.352.305,74	102,05

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

Grafik 3. 3
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020



Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Gambar 3.3 di atas terlihat selama periode tahun 2016-2021, target pendapatan daerah yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD sudah dapat terpenuhi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari data realisasi pendapatan yang dapat diwujudkan oleh daerah yang selalu hampir pada kisaran angka 100% yaitu pada tahun 2016 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 1.612.246.983.358,60 dari target sebesar Rp 1.714.540.211.390 atau sebesar 94,03%. Tahun 2017 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 1.790.263.499.730,15 dari target sebesar Rp 1.773.971.166.873 atau sebesar 100,92%, tahun 2018 realisasi pendapatan sebesar Rp 1.781.396.471.000,37 dari target sebesar Rp 1.785.653.795.674,00 atau sebesar 99,76%, tahun 2019 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 1.870.608.908.440,64 dari target sebesar Rp 1.872.059.870.736,00 atau sebesar 99,92%, dan tahun 2020 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 1.883.817.352.305,74 dari target sebesar Rp 1.845.932.697.136,00 atau sebesar 102,05%.

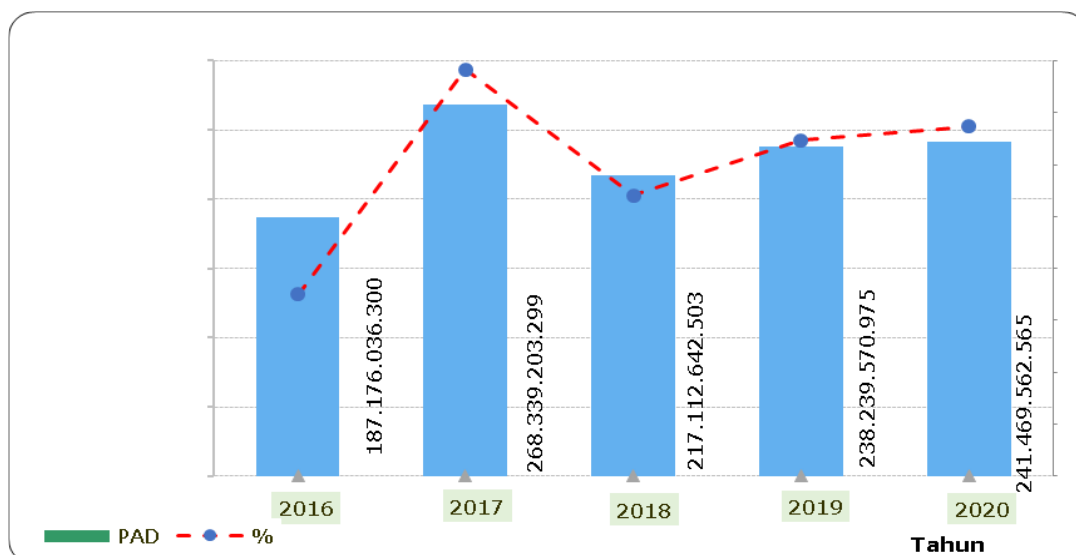
Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (fiskal gap). Pemerintah Kabupaten Gowa berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu pemerintah daerah selalu dan terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah nilainya mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2016 nilai PAD Kabupaten Gowa masih sekitar Rp 187,17 Milyar lebih, mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 43,36% menjadi Rp 268,33 Milyar lebih. Di tahun 2018 PAD turun sebesar 19,09% menjadi Rp 217,11 Milyar, dan kembali meningkat di tahun 2019 sebesar 9,73% menjadi Rp 238,23 Milyar lebih dan hingga di tahun 2020 meningkat sebesar 1,36% menjadi Rp 241,46 Milyar. Perkembangan PAD yang signifikan ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah telah berkembang dengan cukup baik dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. Gambaran Perkembangan pendapatan asli daerah dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut :

Grafik 3. 4
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kab. Gowa
Tahun 2016-2020



Sumber : Data Diolah

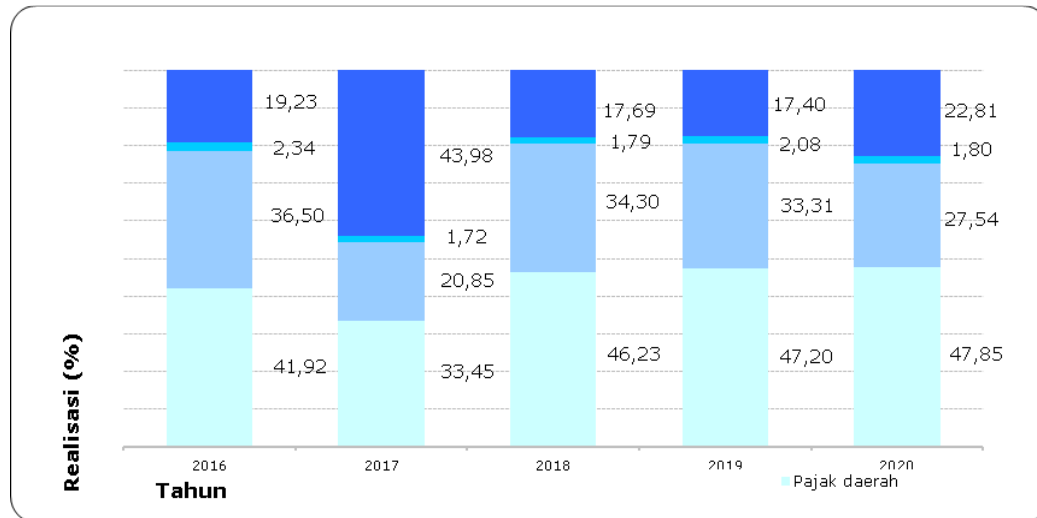
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa selama Tahun Anggaran 2016-2020 masih didominasi oleh kontribusi dari Pajak Daerah rata-rata sebesar 43,33 persen per tahun, diikuti dengan Retribusi Daerah rata-rata sebesar 30,50 persen per tahun, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah rata-rata sebesar 24,22 persen per tahun, dan yang terakhir adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan rata-rata sebesar 1,95 persen per tahun.

Tabel 3. 5
Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kab.
Gowa Tahun 2016 s/d Tahun 2020

Uraian	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	Rata-rata Proporsi (%)
Pajak Daerah	41,92	33,45	46,23	47,20	47,85	43,33
Retribusi Daerah	36,50	20,85	34,30	33,31	27,54	30,50
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2,34	1,72	1,79	2,08	1,80	1,95
Lain-lain PAD yang Sah	19,23	43,98	17,69	17,40	22,81	24,22

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

Grafik 3. 5
Rata-rata Proporsi Realisasi KomponenPendapatan Asli
Daerah Tahun 2016-2020



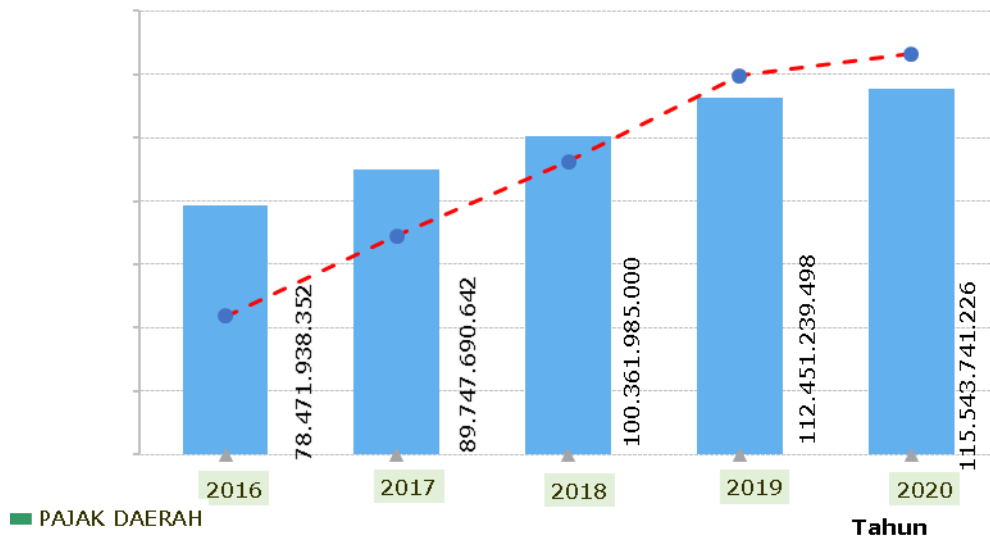
Sumber : Data Diolah

Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari : (a) pajak daerah; (b) retribusi daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa untuk melaksanakan pungutan meliputi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Rumah Makan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan. Realisasi Pajak Daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 10,25 persen dalam kurun waktu 2016-2020.

Grafik 3. 6
Perkembangan Pajak Daerah Kab. Gowa Tahun
2016-2020



Sumber : Data Diolah

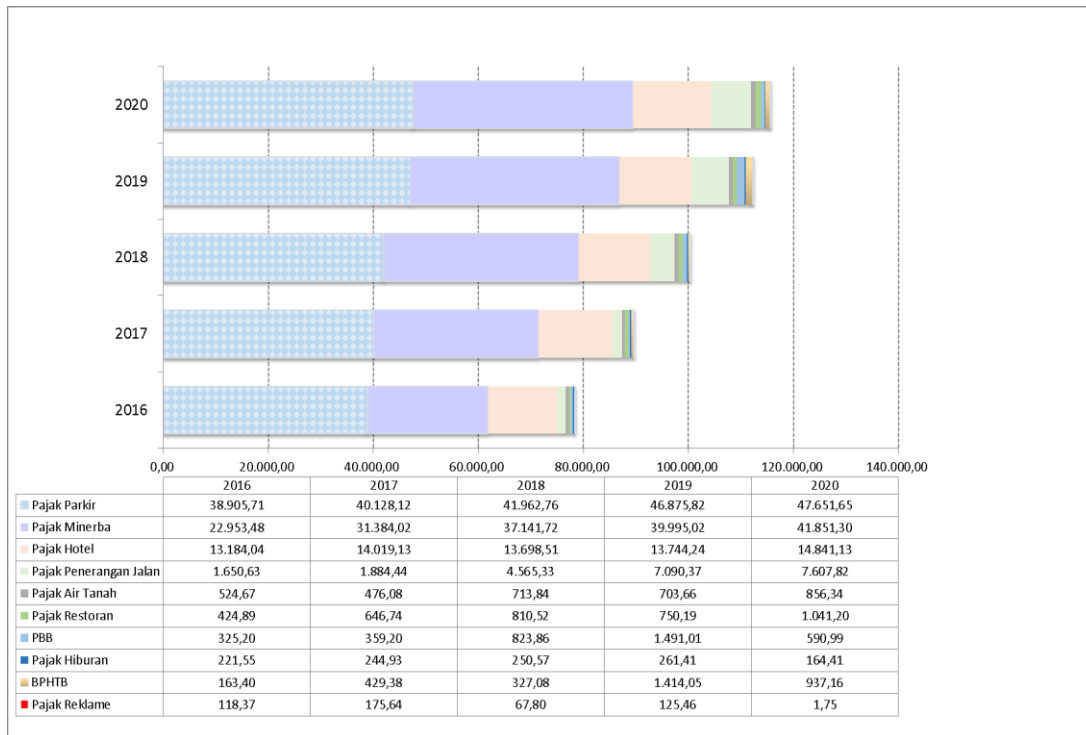
Berdasarkan Gambar diatas terlihat bahwa pajak daerah mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2016 pajak daerah Kabupaten Gowa masih sekitar Rp 78,47 Milyar lebih, mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 14,37% menjadi Rp 89,74 Milyar lebih. Di tahun 2018 terus meningkat sebesar 11,83% menjadi Rp 100,36 Milyar, dan kembali meningkat di tahun 2019 sebesar 12,05% menjadi Rp 112,45 Milyar lebih dan hingga di tahun 2020 meningkat sebesar 2,75% menjadi Rp 115,54 Milyar. Perkembangan pajak daerah yang signifikan menunjukkan kesadaran masyarakat semakin meningkat dalam memenuhi kewajibannya. Realisasi Komponen Pajak Daerah dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.6
Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Pajak Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2020 Kabupaten Gowa

No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.1.1	PAJAK DAERAH	78.471.938.351,84	89.747.690.642,00	100.361.985.000,00	112.451.239.497,56	115.543.741.226,00	10,25
	Pajak Hotel	163.399.234,00	429.381.778,00	327.077.963,00	1.414.054.967,00	937.157.283,00	109,39
	Pajak Restoran	1.650.629.260,00	1.884.441.952,00	4.565.326.020,00	7.090.369.244,00	7.607.821.165,00	54,76
	Pajak Hiburan	325.203.281,00	359.197.713,00	823.857.028,00	1.491.012.790,00	590.985.305,00	40,11
	Pajak Reklame	424.885.874,00	646.740.063,00	810.523.000,00	750.188.729,00	1.041.198.957,00	27,22
	Pajak Penerangan Jalan	22.953.482.883,00	31.384.023.849,00	37.141.723.442,00	39.995.021.884,00	41.851.304.433,00	16,85
	Pajak Parkir	118.370.700,00	175.644.600,00	67.803.300,00	125.461.560,00	1.749.900,00	(6,64)
	Pajak Air Tanah	221.554.809,00	244.931.247,00	250.567.877,00	261.412.623,56	164.408.073,00	(4,98)
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	524.667.500,00	476.080.960,00	713.835.000,00	703.660.429,00	856.335.000,00	15,24
	Pajak Bumi dan Bangunan	13.184.036.086,84	14.019.130.698,00	13.698.513.072,00	13.744.239.789,00	14.841.128.860,00	3,09
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	38.905.708.724,00	40.128.117.782,00	41.962.758.298,00	46.875.817.482,00	47.651.652.250,00	5,27

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

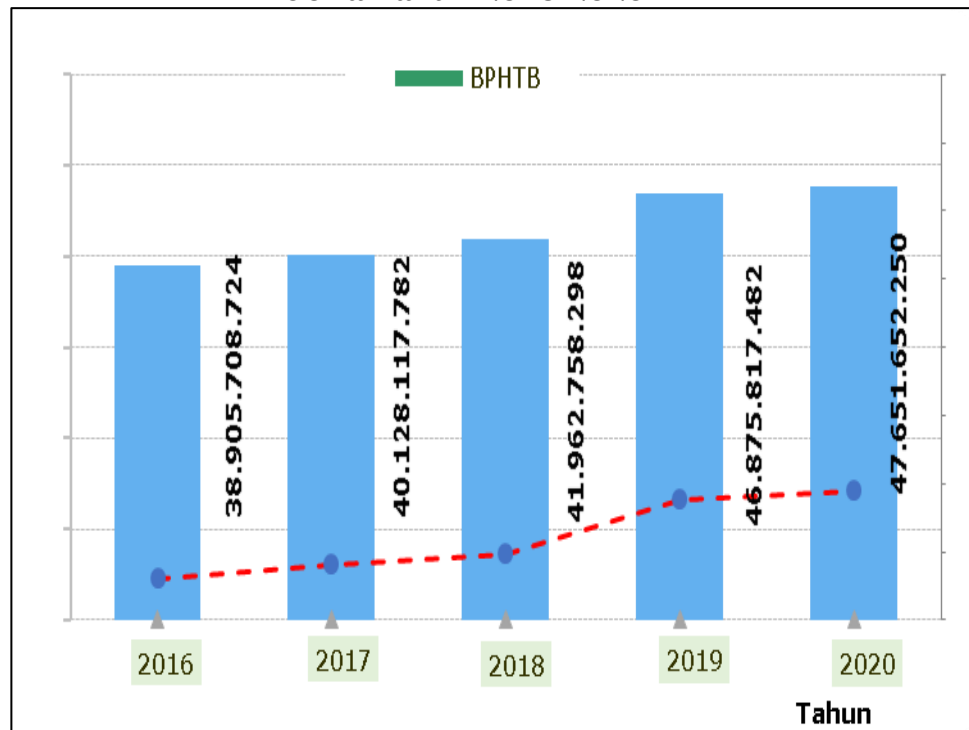
Grafik 3. 7
Postur Pajak Daerah Kabupaten Gowa Tahun
2016-2020 (dalam Juta)



Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel realisasi komponen pajak daerah dan Gambar postur Pajak Daerah Kabupaten Gowa selama Tahun Anggaran 2016-2020, Kontribusi Pajak Daerah terbesar diberikan oleh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Penerangan Jalan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan memberikan rata-rata kontribusi sebesar 43,81% per tahun dan Pajak Penerangan Jalan memberikan kontribusi sebesar 34,60% per tahun. Sedangkan Laju Pertumbuhan tertinggi diperoleh Pajak Hotel dan Pajak Restoran, dengan laju pertumbuhan masing-masing 109,39% dan 54,76% pertahun.

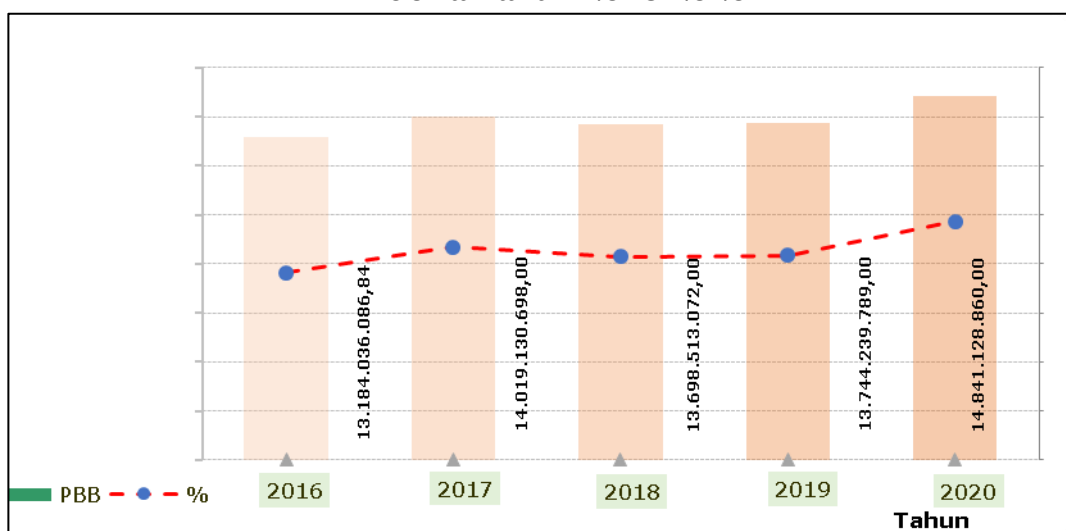
Grafik 3. 8
Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten
Gowa Tahun 2016-2020



Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Gambar Realisasi Tahun 2016-2020 terlihat bahwa realisasi pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun 2016 sebesar Rp 38,90 Milyar hingga di tahun 2020 mencapai Rp 47,65 Milyar dengan laju pertumbuhan realisasi 5,27%, hal ini disebabkan adanya peningkatan pembangunan di sektor property, peningkatan peralihan kepemilikan, dan peningkatan status tanah, serta optimalisasi peninjauan lokasi pemohon BPHTB.

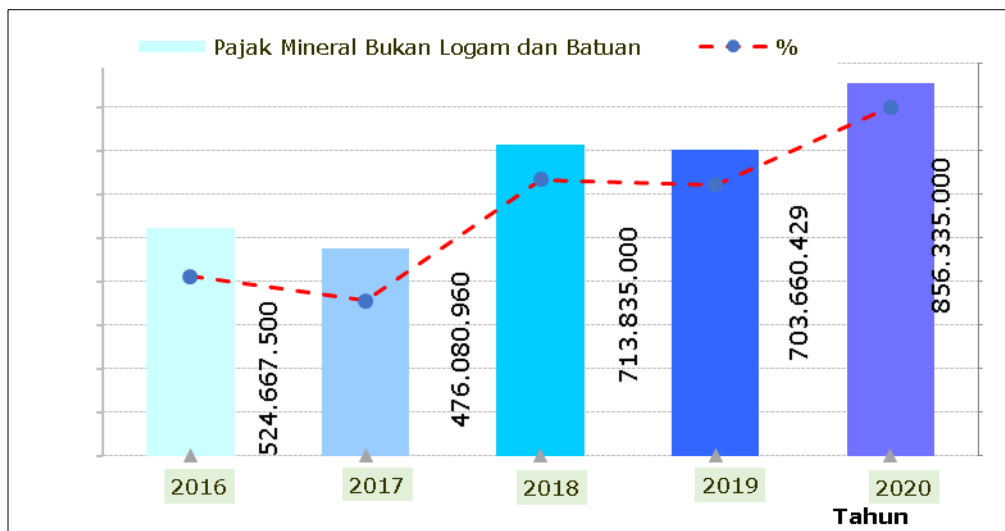
Grafik 3. 9
Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Kabupaten
Gowa Tahun 2016-2020



Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Gambar Realisasi Tahun 2016-2020, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 terealisasi sebesar Rp 13,18 Milyar hingga di tahun 2020 mencapai Rp 14,84 Milyar dengan laju pertumbuhan realisasi 3,09%, hal ini disebabkan adanya pembukaan Counter Pembayaran (*Postpayment Application System*) PBB-P2 di setiap kantor kecamatan utamanya di dataran tinggi untuk memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran PBB-P2 sehingga tidak akan ada lagi wajib pajak yang selama ini sulit menjangkau bank yang hanya berada di ibu kota kabupaten dikarenakan akses jalan dan transportasi masih terbatas sehingga ketepatan waktu pembayaran sulit diupayakan. *Postpayment Application System* PBB-P2 dianggap sangat membantu masyarakat selaku wajib pajak untuk dapat melakukan pembayaran tepat waktu. Peningkatan realisasi PBB-P2 juga disebabkan adanya peningkatan wajib pajak yang melakukan pemecahan dan perluasan tanah sehingga dilakukan penyesuaian NJOP, kenaikan harga tanah akibat berkembangnya wilayah secara pesat serta peningkatan pendaftaran wajib pajak baru.

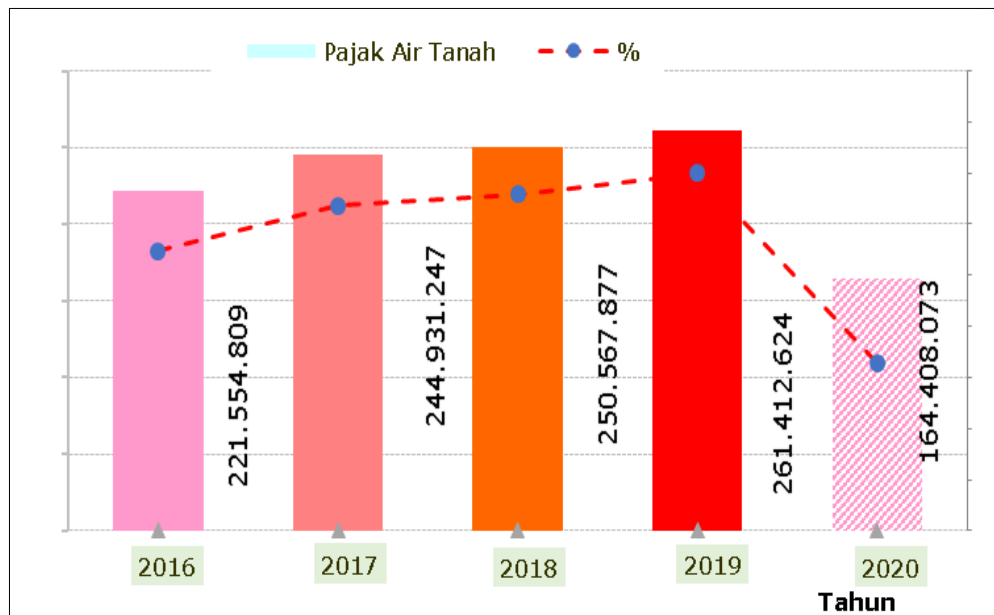
Grafik 3. 10
Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020



Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Gambar Realisasi Tahun 2016-2020, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2016 terealisasi sebesar Rp 524 Juta hingga di tahun 2020 mencapai Rp 856 Juta dengan laju pertumbuhan realisasi sebesar 15,24%, hal ini ditunjang oleh pengawasan dan efektifitas monitoring dan evaluasi lokasi tambang dan penguatan database.

Grafik 3. 11
Realisasi Pajak Air Tanah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020



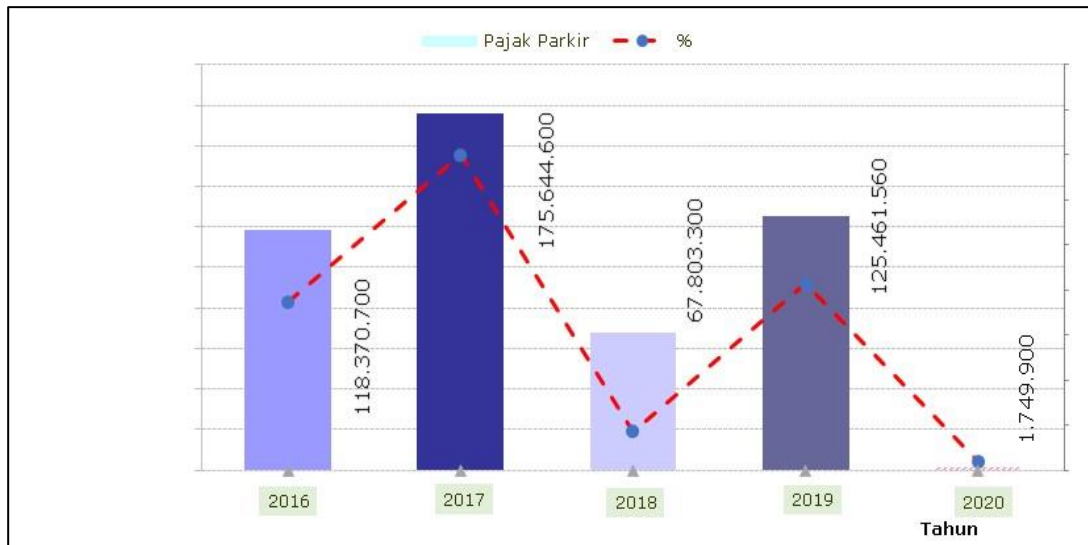
Sumber : **Data Diolah**

Berdasarkan Gambar Realisasi Tahun 2016-2020, Pajak Air Tanah di tahun 2016 terealisasi sebesar Rp 221 Juta hingga di tahun 2020 mengalami penurunan capaian sebesar Rp 164 Juta, dengan laju penurunan realisasi 4,98% disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak yang menggunakan air tanah secara komersil untuk melunasi kewajiban perpajakannya, sebagian wajib pajak belum ada yang memasang alat pengukur meteran air, wajib pajak berharap petugas yang memasangnya, padahal hal itu merupakan kewajiban wajib pajak, selain itu terdapat wajib pajak atau perusahaan yang menggunakan air tanah secara komersil beralih menggunakan PDAM sehingga berimbas pada berkurangnya pemasukan Pajak Air Tanah.

Berdasarkan Gambar Realisasi Tahun 2016-2020, Pajak Parkir di tahun 2016 terealisasi sebesar Rp 118 Juta hingga di tahun 2020 mengalami penurunan capaian sebesar Rp 1,74 Juta, Pajak Parkir mengalami penurunan laju realisasi sebesar 6,64% disebabkan oleh dampak pandemi covid-19 dengan diterapkannya Pembatasan Sosial

Berskala Besar sehingga ditutupnya sejumlah pusat perbelanjaan dan sarana umum lainnya yang mengakibatkan pemasukan pajak parkir sangat berkurang, disamping itu dari sisi pengawasan, masih banyaknya juru parkir liar yang harus ditertibkan, melakukan pengawasan intensif pada daerah parkir yang tidak memiliki izin.

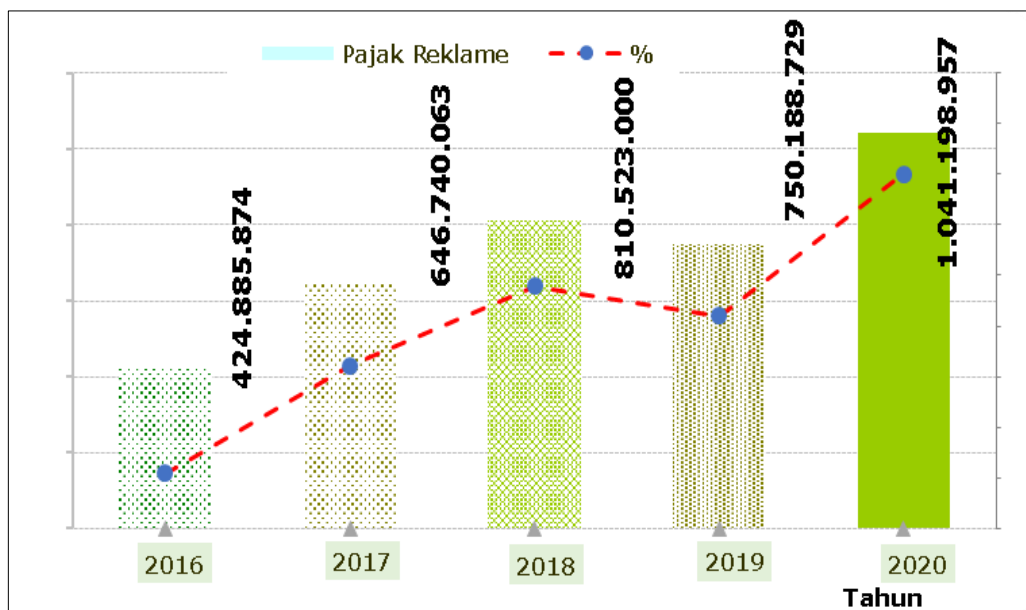
Grafik 3. 12
Realisasi Pajak Parkir Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020



Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Gambar Realisasi Tahun 2016-2020, Pajak Penerangan Jalan di tahun 2016 terealisasi sebesar Rp 22,95 Milyar hingga di tahun 2020 mencapai Rp 41,85 Milyar, dengan laju pertumbuhan realisasi sebesar 16,85% disebabkan oleh wajib pajak pengguna listrik rumah tangga maupun perusahaan yang membayar tagihan PLN secara langsung maupun online akan selalu dikenakan tarif pajak sesuai cluster dengan dasar pemungutan yang jelas dan pasti, selain itu terjadinya peningkatan permohonan pemasangan baru, penambahan daya, dan penurunan daya dari pelanggan.

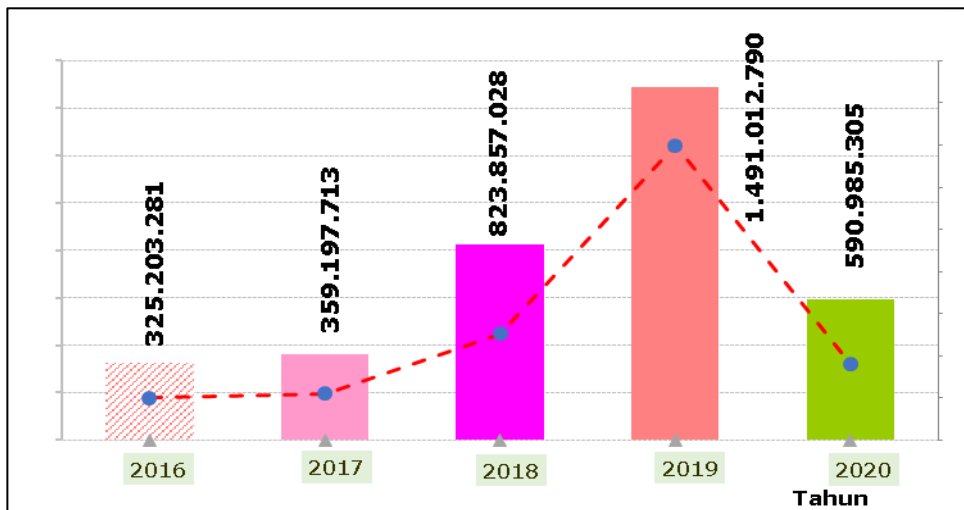
Grafik 3. 13
Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020



Sumber : Data Diolah

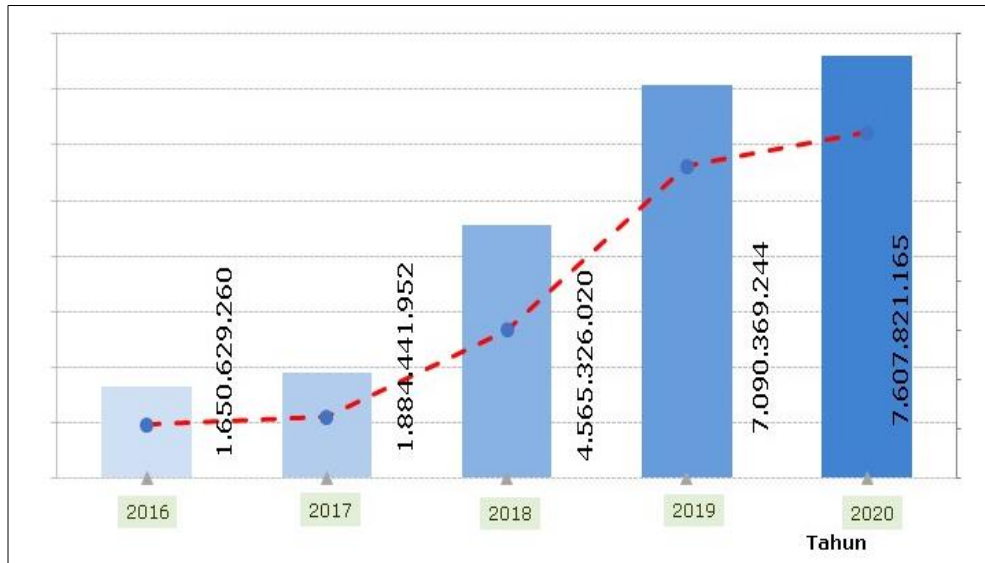
Berdasarkan Gambar Realisasi Tahun 2016-2020, Pajak Reklame terealisasi di tahun 2016 sebesar Rp 424 Juta hingga di tahun 2020 mencapai Rp 1,041 Milyar, dengan laju pertumbuhan realisasi sebesar 27,22% disebabkan oleh peningkatan jumlah industri yang berinvestasi di Gowa mengakibatkan meningkatnya perusahaan atau perorangan yang memperkenalkan produk barang atau jasa mereka kepada masyarakat melalui media reklame, peningkatan variasi produk barang atau jasa yang tersedia akan meningkatkan objek pajak reklame, sehingga penerimaan pajak reklame meningkat.

Grafik 3. 14
Realisasi Pajak Hiburan Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020



Berdasarkan Gambar Realisasi Tahun 2016-2020, Pajak Hiburan terealisasi di tahun 2016 sebesar Rp 325 Juta hingga di tahun 2020 mencapai Rp 590 Juta, dengan laju pertumbuhan realisasi 40,11%, Penurunan realisasi di tahun 2020 dibanding tahun 2019 disebabkan oleh dampak pandemi covid-19 dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar sehingga ditutupnya sejumlah tempat-tempat hiburan dan pembatasan waktu beroperasi, namun demikian optimalisasi pajak hiburan tetap dilakukan dengan upaya intensifikasi pemeriksaan dan pengawasan terhadap objek pajak yang telah terdaftar dan upaya ekstensifikasi dengan survey jenis-jenis hiburan yang baru bermunculan dan berpotensi menambah jenis objek Pajak Hiburan, serta peningkatan sarana dan prasarana hiburan yang menarik minat pengunjung serta ditunjang oleh penyelenggaraan Sosialisasi Diseminasi Wajib Pungut Pajak Hiburan oleh Pemerintah Daerah.

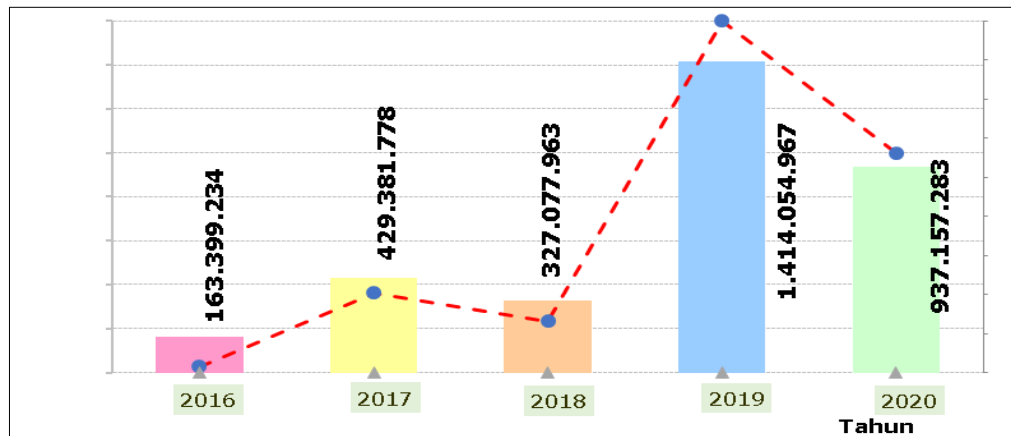
Grafik 3. 15
Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Gowa
Tahun 2016-2020



Sumber : Data Diolah

Restoran terealisasi di tahun 2016 sebesar Rp 1,65 Milyar hingga di tahun 2020 mencapai Rp 7,60 Milyar, dengan laju pertumbuhan realisasi 54,76%, hal ini merupakan hasil dari intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dengan mengoptimalkan pendataan potensi pajak restoran, Melakukan Pemasangan Alat Perekam Pajak Mobile Payment Online Sistem (MPOS) dan Transaction Monitoring Device (TMD). Penerapan tax monitoring system ini juga dinilai mampu meningkatkan pendapatan daerah, sekaligus menghindari adanya kebocoran di sektor pajak. Penggunaan MPOS system ini dilakukan setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang pajak restoran, di mana setiap pengunjung yang menggunakan pelayanan yang disediakan restoran dikenakan pajak 10 persen. Aturan tersebut juga semakin didukung dengan Peraturan Bupati Gowa Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pembayaran, Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Sistem Online.

Grafik 3. 16
Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Gowa Tahun
2016-2020



Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Gambar Realisasi Tahun 2016-2020, Pajak Hotel terealisasi di tahun 2016 sebesar Rp 163 Juta hingga di tahun 2020 mencapai Rp 937 Juta, dengan laju pertumbuhan realisasi 109,39%, Penurunan realisasi di tahun 2020 dibanding tahun 2019 disebabkan oleh dampak pandemi covid-19 sehingga kurangnya pengunjung hotel yang datang untuk menginap, namun demikian upaya optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah senantiasa dilakukan dengan peningkatan pendataan potensi pajak hotel, disamping itu letak kabupaten Gowa yang strategis berbatasan dengan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten wisata mendorong tumbuh kembangnya industri perhotelan dan jasa penginapan, ditunjang oleh penyelenggaraan Sosialisasi Diseminasi Wajib Pungut Pajak Hotel oleh Pemerintah Daerah.

2. Retribusi Daerah

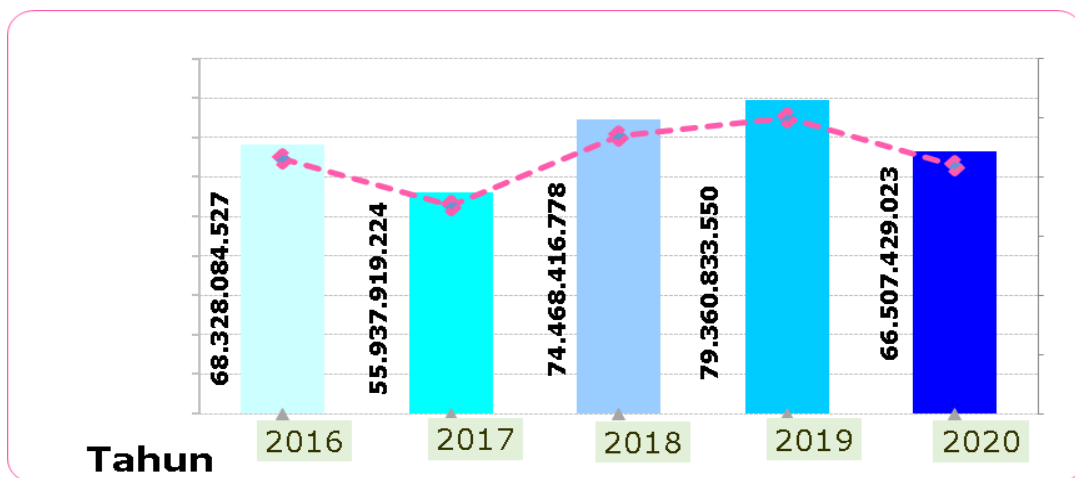
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa untuk melaksanakan pungutan meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Jasa Umum terbagi atas 8 (delapan) jenis, yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Retribusi Jasa Usaha terbagi atas 6 (enam) jenis, yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Perizinan Tertentu terbagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan/Keramaian, dan Retribusi Izin Trayek. Realisasi Retribusi Daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 1,34 persen dalam kurun waktu 2016-2020.

Grafik 3. 17
Perkembangan Retribusi Daerah Kab. Gowa
Tahun 2016-2020



Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Gambar diatas terlihat bahwa retribusi daerah selama periode 2016-2020 dengan trend fluktuatif. Tahun 2016 retribusi daerah Kabupaten Gowa masih sekitar Rp 68,32 Milyar lebih, mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 18,13% menjadi Rp 55,93 Milyar lebih. Di tahun 2018 meningkat sebesar 33,13% menjadi Rp 74,46 Milyar, dan kembali meningkat di tahun 2019 sebesar 6,57% menjadi Rp 79,36 Milyar lebih dan di tahun 2020 kembali menurun sebesar 16,20% menjadi Rp 66,50 Milyar. Penurunan realisasi di tahun 2020 dibanding tahun 2019 disebabkan oleh dampak pandemi covid-19 dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar menyebabkan seluruh tempat rekreasi, tempat olahraga, dan sarana umum lainnya ditutup, adanya *lock down* dengan pembatasan mobilitas penduduk yang cukup tinggi mengakibatkan perekonomian tumbuh tidak optimal sehingga sangat berpengaruh terhadap pendapatan retribusi daerah. Realisasi Komponen Retribusi Daerah selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

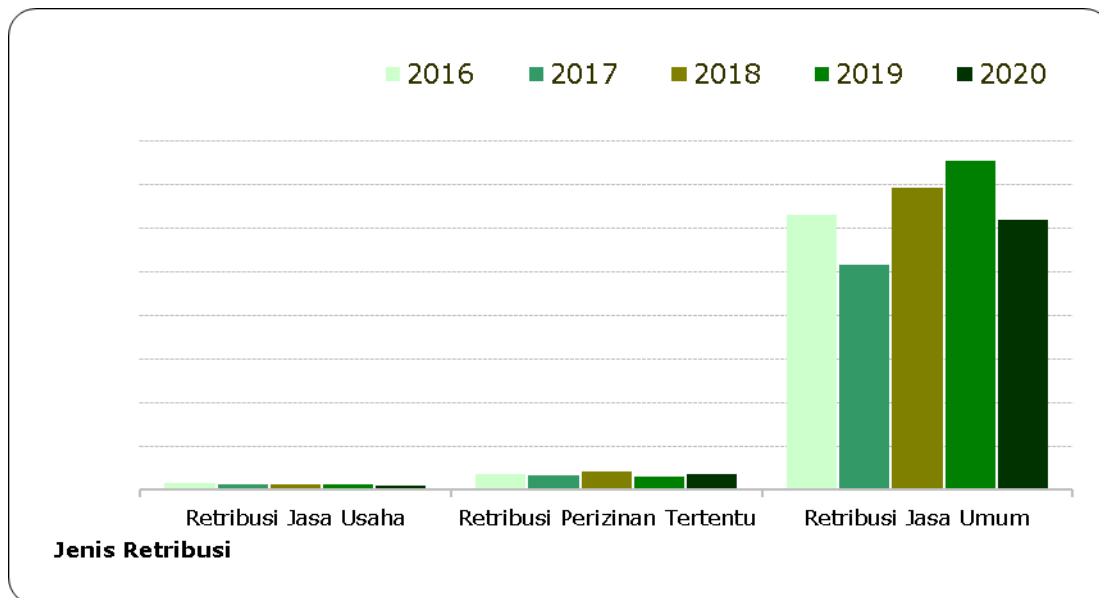
Tabel 3.7
Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Retribusi Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2020
Kabupaten Gowa

No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.1.2	RETRIBUSI DAERAH	68.328.084.527,00	55.937.919.224,00	74.468.416.778,00	79.360.833.550,00	66.507.429.022,99	1,34
	Retribusi Jasa Umum	63.149.848.925,00	51.421.169.719,00	69.242.321.134,00	75.287.066.025,00	61.911.848.026,00	1,76
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	61.745.611.425,00	49.910.763.719,00	67.588.835.134,00	73.455.528.025,00	60.082.383.426,00	1,68
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	303.235.000,00	354.507.000,00	403.310.000,00	400.280.000,00	238.836.000,00	(2,60)
	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	19.245.000,00	18.487.500,00	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	(0,02)
	Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum	101.000.000,00	107.700.000,00	155.000.000,00	200.000.000,00	103.800.000,00	7,87
	Retrubusi Pelayanan Pasar	690.673.000,00	674.188.000,00	605.056.000,00	509.485.000,00	392.534.000,00	(12,85)
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	261.104.500,00	282.438.500,00	400.605.000,00	622.308.000,00	989.067.500,00	41,07
	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	28.980.000,00	73.085.000,00	70.315.000,00	80.265.000,00	64.877.100,00	35,85
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	-	-	-	21.150.000,00	0,00
	Retribusi Jasa Usaha	1.558.937.500,00	1.293.059.900,00	1.203.820.580,00	1.225.333.080,00	915.563.380,00	(11,86)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	397.490.000,00	509.788.500,00	482.529.580,00	515.405.080,00	403.129.380,00	1,98
	Retribusi Terminal	509.560.000,00	429.180.000,00	339.250.000,00	265.900.000,00	97.300.000,00	(30,44)

No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vi lla	35.000.000,00	35.000.000,00	35.500.000,00	35.000.000,00	52.000.000,00	12,15
	Retribusi Rumah Potong Hewan	90.607.000,00	97.947.000,00	112.305.000,00	122.260.000,00	127.650.000,00	9,01
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	88.100.000,00	131.664.000,00	138.346.000,00	193.958.000,00	144.334.000,00	17,28
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	438.180.500,00	89.480.400,00	95.890.000,00	92.810.000,00	91.150.000,00	(19,35)
	Retribusi Perizinan Tertentu	3.619.298.102,00	3.223.689.605,00	4.022.275.064,00	2.848.434.445,00	3.680.017.616,99	3,46
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.137.548.102,00	2.407.729.605,00	4.015.155.064,00	2.842.954.445,00	3.677.737.616,99	10,92
	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	467.150.000,00	808.000.000,00	-	-	-	18,24
	Retribusi Izin Trayek	14.600.000,00	7.960.000,00	7.120.000,00	5.480.000,00	2.280.000,00	(34,37)

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

Grafik 3. 18
Postur Retribusi Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020



Sumber : Data Diolah

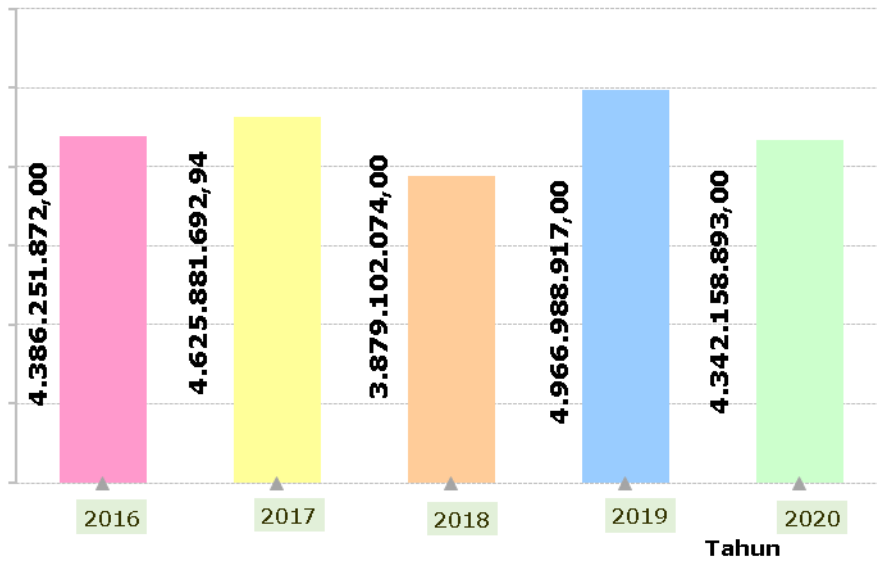
Berdasarkan tabel Realisasi Komponen Retribusi Daerah dan Gambar postur Retribusi Daerah Kabupaten Gowa selama Tahun Anggaran 2016-2020, kontribusi terbesar diberikan oleh Retribusi Jasa Umum, dengan rata-rata kontribusi sebesar 93,06% per tahun, sedangkan Laju Pertumbuhan tertinggi diperoleh Retribusi Perizinan Tertentu, dengan laju pertumbuhan sebesar 3,46% pertahun.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. HPKD masih mengandalkan penerimaan deviden atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD merupakan pendapatan yang bersumber dari PDAM Gowa dan PD Holding Company, Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN merupakan pendapatan yang bersumber dari PT. Bank Sulselbar, Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta merupakan pendapatan yang bersumber dari PT. GMTDC

Selama tahun 2016-2020, realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan masih fluktuatif, dengan rata-rata pertumbuhan 1,20 persen. Hal ini tergambar pada Gambar berikut.

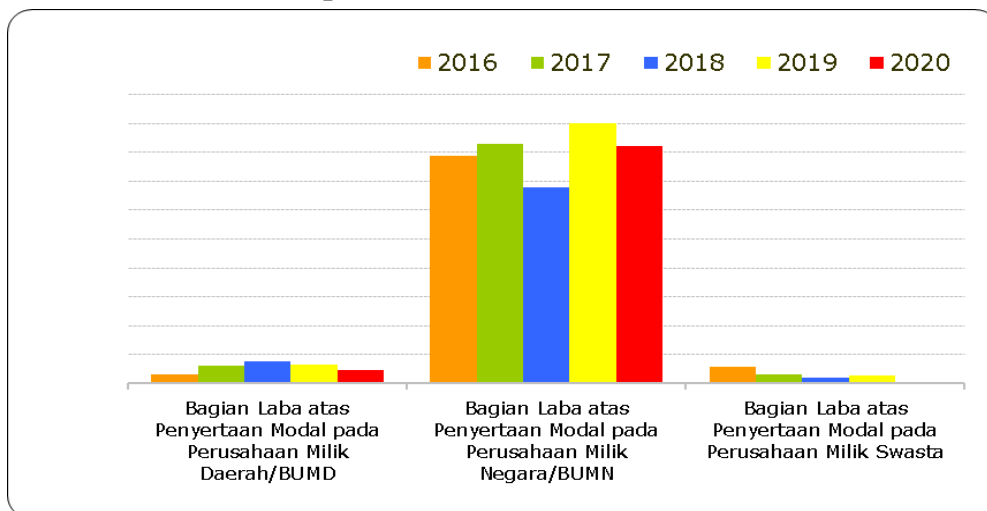
Grafik 3. 19
Perkembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kab. Gowa Tahun 2016-2020



Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Gambar diatas terlihat bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selama periode 2016-2020 dengan trend fluktuatif. Tahun 2016 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Gowa masih sekitar Rp 4,38 Milyar lebih, mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 5,46% menjadi Rp 4,62 Milyar lebih. Di tahun 2018 menurun sebesar 16,14% menjadi Rp 3,87 Milyar, dan kembali meningkat di tahun 2019 sebesar 28,04% menjadi Rp 4,96 Milyar lebih dan di tahun 2020 kembali menurun sebesar 12,58% menjadi Rp 4,34 Milyar.

Grafik 3. 20
Postur Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020



Sumber : Data Diolah

Tabel 3.8
Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten
Gowa Tahun 2016 s/d Tahun 2020

No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	4.386.251.872	4.625.881.693	3.879.102.074	4.966.988.917	4.342.158.893	1,20
	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	150.000.000	315.000.000	375.000.000	325.000.000	235.000.000	22,01
	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN	3.939.251.872	4.145.881.693	3.398.502.074	4.509.988.917	4.107.158.893	2,75
	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	297.000.000	165.000.000	105.600.000	132.000.000	-	-38,86

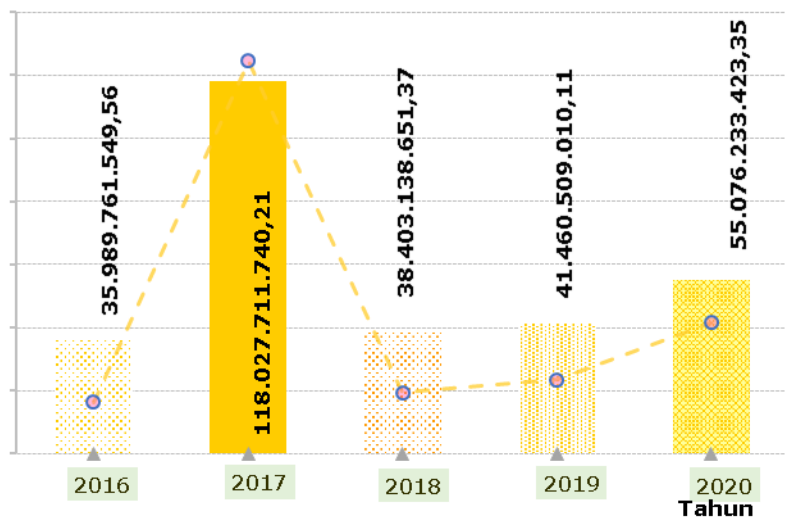
Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel Realisasi Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Gowa dan Gambar postur Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Gowa selama Tahun Anggaran 2016-2020, kontribusi terbesar diberikan oleh Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN, dengan rata-rata kontribusi sebesar 90,49% per tahun, sedangkan Laju Pertumbuhan tertinggi diperoleh Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, dengan laju pertumbuhan sebesar 22,01% pertahun.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri atas Penerimaan Jasa Giro, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR), Pendapatan Denda Pajak, Penerimaan PAD yang Sah Lainnya, Pendapatan Dana Kapitasi JKN, Lain-lain PAD yang Sah Lainnya.

Grafik 3. 21
Perkembangan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020



Sumber : Data Diolah

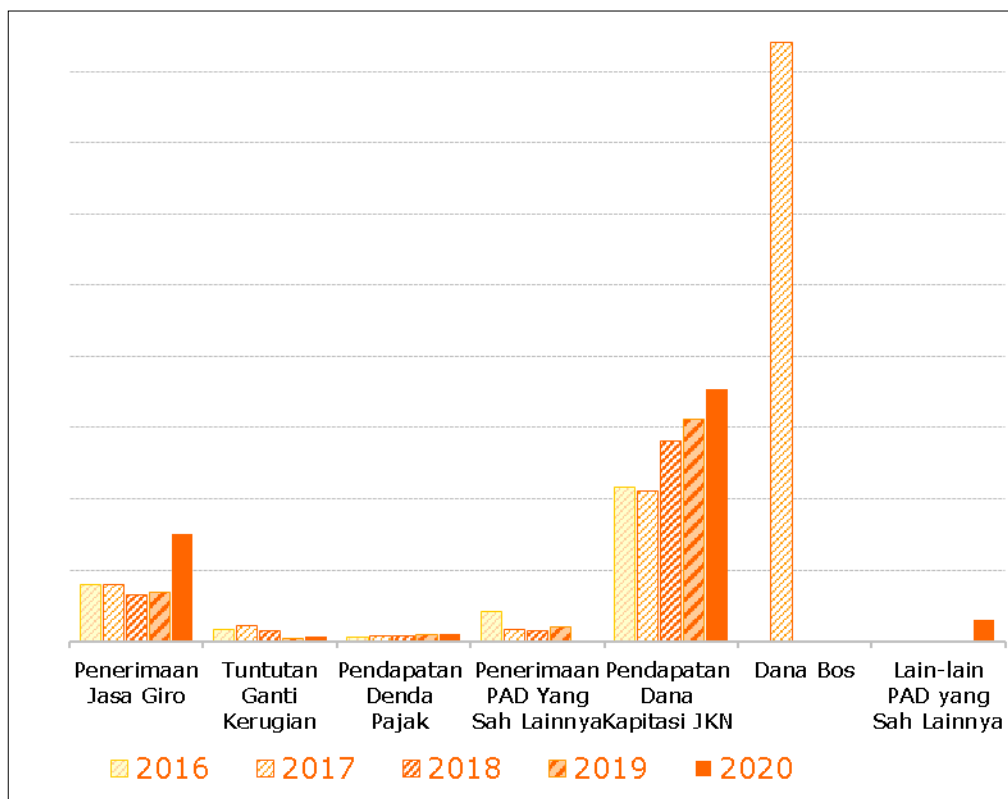
Berdasarkan Gambar diatas terlihat bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama periode 2016-2020 dengan trend cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 50,32 persen. Tahun 2016 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Gowa masih sekitar Rp 35,98 Milyar lebih, mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 227,95% menjadi Rp 118,02 Milyar lebih. Di tahun 2018 menurun sebesar 67,46% menjadi Rp 38,40 Milyar, dan kembali meningkat di tahun 2019 sebesar 7,96% menjadi Rp 41,46 Milyar lebih dan di tahun 2020 kembali meningkat sebesar 32,84% menjadi Rp 55,07 Milyar.

Tabel 3.9
Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Gowa
Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.1.4.	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	35.989.761.549,56	118.027.711.740,21	38.403.138.651,37	41.460.509.010,11	55.076.233.423,35	50,32
	Penerimaan Jasa Giro	7.992.675.712,22	8.000.614.828,10	6.553.096.662,46	6.849.763.349,45	14.988.554.592,01	26,34
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	1.578.939.096,64	2.260.215.384,11	1.481.615.021,11	378.040.768,97	668.933.106,34	2,79
	Pendapatan Denda Pajak	617.184.696,00	821.434.670,00	676.046.736,00	997.361.833,00	980.480.549,00	15,31
	Penerimaan PAD Yang Sah Lainnya	4.192.044.844,70	1.671.869.473,00	1.558.191.099,80	2.079.956.093,69	-	-33,36
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	21.608.917.200,00	21.170.034.179,00	28.134.189.132,00	31.155.386.965,00	35.427.295.380,00	13,83
	Dana Bos	-	84.103.543.206,00	-	-	-	0
	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	-	-	-	3.010.969.796,00	0

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

Grafik 3. 22
Postur Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kab. Gowa Tahun
2016-2020



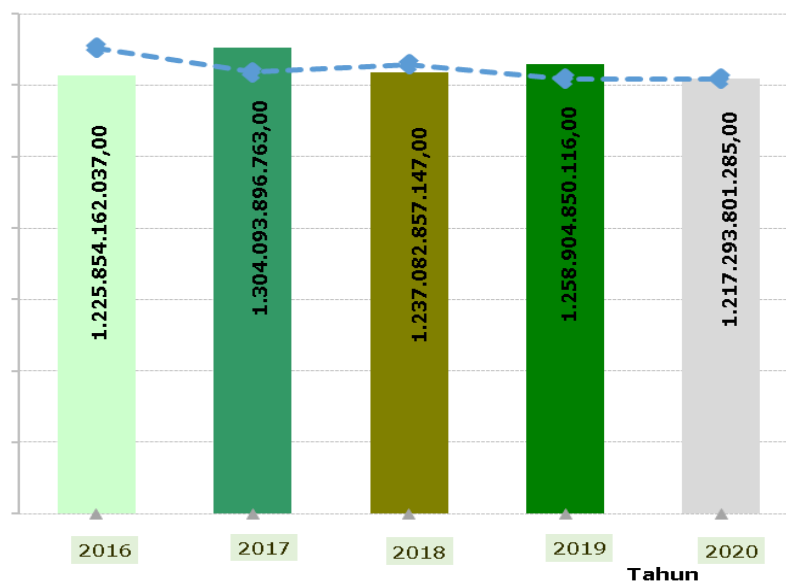
Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel Realisasi Komponen Lain-lain PAD yang Sah dan Gambar postur Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Gowa selama Tahun Anggaran 2016-2020, kontribusi terbesar diberikan oleh Pendapatan Dana Kapitasi JKN, dengan rata-rata kontribusi sebesar 58,14% per tahun, sedangkan Laju Pertumbuhan tertinggi diperoleh Pendapatan Jasa Giro, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 26,34% pertahun.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah. Dana bagi hasil/bagi hasil bukan pajak meliputi Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak, Bagi Hasil Dari Cukai Tembakau. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam meliputi Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Hutan, Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan, Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi, dan Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum, disajikan dalam tabel berikut ini :

Grafik 3. 23
Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Gowa Tahun
2016-2020



Sumber : Data Diolah

Selama tahun 2016-2020, realisasi Dana Perimbangan cenderung menurun, dengan rata-rata laju penurunan 0,07 persen. Tahun 2016 Dana Perimbangan Kabupaten Gowa masih sekitar Rp 1,22 Trilyun lebih, mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 6,38% menjadi Rp 1,30 Trilyun lebih. Di tahun 2018 PAD turun sebesar 5,14% menjadi Rp 1,23 Trilyun, dan kembali meningkat di tahun 2019 sebesar 1,76% menjadi Rp 1,25 Trilyun lebih dan di tahun 2020 turun sebesar 3,31% menjadi Rp 1,21 Trilyun.

Tabel 3. 10
Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Dana Perimbangan Kab.
Gowa Tahun 2016-2020

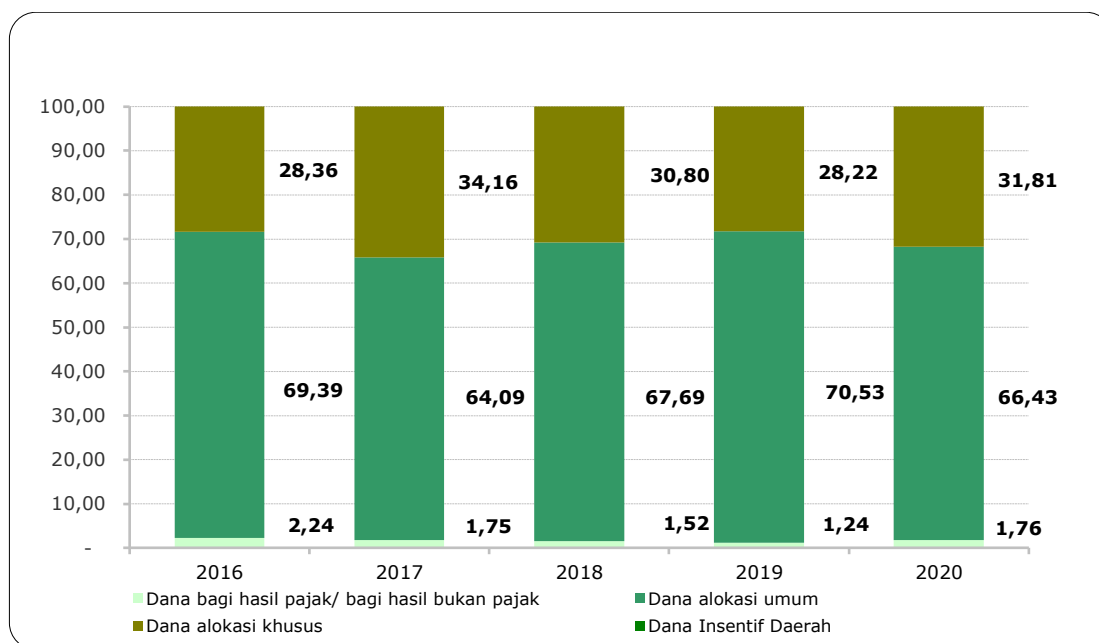
Uraian	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	Rata-rata Proporsi (%)
Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	2,24	1,75	1,52	1,24	1,76	1,70
Dana alokasi umum	69,39	64,09	67,69	70,53	66,43	67,63
Dana alokasi khusus	28,36	34,16	30,80	28,22	31,81	30,67
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel dan Gambar Dana Perimbangan Kabupaten Gowa selama Tahun Anggaran 2016-2020 masih didominasi oleh kontribusi dari Dana Alokasi Umum rata-rata sebesar 67,63 persen

per tahun, diikuti dengan Dana Alokasi Khusus rata-rata sebesar 30,67 persen per tahun, Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak rata-rata sebesar 1,70 persen per tahun.

Grafik 3. 24
Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Dana Perimbangan Kab. Gowa Tahun 2016-2020



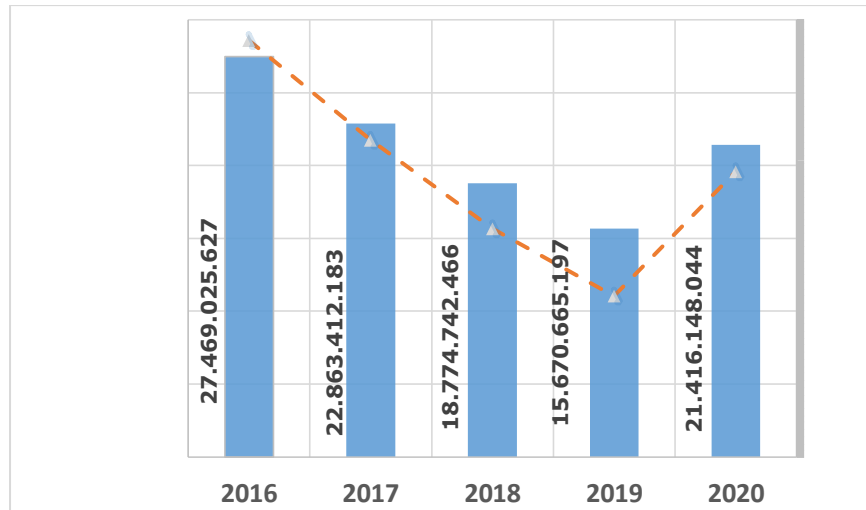
Sumber : Data Diolah

1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) UU No.33/2004 Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN. DBH dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Tujuan DBH adalah memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memerhatikan potensi daerah penghasil. Pembagian DBH ini dilakukan berdasarkan prinsip by origin yang berarti daerah penghasil mendapat porsi yang lebih besar dari daerah lain dalam provinsi tersebut. Sementara itu, daerah lainnya (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam UU No.33/2004.

Grafik 3. 25
Perkembangan Dana Bagi Hasil Kabupaten Gowa
Tahun 2016-2020

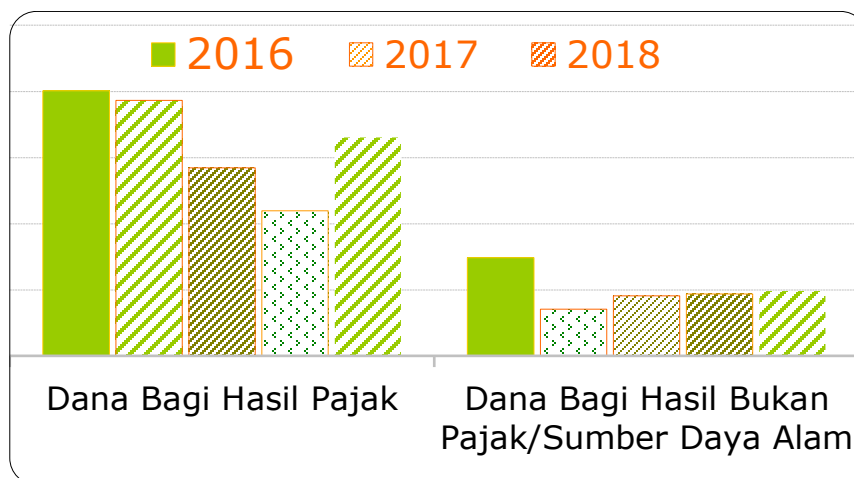


Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Gambar di atas terlihat bahwa Dana Bagi Hasil selama periode 2016-2020 dengan trend cenderung menurun dengan rata-rata penurunan 3,63 persen per tahun. Tahun 2016 Dana Bagi Hasil Kabupaten Gowa masih sekitar Rp 27,46 Milyar lebih, mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 16,77% menjadi Rp 22,86 Milyar lebih. Di tahun 2018 kembali menurun sebesar 17,88% menjadi Rp 18,77 Milyar, dan terus menurun di tahun 2019 sebesar 16,53% menjadi Rp 15,67 Milyar lebih dan di tahun 2020 meningkat sebesar 36,66% menjadi Rp 21,41 Milyar.

Merujuk Pasal 23 UU No.33/2004 penyaluran DBH didasarkan pada realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan yang berarti berdasarkan pada prinsip based on actual revenue. Adapun DBH tersegmentasi menjadi dua jenis, yaitu DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam.

Grafik 3. 26
Postur Dana Bagi Hasil Kabupaten Gowa Tahun
2016-2020



Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Gambar postur Dana Bagi Hasil Kabupaten Gowa selama Tahun Anggaran 2016-2020, kontribusi terbesar diberikan oleh Dana Bagi Hasil Pajak, dengan rata-rata kontribusi sebesar 76,05% per tahun dan Laju Pertumbuhan menurun rata-rata sebesar 0,61% per tahun.

Dana Bagi Hasil Pajak terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu *Pertama*, DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). DBH PBB berasal dari penerimaan PBB yang diterima oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tidak termasuk karena dikelola oleh daerah.

Kedua, DBH Pajak Penghasilan (DBH PPh). DBH PPh berasal dari penerimaan PPh yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penerimaan PPh tersebut meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 dan Pasal 29.

Ketiga, DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). DBH CHT adalah transfer dari pusat yang dialokasikan kepada provinsi penghasil cukai dalam hal ini provinsi penghasil tembakau. Ketentuan lebih lanjut mengenai DBH Pajak tercantum dalam UU No.33/2004 dan aturan turunannya.

Penggunaan DBH Pajak bersifat block grant yang berarti penggunaannya diserahkan kepada tiap daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun, untuk DBH CHT setiap daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 50% dari dana DBH. Alokasi tersebut digunakan untuk mendanai program/kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai serta pemberantasan barang kena cukai ilegal.

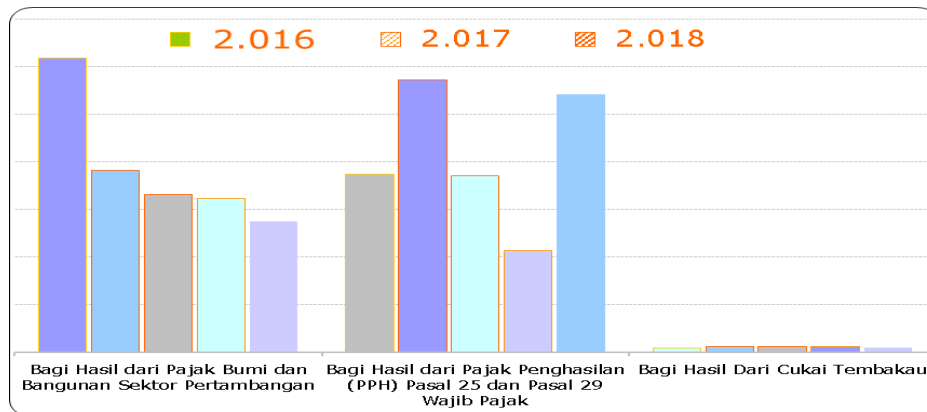
Grafik 3. 27
Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020



Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Gambar diatas terlihat bahwa Dana Bagi Hasil Pajak selama periode 2016-2020 dengan trend cenderung menurun dengan rata-rata penurunan 0,61 persen per tahun. Tahun 2016 Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten Gowa masih sekitar Rp 20,03 Milyar lebih, mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 3,56% menjadi Rp 19,31 Milyar lebih. Di tahun 2018 kembali menurun sebesar 26,38% menjadi Rp 14,22 Milyar, dan terus menurun di tahun 2019 sebesar 22,81% menjadi Rp 10,97 Milyar lebih dan di tahun 2020 meningkat sebesar 50,31% menjadi Rp 16,50 Milyar.

Grafik 3. 28
Postur Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020



Sumber : Data Diolah

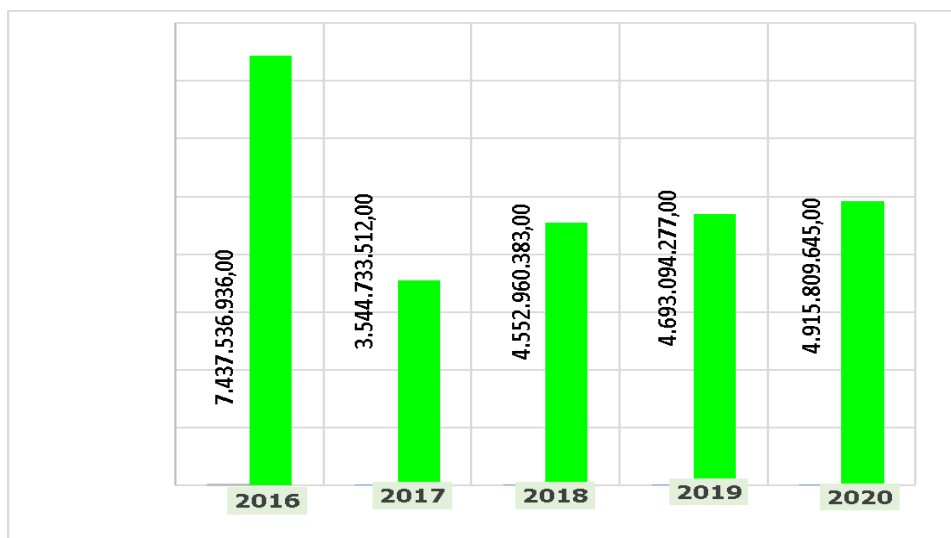
Tabel 3. 10
Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Kab. Gowa Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.2	DANA BAGI HASIL	27.469.025.627,00	22.863.412.183,00	18.774.742.466,00	15.670.665.197,00	21.416.148.044,00	-3,63
	Dana Bagi Hasil Pajak	20.031.488.691,00	19.318.678.671,00	14.221.782.083,00	10.977.570.920,00	16.500.338.399,00	-0,61
	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan	12.365.939.450,00	7.644.301.496,00	6.609.562.178,00	6.461.676.720,00	5.493.401.873,00	-17,24
	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak	7.486.253.336,00	11.439.987.119,00	7.392.386.905,00	4.278.208.509,00	10.828.278.396,00	32,1
	Bagi Hasil Dari Cukai Tembakau	179.295.905,00	234.390.056,00	219.833.000,00	237.685.691,00	178.658.130,00	1,95
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7.437.536.936,00	3.544.733.512,00	4.552.960.383,00	4.693.094.277,00	4.915.809.645,00	-4,02
	Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Hutan	21.531.324,00	42.051.493,00	236.272.032,00	18.063.000,00	49.068.876,00	159,12
	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	163.379.100,00	223.968.600,00	701.234.591,00	590.155.800,00	788.276.289,00	66,98
	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	288.646.439,00	301.603.527,00	-	-	-	1,12
	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	876.107.411,00	1.136.817.321,00	862.843.100,00	1.505.935.530,00	289.289.456,00	-0,15
	Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum	6.087.872.662,00	1.840.292.571,00	2.752.610.660,00	2.578.939.947,00	3.789.175.024,00	5,11

Berdasarkan tabel Realisasi Komponen Bagi Hasil Pajak Kabupaten Gowa dan Gambar postur Bagi Hasil Pajak Kabupaten Gowa selama Tahun Anggaran 2016-2020, kontribusi terbesar diberikan oleh Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak, dengan rata-rata kontribusi sebesar 65,62% per tahun, dengan laju pertumbuhan sebesar 32,10% pertahun.

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Kabupaten Gowa terbagi atas 4 (empat) jenis yaitu *Pertama*, Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan yang berasal dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); dan Dana Reboisasi (DR). *Kedua*, Bagi Hasil Dari Sumber Daya Alam Perikanan yang berasal dari Pungutan Pengusahaan Perikanan, dan Pungutan Hasil Perikanan. *Ketiga*, Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi dan *Keempat*, Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum berasal dari Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi. Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak cenderung menurun, dengan rata-rata penurunan 4,02 persen per tahun.

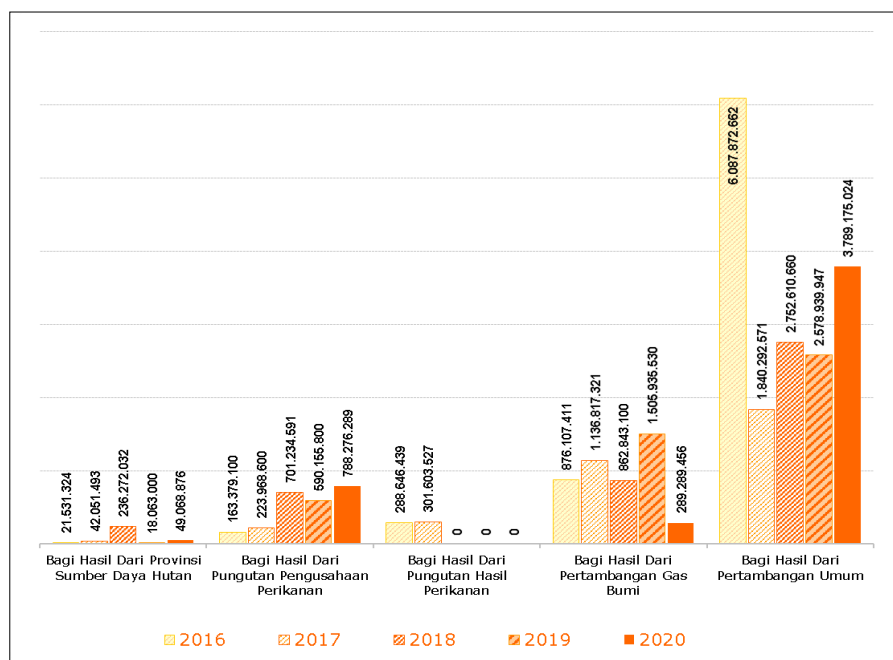
Grafik 3. 29
Perkembangan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Gowa
Tahun 2016-2020



Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Gambar diatas terlihat bahwa Dana Bagi Hasil Bukan Pajak selama periode 2016-2020 dengan trend cenderung meningkat. Tahun 2016 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Gowa masih sekitar Rp 7,43 Milyar lebih, mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 52,34% menjadi Rp 3,54 Milyar lebih. Di tahun 2018 meningkat sebesar 28,44% menjadi Rp 4,55 Milyar, dan kembali meningkat di tahun 2019 sebesar 3,08% menjadi Rp 4,69 Milyar lebih dan di tahun 2020 meningkat sebesar 4,75% menjadi Rp 4,91 Milyar.

Grafik 3. 30
Postur Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten
Gowa Tahun 2016-2020



Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel Realisasi Komponen Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Gowa selama Tahun Anggaran 2016-2020, kontribusi terbesar diberikan oleh Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum, dengan rata-rata kontribusi sebesar 65,25% per tahun, sedangkan Laju Pertumbuhan tertinggi diperoleh Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 159,12% pertahun.

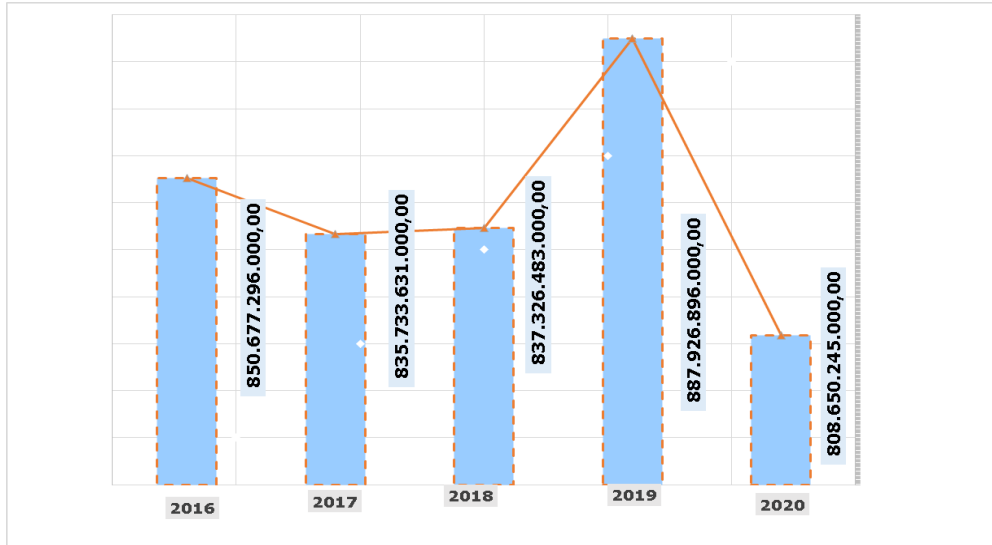
2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Salah satu tujuan pemerintah dalam menjalankan kebijakan desentralisasi fiskal adalah untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan, baik vertikal maupun horisontal. Dalam era otonomi daerah, tujuan ini dilaksanakan dengan memberikan sumber pendanaan kepada daerah, baik dalam bentuk kewenangan untuk melakukan pungutan maupun transfer secara langsung kepada daerah, selaras dengan kewenangan pengelolaan urusan-urusan yang telah diserahkan kepada daerah.

Dana Alokasi Umum merupakan Dana Perimbangan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Gowa dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah, sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat

dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Grafik 3. 31
Perkembangan Dana Alokasi Umum Kabupaten Gowa
Tahun 2016-2020



Sumber : Data Diolah

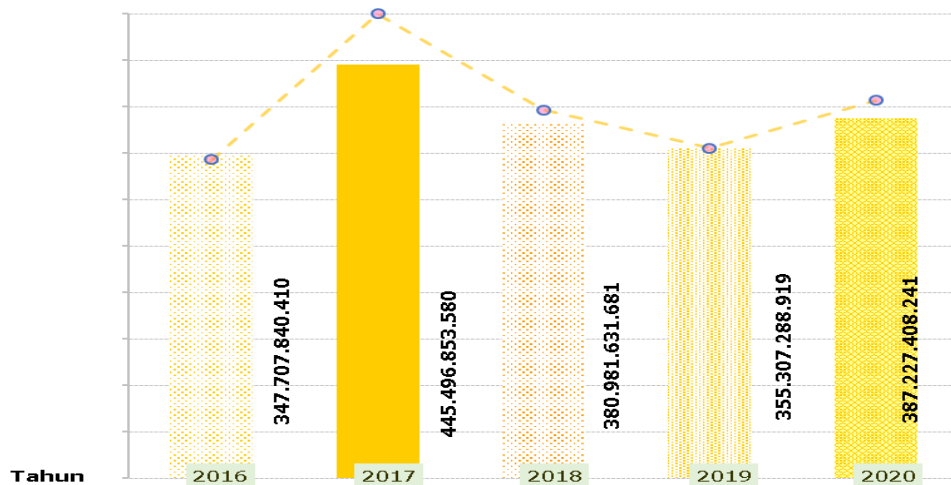
Berdasarkan Gambar diatas terlihat bahwa Dana Alokasi Umum selama periode 2016-2020 dengan trend cenderung menurun, dengan rata-rata penurunan 1,11 persen per tahun. Tahun 2016 Dana Alokasi Umum Kabupaten Gowa masih sekitar Rp 850 Miliar lebih, mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 1,76% menjadi Rp 835 Miliar lebih. Di tahun 2018 meningkat sebesar 0,19% menjadi Rp 837 Miliar, dan kembali meningkat di tahun 2019 sebesar 6,04% menjadi Rp 887 Miliar lebih dan di tahun 2020 menurun sebesar 8,93% menjadi Rp 808 Miliar.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah dalam tahun anggaran bersangkutan, kemudian, Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah. Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan.

Dana Alokasi Khusus terbagi atas 2 (dua) jenis yaitu Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Dana Alokasi Khusus Fisik terdiri atas Dana Alokasi Khusus Reguler dan Dana Alokasi Khusus Penugasan. Dana Alokasi Khusus Reguler meliputi DAK Bidang Pendidikan, DAK Bidang Kesehatan, DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman, DAK Bidang Jalan, DAK Bidang Air Minum, DAK Bidang Sanitasi, DAK Bidang Pertanian, DAK Bidang Pasar, DAK Bidang Pariwisata, DAK Bidang Kelautan dan Perikanan. DAK Penugasan meliputi DAK Bidang Kesehatan, DAK Bidang Air Minum, DAK Bidang Sanitasi, DAK Bidang Jalan, DAK Bidang Irigasi, DAK Bidang Pertanian, DAK Bidang Kedaulatan Pangan, DAK Bidang Kelautan dan Perikanan, DAK Bidang Pasar, DAK Bidang Transportasi, DAK Bidang Perdagangan, DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. DAK Non Fisik meliputi DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, DAK Non Fisik Bantuan Tunjangan Profesi Guru, DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru, DAK Non Fisik Pendidikan Kesetaraan, DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesehatan, DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan KB, DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Akreditasi RSUD, DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas, DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Jampersal, Pelayanan Kepariwisata, BOP Museum, BOK Tambahan.

Grafik 3. 32
Perkembangan Dana Alokasi Khusus Kabupaten
Gowa Tahun 2016-2020



Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Gambar diatas terlihat bahwa Dana Alokasi Khusus selama periode 2016-2020 dengan trend cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 3,97 persen per tahun. Tahun 2016 Dana Alokasi Khusus Kabupaten Gowa masih sekitar Rp 347 Milyar lebih, mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 28,12% menjadi Rp

445 Milyar lebih. Di tahun 2018 menurun sebesar 14,48% menjadi Rp 380 Milyar, dan terus menurun di tahun 2019 sebesar 6,74% menjadi Rp 355 Milyar lebih dan di tahun 2020 meningkat sebesar 8,98% menjadi Rp 387 Milyar. Berikut disajikan tabel Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Dana Alokasi Khusus Kab. Gowa Tahun 2016-2020 .

Tabel 3.12
Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Dana Alokasi Khusus Kab. Gowa Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS	347.707.840.410,00	445.496.853.580,00	380.981.631.681,00	358.821.981.919,00	387.227.408.241,00	3,94
	DAK Fisik	186.426.251.548,00	281.121.065.969,00	197.984.149.483,00	170.492.919.736,00	191.420.066.714,00	4,90
	DAK Reguler	26.231.719.000,00	94.343.238.357,00	162.165.485.991,00	137.679.458.184,00	150.202.417.080,00	81,38
	DAK Bidang Pendidikan	6.264.784.000,00	13.375.129.616,00	12.534.585.467,00	34.526.301.087,00	37.755.135.786,00	73,00
	DAK Bidang Kesehatan	17.335.731.000,00	59.378.435.757,00	54.617.079.428,00	41.161.793.297,00	64.606.983.808,00	66,71
	DAK Bidang Perumahan dan Permukiman	-	4.144.368.000,00	-	2.756.250.000,00	2.883.678.000,00	1,16
	DAK Bidang Jalan	-	-	79.136.466.100,00	45.897.460.364,00	44.956.619.486,00	(0,93)
	DAK Bidang Air Minum	1.161.204.000,00	-	980.869.250,00	2.031.320.744,00	-	26,77
	DAK Bidang Sanitasi	1.470.000.000,00	-	2.065.501.000,00	3.057.022.000,00	-	12,00
	DAK Bidang Pertanian	-	14.806.904.985,00	6.320.419.000,00	3.280.608.692,00	-	(12,60)
	DAK Bidang Pasar	-	-	3.514.693.000,00	3.514.693.000,00	-	0,00
	DAK Bidang Pariwisata	-	1.175.700.000,00	1.539.146.746,00	-	-	7,73
	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	-	1.462.699.999,00	1.456.726.000,00	1.454.009.000,00	-	(0,05)

No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	DAK Penugasan	160.194.532.548,00	186.777.827.612,00	35.818.663.492,00	32.813.461.552,00	41.217.649.634,00	(11,75)
	DAK Bidang Kesehatan	-	-	3.595.549.142,00	2.740.630.071,00	3.428.192.880,00	6,03
	DAK Bidang Air Minum	8.071.252.930,00	-	4.536.885.000,00	2.485.573.197,00	7.318.479.000,00	48,16
	DAK Bidang Sanitasi	2.500.000.000,00	-	6.806.682.000,00	1.000.000.000,00	6.500.171.000,00	136,65
	DAK Bidang Jalan	31.481.646.300,00	53.583.268.997,00	-	16.053.988.786,00	13.843.564.054,00	(2,74)
	DAK Bidang Irigasi	29.867.876.770,00	-	19.846.492.000,00	5.607.518.128,00	6.584.730.700,00	3,64
	DAK Bidang Pertanian	-	-	-	-	2.061.520.000,00	0,00
	DAK Bidang Kedaulatan Pangan	14.279.791.237,00	-	-	-	-	0,00
	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	4.666.472.311,00	-	-	-	1.480.992.000,00	0,00
	DAK Bidang Pasar	-	-	-	4.111.705.570,00	-	0,00
	DAK Bidang Transportasi	691.272.000,00	-	-	-	-	0,00
	DAK Bidang Perdagangan	4.568.752.000,00	-	-	-	-	0,00
	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.248.109.000,00	-	1.033.055.350,00	814.045.800,00	-	(5,30)
	DAK Tambahan Usulan Daerah	-	68.940.166.701,00	-	-	-	0,00
	Tambahan DAK Fisik	58.819.360.000,00	64.254.391.914,00	-	-	-	2,31

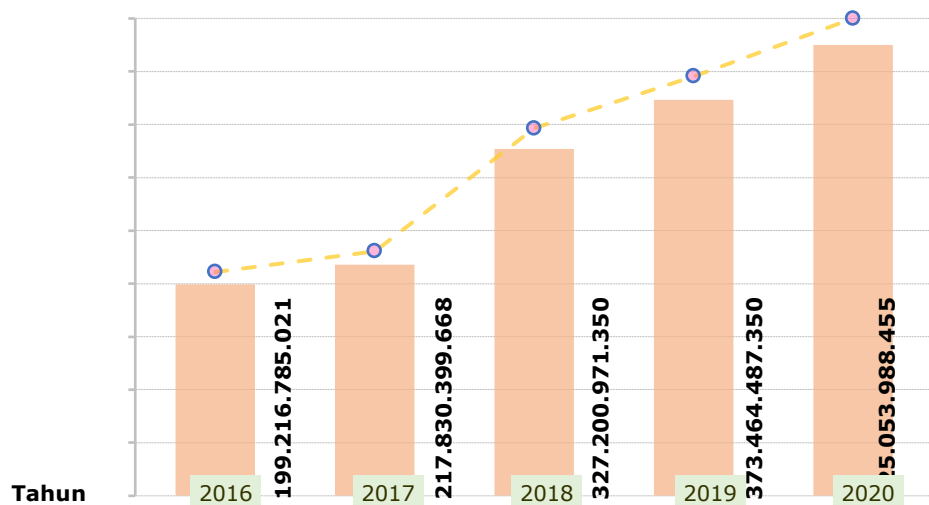
No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	DAK Non Fisik	161.281.588.862,00	164.375.787.611,00	182.997.482.198,00	188.329.062.183,00	195.807.341.527,00	5,03
	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	6.264.000.000,00	4.916.400.000,00	7.307.400.000,00	6.850.500.000,00	7.481.100.000,00	7,52
	DAK Non Fisik Bantuan Tunjangan Profesi Guru	145.459.552.862,00	135.653.209.374,00	145.941.200.000,00	144.000.622.900,00	140.326.530.000,00	(0,76)
	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	-	2.218.500.000,00	604.800.000,00	-	226.450.000,00	(18,18)
	DAK Non Fisik Pendidikan Kesetaraan	-	-	-	2.170.300.000,00	2.309.550.000,00	1,60
	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesehatan	6.939.151.381,00	18.945.965.737,00	22.931.737.112,00	27.749.843.715,00	29.221.830.000,00	55,10
	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan KB	843.600.000,00	994.010.500,00	4.461.499.300,00	4.620.074.700,00	5.009.354.500,00	94,66
	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	1.647.702.000,00	1.750.845.786,00	1.965.984.868,00	2.480.613.936,00	6,73
	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Akreditasi RSUD	272.648.731,00	-	-	-	-	0,00
	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas	349.498.113,00	-	-	-	-	0,00
	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Jampersal	1.153.137.775,00	-	-	-	-	0,00
	Pelayanan Kepariwisata	-	-	-	521.736.000,00	344.050.000,00	(8,51)
	BOP Museum	-	-	-	450.000.000,00	600.000.000,00	8,33
	BOK Tambahan	-	-	-	-	7.807.863.091,00	0,00

Berdasarkan tabel Realisasi Komponen Dana Alokasi Khusus Kabupaten Gowa selama Tahun Anggaran 2016-2020 diatas, kontribusi terbesar untuk DAK Fisik Reguler diperoleh pada DAK Bidang Kesehatan, dengan rata-rata kontribusi sebesar 47,12% per tahun, sedangkan Laju Pertumbuhan tertinggi diperoleh DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 73,00% pertahun. kontribusi terbesar untuk DAK Fisik Penugasan diperoleh pada DAK Bidang Jalan, dengan rata-rata kontribusi sebesar 26,17% per tahun, sedangkan Laju Pertumbuhan tertinggi diperoleh DAK Bidang Sanitasi, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 136,65% pertahun. kontribusi terbesar untuk DAK Non Fisik diperoleh pada DAK Non Fisik Bantuan Tunjangan Profesi Guru dengan rata-rata kontribusi sebesar 80,12% per tahun, sedangkan Laju Pertumbuhan tertinggi diperoleh DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan KB, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 94,66% pertahun.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana penyesuaian dan otonomi khusus, Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya, dan Pendapatan Lainnya.

Grafik 3. 33
Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kab. Gowa Tahun 2016-2020



Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Gambar diatas terlihat bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama periode 2016-2020 dengan trend cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 21,88 persen per tahun. Tahun 2016 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Gowa masih sekitar Rp 199 Milyar lebih, mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 9,34% menjadi Rp 217 Milyar lebih. Di tahun 2018

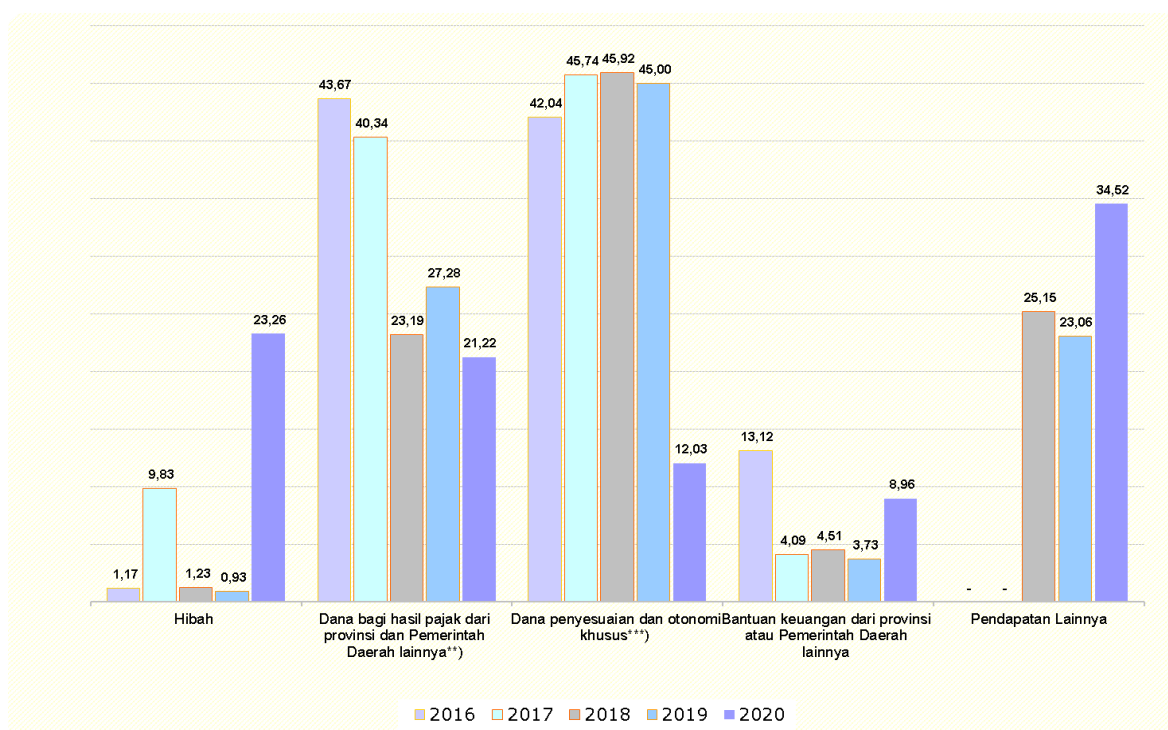
menurun sebesar 50,21% menjadi Rp 327 Milyar, dan terus menurun di tahun 2019 sebesar 14,14% menjadi Rp 373 Milyar lebih dan di tahun 2020 meningkat sebesar 13,81% menjadi Rp 425 Milyar.

Tabel 3. 13
Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020

Uraian	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	Rata-rata Proporsi (%)
Hibah	1,17	9,83	1,23	0,93	23,26	7,29
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya**)	43,67	40,34	23,19	27,28	21,22	31,14
Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	42,04	45,74	45,92	45	12,03	38,15
Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	13,12	4,09	4,51	3,73	8,96	6,88
Pendapatan Lainnya	-	-	25,15	23,06	34,52	16,55

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

Grafik 3. 34
Rata-rata Proporsi Realisasi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020



Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel dan Gambar Proporsi Realisasi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 masih didominasi oleh kontribusi dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus rata-rata sebesar 38,15 persen per tahun, diikuti

dengan Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya rata-rata sebesar 31,14 persen per tahun, Pendapatan Lainnya rata-rata sebesar 16,55 persen per tahun. Pendapatan Hibah rata-rata sebesar 7,29 persen per tahun, dan Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya rata-rata sebesar 6,88 persen per tahun.

3.1.1.2. Kinerja Belanja Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pengukuran kinerja APBD selain dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Komponen Belanja yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Secara umum dari tahun 2016 sampai tahun 2020, jumlah anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Gowa terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Berikut disajikan data Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2020 yaitu:

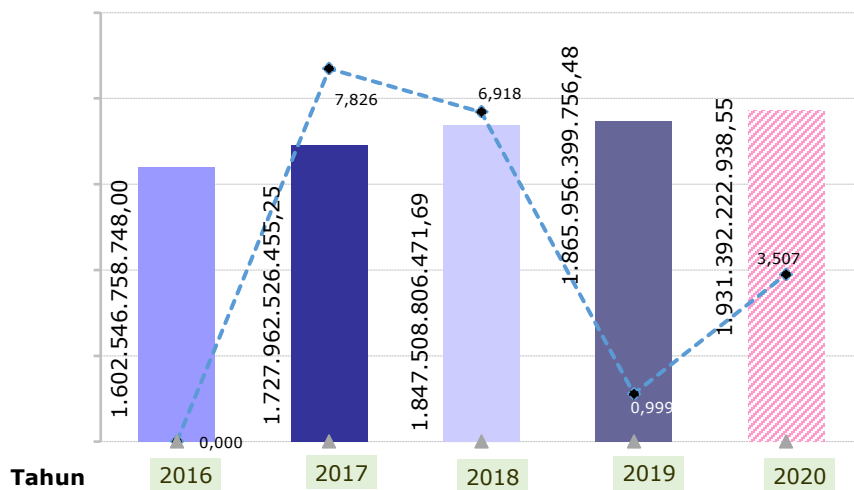
Tabel 3.14
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2020 Kabupaten Gowa

No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2	BELANJA	1.602.546.758.748,00	1.727.962.526.455,25	1.827.641.077.090,69	1.865.956.399.756,48	1.931.392.222.938,55	4,8
2,1	Belanja Tidak Langsung	937.341.157.218,00	854.553.516.478,00	927.727.665.691,41	978.336.280.228,57	1.100.111.411.925,89	4,41
2.1.1	Belanja Pegawai	754.891.301.986,00	656.658.328.352,00	703.167.264.409,41	721.227.943.794,00	716.976.502.117,00	-0,99
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0
2.1.3	Belanja Hibah	9.981.178.000,00	8.928.751.334,00	10.909.182.587,00	12.354.922.000,00	97.217.987.620,00	177,94
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.419.000.000,00	482.500.000,00	76.572.200,00	2.625.000.000,00	19.824.610.100,00	954,79
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	1.675.443.700,00	1.675.443.700,00	1.675.443.700,00	1.070.606.769,00	1.068.106.071,00	-9,08
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	168.374.233.532,00	186.808.493.092,00	211.899.202.795,00	240.557.807.665,57	229.566.158.017,89	8,33
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	500.000.000,00	35.458.048.000,00	1.747,90
2,2	Belanja Langsung	665.205.601.530,00	873.409.009.977,25	899.913.411.399,28	887.620.119.527,91	831.280.811.012,66	6,66
2.2.1	Belanja Pegawai	38.274.997.306,00	41.552.451.426,00	33.505.309.500,00	32.959.499.459,00	53.373.038.881,00	12,38
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	284.454.757.410,00	353.962.254.334,00	412.730.052.406,28	426.139.538.479,94	407.456.317.961,00	9,98
2.2.3	Belanja Modal	342.475.846.814,00	477.894.304.217,25	453.678.049.493,00	428.521.081.588,97	370.451.454.170,66	3,84

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

Jumlah nominal belanja daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2016 mencapai sebesar Rp 1,602 trilyun yang kemudian berkembang menjadi sebesar Rp 1,931 trilyun pada tahun 2020, selama periode tersebut belanja daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,80% pertahun. Jika dilihat dari distribusi pertumbuhan belanja daerah terlihat adanya peningkatan alokasi yang cukup signifikan pada kedua pos belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 4,41%, sedangkan belanja langsung mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,66% per tahun.

Grafik 3. 35
Kinerja Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Gowa
Tahun 2016 – 2020



Sumber : Data Diolah

Pada tabel berikut disajikan Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Tahun 2016-2020, sebagai berikut:

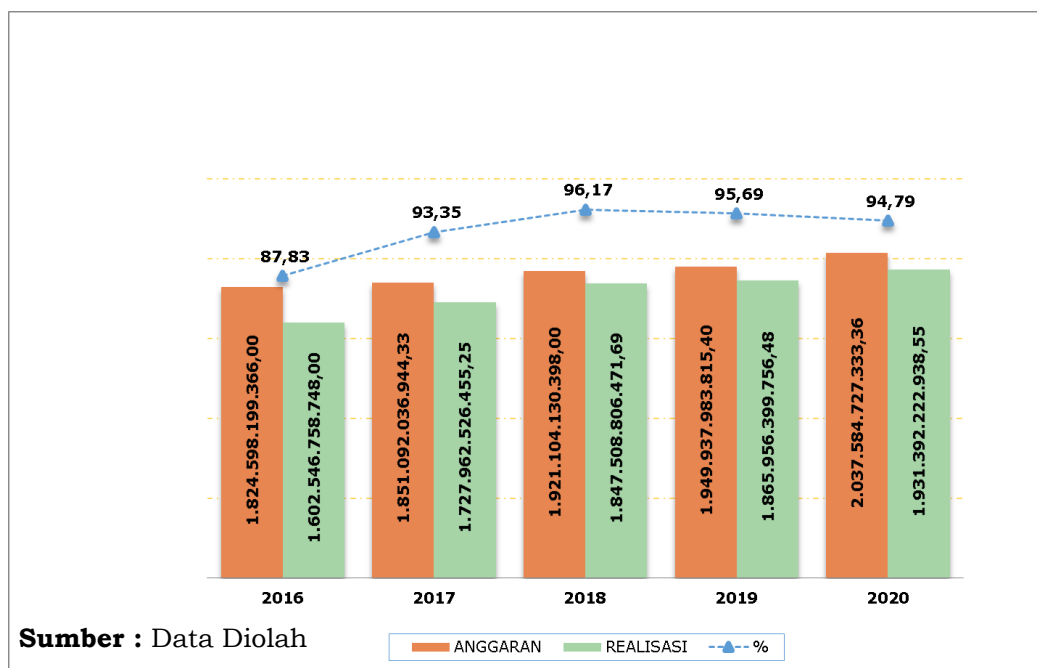
Tabel 3.15
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi 2016	(%)	Realisasi 2017	(%)	Realisasi 2018	(%)	Realisasi 2019	(%)	Realisasi 2020	(%)
A	Belanja Tidak Langsung	937.341.157.218	87,98	854.553.516.478	93,96	927.727.665.691,41	95,49	978.336.280.228,57	96,37	1.100.111.411.925,89	94,56
1	Belanja Pegawai	754.891.301.986	85,91	656.658.328.352	92,58	703.167.264.409,41	94,35	721.227.943.794,00	95,41	716.976.502.117,00	92,24
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	9.981.178.000	80,45	8.928.751.334	97,94	10.909.182.587,00	95,62	12.354.922.000,00	91,69	97.217.987.620,00	98,83
5	Belanja Bantuan Sosial	2.419.000.000	86,1	482.500.000	73,94	76.572.200,00	17,7	2.625.000.000,00	85,85	19.824.610.100,00	97,34
6	Belanja Bagi Hasil	1.675.443.700	100	1.675.443.700	100	1.675.443.700,00	100	1.070.606.769,00	63,9	1.068.106.071,00	63,75
7	Belanja Bantuan Keuangan	168.374.233.532	99,43	186.808.493.092	99,25	211.899.202.795,00	99,83	240.557.807.665,57	100	229.566.158.017,89	100
8	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-	500.000.000,00	100	35.458.048.000,00	98,14
B	Belanja Langsung	665.205.601.530	87,62	873.409.009.977	92,75	919.781.140.780,28	96,86	887.620.119.527,91	94,96	831.280.811.012,66	95,09
1	Belanja Pegawai	38.274.997.306	87,94	41.552.451.426	95,7	53.373.038.881,00	95,72	32.959.499.459,00	96,21	53.373.038.881,00	98,83
2	Belanja Barang dan Jasa	284.454.757.410	94,86	353.962.254.334	97,71	412.730.052.406,28	94,37	426.139.538.479,94	95,67	407.456.317.961,00	94,64
3	Belanja Modal	342.475.846.814	82,36	477.894.304.217	89,17	453.678.049.493,00	95,08	428.521.081.588,97	94,17	370.451.454.170,66	95,07
	BELANJA	1.602.546.758.748	87,83	1.727.962.526.455	93,35	1.847.508.806.471,69	96,17	1.865.956.399.756,48	95,69	1.931.392.222.938,55	94,79

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat perbandingan pertumbuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung mengindikasikan semakin besarnya belanja untuk kegiatan-kegiatan yang lebih berorientasi kepada kepentingan publik. Proporsi belanja untuk pelaksanaan kegiatan juga terlihat semakin baik, hal ini ditunjukkan dengan semakin besarnya jumlah belanja kegiatan yang dialokasikan pada jenis belanja barang dan belanja modal. Selama periode tahun 2016-2020 terlihat pos belanja pegawai pada belanja langsung mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan pertumbuhan sebesar 12,38% per tahun, kemudian belanja barang dan jasa mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,98% per tahun dan belanja modal mengalami pertumbuhan pertumbuhan sebesar 3,84% per tahun. Kontribusi realisasi terbesar digunakan untuk Belanja Modal.

Grafik 3. 36
Proporsi Realisasi Belanja Daerah

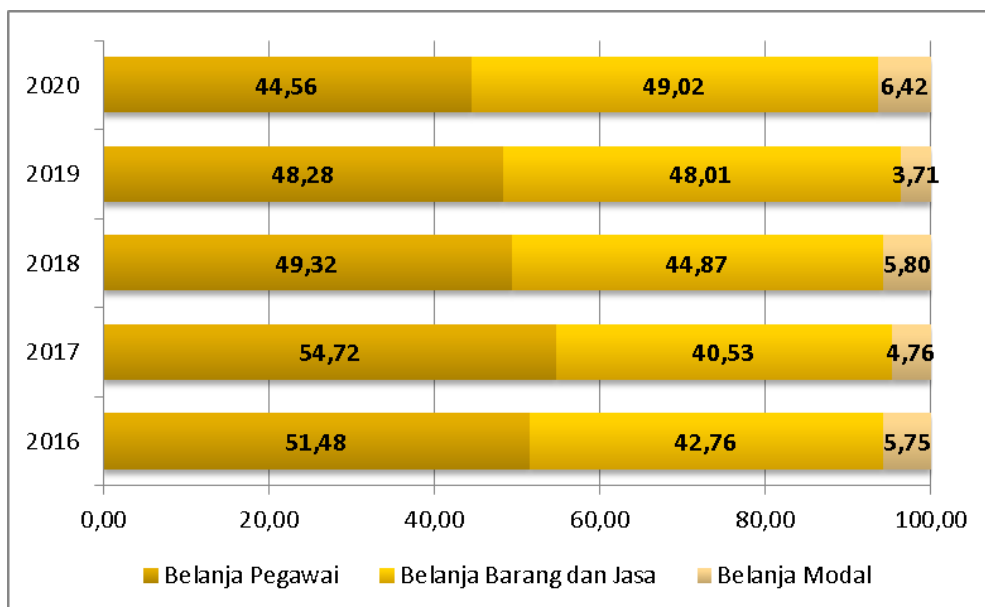


Berdasarkan Gambar 3.8 diatas, pada tahun 2016 realisasi belanja daerah sebesar Rp 1.602.546.758.748,00 dari target sebesar Rp 1.824.598.199.366,00 atau sebesar 87,83%. Tahun 2017 realisasi belanja sebesar Rp 1.727.962.526.455,25 dari target Rp 1.851.092.036.944,33 atau sebesar 93,35%, tahun

2018 realisasi belanja sebesar Rp 1.847.508.806.471,69 dari target sebesar Rp 1.921.104.130.398 atau sebesar 96,17 %, tahun 2019 realisasi belanja sebesar Rp 1.865.956.399.756,48 dari target sebesar Rp 1.949.937.983.815,40 atau sebesar 95,69 %, dan tahun 2020 realisasi belanja sebesar Rp 1.931.392.222.938,55 dari target sebesar Rp 2.037.584.727.333,36 atau sebesar 94,79%.

Hal ini menunjukkan realisasi belanja telah sesuai rencana yang ditetapkan disebabkan penyerapan anggaran hampir mencapai 100%.

Grafik 3. 37
Proporsi Realisasi Komponen Belanja Langsung
Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020



Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Gambar 3.9 diatas, dapat kita lihat bahwa Proporsi komponen Belanja Langsung pada tahun 2016 untuk belanja pegawai hanya sebesar 5,75%, belanja barang dan jasa sebesar 42,76% dan belanja modal sebesar 51,48%. Pada tahun 2017 untuk belanja pegawai hanya sebesar 4,76%, belanja barang dan jasa sebesar 40,53% dan belanja modal sebesar 54,72%. Pada tahun 2018 untuk belanja pegawai hanya sebesar 5,80%, belanja barang dan jasa sebesar 44,87% dan belanja modal sebesar 49,32%. Pada tahun 2019 untuk belanja pegawai hanya sebesar 3,71%, belanja barang dan jasa sebesar 48,01% dan belanja modal sebesar 48,28%. Pada tahun 2020 untuk belanja pegawai

hanya sebesar 6,42%, belanja barang dan jasa sebesar 49,02% dan belanja modal sebesar 44,56%. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa alokasi belanja langsung lebih menitikberatkan pada pemenuhan belanja modal yang meliputi penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan publik.

3.1.1.3. Kinerja Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Tabel 3.16
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
3	Pembiayaan	118.367.104.048,73	83.887.529.496,33	137.595.851.136,23	87.888.000.883,91	147.592.406.818,84	16,68
3.1	Penerimaan Pembiayaan	122.305.081.922,73	128.115.905.519,33	191.281.349.136,23	141.368.000.883,91	188.112.015.464,84	15,26
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	3.937.977.874,00	44.228.376.023,00	53.685.498.000,00	53.480.000.000,00	40.519.608.646,00	254,97
Surplus/(Defisit)		9.700.224.610,60	62.300.973.274,90	(46.244.606.090,32)	4.652.508.684,16	1.555.712.387,19	47,85
SILPA		128.067.328.659,33	146.188.502.771,23	91.351.245.045,91	92.540.509.568,07	149.148.119.206,03	9,78

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

Penerimaan pembiayaan meliputi SILPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman, sedangkan pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman. Analisis pembiayaan daerah dimaksudkan untuk menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah.

Berdasarkan table diatas, Pembiayaan Daerah Kabupaten Gowa dari tahun 2016 sampai tahun 2020 berfluktuatif setiap tahunnya, dimana SILPA memberikan kontribusi terbesar terhadap Penerimaan Pembiayaan Daerah. Pada sisi lain, Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang semula sebesar Rp 3.937.977.874,00 di tahun 2016 meningkat menjadi 40.519.608.646,00 di tahun 2020 yang sebagian diperuntukkan untuk Pembentukan Dana Cadangan. Rata-rata pertumbuhan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Gowa 2016-2020 sebesar 16,68 %.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan suatu gambaran terkait harta yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundangundangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca daerah merupakan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang Aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), Kewajiban (jangka pendek dan jangka panjang) dan Ekuitas suatu pemerintah daerah.

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter.

Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya membutuhkan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Ekuitas adalah nilai kekayaan bersih yang dimiliki oleh Pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Gambaran umum perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Gowa pada periode tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Gowa

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
							(%)
1	ASET	3.072.581.244.029,10	3.429.713.438.399,34	3.759.988.175.398,66	3.903.055.429.662,76	4.123.906.070.662,97	7,68
11	ASET LANCAR	186.483.298.973,25	203.557.330.223,96	167.086.460.589,69	159.598.438.672,46	183.948.087.512,02	0,5
111	Kas	129.781.021.550,33	146.915.919.661,23	92.595.402.577,91	93.241.910.318,07	149.179.927.240,03	9,23
112	Piutang	44.961.298.808,78	42.545.288.557,94	55.453.820.729,83	49.998.019.966,43	20.603.414.558,14	-10,92
113	Beban Dibayar Dimuka	592.377.806,28	853.928.507,18	659.708.884,86	599.901.858,00	456.030.175,33	-2,91
114	Persediaan	11.148.600.807,86	13.242.193.497,61	18.377.528.397,09	15.758.606.529,96	13.708.715.538,52	7,58
12	INVESTASI JANGKA PANJANG	57.789.721.250,13	81.433.593.174,00	85.304.836.584,00	84.036.922.517,00	88.258.892.368,00	12,3
121	Investasi Jangka Panjang Permanen	2.644.925.021,00	2.644.925.021,00	2.644.925.021,00	2.644.925.021,00	2.644.925.021,00	0
1211	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	55.144.796.229,13	78.788.668.153,00	82.659.911.563,00	81.391.997.496,00	85.613.967.347,00	12,86
1222	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	0
13	ASET TETAP	2.783.698.823.082,73	2.991.175.919.367,31	3.402.643.862.143,42	3.554.184.434.973,71	3.819.882.990.032,14	8,28
131	Tanah	598.685.806.251,14	627.026.387.227,14	641.874.134.728,14	645.204.268.136,51	648.078.083.950,51	2,02
132	Peralatan dan Mesin	278.962.713.547,86	311.217.577.344,46	362.866.740.046,01	421.603.042.975,55	465.989.380.800,78	13,72
133	Gedung dan Bangunan	798.404.952.512,37	791.038.111.551,84	844.061.930.110,66	911.989.948.007,94	1.150.238.699.634,75	9,99
134	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.269.260.389.930,52	2.566.179.714.210,02	2.959.088.874.648,53	3.160.527.656.289,78	3.304.011.400.816,62	9,94
135	Aset Tetap Lainnya	58.129.581.150,00	67.924.896.295,14	86.481.266.512,14	104.391.513.458,14	117.403.981.416,14	19,34

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
136	Konstruksi Dalam Pengerjaan	22.611.936.844,78	22.239.275.890,98	98.723.750.524,10	149.362.137.820,45	10.970.872.155,85	75,23
137	Akumulasi Penyusutan	-1.242.356.557.153,94	-1.394.450.043.152,27	-1.590.452.834.426,16	-1.838.894.131.714,66	-1.876.809.428.742,51	11
14	DANA CADANGAN	13.418.794.040,93	52.241.598.043,38	60.610.718.772,96	64.731.758.691,51	854.764.538,18	53,36
141	Dana Cadangan	13.418.794.040,93	52.241.598.043,38	60.610.718.772,96	64.731.758.691,51	854.764.538,18	53,36
15	ASET LAINNYA	31.190.606.682,06	101.304.997.590,69	44.342.297.308,59	40.503.874.808,08	30.961.336.212,63	34,09
151	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	-	-	-	27.720.000,00	12.320.000,00	-55,56
152	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	-	-	-	-	0
153	Aset Tidak Berwujud	24.347.283.320,23	23.572.836.246,14	17.850.183.260,92	12.783.099.934,68	12.698.839.494,61	-14,13
154	Aset Lain-lain	6.843.323.361,83	77.732.161.344,55	26.492.114.047,67	27.693.054.873,40	18.250.176.718,02	235,1
	JUMLAH ASET DAERAH	3.072.581.244.029,10	3.429.713.438.399,34	3.759.988.175.398,66	3.903.055.429.662,76	4.123.906.070.662,97	7,68
2	KEWAJIBAN	78.125.756.631,29	3.792.217.070,33	168.862.074.631,22	134.730.291.589,08	27.332.115.691,32	1039,45
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	78.125.756.631,29	3.792.217.070,33	168.862.074.631,22	134.730.291.589,08	27.332.115.691,32	1039,45
211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	38.175.614,00	727.416.890,00	1.244.157.532,00	701.400.750,00	31.808.034,00	434,35
212	Utang Bunga	392.079.625,00	-	-	-	-	100
213	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	0
214	Pendapatan Diterima Dimuka	478.437.611,67	856.344.129,33	571.178.330,42	653.634.484,00	784.222.666,00	20,03
215	Utang Beban	4.126.535.540,00	889.308.336,00	17.563.290.943,00	27.746.892.575,00	23.089.830.187,00	459,42
216	Utang Jangka Pendek Lainnya	73.090.526.224,62	1.319.145.698,00	149.483.445.807,80	105.628.361.761,08	3.426.254.804,32	2751,89
217	Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	0

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	0
221	Utang Dalam Negeri		-	-	-	-	0
222	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-	-	-	0
3	EKUITAS	2.994.455.489.413,80	3.425.921.223.346,01	3.591.126.102.785,44	3.768.325.140.092,68	4.096.573.954.971,65	8,22
31	Ekuitas	2.994.455.489.413,80	3.425.921.223.346,01	3.591.126.102.785,44	3.768.325.140.092,68	4.096.573.954.971,65	8,22
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.072.581.246.045,09	3.429.713.440.416,34	3.759.988.177.416,66	3.903.055.431.681,76	4.123.906.070.662,97	7,68

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah selama kurun waktu tahun 2016-2020 untuk komponen Aset Daerah cenderung meningkat setiap tahun. Aset daerah sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp 4.123.906.070.662,97 dibanding dengan tahun 2016 yang masih sebesar Rp 3.072.581.244.029,10 sehingga terjadi peningkatan jumlah aset daerah sebesar Rp.1.051.324.826.633,87 atau 34,22%. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Gowa dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Fluktuasi nilai kewajiban dengan pihak ketiga dapat dilihat sebagai hal yang wajar selama manajemen pengelolaan keuangan daerah semakin profesional dan digunakan secara tepat untuk program yang relevan. Hal ini dapat dilihat dari kewajiban daerah di tahun 2016 sebesar Rp Rp.78.125.756.631,29 dan di tahun 2020 berhasil turun sebesar Rp Rp.27.332.115.691,32 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek.

Nilai Ekuitas Pemerintah Kabupaten Gowa terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ekuitas daerah di tahun 2016 sebesar Rp.2.994.455.489.413,80 dan meningkat sampai pada tahun 2020 sebesar Rp.4.096.573.954.971,65 sehingga terjadi peningkatan jumlah ekuitas daerah sebesar Rp.1.102.118.465.557,85 atau 36,81%. Berikut disajikan pembahasan lebih lanjut mengenai komponen Neraca Daerah.

3.1.2.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya. Total Aset di tahun 2016 sebesar 3.072.581.244.029,10, di tahun 2017 meningkat menjadi Rp.3.429.713.438.399,34, tahun 2018 meningkat lagi sebesar Rp.3.759.988.175.398,66, tahun 2019 meningkat sebesar Rp.3.903.055.429.662,76, dan di tahun 2020 meningkat sebesar Rp.4.123.906.070.662,97, Rata-rata pertumbuhan Aset Daerah dalam kurun waktu tahun 2016-2020

sebesar 7,68%. Berikut disajikan komponen Aset Daerah yang terdiri dari:

a. Aset Lancar

Berdasarkan tabel 3.17 menunjukkan bahwa Aset Lancar cenderung berfluktuasi selama tahun 2016-2020. Aset Lancar di tahun 2016 sebesar Rp 186.483.298.973,25 di tahun 2017 meningkat sebesar Rp 203.557.330.223,96 dan di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 167.086.460.589,69 tahun 2019 kembali menurun sebesar Rp 159.598.438.672,46 dan di tahun 2020 meningkat sebesar Rp 183.948.087.512,02. dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,50 %.

Aset lancar terbagi lagi menjadi beberapa komponen yaitu kas, piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan. Investasi Jangka Panjang meliputi Investasi Jangka Panjang Permanen dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Komponen Aset Lancar untuk Kas di tahun 2016 hingga tahun 2020 berfluktuasi dengan tingkat rata-rata pertumbuhan sebesar 9,23%. Posisi Kas pada tahun 2020 sebesar Rp 149.179.927.240,03 terdiri dari Kas di kas daerah sebesar Rp 146.784.677.575,03, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 731.037.156,00, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp 35.321.750,00, dan Kas Lainnya sebesar Rp1.628.890.759,00 terdiri dari saldo kas Dana BOS sebesar Rp 442.238.958,00 dan kas di bendahara JKN Puskesmas sebesar Rp1.186.651.801,00.

Komponen Aset Lancar untuk Piutang di tahun 2016 sebesar Rp.44.961.298.808,78, di tahun 2017 sebesar Rp.42.545.288.557,94, tahun 2018 meningkat sebesar Rp.55.453.820.729,83 dan di tahun 2019 menurun sebesar Rp.49.998.019.966,43, dan pada tahun 2020 terus menurun sebesar Rp.20.603.414.558,14.

Piutang Daerah di tahun 2020 sebesar Rp. 20.603.414.558,14. terdiri atas Piutang Pajak sebesar Rp.14.164.768.468,96, Piutang Retribusi sebesar Rp.2.823.035.960,00, Piutang Lainnya sebesar Rp 3.757.067.927,18 yang terdiri dari piutang dana bagi hasil provinsi, piutang dana avalis, piutang dana bergulir, piutang denda PBB-P2, dan piutang TPTGR.

Komponen Aset Lancar untuk Beban Dibayar Dimuka di tahun 2020 sebesar Rp.456.030.175,33. Belanja dibayar dimuka timbul karena terdapat pembayaran jasa/sewa/kontrak yang telah terbayarkan namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 masa

kontrak belum habis. Perhitungan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor 322/V/2016 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pengukuran dan Penilaian Pendapatan Diterima Dimuka dan Belanja Dibayar Dimuka pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa yang menjelaskan bahwa beban dibayar dimuka yang dibayarkan secara tunai yang dilakukan pada tanggal 1 s.d. 15 per bulan dihitung dan dicatat sebagai beban satu bulan dan diatas tanggal 16 sampai dengan 31 dihitung dan dicatat sebagai beban pada bulan berikutnya.

Komponen Aset Lancar untuk Persediaan barang pakai habis/material adalah barang yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi, persediaan barang pakai habis/material terdiri atas Obat-obatan, Alat Tulis Kantor (ATK), Barang Cetak, Alat Listrik, Lain-lain, dan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai dan diukur berdasarkan hasil inventarisasi fisik barang yang belum terpakai yang dicantumkan ke dalam neraca daerah.

Persediaan barang pakai habis/material dan benda berharga sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp13.708.715.538,52. Jika dibandingkan dengan Persediaan Tahun 2019 sebesar Rp15.758.606.529,96 maka Persediaan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 2.049.890.991,44 atau 13,01%, hal ini disebabkan bertambahnya sisa barang pakai habis pada SKPD Pemerintah Kabupaten Gowa.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gowa dan investasi permanen lainnya.

Berdasarkan tabel 3.8 menunjukkan bahwa Investasi jangka panjang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat kita lihat di tahun 2016 Investasi Jangka Panjang sebesar Rp.57.789.721.250,13 di tahun 2017 sebesar Rp.81.433.593.174,00 tahun 2018 sebesar Rp. 85.304.836.584,00, tahun 2019 menurun menjadi sebesar Rp 84.036.922.517,00, dan di

tahun 2020 meningkat sebesar Rp 88.258.892.368,00. Komponen Investasi Jangka Panjang dalam bentuk Pinjaman Modal dari tahun 2016 hingga tahun 2020 sebesar Rp 2.644.925.021,00 merupakan dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa dalam bentuk pinjaman modal kepada Perusahaan Holding Company (Taksi Gowata) berdasarkan Perjanjian Nomor 77/PK/KIB/2001 tanggal 31 Desember 2001 dengan jangka waktu lima tahun. Pada tahun 2002, dilakukan perubahan kredit berdasarkan Akta Notaris Nomor 99.

Komponen Investasi Jangka Panjang dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah meliputi: 1) Penyertaan Modal pada PT. Bank Sulselbar di tahun 2020 sebesar Rp 20.142.000.000,00, Hal ini berdasarkan surat dari Bank Sulselbar nomor: SR/369/B/GPK/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 disampaikan bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 02 tanggal 2 Desember 2020 oleh Notaris Mustahar, SH., Mkn, menyampaikan hasil Kapitalisasi Cadangan ke Modal Saham sebesar Rp 8.088.000.000,00. Saham yang dimiliki Pemerintah daerah Kabupaten Gowa sebanyak 20.142 lembar dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 per lembar saham sehingga persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Gowa adalah sebesar 0,96%. 2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gowa pada PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTDC) sebesar Rp3.300.000.000,00 dalam bentuk saham sebanyak 6.600.000 lembar dengan nilai nominal saham per lembar senilai Rp500,00. 3) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gowa pada PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa tahun 2020 sebesar Rp 62.171.967.347,00. Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Gowa pada PDAM Kabupaten Gowa adalah 100,00% sehingga penyajiannya menggunakan metode ekuitas. Salah satu konsekuensi penerapan metode ekuitas adalah nilai investasinya berpedoman dari laba/rugi perusahaan/BUMD.

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Gowa meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 aset tetap sebesar Rp.2.783.698.823.082,73, tahun 2017 meningkat sebesar

Rp.2.991.175.919.367,31, tahun 2018 meningkat lagi sebesar Rp 3.402.643.862.143,42, tahun 2019 kembali meningkat sebesar Rp.3.554.184.434.973,71, dan tahun 2020 sebesar Rp.3.819.882.990.032,14.

Komponen Aset Tetap untuk Tanah di tahun 2020 milik Pemerintah Kabupaten Gowa sebesar Rp.648.078.083.950,51 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.873.815.814,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan Tanah dipengaruhi oleh belanja modal tahun 2020 dan hasil inventarisasi ulang yang dilakukan oleh Bidang Aset BPKD Kabupaten Gowa.

Komponen Aset Tetap untuk Peralatan dan mesin milik Pemerintah Kabupaten Gowa tahun 2016 sebesar Rp.278.962.713.547,86,- meningkat di tahun 2017 sebesar Rp.311.217.577.344,46, meningkat lagi sebesar tahun 2018 sebesar Rp.362.866.740.046,01,- tahun 2019 sebesar Rp.421.603.042.975,55, dan tahun 2020 terus meningkat sebesar Rp.465.989.380.800,78.

Komponen Aset Tetap untuk Gedung dan Bangunan di tahun 2016 sebesar Rp.798.404.952.512,37, kemudian di tahun 2017 sebesar Rp.791.038.111.551,84, di tahun 2018 meningkat sebesar Rp.844.061.930.110,66, tahun 2019 meningkat sebesar Rp.911.989.948.007,94, dan tahun 2020 meningkat sebesar Rp.1.150.238.699.634,75.

Komponen Aset Tetap untuk jalan, irigasi dan jaringan tahun 2016 sebesar Rp.2.269.260.389.930,52, di tahun 2017 meningkat sebesar Rp.2.566.179.714.210,02, tahun 2018 meningkat sebesar Rp.2.959.088.874.648,53, pada tahun 2019 meningkat lagi sebesar Rp.3.160.527.656.289,78, dan di tahun 2020 sebesar Rp.3.304.011.400.816,62 yang disajikan tersebut tidak termasuk jalan di atas tanah sesuai dengan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Komponen Aset Tetap Lainnya di tahun 2016 sebesar Rp.58.129.581.150,00, di tahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp.67.924.896.295,14, dan di tahun 2018 meningkat sebesar Rp.86.481.266.512,14, di tahun 2019 meningkat menjadi sebesar Rp.104.391.513.458,14, di tahun 2020 meningkat sebesar Rp.117.403.981.416,14. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan.

Komponen Aset Tetap untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berfluktuasi nilainya, di tahun 2016 sebesar Rp.22.611.936.844,78, tahun 2017 menurun sebesar Rp.22.239.275.890,98, di tahun 2018 meningkat sebesar Rp.98.723.750.524,10, di tahun 2019 meningkat sebesar Rp.149.362.137.820,45, di tahun 2020 turun sebesar Rp.10.970.872.155,85 dimana kategori Konstruksi dalam Pengerjaan yaitu aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Komponen Aset Tetap untuk Akumulasi Penyusutan Aset Tetap di tahun 2016 sebesar Rp.(1.242.356.557.153,94), di tahun 2017 meningkat sebesar Rp.(1.394.450.043.152,27), tahun 2018 meningkat sebesar Rp.(1.590.452.834.426,16), tahun 2019 meningkat sebesar Rp.(1.838.894.131.714,66), tahun 2020 meningkat sebesar Rp.(1.876.809.428.742,51). Pemerintah Kabupaten Gowa telah menetapkan kebijakan akuntansi untuk penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus dan untuk aset tetap yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan, penyusutan dilaksanakan berdasarkan tahunan.

d. Dana Cadangan

Saldo Dana Cadangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa di tahun 2016 sebesar Rp.13.418.794.040,93, di tahun 2017 meningkat sebesar Rp.52.241.598.043,38, tahun 2018 meningkat lagi sebesar Rp.60.610.718.772,96, di tahun 2019 meningkat menjadi Rp.64.731.758.691,51, tahun 2020 menurun sebesar Rp.854.764.538,18. yang merupakan sisa Dana Cadangan yang dicadangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan yang diperuntukkan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gowa. Pada tahun 2019 Dana Cadangan dibagi dalam bentuk giro dan deposito.

e. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan, yaitu tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, aset tak berwujud, aset lain-lain. Saldo Aset Lainnya di tahun 2016 sebesar Rp.31.190.606.682,06, tahun 2017 meningkat

sebesar Rp.101.304.997.590,69, di tahun 2018 menurun sebesar Rp.44.342.297.308,59, tahun 2019 menurun sebesar Rp 40.503.874.808,08, dan di tahun 2020 menurun sebesar Rp.30.961.336.212,63.

Komponen Aset Lainnya untuk Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tagihan Penjualan Angsuran di tahun 2020 sebesar Rp.24.640.000,00 dengan nilai penyisihan sebesar (Rp12.320.000,00) sehingga Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran netto adalah sebesar Rp.12.320.000,00. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran ini merupakan Piutang Penjualan Kendaraan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp.24.640.000,00.

Komponen Aset Lainnya untuk Aset Tak Berwujud di tahun 2016 sebesar Rp.24.347.283.320,23, di tahun 2017 turun sebesar Rp.23.572.836.246,14, tahun 2018 turun sebesar Rp.17.850.183.260,92, dan di tahun 2019 turun sebesar Rp.12.783.099.934,68, dan di tahun 2020 turun sebesar Rp.12.698.839.494,61. Aset Tak Berwujud berupa perangkat lunak (software) atau aplikasi yang ada pada SKPD terkait, untuk menunjang kelancaran dalam mengoptimalkan dan mempermudah kerja untuk menghindari trouble error. Pemerintah Kabupaten Gowa telah menetapkan kebijakan akuntansi untuk Amortisasi Aset Tak Berwujud dengan metode garis lurus untuk masa manfaat selama 8 tahun dan dilaksanakan berdasarkan tahunan

Komponen Aset Lainnya untuk Aset Lain-lain di tahun 2016 sebesar Rp.6.843.323.361,83, tahun 2017 meningkat sebesar Rp.77.732.161.344,55, tahun 2018 menurun sebesar Rp.26.492.114.047,67, di tahun 2019 meningkat sebesar Rp.27.693.054.873,40, dan di tahun 2020 menurun sebesar Rp.18.250.176.718,02 yang merupakan mutasi dari aset tetap ke aset lain-lain.

3.1.2.2. Kewajiban

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Jumlah Kewajiban Pemerintah Kabupaten Gowa di tahun 2016 sebesar Rp 78.125.756.631,29, di tahun 2017 menurun sebesar Rp 3.792.217.070,33, dan di tahun 2018 meningkat sebesar Rp

168.862.074.631,22, di tahun 2019 menurun sebesar Rp 134.730.291.589,08, di tahun 2020 menurun sebesar Rp 27.332.115.691,32. Kewajiban ini seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek berupa Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pendapatan diterima dimuka, utang belanja/beban, utang pihak ketiga, utang jangka pendek lainnya.

Komponen Kewajiban untuk Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Utang PFK sebesar Rp.31.808.034 merupakan pemotongan/pemungutan PPN dan PPh pada Bendahara Pengeluaran SKPD yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum disetor ke kas negara. Besarnya Saldo PFK di tahun 2016 sebesar Rp.38.175.614,00 di tahun 2017 meningkat menjadi Rp.727.416.890,00 tahun 2018 meningkat sebesar Rp.1.244.157.532,00 dan di tahun 2019 turun menjadi sebesar Rp 701.400.750,00, sehingga di tahun 2020 tersisa sebesar Rp.31.808.034,00.

Komponen Kewajiban untuk Pendapatan Diterima Dimuka di tahun 2016 sebesar Rp.478.437.611,67, tahun 2017 meningkat sebesar Rp.856.344.129,33 di tahun 2018 menurun sebesar Rp.571.178.330,42 tahun 2019 sebesar Rp.653.634.484,00 dan di tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp 784.222.666,00. Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor 322/V/2017 tentang Mekanisme Pengukuran dan Penilaian Pendapatan Diterima Dimuka dan Beban Dibayar Dimuka pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa yang menjelaskan bahwa Pendapatan Diterima Dimuka yang diterima secara tunai pada tanggal 1 sampai dengan 15 per bulan dihitung dan dicatat sebagai pendapatan 1 (satu) bulan, dan di atas tanggal 15 sampai dengan 31 dihitung dan dicatat pada bulan berikutnya.

Komponen Kewajiban untuk Utang Belanja/Beban berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Utang kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban entitas pemerintah terhadap barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian. Saldo utang belanja/beban di tahun 2016 sebesar Rp.4.126.535.540,00, tahun 2017 berkurang menjadi sebesar Rp.889.308.336,00, di tahun 2018 meningkat sebesar Rp.17.563.290.943,00, meningkat lagi di tahun

2019 sebesar Rp.27.746.892.575,00, dan di tahun 2020 menurun sebesar Rp.23.089.830.187,00.

Utang jangka pendek lainnya di tahun 2016 sebesar Rp.73.090.526.224,62, menurun di tahun 2017 menjadi sebesar Rp.1.319.145.698,00, lalu meningkat di tahun 2018 menjadi sebesar Rp.149.483.445.807,80, di tahun 2019 menjadi sebesar Rp.105.628.361.761,08 dan di tahun 2020 menurun menjadi sebesar Rp.3.426.254.804,32, yang merupakan utang kepada pihak ketiga yaitu utang dari perhitungan pelaksanaan proyek yang fisiknya sudah mencapai 100%, namun realisasi keuangan belum mencapai 100%.

3.1.2.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo Ekuitas di tahun 2016 sebesar Rp.2.994.455.489.413,80, di tahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp.3.425.921.223.346,01, di tahun 2018 menjadi sebesar Rp.3.591.126.102.785,44, di tahun 2019 menjadi sebesar Rp.3.768.325.140.092,68, dan di tahun 2020 meningkat sebesar Rp.4.096.573.954.971,65.

3.1.2.4. Rasio Keuangan

Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dapat diketahui melalui perhitungan sebagai berikut:

a. Ratio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain :

- 1) Rasio lancar = aktiva lancar : kewajiban jangka pendek
- 2) Rasio quick = (aktiva lancar – persediaan) : kewajiban jangka pendek

Untuk ratio likuiditas neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18
Perkembangan Rasio Likuiditas Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 s/d 2020

No	Tahun	Rasio Lancar (Current Ratio)			Rasio Quick (Quick Ratio)			
		Aktiva Lancar	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio	Aktiva Lancar	Persediaan	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio Quick
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e = c/d</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i = (f-g)/h</i>
1	2016	186.483.298.973,25	78.125.754.615,29	2,39	186.483.298.973,25	11.148.600.807,86	78.125.754.615,29	2,24
2	2017	203.557.330.223,96	3.792.215.053,33	53,68	203.557.330.223,96	13.242.193.497,61	3.792.215.053,33	50,19
3	2018	167.086.460.589,69	168.862.072.613,22	0,99	167.086.460.589,69	18.377.528.397,09	168.862.072.613,22	0,88
4	2019	159.598.438.672,46	134.730.289.570,08	1,18	159.598.438.672,46	15.758.606.529,96	134.730.289.570,08	1,07
5	2020	183.948.087.512,02	27.332.115.691,32	6,73	183.948.087.512,02	13.708.715.538,52	27.332.115.691,32	6,23

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel di atas, Rasio Lancar (Current Ratio) Kabupaten Gowa pada tahun 2016 – 2020 menunjukkan angka diatas 1 (satu) yang berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo atau aset lancar mampu membayar kewajiban jangka pendek. Namun pada tahun 2018 Rasio Lancar (*Current Ratio*) Kabupaten Gowa menunjukkan angka dibawah 1 (satu) yaitu 0,99 yang berarti bahwa aset lancar tidak mampu membayar kewajiban jangka pendek. Begitupun pada Rasio Quick (*Quick Ratio*) pada tahun 2016-2020 menunjukkan angka diatas 1 (satu) yang berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo atau aset lancar mampu membayar kewajiban jangka pendek. Namun pada tahun 2018 Rasio Quick (*Quick Ratio*) Kabupaten Gowa menunjukkan angka dibawah 1 (satu) yaitu 0,88 yang berarti bahwa atau aset lancar tidak mampu membayar kewajiban jangka pendek.

b. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain:

- 1) **Rasio total hutang terhadap total aset** = **total hutang** : **total aset**
- 2) **Rasio hutang terhadap modal** = **total hutang** : **total ekuitas**

Untuk rasio solvabilitas neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 19
Perkembangan Rasio Solvabilitas Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 s/d 2020

No	Tahun	Rasio Hutang-Asset			Rasio Hutang-Modal		
		Total Hutang	Total Asset	Rasio Hutang terhadap Total Aset	Total Hutang	Total Ekuitas	Rasio Hutang terhadap Modal
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	$e = c/d$	<i>f</i>	<i>g</i>	$h = f/g$
1	2016	78.125.754.615,29	3.072.581.244.029,09	0,025	78.125.754.615,29	2.994.455.489.413,80	0,026
2	2017	3.792.215.053,33	3.429.713.438.399,34	0,001	3.792.215.053,33	3.425.921.223.346,01	0,001
3	2018	168.862.072.613,22	3.759.988.175.398,66	0,045	168.862.072.613,22	3.591.126.102.785,44	0,047
4	2019	134.730.289.570,08	3.903.055.429.662,76	0,035	134.730.289.570,08	3.768.325.140.092,68	0,036
5	2020	27.332.115.691,32	4.123.906.070.662,97	0,007	27.332.115.691,32	4.096.573.954.971,65	0,007

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel di atas, Rasio Utang terhadap asset Kabupaten Gowa pada tahun 2016-2020 menunjukkan angka di bawah 1 (satu) yang berarti bahwa hutang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Gowa dapat ditutupi oleh asset yang dimiliki, kemudian dilihat dari ratio utang terhadap modal berada dibawah 1 (satu) hal ini menunjukkan hutang Pemerintah Kabupaten Gowa dapat ditutupi dengan modal yang ada.

c. Ratio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah.

- 1) Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas), dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Rata-rata umur piutang} = 365 : \text{Perputaran piutang}$$

Dimana :

$$\text{Perputaran piutang} = \frac{\text{Pendapatan daerah} : \text{rata-rata piutang pendapatan daerah}}$$

$$\text{Rata-rata piutang pendapatan daerah} = \frac{\text{saldo awal piutang} + \text{saldo akhir piutang}}{2}$$

- 2) Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunkan persediaan untuk memberi pelayanan publik), dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Rata-rata umur persediaan} = 365 : \text{perputaran persediaan}$$

Dimana :

$$\text{Perputaran persediaan} = \frac{\text{nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun} : \text{rata-rata nilai persediaan}}$$

$$\text{Rata-rata piutang pendapatan daerah} = \frac{\text{saldo awal persediaan} + \text{saldo akhir persediaan}}{2}$$

Untuk Rasio aktivitas neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 20
Perkembangan Rasio Aktivitas Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 s/d 2020

No	Tahun	Rasio Aktivitas						
		Saldo Awal Piutang	Saldo Akhir Piutang	Total Piutang	Rata-rata Piutang Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	Perputaran Piutang	Rata-rata Umur Piutang
a	b	c	d	e = c+d	f = e/2	g	h = g/f	i = 365/h
1	2016	43.907.719.040,47	44.961.298.808,78	88.869.017.849,25	44.434.508.924,63	1.612.246.983.358,60	36,28	10,06
2	2017	44.961.298.808,78	42.545.288.557,94	87.506.587.366,72	43.753.293.683,36	1.790.263.499.730,15	40,92	8,92
3	2018	42.545.288.557,94	55.453.820.729,83	97.999.109.287,77	48.999.554.643,89	1.781.396.471.000,37	36,36	10,04
4	2019	55.453.820.729,83	49.998.019.966,43	105.451.840.696,26	52.725.920.348,13	1.870.608.908.440,64	35,48	10,29
5	2020	49.998.019.966,43	20.603.414.558,14	70.601.434.524,57	35.300.717.262,29	1.883.817.352.305,74	53,36	6,84

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel di atas rata – rata umur piutang Pemerintah Kabupaten pada tahun 2016 sebesar 10,06, tahun 2017 sebesar 8,92, tahun 2018 sebesar 10,04, tahun 2019 sebesar 10,29, dan di tahun 2020 sebesar 6,84.

Piutang Pemerintah Daerah yang terdiri dari piutang pajak dan piutang retribusi yang tergolong piutang lancar dimasukkan sebagai salah satu pendapatan dan menjadi target pendapatan pada SKPD terkait sesuai jenis pendapatan yang akan diterima dari piutang tersebut. Tidak diperhitungkan pada penerimaan pembiayaan, karena piutang dimaksud sudah diakui secara aktual di neraca pada SKPD terkait dan untuk penerimaan pembiayaan harus dipastikan diterima di tahun berkenaan.

3.2. ANALISIS KEUANGAN DAERAH

3.2.1. Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, dan belanja tertentu. Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar pendapatan daerah harus dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari, seperti gaji PNS, dan selain itu terdapat berbagai jenis pendapatan yang bersifat (earmarked; ditentukan penggunaannya). Semakin besar Kapasitas Fiskal daerah maka semakin besar dana yang masih bisa digunakan untuk melaksanakan inovasi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Secara teknis, kapasitas fiskal dapat dihitung menggunakan formula berikut ini:

Kapasitas Fiskal = (Penerimaan Umum APBD) - (Penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya + Belanja)

Keterangan :

- Penerimaan Umum APBD = Pendapatan + SILPA
- Pendapatan Mengikat = DAK + Pendapatan Hibah + Dana Darurat + Dana Penyesuaian/Otsus
- Belanja Mengikat = Belanja Pegawai + Belanja Bunga + Belanja Bagi Hasil + Belanja Langsung terkait dengan rutin SKPD
- Belanja Wajib = Belanja urusan Pendidikan (20%) + Belanja urusan Kesehatan (10%) + Belanja Wajib Lainnya

Berdasarkan hasil perhitungan Kapasitas Fiskal Kabupaten Gowa tahun 2016-2020 ditemukan bahwa kapasitas fiskal yang dimiliki oleh Kabupaten Gowa sangat terbatas. Tabel 3.12 berikut menunjukkan bahwa selama periode tahun 2016-2020, kapasitas fiskal daerah yang tercipta cukup kecil dibandingkan dengan total penerimaan daerah. Hal ini diakibatkan oleh tingginya kebutuhan anggaran belanja mengikat dan belanja wajib daerah sehingga pada akhirnya berimplikasi pada terbatasnya kesediaan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan strategis daerah.

Tabel 3. 21
Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	KEMAMPUAN FISKAL				
	2016	2017	2018	2019	2020
PENERIMAAN	1.740.314.312.017,93	1.936.452.002.501,38	1.872.747.716.046,28	1.963.149.418.008,71	2.032.965.471.511,77
Pendapatan	1.612.246.983.358,60	1.790.263.499.730,15	1.781.396.471.000,37	1.870.608.908.440,64	1.883.817.352.305,74
SILPA	128.067.328.659,33	146.188.502.771,23	91.351.245.045,91	92.540.509.568,07	149.148.119.206,03
PENDAPATAN MENGIKAT	433.780.021.550,00	566.550.536.222,00	535.254.719.229,00	526.857.114.919,00	537.255.551.241,00
Dana alokasi khusus	347.707.840.410,00	445.496.853.580,00	380.981.631.681,00	355.307.288.919,00	387.227.408.241,00
Pendapatan Hibah	2.330.771.140,00	21.420.810.950,00	4.036.171.549,00	3.477.000.000,00	98.883.540.000,00
Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	83.741.410.000,00	99.632.871.692,00	150.236.915.999,00	168.072.826.000,00	51.144.603.000,00
BELANJA MENGIKAT	756.566.745.686,00	658.333.772.052,00	704.842.708.109,41	722.298.550.563,00	718.044.608.188,00
Belanja Pegawai	754.891.301.986,00	656.658.328.352,00	703.167.264.409,41	721.227.943.794,00	716.976.502.117,00
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Bagi Hasil	1.675.443.700,00	1.675.443.700,00	1.675.443.700,00	1.070.606.769,00	1.068.106.071,00
BELANJA WAJIB	412.231.004.459,00	470.956.110.743,18	479.305.644.169,78	488.267.759.858,37	451.546.804.553,80
Belanja Pendidikan (20%)	133.041.120.306,00	174.681.801.995,45	179.982.682.279,86	177.524.023.905,58	166.256.162.202,53

Uraian	KEMAMPUAN FISKAL				
	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Kesehatan (10%)	66.520.560.153,00	87.340.900.997,73	89.991.341.139,93	88.762.011.952,79	83.128.081.101,27
Belanja Infrastruktur (25% * DAU)	212.669.324.000,00	208.933.407.750,00	209.331.620.750,00	221.981.724.000,00	202.162.561.250,00
TOTAL PENDAPATAN MENGIKAT, BELANJA MENGIKAT DAN BELANJA WAJIB	1.602.577.771.695,00	1.695.840.419.017,18	1.719.403.071.508,19	1.737.423.425.340,37	1.706.846.963.982,80
KAPASITAS FISKAL	137.736.540.322,93	240.611.583.484,21	153.344.644.538,09	225.725.992.668,34	326.118.507.528,97

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

3.2.2. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula. Tabel berikut menunjukkan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah selama periode tahun 2016-2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.22
Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
Pendapatan Daerah	1.612.246.983.358,60	1.790.263.499.730,15	1.781.396.471.000,37	1.870.608.908.440,64	1.883.817.352.305,74
Penerimaan Pembiayaan	122.305.081.922,73	128.115.905.519,33	191.281.349.136,23	141.368.000.883,91	188.112.015.464,84
TOTAL PENERIMAAN DAERAH	1.734.552.065.281,33	1.918.379.405.249,48	1.972.677.820.136,60	2.011.976.909.324,55	2.071.945.367.770,58
Belanja Daerah	1.602.546.758.748,00	1.727.962.526.455,25	1.827.641.077.090,69	1.865.956.399.756,48	1.931.392.222.938,55
Pengeluaran Pembiayaan	3.937.977.874,00	44.228.376.023,00	53.685.498.000,00	53.480.000.000,00	40.519.608.646,00
TOTAL PENGELUARAN DAERAH	1.606.484.736.622,00	1.772.190.902.478,25	1.881.326.575.090,69	1.919.436.399.756,48	1.971.911.831.584,55
Kemampuan Mendanai Belanja Daerah	1,08	1,08	1,05	1,05	1,05

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

Secara umum kondisi kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Gowa selama periode tahun 2016-2020 sudah cukup baik yang ditandai dengan angka kemampuan mendanai belanja daerah selama periode tersebut selalu berada diatas angka 1 (satu), berarti total penerimaan daerah selalu melebihi total pengeluaran daerah. Namun demikian, patut dicermati adanya pola penurunan kemampuan mendanai belanja daerah, dari sebesar 1,08 pada tahun 2017 menjadi sebesar 1,05 pada tahun 2018 dan kembali menjadi sebesar 1,08 pada tahun 2020. Berkaitan dengan kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk mencari sumber pembiayaan lain diantaranya: (1) menyusun readiness criteria untuk mencari dana APBN, DAK; dan (2) opsi kerjasama pemerintah dan badan usaha/swasta yang harus mulai dirintis serta diwujudkan untuk meningkatkan daya saing, mengatasi permasalahan dan menyikapi tantangan ke depan.

3.2.3. Kemandirian Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi semakin besar. Tabel berikut menunjukkan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Gowa tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 3.23
Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	187.176.036.300,40	268.339.203.299,15	217.112.642.503,37	238.239.570.974,67	241.469.562.565,34
Pembanding :					
Dana Perimbangan	1.225.854.162.07,00	.304.093.896.763,00	1.237.082.857.147,00	1.258.904.850.116,00	1.217.293.801.285,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	199.216.785.021,20	217.830.399.668,00	327.200.971.350,00	373.464.487.349,97	425.053.988.455,40
Penerimaan Pembiayaan	122.305.081.922,73	128.115.905.519,33	191.281.349.136,23	141.368.000.883,91	188.112.015.464,84
Total Pembanding	1.547.376.028.980,93	1.650.040.201.950,33	1.755.565.177.633,23	1.773.737.338.349,88	1.830.459.805.205,24
Rasio Kemandirian Daerah	12,10	16,26	12,37	13,43	13,19

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Rasio Kemandirian Daerah menunjukkan angka yang fluktuatif disebabkan besarnya penerimaan daerah yang beragam di setiap tahunnya. Secara keseluruhan tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan rasio kemandirian sebesar 1,09% dengan tingkat rasio rata-rata kemandirian sebesar 13,47% artinya kemandirian daerah masih rendah sekali dan memiliki pola hubungan Instruktif yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.

3.3 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

3.3.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Gowa pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.

3.3.1.1. Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Anggaran

Secara umum, proporsi realisasi belanja daerah Kabupaten Gowa cukup tinggi yang mencapai rata-rata sebesar 93,55% pertahun selama periode tahun 2016-2020. Jika diperbandingkan rata-rata proporsi realisasi antara belanja langsung dan belanja tidak langsung terlihat adanya proporsi realisasi lebih tinggi pada kelompok belanja tidak langsung yang mencapai rata-rata sebesar 93,64%, sedangkan belanja langsung mencapai rata-rata sebesar 93,46%.

Tabel 3.24
Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Tahun 2016 s/d Tahun 2020 Kabupaten Gowa

No.	Uraian	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	Rata-rata (%)
2	BELANJA	87,83	93,35	96,17	95,69	94,79	93,57
2,1	Belanja Tidak Langsung	87,98	93,96	95,49	96,37	94,56	93,67
2.1.1	Belanja Pegawai	85,91	92,58	94,35	95,41	92,24	92,10
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0,00
2.1.3	Belanja Hibah	80,45	97,94	95,62	91,69	98,83	92,91
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	86,10	73,94	17,70	85,85	97,34	72,19
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	100,00	100,00	100,00	63,90	63,75	85,53
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	99,43	99,25	99,83	100,00	100,00	99,70
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	100,00	98,14	39,63
2,2	Belanja Langsung	87,62	92,75	96,86	94,96	95,09	93,46
2.2.1	Belanja Pegawai	87,94	95,70	95,72	96,21	98,83	94,88
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94,86	97,71	94,37	95,67	94,64	95,45
2.2.3	Belanja Modal	82,36	89,17	95,08	94,17	95,07	91,17

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

3.3.1.2. Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah membutuhkan sumber pembiayaan *overhead cost* bagi sumber daya pegawai maupun barang jasa serta kebutuhan lainnya. Dalam konteks penganggaran daerah, *overhead cost* pemerintah ini diletakkan pada berbagai pos pembelanjaan belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk melihat sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan pegawai demi kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dikendalikan oleh aparat pemerintah daerah yang tersebar pada setiap unit dan perangkat daerah terkait, maka salah satu yang perlu dicermati adalah proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari total alokasi belanja daerah, untuk lebih jelasnya mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 25
Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Gowa Tahun 2016 s/d 2020

No	Uraian	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	589.953.542.946,00	656.658.328.352,00	703.167.264.409,41	721.227.943.794,00	692.754.986.817,00
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	564.139.550.967,00	494.314.025.498,00	498.791.663.130,00	663.661.719.954,00	645.470.655.151,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan	18.326.418.137,00	154.605.508.771,00	194.434.337.146,41	47.155.368.265,00	36.439.971.056,00
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH / WKDH	3.786.000.000,00	3.711.000.000,00	5.831.500.000,00	6.107.500.000,00	6.045.000.000,00
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	3.701.573.842,00	4.027.794.083,00	4.109.764.133,00	4.303.355.575,00	4.799.360.610,00
B	Belanja Langsung	418.824.523.276,00	544.435.953.727,25	537.226.845.846,00	516.211.315.203,97	456.313.580.720,66
1	Belanja Honorarium PNS	13.319.919.906,00	9.196.950.000,00	3.269.393.000,00	1.754.558.000,00	5.231.125.500,00
2	Belanja Uang Lembur	3.572.853.000,00	4.035.678.650,00	3.726.216.600,00	3.775.016.000,00	3.519.591.800,00
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-	-
4	Belanja Kursus. Pelatihan. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5.154.866.682,00	5.263.731.721,00	3.968.219.104,00	4.121.195.640,00	2.239.998.580,00
5	Belanja premi asuransi kesehatan	25.165.316.000,00	17.560.301.641,00	31.296.970.311,00	35.488.289.740,00	48.453.735.248,00
6	Belanja makanan dan minuman pegawai	902.290.000,00	198.400.000,00	725.183.401,00	828.182.813,00	383.961.950,00
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya	1.374.425.875,00	751.970.000,00	1.321.630.000,00	1.192.059.000,00	551.449.000,00
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.605.620.504,00	2.250.649.150,00	2.481.276.794,00	2.077.075.800,00	512.345.000,00
9	Belanja Perjalanan Dinas	25.253.384.495,00	27.283.968.348,00	36.759.907.143,00	38.453.856.622,00	24.969.919.472,00
10	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-	-	-

No	Uraian	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
11	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-	-	-
12	Belanja Modal (Kantor. Mobil Dinas. Meubelair. peralatan dan perlengkapan. dll)	342.475.846.814,00	477.894.304.217,25	453.678.049.493,00	428.521.081.588,97	370.451.454.170,66
	TOTAL (A + B)	1.008.778.066.222,00	1.201.094.282.079,25	1.240.394.110.255,41	1.237.439.258.997,97	1.149.068.567.537,66

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

Tabel 3. 26
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Gowa Tahun 2016 s/d 2020

No	Uraian	Total belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x100
1	Tahun anggaran 2016	1.005.076.492.380,00	1.728.789.818.544,73	58,14
2	Tahun anggaran 2017	1.197.066.487.996,25	1.901.982.251.697,58	62,94
3	Tahun anggaran 2018	1.236.284.346.122,41	2.072.607.924.226,92	59,65
4	Tahun anggaran 2019	1.237.299.456.922,97	1.919.436.399.756,48	64,46
5	Tahun anggaran 2020	1.144.269.206.927,66	1.971.911.831.584,55	58,03

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas, secara keseluruhan periode tahun 2016-2020 proporsi belanja aparatur diatas 50 persen dengan harapan setiap tahunnya dapat terus menurun sehingga belanja aparatur dapat ditekan di bawah 50 persen.

3.3.1.3 Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan mengikat serta Prioritas Utama

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah. Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan, untuk lebih jelasnya mengenai belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27**Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Gowa Tahun 2016 s/d 2020**

No	Uraian	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung	760.003.220.178,00	845.142.265.144,00	916.741.910.904,41	962.856.358.228,57	971.205.479.610,89	6,39
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	564.139.550.967,00	494.314.025.498,00	498.791.663.130,00	663.661.719.954,00	645.470.655.151,00	4,71
2	Belanja Tambahan Penghasilan	18.326.418.137,00	154.605.508.771,00	194.434.337.146,41	47.155.368.265,00	36.439.971.056,00	167,73
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	3.786.000.000,00	3.711.000.000,00	5.831.500.000,00	6.107.500.000,00	6.045.000.000,00	14,72
4	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0,00
5	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	3.701.573.842,00	4.027.794.083,00	4.109.764.133,00	4.303.355.575,00	4.799.360.610,00	6,77
	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.345.335.921,00	3.663.341.771,00	3.772.689.258,00	4.163.553.500,00	4.705.870.068,00	8,97
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	356.237.921,00	364.452.312,00	337.074.875,00	139.802.075,00	93.490.542,00	(24,21)
6	Belanja Bagi Hasil Desa	168.333.349.051,00	187.302.471.699,00	212.393.181.402,00	239.764.967.669,00	276.893.611.771,00	13,26
	Alokasi dana Desa	166.657.905.351,00	185.627.027.999,00	210.717.737.702,00	238.694.360.900,00	228.009.276.995,00	8,42
	Alokasi dana Desa dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-	48.453.735.248,00	0,00
	Bagi hasil pajak dan retribusi Desa	1.675.443.700,00	1.675.443.700,00	1.675.443.700,00	1.070.606.769,00	430.599.528,00	(23,97)
7	Bantuan Partai Politik	1.716.328.181,00	1.181.465.093,00	1.181.465.093,00	1.863.446.765,57	1.556.881.022,89	2,53
B	Pengeluaran Pembiayaan	3.937.977.874,00	44.228.376.023,00	53.685.498.000,00	53.480.000.000,00	40.519.608.646,00	254,97
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	38.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	37.500.000.000,00	1,64

No	Uraian	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	3.932.329.915,00	-	-	-	-	0,00
3	Pembayaran Utang Pihak Ketiga-Rekanan	-	3.228.376.023,00	-	-	-	0,00
4	* Penyertaan Modal (PT Bank Sulselbar)	-	3.000.000.000,00	3.500.000.000,00	3.480.000.000,00	3.000.000.000,00	0,77
5	Pemberian Pinjaman daerah	5.647.959,00	-	-	-	-	0,00
6	Sisa dana	-	-	185.498.000,00	-	-	0,00
7	Restitusi					19.608.646,00	0,00
	TOTAL (A+B)	763.941.198.052,00	889.370.641.167,00	970.427.408.904,41	1.016.336.358.228,57	1.011.725.088.256,89	7,45

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata pertumbuhan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Gowa tahun 2016 – 2018 adalah 6,28 persen. Total pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar pada komponen gaji dan tunjangan.

3.3.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keseimbangan keuangan daerah, antara pendapatan dalam belanja daerah, dimana dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu anggaran surplus dan anggaran defisit. Sedangkan jika tidak ditemukan selisih antara keduanya, berarti terjadi transaksi keuangan daerah yang seimbang. Pada setiap kebijakan penganggaran, digambarkan komponen – komponen penerimaan untuk menutup defisit atau bahkan alokasi pembiayaan saat penganggaran surplus pada saat realisasi pendapatan melebihi kebutuhan alokasi belanja daerah.

Tabel 3. 28
Defisit Riil Anggaran Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Gowa

NO	Uraian	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.612.246.983.358,60	1.790.263.499.730,15	1.781.396.471.000,37	1.870.608.908.440,64	1.883.817.352.305,74
	Dikurangi realisasi :					
2	Belanja Daerah	1.724.851.840.670,73	1.857.753.875.674,58	1.827.641.077.090,69	1.865.956.399.756,48	1.931.392.222.938,55
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.937.977.874,00	44.228.376.023,00	53.685.498.000,00	53.480.000.000,00	40.519.608.646,00
	Defisit riil	(116.542.835.186,13)	(111.718.751.967,43)	(99.930.104.090,32)	(48.827.491.315,84)	(88.094.479.278,81)

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas, penganggaran Pemerintah Kabupaten Gowa pada tahun 2016 – 2020 mengalami defisit. Hal ini dikarenakan realisasi belanja dan pengeluaran lebih besar daripada pendapatan daerah sedangkan komposisi defisit riil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.29
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Gowa
Tahun 2016-2020

Uraian	PROPORSI DARI TOTAL DEFISIT RIIL				
	Tahun 2016 (%)	Tahun 2017 (%)	Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	100	100	100	100	100
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0	0	0
Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

Komposisi penutup defisit riil anggaran Pemerintah Kabupaten Gowa pada tahun 2016 – 2020 berdasarkan tabel diatas, sepenuhnya ditutupi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Gambaran komposisi sisa lebih perhitungan anggaran digunakan analisis realisasi sisa lebih perhitungan anggaran sehingga dengan mengetahui SiLPA realisasi anggaran periode sebelumnya maka dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Untuk lebih jelasnya mengenai realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2016 – 2018 Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.30
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2016 s/d 2020 Kabupaten Gowa

Uraian	2016		2017		2018		2019		2020		Rata-rata pertumbuhan
	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	
Jumlah SILPA	128.067.328.659,33	100,00	146.188.502.771,23	100,00	91.351.245.045,91	100,00	92.540.509.568,07	100,00	149.148.119.206,03	100,00	9,78
Pelampauan penerimaan PAD	18.310.142.323,40	14,30	17.442.068.674,15	11,93	8.951.745.684,37	9,80	(1.450.962.295,36)	(1,57)	13.295.545.942,34	8,91	(296,49)
Pelampauan penerimaan dana perimbangan	(120.635.225.894,80)	(94,20)	(21.612.544.737,00)	(14,78)	(16.428.721.907,00)	(17,98)	(16.783.873.390,03)	(18,14)	(9.201.087.664,00)	(6,17)	(37,27)
Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	31.855.540,00	0,02	20.462.808.920,00	14,00	3.219.651.549,00	3,52	3.477.000.000,00	3,76	3.000.000.000,00	2,01	16011,57
Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	222.051.440.618,00	173,39	123.129.510.489,08	84,23	93.463.053.307,31	102,31	83.376.747.035,40	90,10	130.171.242.763,02	87,28	(5,83)
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	(78.125.754.615,29)	(61,00)	(3.792.215.053,30)	(2,59)	(168.862.072.613,22)	(184,85)	(168.862.072.613,22)	(182,47)	(27.332.115.691,00)	(18,33)	1043,48
Kegiatan Lanjutan	86.434.870.688,00	67,49	2.974.444.371,70	2,03	171.007.589.025,45	187,20	171.007.589.025,45	184,79	39.214.533.855,67	26,29	1368,90

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

Gambaran riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 31
Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Saldo kas neraca daerah	129.781.021.550,33	146.915.919.661,23	92.595.402.577,91	93.241.910.318,07	149.179.927.240,03
	Dikurangi:					
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	78.125.754.615,29	3.792.215.053,33	168.862.072.613,22	134.730.289.570,08	27.332.115.691,00
3	Kegiatan lanjutan	86.434.870.688,00	2.974.444.371,70	171.007.589.025,45	171.007.589.025,45	39.214.533.855,67
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	(34.779.603.752,96)	140.149.260.236,20	(247.274.259.060,76)	(212.495.968.277,46)	82.633.277.693,36

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

1.2. KERANGKA PENDANAAN

Struktur anggaran yang tepat merupakan syarat pokok (*necessary condition*) bagi pengelolaan keuangan yang baik di daerah. Beberapa hal yang bisa dilakukan yang pertama, struktur anggaran di daerah harus secara eksplisit memisahkan pendapatan dan pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari utang misalnya, tidak bisa diklaim sebagai pendapatan karena suatu saat nanti dana tersebut harus dikembalikan. Untuk memenuhi syarat kecukupan (*sufficient condition*) bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Prioritas-prioritas pembangunan daerah dengan beberapa pertimbangan tersebut menjadi dasar pola alokasi belanja di Kabupaten Gowa.

1.2.1. Asumsi Ekonomi, Sosial dan Fiskal

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas asumsi makro ekonomi daerah, asumsi kondisi sosial masyarakat, dan asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2021-2023. Ketiga asumsi ini memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Artinya, asumsi tersebut, selain akan menuntun proyeksi besaran pendapatan daerah, juga akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

Upaya pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten Gowa selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Kabupaten Gowa, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Kabupaten Gowa. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Kabupaten Gowa, mulai pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita meningkat, persentase penduduk miskin yang menurun, indeks pembangunan manusia yang meningkat, pertumbuhan investasi yang tinggi, serta tingkat pengangguran terbuka yang menurun dan mencapai tingkat yang terendah. Indikator makro ekonomi daerah tersebut, bukan hanya berimplikasi pada kebutuhan belanja pembangunan daerah yang juga tidak sedikit, tetapi juga diharapkan mampu memberi dampak langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Kemudian secara tidak langsung menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas, melalui pertumbuhan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, dan kegiatan ekonomi sektor swasta.

Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa (menggunakan

tahun dasar 2010) dari Tahun 2016 menunjukkan penurunan sampai tahun 2017 yaitu dari 7,57 persen menjadi 7,21 persen, kemudian dari tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 7,14 persen, pada tahun 2019 mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup besar yaitu 7,46 persen, akan tetapi di tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 1,76. Hal ini dipengaruhi oleh terjadinya Pandemi COVID-19.

Angka Garis Kemiskinan kabupaten Gowa selama periode 2016–2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 garis kemiskinan Kabupaten Gowa tercatat sebesar 316.428 Rupiah/Kapita/Bulan, sedangkan tahun 2017 menjadi sebesar 333.002 Rupiah/Kapita/Bulan, tahun 2018 menjadi 365.503 Rupiah/Kapita/Bulan, tahun 2019 menjadi 385.820 Rupiah/Kapita/Bulan, dan untuk tahun 2020 menjadi 390.917 Rupiah/Kapita/Bulan. Jumlah penduduk miskin cenderung mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2016 sebanyak 61.520 jiwa (8,40 %), Tahun 2017 naik menjadi 62.770 jiwa (8,42 %), menurun menjadi 59.340 jiwa (7,83 %) pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 menjadi 57.980 jiwa (7,53 %) demikian pula di tahun 2020 menurun menjadi 57.680 jiwa (7,38 %).

Angka Tingkat Pengangguran terbuka di kabupaten Gowa tahun 2017 mencapai 6,14 persen, di tahun 2018 sebesar 4,80 persen, tahun 2019 sebesar 4,87 persen, dan di tahun 2020 mencapai 6,44 persen.

Indeks Gini Rasio Kabupaten Gowa tahun 2016 sebesar 0,340; di tahun 2017 meningkat sebesar 0,395; tahun 2018 menurun sebesar 0,384; tahun 2019 menurun sebesar 0,354; dan di tahun 2020 kembali menurun sebesar 0,345.

Angka PDRB Perkapita menurut ADHB Kabupaten Gowa di tahun 2016 sebesar 21,11; meningkat di tahun 2017 sebesar 23,08; tahun 2018 meningkat lagi menjadi 25,06; tahun 2019 sebesar 27,08; dan di tahun 2020 menjadi 27,45.

Angka Laju Inflasi kabupaten Gowa menunjukkan di tahun 2016 sebesar 3,68 persen, di tahun 2017 turun menjadi 3,37 persen, kemudian di tahun 2018 meningkat menjadi 3,48 persen, di tahun 2019 turun menjadi 3,72 persen dan di tahun 2020 sebesar 2,13 persen.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gowa tahun 2016 meningkat menjadi 67,7; di tahun 2017 meningkat menjadi 68,33; tahun 2018 meningkat menjadi 68,87; tahun 2019 meningkat menjadi 69,99; dan di tahun 2020 kembali meningkat menjadi 70,14.

Tabel 3.32
Asumsi Capaian Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Gowa Tahun 2020-2026

No	Indikator	Satuan	CAPAIAN 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	1,76	1,40	1,56	1,88	2,33	2,59	2,67
2	Tingkat Kemiskinan	%	7,38	7,36	6,77	6,47	6,32	6,21	6,14
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,44	6,48	6,37	6,29	6,17	6,11	6,05
4	Gini Ratio	Angka	0,35	0,36	0,36	0,35	0,34	0,32	0,30
5	PDRB Perkapita	Juta (Rp)	27,45	27,69	27,84	28,00	28,37	28,56	28,75
6	Inflasi	%	2,13	2,10	2,07	2,04	2,01	1,89	1,76
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,14	70,22	70,27	71,12	71,19	71,24	71,37

Sumber : Bappeda Kab. Gowa (Data Diolah)

Tabel 3.33
Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026

U R A I A N	RENCANA CAPAIAN		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
	TAHUN 2021	R	TAHUN 2022	R	TAHUN 2023	R	TAHUN 2024	R	TAHUN 2025	R	TAHUN 2026	R
Pendapatan Asli Daerah	198.482.604.336	10,78	204.332.604.336	11,06	210.352.604.336,00	11,10	210.552.604.336,00	10,87	218.182.604.336,00	10,98	221.232.604.336,00	10,87
Pendapatan Transfer	1.552.399.635.456	84,30	1.552.399.635.456	84,04	1.591.209.626.342,40	84,00	1.630.989.867.000,96	84,22	1.671.764.613.675,98	84,12	1.713.558.729.017,88	84,22
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	90.528.952.743	4,92	90.528.952.743	4,90	92.792.176.561,58	4,90	95.111.980.975,61	4,91	97.489.780.500,00	4,91	99.927.025.012,50	4,91

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020 (Data Diolah)

Asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal khususnya Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2021-2026 diperkirakan akan tumbuh melambat. Hal ini disebabkan oleh adanya bencana terkait dengan merebaknya wabah covid-19.

Pada Tahun 2020 proyeksi ekonomi Kabupaten Gowa yaitu peningkatan kualitas hidup manusia yang dilihat dari indeks daya beli masyarakat, indeks pendidikan dan kesehatan serta masih mengandalkan sektor primer yaitu Sektor Pertanian dan Sektor Sekunder dan Tersier seperti industri, konstruksi, perdagangan, perbankan serta sektor jasa, mengingat hal tersebut Kabupaten Gowa peluang pemanfaatannya masih cukup besar. Sejalan dengan peningkatan pada beberapa indikator ekonomi Makro tersebut diatas, diperlukan perhatian yang lebih terarah dari Pemerintah Daerah terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mempertahankan dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih cepat. Hal ini dapat merangsang masuknya investasi ke daerah yang tentunya sangat dipengaruhi selain adanya insentif dan kemudahan berinvestasi, juga oleh ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi yang memadai, dengan pertumbuhan ekonomi yang demikian maka Kabupaten Gowa memacu sektor pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah khususnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu ditingkatkan, sehingga kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud. Implikasi hal tersebut, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak dan retribusi serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah dan tidak memberatkan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun-tahun sebelumnya, PAD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah perlu dikelola dengan lebih efektif melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan dan penciptaan sumber-sumber penerimaan baru (local revenue coverage). Kebijakan peningkatan pendapatan tersebut didasarkan atas pertimbangan rasionil melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber dan pengelolaan pendapatan daerah yang didukung pula dengan pengadaan sarana dan prasarana penunjang sehingga penerimaan dari pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat meningkat disamping melakukan pengawasan atas manajemen pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam mengimplementasikan paket undang-undang tentang pengelolaan keuangan, pendapatan daerah diarahkan pada pemberdayaan dan

kemandirian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan visi otonomi daerah. Hal ini dapat diarahkan agar penerimaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah disesuaikan dengan kondisi dan keadaan jumlah penduduk, geografis dan luas wilayah, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas. Strategi belanja daerah adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas dan penghematan di bidang belanja daerah sesuai dengan prioritas yakni untuk membiayai kegiatan/program pada dinas teknis yang bertanggung jawab melayani secara langsung.

Prioritas belanja daerah pada belanja tak langsung ditekankan pada kegiatan yang meningkatkan mutu pelayanan pemerintah daerah pada seluruh unit organisasi dengan indikator pada pencapaian kinerja yang ditetapkan guna mendukung visi daerah. Sedangkan titik berat belanja Langsung ditekankan pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar pelayanan publik, kebutuhan jasa serta aksesibilitas publik terhadap jasa pelayanan yang ada. Pengalokasian belanja daerah kepada tiap-tiap Unit Kerja Pengguna Anggaran yang setelah dilakukan proses penjaringan aspirasi melalui mekanisme tahap-tahap perencanaan dimaksudkan sebagai pengejawantahan penerapan perencanaan partisipatif dan lebih bernuansa *bottom up* dari pada *top down*, Rencana ini dimaksudkan sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Pemerintah Kabupaten Gowa dalam penyelenggaraan Pembangunan Lima Tahun.

3.4.2 Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi yang didasarkan pada data historis perkembangan pertumbuhan pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan daerah beberapa tahun sebelumnya.

3.4.2.1. Kebijakan dan Target Pendapatan Daerah

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah khususnya sumber-sumber PAD perlu ditingkatkan, sehingga kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud. Hal ini diarahkan agar penerimaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah disesuaikan dengan kondisi dan keadaan jumlah penduduk, geografis dan luas wilayah dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.

Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memperhatikan aspek

legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dalam rangka pemenuhan pembiayaan pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kepada masyarakat.

Kebijakan desentralisasi dalam otonomi daerah saat ini telah terbukti memberi peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor-sektor penerimaan. Besarnya kewenangan pengelolaan pendapatan, membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan potensi dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, baik yang bersumber dari penerimaan daerah berupa pajak daerah.

Dalam strategi pelaksanaannya dilakukan upaya-upaya antara lain intensifikasi pungutan dan retribusi oleh unit-unit kerja pengelola PAD tanpa membebani masyarakat, mengoptimalkan kinerja Holding Company dan melakukan pendekatan kepada pemerintah propinsi serta pemerintah pusat. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu mendorong pendapatan daerah sesuai dengan penerimaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penetapan target PAD harus dilakukan secara realistis sesuai potensi riil sumber-sumber pendapatan yang ada pada masing-masing unit kerja/pengelola pendapatan. Disamping itu dilakukan pula pengembangan potensi sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dan mengupayakan ekstensifikasi sumber PAD baru yang tidak memberatkan masyarakat serta memperhitungkan kebijakan ekonomi biaya tinggi; meningkatkan pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sarana prasarana dan sistem serta prosedur/mechanisme administrasi pelayanan; pendayagunaan aset-aset daerah yang dapat menghasilkan PAD; mempertahankan keseimbangan antara anggaran belanja dengan anggaran pendapatan, memobilisir potensi sumber daya dan dana masyarakat secara berkelanjutan, adil dan merata. Prinsip prudential atau kehati-hatian dalam menggunakan sumber dana menjadi komitmen bersama sehingga dalam merencanakan anggaran belanja benar-benar diupayakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang didukung sumber daya aparatur pengelola pendapatan daerah serta kemampuan masyarakat dengan pendekatan kemitraan, koordinasi, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dengan mengacu pada uraian di atas, pendapatan daerah diarahkan agar dalam penerimaan, pengelolaan dan pemanfaatannya dapat mewujudkan Kabupaten Gowa sejajar dengan kabupaten termaju lainnya di Indonesia dan menjadi daerah andalan di Sulawesi Selatan. Dengan arahan tersebut,

maka kebijakan pendapatan daerah Tahun 2020 meliputi:

- 1) Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan pendapatan dari sumber daya yang ada. Dengan potensi sumberdaya alam yang dimiliki, khususnya bahan galian golongan C, yang masih menjadi primadona hendaknya memperhatikan pengembangan dan kelestariannya.
- 2) Intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Diusahakan agar terjadi kesesuaian antara target PBB dengan potensi PBB baik sektor perkotaan maupun pedesaan yang ditunjang oleh akuratnya data potensi PBB, sarana dan prasarana pendukung yang memadai, di samping peningkatan pengawasan atas manajemen pengelolaan dan keterpaduan tugas serta pengembangan sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah.
- 3) Penyempurnaan dan Penambahan Jenis Pajak dan Retribusi Kebijakan desentralisasi dalam otonomi daerah saat ini telah terbukti memberi peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor-sektor penerimaan. Besarnya kewenangan pengelolaan pendapatan, membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan potensi dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, yang bersumber dari penerimaan daerah yaitu pajak daerah.

Atas dasar kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor pajak dan retribusi, maka diperlukan evaluasi dan pengkajian ulang jenis objek pajak dan retribusi dalam rangka penyempurnaan dan penambahannya. Upaya-upaya tersebut di atas diharapkan mampu mendorong pendapatan daerah sesuai dengan penerimaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Beberapa faktor pendorong peningkatan PAD dengan meningkatkan jumlah objek dan wajib pajak serta retribusi, meningkatnya cakupan dan kualitas penyelenggaraan mobilisasi pendapatan daerah oleh OPD terkait, pemantapan kerangka regulasi dan kelembagaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah, peningkatan sistem administrasi dan teknologi informasi mobilisasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan tarif untuk beberapa jenis pajak dan retribusi, peningkatan nilai jual objek pajak (NJOP) pada subjek dan objek PBB-P2 dan BPHTB. Berikut disajikan data proyeksi pendapatan daerah tahun 2021-2026 yaitu:

Tabel 3.34
Target Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026

U R A I A N	RENCANA CAPAIAN	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
PENDAPATAN DAERAH	1.841.411.192.535,00	1.847.261.192.535,00	1.894.354.407.239,98	1.936.654.452.312,57	1.987.436.998.511,99	2.034.718.358.366,39
PENDAPATAN ASLI DAERAH	198.482.604.336,00	204.332.604.336,00	210.352.604.336,00	210.552.604.336,00	218.182.604.336,00	221.232.604.336,00
Hasil Pajak Daerah	107.179.635.430,00	113.029.635.430,00	119.049.635.430,00	119.249.635.430,00	126.679.635.430,00	129.729.635.430,00
Hasil Retribusi Daerah	37.760.816.511,00	37.760.816.511,00	37.760.816.511,00	37.760.816.511,00	37.960.816.511,00	37.960.816.511,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.020.000.000,00	5.020.000.000,00	5.020.000.000,00	5.020.000.000,00	5.020.000.000,00	5.020.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	48.522.152.395,00	48.522.152.395,00	48.522.152.395,00	48.522.152.395,00	48.522.152.395,00	48.522.152.395,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.552.399.635.456,00	1.552.399.635.456,00	1.591.209.626.342,40	1.630.989.867.000,96	1.671.764.613.675,98	1.713.558.729.017,88
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.446.534.404.000,00	1.446.534.404.000,00	1.482.697.764.100,00	1.519.765.208.202,50	1.557.759.338.407,56	1.596.703.321.867,75
Pendapatan Transfer antar Daerah	105.865.231.456,00	105.865.231.456,00	108.511.862.242,40	111.224.658.798,46	114.005.275.268,42	116.855.407.150,13
LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	90.528.952.743,00	90.528.952.743,00	92.792.176.561,58	95.111.980.975,61	97.489.780.500,00	99.927.025.012,50
lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	90.528.952.743,00	90.528.952.743,00	92.792.176.561,58	95.111.980.975,61	97.489.780.500,00	99.927.025.012,50

Target pendapatan dilakukan berdasarkan beberapa asumsi yang menjadi dasar proyeksi, diantaranya asumsi berdasarkan data historis dan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam masa pandemi covid-19. Pendapatan Daerah tahun 2021 sebesar Rp 1.841.411.192.535,00, dan meningkat menjadi sebesar Rp 2.034.718.358.366,39 di tahun 2026 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 2,02%.

3.4.2.2. Kebijakan dan Target Belanja Daerah

Fokus kebijakan pada Tahun 2020 adalah Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa diarahkan pada peningkatan profesionalisme dan kinerja pengelolaan belanja daerah dan tetap mengacu pada ketiga fungsinya yaitu pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas.

Kebijakan umum belanja daerah mengacu pada kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Pembangunan Kabupaten Gowa merupakan payung atau dokumen induk perencanaan pembangunan yang mengarahkan seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menjadi terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan sehingga berkedudukan sebagai acuan bagi semua pelaku utama pembangunan dan berfungsi sebagai pedoman dalam mengembangkan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Gowa. Belanja daerah mengacu pada program pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan aspek pro growth, pro jobs, dan pro environment serta pemerataan pengalokasian anggaran pembangunan antara dataran rendah dengan dataran tinggi secara proporsional.

Dasar norma perencanaan dan pelaksanaan anggaran, maka dalam penyusunan belanja daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020 ini tetap diperhatikan prinsip-prinsip anggaran, yaitu prinsip keadilan, prinsip efisiensi dan efektifitas serta prinsip transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Target belanja dilakukan berdasarkan beberapa asumsi data historis dan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam masa pandemi covid-19. Belanja Daerah tahun 2021 sebesar Rp 2.144.411.192.535,00 dan meningkat menjadi sebesar Rp 2.034.718.358.366,39 di tahun 2026 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 0,81%. Target Belanja Daerah tahun 2021-2026 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.35
Target Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026

URAIAN	RENCANA CAPAIAN 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
BELANJA	2.144.411.192.535,00	1.847.261.192.535,00	1.894.354.407.239,98	1.936.654.452.312,57	1.987.436.998.511,99	2.034.718.358.366,39
BELANJA OPERASI	1.257.569.701.403,00	1.269.619.302.673,36	1.300.222.285.240,19	1.329.737.139.342,81	1.362.163.067.826,38	1.393.206.329.413,65
Belanja Pegawai	752.274.809.330,00	752.274.809.330,00	771.081.679.563,25	790.358.721.552,33	810.117.689.591,14	830.370.631.830,92
Belanja Barang dan Jasa	468.391.551.399,00	468.391.551.399,00	480.101.340.183,98	489.703.366.987,65	501.945.951.162,35	512.090.034.833,01
Belanja Bunga	3.555.000.000,00	15.500.000.000,00	14.750.000.000,00	14.700.000.000,00	14.250.000.000,00	14.000.000.000,00
Belanja Hibah	28.118.277.156,00	28.118.277.156,00	28.821.234.084,90	29.397.658.766,60	30.132.600.235,76	30.885.915.241,66
Belanja Bantuan Sosial	5.230.063.518,00	5.334.664.788,36	5.468.031.408,07	5.577.392.036,23	5.716.826.837,14	5.859.747.508,06
BELANJA MODAL	651.332.725.432,00	342.049.615.287,64	352.650.040.561,43	360.605.589.902,64	372.804.414.541,81	382.730.774.905,35
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.500.000.000,00	2.550.000.000,00	2.613.750.000,00	2.666.025.000,00	2.732.675.625,00	2.800.992.515,63
BELANJA TRANSFER	233.008.765.700,00	233.042.274.574,00	238.868.331.438,35	243.645.698.067,12	249.736.840.518,80	255.980.261.531,77
Belanja Bagi Hasil	1.675.443.700,00	1.708.952.574,00	1.751.676.388,35	1.786.709.916,12	1.831.377.664,02	1.877.162.105,62
Belanja Bantuan Keuangan	231.333.322.000,00	231.333.322.000,00	237.116.655.050,00	241.858.988.151,00	247.905.462.854,78	254.103.099.426,14

3.4.2.3. Kebijakan dan Target Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2020, meliputi hal-hal sebagai berikut.

- 1) Mengupayakan peningkatan penghimpunan dana tabungan masyarakat dan tabungan pemerintah untuk dapat menggerakkan investasi pembangunan di daerah;
- 2) Pembiayaan pembangunan sektor swasta dan masyarakat diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang lebih berorientasi ekonomi terutama untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca krisis;
- 3) Pembiayaan dari sektor pemerintah berorientasi pada kegiatan-kegiatan yang lebih berorientasi ekonomi dan pencapaian keunggulan kompetitif daerah;
- 4) Program-program yang diarahkan untuk dibiayai dengan dana pemerintah, pengalokasian rencana pembiayaannya diatur berdasarkan pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar instansi/unit kerja; dan
- 5) Optimalisasi pengelolaan pembiayaan untuk menutupi defisit antara Anggaran Pendapatan dan Belanja yang dianggarkan pada tahun berjalan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Gowa tentang Perubahan APBD Kabupaten Gowa Tahun anggaran 2020, TAPD Kabupaten Gowa akan mengalokasikan kembali atas pemotongan anggaran dimaksud dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah pada saat penyusunan Ranperda Perubahan APBD Tahun anggaran 2020. Apabila dikaitkan antara proyeksi pendapatan daerah dengan proyeksi belanja daerah Kabupaten Gowa, maka jumlah pendapatan yang ada tidak mencukupi untuk mendanai seluruh belanja kegiatan yang direncanakan, atau terdapat defisit anggaran, sehingga harus ditanggulangi atau didanai dengan pembiayaan daerah yang bersumber dari SILPA.

Penerimaan pembiayaan yang diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan Penerimaan piutang daerah, proyeksi Pembiayaan Daerah lima tahun kedepan (2021-2026) dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran.

Target pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan beberapa asumsi data historis dan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam masa pandemi covid-19. Pembiayaan Daerah tahun 2021 sebesar Rp 303.000.000.000,00, untuk lebih jelasnya Proyeksi Pembiayaan Daerah tahun 2021-2026 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 36
Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026

URAIAN	Rencana Capaian 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
PEMBIAYAAN	303.000.000.000	0	0	0	0	0
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	353.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
SILPA	53.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
Penerimaan Pinjaman Daerah	300.000.000.000		-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh Tempo	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000

3.4.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah dan mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dialokasikan kedalam 3 (tiga) prioritas.

Prioritas Pertama, untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar, antara lain Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk mencapai target belanja infrastruktur daerah minimal 25 persen, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI;

Prioritas Kedua, untuk membiayai belanja pemenuhan visi misi Kepala Daerah; Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gowa terpilih, maka disusun sebanyak 50 program prioritas, dengan tujuan yaitu :

1. Untuk Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif, dilaksanakan dengan program sebagai berikut ;
 - 1) Program Pengelolaan Pendidikan
 - 2) Program Pembinaan Perpustakaan
 - 3) Program Pengembangan Kurikulum
 - 4) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 5) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - 6) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - 7) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 8) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - 9) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - 10) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - 11) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

2. Untuk Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal dan sektor unggulan daerah, dilaksanakan dengan program sebagai berikut ;
 - 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 2) Program Penyuluhan Pertanian
 - 3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 4) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - 5) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - 6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
 - 7) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - 8) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - 9) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 10) Program Pengembangan UMKM
 - 11) Program Rehabilitasi Sosial
 - 12) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - 13) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - 14) Program Penempatan Tenaga Kerja

3. Untuk Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur layanan dasar masyarakat, dilaksanakan dengan program sebagai berikut ;
 - 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 3) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - 4) Program Pengembangan Perumahan
 - 5) Program Penyelenggaraan Jalan
 - 6) Program Kawasan Permukiman
 - 7) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - 8) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - 9) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - 10) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 11) Program Pengelolaan Persampahan
 - 12) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 13) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

2. Untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien, dilaksanakan dengan program sebagai berikut;
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - 3) Program Pelayanan Penanaman Modal
 - 4) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - 5) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 6) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 7) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - 8) Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - 9) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 10) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 11) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 12) Program Penataan Desa

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Gowa, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Propinsi, dan Sumber-sumber pendanaan lainnya).

Prioritas Ketiga, untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, seperti gaji dan tunjangan.

Dalam kurun waktu lima tahun mendatang, kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Gowa diharapkan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah meningkat dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah. Adapun Gambaran Kemampuan Keuangan Daerah dan Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 3.37
Proyeksi Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Gowa
Tahun 2021 s/d 2026

URAIAN	Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019					
	RENCANA CAPAIAN 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Pendapatan	1.841.411.192.535	1.847.261.192.535	1.894.354.407.239,97	1.936.654.452.312,57	1.987.436.998.511,99	2.034.718.358.366,39
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran	353.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
Total Penerimaan	2.194.411.192.535	1.897.261.192.535	1.944.354.407.239,98	1.986.454.452.312,57	2.037.436.998.511,98	2.084.718.358.366,39
Dikurangi						
Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	2.144.411.192.535	1.847.261.192.535	1.894.354.407.239,98	1.936.454.452.312,57	1.987.436.998.511,98	2.034.718.358.366,39

Tabel 3.38
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Tahun 2021-2026

URAIAN	RENCANA CAPAIAN 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	2.144.411.192.535,00	1.847.261.192.535,00	1.894.354.407.239,98	1.936.454.452.312,57	1.987.436.998.511,98	2.034.718.358.366,39
Dibagi ke dalam Prioritas:						
Prioritas I (10 %)	214.441.119.253,50	184.726.119.253,50	189.435.440.724,00	193.645.445.231,26	198.743.699.851,20	203.471.835.836,64
Prioritas II (40 %)	857.764.477.014,00	738.904.477.014,00	757.741.762.895,99	774.581.780.925,03	794.974.799.404,79	813.887.343.346,56
Prioritas III (50 %)	1.072.205.596.267,50	923.630.596.267,50	947.177.203.619,99	968.227.226.156,29	993.718.499.255,99	1.017.359.179.183,19

3.5. DAMPAK PANDEMI TERHADAP PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2020

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika tiba-tiba muncul wabah Covid-19, yang awalnya muncul secara lokal di Wuhan China, lalu merebak dan memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian dunia. Data per-10 Maret 2021 menunjukkan Kabupaten Gowa ada 305 orang yang terkonfirmasi Covid, 3.409 dinyatakan sembuh dan 72 orang dinyatakan meninggal dunia.

Perkembangan krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi ini praktis membuat Pemerintah Daerah harus mundur dengan rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan semula untuk kemudian digantikan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi wabah Covid-19. Tahun 2020 Kabupaten Gowa mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi serta telah dilakukan revisi APBD dengan menyediakan alokasi anggaran yang besar untuk mengatasi wabah corona ini. Mengingat bahwa penyakit yang datang melalui virus corona cukup mematikan (rata-rata sekitar 3-5 persen kematian dari korban yang telah terpapar virus), lalu obat paten belum ditemukan, maka hanya solusi pencegahan yang menjadi jalan terbaik untuk diupayakan untuk melindungi setiap nyawa warganya.

Merebaknya pandemi Covid-19, menimbulkan permasalahan baru bagi seluruh dunia termasuk Indonesia. Salah satunya pada aspek ketenagakerjaan Indonesia dimana banyak pekerja yang terpaksa dirumahkan dan menyebabkan angka pengangguran melonjak tajam. Di Kabupaten Gowa, pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami peningkatan 4,35 persen tahun 2019 menjadi 6,44 persen pada tahun 2020 sebagai akibat pekerja yang dirumahkan dan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan terbanyak terdampak pada sektor perdagangan, industri dan pariwisata.

Dampak sosial dan ekonomi yang melanda Indonesia akibat pandemi ini memaksa semua level pemerintahan baik pusat dan daerah untuk melakukan koreksi terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Terutama yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran mengingat pada saat menyusun sama sekali tidak memperhitungkan pandemi. Penyesuaian yang tepat dan kebijakan yang terukur dalam menangani wabah corona akan menjadi titik awal untuk pemulihan.

Perencanaan pembangunan pasca covid-19 merupakan tantangan berat, kehidupan normal baru masyarakat dimana sampai saat ini belum ada obat paten yang menjamin untuk menyembuhkan covid-19 menjadikan bahwa hal yang pasti kalau masyarakat akan hidup bersama covid-19. Pemerintah Kabupaten Gowa harus dapat menyusun skenario sendiri dengan asumsi bahwa obat paten yang akan menyembuhkan akan lama ditemukan, dan yang pasti tidak akan terjadi dalam jangka pendek. Bagaimana menggerakkan ekonomi ketika kehidupan normal baru memerlukan perubahan budaya yang sangat drastis akan perilaku masyarakat.

Pemerintah memberikan panduan bagaimana kehidupan normal baru yang harus dilakukan masyarakat dengan merancang program untuk mengakomodir kehidupan normal baru dalam ancaman Covid-19. Kabupaten Gowa berdasarkan Berita Acara Nomor 068/01/TAPD/IV/2020 Tanggal 21 April tahun 2020 menyatakan bahwa TAPD telah melakukan pemotongan atas anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sebesar Rp124.376.354.399,00 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) untuk dialihkan sebagai bagian pembiayaan status daerah Siaga Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Covid-19 di wilayah Kabupaten Gowa sebagai pandemi global sekaligus force majur terhadap pelaksanaan belanja pada SKPD terkait. Hal ini sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Gowa tahun 2020 menunjukkan kondisi yang positif meskipun berada di tengah-tengah pandemi Covid-19. Apalagi, wilayah ini sebelumnya masuk menjadi daerah episentrum penularan, selain Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Meski berada ditengah hantaman pandemi, Pemkab Gowa dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi daerah agar tetap stabil. Indikator keberhasilan ekonomi juga menggambarkan kinerja yang cukup baik di masa pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 mengalami perlambatan akan tetapi masih berada pada kondisi positif. Trend pertumbuhan ekonomi daerah di masa pandemi masih positif yaitu sekitar 1,76 persen. Indikator keberhasilan yang menyebabkan pertumbuhan

ekonomi tetap positif, salah satunya adalah pendapatan perkapita di Kabupaten Gowa mengalami peningkatan, di mana pada 2019 mencapai Rp 27,10 juta dan di 2020 naik sebesar 1,29 persen atau Rp 27,45 juta.

Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa di tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 1.883.817.352.305,74 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 241.469.562.565,34, Pendapatan Transfer sebesar Rp 1.396.731.032.740,40, Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp 245.616.757.000,00.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp 115.543.741.226,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 3.092.501.728,44 atau 2,75% jika dibanding tahun 2019 yang hanya sebesar Rp 112.451.239.497,56. Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp 66.507.429.022,99, mengalami penurunan sebesar Rp 12.853.404.527,01 atau 16,20% jika dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp 79.360.833.550,00. Hal ini disebabkan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar yang mengakibatkan tidak beroperasinya tempat wisata/tempat hiburan, penginapan, sepiunya area parkir, penyewaan gedung, jasa usaha terminal, dan lain sebagainya sebagai objek pungut retribusi. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan di tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 4.342.158.893,00 mengalami penurunan sebesar Rp 624.830.024,00 atau 12,58% jika dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp 4.966.988.917,00. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 55.076.233.423,35. mengalami peningkatan sebesar Rp 13.615.724.413,24 atau 32,84% jika dibanding tahun 2019 yang hanya sebesar Rp 41.460.509.010,11.

Realisasi Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH, DBHBP) sebesar Rp 1.217.293.801.285,00 mengalami penurunan sebesar Rp 41.611.048.831,00 atau 3,31% jika dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp 1.258.904.850.116,00. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya di tahun 2020 sebesar Rp 51.144.603.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp 116.928.223.000,00 atau 69,57% jika dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp 168.072.826.000,00. Transfer Pemerintah Propinsi sebesar Rp 90.192.159.355,40 mengalami penurunan sebesar Rp 11.691.038.394,57 atau 11,47% jika dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp 101.883.197.749,97. Bantuan Keuangan di tahun 2020 sebesar Rp 38.100.469.100,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 24.185.165.500,00 atau

173,80% jika dibanding tahun 2019 yang hanya sebesar Rp 13.915.303.600,00. Realisasi Pendapatan Transfer cenderung mengalami penurunan disebabkan adanya refocusing anggaran untuk pencegahan dan penanganan covid-19. .

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah sebesar Rp 98.883.540.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 95.406.540.000,00 atau 2743,93% merupakan pendapatan hibah kepada PDAM Tirta Je'neberang sebesar Rp 3.000.000.000,00 dan Hibah Dana Bos sebesar Rp 95.883.540.000,00 jika dibanding tahun 2019 yang hanya sebesar Rp 3.477.000.000,00. hanya merupakan pendapatan hibah kepada PDAM Tirta Je'neberang. Lain-lain Pendapatan yang Sah yang bersumber dari Dana Desa di tahun 2020 sebesar Rp 146.733.217.000,00.

3.6. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN NON PEMERINTAH

Jenis pembiayaan non-anggaran pemerintah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah dalam menyediakan infrastruktur, terutama dari segi pembiayaan dan sumber pendanaan. Dalam pembiayaan infrastruktur efisiensi diartikan sebagai sebuah ukuran mengetahui sejauh mana besaran sumber daya yang digunakan dalam mencapai hasil yang disepakati, sedangkan efektivitas dapat diartikan sebagai sejauh mana instrumen dapat memberikan akses yang andal dan memadai secara tepat waktu. CSR dapat dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur dengan biaya investasi rendah hingga menengah. Prinsip CSR adalah bentuk tanggung jawab dari perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan untuk membangun infrastruktur sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan pembangunan yang ada di daerah. Pemanfaatan CSR tidak menimbulkan risiko yang besar, karena pemerintah, swasta maupun masyarakat mendapatkan manfaat yang seimbang dalam jangka panjang. Bentuk CSR yang telah dilaksanakan di tahun 2020 oleh PT Bank Sulselbar Cabang Gowa menyerahkan bantuan penanganan Covid-19 berupa uang tunai sebesar Rp 100 juta kepada PKK Kabupaten Gowa di Posko Induk Penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa. Hal ini merupakan bentuk dukungan Bank Sulselbar kepada Pemerintah Kabupaten Gowa untuk penanganan Covid-19 di Gowa.

PT Tirta Fresindo Jaya (PT TFJ) Mayora Group terus

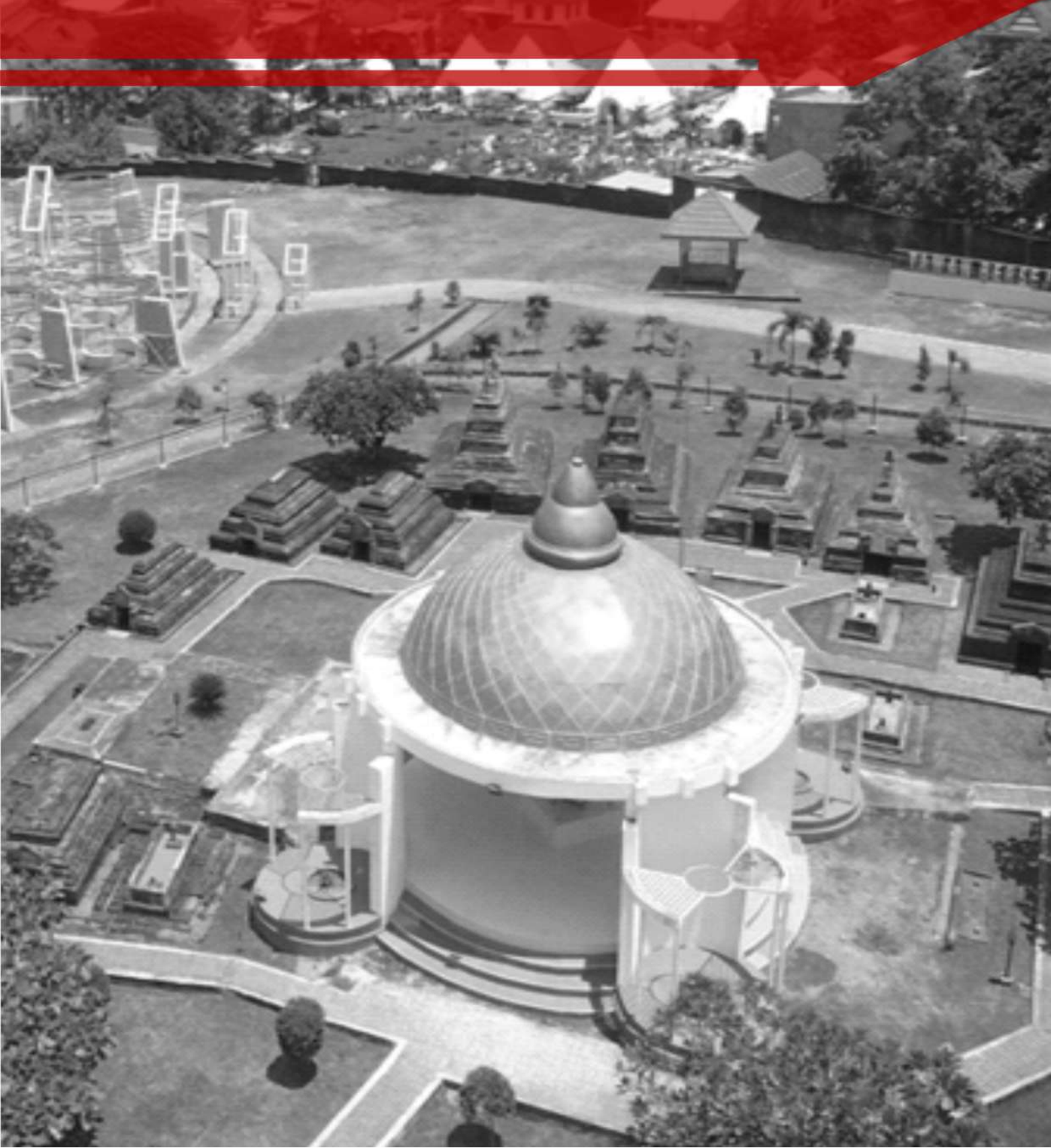
mengoptimalkan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau program tanggung jawab sosial kepada masyarakat lingkungan perusahaan. PT Tita Fresindo Jaya yang memiliki pabrik produk Mayora di Kabupaten Gowa berfokus melakukan penghijauan di sejumlah lokasi di Kabupaten Gowa Tahun 2020. Penanaman bibit pohon untuk penghijauan telah dilakukan di beberapa titik, di desa manimbahoi Kecamatan Parigi, sekitar 2.000 bibit pohon yang disiapkan untuk penghijauan, selanjutnya beralih ke desa pakkatto kecamatan Bonto Marannu kab Gowa.

Pemerintah Kabupaten Gowa menyerahkan Satu Unit Mobil Tangki kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gowa di Tahun 2021. Mobil tangki ini bantuan dari Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bank Sulselbar Cabang Gowa, dengan adanya bantuan CSR berupa mobil tangki ke PDAM tentu akan memberikan kemampuan kepada PDAM untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat utamanya diluar pelanggan PDAM dengan lebih baik, maksimal dengan cakupan lebih luas.

PLN UIW SULSELBAR memberikan bantuan senilai Rp100 juta untuk pembangunan Musalah SMP Kalle Mandalle Rp20 juta, bantuan penambahan fasilitas kelas SMP Sumbarrang Rp40 juta, dan bantuan APD RSUD Syech Yusuf Gowa senilai Rp 40 juta pada kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Gowa, Desa Bone, Kecamatan Bajeng serta bantuan Bedah Rumah IKPLN senilai Rp500 juta di kantor PLN UIW SULSELBAR.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Gowa dalam kurun waktu 2016-2020 telah membuahkan hasil yang diharapkan, tetapi untuk pembangunan kedepan masih terdapat permasalahan dan tantangan dari berbagai dimensi pembangunan. Berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Gowa dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal yang terjadi sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor baik pada skala lokal kabupaten, provinsi maupun nasional. Permasalahan-permasalahan tersebut timbul karena kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, adanya kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan pembangunan daerah adalah perbedaan/kesenjangan (gap) pencapaian antar kinerja pembangunan daerah yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa akan datang, utamanya pada akhir periode RPJMD yaitu tahun 2026.

Uraian secara rinci pada Bab ini meliputi : Permasalahan pembangunan daerah yang dibagi menjadi dua aspek tujuan pembangunan daerah yaitu kesejahteraan masyarakat dan aspek Daya Saing. Pada aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari 15 indikator sasaran dan pada aspek Daya Saing terdidi dari dua indikator sasaran pembangunan. Sementara permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Daerah (Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah) dan isu-isu strategis baik global, nasional maupun isu strategis pembangunan daerah.

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan Pembangunan Daerah menjelaskan perbedaan hasil pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam periode tertentu dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dibuat. Permasalahan Pembangunan Daerah ini diklasifikasi dalam dua level permasalahan yaitu permasalahan pada level makro (untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah) dan permasalahan pada level mikro (untuk penentuan program prioritas daerah menurut urusan pemerintahan, baik urusan wajib dan urusan pilihan maupun urusan penunjang).

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dirumuskan dengan menggunakan tiga tingkatan masalah, yaitu masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Masalah pokok adalah masalah yang bersifat makro bagi daerah, dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Sementara Masalah adalah uraian dari beberapa penyebab dari masalah pokok,

dipecahkan melalui rumusan strategi, sedangkan akar masalah adalah uraian yang lebih rinci dari penyebab masalah, dan dipecahkan melalui arah kebijakan. Penuntasan permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu esensi dari tujuan pembangunan daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan tahap demi tahap.

Permasalahan pembangunan daerah menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks, baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah.

Dari hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah, telah teridentifikasi sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan isu strategis daerah yang ingin diselesaikan dalam Lima tahun ke depan, Pada Bab ini menjelaskan beberapa permasalahan pembangunan daerah, sektoral atau permasalahan menurut urusan pemerintahan urusan wajib. Masalah pembangunan.

4.1.1 Permasalahan Pembangunan untuk Penentuan Prioritas Daerah

4.1.1.1 Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Gowa ditunjukkan oleh peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Perkembangan IPM Kabupaten Gowa selama periode 5 tahun terakhir memperlihatkan trend peningkatan. Data IPM Kabupaten Gowa tahun 2016 sebesar 67,70 berada pada kategori menengah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga di tahun 2020 sebesar 70,14 berada pada kategori tinggi. Meskipun terjadi peningkatan setiap tahunnya namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan IPM Sulawesi Selatan sebesar 71,93. Capaian IPM Kabupaten Gowa ini secara relatif di tahun 2016 berada di urutan 13 dari 23 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan meningkat di tahun 2020 di urutan ke-9.

Penyebab masih rendahnya IPM Kabupaten Gowa adalah masih rendahnya rata-rata lama sekolah yaitu hanya 8,19 tahun, lamanya sekolah hanya sampai kelas VIII (kelas 2 SMP). Beberapa hal yang menjadi akar masalah dari rendahnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gowa yaitu masih rendahnya pemerataan akses layanan Pendidikan yang tercermin dari data partisipasi PAUD, APM SMP, APS SD, Angka melanjutkan SD ke SMP, Rasio ketersediaan SD dan rasio guru murid yang menunjukkan trend menurun.

Pembangunan sektor kesehatan memperlihatkan bahwa angka umur harapan hidup kabupaten Gowa tahun 2020 sebesar 70,43 tahun lebih rendah jika dibandingkan dengan umur harapan hidup Sulawesi Selatan 70,57 tahun. Umur Harapan Hidup Sulawesi Selatan yang masih rendah menunjukkan kinerja pembangunan sektor kesehatan yang belum maksimal yang diindikasikan dengan tingginya

angka kematian ibu dan anak akibat penurunan komplikasi kebidanan yang ditangani dan pertolongan persalinan oleh bidan.

Sementara itu tingkat daya beli masyarakat Kabupaten Gowa yang masih tergolong rendah menjadi salah satu faktor rendahnya pembangunan manusia. Daya beli masyarakat yang disetarakan dengan pengeluaran perkapita sangat tergantung pada tingkat pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Data terakhir menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Kabupaten Gowa tahun 2020 yang diukur dari besaran pengeluaran perkapita pertahun masih lebih rendah dari capaian Sulawesi Selatan pada tahun yang sama, hal ini disebabkan karena pendapatan masyarakat masih rendah.

Dari pembangunan perspektif gender diukur berdasarkan beberapa indikator, diantaranya adalah Indek Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IGD). Dimana IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki. IPG di Kabupaten Gowa Selatan dua tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 0,277 persen hal ini disebabkan karena IPG di kabupaten Gowa terjadi kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan pada kegiatan bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian.

Sementara itu Perkembangan IDG Kabupaten Gowa mengalami fluktuasi dalam 3 tahun terakhir yaitu sebesar 69,01 ditahun 2017 menurun sebesar 61,06 ditahun 2018 dan kembali meningkat ditahun 2019 sebesar 78,3. Angka ini berada di atas angka IDG Sulawesi Selatan (76,01). Kenaikan angka IDG Kabupaten Gowa secara umum disebabkan oleh meningkatnya seluruh komponen pembentuk IDG di tahun 2019. IDG diperoleh dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan, dengan demikian IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.

Perkembangan keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional di Kabupaten Gowa di tahun 2019 angka indeks telah mencapai 48,45 persen yang masih lebih rendah dengan rata-rata Sulawesi Selatan sebesar 53,02 persen yang artinya tenaga profesional di Kabupaten Gowa yang berperan pula sebagai pengambil keputusan masih perlu ditigkatkan hingga mengalami kesetaraan gender. Perempuan di Kabupaten Gowa mampu mengejar ketertinggalan dari laki-laki dalam sektor publik. Kemampuan perempuan dalam penciptaan pendapatan di Kabupaten Gowa secara trend terus mengalami peningkatan dan lebih tinggi dari rata-rata Sulawesi Selatan sebesar 34,09 persen (Sulawesi Selatan = 32,44 persen) artinya sumbangan pendapatan perempuan cenderung lebih baik di Sulawesi Selatan. Keterlibatan perempuan dalam parlemen cukup berpengaruh terhadap ketimpangan IDG. Kabupaten Gowa sebagai kabupaten dengan nilai IDG 78,31 persen, memiliki angka indeks keterlibatan perempuan dalam parlemen yang cukup baik sebesar 28,89 persen masih diatas rata-rata Sulawesi Selatan sebesar 27,71 persen.

Potensi SDM Pemuda di kabupaten Gowa masih sangat besar berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 jumlah pemuda di kabupaten Gowa yang berusia 16-30 tahun sekitar 262.947 jiwa atau 34,33 persen dari total penduduk Kabupaten Gowa. Hal tersebut berarti satu dari tiga penduduk kabupaten Gowa adalah pemuda. Sementara Indeks Pembangunan Pemuda sebagai salah satu indikator untuk menilai kemajuan pembangunan tahun 2020 masih berada pada kategori rendah sebesar 41,50 persen.

4.1.1.2 Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi

Sebagai upaya dalam melihat kinerja perekonomian sebuah daerah terdapat dua perspektif yang berbeda yang meliputi pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan melalui pertumbuhan PDRB Kabupaten Gowa dan perspektif pemerataan. Dalam hal ini pertumbuhan perekonomian Kabupaten Gowa selama kurun waktu 2016-2020 yakni dimana pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa tumbuh diangka 7,57 persen, namun capaian tersebut melambat jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang tumbuh mencapai 7,21 persen. Pelambatan pertumbuhan ekonomi juga terjadi pada tahun 2018, bahkan pertumbuhan ekonomi melambat pada angka 7,14 persen dan kembali menguat di tahun 2019 yang tumbuh menjadi 7,46 persen namun akibat pandemi covid-19 kembali melemah ditahun 2020 menjadi 1,76 persen.

Permasalahan melambatnya pertumbuhan ekonomi ini tentu melibatkan berbagai sektor yang perlu diprioritaskan intervensinya. Sedangkan dalam PDRB terdapat sektor yang mengalami perlambatan yaitu sektor pertanian. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Gowa dalam penanganan program pertanian kedepan.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa terutama dikontribusi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor ini terus menunjukkan pertumbuhan yang melambat sejak tahun 2016, dan pada tahun 2019, sektor ini hanya bertumbuh 1,08 persen yang merupakan pertumbuhan terendah dalam satu dekade terakhir. Padahal sektor ini masih menjadi motor penggerak pembentukan PDRB Kabupaten Gowa, yaitu rata-rata 27,01 persen pada tahun 2019. Motor penggerak perekonomian kabupaten Gowa tahun 2019 adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 27 persen, Perdagangan sebesar 13 persen dan Konstruksi sebesar 12 persen total ketiga lapangan usaha ini 52 persen. Pengembangan industri pengolahan skala menengah yang berbahan baku lokal dan banyak menyerap tenaga kerja sangat prospek dikembangkan di kabupaten Gowa yang akan mendongkrak pertumbuhan perekonomian daerah.

Struktur PDRB Kabupaten Gowa menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Sulawesi

Selatan, yaitu 61,34 persen. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Komponen PMTB dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yaitu sebesar 31,09 persen dan 9,64 persen. Komponen Ekspor Barang dan Jasa juga memiliki kontribusi cukup besar, namun impor sebagai pengurangnya justru lebih besar daripada ekspor. Sedangkan peranan Komponen PK-LNPRT dan Perubahan Inventori relatif kecil.

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir RumahTangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasanya yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto(PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Gowa ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Gowa maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Oleh karena itu menjaga income masyarakat karena konsumsi Rumah tangga sebagai penggerak utama ekonomi sangat penting dan perlunya menjaga income masyarakat dapat berupa peningkatan pendapatan atau pengurangan biaya konsumsi.

Disamping itu pengeluaran konsumsi pemerintah sangat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, maka akselerasinya lebih diperhatikan pada tahun mendatang. Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2015 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 1.671,40 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya meningkat terus menjadi 2.508,30 miliar rupiah pada tahun 2019. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas. Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.

Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah perkapita baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah perkapita. Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” ini menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata

per penduduk. Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah sebesar 12,37 persen dan untuk konsumsi perkapita 10,62 persen.

4.1.1.3 Ketimpangan Pendapatan Masyarakat

Salah satu masalah yang dihadapi saat ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat sehingga mempengaruhi tingkat kemiskinan, jika dilihat tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gowa tergolong relatif baik. Selama kurun waktu 2016 – 2020, PDRB per kapita Kabupaten Gowa meningkat dari Rp 15,47 Juta di tahun 2016 menjadi Rp 21,53 juta di tahun 2020, walaupun demikian besaran PDRB per kapita Kabupaten Gowa ini tahun 2020 lebih rendah bila dibandingkan dengan PDRB per kapita Sulawesi Selatan Rp. 56,51 Juta.

Masalah ketimpangan pendapatan memang bukan isu yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Nilai indeks gini Kabupaten Gowa tahun 2016 sebesar 0,34 meningkat menjadi 0,35 ditahun 2019 walaupun masih berada pada kategori kesenjangan yang sedang dan lebih rendah dari gini rasio provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,40 berada pada ketimpangan kategori tinggi.

Gini rasio Kabupaten Gowa hingga tahun 2019 menunjukkan kecenderungan yang terus membaik dan secara relatif masih menunjukkan ketimpangan yang lebih rendah dari ketimpangan Sulawesi Selatan pada tahun yang sama. Selain itu bila dibandingkan dengan Rasio Gini di daerah tetangga maka tingkat ketimpangan Kabupaten Gowa masih lebih baik dengan tiga Kabupaten/Kota lainnya, yakni Makassar, Takalar dan Maros namun juga tergolong cukup tinggi apabila dibandingkan dengan nilai Rasio Gini daerah lain misalnya Kabupaten dengan nilai Rasio Gini hanya sebesar 0,357 pada tahun 2016.

Peningkatan pendapatan 40 persen penduduk termiskin belum tumbuh secepat pendapatan 20 persen penduduk terkaya sehingga kesenjangan tersebut semakin melebar. Dengan demikian, untuk memperkecil ketimpangan tersebut, perlu dilakukan program-program afirmatif dalam rangka peningkatan pendapatan penduduk miskin.

4.1.1.4 Tingkat Pengangguran yang masih meningkat

Tingkat pengangguran daerah yang diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gowa pada tahun 2020 sebesar 6,44 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar 4,35 persen dengan persentase angkatan kerja perempuan yang menganggur lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Capaian TPT Kabupaten Gowa lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPT kabupaten Maros sebesar 6,28 persen dan Kabupaten

Takalar sebesar 4,16 persen walaupun masih lebih baik jika dibandingkan capaian TPT Kota Makassar sebesar 15,92 persen.

Masih tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Gowa tersebut terutama disebabkan oleh faktor kualitas sumber daya manusia yang masih tergolong rendah. Disamping itu ketersediaan Pendidikan vokasional belum mampu menciptakan *link and match* antara kurikulum vokasional dengan kebutuhan dunia industri. Selain itu, ketersediaan kesempatan kerja dari pengelolaan kegiatan dan sektor ekonomi yang masih berorientasi padat modal dari pada padat karya dan adanya kondisi ekonomi nasional dan daerah yang tidak stabil.

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah yang penting karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Diantaranya aspek sosial dan aspek ekonomi. Tujuan memperluas kesempatan kerja adalah penting, bukan saja karena kesempatan kerja memiliki nilai ekonomis, melainkan juga karena mengandung nilai kemanusiaan dan menumbuhkan rasa harga diri. Kebijakan kesempatan kerja tidak semata-mata ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga penggunaan tenaga kerja secara penuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Pengalaman membuktikan bahwa banyak gejolak sosial seperti meningkatnya angka kriminal. Untuk mengantisipasi hal itu, maka setiap upaya pembangunan yang dilakukan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha.

4.1.1.5 Masih Tingginya Tingkat Angka Kemiskinan

Kemiskinan Kabupaten Gowa masih menjadi isu yang dihadapi oleh Pemerintahan Kabupaten Gowa. Walaupun secara kuantitas jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurun, namun masih belum dapat diselesaikan secara menyeluruh karena penurunan kemiskinan belum menurun secara signifikan. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kabupaten Gowa masih lebih tinggi dibandingkan daerah tetangga Makassar. Padahal isu kemiskinan di Kabupaten Gowa juga menjadi perhatian dalam Pembangunan Kabupaten Gowa 5 tahun mendatang (2021-2026) karena jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gowa pada tahun 2020 sekitar 7,38 persen, masih cukup tinggi apabila dibanding dengan persentase penduduk miskin Kota Makassar sebesar 4,54 persen.

Perhatian Pemerintah juga perlu diberikan terhadap golongan masyarakat yang rawan miskin dan berpotensi kembali miskin karena golongan inilah yang rentan menjadi miskin akibat adanya perubahan kondisi dan kebijakan ekonomi.

Kemiskinan harus dilihat dalam berbagai dimensi, bukan semata dimensi ekonomi saja sehingga penyelesaiannya harus mencakup berbagai bidang. Kecenderungan kemiskinan di Kabupaten Gowa terjadi karena kurangnya kesempatan, keterbatasan kepemilikan aset/barang, serta akses terhadap pelayanan sosial. Rendahnya tingkat pendapatan keluarga miskin tidak lepas dari

aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh kepala keluarga dan anggotanya, dan akan menjadi lebih parah ketika kepala keluarga atau anggotanya tidak bekerja. Sementara itu, kepemilikan aset juga terbatas, yang berarti orang miskin akan menempati kawasan-kawasan kurang layak huni dengan fasilitas yang terbatas sehingga dapat menimbulkan masalah kesehatan.

Masalah kemiskinan yang tidak kunjung teratasi dapat menimbulkan pengaruh terhadap ketenteraman dan ketertiban umum. Gangguan dan masalah sosial yang timbul dalam masyarakat kerap dipicu oleh tekanan kemiskinan. Pemenuhan kebutuhan dasar serta pemberdayaan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Dalam penanggulangan kemiskinan diperlukan akses pemberdayaan yang mengacu kepada karakter, kapasitas dan potensi penerima.

Secara detail, rumusan masalah pokok, masalah, dan akar masalah secara lengkap dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4. 1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa

No.	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Indeks Pendidikan (tahun)	Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Masih rendahnya akses, kualitas, serta kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, kualitas guru, mutu proses pembelajaran serta budaya literasi pada satuan pendidikan dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang ▪ Kuantitas dan kurang meratanya penyebaran guru antar wilayah ▪ Ketersediaan sarana dan perpustakaan Perpustakaan yang masih kurang ▪ Masih minimnya pengembangan kurikulum berbasis Pendidikan Karakter dan teknologi informasi ▪ Masih rendahnya kualitas SDM bidang pendidikan ▪ Menurunnya capaian APK SMP

No.	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menurunnya Angka Pendidikan SD dan SMP; ▪ Menurunnya % guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
2	Indeks Kesehatan (tahun)	Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masih rendahnya Angka Harapan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya kesejahteraan penduduk ▪ Rendahnya derajat Kesehatan ▪ Menurunnya prevalensi kekurangan gizi ▪ Masih tingginya kasus gizi buruk balita ▪ Rendahnya asupan pangan dan gizi seimbang ▪ Tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI/ AKB) ▪ Belum mencukupi dan meratanya tenaga Kesehatan ▪ menurunnya rasio tenaga medis ▪ menurunnya cakupan pertolongan oleh tenaga Kesehatan ▪ menurunnya cakupan pelayanan Kesehatan masyarakat miskin
5	Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB (%)	Melambatnya pertumbuhan ekonomi	Belum optimalnya Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat Pemerataan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) belum

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

No.	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan dan Industri dan Pengolahan	<p>merata ke setiap golongan miskin</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya untuk mengembangkan nilai tambah dari hasil sumber daya alam ▪ Pembangunan yang belum sepenuhnya berorientasi pada pemerataan Produk hasil- hasil ekonomi ke seluruh penduduk, ▪ Masih rendahnya pendapatan masyarakat ▪ Adanya kontraksi dari sektor pertanian dan industri pengolahan yang mempengaruhi nilai PDRB. ▪ Memperkuat dukungan sarana-prasarana pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kurang optimalnya peran sumber-sumber pertumbuhan pada kawasan tersebut disertai dengan koordinasi penanggulangan kemiskinan; ▪ Kurangnya Penguatan peran pusat-pusat pertumbuhan sektor unggulan
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat Pengangguran yang masih meningkat	tingginya jumlah penduduk miskin yang menganggur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya daya beli penduduk ▪ Tingkat produktifitas masyarakat yang rendah. ▪ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

No.	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
				<p>yang terus meningkat</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki Rendahnya Pemberian skills pada usia produktif agar dapat mandiri sektor usaha mikro, sektor usaha kecil, dan sektor usaha menengah, dapat menjadi penyelemat krisis ekonomi seperti Covid -19
7	Angka Kemiskinan (%)	Masih Tingginya Tingkat Angka Kemiskinan	Masih tingginya ketimpangan distribusi pendapatan antar masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat kesenjangan pembangunan antar daerah, desa dan kota masih tinggi Adanya kesenjangan pendapatan antar golongan penduduk dan antar sektorserta antar daerah.
8	Gini Ratio (Nilai)	Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Masih tingginya ketimpangan distribusi pendapatan antar masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat kesenjangan pembangunan antar daerah, desa dan kota masih tinggi Adanya kesenjangan pendapatan antar golongan penduduk dan antar sektorserta antar daerah.
9	Indeks Infrastruktur Daerah (Nilai)	vBelum optimalnya kualitas infrastruktur layanan dasar masyarakat	Belum berkualitasnya ketersediaan infrastruktur dasar	<ul style="list-style-type: none"> adanya kesenjangan antar Kecamatan yaitu pemenuhan perumahan dan pemukiman. Rumah atau

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

No.	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
				<p>tempat tinggal belum merata.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya konektivitas antara pusat-pusat kegiatan dan antara pusat kegiatan dengan kawasan perdesaan melalui pembangunan infrastruktur wilayah yang terpadu dan terintegrasi antar moda transportasi guna menghubungkan lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat pertumbuhan;
10	Indeks Desa Membangun (Nilai)	Belum optimalnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan	Belum optimalnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur layanan dasar masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perencanaan tata ruang Desa dan pengembangan kawasan perdesaan belum optimal. ▪ Belum adanya kerjasama antar Desa yang telah memiliki legal standing ▪ Administrasi Pemerintahan Desa ▪ Belum Optimal.
11	Indeks Pelayanan Publik (Nilai Kategori)	Belum optimalnya pelayanan publik	Belum terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infrastruktur pelayanan publik yang belum terintegrasi ▪ Aksesibilitas Sistem informasi Pelayanan publik yang belum optimal ▪ Penetrasi penggunaan teknologi masih rendah. ▪ Mekanisme pelaporan dan evaluasi masih konvensional atau belum efektif diimplementasikan.
12	Nilai LPPD (Nilai Kategori)	Tata Kelola pemerintahan yang belum	Masih Belum efektifnya kualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kompetensi

No.	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		optimal	penyelenggaraan kinerja Instansi pemerintahan Daerah	sumber daya aparatur. • Belum optimalnya Penataan dan penguatan kelembagaan. • Belum optimalnya Pembinaan dan pengawasan administrasi dan keuangan daerah. • Kurang optimalnya pengawasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

4.1.2 Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah)

4.1.2.1 Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar

1. Pendidikan

- a. Menurunnya angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar (APK) pada tingkat SD dan SMP
- b. Menurunnya partisipasi penduduk usia sekolah dalam pendidikan dasar
- c. Menurunnya lulusan sekolah dasar yang melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama
- d. Masih terbatasnya ketersediaan sekolah bagi penduduk sekolah usia pendidikan dasar
- e. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV masih rendah;
 - a. Akses sekolah yang masih cukup jauh khususnya pada wilayah terpencil dataran tinggi
 - b. Masih terdapat sekolah dengan kondisi bangunan yang kurang baik
 - c. Terbatasnya sarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran secara daring
 - d. Minimnya edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya pendidikan dalam proses keberdayaan masyarakat
 - e. Belum optimalnya gerakan literasi sejak dini
 - f. Masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV
 - g. Belum optimalnya dukungan sekolah terhadap pengembangan pendidikan guru
 - h. Masih terdapat kelurahan dan desa yang belum memiliki sarana PAUD
 - i. Masih rendahnya partisipasi anak dalam PAUD

2. Kesehatan

- a. Ketersediaan obat masih sangat terbatas sehingga masyarakat harus membeli di luar
- b. Masih tingginya angka kematian ibu
- c. Belum optimalnya kunjungan ibu hamil K4
- d. Belum optimalnya pelayanan nifas
- e. Menurunnya cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
- f. Belum optimalnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan
- g. Masih terdapat kasus Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
- h. Belum optimalnya penanganan balita pneumonia
- i. Belum optimalnya imunisasi dasar lengkap bagi bayi
- j. Belum optimalnya pelayanan anak balita
- k. Masih tingginya kasus gizi buruk
- l. Rendahnya penemuan kasus dan penanganan penderita TBC
- m. Minimnya penanganan pada penderita diare
- n. Minimnya penyelidikan epidemiologi pada desa keluarahan yang mengalami KLB
- o. Belum optimalnya pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
- p. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat miskin

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang

- a. Belum optimalnya akses air minum bagi penduduk
- b. Belum optimalnya layanan pengolahan air limbah domestik
- c. Belum optimalnya proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan
- d. Masih banyaknya daerah yang terjadi genangan
- e. Belum optimalnya penyediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan
- f. Masih kurangnya rumah tangga bersanitasi
- g. Masih kurangnya Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air
- h. Masih terdapat drainase dalam kondisi kurang baik
- i. Masih terdapat ruas jalan dalam kondisi kurang baik

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

- a. Masih rendahnya kawasan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
- b. Meningkatnya persentase permukiman kumuh kawasan perkotaan
- c. Masih rendahnya kawasan permukiman yang tertata
- d. Belum optimalnya ketersediaan rumah layak huni

5. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

- a. Masih terbatasnya cakupan petugas perlindungan masyarakat
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam penertiban seperti tidak adanya gudang barang sitaan
- c. Masih terbatasnya tenaga penyidik pegawai negeri sipil
- d. Belum optimalnya waktu tanggap penanganan bencana kebakaran
- e. Masih rendahnya cakupan pelayanan kebakaran

6. Sosial

- a. Masih terdapat wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang belum menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
- b. Tidak optimalnya pendataan fakir miskin di lapangan oleh operator
- c. Masih terbatasnya SDM profesional yang ada di desa dan kelurahan dalam pelaksanaan proses verifikasi dan validasi DTKS dinas sosial
- d. Masih terbatasnya SDM dalam proses pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS
- e. Tidak adanya tenaga profesional khusus untuk penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar
- f. Tidak terdapat fasilitas rumah singgah untuk orang terlantar

4.1.2.2 Urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar

1. Tenaga Kerja

- a. Rendahnya penyelesaian kasus dengan perjanjian bersama
- b. Masih terdapat pencari kerja terdaftar yang belum ditempatkan
- c. Minimnya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi
- d. Belum optimalnya pelatihan kewirausahaan bagi tenaga kerja

2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- a. Minimnya partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan
- b. Belum optimalnya partisipasi perempuan dari kursi DPRD
- c. Minimnya partisipasi perempuan di lembaga swasta
- d. Masih tingginya kasus KDRT

3. Pangan

- a. Masih rendahnya ketersediaan pangan utama
- b. Belum optimalnya ketersediaan energi dan protein perkapita

4. Pertanian

- a. Masih minimnya lahan yang bersertifikat

5. Lingkungan hidup

- a. Belum adanya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan integrasi ke dalam rencana pembangunan

- b. Belum optimalnya kegiatan peningkatan kualitas air
 - c. Belum optimalnya kegiatan peningkatan kualitas udara
 - d. belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
 - e. Minimnya kapasitas dan sarana prasarana penagwas lingkungan hidup
 - f. Belum optimalnya penanganan sampah
 - g. Minimnya tempat pembuangan akhir sampah yang hanya memiliki satu di Kecamatan Bajeng
 - h. Masih rendahnya upaya pengurangan sampah melalui 3R
- 6. Administrasi kependudukan dan pencataan sipil**
- a. Masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP
 - b. Masih terdapat bayi yang belum memiliki akte kelahiran
 - c. Masih banyaknya pasangan yang belum memiliki akte nikah
 - d. Belum optimalnya penerbitan KTP
 - e. Belum optimalnya penerbitan akte kelahiran
 - f. Minimnya edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya identitas administrasi kependudukan
- 7. Pemberdayaan masyarakat dan desa**
- a. Rendahnya LPM berprestasi
 - b. Tidak optimalnya pembinaan LPM
 - c. Rendahnya dukungan swadaya masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat
- 8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana**
- a. Masih rendahnya peran aktif perangkat daerah dalam pembangunan daerah melalui kampung KB
 - b. Masih minimnya pelayanan KB pada pasangan usia subur
 - c. Belum optimalnya pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun
 - d. Masih rendahnya tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi jangka panjang
 - e. Belum optimalnya bina keluarga balita, remaja, dan lansia ber-KB
 - f. Minimnya pusat pelayanan keluarga sejahtera di kecamatan
 - g. Belum optimalnya cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri
 - h. Masih minimnya ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi A
 - i. masih rendahnya pemahaman keluarga yang memiliki balita dan anak tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
- 9. Perhubungan**
- a. Masih banyaknya angkutan umum yang tidak memiliki KIR
 - b. Belum optimalnya peningkatan angkutan umum massal untuk mengatasi kemacetan

- 10. Komunikasi dan informatika**
 - a. belum optimalnya pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan
 - b. Masih rendahnya rumah tangga dengan akses internet
 - c. Minimnya fasilitasi website di instansi pemerintah
- 11. Koperasi, usaha kecil dan menengah**
 - a. Masih banyak koperasi yang tidak aktif
 - b. Masih terdapat banyak UKM non BPR/LKM yang tidak aktif
 - c. Tidak optimalnya pembinaan kelompok UMKM
- 12. Penanaman modal**
 - a. Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pelayanan
 - b. masih rendahnya promosi penanaman modal yang dilakukan
 - c. Masih terbatasnya kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sehingga masih ada pelaku usaha yang tidak melaporkan kegiatan penanaman modal (LKPM)
- 13. Kepemudaan dan Olahraga**
 - a. Tidak optimalnya pengembangan wirausaha muda
 - b. Masih minimnya pelatih yang bersertifikat
 - c. Belum optimalnya pembinaan atlet pada pelajar
 - d. Minimnya atlet berprestasi
- 14. Statistik**
 - a. Belum tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi
 - b. Perlunya peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral
 - c. Kurangnya dorongan keterbukaan badan informasi publik
- 15. Persandian**
 - a. Minimnya peningkatan kompetensi SDM persandian dalam pengamanan aplikasi atau sistem elektronik di lingkungan perangkat daerah
- 16. Kebudayaan**
 - a. Penyelenggaraan festival seni dan budaya belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat khususnya pada wilayah dataran tinggi
 - b. Minimnya karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi
- 17. Perpustakaan**
 - a. Rendahnya minat kunjungan perpustakaan dalam kurun waktu satu tahun
 - b. Minimnya koleksi buku yang dimiliki perpustakaan
 - c. Minimnya fasilitas perpustakaan di wilayah penduduk
 - d. Rendahnya dukungan gerakan literasi pada masyarakat
 - e. Tidak terciptanya budaya baca di sekolah dan di masyarakat
 - f. Tidak optimalnya pemanfaatan perpustakaan berbasis aplikasi
 - g. Miinimnya pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat
 - h.

18. Kearsipan

- a. Minimnya pelatihan kearsipan yang dilakukan secara berkelanjutan di setiap perangkat daerah

4.1.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Pariwisata

- a. Masih rendahnya PAD sektor pariwisata
- b. Belum optimalnya pemanfaatan potensi objek wisata
- c. Masih rendahnya publikasi potensi objek wisata yang dapat dikelola
- d. Tidak optimalnya pemasaran objek wisata

2. Pertanian

- a. Masih rendahnya produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal seperti jagung
- b. Minimnya pembinaan pada kelompok tani
- c. Tidak optimalnya penyuluhan pertanian di lapangan
- d. Minimnya peningkatan kualitas SDM penyuluh
- e. Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian
- f. Belum optimalnya penerapan modernisasi pertanian berbasis teknologi
- g. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian

3. Perdagangan

- a. Masih rendahnya ekspor bersih perdagangan
- b. Belum optimalnya pembinaan kelompok pedagang/usaha informal

4. Perindustrian

- a. Belum optimalnya pembinaan kelompok pengrajin

5. Transmigrasi

- a. Masih minimnya sarana dan prasarana di wilayah transmigrasi

6. Kelautan dan perikanan

- a. Tidak optimalnya pembinaan kelompok nelayan
- b. Belum optimalnya tangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman

4.1.2.3 Urusan Penunjang

1. Perencanaan

- a. Belum optimalnya ketersediaan data realisasi kinerja OPD yang menghambat penyusunan dokumen perencanaan
- b. Belum optimalnya penyusunan anggaran dalam rancangan awal perencanaan pembangunan
- c. Belum optimalnya ketersediaan data RTRW
- d. Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan belum optimal

2. **Keuangan**
 - a. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah untuk mendorong pendapatan asli daerah.
3. **Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**
 - a. Masih rendahnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
 - b. Masih rendahnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
 - c. Belum adanya pemetaan kompetensi ASN dalam rangka mendukung jenjang karir ASN di masa yang akan datang
4. **Penelitian dan pengembangan**
 - a. Masih rendahnya rencana implementasi kelitbangan
 - b. Minimn fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah
 - c. Belum adanya inovasi kelitbangan yang diterapkan daerah
 - d. Minimnya kegiatan penelitian dalam pengembangan inovasi
5. **Pengawasan**
 - a. Belum optimalnya tindak lanjut temuan
 - b. Masih terbatasnya pengawas intern pemerintah
 - c. Penilaian akuntabilitas kinerja OPD hanya berorientasi pada nilai bukan pada tindaklanjut kinerja atau pemberian sanksi
6. **Sekretariat dewan**
 - a. Kurang optimalnya SDM dalam fasilitasi tugas dan fungsi DPRD

4.2 ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu strategis merupakan tantangan dan potensi dalam pembangunan ke depan.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

4.2.1 Isu Strategis Internasional/Global

4.2.1.1 Pandemi Covid-19

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika tiba-tiba muncul wabah Covid-19, yang awalnya muncul secara lokal di Wuhan China, lalu merebak dan memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian dunia. Data per-10 Maret 2021 menunjukkan Kabupaten Gowa ada 305 orang yang terkonfirmasi Covid, 3.409 dinyatakan sembuh dan 72 orang dinyatakan meninggal dunia.

Perkembangan krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi ini praktis membuat Pemerintah Daerah harus mundur dengan rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan semula untuk kemudian digantikan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi wabah Covid-19. Tahun 2020 Kabupaten Gowa mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi serta telah dilakukan revisi APBD dengan menyediakan alokasi anggaran yang besar untuk mengatasi wabah corona ini. Mengingat bahwa penyakit yang datang melalui virus corona cukup mematikan (rata-rata sekitar 3-5 persen kematian dari korban yang telah terpapar virus), lalu obat paten belum ditemukan, maka hanya solusi pencegahan yang menjadi jalan terbaik untuk diupayakan untuk melindungi setiap nyawa warganya.

Merebaknya pandemi Covid-19, memunculkan permasalahan baru bagi seluruh dunia termasuk Indonesia. Salah satunya pada aspek ketenagakerjaan Indonesia dimana banyak pekerja yang terpaksa dirumahkan dan menyebabkan angka pengangguran melonjak tajam. Di Kabupaten Gowa, pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami peningkatan 4,35 persen tahun 2019 menjadi 6,44 persen pada tahun 2020 sebagai akibat pekerja yang dirumahkan dan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan terbanyak terdampak pada sektor perdagangan, industri dan pariwisata.

Dampak sosial dan ekonomi yang melanda Indonesia akibat pandemi ini memaksa semua level pemerintahan baik pusat dan daerah untuk melakukan koreksi terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Terutama yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran mengingat pada saat menyusun sama sekali tidak memperhitungkan pandemi. Penyesuaian yang tepat dan kebijakan yang terukur dalam menangani wabah corona akan menjadi titik awal untuk pemulihan.

Perencanaan pembangunan pasca covid-19 merupakan tantangan berat, kehidupan normal baru masyarakat dimana sampai saat ini belum ada obat paten yang menjamin untuk menyembuhkan covid-19 menjadikan bahwa hal yang pasti kalau masyarakat akan hidup bersama covid. Pemerintah Kabupaten Gowa harus dapat menyusun skenario sendiri dengan asumsi bahwa obat paten yang akan menyembuhkan akan lama ditemukan, dan yang pasti tidak akan terjadi dalam jangka pendek. Bagaimana menggerakkan ekonomi ketika kehidupan normal baru memerlukan perubahan budaya yang sangat drastis akan perilaku masyarakat. Pemerintah memberikan panduan bagaimana kehidupan normal baru yang harus dilakukan masyarakat dengan merancang program untuk mengakomodir kehidupan normal baru dalam ancaman Covid-19.

4.2.1.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDG's)

Pembangunan Berkelanjutan adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) adalah 17 tujuan dengan 169 target yang meliputi masalah-masalah pembangunan yang berkelanjutan yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Termasuk didalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan, dan pendidikan, pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, serta melindungi hutan dan laut dengan capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan *SDG's* ini disahkan pada tanggal 25 September 2015, dimana 193 kepala negara hadir dan menandatangani kesepakatan global tersebut sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.

Hasil kesepakatan bersama tingkat global telah ditindaklanjuti pemerintah Indonesia dengan meratifikasinya dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian *SDG's*. Keseriusan dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan *SDG's* tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, dimana *SDG's* sudah menjadi *mainstreaming* untuk pembangunan Indonesia 5 tahun kedepan. Ada 3 prinsip utama implementasi *SDG's* di Indonesia, yaitu; (1) *SDG's* adalah tugas bersama, (2) efek domino implementasi *SDG's*, dan (3) pembiayaan inovatif.

Berdasarkan hasil analisis capaian Indikator TPB di Kabupaten Gowa hingga tahun 2019 hanya berkisar 40,80%. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gowa belum tercapai dengan baik. Umumnya dari 17 TPB yang ada, terdapat 5 TPB yang tingkat pencapaiannya masih dibawah 50%. Untuk itu disepakati TPB yang tingkat pencapaiannya dibawah 50% dijadikan sebagai isu pembangunan berkelanjutan yang perlu mendapatkan perhatian pada periode RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Adapun tingkat pencapaian TPB di Kabupaten Gowa diperlihatkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2 Tingkat Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No. TPB	Tujuan TPB	Kategori				Tingkat Capaian TPB (%)
		A	B	C	D	
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	9	11	1	1	45,00%
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	7	1	1	2	87,50%
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	15	12		5	55,56%
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	5	6		2	45,45%
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	6	5		3	54,55%
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	7	5	5		58,33%
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua				2	0,00%
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	6	3		8	66,67%
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	4	1		4	80,00%
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara	3	2		4	60,00%
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	3	4		1	42,86%
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	2			1	100,00%
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	1	1			50,00%
14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	1			1	100,00%
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	3	1			75,00%

No. TPB	Tujuan TPB	Kategori				Tingkat Capaian TPB (%)
		A	B	C	D	
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	8	2		11	80,00%
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	2	3	1	9	40,00%

A : Dilaksanakan dan mencapai target

B : Dilaksanakan dan belum mencapai target

C : Belum dilaksanakan dan belum mencapai target

D : Tidak ada data

Berdasarkan pada tabel diatas disimpulkan isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gowa yang ditentukan dari TPB yang tingkat pencapaiannya dibawah 50% terdiri dari :

- a. (7) Energi Bersih dan Terbarukan
- b. (1) Tanpa Kemiskinan
- c. (4) Pendidikan
- d. (11) Pemukiman Layak
- e. (17) Peningkatan PDB

Isu energi bersih menjadi isu pembangunan berkelanjutan di karena kan umumnya indikator pada tujuan ini belum dilaksanakan di Kabupaten Gowa. Sementara isu tanpa kemiskinan, pendidikan, menjadi isu pembangunan berkelanjutan dikarenakan indikator pada tujuan ini belum mencapai target.

4.2.1.3 Perubahan Iklim

Pemanasan global merupakan sebuah fenomena yang disebabkan karena meningkatnya jumlah Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer yang diakibatkan berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, perubahan tata guna lahan dan hutan, serta kegiatan pertanian dan peternakan. Gas rumah kaca ini menyerap sebagian dari radiasi inframerah dan memantulkan kembali panas yang terperangkap oleh gas rumah kaca dalam atmosfer. Hal inilah yang mengakibatkan suhu bumi menjadi lebih hangat dan berdampak secara langsung pada bergesernya musim, pendeknya musim hujan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, naiknya permukaan air laut, serta dampak lainnya.

Peran aktif Indonesia terhadap isu perubahan iklim telah ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang *Pengesahan Paris Agreement ToThe United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Dalam Undang-Undang tersebut

dinyatakan komitmen Indonesia secara nasional (Nationally Determined Contribution-NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan dan kerjasama internasional. Pada pertemuan *Conference of the Parties (COP) -24* di Polandia pada tanggal 11 Desember 2018, Indonesia telah menyampaikan strategi dalam upaya menurunkan emisi GRK pada *Talanoa Dialogue*.

Untuk mengantisipasi perubahan iklim dan meminimalisasi dampaknya maka pemerintah provinsi melakukan tiga pendekatan yaitu antisipasi, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Antisipasi dampak perubahan iklim dilakukan pada tataran penyusunan rencana, kebijakan dan program dengan mempertimbangkan isu dampak perubahan iklim dalam pengambilan keputusan. Pada sisi mitigasi, komitmen Pemerintah Provinsi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 11 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca provinsi Sulawesi Selatan. Emisi gas rumah kaca di Provinsi Sulawesi Selatan disumbang oleh beberapa sektor/bidang antara lain pertanian, kehutanan, energi dan transportasi serta bidang limbah. Secara total hasil pengkajian ulang terhadap target penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 5,6% atau setara dengan 300.000 ton CO₂eq setiap tahun yang akan dicapai hingga tahun 2030 dengan menggunakan anggaran pemerintah provinsi. Sejalan dengan itu, dari sisi adaptasi perlu pula dilakukan penguatan kapasitas kepada masyarakat baik individu maupun kelembagaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim khususnya pada daerah-daerah yang rentan. Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tidak dapat dilakukan semata oleh pemerintah provinsi. Oleh karena itu diperlukan pelibatan secara aktif pihak swasta, organisasi sosial kemasyarakatan (CSO), mitra pembangunan dan pemerintah kabupaten/kota sesuai perannya masing-masing.

4.2.1.4 Bonus Demografi

Bonus demografi merupakan fenomena kependudukan karena hanya akan terjadi satu kali ketika proporsi penduduk usia produktif berada lebih dari dua pertiga jumlah penduduk keseluruhan. Indonesia memasuki era bonus demografi yang terjadi akibat berubahnya struktur umur penduduk, digambarkan dengan menurunnya rasio perbandingan antara jumlah penduduk nonproduktif (umur kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap jumlah penduduk produktif (usia 15-64 tahun).

Sejak tahun 2015-2020 penduduk usia produktif Kabupaten Gowa lebih besar jumlah penduduk non produktif yang diperkirakan masih akan berlanjut hingga tahun-tahun kedepan, kondisi ini merupakan bonus demografi yang dimaknai sebagai keuntungan ekonomi yang disebabkan besarnya jumlah penduduk produktif

sehingga dapat memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi yang sering disebut dengan jendela kesempatan.

Potensi tersebut harus dioptimalkan oleh pemerintah kota melalui peningkatan kualitas dan investasi sumber daya manusia (*human capital investment*) mulai dari pendidikan, kesehatan, kemampuan komunikasi, keterampilan, serta penguasaan teknologi. Bonus demografi tidak akan memberikan dampak yang signifikan jika pemerintah tidak melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jika mayoritas penduduk yang berusia produktif memiliki kualitas yang rendah, akan memicu gelombang pengangguran massal dan semakin menambah beban daerah.

Bonus demografi tidak terlepas dari generasi milenial. Generasi milenial dengan kekuatan sebesar itu tentu saja memiliki peranan yang sangat besar pada era bonus demografi. Generasi ini yang akan mencerminkan gambaran bangsa Indonesia apakah menjadi bangsa yang konsumtif atau produktif. Gambaran bangsa ini di antaranya dapat terpantau dari aktivitas sensus.

Bonus demografi menjadi peluang strategis bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan, karena tersedianya sumber daya manusia produktif. Agar bonus demografi menjadi peluang yang menguntungkan di daerah, diperlukan upaya serius semua pihak terutama yang menyangkut peningkatan kualitas SDM, penyiapan tenaga kerja berkualitas dan pembangunan kependudukan. Ketidakmampuan menyiapkan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban daerah.

Jumlah penduduk yang besar pada masa bonus demografi tentu akan meningkatkan penawaran angkatan kerja di Indonesia. Dan penawaran angkatan kerja dalam jumlah yang besar akan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

4.2.1.5 Transformasi Digital

Saat ini dunia sedang memasuki era revolusi industri 4.0 yang mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi pada revolusi industri 1, 2, dan 3 secara umum telah membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dalam melakukan berbagai pekerjaan. Revolusi industri 4.0 memberikan dampak efisiensi dalam proses bisnis dan cara baru di setiap value chain dari suatu produk, walaupun juga menimbulkan disrupsi di berbagai industri.

Revolusi Industri 4.0 kini telah masuk seiring dengan transformasi proses bisnis yang cepat ke arah ekonomi digital. Indonesia menjadi salah satu target bagi para pemain industri dunia yang tengah berebut masuk pasar Indonesia.

Salah satu transformasi model bisnis di era Industri 4.0 adalah penggunaan platform e-commerce oleh pelaku ekonomi. Melalui e-commerce, segala aktivitas transaksi jual-beli barang, promosi, dan

pembayaran dilakukan dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. E-commerce mengalami perkembangan cepat dengan kemudahan yang ditawarkan. Kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi mampu memangkas keterbatasan sarana, jarak dan waktu antara penjual dan pembeli. Saat ini telah banyak bermunculan start up e-commerce dan marketplace yang memudahkan konsumen untuk berbelanja, seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan lainnya.

Transformasi digital para pelaku UMKM di Kabupaten Gowa tidak bisa ditawar lagi, untuk meningkatkan kinerja usaha dan daya saing UMKM itu sendiri sehingga tetap menjadi pilar yang kuat bagi perekonomian. Potensi sistem pertanian digital juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan minat dan kreativitas anak muda menggeluti bidang pertanian yang selama ini mulai menurun. Potensi generasi muda memiliki andil besar dalam perubahan sistem pertanian, karena pemuda lebih adaptif terhadap adanya perubahan dan memiliki semangat yang lebih besar sehingga bisa lebih produktif.

Dengan adanya sistem pertanian digital pemerintah dapat mengontrol komoditas apa yang ditanam dan dipanen dari daerah satu ke daerah lainnya. Melalui sistem ini, pemerintah dapat lebih mudah mengetahui wilayah mana yang sedang surplus dan defisit pangan, mempermudah distribusi dari petani hingga konsumen dengan memperpendek sistem rantai pasok pangan serta tidak ada keterbatasan waktu dan tempat untuk mengakses segala informasi sehingga berpeluang meningkatkan keberdayaan petani.

Pemerintah Kabupaten Gowa berharap dengan sistem pertanian modern akan mampu menurunkan ketimpangan akses pangan, mempercepat pemenuhan kebutuhan pangan dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan perekonomian di Kabupaten Gowa.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

4.2.2.1 Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Penerapan SPM didasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri atas:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataanruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasanpermukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
dan
- f. sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahwa target pencapaian setiap indikator adalah 100% (seratus persen) setiap tahun dari enam urusan tersebut. Dari target tersebut maka menjadi isu pokok yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah capaian indikator mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang belum mencapai 100% sebagaimana capaian kinerja tersebut telah dibahas pada bab II. Adapun yang menjadi isu strategis yaitu upaya pencapaian setiap jenis Pelayanan Dasar kabupaten Gowa yang masih perlu mendapatkan perhatian untuk pembangunan jangka menengah 2021-2026 :

- a. Pelayanan pendidikan anak usia dini ;
- b. Pelayanan kesehatan ibu hamil ;
- c. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- d. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir ;
- e. Pelayanan kesehatan balita ;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar ;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia produktif ;
- h. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut ;
- i. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi ;
- j. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus ;
- k. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat ;
- l. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis (Tb) ;
- m. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immuno deficiency virus*) ;
- n. Kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- o. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
- p. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- q. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- r. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti ;
- s. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;

4.2.3 Isu Strategis Pembangunan Daerah

4.2.3.1 Mendekatkan pelayanan Publik bagi seluruh masyarakat

Syarat pokok pelayanan publik yang baik berkualitas adalah pelayanan tersebut harus tersedia di masyarakat (*available*) serta bersifat berkesinambungan (*continously*). Artinya semua jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit diakses, serta

keberadaannya dimasyarakat senantiasa tersedia setiap saat bila dibutuhkan. Syarat pelayanan publik yang baik lainnya adalah yang mudah dicapai (*accessible*) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang di maksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan publik yang baik, maka kehadiran dan pengaturan distribusi unit pelayanan publik yang berkualitas menjadi sangat penting.

Pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) dan pos pelayanan publik dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi sebagai jawaban atas tantangan revolusi 4.0 yang saat ini sedang dihadapi dunia. Diharapkan dengan penggunaan teknologi informasi, tersedia pelayanan publik yang lebih mudah diakses dan menambah unsur kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan.

Isu strategis mendekatkan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat sejalan dengan isu strategis dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 khususnya pelayanan publik bidang kesehatan yaitu Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat bahwa belum semua penduduk miskin memanfaatkan pelayanan ini karena mereka tidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan akibat kendala biaya, faktor jarak dan transportasi.

4.2.3.2 Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian.

Kabupaten Gowa memiliki luas kurang lebih 1.883,33 km persegi, wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian anatar 10-2800 meter diatas permukaan air laut. Namun demikian wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26% terutama di bagian timur hingga selatan karena merupakan Pegunungan Tinggimoncong, Pegunungan Bawakaraeng-Lompobattang dan Pegunungan Batureppe-Cindako. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang sungai utama 90 Km.

Di samping itu kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal karena dimana panjang jaringan jalan yang ada di kabupaten Gowa 2.938 km terdiri dari 23 km jalan negara, 272 km jalan provinsi dan 2.644 km jalan kabupaten. Kondisi jalan dalam kondisi baik Tahun 2019 telah mencapai 92,69 persen, sedangkan kondisi jalan rusak cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2016 yakni 25,58 dan meningkat tahun 27,86 persen. kondisi jalan rusak berat pada tahun 2013 adalah 7,35 persen turun pada tahun 2014 yakni 7,15 persen hingga tahun 2015 sebesar 4,85.

Isu strategis mendekatkan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat sejalan dengan isu strategis dalam Perubahan RPJMD

Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023. Sementara itu dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 kualitas infrastruktur juga menjadi isu strategis karena peralihan kewenangan beberapa ruas jalan kabupaten menjadi ruas jalan provinsi dengan kondisi rusak berat yang berakibat capaian kinerja ruas jalan provinsi secara akumulasi serta masih rendahnya persentase jalan provinsi dalam kondisi baik antara lain dikarenakan masih terdapat jalan provinsi dengan kondisi rusak berat. Tentunya dengan hal ini perlunya adanya penanganan terhadap jalan yang rusak berat oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Gowa.

4.2.3.3 Pemerataan Pendapatan bagi masyarakat Kabupaten Gowa

Selain fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, sebuah pemerintahan tidak bisa melupakan pemerataan pendapatan masyarakatnya. Pemerataan dilakukan terhadap pendapatan perkapita maupun pemerataan terhadap pembangunan wilayah. Isu pemerataan pemerataan pendapatan bagi masyarakat menjadi sangat penting karena karena juga menjadi isu yang diurusutamakan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023.

Pendapatan per-kapita masyarakat kabupaten Gowa tahun 2020 masih terendah di Sulawesi Selatan saat ini telah meningkat mencapai 27,45 juta per tahunnya. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, pada tahun 2020 Sulawesi Selatan menjadi kabupaten yang memiliki ketimpangan pendapatan warga terendah keempat di Sulawesi Selatan sebesar 0,345. Selain itu, jumlah orang miskin di Kabupaten Gowa masih cukup tinggi sebesar 7,38 % pada tahun 2020.

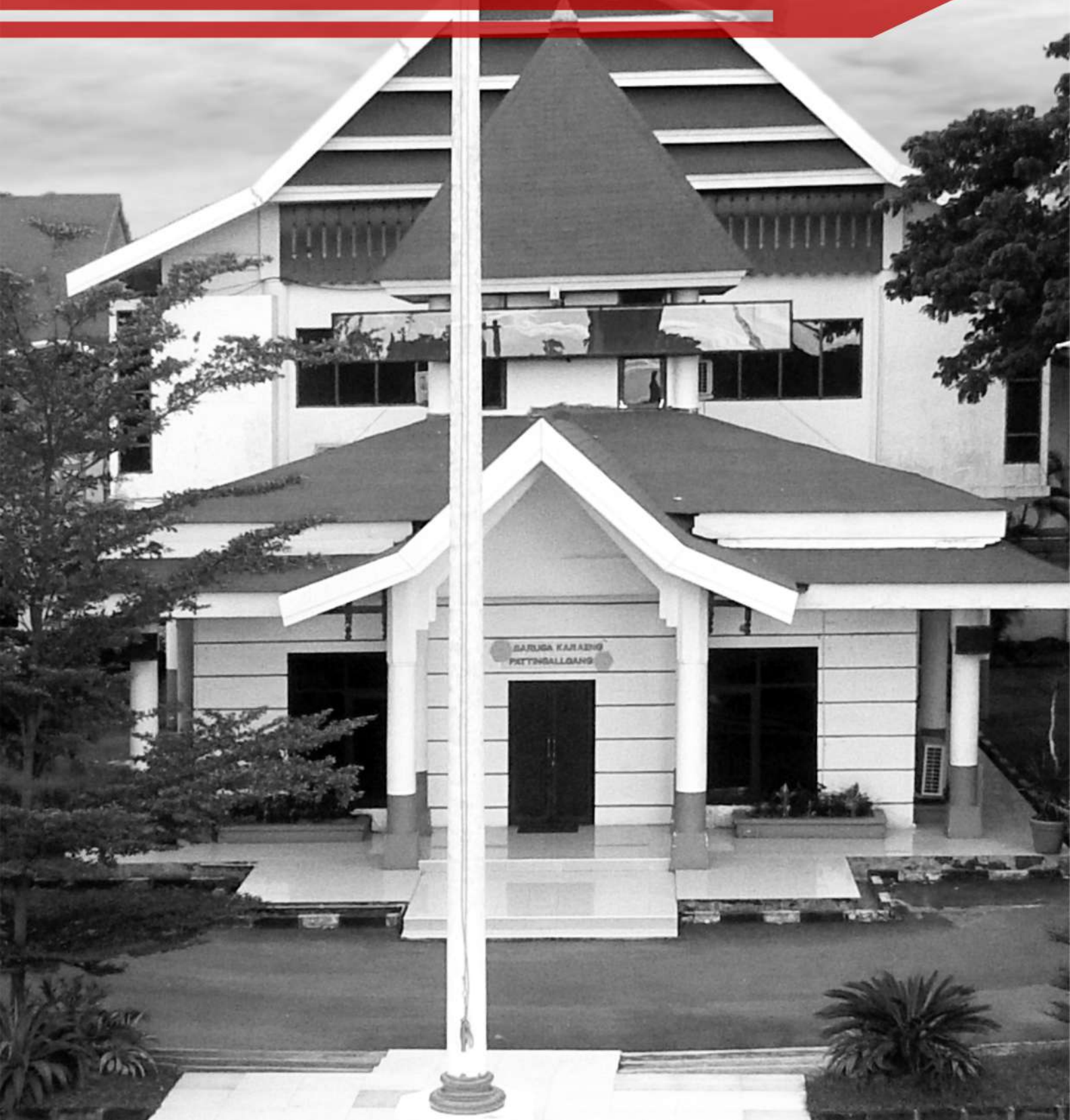
4.2.3.4 Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas

Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas. Kabupaten Gowa seperti Indonesia pada umumnya, memiliki potensi pertumbuhan yang sering dinamakan oleh bonus demografi, di mana mayoritas warga berada pada usia produktif.

Di Kabupaten Gowa pada tahun 2020, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 Tahun) berada di angka 461.344 jiwa atau 60,24 % dari total penduduk Kabupaten Gowa. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi besar dari sisi kuantitas sumber daya manusia, jika dibarengi oleh kualitas SDM tersebut. Namun IPM Sulawesi Selatan saat ini berada di angka 70,14 yang artinya Kabupaten Gowa berada diperingkat 9 dibandingkan kabupaten/kota lain di Indonesia. Lebih dalam lagi, angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan adalah 7,97 tahun, yang artinya rata-rata anak sekolah di Kabupaten Gowa hanya bersekolah sampai sekolah menengah pertama dan menemui hambatan mengenyam sekolah menengah atas.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kabupaten Gowa tahun 2021-2026, yaitu :

**TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH
DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK**

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan di hadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Gowa dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan terhadap visi dimaksud, menghasilkan penjelasan visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5. 1
Penjelasan Pokok Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa 2021-2026

VISI	KATA KUNCI VISI	PENJELASAN KATA KUNCI VISI
TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK	Masyarakat yang Unggul	Kondisi masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik, yaitu lebih cerdas, sehat, produktif, religius, berkarakter gotong-royong, inklusif dan partisipatif.
	Masyarakat yang Tangguh	Kondisi daerah dan masyarakat dengan basis ekonomi yang lebih kuat, mandiri, berdaya saing, merata, tahan terhadap krisis, melalui pengembangan sektor unggulan daerah. Kondisi ini diperkuat dengan infrastruktur yang terintegrasi serta lingkungan hidup yang berkualitas.
	Tata Kelola Pemerintahan Terbaik	Kondisi pemerintahan yang bersih dan akuntabel, berkinerja sangat tinggi dengan pelayanan publik yang berkualitas.

5.2 MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa tahun 2021 -

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

2026 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Gowa dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan melalui peningkatan perekonomian Kabupaten Gowa.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Gowa yang telah ditetapkan di atas, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026 :

1. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul dan Inklusif.
2. Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi.
3. Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan.
4. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif Melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas.



Gambar 5. 1 Proses Bisnis Pencapaian Visi dan Misi

5.2.1 Misi I Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul dan Inklusif

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang inklusif, kesetaraan gender, perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta kualitas sumber daya manusia yang religius dan berbudaya. Dalam upaya pencapaian Misi 1 maka dirumuskan Perencanaan terintegrasi dalam Langkah Pencapaian Misi 1 sebagai berikut :



Gambar 5.2
Kerangka Logis Perencanaan Terintegrasi Misi 1

5.2.2 Misi II Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi

Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengembangkan potensi unggulan daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dalam upaya pencapaian Misi 2 maka dirumuskan Perencanaan terintegrasi dalam Langkah Pencapaian Misi 2 sebagai berikut :



Gambar 5. 3
Kerangka Logis Perencanaan Terintegrasi Misi 2

5.2.3 Misi III Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan

Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Dalam upaya pencapaian Misi 3 maka dirumuskan Perencanaan Terintegrasi dalam Langkah Pencapaian Misi 3 sebagai berikut :



Gambar 5. 4
Kerangka Logis Perencanaan Terintegrasi Misi 3

5.2.4 Misi IV Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif Melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas

Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas yang diwujudkan melalui upaya perbaikan layanan publik secara terpadu dan terintegrasi dan peningkatan kualitas birokrasi. Dalam upaya pencapaian Misi 4 maka dirumuskan Perencanaan Terintegrasi dalam Langkah Pencapaian Misi 4 sebagai berikut :



Gambar 5.5
Kerangka Logis Perencanaan Terintegrasi Misi 4

Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran Visi dan Misi, yang kemudian dituangkan ke dalam 9 butir prioritas pembangunan daerah berikut :

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui **prioritas wajib**:

1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan masyarakat yang berkarakter;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
3. Peningkatan partisipasi masyarakat.

Peningkatan perekonomian melalui **sektor unggulan** :

1. Pengembangan pertanian modern;
2. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal;
3. Penguatan peran UMKM.

Prioritas penunjang peningkatan kualitas SDM dan perekonomian :

1. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi;
2. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial;

3. Peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik.

Berikut digambarkan pilar pembangunan Kabupaten Gowa yang dianalogikan dan dikonstruksikan menyesuaikan dengan goals Visi Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 :



**Gambar 5. 6
Pilar Pembangunan Kabupaten Gowa**

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 2
Keselarasan Misi pada RPJPD Kabupaten Gowa dengan Misi RPJMD
Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026

MISI RPJPD 2005 - 2025	MISI RPJMD 2021 - 2026
<p>MISI 1</p> <p>Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak dasar, kesetaraan gender, nilai budaya dan agama.</p>	<p>MISI 1</p> <p>Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.</p>
<p>MISI 2</p> <p>Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan.</p>	<p>MISI 2</p> <p>Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.</p>
<p>MISI 3</p> <p>Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada interkoneksi antar wilayah dan sektor.</p>	<p>MISI 3</p> <p>Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.</p>
<p>MISI 4</p> <p>Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan.</p>	
<p>MISI 5</p> <p>Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis.</p>	<p>MISI 4</p> <p>Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.</p>

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan

daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Keselarasan hubungan antara misi, tujuan, dan sasaran serta indikator RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026, dapat dilihat dalam penjelasan berikut.

5.3.1 TUJUAN 1

Tujuan 1 dari Misi 1 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 3
Tujuan 1 dari Misi Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat yang Inklusif

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang unggul secara inklusif	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat.	Indeks Pendidikan
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender
		Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.	Indeks Pembangunan Pemuda

Dalam rangka pencapaian misi 1, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan, dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

▪ **Tujuan**

- 1) Tujuan yang ingin dicapai dalam misi meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif adalah

menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang unggul secara inklusif yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

▪ **Sasaran**

- 1) Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat.
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat adalah Indeks Pendidikan yang terdiri dari Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.
- 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah Umur Harapan Hidup.
- 3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Pemuda.

KERANGKA LOGIS TUJUAN 1



Gambar 5.7 Kerangka Logis Pencapaian Tujuan 1

5.3.2 TUJUAN 2

Tujuan 2 dari Misi 2 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 4
Tujuan 1 dari Misi Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah
Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal dan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi PDRB Per Kapita	Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah	Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan)
		Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka
		Berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan
		Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat	Gini Rasio

Dalam rangka pencapaian misi 2, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan, dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

▪ **Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal dan sektor unggulan daerah yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian sebagai indikator kinerjanya Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita.

▪ **Sasaran**

- 1) Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah terdiri dari sektor pertanian, pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya sektor unggulan daerah adalah Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan).

- 2) Meningkatnya kesempatan kerja pada sektor unggulan daerah. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kesempatan kerja adalah Tingkat Pengangguran Terbuka.
- 3) Berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu. Adapun indikator yang menggambarkan berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu adalah Angka Kemiskinan.
- 4) Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat. Adapun indikator yang menggambarkan menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat adalah Gini Rasio.

KERANGKA LOGIS TUJUAN 2



Gambar 5.8 Kerangka Logis Pencapaian Tujuan 2

5.3.3 TUJUAN 3

Tujuan 3 dari Misi 3 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 5
Tujuan 3 dari Misi 3 Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur layanan dasar masyarakat	Pertumbuhan Sektor Bidang Infrastruktur dalam PDRB	Terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi	Indeks Infrastruktur Daerah
		Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan	Indeks Desa Membangun
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam rangka pencapaian misi 3, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan, dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

▪ **Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan adalah meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur layanan dasar masyarakat, yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian Pertumbuhan Sektor Bidang Infrastruktur dalam PDRB sebagai indikator kinerjanya.

▪ **Sasaran**

- 1) Terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi adalah Indeks Infrastruktur Daerah.
- 2) Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan adalah Indeks Desa Membangun. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Meningkatnya kualitas lingkungan hidup adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.



Gambar 5.9. Kerangka Logis Pencapaian Tujuan 3

5.3.4 Tujuan 4

Tujuan 3 dari Misi 3 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 6
Tujuan 3 dari Misi 4 Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik
		Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LPPD
			Nilai SAKIP
			Nilai IPKD

Dalam rangka pencapaian misi 4, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variable yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

▪ **Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator kinerjanya.

▪ **Sasaran**

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah Indeks Pelayanan Publik.
- 2) Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah Nilai LPPD, Nilai SAKIP dan Nilai IPKD.



Gambar 5.10. Kerangka Logis Pencapaian Tujuan 4

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan penjelasan di atas tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD, maka dengan melihat proses konsistensi penjabaran Visi dan Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut ke dalam matriks berikut ini :

Tabel 5. 7

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026

VISI : Terwujudnya Masyarakat Yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR RPJMD
1. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN INKLUSIF											
	1. Menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang unggul secara inklusif (1)		Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	70.14	71.11	71.60	72.10	72.59	73.09	73.09
		1. Meningkatnya ksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat (1)	Indeks Pendidikan	Nilai	65.19	67.46	68.59	69.72	70.86	71.99	71.99
		2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (2)	Indeks Kesehatan	Nilai	77.58	78.01	78.22	78.43	78.64	78.85	78.85
		3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan (3)	Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai	78.31	79.25	79.57	79.88	80.2	80.52	80.52
			Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	41.50	42.50	43.00	43.50	44.00	44.50	44.50
2. MEMPERKOKOH KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DAN TEKNOLOGI											
	1. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal dan sektor unggulan daerah (2)		Pertumbuhan Ekonomi		1.76	6.38	6.54	6.84		7.44	7.44
			PDRB Per Kapita	Rupiah Juta	27.45	28.15	28.50	28.85	29.20	29.55	29.55
		1. Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah (4)	Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan)	Persen	-3.67	8.06	7.04	6.76	5.43	7.25	7.25
		2)Meningkatnya kesempatan kerja (5)	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6.44	5.25	5.08	5.03	4.98	4.93	4.93

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR RPJMD
		3) Berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu (6)	Angka Kemiskinan	Persen	7.38	7.08	6.93	6.78	6.63	6.48	6.48
		4) Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat (7)	Gini Ratio	Nilai	0.345	0.327	0.318	0.309	0.300	0.291	0.291
3. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS, TERINTEGRASI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN											
	1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur layanan dasar masyarakat (3)		Pertumbuhan Sektor Bidang Infrastruktur dalam PDRB	Persen	13.55	57.29	58.04	57.93	57.60	57.71	57.71
		1. Terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi (8)	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	50	55	55	60	60	65	65
		2. Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan (9)	Indeks Desa Membangun	Nilai	0.6884	0.6836	0.6912	0.6988	0.7064	0.7140	0.7140
		3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (10)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	67.60 (Cukup Baik)	60-70 (Cukup Baik)	70-80 (Baik)	70-80 (Baik)	70-80 (Baik)	70-80 (Baik)	70-80 (Baik)
4. MENGEMBANGKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN INOVATIF MELALUI REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS											
	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien (4)		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai (Kategori)	52.39 (CC)	60-70 (B)	60-70 (B)	60-70 (B)	70-80 (BB)	70-80 (BB)	70-80 (BB)
		1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (11)	Indeks Pelayanan Publik	Nilai (Kategori)	3.91 (Baik)	4,01-4,50 (A-)	4,01-4,50 (A-)	4,01-4,50 (A-)	4,51-5,00 (A)	4,51-5,00 (A)	4,51-5,00 (A)
		2. Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (12)	Nilai LPPD	Nilai (Kategori)	3.66 (Tinggi)	3.76 (Tinggi)	3.86 (Tinggi)	4.21 (Sangat Tinggi)	4.31 (Sangat Tinggi)	4.41 (Sangat Tinggi)	4.41 (Sangat Tinggi)
			Nilai SAKIP	Nilai (Kategori)	63.25 (B)	60-70 (B)	70-80 (BB)	70-80 (BB)	70-80 (BB)	80-90 (BB)	80-90 (BB)
			Nilai IPKD	Nilai	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80

5.4 KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN (KETERIKATAN TERHADAP RPJPD KABUPATEN GOWA, RPJMD SULAWESI SELATAN, DAN RPJM NASIONAL)

Misi RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian Misi dalam RPJM Nasional 2020-2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 8
Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dengan RPJM Nasional Tahun 2020-2024

RPJMD KABUPATEN GOWA TAHUN 2021-2026	RPJM NASIONAL TAHUN 2020-2024
VISI	
TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAH TERBAIK	INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
MISI	
1 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.	1 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. 5 Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
2 Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.	2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing. 4 Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
3 Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.	3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan. 6 Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
4 Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.	8 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. 6 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya. 9 Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026 dengan dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.9
Keterkaitan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dan Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

	RPJMD KABUPATEN GOWA TAHUN 2021-2026	RPJMD PROV. SULSEL TAHUN 2018-2023
VISI	TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK	SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF, DAN BERKARAKTER
MISI	1 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.	4 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.
	2 Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.	3 Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel.
	3 Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.	5 Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif.
	4 Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.	2 Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter.
		1 Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan.

Tabel 5.9 diatas menggambarkan keterkaitan antara sasaran RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021- 2026 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023, dari Misi tersebut memiliki substansi yang bersesuaian namun dan memiliki keterkaitan satu dengan yang lain.

Tabel 5. 10
Keterkaitan Dokumen RPJM Nasional Tahun 2020-2024, RPJMD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 Dan RPJMD
Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR	TARGET RPJMN TAHUN 2020-2024	TARGET RPJMD PROV. SULSEL TAHUN 2018-2023	TARGET RPJMD KAB. GOWA TAHUN 2021-2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,2 – 6,5 %	7,8 – 8,2 %	7.44
2	Tingkat Inflasi	2,7	3,0 - 1,0	3,0-10
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,6 – 4,3 %	4,37 %	4.93
4	Tingkat Kemiskinan	6 – 7 %	7,87 %	6.48

Secara rinci Keterkaitan dokumen RPJMN 2020-2024, dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 digambarkan dalam indikator sebagai berikut :

Tabel 5. 11
Keterkaitan Sasaran Dokumen RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2015-2025
dan RPJMD Kabupaten Gowa

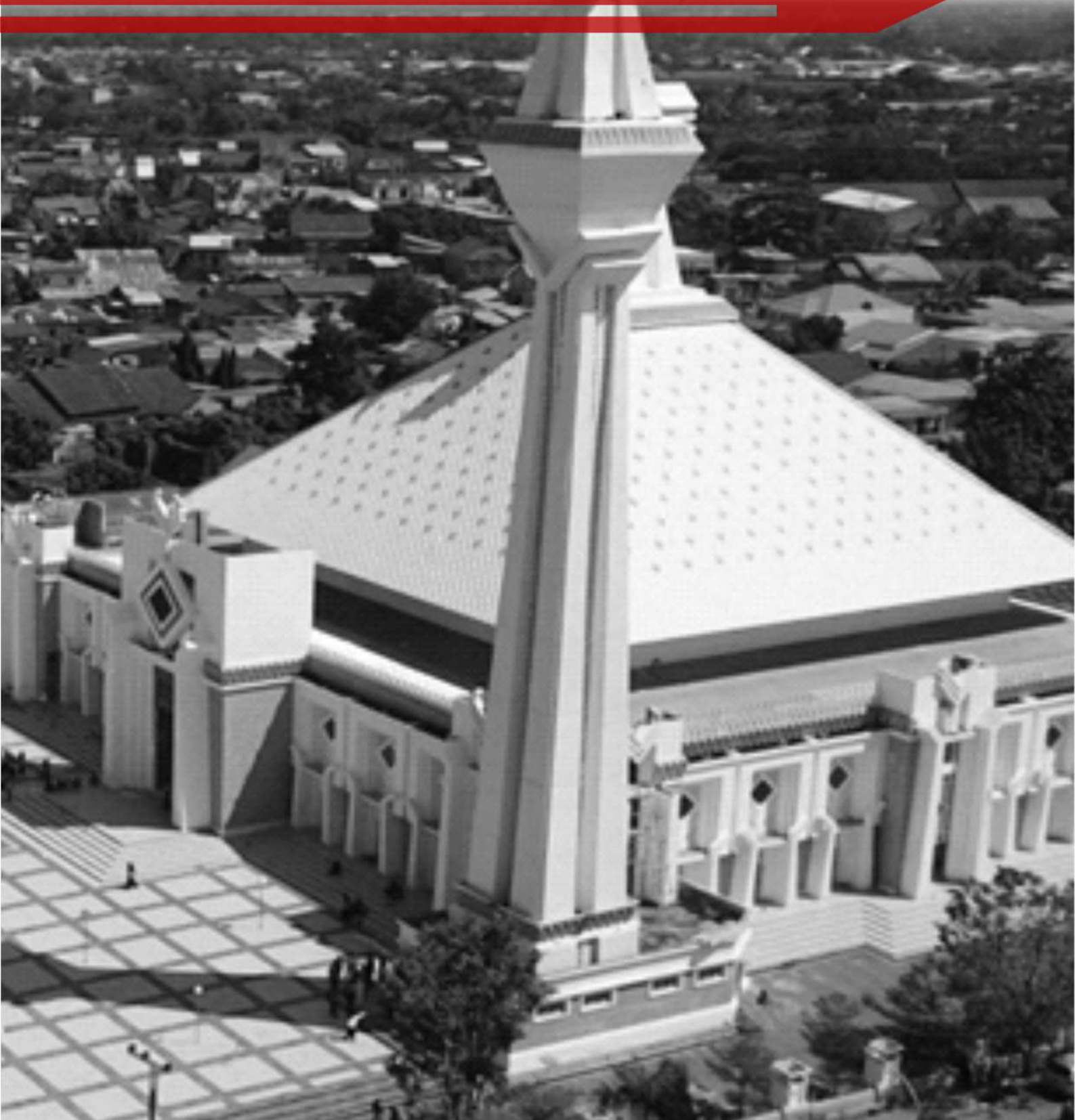
RPJMD KABUPATEN GOWA 2016 – 2021			RJPD KABUPATEN GOWA TAHUN 2005 – 2025
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat (1)	Indeks Pendidikan (tahun)	71.99	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang religius, taat dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa, menjunjung tinggi hak azasi manusia dan toleransi atau penghormatan yang tinggi untuk antara pemeluk agama serta maupun antara sesama agama
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (2)	Indeks Kesehatan (tahun)	78.85	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang religius, taat dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa, menjunjung tinggi hak azasi manusia dan toleransi atau penghormatan yang tinggi untuk antara pemeluk agama serta maupun antara sesama agama
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan (3)	Indeks Pemberdayaan Gender (Nilai)	80.52	Terwujudnya masyarakat demokratis yang berlandaskan hukum
	Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)	44.50	Terwujudnya masyarakat demokratis yang berlandaskan hukum
			Terwujudnya pembangunan yang berpihak kepada masyarakat (community development)

RPJMD KABUPATEN GOWA 2016 – 2021			RJPD KABUPATEN GOWA TAHUN 2005 – 2025
Meningkatnya kesempatan kerja (5)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,93	Terbangunnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang kokoh sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan dari pusat dan provinsi
Berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu (6)	Angka Kemiskinan (%)	6,48	Tercapainya pertumbuhan ekonomi berkesinambungan yang dapat mendorong pembiayaan pembangunan daerah Terlaksananya upaya penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pengentasan penduduk miskin.
Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat (7)	Gini Ratio (Nilai)	0,291	Terciptanya pembangunan yang semakin merata ke seluruh wilayah, yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan antar wilayah dataran rendah dan dataran tinggi
Terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi (8)	Indeks Infrastruktur Daerah (Nilai)	65	Terbangunnya sarana dan prasarana yang handal dan terintegrasi satu sama lain
Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan (9)	Indeks Desa Membangun (Nilai Kategori)	0,7140	Terlaksananya pembangunan multi sektor yang berdasarkan pada rencana tata ruang wilayah. Terciptanya hubungan kerjasama dalam skala interkoneksi wilayah, swasta dan masyarakat
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (10)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	70-80 (Baik)	Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan dan pendayagunaan SDA serta pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi dan daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari.
			Terciptanya pengelolaan SDA terbarukan (<i>renewable</i>) maupun tak terbarukan (<i>non renewable</i>) secara rasional, optimal, efisien dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (11)	Indeks Pelayanan Publik (Nilai Kategori)	4,51-5,00 (A)	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab serta profesional, yang mampu mendukung proses pembangunan daerah

RPJMD KABUPATEN GOWA 2016 - 2021			RJPD KABUPATEN GOWA TAHUN 2005 - 2025
Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (12)	Nilai LPPD (Nilai/ Kategori)	4,41 (Sangat Tinggi)	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab serta profesional, yang mampu mendukung proses pembangunan daerah
	Nilai SAKIP (Nilai/ Kategori)	80-90 (BB)	
	Nilai IPKD (Nilai)	60-80	

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Gowa mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2022 - 2026 dengan efektif dan efisien.

6.1 STRATEGI RPJMD KABUPATEN GOWA TAHUN 2022 – 2026

Strategi merupakan suatu proses dalam manajemen yang sistematis dan didefinisikan sebagai proses dalam pengambilan keputusan atas program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan sumber daya yang akan dialokasikan dalam setiap program selama beberapa tahun mendatang. Oleh sebab itu berdasarkan argumentasi ini kita bisa memberikan pengertian strategi sebagai suatu bentuk pemikiran rasional yang disusun secara sistematis, kemudian pembentukannya berdasarkan dengan pengamatan dalam pengalaman, pengamatan dalam perkembangan lingkungan.

Adapun isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pembangunan daerah saat ini dan dimasa datang adalah Pandemi Covid-19, Revolusi Industri 4.0, Sustainable Development Goals (SDGs) yang meliputi tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi yang layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan kemitraan untuk mencapai tujuan, serta stunting, krisis pangan, perdagangan bebas, gender dan hak anak, disabilitas dan PMKS, serta layanan inklusif.

Adapun strategi pembangunan daerah yang tertuang dari beberapa misi sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat yang unggul dan Inklusif

- 1) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan dasar Pendidikan”, diterapkan:
Strategi 1 : Meningkatkan akses, kualitas, serta kuantitas sarana dan prasarana pendidikan yang merata, terjangkau, dan berkarakter, meningkatkan kualitas guru, meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan, serta meningkatkan mutu proses pembelajaran dan penumbuhan budaya literasi pada satuan pendidikan.
- 2) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat”, diterapkan:
Strategi 2 : Meningkatkan aksesibilitas dan Pemerataan kualitas layanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat baik bersifat kuratif, promotif maupun preventif, meningkatkan kuantitas dan kapasitas tenaga medis, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesehatan.
- 3) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan daerah”, diterapkan:
Strategi 3 : Meningkatkan akselerasi pembangunan pemuda, pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak-hak anak baik akses, partisipasi, manfaat maupun kontrol dalam proses pembangunan termasuk bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Misi 2 : Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi

- 4) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor komoditas unggulan daerah”, diterapkan:
Strategi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah yaitu sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM, pengembangan inovasi daerah melalui pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

- 5) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah”, diterapkan:
Strategi 5 : Meningkatkan kesempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat termasuk penyediaan informasi bursa kerja dan pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan.
- 6) Untuk mencapai sasaran “Berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu serta usaha mikro dan kecil”, diterapkan:
Strategi 6 : Mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat marginal dan meningkatkan program atau kegiatan perlindungan sosial terhadap pemenuhan kebutuhan dasar.
- 7) Untuk mencapai sasaran “Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat”, diterapkan:
Strategi 7 : Mendorong lebih banyak dan lebih baik kualitas pekerjaan, pendapatan yang lebih tinggi dan kesempatan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat, dengan menjalin kemitraan antara pihak pengusaha dengan UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur, Terintegrasi dan berwawasan Lingkungan

- 8) Untuk mencapai sasaran “Terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi”, diterapkan:
Strategi 8 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, melalui pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas infrastruktur transportasi, jalan, sumber daya air, air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan, fasilitas perkotaan, fasilitas pendidikan, fasilitas olah raga dan kesenian, pariwisata, kesehatan, perumahan rakyat, serta pelibatan masyarakat dalam pemeliharannya.

- 9) Untuk mencapai sasaran “Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan”, diterapkan:
Strategi 9 : Meningkatkan aktivitas pembangunan dan pembinaan masyarakat desa, dan Pengembangan ketersediaan akses layanan publik dan akses kegiatan ekonomi yang berwawasan lingkungan menuju terciptanya desa maju dan mandiri.
- 10) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup”, diterapkan:
Strategi 10 : Meningkatkan perlindungan lingkungan hidup melalui tindakan preventif, penanggulangan dan penanganan bencana terutama banjir dan longsor, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, serta pemenuhan penyelesaian kasus lingkungan.

Misi 4 : Mengembangkan Tata kelola Pemerintahan Inovatif melalui Informasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas

- 11) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”, diterapkan:
Strategi 11 : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan dan kualitas layanan publik melalui pengembangan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 12) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah”, diterapkan:
Strategi 12 : Meningkatkan kualitas layanan publik dan Penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui penyederhanaan birokrasi, penerapan manajemen kinerja, pengelolaan keuangan dan asset, meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur serta penerapan Teknologi Informasi dan komunikasi

Tabel 6. 1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Gowa

Visi : Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul dan Inklusif

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
1 Menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang unggul secara inklusif	1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan dasar Pendidikan	Indeks pendidikan	1 Meningkatkan akses, kualitas, serta kuantitas sarana dan prasarana pendidikan yang merata, terjangkau, dan berkarakter, meningkatkan kualitas guru, meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan, serta meningkatkan mutu proses pembelajaran dan penumbuhan budaya literasi pada satuan pendidikan.
	2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan	2 Meningkatkan aksesibilitas dan Pemerataan kualitas layanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat baik bersifat kuratif, promotif maupun preventif, meningkatkan kuantitas dan kapasitas tenaga medis, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesehatan
	3 Meningkatnya Pemberdayaan perempuan dalam Pembangunan daerah	Indeks Pemberdayaan indeks Pembangunan Pemuda	3 Meningkatkan akselerasi pembangunan pemuda, pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak-hak anak baik akses, partisipasi, manfaat maupun kontrol dalam proses pembangunan termasuk bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya

Visi : Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik

Misi 2 : Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
<p>2 Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal dan sektor unggulan daerah</p>	<p>4 Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor komoditas unggulan daerah</p>	<p>Pertumbuhan sektor unggulan dalam PDRB</p>	<p>4 Meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah yaitu sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM, pengembangan inovasi daerah melalui pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)</p>
	<p>5 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah</p>	<p>Tingkat Pengangguran Terbuka</p>	<p>5 Meningkatkan kesempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat termasuk penyediaan informasi bursa kerja dan pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan</p>
	<p>6 Berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu serta usaha mikro dan kecil</p>	<p>Indeks Pemberdayaan</p>	<p>6 Mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat marginal dan meningkatkan program atau kegiatan perlindungan sosial terhadap pemenuhan kebutuhan dasar</p>
	<p>7 Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat</p>	<p>Gini Ratio</p>	<p>7 Mendorong lebih banyak dan lebih baik kualitas pekerjaan, pendapatan yang lebih tinggi dan kesempatan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat, dengan menjalin kemitraan antara pihak pengusaha dengan UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah</p>

Visi : Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik

Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur, Terintegrasi dan berwawasan Lingkungan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
<p>3 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur layanan dasar masyarakat</p>	<p>8 Terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi</p>	<p>Pertumbuhan sektor unggulan dalam PDRB</p>	<p>4 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, melalui pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas infrastruktur transportasi, jalan, sumber daya air, air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan, fasilitas perkotaan, fasilitas pendidikan, fasilitas olah raga dan kesenian, pariwisata, kesehatan, perumahan rakyat, serta pelibatan masyarakat dalam pemeliharannya</p>
	<p>9 Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan</p>	<p>Indeks Desa Membangun</p>	<p>9 Meningkatkan aktivitas pembangunan dan pembinaan masyarakat desa, dan Pengembangan ketersediaan akses layanan publik dan akses kegiatan ekonomi yang berwawasan lingkungan menuju terciptanya desa maju dan mandiri</p>
	<p>10 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</p>	<p>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p>	<p>10 Meningkatkan perlindungan lingkungan hidup melalui tindakan preventif, penanggulangan dan penaganan bencana terutama banjir dan longsor, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, serta pemenuhan penyelesaian kasus lingkungan</p>

Visi : Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik

Visi : Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik

Misi 4 : Mengembangkan Tata kelola Pemerintahan Inovatif melalui Informasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
<p>4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien</p>	<p>11 Meningkatnya kualitas pelayanan publik</p>	<p>Pertumbuhan sektor unggulan dalam PDRB</p>	<p>11 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan dan kualitas layanan publik melalui pengembangan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi</p>
	<p>12 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah</p>	<p>Nilai LPPD</p> <p>Nilai SAKIP</p> <p>Opini BPK</p>	<p>12 Meningkatkan kualitas layanan publik dan Penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui penyederhanaan birokrasi, penerapan manajemen kinerja, pengelolaan keuangan dan asset, meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur serta penerapan Teknologi Informasi dan komunikasi</p>

6.2 ARAH KEBIJAKAN RPJMD KABUPATEN GOWA TAHUN 2022 – 2026

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun permasalahan pokok yang harus mendapatkan perhatian pemerintah daerah adalah Belum optimalnya kualitas hidup masyarakat, belum optimalnya kemandirian ekonomi daerah, belum optimalnya kemantapan infrastruktur yang terintegrasi, serta belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Untuk melaksanakan 12 (*dua belas*) strategi di atas, maka ditempuh arah kebijakan sebagai berikut :

- 1). Untuk melaksanakan strategi “Meningkatkan akses, kualitas, serta kuantitas sarana dan prasarana pendidikan yang merata, terjangkau, dan berkarakter, meningkatkan kualitas guru, meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan, serta meningkatkan mutu proses

pembelajaran dan penumbuhan budaya literasi pada satuan pendidikan.”, diterapkan :

Arah Kebijakan 1 : Peningkatan pemerataan layanan dasar pendidikan dan keterjangkauan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, serta peningkatan mutu sarana dan prasarana pengelolaan pendidikan

Arah Kebijakan 2 : Pengembangan kurikulum berbasis pendidikan Karakter dan teknologi informasi

Arah Kebijakan 3 : Peningkatan ketersediaan, kompetensi, dan pemerataan SDM bidang pendidikan

Arah Kebijakan 4 : Penguatan Sumber Daya Manusia melalui penyediaan sarana dan prasarana pengembangan pemuda, perbibitan dan pembudayaan olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi

2). Untuk melaksanakan strategi “Meningkatkan aksesibilitas dan Pemerataan kualitas layanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat baik bersifat kuratif, promotif maupun preventif, meningkatkan kuantitas dan kapasitas tenaga medis, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesehatan”, diterapkan :

Arah Kebijakan 5 : Peningkatan fasilitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan.

Arah Kebijakan 6 : Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan melalui Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat

3). Untuk melaksanakan strategi “Meningkatkan akselerasi pembangunan pemuda, pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak-hak anak baik akses, partisipasi, manfaat maupun kontrol dalam proses pembangunan termasuk bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya”, diterapkan :

- Arah Kebijakan 7 : Percepatan peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan, peningkatan peran pemuda dalam berwirausaha serta penguatan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak .
- 4). Untuk melaksanakan strategi “Meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah yaitu sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM, pengembangan inovasi daerah melalui pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)”, diterapkan :
- Arah Kebijakan 8 : Peningkatan penggunaan sarana produksi dengan menerapkan sistem pertanian modern dan pengembangan agroindustri pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- Arah Kebijakan 9 : Pemberdayaan UMKM dengan mengembangkan ekosistem bisnis model melalui pembentukan rumah produktif berbasis kecamatan sebagai pusat informasi bisnis dan mengakses keuangan, pusat informasi pasar, pusat informasi produk dan pusat layanan konsultasi bisnis dan pelatihan kerja sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru
- Arah Kebijakan 10 : Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan Pengembangan potensi wisata unggulan
- 5). Untuk melaksanakan strategi “Meningkatkan kesempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat termasuk penyediaan informasi bursa kerja dan pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan”, diterapkan :
- Arah Kebijakan 11 : Peningkatan peluang dan kesempatan kerja, serta peningkatan kompetensi melalui pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja serta menjalin kerja sama dengan pihak pengusaha.

- 6). Untuk melaksanakan strategi “Mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat marginal dan meningkatkan program atau kegiatan perlindungan sosial terhadap pemenuhan kebutuhan dasar”, diterapkan :
- Arah Kebijakan 12 : Pemenuhan layanan dasar dan jaminan sosial bagi warga miskin
- 7). Untuk melaksanakan strategi “Mendorong lebih banyak dan lebih baik kualitas pekerjaan, pendapatan yang lebih tinggi dan kesempatan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat, dengan menjalin kemitraan antara pihak pengusaha dengan UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah.”, diterapkan :
- Arah Kebijakan 13 : Pemberdayaan ekonomi kreatif sektor unggulan daerah dengan memfasilitasi UMKM mulai dari proses produksi sampai dengan promosi pemasaran produk.
- 8). Untuk melaksanakan strategi “Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, melalui pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas infrastruktur transportasi, jalan, sumber daya air, air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan, fasilitas perkotaan, fasilitas pendidikan, fasilitas olah raga dan kesenian, pariwisata, kesehatan, perumahan rakyat, serta pelibatan masyarakat dalam pemeliharannya”, diterapkan :
- Arah Kebijakan 14 : Penyediaan infrastruktur dasar melalui penyediaan fasilitas baik fisik maupun non fisik, infrastruktur sarana transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas ekonomi, serta infrastruktur sarana dan prasarana publik
- 9). Untuk melaksanakan strategi “Meningkatkan aktivitas pembangunan dan pembinaan masyarakat desa, dan Pengembangan ketersediaan akses layanan publik dan akses kegiatan ekonomi yang berwawasan lingkungan menuju terciptanya desa maju dan mandiri”, diterapkan :
- Arah Kebijakan 15 : Mendorong masyarakat melakukan aktivitas pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, mengelola potensi ekonomi lokal, serta memanfaatkan

sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

- 10). Untuk melaksanakan strategi “Meningkatkan perlindungan lingkungan hidup melalui tindakan preventif, penanggulangan dan penanganan bencana terutama banjir dan longsor, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, serta pemenuhan penyelesaian kasus lingkungan”, diterapkan :

Arah Kebijakan 16 : Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu, melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan fokus pada kualitas lingkungan air, lingkungan udara, dan lingkungan tutupan lahan

- 11). Untuk melaksanakan strategi “Meningkatkan kinerja penyelenggaraan dan kualitas layanan publik melalui pengembangan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi.”, diterapkan :

Arah Kebijakan 17 : Peningkatan layanan administrasi pemerintahan secara terpadu dan terintegrasi, serta inovasi pelayanan publik yang berbasis elektronik.

- 12). Untuk melaksanakan strategi “Meningkatkan kualitas layanan publik dan Penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui penyederhanaan birokrasi, penerapan manajemen kinerja, pengelolaan keuangan dan asset, meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur serta penerapan Teknologi Informasi dan komunikasi.”, diterapkan :

Arah Kebijakan 18 : Peningkatan efektifitas sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual

Tabel 6. 2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gowa

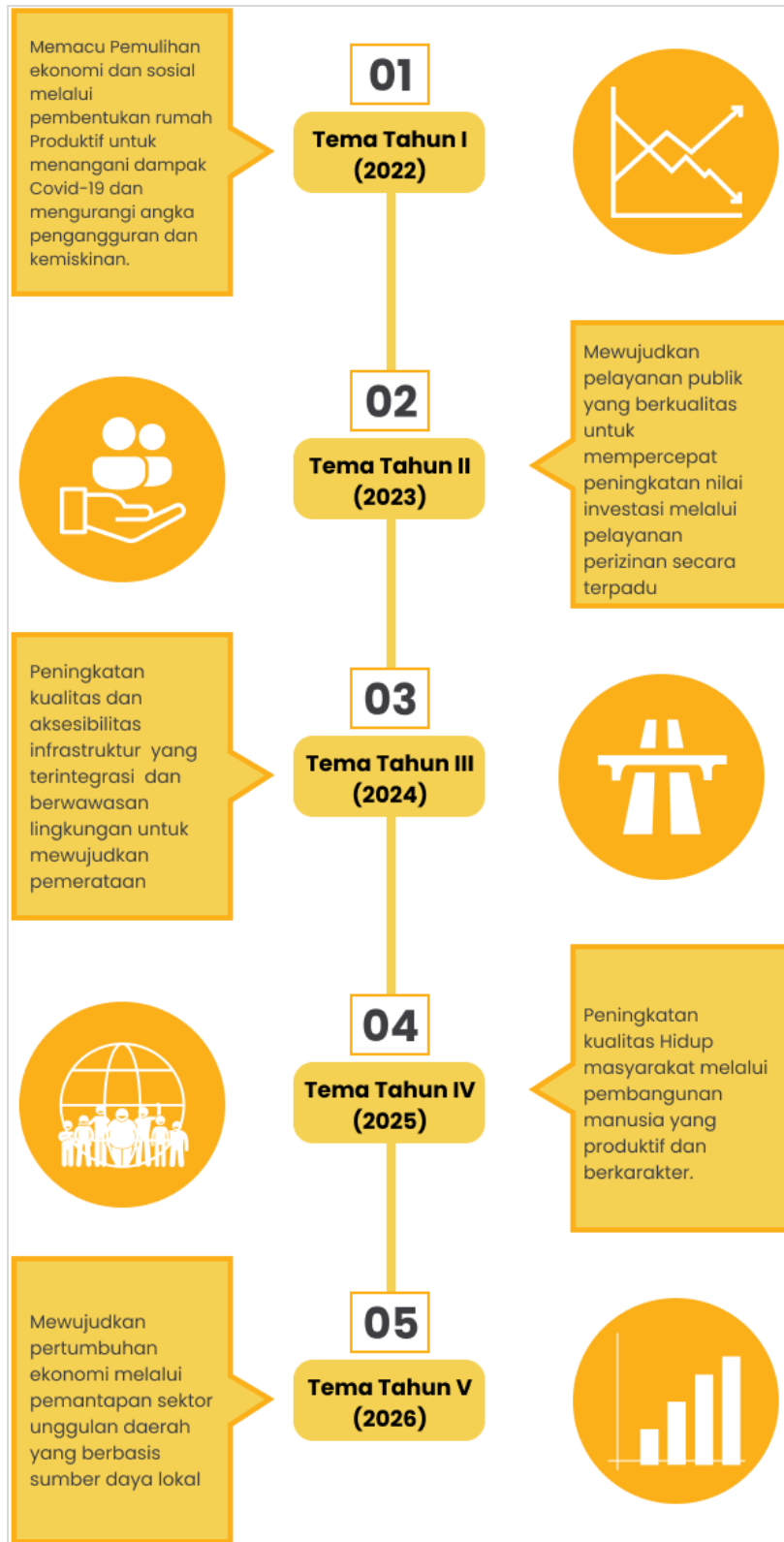
STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
	URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatkan akses, kualitas, serta kuantitas sarana dan prasarana pendidikan yang merata, terjangkau, dan berkarakter, meningkatkan kualitas guru, meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan, serta meningkatkan mutu proses pembelajaran dan penumbuhan budaya literasi pada satuan pendidikan	Peningkatan pemerataan layanan Dasar pendidikan dan keterjangkauan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, serta Peningkatan mutu sarana dan prasarana pengelolaan pendidikan	√	√	√	√	√
	Pengembangan kurikulum berbasis Pendidikan Karakter dan teknologi informasi	√	√	√	√	√
	Peningkatan ketersediaan, kompetensi, dan pemerataan SDM bidang pendidikan	√	√	√	√	√
	Penguatan Sumber Daya Manusia melalui penyediaan sarana dan prasarana pengembangan pemuda, perbibitan dan pembudayaan olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi	√	√	√	√	√
2. Meningkatkan aksesibilitas dan Pemerataan kualitas layanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat baik bersifat kuratif, promotif maupun preventif, meningkatkan kuantitas dan kapasitas tenaga medis, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesehatan.	Peningkatan fasilitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan	√	√	√	√	√
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan melalui Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat	√	√	√	√	√
3. Meningkatkan akselerasi pembangunan pemuda, pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak-hak anak baik akses, partisipasi, manfaat maupun kontrol dalam proses pembangunan termasuk bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya	Percepatan Peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan, peningkatan peran pemuda dalam berwirausaha serta Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak	√	√	√	√	√
4. Meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah yaitu sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM, pengembangan inovasi daerah melalui pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).	Peningkatan penggunaan sarana produksi dengan menerapkan sistem pertanian modern dan pengembangan agroindustri pengolahan hasil pertanian dan perikanan	√	√	√	√	√
	Pemberdayaan UMKM dengan mengembangkan ekosistem bisnis model melalui pembentukan rumah produktif berbasis kecamatan sebagai pusat informasi bisnis dan	√	√	√	√	√

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN					
		URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
		mengakses keuangan, pusat informasi pasar, pusat informasi produk dan pusat layanan konsultasi bisnis dan pelatihan kerja sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru					
		Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan Pengembangan potensi wisata unggulan	√	√	√	√	√
5.	Meningkatkan kesempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat termasuk penyediaan informasi bursa kerja dan pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan	Peningkatan peluang dan kesempatan kerja, serta peningkatan kompetensi melalui pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja serta menjalin kerja sama dengan pihak pengusaha	√	√	√	√	√
6.	Mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat marginal dan meningkatkan program atau kegiatan perlindungan sosial terhadap pemenuhan kebutuhan dasar	Pemenuhan layanan dasar dan jaminan sosial bagi warga miskin	√	√	√	√	√
7.	Mendorong lebih banyak dan lebih baik kualitas pekerjaan, pendapatan yang lebih tinggi dan kesempatan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat, dengan menjalin kemitraan antara pihak pengusaha dengan UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah	Pemberdayaan ekonomi kreatif sektor unggulan daerah dengan memfasilitasi UMKM mulai dari proses produksi sampai dengan promosi pemasaran produk.	√	√	√	√	√
8.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, melalui pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas infrastruktur transportasi, jalan, sumber daya air, air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan, fasilitas perkotaan, fasilitas pendidikan, fasilitas olah raga dan kesenian, pariwisata, kesehatan, perumahan rakyat, serta pelibatan masyarakat dalam pemeliharannya	Penyediaan infrastruktur dasar melalui penyediaan fasilitas baik fisik maupun non fisik, infrastruktur sarana transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas ekonomi, serta infrastruktur sarana dan prasarana publik	√	√	√	√	√

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN					
		URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
9.	Meningkatkan aktivitas pembangunan dan pembinaan masyarakat desa, dan Pengembangan ketersediaan akses layanan publik dan akses kegiatan ekonomi yang berwawasan lingkungan menuju terciptanya desa maju dan mandiri	Mendorong masyarakat melakukan aktivitas pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, mengelola potensi ekonomi lokal, serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.	√	√	√	√	√
10	Meningkatkan perlindungan lingkungan hidup melalui tindakan preventif, penanggulangan dan penaganan bencana terutama banjir dan longsor, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, serta pemenuhan penyelesaian kasus lingkungan	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu, melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan fokus pada kualitas lingkungan air, lingkungan udara, dan lingkungan tutupan lahan	√	√	√	√	√
11	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan dan kualitas layanan publik melalui pengembangan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Peningkatan layanan administrasi pemerintahan secara terpadu dan terintegrasi, serta inovasi pelayanan publik yang berbasis elektronik	√	√	√	√	√
12	Meningkatkan kualitas layanan publik dan Penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui <i>penyederhanaan birokrasi</i> , penerapan manajemen kinerja, pengelolaan keuangan dan asset, meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur serta penerapan Teknologi Informasi dan komunikasi	Peningkatan efektifitas sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian intern (SPI), dan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis Akruar	√	√	√	√	√

Adapun rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi, yang selanjutnya menjadi arah kebijakan pembangunan untuk tiap tahunnya. Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan:



Gambar 6. 1
Tema Pembangunan 2021-2026

6.3 ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN GOWA

Pengembangan wilayah Kabupaten Gowa tidak terlepas dari penggunaan lahan yang disesuaikan dengan peruntukannya yang direncanakan secara integral dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa dan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Gowa juga merupakan bagian kawasan perkotaan Mamminasata yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 dengan luas wilayah 246.230 ha dan menjadi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang RTR Kawasan Perkotaan Mamminasata. Persoalan pada kawasan perkotaan Mamminasata antara lain lingkungan, transportasi, kelangkaan sarana dan prasarana pemukiman, sosial dan ekonomi. Pengembangan kawasan Metropolitan terdapat empat isu strategis yaitu pengembangan ekonomi (investasi) dan keseimbangan antara wilayah, pengembangan pulau Sulawesi, pengembangan kawasan produksi, dan penyelesaian persoalan internal perkotaan di kawasan perkotaan Mamminasata. Pengembangan kawasan perkotaan bergerak pada sektor unggulan perdagangan dan jasa pertanian, dan bagian dari kawasan andalan bergerak pada sektor unggulan pertanian dan pariwisata, oleh karena itu pengembangan komoditas sektor unggulan daerah tersebut sangat dibutuhkan dengan mengoptimalkan peran sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di kawasan mamminasata untuk penanggulangan kemiskinan.

Wilayah Kabupaten Gowa terdiri atas 2 (dua) kawasan, dataran tinggi yang meliputi kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolopao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Sedangkan dataran rendah meliputi kecamatan Bontonopmo, Bontonopmo Selatan, Bajeng, Bajeng Barat, Pallangga, Barombong, Somba Opu, Bontomarannu dan Pattallassang.

1. Kawasan peruntukan pertanian
 - a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah dengan luas 36.089,77 Ha
 - b. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan luas 16.409 Ha

- c. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura dengan luas 12.386 Ha
 - d. Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas 11.029 Ha.
 - e. Kawasan peruntukan peternakan merupakan kawasan peruntukan pengembangan ternak besar.
 - f. Kawasan peruntukan perikanan tangkap, budidaya perikanan air tawar, budidaya minapadi dan budidaya kolam, pengembangan minapolitan, serta Pengembangan BBI.
2. Kawasan peruntukan industri besar, industri sedang, dan industri rumah tangga.
 3. Kawasan peruntukan pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan.
 4. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan
 5. Kawasan peruntukan lainnya seperti : kawasan perkantoran, Kawasan lindung, Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, Kawasan Lindung Geologi, dan wilayah rawan bencana.

Penggunaan lahan merupakan aktifitas manusia pada dan dalam kaitannya dengan lahan, penggunaan lahan dari sudut pandang kemampuan. Penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu, misalnya permukiman, perkotaan dan persawahan. Penggunaan lahan juga merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Gowa ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

1. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah

Kebijakan penataan ruang wilayah daerah Kabupaten Gowa meliputi:

- a. Pengembangan potensi sektor pertanian (*komoditas pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan*) di dataran tinggi dan sebagian dataran rendah.
- b. Pengembangan potensi sektor perikanan tangkap di dataran rendah dan budidaya di dataran tinggi dan dataran rendah.
- c. Pengembangan potensi sektor industri besar, sedang, dan rumah tangga
- d. Pengembangan potensi sektor pariwisata budaya, parawisata alam, dan parawista buatan.

- e. Pengembangan potensi sektor permukiman di perkotaan dan pedesaan
 - f. Pengembangan dan pemanfaatan fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa, pelayanan umum, kesehatan, pendidikan, pamakaman umum, dan pertahanan dan keamanan Negara.
 - g. Penanganan sumber daya alam dan kawasan lindung yang berkelanjutan.
2. Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah
- Strategi penataan ruang wilayah daerah Kabupaten Gowa meliputi :
- a) Strategi pengembangan potensi sektor dengan mengembangkan kawasan sektor produksi unggulan, kawasan produksi pangan lokal, agrobisnis dan agroindustri, dan pertanian modern
 - b. Strategi Pengembangan potensi sektor perikanan tangkap dengan mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan budidaya air tawar, minapadi, dan kolam, sentra produksi dan usaha berbasis perikanan, dan kawasan minapolitan yang terintegrasi yang meliputi sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya
 - c. Strategi Pengembangan potensi sektor industri besar, sedang, dan rumah tangga, dengan Mengembangkan Kawasan Industri Gowa (KIWA) di Kecamatan Pattallassang, kawasan peruntukan industri besar dan sedang Kabupaten Gowa, kawasan peruntukan industri di setiap kecamatan, dan memantapkan industri rumah tangga
 - d. Strategi Pengembangan potensi sektor pariwisata budaya, parawisata alam, dan parawista buatan, dengan Mengembangkan dan memantapkan kawasan pariwisata budaya Benteng sombaopu, wisata makam syekh Yusuf dan Makam Sultan Hasanuddin, serta wisata budaya lokal, kawasan parawista alam Malino, Bendungan Bili-Bili, danau Mawang, serta Wisata air terjun Parangloe, dan kawasan parawista buatan Gowa Discovery Park (GDP) dan kawasan wisata kuliner di perkotaan
 - e. Strategi Pengembangan potensi sektor permukiman di perkotaan dan pedesaan, dengan Mengembangkan kawasan peruntukan permukiman perkotaan baru Gowa-Maros (kota satelit Mamminasata), Kota baru satelit Pattallassang dan Parangloe, dan

kawasan strategis lainnya, dan kawasan peruntukan pemukiman perdesaan.

- f. Strategi Pengembangan dan pemanfaatan fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa, pelayanan umum, kesehatan, pendidikan, pemukiman umum, dan pertahanan dan keamanan Negara, dengan Mengembangkan dan memantapkan fungsi sistem pelayanan kegiatan masyarakat, sistem jaringan prasarana transportasi, sistem jaringan prasarana sumberdaya air, sistem jaringan prasarana energy/kelistrikan, sistem jaringan prasarana telekomunikasi, dan sistem jaringan prasarana lingkungan.
 - g. Strategi Penanganan sumber daya alam dan kawasan lindung yang berkelanjutan, dengan Melestarikan kawasan hutan lindung, kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai, kawasan sekitar danau dan waduk, Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, dan kawasan taman wisata alam Malino
3. Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah
- Rencana Struktur ruang wilayah daerah Kabupaten Gowa terdiri dari:
- a. Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Perkotaan
 - b. Rencana Pengembangan Sistem Drainase dan Limbah
 - c. Rencana Jaringan Air Bersih
 - d. Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air
 - e. PKN yang berada di wilayah Kabupaten
 - f. PKL yang berada di wilayah Kabupaten
 - g. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, dan
 - h. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat pemukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
4. Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah
- Rencana pola ruang wilayah daerah Kabupaten terdiri dari :
- a. Rencana Kawasan Perairan dan Permukiman, meliputi :
 - 1) Kawasan Peruntukan Perairan
 - 2) Kawasan Peruntukan Permukiman
 - b. Rencana Kawasan Budidaya yang meliputi :
 - 1) Kawasan Peruntukan Budidaya Agroforestri
 - 2) Kawasan Peruntukan Budidaya Hortikultura
 - 3) Kawasan Peruntukan Budidaya Perkebunan

- 4) Kawasan Peruntukan Budidaya Perikanan
 - a) Kawasan Peruntukan Budidaya Pertanian Lahan Basah
 - b) Kawasan Peruntukan Budidaya Pertanian Lahan Kering

6.4 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Gowa berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa akan fokus pada program prioritas yaitu Gowa Kabupaten Pendidikan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat, meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan, meningkatkan produksi dan produktivitas serta peningkatan daya saing komoditas unggulan daerah, serta pemberdayaan UMKM dengan mengembangkan ekosistem bisnis.

Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pada dasarnya pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi tanggungjawab masing-masing SKPD

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gowa terpilih yang disampaikan, maka disusun sebanyak 50 program prioritas, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif, dilaksanakan dengan program sebagai berikut :
 - 1) Program Pengelolaan Pendidikan
 - 2) Program Pengelolaan Pendidikan
 - 3) Program Pembinaan Perpustakaan
 - 4) Program Pengembangan Kurikulum

- 5) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 6) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - 7) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - 8) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 9) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - 10) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - 11) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - 12) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
2. Untuk Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal dan sektor unggulan daerah, dilaksanakan dengan program sebagai berikut ;
- 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 2) Program Penyuluhan Pertanian
 - 3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 4) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - 5) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - 6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
 - 7) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - 8) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - 9) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 10) Program Pengembangan UMKM
 - 11) Program Rehabilitasi Sosial
 - 12) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - 13) Program Penempatan Tenaga Kerja
3. Untuk Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur layanan dasar masyarakat, dilaksanakan dengan program sebagai berikut :
- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 3) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

- 4) Program Pengembangan Perumahan
 - 5) Program Penyelenggaraan Jalan
 - 6) Program Kawasan Permukiman
 - 7) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - 8) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - 9) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - 10) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 11) Program Pengelolaan Persampahan
 - 12) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 13) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
4. Untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien, dilaksanakan dengan program sebagai berikut ;
- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - 3) Program Pelayanan Penanaman Modal
 - 4) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - 5) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 6) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 7) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - 8) Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - 9) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 10) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 11) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 12) Program Penataan Desa

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Gowa, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Propinsi, dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Berikut ini program-program prioritas yang menjadi acuan SKPD dalam melaksanakan kegiatannya dalam menjalankan program pembangunan seperti dijelaskan pada tabel 6.3. berikut ini:

Tabel 6. 3 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu indikatif Kabupaten Gowa

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21		
Visi : Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik																		
Misi 1. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul dan Inklusif																		
Tujuan 1. Menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang unggul secara inklusif		IPM	70.14	71.11		71.60		72.10		72.59		73.09		73.09				
Sasaran 1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan dasar Pendidikan		Indeks Pendidikan	65.19	67.46		68.59		69.72		70.86		71.99		71.99				
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	512.148.006	100%	525.204.469	100%	536.876.589	100%	551.011.357	100%	564.119.982	100%	2.689.360.403	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1 01 02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	100%	100,00%	70.370.614.860	100%	72.164.610.473	100%	73.768.393.451	100%	75.710.551.462	100%	77.511.714.382	100%	369.525.884.628	Dinas Pendidikan
1 01 03	Program Pengembangan Kurikulum	Cakupan sekolah yang menerapkan kurikulum bermuatan lokal di tingkat Pendidikan Dasar	0%	20,07%	100.574.880	20,08%	103.138.889	19,98%	105.431.043	19,98%	108.206.809	19,98%	110.781.061	100%	528.132.683	Dinas Pendidikan
1 01 04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Cakupan pemenuhan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	75%	75%	1.487.312.066	87%	1.525.228.905	92%	1.559.125.522	96%	1.600.173.836	100%	1.638.242.159	100%	7.810.082.489	Dinas Pendidikan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2 23 02	Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan Pembinaan Perpustakaan	27,25%	40%	8.625.505.793	50%	8.845.400.412	60%	9.041.980.183	65%	9.280.035.445	70%	9.500.808.579	70%	45.293.730.412	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sasaran 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Indeks Kesehatan	77.58	78.01		78.22		78.43		78.64		78.85		78.85		
1 02 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	100%	100%	184.516.898.888	100%	189.220.886.592	100%	193.426.122.858	100%	198.518.603.207	100%	203.241.384.117	100%	968.923.895.664	Dinas Kesehatan
		Persentase unit layanan yang menerapkan SPM RS	100%	100%	42.166.105.262	100%	43.241.068.271	100%	44.202.055.780	100%	45.365.797.766	100%	46.445.055.429	100%	221.420.082.508	RSUD Syekh Yusuf

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1 02 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio dokter per satuan penduduk	46,7	47,5	169.391.692	48	173.710.085	48,5	177.570.610	49	182.245.650	49,5	186.581.295	49,5	889.499.333	Dinas Kesehatan
1 02 05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase pembinaan posyandu aktif	51%	80%	1.632.102.824	85%	1.673.710.892	90%	1.710.907.366	100%	1.755.951.758	100%	1.797.726.057	100%	8.570.398.897	Dinas Kesehatan
2 14 03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Tingkat prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	56,0%	58,78%	4.934.484.885	59,77%	5.060.282.339	60,61%	5.172.741.821	61,34%	5.308.928.628	61,58%	5.435.228.664	61,58%	25.911.666.337	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Persentase Peserta aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	23,78%	27,12%		28,79%		30,46%		32,13%		33,80%		33,80%		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Sasaran 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Indeks Pemberdayaan Gender	78.31	79.25		79.57		79.88		80.2		80.52		80.52			
		Indeks Pembangunan Pemuda	41.50	42.50		43.00		43.50		44.00		44.50		44.50			
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pemenuhan Indikator Prasyarat PUG	35 %	55%	11.904.969	60%	12.208.469	65%	12.479.790	70%	12.808.355	75%	13.113.067	75%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Layak Anak	500-600	500-600	21.001.245	600-700	21.536.641	700-800	22.015.270	700-800	22.594.883	700-800	23.132.418	700-800	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2 19 02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda mandiri	52,32%	52,32%	380.417.549	54,52%	390.115.736	56,73%	398.785.650	59,42%	409.284.791	60,42%	419.021.724	60,42%	1.997.625.451	Dinas Pemuda dan Olahraga
Misi 2. Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi																
Tujuan 2. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal dan sektor unggulan daerah		Pertumbuhan Ekonomi	1.76	6.38		6.54		6.84		7.14		7.44		7.44		
		PDRB Per Kapita	27.45	28.15		28.50		28.85		29.20		29.55		29.55		
Sasaran 4. Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor komoditas unggulan daerah		Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan	-3.67	8.06		7.04		6.76		5.43		7.25		7.25		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	100%	2.081.671.932	100%	2.134.741.104	100%	2.182.183.492	100%	2.239.635.538	100%	2.292.916.731	100%	2.292.916.731	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	100%	100%	2.173.419.074	100%	2.228.827.205	100%	2.278.360.558	100%	2.338.344.733	100%	2.393.974.229	100%	2.393.974.229	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan	100%	100%	158.933.926	100%	162.985.713	100%	166.607.900	100%	170.994.317	100%	175.062.291	100%	175.062.291	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Persentase Penyuluhan Pertanian (Perkebunan dan Peternakan) yang dilaksanakan	100%	100%	12.680.014	100%	13.003.272	100%	13.292.256	100%	13.642.212	100%	13.966.762	100%	13.966.762	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	11%	10%	90.858.138	10%	93.174.433	10%	95.245.137	10%	97.752.730	10%	100.078.279	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	947,1 Ton	956,2 Ton	678.146.512	992,5 Ton	695.434.863	1040,8 Ton	710.890.175	1090 Ton	729.606.335	1150 Ton	746.963.755	Dinas Perikanan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3 31 02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	12,50%	13,00%	319.820.539	13,50%	327.973.895	14,00%	335.262.772	14,50%	344.089.496	15,00%	352.275.425	15,00%	1.679.422.127	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2 17 07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang telah mendaftarkan dan atau mendapatkan izin usaha mikro kecil atau Nomor Induk Berusaha (NIB)	3,18%	0,63%	32.871.793	1,42%	33.709.811	2,26%	34.458.977	3,05%	35.366.205	3,74%	36.207.571	3,74%	172.614.358	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 26 02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara	-89%	-69%	127.920.787	-49%	131.181.940	-29%	134.097.321	-9%	137.627.806	2%	140.901.988	2%	671.729.842	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
Sasaran 5. 2. Meningkatkan kesempatan kerja				Tingkat Pengangguran Terbuka	6.44	5.25		5.08		5.03		4.98		4.93		4.93		
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan UMKM	37,34%	0,31%	32.668.194	0,58%	33.501.022	3,52%	34.245.547	2,45%	35.147.156	2,64%	35.983.311	2,64%	171.545.231	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sasaran 6. Berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu serta usaha mikro dan kecil				Angka Kemiskinan	7.38	7.08		6.93		6.78		6.63		6.48		6.48		
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	0,25%	0,26%	358.609.853	0,27%	367.752.086	0,28%	375.924.991	0,29%	385.822.261	0,30%	395.001.018	0,30%	1.883.110.210	Dinas Sosial
Sasaran 7. Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat				Gini Ratio	0.345	0.327		0.318		0.309		0.300		0.291		0.291		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	100%	54,84%	8.498.351.891	61,29%	8.715.004.908	67,74%	8.908.686.775	74,19%	9.143.232.718	80,19%	9.360.751.299	80,19%	44.626.027.592	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	45%	47%	14.569.374	48%	14.940.799	49%	15.272.842	50%	15.674.942	51%	16.047.851	51%	76.505.809	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	60%	62%	65.541.939	64%	67.212.835	66%	68.706.570	68%	70.515.461	70%	72.193.032	70%	344.169.837	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Misi 3. Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan																		
Tujuan 3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur layanan dasar masyarakat				Pertumbuhan Sektor Bidang Infrastruktur dalam PDRB	13.55	57.29		58.04		57.93		57.60		57.71		57.71		
Sasaran 8. Terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi				Indeks Infrastruktur Daerah	50	55		55		60		60		65		65		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1 03 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kot a yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,82	0,83	19.456.241.338	0,85	19.952.249.674	0,87	20.395.667.551	0,88	20.932.640.193	0,90	21.430.630.164	0,90	102.167.428.921	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari	90,23%	100%	8.931.613.722	100%	9.159.312.114	100%	9.362.868.244	100%	9.609.371.777	100%	9.837.979.861	100%	46.901.145.717	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah Fasilitas pengurangan sampah di perkotaan yang tersedia	3 Unit	2 Unit	1.794.227.920	2 unit	1.839.969.129	2 unit	1.880.860.518	2 unit	1.930.379.399	2 unit	1.976.303.352	10 unit	9.421.740.319	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1 04 02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100%	100%	25.904.593	100%	26.564.993	100%	27.155.372	100%	27.870.313	100%	28.533.351	100%	136.028.621	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 03 10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	82,4%	83,4%	263.338.041.487	84,4%	270.051.458.614	84,4%	276.053.069.788	85,4%	283.320.934.192	86,4%	290.061.172.526	86,4%	1.382.824.676.608	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 04 03	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	50%	54,00%	1.119.485.166	56%	1.148.024.798	58%	1.173.538.448	60%	1.204.435.110	62%	1.233.088.763	62%	5.878.572.284	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1 04 04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase meningkatnya rumah layak huni	72.70%	72,95%	12.648.020	73,3%	12.970.463	73,60%	13.258.717	73,90%	13.607.790	74,20%	13.931.521	74,20%	66.416.511	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	55%	60%	12.648.020	62%	12.970.463	64%	13.258.717	66%	13.607.790	68%	13.931.521	68%	66.416.511	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2 15 02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas	0,05%	0,0489 %	1.582.737.625	0,0484 %	1.623.087.199	0,0478 %	1.659.158.614	0,0471%	1.702.840.577	0,0465 %	1.743.351.354	0,0465 %	8.311.175.369	Dinas Perhubungan
Sasaran 9. Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat pedesaan		Indeks Desa Membangun	0.6884	0.6836		0.6912	0.6988			0.7064		0.7140		0.7140		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Panjang Jalan Mantap 1975 km (82,4 %)	88,3%	263.338.041.487	91,2%	270.051.458.614	94,1%	276.053.069.788	97%	283.320.934.192	97%	290.061.172.526	97%	290.061.172.526	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persentase Jaringan Perpipaan (PDAM) = 21,52%	29,52%	8.931.613.722	33,52%	9.159.312.114	37,52%	9.362.868.244	25,52%	9.609.371.777	25,52%	9.837.979.861	25,52%	9.837.979.861	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Persentase Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi = 70,98 %	72,38%	6.675.298.230	73,08%	6.845.475.168	73,78%	6.997.608.693	74,48%	7.181.840.193	74,48%	7.352.697.015	74,48%	7.352.697.015	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang ditangani	93,19%	85%	6.675.298.230	72%	6.845.475.168	71%	6.997.608.693	70%	7.181.840.193	70%	7.352.697.015	70%	7.352.697.015	Dinas Lingkungan Hidup
Sasaran 10. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67.60 (Cukup Baik)	60-70 (Cukup Baik)	70-80 (Baik)	70-80 (Baik)	70-80 (Baik)	70-80 (Baik)	70-80 (Baik)	70-80 (Baik)	70-80 (Baik)	70-80 (Baik)	70-80 (Baik)	70-80 (Baik)				

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2 11 03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	1.070.865.299	100%	1.098.165.439	100%	1.122.571.017	100%	1.152.125.820	100%	1.179.535.028	100%	5.623.262.604	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	11,11%	10%	33.719.962	10%	34.579.603	10%	35.348.099	10%	36.278.735	10%	37.141.811	10%	177.068.210	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2 11 11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah tingkat kabupaten	93,19%	85%	Rp. 6.675.298.230	80%	Rp. 6.845.475.168	71%	Rp. 6.997.608.693	70%	Rp. 7.181.840.193	70%	Rp. 7.352.697.015	70%	Rp. 35.052.919.298	Dinas Lingkungan Hidup
Misi 4. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas																
Tujuan 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	52.39 (CC)	60-70 (B)		60-70 (B)		60-70 (B)		70-80 (BB)		70-80 (BB)		70-80 (BB)		
Sasaran 11. Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Indeks Pelayanan Publik	3.91 (Baik)	4,01-4,50 (A-)		4,01-4,50 (A-)		4,01-4,50 (A-)		4,51-5,00 (A)		4,51-5,00 (A)		4,51-5,00 (A)		
2 16 03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggara n secara online dan terintegrasi	100%	100%	Rp. 2.456.949.727	100%	Rp. 2.519.586.057	100%	Rp. 2.575.581.221	100%	Rp. 2.643.390.556	100%	Rp. 2.706.277.128	100%	Rp. 12.901.784.689	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2 18 02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor	44%	44%	358.997.210	46%	368.149.317	48%	376.331.051	50%	386.239.012	52%	395.427.683	52%	1.885.144.273	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan peningkatan pelayanan masyarakat	100%	100%	889.391.379	100%	912.065.107	100%	932.334.800	100%	956.881.106	100%	979.645.420	100%	4.670.317.812	18 Kecamatan
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100%	100%	23.323.478.463	100%	23.918.076.338	100%	24.449.630.564	100%	25.093.335.051	100%	25.690.308.443	100%	122.474.828.860	18 Kecamatan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
Sasaran 12. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah				Nilai LPPD	3.66 (Tinggi)	3.76 (Tinggi)		3.86 (Tinggi)		4.21 (Sangat Tinggi)		4.31 (Sangat Tinggi)		4.41 (Sangat Tinggi)		4.41 (Sangat Tinggi)		
				Nilai SAKIP	63.25 (B)	60-70 (B)		70-80 (BB)		70-80 (BB)		70-80 (BB)		80-90 (BB)		80-90 (BB)		
				Nilai IPKD	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80			
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Unit Kerja yang Bersih dari Penyimpangan Pengelolaan Keuangan/ Aset yang Material	95%	95%	1.611.348.810	95%	1.652.427.785	97%	1.689.151.264	97%	1.733.622.866	97%	1.774.865.958	97%	8.461.416.683	Inspektorat Daerah

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat kepatuhan SKPD terhadap standar pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	201.630.272.218	100%	212.298.993.115	100%	217.017.116.157	100%	222.730.694.980	100%	228.029.484.400	100%	1.081.706.560.869	Badan Pengelolaan Keuangan
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100%	100%	388.439.038	100%	398.341.721	100%	407.194.450	100%	417.914.975	100%	427.857.222	100%	2.039.747.406	Badan Pengelolaan Keuangan
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak terhadap Potensi Pajak Daerah	100%	100%	1.174.873.178	100%	1.204.824.846	100%	1.231.600.818	100%	1.264.026.133	100%	1.294.097.463	100%	6.169.422.438	Badan Pendapatan Daerah
				Indeks Kepuasan Wajib Pajak terhadap Pelayanan	93,27%	94,30%		94,68%		95,00%		95,37%		95,58%		95,58%		Badan Pendapatan Daerah

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		PBB-P2 dan BPHTB																
		Persentase wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu	96,15%	96,64%	96,72%	96,80%	96,89%	97,00%	97,00%							Badan Pendapatan Daerah		
		Persentase peninjauan lokasi objek pajak terhadap total pemohon BPHTB	10,83%	11,93%	12,20%	12,55%	12,79%	13,00%	13,00%							Badan Pendapatan Daerah		
2	13	02	Program Penataan Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	0%	100%	666.284.824	100%	683.270.779	100%	698.455.757	0	0	0	0	100%	2.048.011.360	Dinas PMD

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

MALINO
-1927-

REWAKO GOWA

TILADA HARI TANPA PERUBAHAN
TILADA HARI TANPA PENYEMPURNAAN

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah Kabupaten Gowa berisi program-program pembangunan, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaan.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah perlu memperhatikan kapasitas riil kemampuan keuangan. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa program pembangunan daerah dapat didanai dengan baik. Idealnya Kapasitas Riil suatu daerah harus mampu memenuhi kebutuhan program pembangunan dalam kerangka pendanaan.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama periode 2022-2026 diproyeksikan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, kapasitas riil kemampuan keuangan sebesar Rp1.847.261.192.535,00 diprediksikan mengalami peningkatan menjadi Rp2.034.718.358.366,39 di tahun 2026. Kapasitas riil kemampuan keuangan ini diharapkan dapat membiayai belanja Pemerintah Kabupaten Gowa lima tahun kedepan.

Proporsi belanja daerah yang paling besar adalah belanja operasi dengan jumlah Rp1.269.619.302.673,36 di tahun 2022 dan Rp1.393.206.329.413,65 di tahun 2026. Besarnya proporsi belanja operasi dikontribusi oleh alokasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial dengan belanja terbesar dilakukan di belanja pegawai sebesar Rp752.274.809.330 dan meningkat setiap tahunnya menjadi Rp830.370.631.830,92 pada tahun 2026.

Tabel 7. 1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 – 2026 Kabupaten Gowa

NO.	KAPASITAS RIIL/BELANJA	TARGET (Rp)				
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
5	KAPASITAS RIIL KEUANGAN BELANJA DAERAH	1.847.261.192.535,00	1.894.354.407.239,98	1.936.654.452.312,57	1.987.436.998.511,98	2.034.718.358.366,39
5.1	BELANJA OPERASI	1.269.619.302.673,36	1.300.222.285.240,19	1.329.737.139.342,81	1.362.163.067.826,38	1.393.206.329.413,65
5.1.1	Belanja Pegawai	752.274.809.330,00	771.081.679.563,25	790.358.721.552,33	810.117.689.591,14	830.370.631.830,92
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	468.391.551.399,00	480.101.340.183,98	489.703.366.987,65	501.945.951.162,35	512.090.034.833,01
5.1.3	Belanja Bunga	15.500.000.000,00	14.750.000.000,00	14.700.000.000,00	14.250.000.000,00	14.000.000.000,00
5.1.5	Belanja Hibah	28.118.277.156,00	28.821.234.084,90	29.397.658.766,60	30.132.600.235,76	30.885.915.241,66
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.334.664.788,36	5.468.031.408,07	5.577.392.036,23	5.716.826.837,14	5.859.747.508,06
5.2	BELANJA MODAL	342.049.615.287,64	352.650.040.561,43	360.605.589.902,64	372.804.414.541,81	382.730.774.905,35
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.550.000.000,00	2.613.750.000,00	2.666.025.000,00	2.732.675.625,00	2.800.992.515,63
5.4	BELANJA TRANSFER	233.042.274.574,00	238.868.331.438,35	243.645.698.067,12	249.736.840.518,80	255.980.261.531,77
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.708.952.574,00	1.751.676.388,35	1.786.709.916,12	1.831.377.664,02	1.877.162.105,62
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	231.333.322.000,00	237.116.655.050,00	241.858.988.151,00	247.905.462.854,78	254.103.099.426,14

7.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Pemerintah Kabupaten Gowa menyusun berbagai program yang disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Gowa. Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif dan target kinerja terukur yang akan dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa. Berikut tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Kabupaten Gowa :

Tabel 7.2.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kab. Gowa

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
					1.847.261.192.535		1.894.354.407.239,98		1.936.654.452.312,57		1.987.436.998.511,99		2.034.718.358.366,39		9.700.425.408.965,92	
	GRANDTOTAL															
x					755.482.980.739		769.214.458.417		786.509.445.103		807.011.226.941		826.210.118.909		3.944.428.230.109	
x	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
x	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.944.428.230.109	Semua SKPD
					755.482.980.739		769.214.458.417		786.509.445.103		807.011.226.941		826.210.118.909			

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				707.325.591.951		725.357.820.476		741.478.139.261		760.999.612.356		779.103.882.603		3.714.265.046.647	
1 01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				72.059.076.686		73.896.117.157		75.538.381.060		77.527.138.915		79.371.518.664		378.392.232.482	
1 01 02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	100,00%	100%	70.370.614.860	100%	72.164.610.473	100%	73.768.393.451	100%	75.710.551.462	100%	77.511.714.382	100%	369.525.884.628	Dinas Pendidikan
1 01 03	Program Pengembangan Kurikulum	Cakupan sekolah yang menerapkan kurikulum bermuatan lokal di tingkat Pendidikan Dasar	0%	20,07%	100.574.880	20,08%	103.138.889	19,98%	105.431.043	19,98%	108.206.809	19,98%	110.781.061	100%	528.132.683	Dinas Pendidikan

Kerangka Pendanaan Pembangunan
Dan Program Perangkat Daerah

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1 01 04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Cakupan pemenuhan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	75%	75%	1.487.312.066	87%	1.525.228.905	92%	1.559.125.522	96%	1.600.173.836	100%	1.638.242.159	100%	7.810.082.489	Dinas Pendidikan
1 01 05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase rekomendasi perizinan pendidikan yang ditindaklanjuti	0%	100%	50.287.440	100%	51.569.445	100%	52.715.522	100%	54.103.404	100%	55.390.531	100%	264.066.341	Dinas Pendidikan
1 01 06	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase bahasa dan sastra Indonesia dan bahasa dan sastra daerah yang dikembangkan di sekolah	0%	20%	50.287.440	20%	51.569.445	20%	52.715.522	20%	54.103.404	20%	55.390.531	100%	264.066.341	Dinas Pendidikan
1 02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				228.686.821.125		234.516.856.212		239.728.748.020		246.040.273.683		251.893.600.720		1.200.866.299.759	

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	100%	100%	184.516.898.888	100%	189.220.886.592	100%	193.426.122.858	100%	198.518.603.207	100%	203.241.384.117	100%	968.923.895.664	Dinas Kesehatan
				Persentase unit layanan yang menerapkan SPM RS	100%	100%	42.166.105.262	100%	43.241.068.271	100%	44.202.055.780	100%	45.365.797.766	100%	46.445.055.429	100%	221.420.082.508	RSUD Syekh Yusuf
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio dokter per satuan penduduk	46,7	47,5	169.391.692	48	173.710.085	48,5	177.570.610	49	182.245.650	49,5	186.581.295	49,5	889.499.333	Dinas Kesehatan
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana kefarmasian yang memenuhi standar	80%	85%	202.322.457	90%	207.480.372	90%	212.091.406	100%	217.675.302	100%	222.853.823	100%	1.062.423.359	Dinas Kesehatan
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase pembinaan posyandu aktif	51%	80%	1.632.102.824	85%	1.673.710.892	90%	1.710.907.366	100%	1.755.951.758	100%	1.797.726.057	100%	8.570.398.897	Dinas Kesehatan

Kerangka Pendanaan Pembangunan
Dan Program Perangkat Daerah

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1 03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				396.094.845.865		406.192.703.003		415.219.910.921		426.151.729.259		436.289.929.000		2.079.949.118.047	
1 03 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,8187	0,8343	19.456.241.338	0,8499	19.952.249.674	0,8655	20.395.667.551	0,8811	20.932.640.193	0,8967	21.430.630.164	0,8967	102.167.428.921	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	90,23%	100%	8.931.613.722	100%	9.159.312.114	100%	9.362.868.244	100%	9.609.371.777	100%	9.837.979.861	100%	46.901.145.717	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah Fasilitas pengurangan sampah di perkotaan yang tersedia	3 Unit	2 Unit	1.794.227.920	2 unit	1.839.969.129	2 unit	1.880.860.518	2 unit	1.930.379.399	2 unit	1.976.303.352	10 unit	9.421.740.319	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	94,09%	100%	3.165.981.037	100%	3.246.693.080	100%	3.318.847.437	100%	3.406.225.321	100%	3.487.259.822	100%	16.625.006.697	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	63,48%	69,2%	2.575.770.862	70,1%	2.641.436.362	71,1%	2.700.139.522	72,1%	2.771.228.201	73,1%	2.837.156.046	73,1%	13.525.730.994	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Pemerintahan yang memenuhi persyaratan tata bangunan	12%	4,76%	90.646.767.615	9,52%	92.957.674.003	14,29%	95.023.561.068	19,05%	97.525.320.449	23,81%	99.845.459.288	23,81%	475.998.782.423	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	50,2%	52,2%	4.435.786.079	54,2%	4.548.869.939	56,2%	4.649.963.815	58,2%	4.772.387.038	58,4%	4.885.922.687	58,4%	23.292.929.557	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kerangka Pendanaan Pembangunan
Dan Program Perangkat Daerah

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1 03 10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	82,4%	83,4%	263.338.041.487	84,4%	270.051.458.614	84,4%	276.053.069.788	85,4%	283.320.934.192	86,4%	290.061.172.526	86,4%	1.382.824.676.608	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0	0,20	252.493.375	0,40	258.930.323	0,60	264.684.779	0,80	271.653.342	1,00	278.116.007	1,00	1.325.877.826	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rasio Ketaatan terhadap RTRW	0,75	0,81	1.497.922.430	0,84	1.536.109.765	0,87	1.570.248.198	0,90	1.611.589.347	0,92	1.649.929.247	0,92	7.865.798.987	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.170.685.798		1.200.530.716		1.227.211.255		1.259.521.003		1.289.485.155		6.147.433.927	

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1 04 02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100%	100%	25.904.593	100%	26.564.993	100%	27.155.372	100%	27.870.313	100%	28.533.351	100%	136.028.621	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 03	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	50%	54%	1.119.485.166	56%	1.148.024.798	58%	1.173.538.448	60%	1.204.435.110	62,%	1.233.088.763	62%	5.878.572.284	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase meningkatnya rumah layak huni	72.70%	72,95%	12.648.020	73,30%	12.970.463	73,60%	13.258.717	73,90%	13.607.790	74,20%	13.931.521	74%	66.416.511	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1 04 05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	55,00%	60,00%	12.648.020	62,00%	12.970.463	64,00%	13.258.717	66,00%	13.607.790	68,00%	13.931.521	68%	66.416.511	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

**Kerangka Pendanaan Pembangunan
Dan Program Perangkat Daerah**

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1 05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				8.465.163.857		8.680.970.794		8.873.896.289		9.107.526.275		9.324.195.396		44.451.752.612	
1 05 02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	90%	100%	7.032.554.880	100%	7.211.839.552	100%	7.372.115.142	100%	7.566.206.565	100%	7.746.207.509	100%	36.928.923.647	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan korban bencana	100%	100%	59.266.418	100%	60.777.328	100%	62.128.041	100%	63.763.734	100%	65.280.681	100%	311.216.203	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Non Kebakaran	95%	100%	1.373.342.560	100%	1.408.353.914	100%	1.439.653.106	100%	1.477.555.976	100%	1.512.707.207	100%	7.211.612.762	Dinas Pemadam Kebakaran
1 06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				848.998.620		870.642.595		889.991.716		913.423.221		935.153.667		4.458.209.819	

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1 06 02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang aktif	12,5%	20%	90.622.488	20%	92.932.775	21%	94.998.109	21,00%	97.499.198	22%	99.818.716	22%	475.871.287	Dinas Sosial
1 06 04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	0,25%	0,26%	358.609.853	0,27%	367.752.086	0,28%	375.924.991	0,29%	385.822.261	0,3%	395.001.018	0,3%	1.883.110.210	Dinas Sosial
1 06 05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh jaminan sosial	85%	39%	241.200.538	39%	247.349.592	40%	252.846.678	40%	259.503.570	41%	265.677.190	41%	1.266.577.569	Dinas Sosial
1 06 06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	66.814.129	100%	68.517.457	100%	70.040.186	100%	71.884.188	100%	73.594.322	100%	350.850.282	Dinas Sosial
1 06 07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan TMPN yang mendapatkan pemeliharaan	100%	100%	91.751.612	100%	94.090.684	100%	96.181.751	100%	98.714.003	100%	101.062.421	100%	481.800.472	Dinas Sosial

Kerangka Pendanaan Pembangunan
Dan Program Perangkat Daerah

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				43.195.353.357		44.296.555.535		45.281.000.145		46.473.148.341		47.578.750.004		226.824.807.382	
2 07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja				98.179.818		100.682.768		102.920.337		105.630.001		108.142.951		515.555.876	
2 07 02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada Rencana Tenaga Kerja	100%	100%	5.953.129	100%	6.104.895	100%	6.240.570	100%	6.404.870	100%	6.557.243	100%	31.260.706	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	45%	47%	14.569.374	48%	14.940.799	49%	15.272.842	50%	15.674.942	51%	16.047.851	51%	76.505.809	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	60%	62%	65.541.939	64%	67.212.835	66%	68.706.570	68%	70.515.461	70%	72.193.032	70%	344.169.837	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2 07 05	Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	90%	100%	12.115.376	100%	12.424.240	100%	12.700.356	100%	13.034.728	100%	13.344.825	100%	63.619.524	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				460.431.232		472.169.251		482.662.719		495.370.157		507.155.071		2.417.788.431	
2 08 02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pemenuhan Indikator Prasyarat PUG	35 %	55%	11.904.969	60%	12.208.469	65%	12.479.790	70%	12.808.355	75%	13.113.067	75%	62.514.650	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Yang Terstandarnisasi	40%	55%	391.172.651	60%	401.145.025	65%	410.060.053	70%	420.856.024	75%	430.868.238	75%	2.054.101.991	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Penyediaan Lembaga Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga di Kecamatan	25%	55%	13.757.045	60%	14.107.761	65%	14.421.291	70%	14.800.971	75%	15.153.088	75%	72.240.156	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kerangka Pendanaan Pembangunan
Dan Program Perangkat Daerah

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2 08 05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Peningkatan Penyediaan Data Gender dan Anak	35 %	55%	10.388.852	60%	10.653.700	65%	10.890.468	70%	11.177.189	75%	11.443.096	75%	54.553.305	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Layak Anak	500-600	500-600	21.001.245	600-700	21.536.641	700-800	22.015.270	700-800	22.594.883	700-800	23.132.418	700-800	110.280.457	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	40%	55%	12.206.470	60%	12.517.656	65%	12.795.848	70%	13.132.734	75%	13.445.164	75%	64.097.872	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				1.294.660.618		1.327.666.092		1.357.172.082		1.392.903.409		1.426.040.745		6.798.442.945	

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2 09 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase ketersediaan dan distribusi pangan (tersedianya cadangan beras / jagung sesuai kebutuhan)	75%	78%	743.629.660	79%	762.587.408	80%	779.535.115	81%	800.058.544	82%	819.092.031	82%	3.904.902.757	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase pengembangan diversifikasi produk pangan	14,29%	14%	500.766.489	14%	513.532.796	14%	524.945.525	14%	538.766.175	14%	551.583.486	14%	2.629.594.470	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rawan pangan	50%	48%	12.383.063	46%	12.698.751	44%	12.980.968	42%	13.322.728	40%	13.639.677	40%	65.025.188	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Tingkat keamanan pangan	80%	81%	37.881.406	82%	38.847.137	82%	39.710.474	83%	40.755.962	83%	41.725.552	83%	198.920.531	Dinas Ketahanan Pangan
2 10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				3.296.101.190		3.380.130.455		3.455.250.318		3.546.219.388		3.630.584.364		17.308.285.715	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan
Dan Program Perangkat Daerah**

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	20.119.872	100%	20.632.799	100%	21.091.341	100%	21.646.629	100%	22.161.605	100%	105.652.246	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100%	100%	2.999.452.083	100%	3.075.918.714	100%	3.144.277.790	100%	3.227.059.643	100%	3.303.831.771	100%	15.750.540.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100%	100%	12.841.140	100%	13.168.506	100%	13.461.162	100%	13.815.565	100%	14.144.238	100%	67.430.611	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase lahan Pemda yang bersertifikat	50%	53%	263.688.095	56%	270.410.436	60%	276.420.025	63%	283.697.551	65%	290.446.749	65%	1.384.662.857	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											OPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
2 11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				8.171.338.586		8.379.654.878		8.565.883.942		8.791.404.648		9.000.553.198		42.908.835.252	
2 11 02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan program perencanaan lingkungan hidup	85,71%	90%	110.088.233	100%	112.894.771	100%	115.403.739	100%	118.442.063	100%	121.259.814	100%	578.088.620	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100,00%	100%	1.070.865.299	100%	1.098.165.439	100%	1.122.571.017	100%	1.152.125.820	100%	1.179.535.028	100%	5.623.262.604	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Cakupan program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	44,14%	44,14%	230.938.397	44,14%	236.825.832	44,14%	242.089.039	44,14%	248.462.705	44,14%	254.373.662	44,14%	1.212.689.635	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil LB3 yang memiliki TPS LB3 sesuai regulasi	32,20%	45,31%	31.374.287	49,28%	32.174.128	52,70%	32.889.165	55,70%	33.755.063	58,33%	34.558.100	58,33%	164.750.743	Dinas Lingkungan Hidup

**Kerangka Pendanaan Pembangunan
Dan Program Perangkat Daerah**

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	11	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	11,11%	10%	33.719.962	10%	34.579.603	10%	35.348.099	10%	36.278.735	10%	37.141.811	10%	177.068.210	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Cakupan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan hak MHA	0%	0%	5.706.313	0%	5.851.787	100%	5.981.837	100%	6.139.326	100%	6.285.381	100%	29.964.644	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan peningkatan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	38,89%	50%	6.055.856	55,56%	6.210.242	61,11%	6.348.258	66,67%	6.515.393	72,22%	6.670.395	72,22%	31.800.144	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan (adhiyata)/filantropi yang diusulkan dalam penilaian tingkat Kabupaten	88,14%	88,69%	5.465.776	88,89%	5.605.118	89,06%	5.729.686	89,20%	5.890.536	89,32%	6.020.435	89,32%	28.701.552	Dinas Lingkungan Hidup

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Cakupan penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	1.826.233	100%	1.872.790	100%	1.914.411	100%	1.964.813	100%	2.011.556	100%	9.589.802	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah tingkat kabupaten	93,19%	6.675.298.230	85%	6.845.475.168	71%	6.997.608.693	70%	7.181.840.193	70%	7.352.697.015	70%	35.052.919.298	Dinas Lingkungan Hidup
2	12		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			1.670.498.794		1.713.085.710		1.751.157.248		1.797.261.331		1.840.018.389		8.772.021.472	
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Pendaftaran Penduduk	100%	1.417.889.725	100%	1.454.036.744	100%	1.486.351.190	100%	1.525.483.516	100%	1.561.774.948	100%	7.445.536.123	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil	100%	166.449.402	100%	170.692.786	100%	174.486.254	100%	179.080.090	100%	183.340.426	100%	874.048.959	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kerangka Pendanaan Pembangunan
Dan Program Perangkat Daerah

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	6,80%	14,81%	67.264.188	22,22%	68.978.990	33,33%	70.511.976	46,30%	72.368.400	55,56%	74.090.053	55,56%	353.213.608	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Profil Kependudukan yang disebarluaskan	80%	100%	18.895.478	100%	19.377.190	100%	19.807.828	100%	20.329.324	100%	20.812.961	100%	99.222.782	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			3.537.934.989		3.628.129.452		3.708.760.834		3.806.404.272		3.896.959.077		18.578.188.624		
2	13	02	Program Penataan Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	0%	100%	666.284.824	100%	683.270.779	100%	698.455.757	-	0	-	0	100%	2.048.011.360	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama Desa Yang Dibina	100%	100%	380.895.927	100%	390.606.310	100%	399.287.126	100%	768.221.743	100%	786.497.829	100%	2.725.508.935	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang tertib administrasi	100%	100%	2.155.224.061	100%	2.210.168.338	100%	2.259.287.017	100%	2.318.769.028	100%	2.373.932.816	100%	11.317.381.260	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif	100%	20%	335.530.176	20%	344.084.026	20%	351.730.933	20%	719.413.501	20%	736.528.433	100%	2.487.287.069	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	14		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			6.403.616.009		6.566.866.807		6.712.808.553		6.889.541.897		7.053.444.909		33.626.278.175		
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,39	2,31	539.173.835	2,29	552.919.281	2,26	565.207.334	2,24	580.087.988	2,21	593.888.349	2,21	2.831.276.787	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase kampung KB yang dibentuk berstatus mandiri	12%	20%		40%		50%		55%		60%		60%		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kerangka Pendanaan Pembangunan
Dan Program Perangkat Daerah

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Tingkat prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	56,0%	58,78%	4.934.484.885	59,77%	5.060.282.339	60,61%	5.172.741.821	61,34%	5.308.928.628	61,58%	5.435.228.664	61,58%	25.911.666.337	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase Peserta aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	23,78%	27,12%		28,79%		30,46%		32,13%		33,80%		33,80%		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	ASFR 15-19 th	27,12	25,29	929.957.290	24,37	953.665.187	23,45	974.859.398	22,53	1.000.525.281	23,45	1.024.327.895	23,45	4.883.335.051	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase keluarga bumil dan balita yang mendapatkan informasi 1000 hpk di kelompok bkb	27,7%	40,2%		52,7%		65,1%		77,58%		90,06%		90,06%		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	15		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			1.582.737.625		1.623.087.199		1.659.158.614		1.702.840.577		1.743.351.354		8.311.175.369		

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas	0,05%	0,048%	1.582.737.625	0,048%	1.623.087.199	0,048%	1.659.158.614	0,047%	1.702.840.577	0,046%	1.743.351.354	0,0465%	8.311.175.369	Dinas Perhubungan
2	16		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika			4.680.035.219		4.799.345.853		4.906.006.294		5.035.170.546		5.154.957.846		24.575.515.757		
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80%	90%	2.223.085.492	100%	2.279.759.796	100%	2.330.425.072	100%	2.391.779.990	100%	2.448.680.718	100%	11.673.731.068	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	100%	2.456.949.727	100%	2.519.586.057	100%	2.575.581.221	100%	2.643.390.556	100%	2.706.277.128	100%	12.901.784.689	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

Kerangka Pendanaan Pembangunan
Dan Program Perangkat Daerah

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											OPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
2 17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah				121.900.830		125.008.513		127.786.696		131.151.036		134.271.135		640.118.211	
2 17 02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam	5%	5%	9.551.193	5%	9.794.687	6%	10.012.364	5%	10.275.967	4%	10.520.434	31%	50.154.645	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase capaian pengawasan dan pemeriksaan koperasi aktif	2%	2%	10.381.099	2%	10.645.750	3%	10.882.340	2%	11.168.848	2%	11.434.556	17%	54.512.594	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Penilaian Kesehatan KSP-USP	21%	24%	10.596.457	26%	10.866.598	28%	11.108.096	30%	11.400.548	32%	11.671.768	32%	55.643.467	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase capaian Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	35%	25%	14.418.140	25%	14.785.709	30%	15.114.306	25%	15.512.232	28%	15.881.270	28%	75.711.657	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	17	06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase capaian pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	4%	11.413.954	4%	11.704.936	4%	11.965.066	4%	12.280.080	4%	12.572.224	24%	59.936.260	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang telah mendaftarkan dan atau mendapatkan izin usaha mikro kecil atau Nomor Induk Berusaha (NIB)	3,18%	32.871.793	1,42%	33.709.811	2,26%	34.458.977	3,05%	35.366.205	3,74%	36.207.571	3,74%	172.614.358	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan UMKM	37,34%	32.668.194	0,58%	33.501.022	3,52%	34.245.547	2,45%	35.147.156	2,64%	35.983.311	2,64%	171.545.231	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	18		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			1.352.515.714		1.386.996.118		1.417.820.656		1.455.148.726		1.489.766.885		7.102.248.101	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan
Dan Program Perangkat Daerah**

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor	44%	44%	358.997.210	46%	368.149.317	48%	376.331.051	50%	386.239.012	52%	395.427.683	52%	1.885.144.273	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah pelaku investasi pada sektor unggulan	41 Orang	45 Orang	215.398.326	50 Orang	220.889.590	55 Orang	225.798.630	60 Orang	231.743.407	65 Orang	237.256.610	65 Orang	1.131.086.564	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase izin yang diterbitkan	100%	95%	256.294.895	95%	262.828.758	95%	268.669.852	95%	275.743.333	95%	282.303.299	95%	1.345.840.137	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2 18 05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan penanaman modal yang menaati peraturan pelaksanaan penanaman modal	94%	94%	387.845.220	96%	397.732.765	98%	406.571.960	100%	417.276.097	100%	427.203.144	100%	2.036.629.185	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase ketersediaan data dan informasi yang valid	100%	100%	133.980.063	100%	137.395.688	100%	140.449.164	100%	144.146.878	100%	147.576.149	100%	703.547.942	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga				1.130.601.246		1.159.424.267		1.185.191.258		1.216.394.712		1.245.332.886		5.936.944.369	
2 19 02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda mandiri	52,32%	52,32%	380.417.549	54,52%	390.115.736	56,73%	398.785.650	59,42%	409.284.791	60,42%	419.021.724	60,42%	1.997.625.451	Dinas Pemuda dan Olahraga

Kerangka Pendanaan Pembangunan
Dan Program Perangkat Daerah

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2 19 03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlet berprestasi tingkat daerah	59 Orang	59 Orang	61 Orang	63 Orang	65 Orang	67 Orang	67 Orang	67 Orang	67 Orang	67 Orang	67 Orang	3.529.490.442	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2 19 04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	409.828.476	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2 20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik															
														10.847.133		
														11.123.665		
														11.370.876		
														11.670.246		
														11.947.883		
														56.959.803		
2 20 02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	56.959.803	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	
														10.847.133		
														11.123.665		
														11.370.876		
														11.670.246		
														11.947.883		
														56.959.803		
2 21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian															
														20.235.002		
														20.750.864		
														21.212.030		
														21.770.496		
														22.288.419		
														106.256.811		

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat keamanan informasi pemerintah	30%	60%	20.235.002	90%	20.750.864	100%	21.212.030	100%	21.770.496	100%	22.288.419	100%	106.256.811	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2	22		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			697.864.260		715.655.285		731.559.976		750.820.325		768.682.429		3.664.582.275		
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya lokal menjadi daya tarik wisata	22%	10%	12.921.457	10%	13.250.871	10%	13.545.358	10%	13.901.977	10%	14.232.707	10%	67.852.370	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Sanggar Seni yang terbina	100%	13%	6.978.643	13%	7.156.553	13%	7.315.600	13%	7.508.203	13%	7.686.824	13%	36.645.823	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	100%	2%	6.978.643	2%	7.156.553	2%	7.315.600	2%	7.508.203	2%	7.686.824	2%	36.645.823	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kerangka Pendanaan Pembangunan
Dan Program Perangkat Daerah

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	22	06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase peningkatan kunjungan Museum Daerah	16%	20%	670.985.517	20%	688.091.309	20%	703.383.418	20%	721.901.942	20%	739.076.074	20%	3.523.438.260	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	23		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan			8.635.840.701		8.855.998.793		9.052.814.102		9.291.154.597		9.512.192.258		45.348.000.450		
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan Pembinaan Perpustakaan	27,25%	40%	8.625.505.793	50%	8.845.400.412	60%	9.041.980.183	65%	9.280.035.445	70%	9.500.808.579	70%	45.293.730.412	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase peningkatan pelestarian naskah kuno	0%	0%	10.334.908	3%	10.598.381	6%	10.833.919	9%	11.119.152	10%	11.383.678	10%	54.270.039	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan			30.014.392		30.779.565		31.463.609		32.291.975		33.060.205		157.609.746		

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan arsip	25%	48%	18.008.635	55%	18.467.739	67%	18.878.165	70%	19.375.185	75%	19.836.123	75%	94.565.848	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jumlah arsip yang menjadi bahan informasi	0%	2 Dokumen	12.005.757	2 Dokumen	12.311.826	2 Dokumen	12.585.443	2 Dokumen	12.916.790	2 Dokumen	13.224.082	10 Dokumen	63.043.898	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			16.024.739.434		16.433.266.662		16.798.478.823		17.240.745.473		17.650.904.835		84.148.135.227		
3	25		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan			1.075.366.846		1.102.781.747		1.127.289.917		1.156.968.958		1.184.493.385		5.646.900.853		
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	1062 Ton	1286,4 Ton	190.803.928	1301 Ton	195.668.195	1318,1 Ton	200.016.716	1333,2 Ton	205.282.712	1350 Ton	210.166.412	1350 Ton	1.001.937.962	Dinas Perikanan

Kerangka Pendanaan Pembangunan
Dan Program Perangkat Daerah

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3 25 04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	947,1 Ton	956,2 Ton	678.146.512	992,5 Ton	695.434.863	1040,8 Ton	710.890.175	1090 Ton	729.606.335	1150 Ton	746.963.755	1150 Ton	3.561.041.640	Dinas Perikanan
3 25 05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	0%	10%	13.317.715	15%	13.657.231	20%	13.960.749	25%	14.328.304	30%	14.669.176	30%	69.933.176	Dinas Perikanan
3 25 06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	60,3 Ton	66,5 Ton	193.098.690	70 Ton	198.021.458	73,3 Ton	202.422.278	76,4 Ton	207.751.607	80,2 Ton	212.694.042	80,2 Ton	1.013.988.075	Dinas Perikanan
3 26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				883.222.079		905.738.530		925.867.621		950.243.660		972.850.069		4.637.921.959	
3 26 02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara	-89%	-69%	127.920.787	-49%	131.181.940	-29%	134.097.321	-9%	137.627.806	2%	140.901.988	2%	671.729.842	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Nusantara	-66%	-46%	-26%	-16%	6%	26%	26%					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	5%	10%	80.613.213	15%	82.668.328	20%	84.505.545	25%	86.730.389	30%	88.793.715	30%	423.311.190	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3	26	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase usaha ekonomi kreatif yang dibina untuk mendapatkan HAKI	33%	10%	42.640.262	10%	43.727.313	10%	44.699.107	10%	45.875.935	10%	46.967.329	10%	223.909.947	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang tersertifikasi	0%	10%	632.047.816	10%	648.160.949	10%	662.565.648	10%	680.009.530	10%	696.187.037	10%	3.318.970.979	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	27		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			4.785.006.508		4.906.993.230		5.016.046.022		5.148.107.376		5.270.581.456		25.126.734.592		

Kerangka Pendanaan Pembangunan
Dan Program Perangkat Daerah

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemanfaatan sarana pertanian	100%	100%	205.429.264	100%	210.666.382	100%	215.348.222	100%	221.017.863	100%	226.275.904	100%	1.078.737.635	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Persentase Penyediaan Sarana Pertanian (Peternakan)	100%	100%	16.906.685	100%	17.337.696	100%	17.723.008	100%	18.189.616	100%	18.622.349	100%	88.779.355	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pemanfaatan prasarana pertanian	100%	100%	2.081.671.932	100%	2.134.741.104	100%	2.182.183.492	100%	2.239.635.538	100%	2.292.916.731	100%	10.931.148.798	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian (Peternakan)	100%	100%	2.173.419.074	100%	2.228.827.205	100%	2.278.360.558	100%	2.338.344.733	100%	2.393.974.229	100%	11.412.925.800	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	11%	10%	90.858.138	10%	93.174.433	10%	95.245.137	10%	97.752.730	10%	100.078.279	10%	477.108.718	Dinas Peternakan dan Perkebunan

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3	27	05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	10%	10%	19.456.477	10%	19.952.491	10%	20.395.914	10%	20.932.893	10%	21.430.889	10%	102.168.664	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
				Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Perkebunan)	20%	20%	8.453.343	20%	8.668.848	20%	8.861.504	20%	9.094.808	20%	9.311.175	20%	44.389.677	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Perizinan Usaha Pertanian yang diterbitkan	100%	100%	12.970.984	100%	13.301.661	100%	13.597.276	100%	13.955.262	100%	14.287.260	100%	68.112.443	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
				Persentase perizinan usaha perkebunan diterbitkan	100%	100%	4.226.671	100%	4.334.424	100%	4.430.752	100%	4.547.404	100%	4.655.587	100%	22.194.839	Dinas Peternakan dan Perkebunan
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluhan Pertanian yang direalisasikan	100%	100%	158.933.926	100%	162.985.713	100%	166.607.900	100%	170.994.317	100%	175.062.291	100%	834.584.148	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
				Persentase Penyuluhan Pertanian (Perkebunan) yang direalisasikan	100%	100%	12.680.014	100%	13.003.272	100%	13.292.256	100%	13.642.212	100%	13.966.762	100%	66.584.516	Dinas Peternakan dan Perkebunan

Kerangka Pendanaan Pembangunan
Dan Program Perangkat Daerah

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3	30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan			8.948.936.953		9.177.076.975		9.381.027.911		9.628.009.547		9.857.061.027		46.992.112.414		
3	30	02 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan dan STP / lanjutan Waralaba)	100%	100%	34.117.230	100%	34.986.998	100%	35.764.548	100%	36.706.149	100%	37.579.393	100%	179.154.317	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	100,00%	54,84%	8.498.351.891	61,29%	8.715.004.908	67,74%	8.908.686.775	74,19%	9.143.232.718	80,19%	9.360.751.299	80,19%	44.626.027.592	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Indeks kesesuaian harga kebutuhan pokok dan barang penting	1,002%	1,002%	22.304.374	1,001%	22.872.991	1,000%	23.381.319	0,09%	23.996.898	0,08%	24.567.787	0,08%	117.123.368	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											OPD Penanggung Jawab			
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
3	30	05	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor bersih perdagangan	\$ 1.467.865	\$ 1.618.321,163	291.102.345,3	\$ 1.699.237,221	298.523.572,7	\$ 1.784.199,082	305.157.946,8	\$ 1.873.409,036	313.192.078	\$ 1.967.079,488	320.642.954,4	\$ 1.967.079,488	1.528.618.897	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	52,50%	55,53%	46.394.924	57,12%	47.577.694	58,71%	48.635.059	59,94%	49.915.512	61,88%	51.103.008	61,88%	243.626.195	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang terfasilitasi dalam penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	11%	14%	56.666.190	17%	58.110.811	19%	59.402.263	22%	60.966.193	25%	62.416.586	25%	297.562.044	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	31		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				319.820.539		327.973.895		335.262.772		344.089.496		352.275.425		1.679.422.127	
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	12,5%	13%	319.820.539	13,5%	327.973.895	14%	335.262.772	14,5%	344.089.496	15%	352.275.425	15%	1.679.422.127	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kerangka Pendanaan Pembangunan
Dan Program Perangkat Daerah

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3	32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi			12.386.509		12.702.285		12.984.580		13.326.435		13.643.473		65.043.282		
3	32	04 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase satuan pemukiman yang mendapatkan pembinaan	50%	100%	12.386.509	100%	12.702.285	100%	12.984.580	100%	13.326.435	100%	13.643.473	100%	65.043.282	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			91.092.017.550		93.414.274.932		95.490.309.474		98.004.357.304		100.335.892.487		478.336.851.747		
4	01	Sekretariat Daerah			45.664.156.220		46.828.296.907		47.869.006.820		49.129.291.486		50.298.083.106		239.788.834.539		
4	01	01 Program Administrasi Umum	Persentase Kinerja Program Administrasi Umum	100%	100%	39.643.417.893	100%	40.654.068.687	100%	41.557.562.837	100%	42.651.681.195	100%	43.666.369.706	100%	208.173.100.318	Sekretariat Daerah

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4 01 02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan kinerja penyelenggaraan bidang pemerintahan, hukum, kerja sama dan kesejahteraan masyarakat	100%	100%	4.775.062.732	100%	4.896.795.953	100%	5.005.622.121	100%	5.137.409.037	100%	5.259.628.602	100%	25.074.518.446	Sekretariat Daerah
4 01 03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan kinerja penyelenggaraan bidang perekonomian dan pembangunan	100%	100%	1.245.675.594	100%	1.277.432.267	100%	1.305.821.863	100%	1.340.201.253	100%	1.372.084.798	100%	6.541.215.775	Sekretariat Daerah
4 02	Sekretariat DPRD				45.427.861.330		46.585.978.025		47.621.302.654		48.875.065.819		50.037.809.381		238.548.017.208	
4 02 01	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Administrasi Keuangan	100%	100%	28.172.937.489	100%	28.891.165.209	100%	29.533.241.134	100%	30.310.785.800	100%	31.031.882.957	100%	147.940.012.589	Sekretariat DPRD

Kerangka Pendanaan Pembangunan
Dan Program Perangkat Daerah

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4	02 02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	17.254.923.840	100%	17.694.812.816	100%	18.088.061.520	100%	18.564.280.019	100%	19.005.926.423	100%	90.608.004.619	Sekretariat DPRD
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				205.842.432.389		216.618.536.132		221.432.656.499		227.262.486.695		232.669.087.973		1.103.825.199.688	
5	01	Perencanaan				662.692.030		679.586.392		694.689.488		712.979.120		729.940.977		3.479.888.007	
5	01 02	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	512.148.006	100%	525.204.469	100%	536.876.589	100%	551.011.357	100%	564.119.982	100%	2.689.360.403	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Tingkat konsistensi dokumen penjabaran RKPD ke dalam APBD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5 01 03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target tahunan	100%	100%	150.544.024	100%	154.381.923	100%	157.812.900	100%	161.967.763	100%	165.820.995	100%	790.527.604	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 02	Keuangan				203.193.584.433		213.902.159.682		218.655.911.424		224.412.636.088		229.751.439.084		1.089.915.730.712	
5 02 02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat kepatuhan SKPD terhadap standar pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	201.630.272.218	100%	212.298.993.115	100%	217.017.116.157	100%	222.730.694.980	100%	228.029.484.400	100%	1.081.706.560.869	Badan Pengelolaan Keuangan
5 02 03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100%	100%	388.439.038	100%	398.341.721	100%	407.194.450	100%	417.914.975	100%	427.857.222	100%	2.039.747.406	Badan Pengelolaan Keuangan

Kerangka Pendanaan Pembangunan
Dan Program Perangkat Daerah

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak terhadap Potensi Pajak Daerah	100,02%	100,00%	1.174.873.178	100,00%	1.204.824.846	100,00%	1.231.600.818	100,00%	1.264.026.133	100,00%	1.294.097.463	100%	6.169.422.438	Badan Pendapatan Daerah
				Indeks Kepuasan Wajib Pajak terhadap Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB	93,27%	94,30%		94,68%		95,00%		95,37%		95,58%	95,6%		Badan Pendapatan Daerah	
				Persentase wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu	96,15%	96,64%		96,72%		96,80%		96,89%		97,00%	97%		Badan Pendapatan Daerah	
				Persentase peninjauan lokasi objek pajak terhadap total pemohon BPHTB	10,83%	11,93%		12,20%		12,55%		12,79%		13,00%	13%		Badan Pendapatan Daerah	
5	03		Kepegawaian			794.400.003		814.652.066		832.756.856		854.681.495		875.014.468		4.171.504.887		
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru	76,5%	77,5%	794.400.003	78,4%	814.652.066	79,3%	832.756.856	80,0%	854.681.495	80,8%	875.014.468	80,8%	4.171.504.887	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5 04	Pendidikan dan Pelatihan				996.762.086		1.022.173.073		1.044.889.801		1.072.399.429		1.097.911.937		5.234.136.326	
5 04 02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	10,07%	10,07%	996.762.086	10,06%	1.022.173.073	10,06%	1.044.889.801	10,05%	1.072.399.429	11,37%	1.097.911.937	11,37%	5.234.136.326	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	42,86%	47,98%		52,26%		59,70%		62,54%		65,02%		65,02%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5 05	Penelitian dan Pengembangan				194.993.837		199.964.919		204.408.930		209.790.564		214.781.506		1.023.939.756	

Kerangka Pendanaan Pembangunan
Dan Program Perangkat Daerah

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase peningkatan rekomendasi hasil penelitian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.023.939.756	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Persentase inovasi yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												9.942.927.941	
6	01		Inspektorat Daerah												9.942.927.941	
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Unit Kerja yang Bersih dari Penyimpangan Pengelolaan Keuangan/Aset yang Material	95%	95%	95%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	8.461.416.683	Inspektorat Daerah

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Persentase pemenuhan capaian kinerja program Korsupgah	64%	65%	282.131.408	65%	289.323.935	67%	295.753.856	67%	303.540.399	68%	310.761.661	68%	1.481.511.259	Inspektorat Daerah
7			UNSUR KEWILAYAHAN			24.941.296.955		25.577.138.739		26.145.563.892		26.833.918.538		27.472.300.615		130.970.218.739		
7	01		Kecamatan			24.941.296.955		25.577.138.739		26.145.563.892		26.833.918.538		27.472.300.615		130.970.218.739		
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan peningkatan pelayanan masyarakat	100%	100%	889.391.379	100%	912.065.107	100%	932.334.800	100%	956.881.106	100%	979.645.420	100%	4.670.317.812	18 Kecamatan

Kerangka Pendanaan Pembangunan
Dan Program Perangkat Daerah

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100%	100%	23.323.478.463	100%	23.918.076.338	100%	24.449.630.564	100%	25.093.335.051	100%	25.690.308.443	100%	122.474.828.860	18 Kecamatan
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	331.103.233	100%	339.544.224	100%	347.090.240	100%	356.228.355	100%	364.703.069	100%	1.738.669.122	18 Kecamatan
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelesaian program urusan pemerintahan umum	100%	100%	231.772.263	100%	237.680.957	100%	242.963.168	100%	249.359.849	100%	255.292.149	100%	1.217.068.385	18 Kecamatan
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	100%	100%	165.551.617	100%	169.772.112	100%	173.545.120	100%	178.114.178	100%	182.351.535	100%	869.334.561	18 Kecamatan
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					1.463.299.942		1.500.604.627		1.533.953.995		1.574.339.598		1.611.793.322		7.683.991.485		

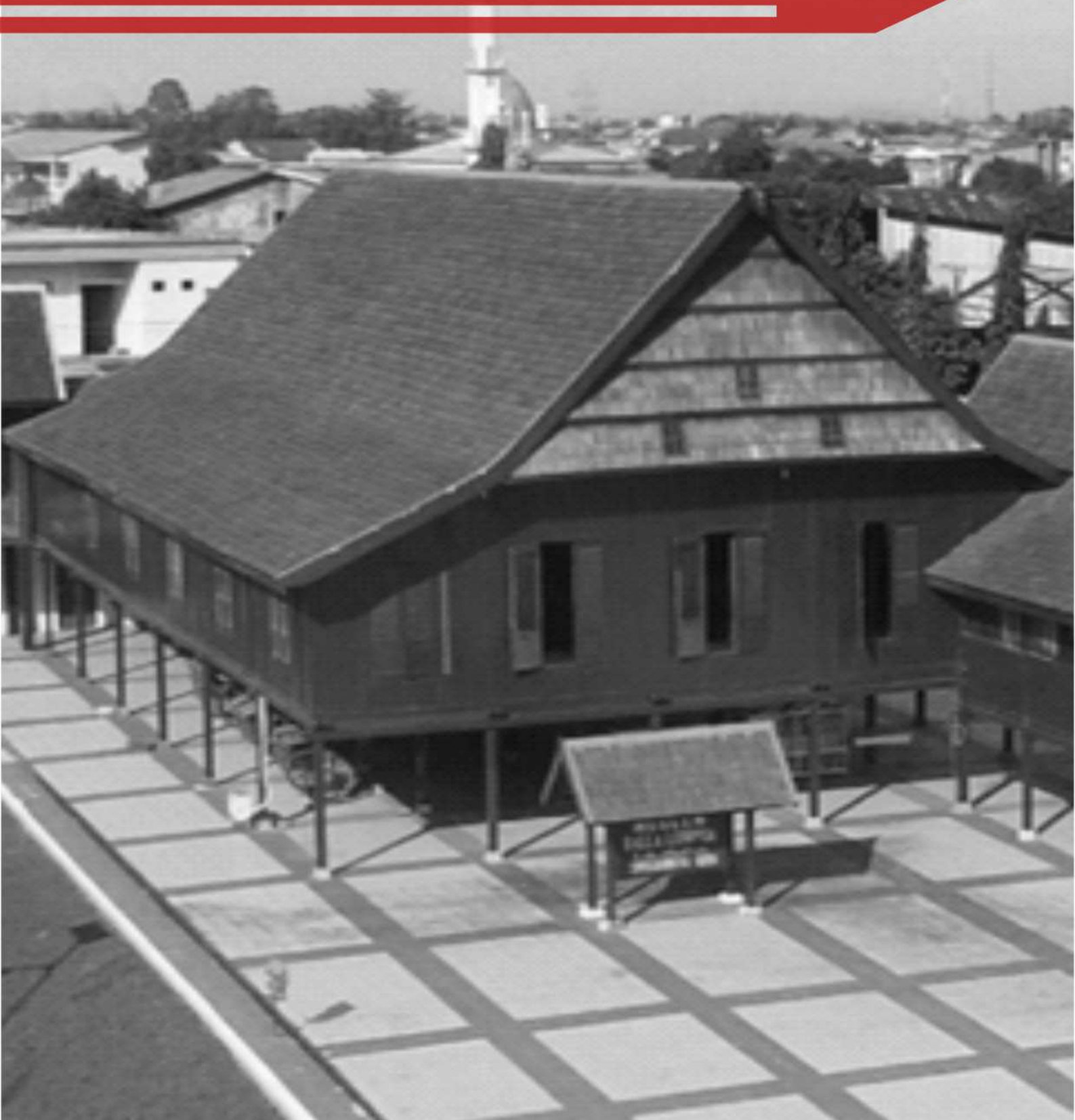
KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
8 01	Kesatuan Bangsa dan Politik				1.463.299.942		1.500.604.627		1.533.953.995		1.574.339.598		1.611.793.322		7.683.991.485	
8 01 02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase potensi konflik etnis/suku yang ditindaklanjuti	100%	100%	64.404.512	100%	66.046.410	100%	67.514.223	100%	69.291.722	100%	70.940.181	100%	338.197.048	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase permohonan bantuan keuangan partai politik yang memenuhi syarat	100%	100%	1.349.896.924	100%	1.384.310.566	100%	1.415.075.420	100%	1.452.331.214	100%	1.486.882.345	100%	7.088.496.470	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	100%	100%	8.700.448	100%	8.922.253	100%	9.120.541	100%	9.360.664	100%	9.583.356	100%	45.687.262	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase aliran kepercayaan menyimpang yang ditindaklanjuti	100%	100%	30.748.761	100%	31.532.656	100%	32.233.436	100%	33.082.071	100%	33.869.098	100%	161.466.023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Kerangka Pendanaan Pembangunan
Dan Program Perangkat Daerah**

KODE	URUSAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
8 01 06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik antargolongan yang ditindaklanjuti	100%	100%	9.549.296	100%	9.792.742	100%	10.010.375	100%	10.273.926	100%	10.518.344	100%	50.144.683	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2021-2026 yang terdiri dari Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebut sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB)/SDG's) pada akhir periode tahun 2026.

8.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

8.1.1. Indikator Kinerja Makro

Indikator Kinerja Makro adalah gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja masing – masing indikator kinerja secara makro. Indikator makro tersebut terdiri dari 6 (enam) indikator yang diamanahkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Enam indikator kinerja makro tersebut juga merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama sebagaimana dituangkan pada tabel berikut ini.

Tabel 8. 1
Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Gowa
Tahun 2022 – 2026

INDIKATOR KINERJA MAKRO	Satuan	Rencana Capaian (2021)	Target Kinerja				
			2022	2023	2024	2025	2026
1. Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	70.62 (Tinggi)	71.11 (Tinggi)	71.60 (Tinggi)	72.10 (Tinggi)	72.59 (Tinggi)	73.09 (Tinggi)
2. Tingkat Kemiskinan	%	7.23	7.08	6.93	6.78	6.63	6.48
3. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5.77	5.25	5.08	5.03	4.98	4.93
4. Pertumbuhan Ekonomi	%	5.36	6.38	6.54	6.84	7.14	7.44
5. PDRB Perkapita AHB	Juta Rp.	27.80	28.15	28.50	28.85	29.20	29.55
6. Rasio Gini	Angka	0.336	0.327	0.318	0.309	0.300	0.291

8.1.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*impact based*) untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah pada masa jabatan pemerintah daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Penetapan indikator kinerja utama selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini.

Untuk lebih jelasnya mengenai penetapan indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8. 2
Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gowa Tahun
2022 – 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	RENCANA CAPAIAN (2021)	TARGET KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2026
1. Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	70,62 (Tinggi)	71,11 (Tinggi)	71,60 (Tinggi)	72,10 (Tinggi)	72,59 (Tinggi)	73,09 (Tinggi)
2. Indeks Pendidikan	Nilai	66,32	67,46	68,59	69,72	70,86	71,99
3. Indeks Kesehatan	Nilai	77,80	78,01	78,22	78,43	78,64	78,85
4. Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai	78,62	79,25	79,57	79,88	80,20	80,52
5. Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	42,00	42,50	43,00	43,50	44,00	44,50
6. Pertumbuhan Ekonomi	%	5,36	6,38	6,54	6,84	7,14	7,44
7. PDRB Perkapita AHB	Juta Rp.	27,80	28,15	28,50	28,85	29,20	29,55
8. Pertumbuhan Sektor Unggulan dalam PDRB	%	2,70	8,06	7,04	6,76	5,43	7,25
9. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,77	5,25	5,08	5,03	4,98	4,93
10. Tingkat Kemiskinan	%	7,23	7,08	6,93	6,78	6,63	6,48
11. Rasio Gini	Angka	0,336	0,327	0,318	0,309	0,300	0,291
12. Pertumbuhan Sektor Bidang Infrastruktur dalam PDRB	%	57.29	58.04	57.93	57.60	57.71	57.71

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	RENCANA CAPAIAN (2021)	TARGET KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2026
13. Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	55	55	55	60	60	65
14. Indeks Desa Membangun	Nilai	0.6884	0.6836	0.6912	0.6988	0.7064	0.7140
15. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	60-70 (Cukup Baik)	60-70 (Cukup Baik)	70-80 (Baik)	70-80 (Baik)	70-80 (Baik)	70-80 (Baik)
16. Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai/ Kategori	60-70 (B)	60-70 (B)	60-70 (B)	60-70 (B)	70-80 (BB)	70-80 (BB)
17. Indeks Pelayanan Publik	Nilai/ Kategori	4,01-4,50 (A-)	4,01-4,50 (A-)	4,01-4,50 (A-)	4,01-4,50 (A-)	4,51-5,00 (A)	4,51-5,00 (A)
18. Nilai LPPD	Nilai/ Kategori	3,66 (Tinggi)	3,76 (Tinggi)	3,86 (Tinggi)	4,21 (Sangat Tinggi)	4,31 (Sangat Tinggi)	4,41 (Sangat Tinggi)
19. Nilai SAKIP	Nilai/ Kategori	60-70 (B)	60-70 (B)	70-80 (BB)	70-80 (BB)	70-80 (BB)	80-90 (BB)
20. Nilai IPKD	Predikat	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80

8.1.3. Indikator Kinerja Kunci

Pada indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 terdiri atas:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, dimana penentuan capaian indikator tahunan dari indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga;
2. Aspek Daya Saing Daerah, dimana capaian indikator tahunan dari fokus kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim investasi dan fokus sumber daya manusia; dan
3. Aspek Pelayanan Umum, dimana penentuan capaian indikator tahunan dari indikator urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib pelayanan non dasar dan urusan pilihan.

Target tahunan dari indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8. 3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kabupaten Gowa

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RENCANA CAPAIAN 2021	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PENANGGUNG JAWAB DATA
			2022	2023	2024	2025	2026		
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Pertumbuhan PDRB	5,36	6,38	6,54	6,84	7,14	7,44	7,44	BPS
2	Laju inflasi	2-3,5	2-3,5	2-3,5	2-3,5	2-3,5	2-3,5	2-3,5	BPS
3	PDRB per kapita :								BPS
	- PDRB per kapita Atas Dasar harga Berlaku (ADHB)	23.563,58	25.786,98	28.220,18	30.882,97	33.797,01	36.986,02	36.986,02	BPS
	- PDRB per kapita Atas Dasar harga Konstan (ADHK)	14.899,41	15.827,48	15.827,48	15.827,48	15.827,48	15.827,48	15.827,48	BPS
4	Indeks Gini	0,336	0,327	0,318	0,309	0,300	0,291	0,291	BPS
5	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	BPS
6	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,0897	0,1007	0,1117	0,1227	0,1337	0,1447	0,1447	BPS
7	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	92,63	92,75	92,88	93,00	93,13	93,2	93,2	BPS
8	Rasio kesenjangan kemiskinan	0,75	0,60	0,45	0,30	0,15	0,15	0,15	BPS
9	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dai USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76	BPS
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,62 (Tinggi)	71,11 (Tinggi)	71,60 (Tinggi)	72,10 (Tinggi)	72,59 (Tinggi)	73,09 (Tinggi)	70,62 (Tinggi)	BPS
11	Angka melek huruf	97,63	98,63	99,63	100	100	100	100	BPS

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RENCANA CAPAIAN 2021	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PENANGGUNG JAWAB DATA
			2022	2023	2024	2025	2026		
12	Angka rata-rata lama sekolah	8,29	8,39	8,49	8,59	8,69	8,79	8,79	BPS
13	Angka usia harapan hidup	70,53	70,63	70,73	70,83	70,93	71,03	71,03	BPS
14	Persentase balita gizi buruk	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04	DINKES
15	Prevalensi balita gizi kurang	4,12	3,62	3,12	2,62	2,12	1,62	1,62	DINKES
16	Cakupan Desa Siaga Aktif	100	100	100	100	100	100	100	DINKES
17	Angka partisipasi angkatan kerja	73,02	76,62	80,22	83,82	87,42	87,42	87,42	BPS
18	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69.61	71.60	73.59	75.58	77.57	79.56	79.56	BPS
19	Tingkat pengangguran terbuka	5.94	5.44	4.94	4.44	3.94	3.44	3.44	BPS
20	Rasio penduduk yang bekerja	94.06	94.56	95.06	95.56	96.06	96.56	96.56	BPS
21	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	BPS
22	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	67.15	69.35	71.55	73.75	75.95	78.15	78.15	BPS
23	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	45.76	48.05	50.34	52.63	54.92	57.21	57.21	BPS
24	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	47.77	47.47	47.17	46.87	46.57	46.27	46.27	BPS
25	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	DISDIK, DUKCAPIL, DPMPSTP, PUPR, DINKES
26	Persentase PAD terhadap pendapatan	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82	BAPENDA
27	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	INSPEKTORAT
28	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89.9	89.9	89.9	89.9	89.9	89.9	89.9	DISKETAPANG
29	Penguatan cadangan pangan	2 Ton	2 Ton	2 Ton	2 Ton	2 Ton	2 Ton	2 Ton	DISKETAPANG
30	Penanganan daerah rawan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DISKETAPANG

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RENCANA CAPAIAN 2021	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PENANGGUNG JAWAB DATA
			2022	2023	2024	2025	2026		
31	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	19.47	19.47	19.47	19.47	19.47	19.47	19.47	BPS
32	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	84.21	84.21	84.21	84.21	84.21	84.21	84.21	BPS
33	Produksi sektor pertanian	1.488.373	1.488.373	1.488.373	1.488.373	1.488.373	1.488.373	1.488.373	DTPH
34	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	BPS
35	Produksi sektor perkebunan	5.046	5.147	5.250	5.355	5.462	5.571	5.571	DISNAKBUN
36	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	100	100	100	100	100	100	100	BPS
37	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	BPS
38	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	BPS
39	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	7.87	7.87	7.87	7.87	7.87	7.87	7.87	BPS
40	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	6.28	6.28	6.28	6.28	6.28	6.28	6.28	BPS
41	Pertumbuhan Industri	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	PERDASTRI
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita	1.960.740,73	2.012.592,59	2.064.444,45	2.116.296,31	2.168.148,17	2.220.000,03	2.220.000,03	BPS
2	Nilai tukar petani	106,93	107,69	108,45	109,21	109,97	110,73	110,73	DTPHP/ BPS
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita	51,26%	54,35%	57,44%	60,53%	63,62%	66,71%	66,71%	
4	Produktivitas total daerah								BPS/DPMPSTP
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	46,71%	49,70%	52,69%	55,69%	58,68%	61,68%	61,68%	DPMD / BPS

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RENCANA CAPAIAN 2021	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PENANGGUNG JAWAB DATA
			2022	2023	2024	2025	2026		
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	PERDASTRI / BPS
7	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	2.37	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	BPS/DPMPSTP
8	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	2,14	2,22	2,3	2,38	2,46	2,54	2,54	BPS/KOPERA SI, BAG. EKONOMI SETDA & BID EKONOMI BAPPEDA
9	Angka kriminalitas yang tertangani	0.09	0.07	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01	SATPOL PP
10	Rasio ketergantungan	63	60	57	54	51	49	49	
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	Pendidikan								
1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DISDIK
1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DISDIK
1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DISDIK
1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DISDIK
2	Kesehatan								
2.1	Rasio daya tampung RS	1:265.677	1:269.807	1:273.914	1 : 277.999	1 : 282.077	1 : 282.077	1 : 282.077	RSUD SY

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RENCANA CAPAIAN 2021	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PENANGGUNG JAWAB DATA
			2022	2023	2024	2025	2026		
2.2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Gowa yang terakreditasi	66.67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES
2.3	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES
2.4	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES
2.5	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES
2.6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES
2.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES
2.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES
2.9	Persentase orang usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES
2.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES
2.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES
2.12	Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES
2.13	Persentase Orang Terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RENCANA CAPAIAN 2021	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PENANGGUNG JAWAB DATA
			2022	2023	2024	2025	2026		
2.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3.1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	0.8187	0.8343	0.8499	0.8655	0.8811	0.8967	0.8967	DINAS PUPR
3.2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PUPR
3.3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PUPR
3.4	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	DINAS PUPR
3.5	Tingkat kemantapan jalan	83.4%	83.4%	84.4%	84.4%	85.4%	86.4%	86.4%	DINAS PUPR
3.6	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0	0.20	0.40	0.60	0.80	1	1	DINAS PUPR
3.7	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	DINAS PUPR
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman								
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PERKIMTAN
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PERKIMTAN

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RENCANA CAPAIAN 2021	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PENANGGUNG JAWAB DATA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	relokasi program pemerintah kabupaten								
4.3	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	52%	54%	56%	58%	60%	62%	62%	PERKIMTAN
4.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	72.70%	72.95%	73.30%	73.60%	73.90%	74.20%	74.20%	PERKIMTAN
4.5	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	57%	60%	62%	64%	66%	68%	68%	PERKIMTAN
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
5.1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SATPOL PP
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SATPOL PP
5.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD
5.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD
5.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD
5.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DAMKAR
5.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	DAMKAR
6	Sosial								

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RENCANA CAPAIAN 2021	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PENANGGUNG JAWAB DATA
			2022	2023	2024	2025	2026		
6.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINSOS
6.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINSOS

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
7	Tenaga Kerja								
7.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NAKERTRANS
7.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0.023 %	0.023 %	0.023 %	0.023 %	0.023 %	0.023 %	0.023 %	NAKERTRANS
7.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	3.804 %	3.804 %	3.804 %	3.804 %	3.804 %	3.804 %	3.804 %	BPS
7.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NAKERTRANS
7.5	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	62%	62%	64%	66%	68%	70%	70%	NAKERTRANS
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
8.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%	DP3A

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RENCANA CAPAIAN 2021	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PENANGGUNG JAWAB DATA
			2022	2023	2024	2025	2026		
8.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%	DP3A
8.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DP3A
9	Pangan								
9.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	77%	78%	79%	80%	81%	82%	82%	DISKETAPANG
10	Pertanahan								
10.1	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PERKIMTAN
11	Lingkungan Hidup								
11.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	60-70 (Cukup Baik)	60-70 (Cukup Baik)	70-80 (Baik)	70-80 (Baik)	70-80 (Baik)	70-80 (Baik)	70-80 (Baik)	DLH
11.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten	90.0%	85.0%	72.0%	71.0%	70.0%	70.0%	70.0%	DLH
11.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	DLH
12	Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil								
12.1	Perekaman KTP Elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DUKCAPIL
12.2	Persentase anak usia 0 -17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	16.87%	16.87%	16.87%	16.87%	16.87%	16.87%	16.87%	DUKCAPIL
12.3	Kepemilikan akta kelahiran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DUKCAPIL

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RENCANA CAPAIAN 2021	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PENANGGUNG JAWAB DATA
			2022	2023	2024	2025	2026		
12.4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan penjanjian kerja sama	11.11%	14.81%	22.22%	33.33%	46.30%	55.56%	55.56%	DUKCAPIL
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
13.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DPMD
13.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	DPMD
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
14.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2.33	2.31	2.29	2.26	2.24	2.10	2.10	PPKB
14.2	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	56.00%	58.78%	59.77%	60.61%	61.34%	61.58%	61.58%	PPKB
14.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11.34%	10.34%	9.34%	8.34%	7.4%	7.4%	7.4%	PPKB
16	Komunikasi dan Informatika								
16.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	KOMINFOSP
16.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KOMINFOSP
16.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KOMINFOSP

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RENCANA CAPAIAN 2021	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PENANGGUNG JAWAB DATA
			2022	2023	2024	2025	2026		
18	Penanaman Modal								
18.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	44%	44%	46%	48%	50%	52%	52%	DMPTSP
20	Statistik								
20.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KOMINFOSP
20.2	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KOMINFOSP
21	Persandian								
21.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	30%	60%	90%	100%	100%	100%	100%	KOMINFOSP
22	Kebudayaan								
22.1	Terlestariannya Cagar Budaya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	DISPARBUD
23	Perpustakaan								
23.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
23.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0%	0%	3%	6%	9%	10%	10%	
24	Kearsipan								
24.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (pasal 40 dan 59 UU 43/2009)	0%	5%	7%	8.50%	9%	10%	10%	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
24.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek	0%	5%	7%	8%	8.50%	9%	9%	Dinas Perpustakaan

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RENCANA CAPAIAN 2021	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PENANGGUNG JAWAB DATA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat								dan Arsip Daerah
URUSAN PILIHAN									
1	Kelautan dan Perikanan								
1.1	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten	2009,10 Ton	2242.6 Ton	2293.5 Ton	2358.9 Ton	2423.2 Ton	2500.0 Ton	2500.0 Ton	PERIKANAN
2	Pariwisata								
2.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-79%	-69%	-49%	-29%	-9%	2%	2%	DISPARBUD
2.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang	-56%	-46%	-26%	-16%	6%	26%	26%	DISPARBUD
2.3	Tingkat hunian akomodasi	5%	10%	15%	20%	25%	30%	30%	DISPARBUD
2.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah total PDRB	22.2%	22.2%	22.2%	22.2%	22.2%	22.2%	22.2%	DISPARBUD
2.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah total PAD	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	DISPARBUD
3	Pertanian								
3.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5.96 Ton/Ha	5.96 Ton/Ha	5.96 Ton/Ha	5.96 Ton/Ha	5.96 Ton/Ha	5.96 Ton/Ha	5.96 Ton/Ha	DTPH
3.2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	DISNAKBUN
4	Perdagangan								
4.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PERDASTRI
4.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	9.16 %	9.16 %	9.16 %	9.16 %	9.16 %	9.16 %	9.16 %	PERDASTRI
4.3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya	54.09%	55.53%	57.12%	58.71%	59.94%	61.88%	61.88%	PERDASTRI

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RENCANA CAPAIAN 2021	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PENANGGUNG JAWAB DATA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	(UTTP) bertanda tera sah yang berlaku								
5	Perindustrian								
5.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	12.50%	13.00%	13.50%	14.00%	14.50%	15.00%	15.00%	PERDASTRI
5.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP								PERDASTRI
5.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PERDASTRI
5.4	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PERDASTRI
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
1	Perencanaan dan Keuangan								
1.1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	11.86	11.86	11.86	11.86	11.86	11.86	11.86	BPKD
1.2	Rasio PAD	11.801,399 %	11.801,399 %	11.801,399 %	11.801,399 %	11.801,399 %	11.801,399 %	11.801,399 %	BAPENDA
1.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	INSPEKTORAT
1.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	INSPEKTORAT
1.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	37.75 %	37.75 %	37.75 %	37.75 %	37.75 %	37.75 %	37.75 %	BPKD
1.6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	INSPEKTORAT

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RENCANA CAPAIAN 2021	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PENANGGUNG JAWAB DATA
			2022	2023	2024	2025	2026		
2	Pengadaan								
2.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	BAGIAN ULP SETDA
2.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	64.04%	64.04%	64.04%	64.04%	64.04%	64.04%	64.04%	BAGIAN ULP SETDA
2.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	26 %	26 %	26 %	26 %	26 %	26 %	26 %	BAGIAN ULP SETDA
3	Kepegawaian								
3.1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	76.5%	77.5%	78.4%	79.3%	80.0%	80.08%	80.08%	BKPSDM
3.2	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	10.07%	10.07%	10.06%	10.06%	10.05%	11.37%	11.37%	BKPSDM
3.3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	42.86%	47.98%	52.26%	59.70%	62.54%	65.02%	65.02%	BKPSDM
4	Manajemen Keuangan								
4.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	94.70	94.70	94.70	94.70	94.70	94.70	94.70	BPKD
4.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	105,83	105,83	105,83	105,83	105,83	105,83	105,83	BAPENDA
4.3	Assets management	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BPKD
4.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	7.64	7.64	7.64	7.64	7.64	7.64	7.64	BPKD
5	Transparansi dan Partisipasi Publik								
5.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	BPKD

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RENCANA CAPAIAN 2021	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PENANGGUNG JAWAB DATA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	(information on resources available to frontline service delivery units)								
5.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (public access to fiscal information)	100	100	100	100	100	100	100	BPKD

8.2. INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan:

1. Pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
2. Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 8. 4
Target Indikator SPM Kabupaten Gowa Tahun 2022 – 2026**

NO.	SPM	TARGET KINERJA					Kondisi Akhir RPJMD	Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026		
Pendidikan								
1	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
2	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dan menengah (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
3	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
Kesehatan								
1	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan

NO.	SPM	TARGET KINERJA						Kondisi Akhir RPJMD	Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026			
2	persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
3	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
6	Cakupan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi usia produktif (umur 15-59 tahun)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
7	Presentase usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
8	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
11	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
12	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
1	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman	

NO.	SPM	TARGET KINERJA						Kondisi Akhir RPJMD	Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026			
								dan Pertanahan	
2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (usul OPD : Persentase Warga Negara yang difasilitasi akibat relokasi dari program pemerintah)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat									
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja	
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pemadam Kebakaran	
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5	Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Sosial									
1	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial	
2	Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasartuna sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial	
3	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial	
4	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial	

NO.	SPM	TARGET KINERJA						Kondisi Akhir RPJMD	Penanggung Jawab
		2022	2023	2024	2025	2026			
	memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti								
5	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial	

8.3. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals TPB/SDGs)

**Tabel 8. 5
Penetapan Indikator TPB/SDGs Kabupaten Gowa**

NO	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	RENCANA CAPAIAN 2021	TARGET KINERJA					PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	2025	2026	
TUJUAN 1. Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat									
1.2	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	7%	7.53	7.53	7.53	7.53	7.53	7.53	Dinas Sosial
1.3	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	95%	85	86	87	88	89	90	Dinas Kesehatan
1.3	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta bidang ketenaga kerjaan	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Dinas Kesehatan
1.3	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Meningkat	28%	31%	34%	38%	41%	46%	Dinas Sosial
1.3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Menurun	24.611KK	24.000KK	23.000KK	22.000KK	21.000KK	20.000KK	Dinas Sosial
1.4	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	Dinas Kesehatan
1.4	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap)	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%	Dinas Kesehatan
1.4	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	65%	53.90%	54.90%	55.90%	56.90%	57.90%	58.90%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.4	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	RENCANA CAPAIAN 2021	TARGET KINERJA					PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	94.78%	94.78	94.78	94.78	94.78	94.78	94.78	Dinas Pendidikan
1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	82.20%	82.20	82.20	82.20	82.20	82.20	82.20	Dinas Pendidikan
1.5	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	59	55	50	45	40	35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Meningkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial
1.5	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	200juta	200juta	200juta	200juta	200juta	200juta	Dinas Sosial
1.5	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.a	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkat	0.33	0.43	0.53	0.63	0.73	0.83	Dinas Sosial
1.a	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat	12.51	12.51	12.51	12.51	12.51	12.51	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
TUJUAN 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan									
2.1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Menurun	5%	4.5%	4%	3%	2%	1%	Dinas Ketahanan Pangan
2.1	Prevalensi balita gizi kurang	17%	16%	15%	15%	14%	14%	12%	Dinas Kesehatan
2.1	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Menurun	15%	15%	15%	15%	15%	15%	Dinas Ketahanan Pangan
2.1	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar	Menurun	5%	5%	5%	5%	5%	5%	Dinas Ketahanan Pangan

NO	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	RENCANA CAPAIAN 2021	TARGET KINERJA					PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	2025	2026	
	yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)								
2.2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun	36.90%	35.90%	34.90%	33.90%	32.90%	30.90%	Dinas Kesehatan
2.2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun	36.90%	35.90%	34.90%	33.90%	32.90%	30.90%	Dinas Kesehatan
2.2	Persentase balita gizi buruk/kurang gizi	Menurun	36.90%	35.90%	34.90%	33.90%	32.90%	30.90%	Dinas Kesehatan
2.2	Prevalensi anemia pada ibu hamil.		NA	NA	NA	NA			Dinas Kesehatan
2.2	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat	81.10	82.10	83.10	84.10	85.10	86.10	Dinas Kesehatan
2.2	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	92.50%	92.50%	92.50%	92.50%	92.50%	92.50%	92.50%	Dinas Ketahanan Pangan
TUJUAN 3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia									
3.1	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Menurun	103.3	103.3	103.3	103.3	103.3	103.3	Dinas Kesehatan
3.1	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Dinas Kesehatan
3.1	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	Dinas Kesehatan
3.2	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Menurun	0,4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	Dinas Kesehatan
3.2	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Menurun	3,1	3,0	2.9	2.8	2.7	2.6	Dinas Kesehatan
3.2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Menurun	3,0	2,9	2.8	2.7	2.5	2.6	Dinas Kesehatan
3.2	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Dinas Kesehatan
3.3	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Menurun	49 Orang	49 Orang	49 Orang	49 Orang	49 Orang	49 Orang	Dinas Kesehatan
3.3	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Menurun	1.80	1.79	1.78	1.77	1.76	1.75	Dinas Kesehatan
3.3	Angka kejadian Malaria	Menurun	0.013	0.012	.0.011	0.010	0,09	0.08	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	RENCANA CAPAIAN 2021	TARGET KINERJA					PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	2025	2026	
3.3	Jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria.	18	18	18	18	18	18	18	Dinas Kesehatan
3.3	Persentase kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Meningkat	76.90	77.90	78.90	78.90	78.90	78.90	Dinas Kesehatan
3.4	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurun	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.4%	0.4%	Dinas Kesehatan
3.4	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun	33%	32%	31%	30%	29%	28%	Dinas Kesehatan
3.4	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun	4%	3%	2.5%	2%	1,5%	1%	Dinas Kesehatan
3.4	Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkat	2 puskesmas	2 puskesmas	4 puskesmas	5 puskesmas	5 puskesmas	5 puskesmas	Dinas Kesehatan
3.7	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	66%	66%	66%	66%	66%	66%	66%	Dinas Kesehatan
3.7	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.7	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	23.50%	21.68	23.68	25.68	27.68	29.00	29.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.7	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	38	26.04	24.04	22.04	20.04	18	18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.7	Total Fertility Rate (TFR)	2.28	2.33	2.27	2.15	2.10	2.10	2.10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.8	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat	NA	NA	529477 Jiwa	648793 Jiwa	648793 Jiwa	648793 Jiwa	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.8	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	95%	NA	NA	70%	84%	90%	95%	Dinas Kesehatan
3.a	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Menurun	0,22	0,20	0,18	0,15	0,10	0,6	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	RENCANA CAPAIAN 2021	TARGET KINERJA					PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	2025	2026	
3.b	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat	93.50%	102.85 %	113.14%	124.45%	136.89%	150.58%	Dinas Kesehatan
3.c	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat	932	1025	1127	1240	1364	1500	Dinas Kesehatan
TUJUAN 4. Memastikan Pendidikan yang Inklusif dan Berkualitas Setara, juga Mendukung Kesempatan Belajar Seumur Hidup bagi Semua									
4.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Meningkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
4.1	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	84.20%	52.05%	57.26%	62.98%	69.28%	76.21%	81%	Dinas Pendidikan
4.1	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	81%	52.05%	57.26%	62.98%	69.28%	76.21%	81%	Dinas Pendidikan
4.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	114.09%	114.09%	114.09 %	114.09%	114.09%	114.09%	114.09%	Dinas Pendidikan
4.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	106.94%	106.94%	106.94 %	106.94%	106.94%	106.94%	106.94%	Dinas Pendidikan
4.1	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	8,8 Tahun	7,7 Tahun	7,5 Tahun	7,2 Tahun	7 Tahun	6,5 Tahun	6 Tahun	Dinas Pendidikan
4.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	77.20%	77.20%	77.20%	77.20%	77.20%	77.20%	77.20%	Dinas Pendidikan
4.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A; Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B; Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	82.20%	82.20%	82.20%	82.20%	82.20%	82.20%	82.20%	Dinas Pendidikan
4.6	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	96.10%	96.10%	96.10%	96.10%	96.10%	96.10%	96.10%	Dinas Pendidikan
4.6	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Meningkat	96.63%	96.63%	96.63%	96.63%	96.63%	96.63%	Dinas Pendidikan
4.c	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat	91.30%	91.30%	91.30%	91.30%	91.30%	91.30%	Dinas Pendidikan

NO	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	RENCANA CAPAIAN 2021	TARGET KINERJA					PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	2025	2026	
TUJUAN 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan									
5.2	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	0,10	0,8	0,6	0,4	0,2	0,1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan..	Menurun	0,19	0,17	0,15	0,13	0,11	0,09	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir..	Menurun	0,8	0,6	,0,4	0,2	0,1	0,1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkat	75%	80%	85%	90%	95%	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.3	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun	0,09	0,08	0,07	0,06	0,050	0,04	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.5	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Meningkat	NA	17.00%	17.00%	20.00%	25.00%	30.00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.5	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat	NA	3.35%	3.35%	3.35%	3.35%	3.35%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.6	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	9.90%	9.90%	9.90%	9.90%	9.90%	9.90%	9.90%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5.6	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	RENCANA CAPAIAN 2021	TARGET KINERJA					PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	2025	2026	
5.b	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Meningkat	99.96	99.96	99.96	99.96	99.96	99.96	Dinas Komunikasi dan Informatika, SP
TUJUAN 6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua									
6.1	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian
6.1	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	118,6 m3/dt	118,6 m3/dt	118,6 m3/dt	118,6 m3/dt	118,6 m3/dt	118,6 m3/dt	118,6 m3/dt	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.1	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.2	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat	30%	45%	55%	70%	80%	90%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
6.2	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat	167	167	167	167	167	167	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.2	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat	167	167	167	167	167	167	Dinas Kesehatan
6.2	Jumlah kecamatan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat	10 IPAL	13 IPAL	38 IPAL	45 IPAL	45 IPAL	45 IPAL	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.2	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	550 rumah tangga	550 rumah tangga	550 rumah tangga	550 rumah tangga	550 rumah tangga	550 rumah tangga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.3	Kualitas air danau.	Meningkat	NA	NA	65%	56%	56%	56%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.3	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat	NA	NA	65%	56%	56%	56%	Dinas Lingkungan Hidup
6.5	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	RENCANA CAPAIAN 2021	TARGET KINERJA					PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	2025	2026	
TUJUAN 7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua									
TUJUAN 8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua									
8.1	Pertumbuhan PDRB	Meningkat	7,4%	8%	9%	10%	11%	12%	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
8.1	PDRB per Kapita	Meningkat	29 Jt	31 Jt	33 Jt	36 Jt	39 Jt	41 Jt	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
8.2	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Meningkat	NA	NA	NA	8.43%	8.43%	8.43%	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
8.3	Persentase tenaga kerja formal.	51%	34.88%	34.88%	34.88%	34.88%	34.88%	34.88%	Dinas Tenaga Kerja
8.5	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat	NA	NA	55,162	59,591	59,591	59,591	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
8.5	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun	NA	6.14%	4.80%	4.87%	4.87%	4.87%	Dinas Tenaga Kerja
8.9	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Meningkat	517.149,5	517.149,5	517.149,5	517.149,5	517.149,5	517.149,5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8.9	Kunjungan wisatawan mancanegara	Meningkat	3462	3462	3462	3462	3462	3462	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8.9	Kunjungan wisata domestik	Meningkat	284225	284225	284225	284225	284225	284225	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8.9	PAD sektor pariwisata	Meningkat	281 (Triliun Rupiah)	281 (Triliun Rupiah)	281 (Triliun Rupiah)	281 (Triliun Rupiah)	281 (Triliun Rupiah)	281 (Triliun Rupiah)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
TUJUAN 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi									
9.2	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita.	Meningkat	6.61%	6.61%	6.61%	6.61%	6.61%	6.61%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9.2	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	Meningkat	6.78%	6.78%	6.78%	6.78%	6.78%	6.78%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9.3	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat	0.015%	0.015%	0.015%	0.015%	0.015%	0.015%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	RENCANA CAPAIAN 2021	TARGET KINERJA					PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	2025	2026	
9.c	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat	70.11	70.11	70.11	70.11	70.11	70.11	Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian
9.c	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	44.31	44.31	44.31	44.31	44.31	44.31	Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian
TUJUAN 10. Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara									
10.1	Koefisien Gini.	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	Dinas Sosial
10.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	Dinas Sosial
10.1	Jumlah desa tertinggal.	Menurun	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.1	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkat	NA	NA	NA	1%	1%	1%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.3	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
TUJUAN 11. Membangun Kota dan Pemukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan									
11.1	Rasio rumah layak huni	Meningkat	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
11.5	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	59	59	59	59	59	59	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun	9	9	9	9	9	9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	RENCANA CAPAIAN 2021	TARGET KINERJA					PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	2025	2026	
11.5	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	200Juta	200Juta	200Juta	200Juta	200Juta	200Juta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.6	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	80%	60.45%	70.45%	71.45%	72.45%	73.45%	75.45%	Dinas Lingkungan Hidup
11.b	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TUJUAN 12. Memastikan Pola Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan									
12.4	Jumlah limbah B3 yang dikelola	Meningkat	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	Dinas Lingkungan Hidup
12.5	Presentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Meningkat	28046.72	28046.72	28046.72	28046.72	28046.72	28046.72	Dinas Lingkungan Hidup
TUJUAN 13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya									
13.1	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Ada	1	1	1	1	1	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.1	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	1	3	-	59	59	59	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

TUJUAN 14. Mengkonservasi dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Laut, Samudra dan Maritim untuk Pembangunan yang Berkelanjutan

14.b	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Meningkat	6	6	6	6	6	6	Dinas Perikanan
------	----------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----------------

TUJUAN 15. Melindungi, Memulihkan dan Mendukung Penggunaan yang Berkelanjutan terhadap Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Berkelanjutan, Memerangi Desertifikasi (Penggurunan) dan Menghambat dan Membalikkan Degradasi Tanah dan Menghambat Hilangnya Keanekaragaman Hayati

TUJUAN 16. Mendukung Masyarakat yang Damai dan Inklusif untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses terhadap Keadilan bagi Semua dan Membangun Institusi-Institusi yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Level

16.6	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	95.13	95.13	95.13	95.13	95.13	95.13	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
16.6	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Meningkat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
16.6	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Meningkat	B	B	BB	BB	BB	A	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
16.6	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Bagian Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah
16.6	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
16.6	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
16.7	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat	30%	30%	30%	30%	30%	30%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TUJUAN 17. Memperkuat Ukuran Implementasi dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan									
17.1	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat	8.93%	8.93%	8.93%	8.93%	8.93%	8.93%	Badan Pendapatan Daerah
17.1	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	12%	1.08%	1.08%	1.08%	1.08%	1.08%	1.08%	Badan Pendapatan Daerah
17.8	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Meningkat	44.31%	44.31%	44.31%	44.31%	44.31%	44.31 %	Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian
17.18	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meningkat	20%	20%	20%	20%	20%	20%	Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian

BAB IX

PENUTUP



BAB IX

PENUTUP

9.1 PEDOMAN TRANSISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 ini, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Gowa tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pada Tahun 2026 yang akan datang merupakan tahun transisi pemerintahan, terkait dengan hal tersebut diperlukan pedoman transisi guna menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pada tahun 2027 yang harus disusun ditahun 2026. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2027 yang disusun pada tahun 2026 atau setelah RPJMD periode 2021-2026 berakhir, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2026-2046 untuk tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Namun RKPD masa transisi tersebut tetap merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya (2026-2031). Program-program pada tahun 2026 masa transisi tersebut diarahkan untuk menjaga kesinambungan aktivitas dan capaian program tahun sebelumnya, sehingga setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2026 tetap mengacu kepada program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

9.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, meliputi:

1. Bappeda selaku ketua tim penyusunan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 berwenang dan bertanggungjawab dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Gowa dan berkoordinasi dengan tim penyusun, kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan agar penetapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, masyarakat dan pemangku kepentingan agar



berpartisipasi secara aktif memberi masukan, saran dan perbaikan pada setiap tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 yaitu persiapan penyusunan RPJMD, penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan rancangan RPJMD, pelaksanaan musrenbang RPJMD, perumusan rancangan akhir RPJMD dan penetapan RPJMD;

3. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026;
4. RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa setiap tahunnya dan RKPD Kabupaten Gowa wajib menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
5. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa wajib melaksanakan program dalam RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dan Renstra masing-masing perangkat daerah Tahun 2021-2026;
6. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 meliputi :
 - a. Kepala perangkat daerah melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan masing-masing perangkat daerah;
 - b. Kepala Bappeda Kabupaten Gowa menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing kepala perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. Kepala perangkat daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan perangkat daerah periode sebelumnya;

- d. Kepala Bappeda Kabupaten Gowa menghimpun, menganalisis dan menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, menjadi bahas bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
7. RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021–2026 dapat dilakukan perubahan apabila :
- a. Terdapat perkembangan yang berpengaruh terhadap target, kebutuhan penganggaran dan lain-lain dalam RPJMD, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan RKPD, KUA-PPAS dan R-APBD setiap tahunnya;
 - b. Terdapat pertimbangan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Gowa dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya di konsultasikan kepada DPRD kabupaten gowa untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya;
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik social budaya, gnagguan keamanan, pemekaran daerah, perubahan perangkat daerah, dan perubahan kebijakan nasional; dan
 - d. perubahan RPJMD menjadi pedoman perubahan RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah
8. Apabila terjadi perkembangan perkembangan berbagai hal di luar kendali Pemerintah kabupaten Gowa dan di perkirakan dapat menghambat pelaksanaa RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah di tetapkan dapat di tinjau kembali dan di sesuaikan dengan kebutuhan serta hasilnya di konsultasikan kepada Dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Gowa untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan lebih dalam proses pelaksanaanya.

Penutup

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Gowa sebagai salah satu kesatuan perencanaan pembangunan yang secara terpadu, sinergi dan selaras dengan perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah selama (lima) tahun mendatang. Diharapkan komitmen, kerja keras dan dukungan partisipasi serta pemberdayaan seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Gowa, dunia akademik, dunia usaha, dan

 **BUPATI GOWA**

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL